

Striking Performance Aim Higher



Tentang Laporan Tahunan

About Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) Tahun Buku 2021 dengan tema "Striking Performance, Aim Higher". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan data dan perkembangan bisnis Perseroan di sepanjang tahun 2021 serta masa depan keberlanjutan bisnis Nindya Karya.

Laporan Tahunan ini menjadi sumber dokumentasi komprehensif tentang kinerja PT Nindya Karya (Persero) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Informasi dalam laporan tahunan memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Nindya Karya; kinerja operasi, bisnis dan keuangan; serta informasi perkembangan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Laporan Tahunan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam buku yang sama, dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas baik.

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat dimana PT Nindya Karya (Persero) melaksanakan kegiatan usahanya. Laporan Tahunan ini menggunakan standar yang tercantum dalam kriteria Annual Report Award (ARA).

Welcome to the Annual Report of PT Nindya Karya (Persero) for the 2021 Fiscal Year with the theme "Striking Performance, Aim Higher". The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on data and the Company's business developments throughout 2021 and the future of Nindya Karya's business sustainability.

This Annual Report is a source of comprehensive documentation on the performance of PT Nindya Karya (Persero) within a period of 1 (one) year. Information in the annual report contains complete documentation that describes Nindya Karya's profile; operating, business and financial performance; as well as information on the development of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles.

This Annual Report is presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English in the same book, using easy-to-read fonts and prints of good quality.

References and standards used in the preparation of the Annual Report of PT Nindya Karya (Persero) use standard parameters and criteria applicable in Indonesia, where PT Nindya Karya (Persero) carries out its business activities. This Annual Report uses the standards stated in the Annual Report Award (ARA) criteria.



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability



Laporan online tersedia di website
Online report is available on website

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan PT Nindya Karya (Persero), yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang, terkait lingkungan bisnis PT Nindya Karya (Persero) tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil yang pasti sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan", atau "Nindya Karya", dan sesekali "Perusahaan" yang mengacu pada PT Nindya Karya (Persero). Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan PT Nindya Karya (Persero).

This Annual Report contains various statements related to the financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of PT Nindya Karya (Persero), which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations. These statements have the prospect of risk, as well as uncertainty, to the possibility of discrepancy with actual developments. The various prospective statements in this Annual Report are prepared based on assumptions regarding current conditions, as well as projections of future situations, related to the business environment of PT Nindya Karya (Persero) does not guarantee that documents whose validity has been confirmed will bring definite results as expected.

This Annual Report contains the words "Company", or "Nindya Karya", and occasionally "Company" which refers to PT Nindya Karya (Persero). In addition, the word "we" is also used on several occasions with the same function, due to the convenience of mentioning PT Nindya Karya (Persero).

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2021



Striking Performance, Aim Higher

Di tahun 2021, pandemi COVID-19 masih membayangi industri konstruksi dan infrastruktur Indonesia. Kebijakan ekonomi maupun kebijakan lain yang bertujuan untuk mengatasi pandemi di dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan dampak bagi jalannya usaha konstruksi dan infrastruktur. Kebijakan PPKM Darurat yang dijalankan oleh Pemerintah juga berdampak terhadap pembangunan proyek karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat dan larangan untuk berkerumun guna mengatasi pandemi COVID-19.

Meski demikian, kondisi industri konstruksi masih memiliki optimisme seiring dengan fokus Pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini juga didukung dengan anggaran infrastruktur dalam APBN Tahun 2021 yang sebesar Rp417,4 triliun yang tumbuh 48,4% dibanding tahun sebelumnya. Fokus alokasi anggaran dana APBN 2021 di bidang infrastruktur adalah untuk penguatan infrastruktur digital untuk mendorong efisiensi logistik maupun konektivitas, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, infrastruktur padat karya untuk kawasan industri dan pariwisata, serta penyelesaian kegiatan prioritas yang telah berlangsung sejak tahun 2020 dan tertunda akibat pandemi COVID-19.

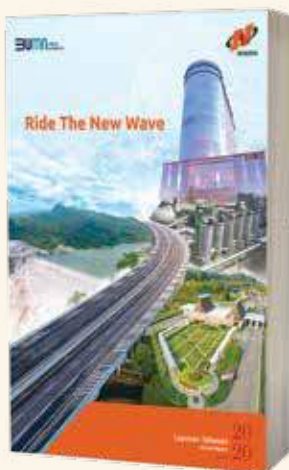
Dinamika iklim usaha yang terjadi sepanjang tahun 2021 merupakan tantangan tersendiri bagi segenap manajemen PT Nindya Karya (Persero). Sinergi yang solid antar Insan Perusahaan merupakan wujud komitmen Nindya Karya dalam menggapai kinerja ekselen secara berkelanjutan di tengah tantangan bayang-bayang ketidakpastian. Perusahaan juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan terus berinovasi dan membuat terobosan dalam menghadapi perubahan demi capaian yang lebih tinggi. Hal tersebut selaras upaya optimalisasi pendapatan melalui penguatan seperti *survival strategy*, transformasi sistem digital, sekaligus membangun *rebound strategy* dalam rangka membangun iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

In 2021, the COVID-19 pandemic is still looming over Indonesia's construction and infrastructure industry. Economic policies and other policies aimed at overcoming the domestic pandemic directly or indirectly also have an impact on the course of construction and infrastructure businesses. The Emergency PPKM policy implemented by the Government also has an impact on project development due to restrictions on community mobility and prohibitions on gathering to overcome the COVID-19 pandemic.

Nevertheless, the condition of the construction industry still has optimism in line with the Government's focus on encouraging infrastructure development through the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 and the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025. This is also supported by the infrastructure budget in the 2021 State Budget which amounted to Rp417.4 trillion, which grew 48.4% compared to the previous year. The focus of the 2021 APBN budget allocation in the infrastructure sector is to strengthen digital infrastructure to encourage logistical efficiency and connectivity, the development of public health facilities and the provision of basic needs, labor-intensive infrastructure for industrial and tourism areas, as well as the completion of priority activities that have been ongoing since 2020 and postponed due to the COVID-19 pandemic.

The dynamics of the business climate that occurred throughout 2021 is a challenge for all management of PT Nindya Karya (Persero). The solid synergy between the Company's personnel is a manifestation of Nindya Karya's commitment to achieving excellent performance in a sustainable manner amidst the challenges of uncertainty. Companies are also required to be able to adapt by continuously innovating and making breakthroughs in the face of change for higher achievements. This is in line with efforts to optimize revenue through strengthening such as a survival strategy, digital system transformation, as well as building a rebound strategy in order to build a healthy and sustainable business climate.

2020



Ride The New Wave

Pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh penjuru dunia memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sehingga menyebabkan terjadinya pelambatan bahkan resesi ekonomi dunia. Hal ini tentu mempengaruhi segala sektor industri, termasuk jasa konstruksi. Menyikapi hal ini PT Nindya Karya (Persero) memberikan respons cepat dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 dari segi bisnis dilakukan dengan mengeluarkan 4 (empat) langkah strategis yaitu menyusun Tim Business Continuity Management (BCM) dan Satgas COVID-19, menyusun Survival Strategy Korporasi dengan 3 (tiga) skenario, melakukan Akselerasi Transformasi Digital Nindya serta menyusun Rebound Strategy Pasca COVID-19.

The COVID-19 pandemic that has spread throughout the world has had a significant impact on economic stability, causing a slowdown and even a world economic recession. This certainly affects all industrial sectors, including construction services. In response to this, PT Nindya Karya (Persero) gave a quick response in tackling the impact of the COVID-19 pandemic from a business standpoint by issuing 4 (four) strategic steps, namely compiling a Business Continuity Management (BCM) Team and COVID-19 Task Force, developing a Corporate Survival Strategy with 3 (three) scenarios, accelerating Nindya's Digital Transformation and compiling a Post-Covid-19 Rebound Strategy.

2019

Provide The Excellence

Dilandaskan profesionalisme, dedikasi dan inovasi, Nindya Karya senantiasa memberikan kinerja terbaiknya bagi pembangunan Indonesia. Dalam rangka menghadirkan produk-produk jasa konstruksi dan EPC yang berkualitas Nindya Karya siap menghadapi tantangan serta berupaya lebih dalam mewujudkan mimpi infrastruktur Indonesia yang berdaya saing dan melampaui jaman. Dengan tema "Provide The Excellence" pada Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) 2019, kami merefleksikan kerja keras dan semangat pantang menyerah dalam membawa Perusahaan pada kinerja terbaiknya serta menyiapkan diri untuk terus melangkah maju menjadi perusahaan jasa konstruksi dengan visi global yang berbudaya unggul.

Based on professionalism, dedication and innovation, Nindya Karya always gives its best performance for the development of Indonesia. In order to deliver quality construction and EPC services, Nindya Karya is ready to face challenges and put more effort into realizing Indonesia's infrastructure dream that is competitive and beyond its era. With the theme "Provide The Excellence" in the 2019 Annual Report of PT Nindya Karya (Persero) we reflect on the hard work and unyielding spirit in bringing the Company to its best performance and preparing ourselves to keep moving forward to become a construction service company with a global vision with a superior culture.



2018



We Build The Great

"We Build The Great" atau "Bersama Membangun yang Terbaik" sebagai tema Laporan Tahunan 2018 mencoba memberikan gambaran besar tentang keterlibatan Nindya Karya dalam serangkaian pembangunan infrastruktur nasional yang telah selesai dibangun di tahun 2018. Mulai dari Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur, Jembatan Holtekamp dan Dermaga Pelabuhan Jayapura di Papua, hingga bangunan monument Kapsul Waktu di Merauke, Papua; yang dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan infrastruktur dan pengembangan perekonomian.

"We Build The Great" or "Together Building the Best" as the theme of the 2018 Annual Report tries to provide a big picture of Nindya Karya's involvement in a series of national infrastructure developments that were completed in 2018. Starting from the Rotiklot Dam in East Nusa Tenggara, the Holtekamp Bridge and the Jayapura Harbor Pier in Papua, to the Time Capsule monument in Merauke, Papua; which was built to answer the needs of the Indonesian people for infrastructure and economic development.

Daftar isi

Table of Contents

02	TENTANG LAPORAN TAHUNAN ABOUT ANNUAL REPORT	76	PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE	142	IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL MATERIAL BOND FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT
03	SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY	80	PROFILE DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE	142	REALISASI INVESTASI BARANG MODAL REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT
04	KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY	84	PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICER	143	INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRING AFTER THE DATE ACCOUNTANT REPORT
06	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS	85	DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA EMPLOYEE DEMOGRAPHY AND HUMAN RESOURCES AT A GLANCE	143	PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN MATERIAL INCREASE OR DECREASE IN SALES OR REVENUE
08	PENCAPAIAN 2021 2021 ACHIEVEMENTS	89	SEKILAS TENTANG PENGELOLAAN SDM DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN ABOUT HR MANAGEMENT AND EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT	143	DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN KINERJA PERUSAHAAN THE IMPACT OF PRICE CHANGES ON THE COMPANY'S REVENUE AND PERFORMANCE
10	KONTRIBUSI TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL CONTRIBUTION TO NATIONAL STRATEGIC PROJECTS	91	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM COMPOSITION OF SHAREHOLDERS	144	DAMPAK NILAI MATA UANG ASING BAGI KINERJA PERUSAHAAN IMPACT OF FOREIGN CURRENCY VALUE ON THE PERFORMANCE OF THE COMPANY
12	PROYEK-PROYEK UNGGULAN FEATURED PROJECTS	93	DAFTAR ENTITAS ANAK, INVESTASI/ PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA, SERTA INFORMASI TENTANG ENTITAS ASOSIASI LIST OF SUBSIDIARIES, SHARE INVESTMENTS AND JOINT VENTURES, AND INFORMATION ABOUT ASSOCIATE ENTITIES	144	PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2021 SERTA PROYEKSI USAHA COMPARISON BETWEEN 2021 TARGET AND REALIZATION AND BUSINESS PROJECTIONS
16	JEJAK LANGKAH PERSEROAN CORPORATE MILESTONES	97	STRUKTUR GRUP NINDYA KARYA NINDYA KARYA GROUP STRUCTURE	145	TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA OTHER FINANCIAL OVERVIEW
KILAS KINERJA Performance Review		102	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATION	146	INFORMASI PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP) INFORMATION ON EMPLOYEES AND/ OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)
20	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS	104	DIVISI OPERASIONAL DIVISION OF OPERATION	147	REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING
23	IKHTISAR OPERASI OPERATION HIGHLIGHTS	106	INFORMASI PADA SITUS WEB INFORMATION ON THE WEBSITE	147	INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING
25	IKHTISAR SAHAM STOCK OVERVIEW	107	PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN AUDIT INTERNAL EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT	148	PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECT
26	INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA PENDANAAN LAINNYA INFORMATION ON BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER FINANCING	ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS		151	ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT
26	KILAS PERISTIWA EVENT HIGHLIGHTS	110	TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW	152	INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES
LAPORAN MANAJEMEN Management Report		113	RENCANA STRATEGIS 2021 2021 STRATEGIC PLAN	156	INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS
38	LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT	114	TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT	156	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN CHANGES TO LAW REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE COMPANY
48	LAPORAN DEWAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT	126	TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW		
59	LEMBAR PENGESAHAN RESPONSIBILITY STATEMENT	139	KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG ABILITY TO PAY DEBT		
PROFIL PERUSAHAAN Company Profile		140	TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG ACCOUNTS RECEIVABLE COLLECTABLE LEVEL		
62	INFORMASI UMUM GENERAL INFORMATION	141	STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE		
66	BIDANG USAHA BUSINESS FIELDS				
70	STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE				
72	VISI, MISI, DAN NILAI PERUSAHAAN VISION, MISSION, AND COMPANY VALUES				
74	NILAI-NILAI UTAMA BUDAYA PERUSAHAAN KEY VALUES OF CORPORATE CULTURE				
75	MAKNA LOGO PERUSAHAAN MEANING OF COMPANY LOGO				

156 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
ACCOUNTING POLICY CHANGES AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

158 INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUOUS INFORMATION

160 PETA JALAN USAHA: RENCANA JANGKA PANJANG
BUSINESS ROAD MAP: LONG-TERM PLAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS BUSINESS SUPPORT FUNCTION

164 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

177 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

183 PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP NINDYA KARYA
THE DEVELOPMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN THE NINDYA KARYA SCOPE

184 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
BASIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

190 PETA JALAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ROADMAP FOR THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

195 SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

196 ASSESSMENT: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ASSESSMENT: EVALUATION, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

205 ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE ORGAN

215 DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

226 DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

233 TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TRANSPARENCY OF INFORMATION ABOUT THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

243 RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETING

256 PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI
DISCLOSURE OF AFFILIATION RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

260 ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

267 FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

270 KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI: PROSEDUR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMILIHAN ULANG DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS SUCCESS POLICY: BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT, DISMISSAL AND RE-ELECTION PROCEDURES

273 ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
SUPPORTING ORGAN OF DIRECTORS

278 AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
INTERNAL AUDIT/INTERNAL OVERSIGHT UNIT

283 INFORMASI TENTANG ORGAN/KOMITE LAINNYA DI BAWAH DIREKSI
INFORMATION ABOUT OTHER ORGANS/ COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

286 MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

300 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

301 SEKILAS TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT A GLANCE

302 PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM
IMPORTANT MATTERS AND LEGAL ISSUES

304 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN: TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA: INFORMATION DISCLOSURE GOVERNANCE

305 KODE ETIK
CODE OF ETHICS

320 PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATUITY CONTROL

325 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

327 WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

330 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
STATE ADMINISTRATOR WEALTH REPORT (LHKPN)

332 KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY OF COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

333 TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE
TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY

340 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

341 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

344 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ENVIRONMENTAL COMPANY RESPONSIBILITY

351 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

368 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON RESPONSIBILITY FOR PRODUCTS/SERVICES AND CONSUMERS AND WORK PARTNERS

370 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT

Pencapaian 2021

2021 Achievements

Kinerja Segmen Usaha

Business Segment Performance



Konstruksi
Construction

Rp 4,26 Triliun
21,83%



Manufaktur
Manufacture

Rp 103,46 Miliar
7,16%



Properti
Property

Rp 30,04 Miliar
71,78%



Sewa Alat
Equipment Rental

Rp 8,12 Miliar
30,18%

Kinerja Keuangan

Financial Performance



Pendapatan Usaha
Operating Revenues

Rp 4,42 Triliun
22,09%



Laba Bruto
Gross Profit

Rp 361,89 Miliar
14,10%



Laba Bersih
Net Profit

Rp 65,79 Miliar
53,64%



Laba Komprehensif
Comprehensive Profit

Rp 79,40 Miliar
68,39%

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Skor GCG
GCG Score

90,082 Poin
Point

Penerapan *good corporate governance* di PT Nindya Karya (Persero) adalah "SANGAT BAIK"

In 2021, the implementation of good corporate governance at PT Nindya Karya (Persero) is generally "VERY GOOD"

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sustainable Social and Environmental Responsibility



Realisasi Biaya
Cost Realization

Rp 1,21 Miliar
Billion

PT Nindya Karya (Persero) telah menyalurkan biaya program TJSL sebesar Rp1,21 miliar yang dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

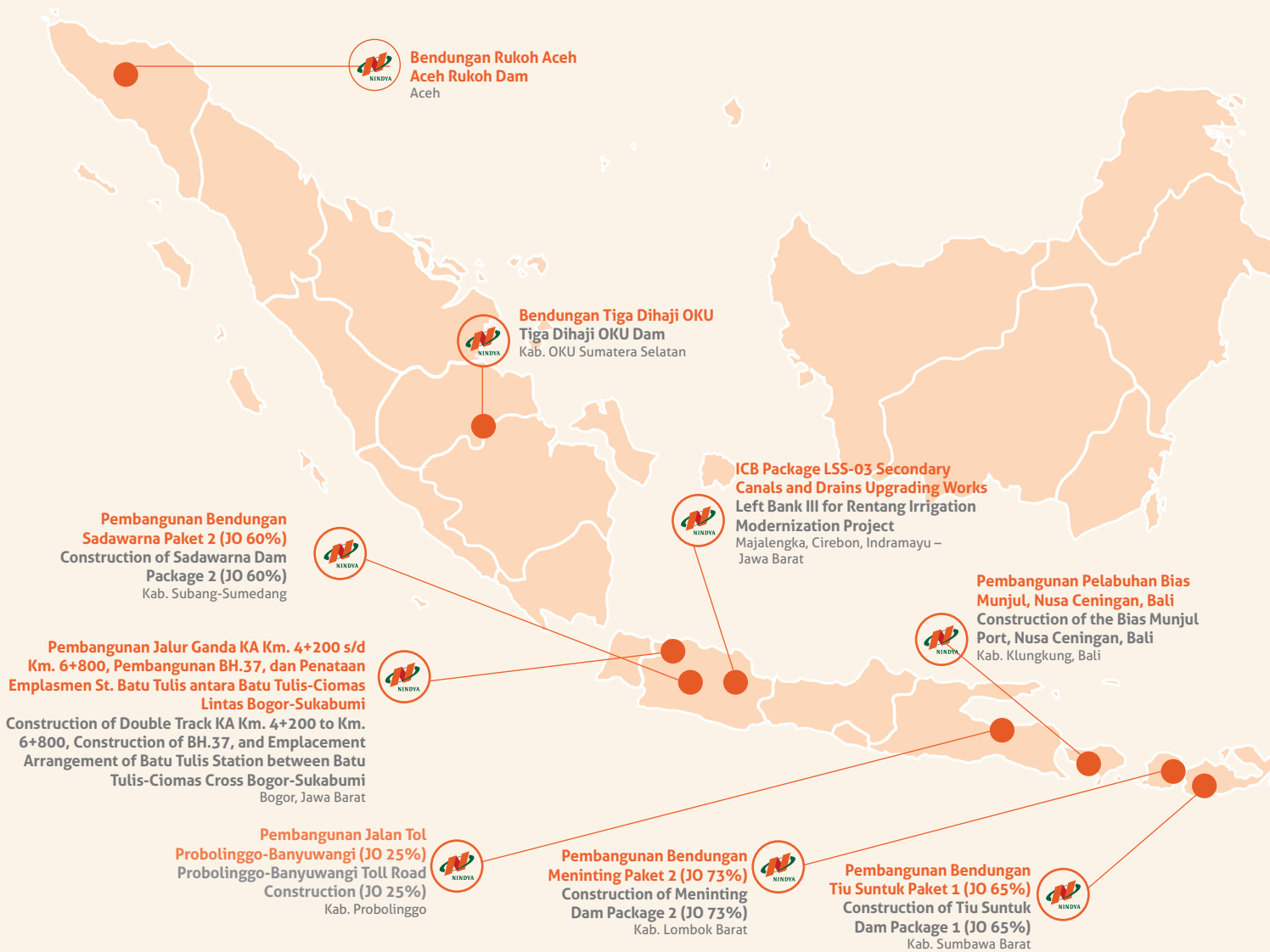
PT Nindya Karya (Persero) has realized the cost of the TJSL program of Rp1.21 billion which is grouped into 4 (four) pillars of the Sustainable Development Goals (SDG)

Kontribusi terhadap Proyek Strategis Nasional

Contribution to National Strategic Projects

Selain proyek-proyek unggulan yang peresmian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, PT Nindya Karya (Persero) juga ikut andil berkontribusi dalam pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut:

In addition to the flagship projects which were inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, PT Nindya Karya (Persero) also contributed to the completion of various National Strategic Projects as mandated by the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation Number 7 of 2021 concerning Changes to the List of National Strategic Projects. The projects are as follows:





Proyek-Proyek Unggulan

Featured Projects



● Venue Pekan Olahraga Nasional, Papua
Venue of National Sports Week, Papua

5 Venue PON Papua Besutan NINDYA 5 PON Papua Venues Made by NINDYA

Presiden Republik Indonesia resmikan seluruh venue Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang diselenggarakan di Bumi Cendrawasih Papua. Pada peresmian venue tersebut, 5 (lima) venue diantaranya dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) sebagai pelaksana pembangunan. Adapun kelima venue PON yang diresmikan presiden diantaranya Venue Dayung, Venue Cricket, Venue Hockey Indoor dan Outdoor, Venue Panahan dan Venue Sepatu Roda yang tersebar di beberapa lokasi seperti, Desa Bukit Harapan, Desa Doyo Baru dan Teluk Youtefa.

The President of the Republic of Indonesia inaugurated all the venues for the 20th National Sports Week which was held on the Earth of Cendrawasih Papua. At the inauguration of the venue, 5 (five) venues were carried out by PT Nindya Karya (Persero) as the executor of the development. The five PON venues which were inaugurated by the president include the Rowing Venue, Cricket Venue, Indoor and Outdoor Hockey Venue, Archery Venue and Skate Venue spread across several locations such as Bukit Harapan Village, Doyo Baru Village and Youtefa Bay.



Bendungan Bendo di Ponorogo, Jawa Timur Bendo Dam in Ponorogo, East Java

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan secara langsung Bendungan Bendo yang berada di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 7 September 2021. Bendungan Bendo merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh Nindya Karya (kerjasama operasional/KSO) dengan Wijaya Karya dan Hutama Karya.

The President of the Republic of Indonesia Joko Widodo inaugurated the Bendo Dam in Ngindeng Village, Sawoo District, Ponorogo Regency, East Java on September 7, 2021. The Bendo Dam is one of the National Strategy Projects (PSN) undertaken by Nindya Karya (operational cooperation/KSO) with Wijaya Karya and Hutama Karya.



● Bendungan Bendo Ponorogo, Jawa Timur
Bendo Dam in Ponorogo, East Java



● Bendungan Napun Gete, Nusa Tenggara Timur
Napun Gete Dam, East Nusa Tenggara

Bendungan Napun Gete di Nusa Tenggara Timur Napun Gete Dam in East Nusa Tenggara

Nindya Karya dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk mengerjakan proyek pembangunan Bendungan Napun Gete yang dibangun sejak akhir 2016. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung hingga 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 99,78 hektar. Bendungan ini akan menjadi sumber pengairan irigasi untuk sekitar 300 hektar sawah di sekitarnya. Selain itu, Bendungan Napun Gete dapat menjadi sumber air baku dan berpotensi menghasilkan listrik. Bendungan Napun Gete diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Nindya Karya was trusted by the Ministry of PUPR to work on the Napun Gete Dam construction project which was built at the end of 2016. This dam has a capacity of up to 11.22 million cubic meters with an inundation area of 99.78 hectares. This dam will be a source of irrigation for around 300 hectares of rice fields. In addition, the Napun Gete Dam can be a source of raw water and has the potential to generate electricity. The Napun Gete Dam was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, who was accompanied by the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Basuki Hadimuljono.



● Bendungan Tugu, Trenggalek
Tugu Dam, Trenggalek

Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek Tugu Dam in Trenggalek District

Proyek Bendungan Tugu yang berada di Desa Nglinggis, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 November 2021. Bendungan Tugu memiliki kapasitas tampungan air total sebanyak 12,14 juta m³ dengan luas genangan 41,74 Ha. Nantinya, Bendungan Tugu dipersiapkan untuk dapat menyuplai irigasi seluas 1.250 Ha, Sebagai penyedia air baku pedesaan sebesar 12 liter/detik, Menjadi sumber energi listrik untuk PLTMH sebesar 0,4 MW, mereduksi banjir sebanyak 25 persen serta menjadi ikon baru untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek.

The Tugu Dam project, located in Nglinggis Village, Trenggalek District, Trenggalek Regency, East Java Province, was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia on November 30, 2021. The Tugu Dam has a total water storage capacity of 12.14 million m³ with a pool area of 41.74 hectares. Later, the Tugu Dam will be prepared to supply irrigation covering an area of 1,250 Ha. As a rural raw water supply of 12 liters/second, Be a source of electrical energy for MHP by 0.4 MW, reduce flooding by 25 percent and become a new icon for tourism development in the Regency. Trenggalek District.

Bendungan Karalloe di Kabupaten Goa Karalloe Dam in Goa District

Presiden Joko Widodo resmikan Bendungan Karalloe pada Selasa 23 November 2021. Proyek yang dikerjakan oleh yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) ini berlokasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Proyek yang digagas oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen SDA Kementerian PUPR) tersebut memiliki beragam manfaat besar bagi masyarakat sekitar bendungan antara lain sebagai irigasi yang mampu mengairi 7.000 hektar lahan pertanian di daerah sekitar, suplai air baku sebesar kurang lebih 440 liter per detik, pembangkit listrik mikrohidro 4,5 Megawatt, reduksi banjir 549 hektar menjadi 279 hektar atau sebesar 49 persen, konservasi sumber daya air hingga potensi pengembangan pariwisata.

President Joko Widodo inaugurated the Karalloe Dam on Tuesday, November 23, 2021. The project undertaken by PT Nindya Karya (Persero) is located in Gowa Regency, South Sulawesi. The project, which was initiated by the Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (Dirjen SDA, Ministry of PUPR) has various great benefits for the community around the dam, including irrigation which is able to irrigate 7,000 hectares of agricultural land in the surrounding area, raw water supply is less than more than 440 liters per second, 4.5 Megawatt micro hydro power plant, 549 hectares of flood reduction to 279 hectares or 49 percent, conservation of water resources to the potential for tourism development.



● Bendungan Karalloe, Kabupaten Goa
Karalloe Dam, Goa District



● Bypass BIL Mandalika

Bypass BIL Mandalika Bypass BIL Mandalika

Nindya menyelesaikan pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika secara tepat waktu dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021. Perseroan mengerjakan Jalan Bypass BIL Mandalika Paket 1 sepanjang 4,3 kilometer. Secara keseluruhan, jalan ini dibangun sepanjang 17,3 kilometer yang kini sudah siap digunakan. Jalan ini juga menjadi ikon baru Mandalika, sehingga menjadi salah satu tempat favorit swafoto para wisatawan maupun warga yang melintas.

Nindya completed the construction of the Lombok International Airport (BIL) Mandalika Bypass Road in a timely manner and was inaugurated by President Joko Widodo on November 12, 2021. The Company is working on the 4.3-kilometer BIL Mandalika Bypass Road Package 1. Overall, this road was built along 17.3 kilometers which is now ready for use. This road has also become a new icon of Mandalika, making it one of the favorite selfie spots for tourists and residents who pass by.



● Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Merauke
Lontas Cross-border Post, Merauke

Proyek PLBN Terpadu Sota di Merauke The Sota Integrated PLBN Project in Merauke

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo resmikan Proyek Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota yang terletak di perbatasan Kabupaten Merauke dengan Papua Nugini pada 3 November 2021.

President of the Republic of Indonesia Ir. Joko Widodo inaugurated the Sota Integrated Cross-border Post Project (PLBN) which is located on the border of Merauke Regency with Papua New Guinea on November 3, 2021.

Proyek ini merupakan inisiasi Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan Nindya sebagai pelaksana pembangunan sejak tahun 2019.

This project is an initiative of the Director General of Human Settlements of the Ministry of Public Works & Public Housing (PUPR) which Nindya has been working on as the executor of development since 2019.

Proyek Gedung Terminal Bandar Udara Mopah di Merauke Mopah Airport Terminal Building Project in Merauke

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo resmikan Proyek Nindya Karya yaitu Gedung Terminal Bandar Udara Mopah pada minggu 3 Oktober 2021. Bandar Udara Mopah merupakan Bandara kelas I dengan luas gedung terminal sekitar 3624 m², yang berlokasi di Rimba Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua.

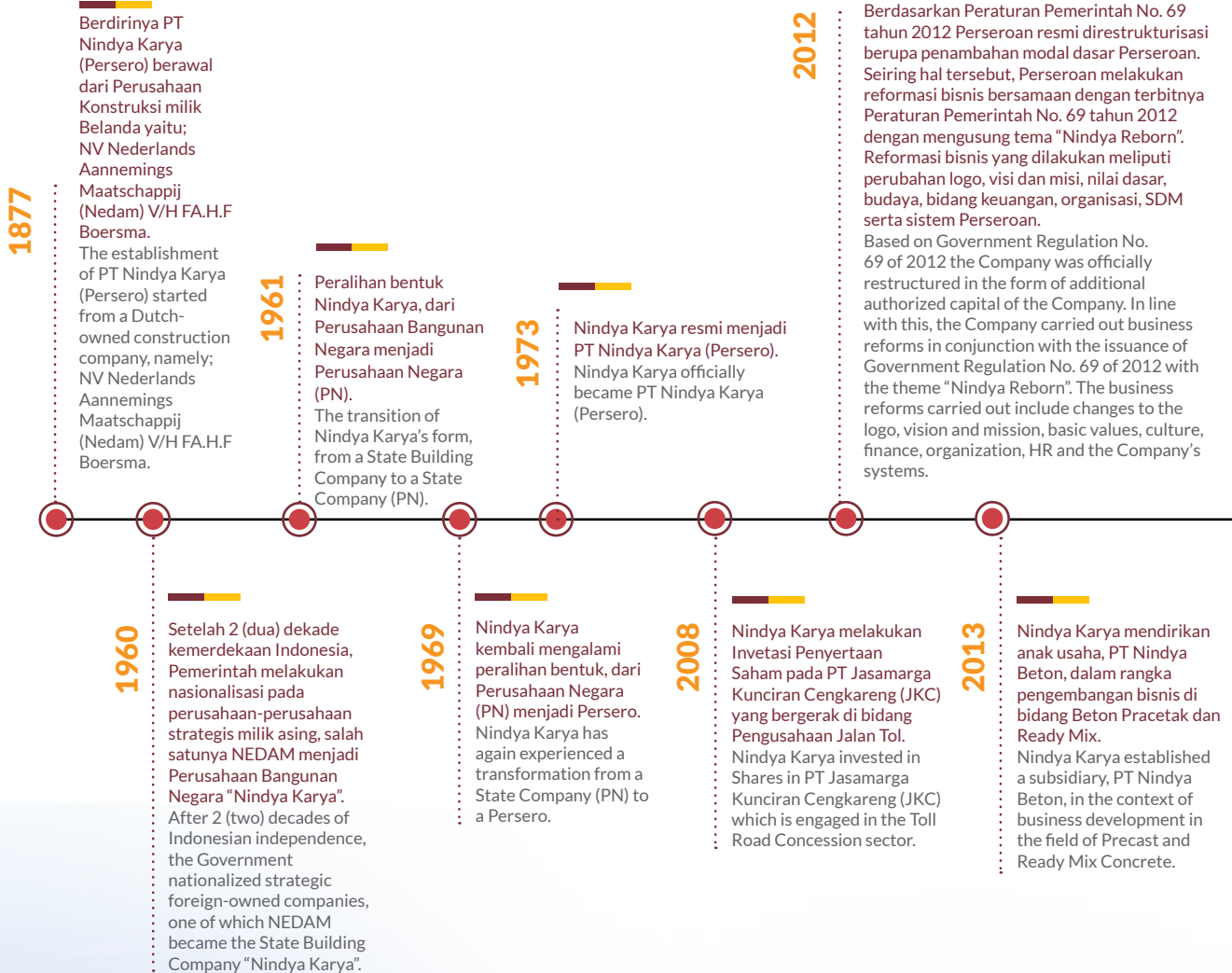
President of the Republic of Indonesia Ir. Joko Widodo inaugurated the Nindya Karya Project, namely the Mopah Airport Terminal Building on the week of October 3, 2021. Mopah Airport is a class I airport with a terminal building area of approximately 3624 m², located in Rimba Jaya, Merauke District, Merauke Regency, Papua.



● Terminal Bandar Udara Mopah, Merauke
Mopah Airport Terminal, Merauke

Jejak Langkah Perseroan

Corporate Milestones



2018

Nindya Karya mengembangkan sektor bisnis baru yaitu pengembangan bisnis penyewaan alat berat, angkat dan angkut melalui Unit Penunjang Produksi serta pengembangan bisnis sektor properti, salah satunya Soft Launching Hotel Horison Nindya Semarang. Di tahun ini pula Nindya Karya pertama kali melaksanakan pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham.

Nindya Karya is developing a new business sector, namely the development of the heavy equipment rental, lifting and transportation business through the Production Support Unit and the property sector business development, one of which is the Soft Launching of Hotel Horison Nindya Semarang. This year also Nindya Karya made the first payment of dividends to shareholders.

2019

Mulai melakukan transformasi digital dengan mengembangkan Enterprise Resource Planning (ERP). Start doing digital transformation by developing Enterprise Resource Planning (ERP).

2017

Pelebaran bisnis dengan melakukan investasi di sector properti, melalui peluncuran proyek Hotel Horison Nindya di Semarang.

Business expansion by investing in the property sector, through the launch of the Horison Nindya Hotel project in Semarang.

Penerbitan Medium Term Notes (MTN) I Nindya Karya tahun 2017 dengan peringkat efek idBBB+ oleh PEFINDO. Issuance of Medium Term Notes (MTN) I Nindya Karya in 2017 with a securities rating of idBBB+ by PEFINDO.

2020

Memorandum of Undersanding (MoU) Pembangunan RDMP Dumai antara NINDYA-PERTAMINA, DH Holding (Korea). Memorandum of Undersanding (MoU) for the Dumai RDMP Development between NINDYA-PERTAMINA, DH Holding (Korea).

Pengembangan PLTA Maung-Banjarnegara antara NINDYA, Indonesia Power, KOSPO. Development of the Maung-Banjarnegara PLTA between NINDYA, Indonesia Power, KOSPO.

Memorandum of Undersanding (MoU) Pengembangan Air Limbah dan WTP Bali Selatan antara NINDYA, PDAM Provinsi Bali dan Samsung Engineering. Memorandum of Undersanding (MoU) for South Bali Wastewater and WTP Development between NINDYA, PDAM Bali Province and Samsung Engineering. Memorandum of Undersanding (MoU) Pengembangan Bali Integrated

Transportation System antara NINDYA KIND, KRNA, KRTC dan Byucksan Engineering. Memorandum of Undersanding (MoU) Development of the Bali Integrated Transportation System between NINDYA, KIND, KRNA, KRTC and Byucksan Engineering.

Go Live ERP dan peluncuran beragam aplikasi dalam rangka akselerasi transformasi digital. Go Live ERP and launch various applications in order to accelerate digital transformation.

Peluncuran Core Values AKHLAK. Launch of AKHLAK Core Values.

2021

Pendirian anak usaha Nindya Tirta Unggul sebagai bentuk investasi dalam rangka diversifikasi usaha pada segmen Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di luar segmen usaha jasa konstruksi. Establishment of Nindya Tirta Unggul subsidiary as a form of investment in the framework of business diversification in the Drinking Water Supply System (SPAM) segment outside the construction services business segment.



● Jalan Tol Solo Kertosono
Solo Kertosono Toll Road



01

Kilas Kinerja

Performance Review



Di tahun 2021, Perusahaan berhasil mencetak laba bruto sebesar Rp361,89 miliar, jumlah tersebut meningkat 14,10% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu Rp317,17 miliar.

In 2021, the Company managed to record a gross profit of Rp361.89 billion, this number increased by 14.10% compared to the previous year's achievement of Rp317.17 billion.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlights

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	YOY 2020- 2021
Pendapatan Usaha Revenues	4.415.364	3.616.483	5.783.502	6.226.911	5.875.138	22,09%
Beban Pokok Pendapatan Revenue Costs	(4.053.477)	(3.299.318)	(5.158.970)	(5.534.321)	(5.203.412)	22,86%
Laba Bruto Gross Profit	361.887	317.165	624.533	692.590	671.726	14,10%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	65.700	50.101	220.087	273.388	244.331	31,13%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for Current Year	65.794	42.822	215.873	272.181	244.273	53,64%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income in Total	13.608	4.333	(5.984)	178	260.272	214,07%
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE CURRENT YEAR	79.402	47.155	209.889	272.358	504.546	68,39%
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: NET PROFIT FROM THE CURRENT YEAR ATTRIBUTED TO:						
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	75.561	50.896	223.784	271.522	264.749	48,46%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	(9.767)	(8.074)	(7.911)	659	(20.476)	20,98%
Jumlah Total	65.794	42.822	215.873	272.181	244.273	53,64%
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE CURRENT YEAR ATTRIBUTED TO:						
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	88.514	55.276	217.790	271.771	525.022	60,13%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	(9.112)	(8.121)	(7.901)	587	(20.476)	12,20%
Jumlah Total	79.402	47.155	209.889	272.358	504.546	68,39%

Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	YOY 2020- 2021
ASET ASSETS						
Aset Lancar Current Assets	3.521.577	4.221.246	4.830.380	4.517.913	3.778.872	(16,57%)
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	1.378.422	1.265.572	1.245.942	1.173.088	951.007	8,92%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	4.899.999	5.486.818	6.076.322	5.691.001	4.729.879	(10,70%)
LIABILITAS LIABILITY						
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	3.004.927	3.378.819	4.023.379	3.667.131	2.926.055	(11,07%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	296.770	589.924	366.306	511.824	546.637	(49,69%)
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	3.301.697	3.968.743	4.389.685	4.178.955	3.472.692	(16,81%)

Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	YOY 2020- 2021
EKUITAS EQUITY						
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	1.598.302	1.518.075	1.686.637	1.512.046	1.257.187	5,28%
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITY AND EQUITY						
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITY AND EQUITY	4.899.999	5.486.818	6.076.322	5.691.001	4.729.879	(10,70%)

Arus Kas Konsolidasian
Consolidate Cash Flow

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	YOY 2020- 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	590.742	(583.271)	32.792	(235.153)	272.973	(201,28%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	36.825	36.624	(27.720)	(68.202)	(25.283)	0,55%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(437.818)	284.462	(35.298)	(17.500)	317.549	(253,91%)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) for Cash and Cash Equivalent	189.749	(262.184)	(30.226)	(320.854)	565.238	(172,37%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at the Start of the Year	245.873	508.064	538.290	859.144	293.997	(51,61%)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at the End of the Year	435.623	245.873	508.064	538.290	859.144	77,17%

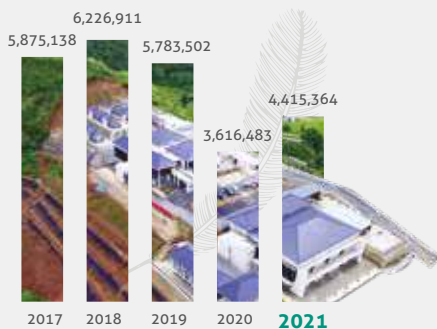
Rasio-Rasio Keuangan
Financial Ratios

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017
LIKUIDITAS LIQUIDITY					
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	21,15	13,92	17,60	20,13	36,20
Rasio Lancar (Likuiditas) (%) Current Ratio (Liquidity) (%)	117,19	131,78	120,06	123,20	129,15
RENTABILITAS RENTABILITY					
Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) (%) Return on Equity (ROE) Ratio (%)	4,29	2,90	14,68	22,10	24,12
Rasio Pengembalian atas Investasi (ROI) (%) Return on Investment (ROI) Ratio (%)	6,22	5,08	8,23	9,54	10,59
SOLVABILITAS SOLVABILITY					
Debt to Equity Ratio (DER) (Kali) Debt to Equity Ratio (DER) (Times)	0,37	0,68	0,44	0,49	0,59
TURNOVER TURNOVER					
Collection Period (Hari) Collection Period (Days)	10	14	18	18	23
Perputaran Persediaan (Hari) Supply Turnover (Days)	19	15	11	7	9
AKTIVITAS ACTIVITY					
Total Aset Turnover (TATO) (Kali) Total Aset Turnover (TATO) (Times)	0,95	0,69	0,98	1,34	1,24

Grafik Kinerja Keuangan Financial Performance Chart

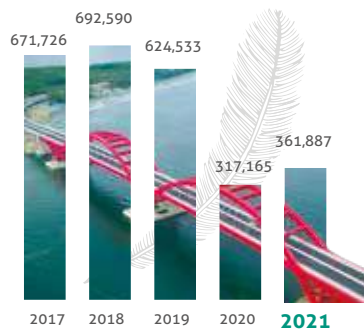
Pendapatan Usaha Operating Revenues

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah



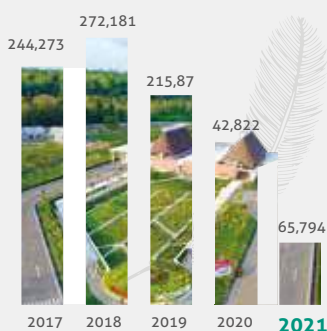
Laba Bruto Gross Profit

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah



Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah



Aset Asset

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah



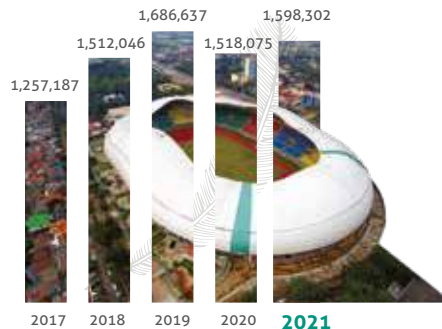
Liabilitas Liabilities

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah



Ekuitas Equity

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah



Ikhtisar Operasi

Operation Highlights

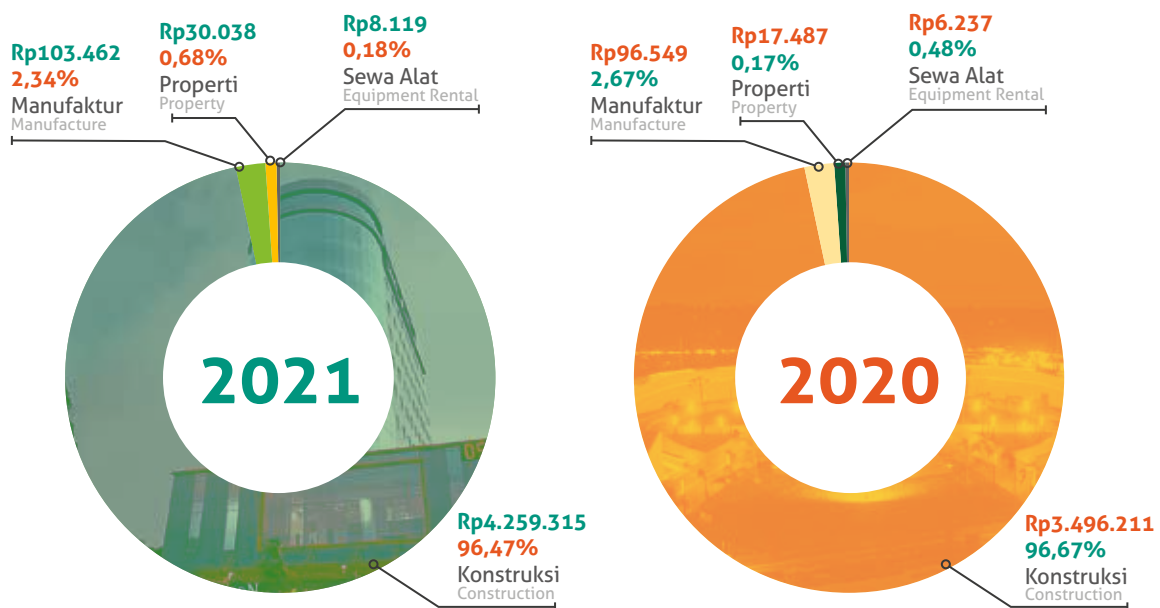
Ikhtisar Kinerja Operasional

Operational Performance Highlight

Jumlah dan Kontribusi Segmen Usaha terhadap Pendapatan 2020-2021
Amount and Contribution of Business Segments to Revenues 2020-2021

Segmen Operasi Operating Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Konstruksi Construction	4.259.315	96,47%	3.496.211	96,67%	763.104	21,83%
Manufaktur Manufacture	103.462	2,34%	96.549	2,67%	6.914	7,16%
Properti Property	30.038	0,68%	17.487	0,48%	12.552	71,78%
Sewa Alat Equipment Rental	8.119	0,18%	6.237	0,17%	1.882	30,18%
Jumlah Pendapatan Total Revenues	4.415.364	100,00%	3.616.483	100,00%	798.881	22,09%

Komposisi Kontribusi Segmen Usaha terhadap Pendapatan Perusahaan
Composition of Business Segment Contribution to Revenues



Ikhtisar Penilaian Administrasi Administration Assessment Highlight

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017
ASPEK ADMINISTRASI ADMINISTRATION ASPECTS					
Laporan Tahunan (Hari) Annual Report (Days)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
RKAP (Hari) RKAP (Days)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Laporan Triwulan (Hari) Quarterly Reports (Days)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Efektivitas Penyaluran Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) (%) Effectiveness of Fund Distribution for Small Enterprises and Cooperatives Development (PUKK) (%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) (%) Collectability Rate of Return of Fund for Small Enterprises and Cooperatives Development (PUKK) (%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ikhtisar Penilaian Kinerja dan Operasional Performance and Operational Assessment Highlight

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017
Peningkatan Penguasaan Teknologi Improved Mastery of Technology	96,22%	93,88%	90,00%	90,00%	-
Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Implementation of Formal and Informal Education	169,40%	93,74%	76,89%	148,00%	-
Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Timely Completion of Work	95,70%	96,40%	96,33%	91,61%	91,55%

GCG dan Pemeringkatan Lainnya GCG and Other Ratings

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017
ASESSMENT PENERAPAN GCG ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION					
Skor Score	90,082	89,793	89,69	89,64	85,51
Klasifikasi Classification	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good	Sangat Baik Very Good
PEMERINGKATAN Rating					
Pemeringkatan oleh PEFINDO Rating by PEFINDO	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+

Ikhtisar Saham

Stocks Overview

Jumlah Saham

Jumlah saham PT Nindya Karya (Persero) per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 5.950.000 lembar saham, dengan kepemilikan Negara Republik Indonesia sebanyak 59.500 saham Seri A Dwi Warna atau sebesar 1,00%, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebanyak 5.890.500 saham Seri B atau sebesar 99,00%.

Number of Shares

The number of shares of PT Nindya Karya (Persero) as of December 31, 2021 is 5,950,000 shares, with ownership by the Republic of Indonesia at 59,500 Series A Dwi Warna shares or amounting to 1,00%, and PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) with 5,890,500 Series B shares or amounting to 99.00%.

Informasi tentang Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Hingga 31 Desember 2021, PT Nindya Karya (Persero) belum melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) sehingga tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, laporan terkait jumlah saham yang beredar, informasi dalam bentuk tabel yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan harga saham tertinggi, terendah dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan, volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan, informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan, dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun terakhir belum tersaji di dalam laporan tahunan ini.

Information on Share Trading and Share Ownership by the Public

As of December 31, 2021 PT Nindya Karya (Persero) has not executed an Initial Public Offering (IPO) as such none of its shares are traded to the public on Stock Exchanges, whether locally or abroad. Thus, reports with regards to number of publicly traded shares, information in the form of tables containing market capitalization based on price on the Stock Exchange on which the shares are listed, the highest, lowest, and closing prices of the shares on the Stock Exchange where it is listed, information in the form of graphs containing at least the closing price based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed, and share trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed for each quarter in the past 2 (two) years cannot be presented in this annual report.

Dividen Saham

Menurut Risalah RUPS Tahunan PT Nindya Karya (Persero) No.50 pada hari Selasa, 29 Juni 2021, tidak menetapkan adanya pembayaran dividen di tahun 2021 untuk tahun buku 2020. Begitupun dengan tahun 2020, dimana Perusahaan tidak melakukan pembagian dividen atas kinerja tahun 2019, yang lebih disebabkan oleh kebijakan untuk pengendalian dampak COVID-19 terhadap kelangsungan bisnis Perusahaan.

Share Dividends

According to the Minutes of the GMS of PT Nindya Karya (Persero) No.50 on Tuesday June 29, 2021, there was no resolution to distribute dividend in the year 2021 for the 2020 fiscal year. The same goes for 2020, where the Company did not distribute dividends for its 2019 performance, mostly due to policies to manage the impacts of the COVID-19 towards the business continuity of the Company.

Informasi tentang Aksi Korporasi Saham Lainnya

Hingga 31 Desember 2021, tidak terdapat aksi korporasi yang dilakukan PT Nindya Karya (Persero) sehingga informasi terkait Initial Public Offering, pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, perubahan nominal saham dan aksi korporasi lainnya yang diperbolehkan oleh otoritas bursa belum disajikan dalam laporan tahunan ini.

Information on Other Corporate Actions

As of December 31, 2021 there were no corporate actions performed by PT Nindya Karya (Persero), therefore information related to Initial Public Offering, Stock Split, Reverse Stock, bonus shares, changes in nominal value, and other corporate actions sanctioned by exchange authorities cannot be presented in the annual report.

Informasi tentang Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, serta Pendanaan Lainnya

Information on Bonds, Sukuk or Convertible Bonds, and Other Financing

Per 31 Desember 2021, PT Nindya Karya (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, efek lainnya, serta pendanaan lainnya berupa *Medium Term Notes*. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

As of December 31, 2021, PT Nindya Karya (Persero) did not issue any bonds, sukuk, convertible bonds, or any other securities nor financing in the form of *Medium Term Notes*. Thus, there are no information related to bonds/sukuk/outstanding convertible bonds, interest/return rate, maturity date and bond/sukuk ratings.

Kilas Peristiwa

Event Highlights



Pelantikan Pejabat
Management Appointment

Januari
January

5	NINDYA Perbaharui Struktur Organisasi dan Melantik Pejabat Baru NINDYA Renewed Organization Structure and Appointed New Management
8	Program Kampung NINDYA-Cikopomayak diawali Pembinaan Protokol Kesehatan The Kampung NINDYA-Cikopomayak Program is Opened with Health Protocol Coaching
15	Nindya Kerahkan Alat Berat dan Dirikan Tenda Darurat Bantu Rehabilitasi Dampak Gempa Mamuju Nindya Deployed Heavy Equipment and Sets Up Emergency Tents to Help Mamuju Earthquake Impact Rehabilitation
17	NINDYA Berikan Bantuan berupa Sarana dan Prasarana Ibadah di Kabupaten Sukabumi NINDYA Provided Assistance in the Form of Religious Facilities and Infrastructure in Sukabumi Regency
18	NINDYA Berikan Bantuan kepada Korban Bencana Gempa di Mamuju & Majene, Sulbar NINDYA Provided Aid to Earthquake Victims in Mamuju and Majene, West Sulawesi
19	NINDYA Bagikan Bantuan kepada Korban Terdampak Bencana Longsor dan Banjir Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat NINDYA Distributed Aid to Victims Affected by Landslides and Floods at Cimanggu, Sumedang District, West Java
20	NINDYA Siap Tingkatkan Tata Kelola Sistem TI Melalui Asesmen IT Maturity Level NINDYA Set to Improve IT System Governance Through IT Maturity Level Assessment
20	Kepala BP Batam Tinjau Perluasan Apron dan Taxiway Bandara Hang Nadim yang Dikerjakan NINDYA Head of BP Batam Reviewed the Apron and Taxiway Expansion of Hang Nadim Airport Completed by NINDYA
21	Proyek NINDYA Berikan Matras dan Alat Peraga kepada Anak Berkebutuhan Khusus NINDYA Project Distributed Mats and Visual Aids for Children with Special Needs
22	Nindya Tandatangani Kontrak KSO Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket I Nindya Signed KSO Contract for Bekasi River Flood Control Project Package I
23	Nindya Serahkan Bantuan kepada Korban Banjir Kalimantan Selatan Nindya Distributed Aid to Victims of South Kalimantan Flood
26	NINDYA Lakukan Sertifikasi ISO 19650:2018 BIM NINDYA Undergoes ISO 19650:2018 BIM Certification

- 28 NINDYA Tandatangani MoU Bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
NINDYA Signed MoU with North Sulawesi Attorney General
- 28 Nindya Laksanakan Entry Meeting Assessment GCG
Nindya Conducted GCG Entry Meeting Assessment
- 28 Nindya Learning Center adakan Sharing Knowledge tentang Proses Bisnis Investasi
Nindya Learning Center held Knowledge Sharing on Investment Business Process



Presiden Resmikan Bendungan Napun Gete
President Inaugurated the Napun Gete Dam

Februari February

- 4 Audit Pertama Gap Asesmen Nindya ISO:19650 BIM Dimulai
The First Gap Assessment Audit of Nindya ISO:19650 BIM Begins
- 18 Perkuat Hubungan dengan Mitra Nindya Selenggarakan Vendor Gathering
Nindya Held Vendor Gathering to Strengthen Relationship with Partners
- 23 NINDYA Peduli Bergerak Berikan Bantuan untuk Korban Banjir di Jakarta Timur
NINDYA Peduli Mobilizes to Give Aid for East Jakarta Flood Victims
- 25 NINDYA Buka Rangkaian Kegiatan HUT Ke-61 dengan Program Penataan Lingkungan di sekitar Proyek
NINDYA Sets Off for 61st Anniversary Series of Activities with Environmental Management Program for Surrounding Areas
- 26 Pemilihan Duta Nindya Karya dalam Rangkaian Peringatan HUT Ke-61
Appointment of Nindya Karya Ambassadors in Commemoration of the 61st Anniversary
- 27 Presiden Resmikan Bendungan Napun Gete yang dibangun Nindya Karya
President Inaugurated Napun Gete Dam built by Nindya Karya
- 28 Nindya Lakukan Surveillance Audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018
Nindya Conducted ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 Surveillance Audits
- 28 Nindya Selenggarakan Kompetisi PUBG dalam Rangkaian Peringatan HUT Ke-61
Nindya Held PUBG Competition in 61st Anniversary Commemoration Series



Perayaan HUT ke 61 Nindya Karya
Nindya Karya's 61st Anniversary Celebration

Maret March

- 3 NINDYA Gelar Nuzulul Qur'an dan Santunan 300 Anak Yatim
NINDYA Held Nuzulul Qur'an and Compensation for 300 Orphans
- 5 Nindya Selenggarakan Audiensi dan Konsultasi Rencana Proyek LRT Bali dengan Kementerian PPN/Bappenas
Nindya Held Audience and Consultation on the Bali LRT Project Plan with the Ministry of National Development Planning/ Bappenas
- 6 Direktur NINDYA Harapkan Koperasi Karyawan Dapat Terus Meningkatkan Pelayanannya
Director of NINDYA Hoped Employee Cooperatives can Continue to Improve Their Services
- 17 Nindya Karya Selenggarakan Halal Bi Halal Secara Daring
Nindya Karya Held Halal Bi Halal Online
- 18 Nindya Kembangkan dan Dirikan Anak Usaha Nindya Tirta Unggul
Nindya Developed and Established a Subsidiary of Nindya Tirta Unggul

- 20 Nindya Karya Ikuti Upacara Peringati Hari Kebangkitan Nasional Secara Daring
Nindya Karya Joined the Ceremony to Commemorate National Awakening Day Online
- 24 Manajemen NINDYA Tinjau Proyek Renovasi Stadion U-20 di Surakarta
NINDYA Management Reviewed U-20 Stadium Renovation Project in Surakarta



Nindya Resmi Memperoleh Sertifikasi ISO 19650-1: 2018 & ISO 19650-2: 2018
Nindya Officially Obtained ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018 Sertifikasi Certification

April
April

- 1 Khitanan Yatim Jadi Salah Satu Rangkaian HUT Nindya Karya ke-61
Orphan Circumcision was Part of Nindya Karya's 61st Anniversary Series of Activities
- 2 Dukung Program Pemerintah, Karyawan NINDYA Ikuti Vaksin Covid-19
NINDYA Employees Received COVID-19 Vaccines in Support of Government Programs
- 5 Nindya Peduli Delegasikan Relawan Donor Plasma
Nindya Peduli Delegated Plasma Donor Volunteers
- 5 Komisaris NINDYA Pantau Proyek Renovasi Stadion dan Lapangan Sepak Bola
NINDYA Commissioner Monitored Stadium and Football Field Renovation Project
- 6 Unjuk Kreatifitas Insan Nindya dalam Acara The Command
Nindya Employees Demonstrated Creativity at The Command Event
- 6 Kementerian PUPR Pantau Pekerjaan NINDYA di Proyek Penataan Pantai Malalayang dan Ecotourism Village Bunaken
Ministry of PUPR Monitored NINDYA's Work in the Malalayang Beach Arrangement and Bunaken Ecotourism Village Project
- 8 NINDYA Raih Penghargaan di Malam Anugerah BUMN 2021
NINDYA Won Award at the 2021 BUMN Award Night
- 11 Hymne NINDYA Resmi Diluncurkan
The NINDYA Hymn was Officially Launched
- 12 PT Nindya Karya (Persero) Resmi Bersertifikasi ISO:19650 BIM
PT Nindya Karya (Persero) Officially Received ISO:19650 BIM Certification
- 12 Nindya Resmi Memperoleh Sertifikasi ISO 19650-1: 2018 & ISO 19650-2: 2018 yang diberikan oleh British Standards Institution (BSI)
Nindya Officially Obtained ISO 19650-1:2018 & ISO19650-2:2018 Certification granted by British Standards Institution (BSI)
- 12 Nindya Karya Gelar Rakornas Triwulan I
Nindya Karya Held First Quarterly National Coordination Meeting
- 12 NINDYA Salurkan Bantuan bagi Korban Bencana Alam di NTT
NINDYA Distributed Aid for Natural Disaster Victims in NTT
- 15 NINDYA Peroleh Predikat Penilaian SANGAT BAIK dari skor Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
NINDYA Obtained VERY GOOD Score for the Good Corporate Governance (GCG) Implementation Assessment
- 16 NINDYA Tandatangan MoU Bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
NINDYA Signed MoU with the Central Java Attorney General
- 16 Nindya Selenggarakan Bantuan Beasiswa dalam Rangkaian HUT Nindya ke-61
Nindya Held Scholarship Aid as Part of Nindya's 61st Anniversary Series
- 16 Nindya Leading Innovation untuk Nindya GOAL
Nindya Leading Innovation for Nindya GOAL
- 16 Talkshow HUT Ke-61, NINDYA
NINDYA's 61st Anniversary Talkshow
- 17 Nindya Karya gelar Sharing Knowledge Terkait Key Risk Indicator
Nindya Karya held Knowledge Sharing on Key Risk Indicator
- 25 Nindya Karya Gelar Sharing Session Tingkatkan Kesadaran terhadap Vaksin
Nindya Karya Held Sharing Session to Raise Vaccine Awareness
- 26 Proyek Nindya Karya Berikan Bantuan Ruang Baca Terbuka di SMAN 1 Tugu Trenggalek Jawa Timur
Nindya Karya Project Provided Open Reading Room Aid at SMAN 1 Tugu Trenggalek, East Java
- 28 NINDYA Raih 24 Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan
NINDYA Won 24 Awards from the Ministry of Manpower
- 28 Nindya Karya gelar Sharing Session Pengawasan di Era New Normal
Nindya Karya held a Sharing Session on Supervision in the New Normal Era

- 29 Kartini Inspiratif Nindya dalam "Its Time Ladies"
Inspiring Nindya Kartinis in "Its Time Ladies"
- 30 Karyawan NINDYA Jalani Vaksinasi COVID-19 Tahap ke-2
NINDYA Employees Undergo COVID-19 Phase 2 Vaccinations
- 31 Nindya Karya bersama 8 BUMN Konstruksi Lainnya Bersinergi Wujudkan Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
Nindya Karya Along with 8 Other Construction SOEs Synergize to Attain National Energy Independence and Security



penandatanganan kerjasama antara Nindya Karya dan Perumdam di Cilacap
The signing of the cooperation between Nindya Karya and Perumdam in Cilacap

Mei
May

- 1 Nindya Karya Ikuti Upacara Peringati Hari Lahir Pancasila Secara Daring
Nindya Karya Joined Online Ceremony to Commemorate the Birth of Pancasila
- 2 Nindya Karya Lantik 5 Pejabat Baru
Nindya Karya Appointed 5 New Officials
- 4 NINDYA Selenggarakan Sharing Session tentang Pentingnya Inovasi kepada Seluruh #InsanNindya
NINDYA Held Sharing Session About the Importance of Innovation to All #InsanNindya
- 8 Komisaris NINDYA KARYA Pantau Proyek Rehabilitasi Kawasan Pusaka Benteng Pendem Ngawi
NINDYA KARYA Commissioner Monitored the the Ngawi Pendem Fort Heritage Area Rehabilitation Project
- 10 Komisaris NINDYA Andar Perdana Widiastono lakukan kunjungan Proyek Spillway Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur
NINDYA Commissioner Andar Perdana Widiastono visited the Tugu Dam Spillway Project in Trenggalek Regency, East Java
- 10 NINDYA Gelar Sharing Session Feasibility Study
NINDYA Held Feasibility Study Sharing Session
- 23 Nindya Karya Lakukan Surveillance Audit ISO 37001:2016
Nindya Karya Conducted ISO 37001:2016 Surveillance Audit
- 25 NINDYA Sepakati Perjanjian Studi Bersama Proyek Pengembangan Kilang Unit II Dumai
NINDYA Agreed on Jointed Study Agreement for the Dumai Unit II Refinery Development Project



Penandatanganan Studi antar Nindya Karya dan Perusahaan Korea
Signing of Study between Nindya Karya and Korean Companies

Juni
June

- 1 Nindya Learning Center Gelar Sharing Session
Nindya Learning Center Held Sharing Session
- 5 Nindya & Dinas PU Cimahi Tandatangani Kesepakatan Proyek Pembangunan Underpass Sriwijaya
Nindya & Cimahi Public Works Agency Signed Agreement on Sriwijaya Underpass Development Project
- 8 Nindya Lakukan Evaluasi Kinerja Triwulan II
Nindya Conducted Quarter II Performance Evaluation
- 10 NINDYA Kolaborasi dengan IKA UNHAS Selenggarakan Vaksin COVID-19 untuk Alumni dan Mahasiswa
NINDYA Collaborates with IKA UNHAS to Organize a COVID-19 Vaccination for Alumni and Students
- 15 Nindya Gelar Sharing Session tentang Refinery Plant Development Project
Nindya Held Sharing Session on Refinery Plant Development Project

16	Nindya Peduli Salurkan Bantuan APD ke PMI Jakarta Timur Nindya Peduli Distributed PPE Aid to East Jakarta PMI
20	Nindya Bagikan Kurban ke Warga Jakarta dan Sekitarnya Nindya Distributed Qurban to Residents of Jakarta and Surrounding Areas
22	Nindya Tandatangani MoU Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Angin (PLTSA) Nindya Signed MoU on Solar and Wind Power Plants (PLTSA) Development Plan
23	NINDYA Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga yang Terdampak COVID-19 NINDYA Distributed Basic Food Aid for People Affected by COVID-19
24	Vaksinasi NINDYA KARYA-IKA UNHAS NINDYA KARYA-IKA UNHAS Vaccination
30	NINDYA Bersama BUMN Klaster Danareksa-PPA Salurkan Bantuan untuk Nakes dan Penyandang Disabilitas yang Terdampak Pandemi NINDYA Together with Danareksa-PPA Cluster SOEs Distributed Aid for Healthcare Workers and Persons with Disabilities Affected by the Pandemic
31	Proyek Bendungan Bendo yang Dikerjakan Nindya Karya Mulai Lakukan Impounding Nindya Karya's Bendo Dam Project Began Impounding



pelaksanaan sentra vaksin Nindya Tahap pertama
Implementation of the first phase of the Nindya vaccine center

Juli
July

12	TJSL NINDYA Berikan Bantuan Renovasi Masjid di Depok TJSL NINDYA Provided Renovation Aid for Mosque in Depok
13	Nindya Gali Gagasan Karyawan Lewat OBROLIN Nindya Explored Employee Ideas Through OBROLIN
16	Nindya Gelar Donor Plasma Konvalesen dan Donor Darah Reguler Nindya Held Convalescent Plasma and Regular Blood Donor
20	Dukung Suplai Air untuk Irigasi di Kabupaten Gowa, Bendungan Karalloe yang Dibangun Nindya Karya Mulai Dilakukan Impounding Karalloe Dam Built by Nindya Karya Started Impounding to Support Water Supply for Irrigation in Gowa Regency
21	Dukung Program Pemerintah, Nindya Karya Kembali Kirimkan Peserta Vaksin Ke GBK Nindya Karya Sent Vaccine Participants to GBK in support of Government Programs
27	Tinjau Proyek Rumah Sakit Khusus Otak & Jantung di Makassar, Manajemen Nindya Tegaskan Pentingnya Menjaga Mutu Pekerjaan dan Taati Prokes While overseeing the Brain & Heart Hospital Project in Makassar, Nindya Management Emphasized the Importance of Maintaining Quality of Work and Adhering to Health Protocols
27	Nindya Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Jatinegara Nindya Peduli Quick Responded Distributed Aid for Victims of Jatinegara Fire
28	NINDYA KARYA-IKA UNHAS Kembali Laksanakan Sentra Vaksinasi NINDYA KARYA-IKA UNHAS Held another Vaccination Center
28	Dirjen SDA Kementerian PUPR Tinjau Proyek yang Dikerjakan NINDYA, Pembangunan Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa Director General of Natural Resources, Ministry of Public Works and Public Housing, Visited the construction of the Karalloe Dam, Gowa Regency undertaken by NINDYA
30	NINDYA Gelar Groundbreaking Proyek Pembangunan Underpass Sriwijaya Cimahi NINDYA Held Groundbreaking for Sriwijaya Cimahi Underpass Construction Project



Agus Impounding Proyek bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan
Agus Impounding Karalloe Dam Project in South Sulawesi

Agustus August

- 3 NINDYA KARYA Berikan Bantuan Sepeda dan Perlengkapan Penunjang Kesehatan
NINDYA KARYA Distributed Assistance in the form of Bicycle and Healthcare Equipment
- 7 Presiden Resmikan Bendungan Bendo yang Dibangun oleh Nindya Karya, Guna Membantu Meningkatkan Produktivitas di Bidang Pertanian
President Inaugurated Bendo Dam Built by Nindya Karya to Help Increase Productivity in Agriculture
- 16 Proyek NINDYA Gelar Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
NINDYA Project Held Fire Fighting Training
- 16 Nindya Karya Sinergi dengan Bank Syariah Indonesia dalam Rangka Kerjasama Penjualan Unit The Purinatha Cluster
Nindya Karya Synergized with Bank Syariah Indonesia to Cooperate in Sales of The Purinatha Cluster Unit



Sep Ground Breaking Underpass Sriwijaya Cimahi

September September

- 1 Menteri PUPR Tandatangani Prasasti Infrastruktur PON Papua yang Dibangun Nindya
Minister of PUPR Signed Memorial Stone for Papua PON Infrastructure Built by Nindya
- 1 NINDYA Tandatangani MoU Rencana Kerjasama Investasi Pengembangan Kawasan Industri Makassar
NINDYA Signed MoU on Investment Cooperation Plan for Makassar Industrial Estate Development
- 1 Nindya Laksanakan Topping Off Proyek Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Milik Pertamedika
Nindya Held Project Topping Off for Pertamedika's Brain and Heart Hospital
- 1 Nindya Laksanakan Topping Off Ceremony Pembangunan Proyek Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Royal Biringakanaya, Makassar
Nindya Held Topping Off Ceremony for the Royal Biringakanaya Brain and Heart Hospital Construction Project, Makassar
- 2 Presiden Joko Widodo Resmikan 5 Venue PON Papua yang Dikerjakan NINDYA
President Joko Widodo Inaugurated 5 Papua PON Venues Built by NINDYA
- 2 Nindya Mulai Pembangunan Papua Youth Creative Hub sebagai Pusat Pengembangan Kreatifitas Papua
Nindya Started Development of Papua Youth Creative Hub as Papua Creativity Development Center
- 3 Proyek yang Dikerjakan Nindya Kembali Diresmikan Presiden Jokowi, Kali ini Proyek PLBN Terpadu Sota di Merauke
A project by Nindya was once again inaugurated by President Jokowi, this time the Sota Integrated PLBN Project in Merauke
- 3 Presiden Joko Widodo Resmikan Proyek Nindya Karya Gedung Terminal Bandar Udara Mopah di Merauke
President Joko Widodo Inaugurated the Nindya Karya Project, Mopah Airport Terminal Building in Merauke



Peresmian Proyek PON Papua oleh Presiden RI

Oktober October

2	Nindya Penuhi Sertifikasi ISO Tingkatkan Pengendalian Manajemen Risiko Nindya Met ISO Certification for Improved Risk Management Control
3	Dirut NINDYA Buka Peluang Kerja Sama di Hadapan Komunitas Bisnis Turki President Director of NINDYA Opened Partnership Opportunities to the Turkish Business Community
5	Nindya Karya Dipercaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Pelaksana Pemugaran Situs Peninggalan Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Nindya Karya is entrusted by the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as Restoration Executor for the Pendem Fort Heritage Site in Ngawi Regency, East Java
5	Nindya Sepakati Kerja Sama dengan Perusahaan Konstruksi Besar di Turki Nindya Entered Partnership with Major Turkish Construction Company
6	Dukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Nindya Peduli Hadir di Danau Toba Nindya Peduli Came to Lake Toba in Support of Super Priority Tourism Destination
6	NINDYA menjadi bagian dalam pembangunan PLB (Pos Lintas Batas Negara) NINDYA became part of the construction of PLB (Border Crossing Post)
10	Peringati Hari Pahlawan Tahun 2021, Nindya Karya Ikuti Upacara Secara Daring (Online) Commemorating 2021 Heroes' Day, Nindya Karya Joined the Online Ceremony
10	Kementerian PUPR Bersama Walikota Manado Tinjau Pekerjaan NINDYA di Proyek Penataan Pantai Malalayang dan Ecotourism Village Bunaken The Ministry of PUPR and the Mayor of Manado Visited NINDYA's Work in the Malalayang Beach Arrangement and Bunaken Ecotourism Village Project
10	NINDYA Gelar Program 5 Besar Calon Kapten Milenial dalam Collaboration Nindya Millennials to Action (CONNECT) NINDYA Held Top 5 Millennial Captain Candidates Program in Collaboration Nindya Millennials to Action (CONNECT)
11	Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono beserta rombongan mengunjungi Proyek Nindya Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika PUPR Minister, Basuki Hadimuljono and his entourage visited the Nindya Lombok International Airport (BIL) Road Bypass Project-Mandalika
11	Menteri PUPR Tandatangani Prasasti Beberapa Proyek Nindya di Lombok PUPR Minister Signed Memorial Stone for Several Nindya Projects in Lombok
12	Presiden Resmikan Proyek Nindya Jalan Bypass BIL Mandalika Event SuperBike 2021 dan Moto GP 2022 The President Inaugurated Nindya's Mandalika BIL Bypass Road Project, the 2021 SuperBike Event and the 2022 Moto GP
14	Nindya Kembangkan Desa Cikopomayak Lewat Pelatihan Pertukangan Nindya Empowered Cikopomayak Village Through Carpentry Training
22	Proyek Nindya Bendungan Karalloe siap penuhi kebutuhan irigasi dan hadapi La Nina Nindya's Karalloe Dam Project ready to meet irrigation needs and face La Nina
23	Presiden Joko Widodo Resmikan Bendungan Karalloe yang Dikerjakan Nindya President Joko Widodo inaugurated the Karalloe Dam that Nindya completed
25	Menteri BUMN Dukung Pembangunan KIM Plaza dan Waste Water Treatment Plant SOE Minister Supports the Construction of KIM Plaza and Waste Water Treatment Plant
25	Proyek Bendungan Meninting yang dikerjakan Nindya Terima Kunjungan Jam Intel Kejagung dan Inspektur Jenderal PUPR Nindya's Meninting Dam Project Received a Visit from the Attorney General's Office and Inspector General of PUPR
28	NINDYA Peroleh Rekomendasi ISO 27001:2013 Tanpa Temuan Mayor Maupun Minor NINDYA Obtained Recommendation ISO 27001:2013 Without Major or Minor Findings
29	Nindya Terapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Melalui Medical Check Up Nindya Implemented Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Through Medical Check Up
30	Diresmikan Presiden Jokowi, Bendungan Tugu Siap Penuhi Kebutuhan Air di Kabupaten Trenggalek President Jokowi inaugurated Tugu Dam, Ready to Fulfill Water Needs in Trenggalek Regency



Diresmikan Presiden Jokowi, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek
President Jokowi Inaugurated, Tugu Dam in Trenggalek Regency

November November

2	Nindya Penuhi Sertifikasi ISO Tingkatkan Pengendalian Manajemen Risiko Nindya Fulfills ISO Certification Improves Risk Management Control
3	Dirut NINDYA Buka Peluang Kerjasama di Hadapan Komunitas Bisnis Turki President Director of NINDYA Opens Cooperation Opportunities in Front of the Turkish Business Community
5	Nindya Karya Dipercaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Pelaksana Pemugaran Situs Peninggalan Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nindya Karya is trusted by the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Executor of the Restoration of the Pendem Fort Heritage Site in Ngawi Regency, East Java.
5	Nindya Sepakati Kerja Sama dengan Perusahaan Konstruksi Besar di Turki Nindya Agrees to Cooperate with Big Construction Companies in Turkey
6	Dukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Nindya Peduli Hadir di Danau Toba Supporting Super Priority Tourism Destinations, Nindya Peduli Comes to Lake Toba
6	NINDYA menjadi bagian dalam pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) NINDYA is part of the development of PLBN (Cross-border Post)
10	Peringati Hari Pahlawan Tahun 2021, Nindya Karya Ikuti Upacara Secara Daring (Online) Commemorating Hero's Day 2021, Nindya Karya Joins the Online Ceremony
10	Kementerian PUPR Bersama Walikota Manado Tinjau Pekerjaan NINDYA di Proyek Penataan Pantai Malalayang dan Ecotourism Village Bunaken The Ministry of PUPR and the Mayor of Manado Review NINDYA's Work at the Malalayang Beach Arrangement Project and the Bunaken Ecotourism Village
10	NINDYA Gelar Program 5 Besar Calon Kapten Milenial Dalam Collaboration Nindya Millennials to Action (CONNECT) NINDYA Holds the Top 5 Millennial Captain Candidates Program in the Nindya Millennials to Action (CONNECT) Collaboration
11	Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono beserta rombongan mengunjungi Proyek Nindya Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika The Minister of PUPR, Basuki Hadimuljono and his entourage visited the Lombok International Airport (BIL)-Mandalika Nindya Road Bypass Project
11	Menteri PUPR Tandatangani Prasasti Beberapa Proyek Nindya di Lombok Minister of PUPR Signs Inscriptions for Several Nindya Projects in Lombok
12	Presiden Resmikan Proyek Nindya Jalan Bypass BIL Mandalika Event SuperBike 2021 dan Moto GP 2022 The President Inaugurated the Nindya Project, the Mandalika BIL Bypass Road, the 2021 SuperBike Event and the 2022 Moto GP
14	Nindya Kembangkan Desa Cikopomayak Lewat Pelatihan Pertukangan Nindya Develops Cikopomayak Village through Carpentry Training
22	Proyek Nindya Bendungan Karalloe siap penuhi kebutuhan irigasi dan hadapi La Nina The Nindya Karalloe Dam project is ready to meet irrigation needs and face La Nina
23	Presiden Joko Widodo Resmikan Bendungan Karalloe yang Dikerjakan Nindya President Joko Widodo Inaugurated the Karalloe Dam that Nindya worked on
25	Menteri BUMN Dukung Pembangunan KIM Plaza dan Waste Water Treatment Plant SOE Minister Supports the Development of KIM Plaza and Waste Water Treatment Plant
25	Proyek Bendungan Meninting yang dikerjakan Nindya Terima Kunjungan Jam Intel Kejagung dan Inspektur Jenderal PUPR Nindya's Meninting Dam Project Receives a Visit from the Attorney General's Office and Inspector General of PUPR
28	NINDYA Peroleh Rekomendasi ISO 27001:2013 Tanpa Temuan Mayor Maupun Minor NINDYA Receives Recommendation ISO 27001:2013 Without Major or Minor Findings
29	Nindya Terapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Melalui Medical Check Up Nindya Implements an Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Through Medical Check Up
30	Diresmikan Presiden Jokowi, Bendungan Tugu Siap Penuhi Kebutuhan Air di Kabupaten Trenggalek Inaugurated by President Jokowi, Tugu Dam is Ready to Fulfill Water Needs in Trenggalek Regency



Tandatangan Kontrak Proyek Jembatan Sambas
Sambas Bridge Project Contract Sign

Desember December

1	NINDYA Raih Penghargaan Utama Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta Penanggulangan Covid-19 NINDYA Won Major Award for Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction as well as COVID-19 Response
1	NINDYA Bergabung Menjadi Anggota Klaster Danareksa NINDYA Joined as a Member of the Danareksa Cluster
2	Komisi V Lakukan Kunjungan Kerja ke Proyek Nindya Pembangunan Rel Ganda Kereta Api Batu Tulis Commission V Made a Working Visit to Nindya's Batu Tulis Double Track Railway Development Project
6	NINDYA Bagikan Bantuan kepada Korban Terdampak Gunung Semeru NINDYA Distributed Aid to Victims Affected by Mount Semeru
6	Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek diresmikan oleh Presiden Joko Widodo The Tugu Dam in Trenggalek Regency was inaugurated by President Joko Widodo
7	NINDYA Bersama BUMN Klaster Danareksa Salurkan Bantuan kepada Korban Erupsi Gunung Semeru NINDYA and Danareksa Cluster SOEs Distributed Aid to Victims of the Mount Semeru Eruption
8	Nindya Sosialisasikan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Nindya Socialized Awareness about Obligation for State Officials to Report Wealth
9	NINDYA Salurkan Bantuan pada Korban Erupsi Gunung Semeru NINDYA Distributed Aid to Victims of the Mount Semeru Eruption
9	Nindya Karya Tandatangani Kontrak Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar di Pontianak Nindya Karya Signed Contract for the Sambas Besar River Bridge Construction Project in Pontianak
9	Nindya Karya Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nindya Karya Signed Memorandum of Understanding with the West Kalimantan Attorney General
9	Nindya Karya Tandatangani Kontrak Kerja Sama Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika Nindya Karya Signed Partnership Contract for Construction of Pengga Dam Raw Water Supply System for Mandalika SEZ
13	NINDYA & Kemnaker Tandatangani MoU Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Konstruksi Melalui Pelatihan, Vokasi dan Pemagangan di BLK NINDYA & Ministry of Manpower Signed MoU on Improving HR Competence in Construction Sector Through Training, Vocational and Apprenticeships at BLK
13	NINDYA Lakukan Tinjauan Proyek Bendungan Tiu Suntuk Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat NINDYA performed Overview of the Tiu Suntuk Dam Project in West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara
15	Nindya Raih Tiga penghargaan di Bidang Marketing dan Brading Nindya Won Three Awards in Marketing and Branding
16	Nindya Dipercaya Bangun Indoor Multifunction Stadium GBK Nindya Entrusted to Build GBK's Indoor Multifunction Stadium
22	Nindya Raih Dua Penghargaan dari Ajang Human Capital & Performance Award Nindya Won Two Awards from the Human Capital & Performance Award
23	Nindya Dapat apresiasi karena Gedung Hotel Praktek Politeknik Pariwisata Bali Selesai Tepat Waktu Nindya Received an appreciation for Completing the Hotel Building for the Bali Tourism Polytechnic Practice on time
29	NINDYA Dapat dua sertifikasi di Bidang Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi NINDYA Received two certificates in Information Security and Information Technology



● Long Storage Irigasi, Semarang
Long Storage Irrigation, Semarang



● Jembatan Youtefa, Jayapura
Youtefa Bridge, Jayapura



Laporan Manajemen

Management Report



Tahun 2021 merupakan momentum untuk pertumbuhan industri konstruksi, hal tersebut seiring dengan program pemulihan ekonomi yang digulirkan oleh Pemerintah, yang memberikan stimulus positif bagi para pelaku industri, khususnya di bidang konstruksi.

The year 2021 is a momentum for the growth of the construction industry, this is in line with the economic recovery program launched by the Government, which provides a positive stimulus for industry players, especially in the construction sector.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Sugiyartanto

Komisaris Utama
President Commissioner

“Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi penting yang bersifat fundamental terkait kinerja Perusahaan, dan Kami menilai kebijakan strategis yang disusun manajemen dalam rangka menangkap peluang usaha tahun 2021 sudah tepat.

Throughout 2021, the Board of Commissioners has provided important, fundamental recommendations related to the Company's performance, and we assess that the strategic policies drawn up by management in order to capture business opportunities in 2021 are appropriate.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan-Nya kepada kita semua sehingga PT Nindya Karya (Persero) dapat mengarungi tahun 2021 dengan capaian optimal kendati dihadapkan dengan berbagai tantangan. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran komprehensif tentang upaya Perseroan untuk membuktikan kemampuannya dalam rangka mewujudkan visinya “Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan Investasi berbasis Engineering yang Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan”.

Dear Shareholders and Stakeholders,

On this occasion, please allow us to express our praise and gratitude to God Almighty for the grace He has given us all so that PT Nindya Karya (Persero) can navigate 2021 with optimal achievements despite being faced with various challenges. This Annual Report for the 2021 financial year is an attempt to provide a comprehensive picture of the Company's efforts to prove its capabilities in order to realize its vision of “To be a Global Company in the Field of Construction and Engineering-based Investment that is Trusted, Leading and Sustainable”.

Perspektif Makroekonomi

Hingga akhir 2021, hampir seluruh negara di dunia masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Dampak pandemi terhadap perekonomian global sangat besar. Sampai dengan triwulan ketiga 2021, baik negara maju maupun negara berkembang mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan dengan triwulan kedua 2021. Hal ini terutama disebabkan munculnya varian baru dari virus COVID-19, yaitu varian Delta yang lebih mudah menular dibandingkan dengan varian-varian COVID-19 lainnya.

Merujuk kepada Tinjauan Kebijakan Moneter 2021 yang dirilis Bank Indonesia edisi Desember 2021 menyatakan bahwa Ekonomi global tumbuh sesuai perkiraan pada 2021 dan berlanjut pada 2022, meski masih dibayangi gangguan rantai pasok dan kenaikan kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perkembangan tersebut didorong oleh akselerasi tingkat vaksinasi, stimulus kebijakan, dan pemulihan kegiatan usaha secara bertahap.

Sementara itu, di sisi domestik, seperti dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen.

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris dan Hubungan Kerja dengan Direksi

Peran Dewan Komisaris dalam hal ini adalah memberikan arahan dan masukan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, termasuk dengan arahan dan masukan untuk rencana kerja strategis yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris secara proaktif meninjau dan memonitor implementasi kebijakan dan strategi yang ditetapkan pada awal tahun bersama Direksi, pada pengelolaan Perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dilakukan secara konstruktif dan kolaboratif agar Direksi dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan kendala yang muncul. Selain rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat *ad hoc* dan juga kunjungan ke Anak Perusahaan bersama dengan Direksi yang membuat komunikasi Dewan Komisaris dan Direksi terjalin dengan baik. Di sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 13 kali rapat internal dan 12 kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi serta aktif melakukan kunjungan ke Anak Perusahaan. Rapat-rapat maupun kunjungan tersebut menjadi forum bagi

Macroeconomic Perspective

Until the end of 2021, almost all countries in the world are still struggling to deal with the COVID-19 pandemic. The impact of the pandemic on the global economy is enormous. Until the third quarter of 2021, both developed and developing countries experienced an economic slowdown compared to the second quarter of 2021. This was mainly due to the emergence of a new variant of the COVID-19 virus, namely the Delta variant which is more contagious than other COVID-19 variants.

Referring to the 2021 Monetary Policy Review released by Bank of Indonesia in the December 2021 edition, it states that the global economy will grow as expected in 2021 and will continue in 2022, although it is still overshadowed by supply chain disruptions and an increase in COVID-19 cases. Global economic growth is predicted to be more balanced, not only relying on the economic recovery of the United States (US) and China, but also accompanied by economic recovery in Europe, Japan and India. These developments were driven by the acceleration of vaccination rates, policy stimulus, and the gradual recovery of business activities.

Meanwhile, on the domestic side, as quoted from the Central Statistics Agency (BPS), they stated that the Indonesian economy in 2021 grew by 3.69 percent, higher than the achievement in 2020 which experienced a growth contraction of 2.07 percent. In terms of production, the highest growth occurred in the Health Services and Social Activities Business Field at 10.46 percent. Meanwhile, in terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Export Component of Goods and Services at 24.04 percent.

Supervisory Function of the Board of Commissioners and Working Relations with the Board of Directors

The role of the Board of Commissioners in this regard is to provide direction and input according to the capacity and capability they possessed, including direction and input for the strategic work plan formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners proactively reviews and monitors the implementation of policies and strategies established at the beginning of the year together with the Board of Directors, in the management of the Company.

The supervision carried out by the Board of Commissioners is done constructively and collaboratively in order that the Board of Directors can quickly and precisely resolve obstacles that arise. In addition to internal meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Board of Commissioners also holds *ad hoc* meetings and visits to Subsidiaries together with the Board of Directors which makes communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors well established. Throughout 2021, the Board of Commissioners held 13 internal meetings and 12 joint meetings by inviting the Board of Directors and actively making visits to

Dewan Komisaris untuk memantau kinerja dan pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2021.

Dewan Komisaris menekankan bahwa strategi yang tepat merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan Perusahaan. Oleh karena itu, penyusunan strategi perlu memerhatikan implementasinya di tahun sebelumnya dan kondisi terkini agar strategi yang akan dijalankan pada tahun berikutnya berjalan tepat sasaran. Melalui pemberian nasihat, Dewan Komisaris turut berperan dalam penyusunan strategi yang selanjutnya melakukan pengawasan terhadap implementasi atas strategi yang telah disusun oleh Direksi.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Tahun 2021 masih menjadi tantangan bagi Perseroan karena adanya dampak Pandemi COVID-19. Dewan Komisaris dapat memahami hal tersebut. Namun, Dewan Komisaris cukup mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang diambil oleh Direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas Perseroan serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di tengah kondisi yang penuh tantangan di tahun 2021. Penilaian atas kinerja Direksi yang dilakukan Dewan Komisaris juga didasarkan pada arahan pemegang saham yang tertuang melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara umum, Dewan komisaris berpendapat pada tahun 2021 Direksi telah melaksanakan tugas kepengurusan Perseroan dengan sangat baik.

Dewan Komisaris menilai kebijakan strategis yang disusun manajemen dalam rangka menangkap peluang usaha tahun 2021 sudah tepat. Dimana Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan mengalami pemulihan, didorong meluasnya vaksinasi dan keberlanjutan stimulus. Hal tersebut selaras dengan asumsi dari manajemen bahwa pertumbuhan ekonomi dan bisnis setelah pandemi berakhir, akan melonjak tajam sesuai siklus bisnis pasca krisis, kami menilai kebijakan strategis dan penetapan target yang ditetapkan merupakan kebijakan strategis yang tepat serta target yang cukup realistis, yang akan menguatkan posisi Perusahaan. Dengan perkiraan tersebut, maka diharapkan kinerja Perseroan akan memberikan nilai maksimal kepada pemegang saham.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris menggunakan beberapa parameter yaitu pencapaian atas implementasi GCG Perseroan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Lampiran I/6-15 Aspek Pengujian/Indikator Butir 17,18 Parameter No. 58, 59, dan 67. Parameter lainnya yaitu

Subsidiaries. These meetings and visits become a forum for the Board of Commissioners to monitor the performance and achievements of the Company throughout 2021.

The Board of Commissioners emphasizes that the right strategy is a factor that can determine the success of the Company. Therefore, strategy formulation needs to pay attention to its implementation in the previous year and current conditions so that the strategy that will be carried out in the following year runs on target. Through the providing of advice, the Board of Commissioners also plays a role in formulating strategies which then supervises the implementation of the strategies that have been prepared by the Board of Directors.

Assessment of the Board of Directors Performance

The year 2021 is still a challenge for the Company due to the impact of the COVID-19 Pandemic. The Board of Commissioners can understand this. However, the Board of Commissioners quite appreciates the various strategic initiatives taken by the Board of Directors. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has made efforts to maintain the stability of the Company and maintain the trust of stakeholders in the midst of challenging conditions in 2021. The assessment of the performance of the Board of Directors conducted by the Board of Commissioners is also based on the direction of the shareholders as stated in the General Meeting of Shareholders (GMS). In general, the Board of Commissioners is of the opinion that in 2021 the Board of Directors has carried out the management duties of the Company very well.

The Board of Commissioners considers that the strategic policies prepared by management in order to capture business opportunities in 2021 are appropriate. Where the Indonesian economy in 2021 and the following years is expected to recover, driven by the spread of vaccinations and the continuation of the stimulus. This is in line with the assumption from management that economic and business growth after the pandemic ends, will spike sharply according to the post-crisis business cycle. With this estimate, it is expected that the Company's performance will provide maximum value to shareholders.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners uses several parameters, namely the achievement of the Company's GCG implementation based on the Minister of SOE Regulation No. 01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation, Attachment I/6-15 Aspects of Testing/

pencapaian atas target KPI Korporat yang telah ditetapkan dalam RUPS pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Sementara itu, pencapaian atas target KPI Individu Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara juga menjadi salah satu dasar penilaian kinerja Direksi.

Dewan Komisaris memberikan apresiasinya terhadap kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah diperlihatkan Direksi sepanjang tahun 2021 serta mengapresiasi upaya Direksi dan seluruh jajarannya dalam mengantisipasi tantangan dan perkembangan bisnis ke depan. Beberapa catatan penting terkait kebijakan mendasar di tahun 2021 akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk mendorong perkembangan Perseroan ke depan.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Direksi

Kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas aktivitas operasional Perseroan didasarkan pada Undang-Undang, Anggaran Dasar, *Board Manual*, *Code of Conduct* GCG serta pedoman kerja yang dimiliki Perusahaan. Fungsi pengawasan juga dilakukan melalui Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi penting yang bersifat fundamental terkait kinerja perusahaan. Hal tersebut meliputi rencana investasi dengan mendirikan perusahaan patungan dan atau bekerjasama dengan Pemda dan BUMD, selain melakukan identifikasi dan mitigasi risiko terkait aspek financial dan teknis juga perlu melakukan kajian manajemen risiko pada aspek legal terkait aturan dan ketentuan pada Pemerintah Daerah dan BUMD yang akan menjadi mitra strategis/pemegang porsi saham perusahaan patungan.

Sementara itu, rencana penerbitan saham perdana (IPO) di tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Agar Perseroan fokus pada perbaikan *internal business process*.
2. Meningkatkan upaya-upaya dan strategi pemasaran dengan tetap fokus pada produk utama Perseroan dan memelihara loyalitas pelanggan.
3. Mengoptimalkan kerjasama sinergi dengan BUMN lainnya khususnya dalam klaster Danareksa serta menyelaraskan dengan RPJMN tahun 2022-2026 Kementerian PUPERA dalam rangka peningkatan produktivitas dan profitabilitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Indicators Item 17.18 Parameter No. 58, 59, and 67. Another parameter is the achievement of the Corporate KPI targets that have been set in the GMS to ratify the Company's Work Plan and Budget in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for Directors of State-Owned Enterprises.

Meanwhile, the achievement of the Directors' Individual KPI targets that have been set by the Board of Commissioners in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for the Directors of State-Owned Enterprises is also one of the bases for evaluating the performance of the Board of Directors.

The Board of Commissioners appreciates the performance, commitment, and dedication shown by the Board of Directors throughout 2021 and appreciates the efforts of the Board of Directors and all staff in anticipating challenges and future business developments. Several important notes related to fundamental policies in 2021 will become the basis for the Board of Commissioners to encourage the development of the Company going forward.

Supervision of the Board of Directors Strategy Implementation

The authority of the Board of Commissioners in supervising the Company's operational activities is based on the provisions of Law, Articles of Association, Board Manual, GCG Code of Conduct and work guidelines owned by the Company. The supervisory function is also carried out through the Committees under the Board of Commissioners.

Throughout 2021, the Board of Commissioners has provided important and fundamental recommendations related to the Company's performance. This includes investment plans by establishing joint ventures and/or collaborating with the Regional Government and BUMD, in addition to identifying and mitigating risks related to financial and technical aspects, it is also necessary to conduct risk management studies on legal aspects related to the rules and regulations of the Regional Government and BUMD that will become partners. strategic partner/shareholder of the joint venture.

Meanwhile, in the plan for an initial public offering (IPO) in 2023, there are two crucial issues which are:

1. For the Company to focus on improving internal business processes.
2. Improve marketing efforts and strategies by staying focused on the Company's main products and maintaining customer loyalty.
3. Optimizing synergistic cooperation with other SOEs, especially in the mutual funds cluster and aligning it with the RPJMN 2022-2026 of the Ministry of PUPERA in order to increase productivity and profitability carried out in accordance with the principles of good corporate governance.

4. Perlunya dilakukan upaya-upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan (*continuous improvement*) pada anak perusahaan, sehingga seluruhnya mampu memberikan kontribusi laba yang paling optimal bagi perusahaan.

4. The need to carry out continuous efforts to improve the performance of the subsidiaries, so that all of them are able to contribute the most optimal profit for the Company.

Dewan Komisaris senantiasa memberikan perhatian penting pada pengawasan pelaksanaan strategi yang disusun oleh Direksi. Hal ini sejalan dengan peran Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi Perseroan berada di jalur yang tepat tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

The Board of Commissioners always pays necessary attention to the supervision of the implementation of strategies prepared by the Board of Directors. This is in line with the role of the Board of Commissioners to ensure that the implementation of the Company's strategy is on the right track without compromising compliance with applicable regulations.

Pandangan atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2022 masih menjadi tahun yang penuh tantangan terutama iklim ketidakpastian sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun, Dewan Komisaris berkeyakinan tantangan ini akan mampu dilalui dengan penuh rasa optimisme. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2021 dan disiplin yang tetap dibarengi dengan penerapan protokol COVID-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik.

Outlook on Business Prospects

The Board of Commissioners views that 2022 is still a year full of challenges, especially the climate of uncertainty as a result of the COVID-19 pandemic. However, the Board of Commissioners believes that this challenge will be overcome with a sense of optimism. The national vaccine program which has started in early January 2021 and discipline that continues to be accompanied by the implementation of the COVID-19 protocol is expected to support the domestic economic recovery processes.

Dewan Komisaris memandang Perseroan mempunyai prospek bisnis berkelanjutan dengan melihat kondisi ekonomi dan pandemi yang mulai membaik. Direksi telah menyusun RKAP 2022 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, di mana Direksi tetap memastikan kegiatan operasional Perseroan dijalankan dengan menjaga protokol kesehatan.

The Board of Commissioners views that the Company has sustainable business prospects considering the improving economic and pandemic conditions. The Board of Directors has prepared the 2022 RKAP and has received approval from the Board of Commissioners, in which the Board of Directors continues to ensure that the Company's operational activities are carried out by maintaining health protocols.

Terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi Direksi dalam mengelola Perusahaan, dengan masih belum berakhirnya pandemi COVID-19 pada tahun 2021, berdampak makin terbatasnya dana infrastruktur termasuk adanya *refocusing* serta makin ketatnya persaingan untuk mendapatkan proyek pada jasa konstruksi. Hal tersebut tentu membawa pengaruh dalam implementasi strategi dan pelaksanaan operasi. Namun, Perseroan optimis setelah pandemi COVID-19 berakhir akan diikuti pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang tinggi.

Regarding the risks faced by the Board of Directors in managing the Company, with the COVID-19 pandemic still not ending in 2021, the impact on infrastructure funds is increasingly limited, including refocusing and increasingly fierce competition for projects in construction services. This certainly has an impact on the implementation of strategy and implementation of operations. However, the Company is optimistic that after the COVID-19 pandemic ends, high economic and business growth will follow.

Di sisi lain, prospek usaha ke depan juga didukung oleh kebijakan Pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi diantaranya melalui penguatan infrastruktur, dimana hal tersebut akan berdampak positif terhadap pengembangan bisnis Perseroan ke depan. Untuk itu, Dewan Komisaris dan Direksi bersepakat dalam menyusun RJPP tahun 2022-2026 bersifat optimistik dan menargetkan IPO di tahun 2023. Penilaian atas implementasi kebijakan strategis Perseroan akan dinilai dari pencapaian atas implementasi tersebut terhadap target RJPP 2022-2026 yang dituangkan dalam RKAP Tahunan Perusahaan.

On the other hand, future business prospects are also supported by Government policies to encourage economic recovery, including through strengthening infrastructure, which will have a positive impact on the Company's future business development. To that end, the Board of Commissioners and the Board of Directors have agreed in preparing the RJPP for 2022-2026 to be optimistic and targeting an IPO in 2023. The assessment of the implementation of the Company's strategic policies will be assessed from the achievement of the implementation of the RJPP 2022-2026 target as outlined in the Company's Annual RKAP.

Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun Direksi, telah mempertimbangkan asumsi-asumsi dalam makroekonomi global dan nasional pada masa mendatang. Dalam pandangan Dewan Komisaris, target yang telah ditetapkan pada RKAP 2022 merupakan target yang realistis dan dapat terealisasi. Demikian pula dengan strategi yang akan dijalankan, sejalan dengan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung dan senantiasa akan memberikan dukungan kepada Direksi agar target-target tersebut dapat tercapai dengan baik.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Whistleblowing System

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Perseroan menyadari pentingnya pengendalian internal terhadap penyimpangan atau kecurangan yang berindikasi merugikan Perseroan sehingga dibentuklah *Whistleblowing System* (WBS) yang merupakan sistem dan prosedur yang dirancang untuk mengelola pengaduan/penyimpangan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang pada dasarnya melanggar Kode Etik atau *Code of Conduct* Perseroan.

PT Nindya Karya (Persero) memiliki komitmen untuk menjalankan Perseroan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai utama budaya (*core values*) yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang disebut juga dengan AKHLAK dan slogan "Toward the Excellent".

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris turut terlibat dalam pengawasan implementasi pelaporan yang telah berjalan, meliputi prosedur pencegahan, deteksi dan identifikasi, investigasi dan pelaporan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Dewan Komisaris mendukung penuh terhadap implementasi WBS sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perseroan dan memberikan masukan untuk penerapan pedoman WBS yang lebih baik.

Dewan Komisaris dibantu dengan tim independen senantiasa melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas proses pelaporan dan proses pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di lingkup Perseroan. Dewan Komisaris menilai penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan telah dijalankan dengan cukup baik, hal tersebut tercermin dengan tidak terdapatnya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System..

The Board of Commissioners assesses that the business prospects prepared by the Board of Directors have taken into account the assumptions of the global and national macroeconomics in the future. In the view of the Board of Commissioners, the targets set in the 2022 RKAP are realistic and can be realized. Likewise, the strategy to be implemented is in line with the Company's medium and long term plans. For this reason, the Board of Commissioners fully supports and will always provide support to the Board of Directors so that these targets can be achieved properly.

Views on the Implementation of Good Corporate Governance and Whistleblowing System

Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT NINDYA KARYA (Persero). The Company is aware of the importance of internal control against irregularities or fraud that indicates harm to the Company so that the Whistleblowing System (WBS) is formed which is a system and procedure designed to manage complaints/disclosures regarding unlawful behavior, unethical acts which basically violate the Code of Ethics or the Code of Conduct. Company.

PT Nindya Karya (Persero) is committed to running the Company in a professional manner based on behavior that is in accordance with core cultural values, which are trustworthy, competent, harmonious, loyal, adaptive, collaborative which is also known as AKHLAK and the slogan "Toward the Excellent".

Throughout 2021, the Board of Commissioners is also involved in overseeing the implementation of ongoing reporting, including procedures for prevention, detection and identification, investigation and reporting, to evaluation and follow-up. The Board of Commissioners fully supports the implementation of WBS in accordance with the procedures applicable in the Company and provides input for the implementation of better WBS guidelines.

The Board of Commissioners, assisted by an independent team, continues to carry out supervisory responsibilities over the reporting process and the process of monitoring compliance with applicable laws and regulations within the Company. The Board of Commissioners considers that the implementation of the Violation Reporting System in the Company has been carried out quite well, this is reflected in the absence of reports of alleged violations committed by the Company's personnel submitted through the Whistleblowing System mechanism.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite lain jika diperlukan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, keberadaan Organ Pendukung Dewan Komisaris juga diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Saat ini, Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) memiliki 2 (dua) Komite, yakni Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi. Komite Dewan Komisaris memiliki Piagam yang menjadi pedoman kerja yakni Piagam Komite Audit, serta piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Dewan Komisaris bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan yang bersifat strategis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi masalah yang dianggap penting dalam kepemimpinan perusahaan. Secara rinci kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan kode etik Komite Dewan Komisaris telah diatur dalam Piagam Komite.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan masukan dan kajian yang diperlukan secara optimal. Kedua komite tersebut secara intensif, dan efektif telah mendorong dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan membudaya di lingkungan Perusahaan. Hal tersebut selaras dengan semangat Insan Perseroan dalam mewujudkan Visi dan Misi-nya, sehingga Nindya Karya memiliki kemampuan beradaptasi, daya tahan, serta daya saing yang kuat di tingkat nasional maupun regional. Hal ini tentunya akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan serta menyelesaikan program Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional untuk kemajuan ekonomi nasional.

Penilaian terhadap kinerja Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi juga dilakukan secara kualitatif, meliputi keaktifan komite dalam menjalankan tugasnya, proses dokumentasi, dan rekomendasi yang diberikan. Di sepanjang tahun 2021, Komite Audit melakukan 18 kali rapat dan Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan 4 kali rapat dengan agenda yang telah disesuaikan. Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota Komite.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners in carrying out their duties is assisted by the Supporting Organs of the Board of Commissioners consisting of the Secretariat of the Board of Commissioners, the Audit Committee and other committees if necessary. This refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. In addition, the existence of the Supporting Organs of the Board of Commissioners is also regulated in the Company's Articles of Association.

Currently, the Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) has 2 (two) Committees, which are the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee. The Committees of the Board of Commissioners have a charter that serves as a working guideline, namely the Audit Committee Charter, as well as the Nomination and Remuneration Committee charter. The Committee of the Board of Commissioners is tasked with assisting the Board of Commissioners in supervising the Company's strategic activities, both in planning, implementation, and accountability, as well as identifying issues that are considered important in the management of the company. In detail, the positions, duties, authorities, responsibilities and code of ethics of the Committee of the Board of Commissioners have been regulated in the Committee Charter.

Throughout 2021, the Board of Commissioners considers that the performance of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee have provided the required inputs and studies optimally. The two committees have intensively and effectively encouraged and ensured that the principles of GCG are carried out consistently, sustainably, and are cultured within the Company. This is in line with the spirit of the Company's People in realizing its Vision and Mission, so that Nindya Karya has the adaptability, resilience, and strong competitiveness at the national and regional levels. This will certainly benefit all stakeholders as well as the success of the Government's program in accelerating the development of national infrastructure for the advancement of the national economy.

The evaluation of the performance of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee is also carried out qualitatively, including the activeness of the committee in carrying out their duties, the documentation process, and the recommendations provided. Throughout 2021, the Audit Committee held 18 meetings and the Nomination and Remuneration Committee also held 4 meetings with an adjusted agenda. With all the duties that have been carried out by all committee members, allow the Board of Commissioners to express its appreciation and gratitude to all members of the Committee.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai keputusan Pemegang Saham, di tahun 2021 tidak terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In accordance with the Shareholders' decision, in 2021 there will be no change in the composition of the Board of Commissioners. Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2021 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Sugiyartanto	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 dan No. KEP-PS 06/PPA/0919 tanggal 13 September 2019 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 and No. KEP-PS 06/PPA/0919 September 13, 2019	13 September 2019-RUPS 2024 September 13, 2019-2024 GMS	Periode ke-1 1st Period
Rika Kiswardani	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-06/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-06/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated January 6, 2020	6 Januari 2020-RUPS 2025 January 6, 2020-2025 GMS	Periode ke-1 1st Period
Andar Perdana Widiastono	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-308/MBU/12/2018 dan No. SK-78/PPA/1218 tanggal 26 Desember 2018 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-06/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated January 6, 2020	26 Desember 2018-RUPS 2023 December 26, 2018-2023 GMS	Periode ke-1 1st Period

Segenap Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

The entire Board of Commissioners is committed to carrying out this mandate by always prioritizing the principles of good corporate governance for the benefit of the Shareholders and other Stakeholders.

Apresiasi

Berdasarkan kondisi makro ekonomi serta pertumbuhan iklim usaha di Indonesia, Dewan Komisaris memiliki optimisme bahwa Perseroan akan mampu mencapai pertumbuhan yang lebih baik di tahun mendatang. Atas seluruh capaian Perseroan selama tahun 2021, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, konsumen atau pelanggan, mitra bisnis, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaannya dalam mendukung kelangsungan usaha Perusahaan.

Appreciation

Based on macroeconomic conditions and the growing business climate in Indonesia, the Board of Commissioners is optimistic that the Company will be able to achieve better growth in the coming year. For all the Company's achievements throughout 2021, the Board of Commissioners would like to thank the Shareholders, consumers or customers, business partners, employees and other stakeholders for their trust in supporting the Company's business continuity.

Jakarta, Juli 2022/July 2022



Sugiyartanto
Komisaris Utama
President Commissioner



● Gedung Nindya Karya
Nindya Karya Building

Laporan Dewan Direksi

Board of Directors Report



Haedar A. Karim

Direktur Utama
President Director

“Harus diakui bahwa sepanjang tahun 2021 iklim usaha Nindya Karya masih terdampak pada kondisi yang tidak pasti dengan munculnya varian baru Covid-19, namun berbagai upaya yang telah dilakukan manajemen dengan membuat strategi bisnis dan beberapa skenario target yang akan dicapai tahun 2021.

It must be admitted that throughout 2021 Nindya Karya's business climate was still affected by uncertain conditions with the emergence of a new variant of Covid-19, however, various efforts have been made by management by making business strategies and several target scenarios to be achieved in 2021.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

PT Nindya Karya (Persero) senantiasa berkomitmen memberikan kinerja terbaiknya dalam rangka mewujudkan salah satu misinya, yaitu mengembangkan industri konstruksi dan investasi yang berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, kesehatan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Laporan tahunan ini merupakan bentuk komitmen manajemen dalam menjawab tantangan iklim usaha di tahun 2021 dengan menghadirkan kebijakan strategis dalam rangka menggapai hasil yang optimal.

Dear Shareholders and Stakeholders,

PT Nindya Karya (Persero) is always committed to providing the best performance in order to realize one of its missions, which is to develop a construction and investment industry that has global standards and is highly competitive by prioritizing customer satisfaction, occupational health and safety and continuous environmental sustainability. This annual report is a form of management's commitment in responding to the challenges of the business climate in 2021 by presenting strategic policies in order to achieve optimal results.

Perspektif Makro Ekonomi

Di tahun 2021, pandemi COVID-19 masih membayangi industri konstruksi dan infrastruktur Indonesia. Kebijakan ekonomi maupun kebijakan lain yang bertujuan untuk mengatasi pandemi di dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan dampak bagi jalannya usaha konstruksi dan infrastruktur. Kebijakan PPKM Darurat yang dijalankan oleh Pemerintah juga berdampak terhadap pembangunan proyek karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat dan larangan untuk berkerumun guna mengatasi pandemi COVID-19.

Meski demikian, kondisi industri konstruksi masih memiliki optimisme seiring dengan fokus Pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini juga didukung dengan anggaran infrastruktur dalam APBN Tahun 2021 yang sebesar Rp417,4 triliun yang tumbuh 48,4% di banding tahun sebelumnya, sebagaimana dikutip dari Informasi APBN 2021 yang dirilis oleh Kemenkeu bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Fokus alokasi anggaran dana APBN 2021 di bidang infrastruktur adalah untuk penguatan infrastruktur digital untuk mendorong efisiensi logistik maupun konektivitas, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, infrastruktur padat karya untuk kawasan industri dan pariwisata, serta penyelesaian kegiatan prioritas yang telah berlangsung sejak tahun 2020 dan tertunda akibat pandemi COVID-19.

Fokus pembangunan Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 menjadikan industri konstruksi masih memiliki potensi besar untuk tetap tumbuh di tengah tantangan. Untuk itu, Perseroan tetap optimistis dalam menyelesaikan proyek yang telah berjalan dengan menyesuaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang diambil. Selain mempercepat penyelesaian proyek, Perseroan juga berupaya untuk memperoleh proyek-proyek baru yang strategis, investasi proyek dengan sumber pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); CAPEX BUMN; Infrastruktur Asia dan kerjasama pendanaan dengan lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, agar dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus berkontribusi bagi Indonesia, tidak hanya saat pandemi tetapi juga di segala situasi mengingat ketatnya industri konstruksi di Indonesia.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 17 sektor menurut usaha, jasa keuangan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi sebesar -2,5% secara tahunan (yoy) pada triwulan IV-2021. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan jasa intermediasi perbankan akibat penurunan *spread* suku bunga referensi dan suku bunga kredit yang disertai dengan penurunan yang signifikan pada pendapatan sekunder pada bank umum. Di sisi lain, sektor industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan mendominasi PDB triwulan IV-2021 sebesar 63,80%. Adapun rinciannya, sektor industri tumbuh

Macroeconomic Perspective

In 2021, the COVID-19 pandemic is still looming over Indonesia's construction and infrastructure industry. Economic policies and other policies aimed at overcoming the domestic pandemic directly or indirectly also have an impact on the course of construction and infrastructure businesses. The Emergency PPKM policy implemented by the Government also has an impact on project development due to restrictions on community mobility and prohibitions on gathering to overcome the COVID-19 pandemic.

Nevertheless, the condition of the construction industry still has some optimism in line with the Government's focus on encouraging infrastructure development through the National Medium-term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 and the National Long-term Development Plan (RPJPN) 2005-2025. This is also supported by the infrastructure budget in the 2021 State Budget which amounted to Rp417.4 trillion, which grew 48.4% compared to the previous year, as quoted from the 2021 State Budget Information released by the Ministry of Finance entitled Accelerating Economic Recovery and Strengthening Reforms. The focus of the 2021 APBN budget allocation in the infrastructure sector is to strengthen digital infrastructure to encourage logistical efficiency and connectivity, the development of public health facilities and the provision of basic needs, labor-intensive infrastructure for industrial and tourism areas, as well as the completion of priority activities that have been ongoing since 2020 and postponed due to the COVID-19 pandemic.

The Government's development focus through the 2020-2024 RPJMN makes the construction industry still have great potential to continue to grow amidst challenges. To that end, the Company remains optimistic in completing ongoing projects by adjusting the Company's Work Plan and Budget (RKAP) taken. In addition to accelerating project completion, the Company also seeks to acquire strategic, project investment with Government and Business Entity Partnership (PPP) funding sources; CAPEX of SOEs; Asian infrastructure and funding partnerships with domestic and foreign financial institutions, new projects, in order that they can grow sustainably while contributing to Indonesia, not only during the pandemic but also in all situations given the tight construction industry in Indonesia.

Meanwhile, the Central Statistics Agency (BPS) noted that of the 17 sectors by business, financial services was the only business field that experienced a contraction of -2.5% on an annual basis (yoy) in the fourth quarter of 2021. This was due to delays in banking intermediation services due to a decrease in the spread of reference interest rates and lending rates accompanied by a significant decrease in secondary income at commercial banks. On the other hand, the industrial, trade, agriculture, construction and mining sectors dominated GDP in the fourth quarter of 2021 at 63.80%. As for the details, the industrial sector grew by

sebesar 4,92%, sektor perdagangan sebesar 5,56%, sektor pertanian sebesar 2,28%, sektor konstruksi 3,91%, dan sektor pertambangan sebesar 5,15%.

Inisiasi Kebijakan Strategis

Sebagai salah satu pelaku industri di bidang konstruksi, Perseroan melihat bahwa 2021 merupakan tahun momentum untuk pertumbuhan industri konstruksi, hal tersebut seiring dengan program pemulihan ekonomi yang digulirkan oleh Pemerintah, yang memberikan stimulus positif bagi para pelaku industri, khususnya di bidang konstruksi. Meski demikian, tidak sedikit para pelaku industri yang cukup hati-hati dalam menetapkan target pencapaian kinerja untuk tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah menyusun perencanaan strategis, investasi & operasi yang telah ditetapkan dalam RKAP 2021, antara lain:

1. Melanjutkan pertumbuhan Perseroan dengan melakukan investasi pada bidang-bidang strategis sesuai dengan anggaran dasar yang ditetapkan perusahaan baik melalui inisiasi bisnis, kerjasama kemitraan strategis, maupun tender investasi atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
2. Penetrasi pasar pada proyek-proyek EPC (Oil & Gas), energi terbarukan dan investasi melalui sinergi antar BUMN serta kerjasama dengan perusahaan asing.
3. Merencanakan pendanaan pada agenda investasi baik bersumber dari ekuitas, mitra strategis, maupun pendanaan kredit perbankan dan Lembaga keuangan.
4. Melakukan monitoring realisasi investasi yang sudah berjalan, evaluasi kinerja dan pencapaian terhadap target-target yang menjadi indikator realisasi investasi seperti IRR, NPV, PBP, PI.
5. Meningkatkan implementasi Program ERP, MS. Project, BIM, CCTV & Video Conference sebagai alat kerja tata kelola proyek.
6. Memanfaatkan inovasi metode kerja untuk memberi nilai tambah Perseroan.
7. Peningkatan kualitas proses penetapan PPP dengan mempertimbangkan unsur 5 M (Metode, Material, Main Power, Machine & Money).
8. Memaksimalkan pembiayaan internal Perseroan dengan mengutamakan *inflow* proyek.
9. Percepatan pekerjaan persiapan dan pelaksanaan proyek *carry over* dan proyek baru.
10. Monitoring dan evaluasi kegiatan operasional mingguan secara konsisten.

Menjawab Tantangan Pandemi COVID-19

Iklim usaha yang masih penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang masih terjadi di sepanjang tahun 2021 masih memberikan dampak terhadap sektor properti. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur nasional, tantangan utama yang dihadapi Perseroan di tengah masa pandemi COVID-19 adalah menjaga keberlangsungan usaha ke depan.

4.92%, the trade sector by 5.56%, the agricultural sector by 2.28%, the construction sector by 3.91%, and the mining sector by 5.15%.

Strategic Policy Initiation

As one of the industry players in the construction sector, the Company sees that 2021 is a year of momentum for the growth of the construction industry, this is in line with the economic recovery program launched by the Government, which provides a positive stimulus for industry players, especially in the construction sector. However, not a few industry players are quite careful in setting performance targets for 2021.

Based on this, the Company has prepared strategic plans, investments and operations that have been set out in the 2021 RKAP, including:

1. Continue the Company's growth by investing in strategic areas in accordance with the articles of association determined by the company, either through business initiation, strategic partnership cooperation, as well as investment tenders or Government and Business Entity Cooperation (PPP).
2. Market penetration in EPC (Oil & Gas) projects, renewable energy and investment through synergies between SOEs and cooperation with foreign companies.
3. Planning funding on the investment agenda, whether sourced from equity, strategic partners, as well as funding for bank loan and financial institutions.
4. Monitoring the realization of investments that are already running, evaluating performance and achieving targets that are indicators of investment realization such as IRR, NPV, PBP, PI.
5. Improving the implementation of the ERP, MS Program, Project, BIM, CCTV & Video Conference as project management work tools.
6. Utilizing innovative work methods to add value to the Company.
7. Improving the quality of the PPP determination process by considering the 5 M elements (Method, Material, Main Power, Machine & Money).
8. Maximizing the Company's internal financing by prioritizing project inflows.
9. Acceleration of work on the preparation and implementation of carry over projects and new projects.
10. Monitoring and evaluation of weekly operational activities consistently.

Responding to the Challenges of the COVID-19 Pandemic

The business climate which is still full of uncertainty due to the COVID-19 pandemic that will still occur throughout 2021 will still have an impact on the property sector. As a company engaged in the national infrastructure sector, the main challenge faced by the Company in the midst of the COVID-19 pandemic is maintaining business continuity going forward.

Dalam rangka menjawab tantangan usaha, Perseroan melakukan berbagai inovasi khususnya digitalisasi di bidang Operasional meliputi, penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP). Implementasi ERP merupakan salah satu solusi yang tepat bagi Nindya Karya saat ini dalam rangka menjawab tantangan-tantangan usaha seperti kompleksitas bisnis yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan kegiatan usaha dan pihak ketiga serta diperlukannya proses integrasi data secara cepat dan akurat agar mampu memberikan informasi secara *realtime* bagi Manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis.. Selain itu, dalam kegiatan operasional, Perseroan juga telah melakukan transformasi digital dengan mengaplikasikan *Building Information Modeling* (BIM) yang harus diterapkan secara konsisten pada setiap level proyek. Perseroan kemudian juga senantiasa mengidentifikasi Risiko korporasi mengacu pada ISO 31000 dan tetap memperkuat sistem pengendalian internal lainnya di bidang pemasaran, sumber daya manusia dan keuangan dengan dukungan sistem teknologi informasi yang handal.

Tantangan terbesar Perseroan dalam menghadapi iklim usaha yang kurang kondusif yaitu berkurangnya jumlah proyek APBN/APBD yang ditenderkan akibat pandemi COVID-19 dan adanya *refocusing* anggaran yang mempengaruhi cash flow Perseroan. Keadaan ini membuat manajemen hadir dengan solusi memperluas jaringan *owner* swasta secara selektif sesuai prinsip 5C dan senantiasa lebih aktif meningkatkan kolaborasi untuk mempercepat realisasi proyek KPBU, investasi dan kerjasama dengan perusahaan asing.

Di sisi lain, Perseroan juga melakukan Penetapan Pembatasan Kegiatan Perkantoran dengan melaksanakan tugas kedinasan sesuai jadwal *Work from Office* (WFO) dan *Work from Home* (WFH). Penetapan ini diatur dan dikeluarkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja dan bisnis serta karyawan berkomitmen tetap dapat bekerja secara efektif, efisien dan tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam bidang IT, di tahun 2021 Perseroan melanjutkan program transformasi digital kesisteman pada proses bisnis dalam rangka menciptakan proses bisnis yang terintegrasi dan *real time*. Adapun program yang dilakukan meliputi pengembangan *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang bertujuan untuk memantau kegiatan operasional Perseroan baik di sisi produksi, keuangan, pemenuhan kewajiban terhadap rekanan, pengendalian produksi serta *monitoring* untuk memberikan *decision support* secara *real time*.

Implementasi ERP juga merupakan wujud komitmen Nindya Karya dalam upaya mencapai Visi Perusahaan yaitu menjadi perusahaan global di bidang konstruksi dan investasi berbasis engineering yang terpercaya, terkemuka dan berkelanjutan. ERP Nindya Karya merupakan sistem yang dibangun secara *taylor made*, artinya sistem ini dibuat dan dikembangkan oleh Insan Nindya Karya sendiri dengan mengintegrasikan sistem informasi/modul-modul sebelumnya yang sudah ada serta disesuaikan dengan karakteristik bisnis Nindya Karya.

In order to respond to business challenges, the Company carries out various innovations, especially digitalization in the Operational field, including the implementation of Enterprise Resource Planning (ERP). ERP implementation is one of the right solutions for Nindya Karya at this time in order to answer business challenges such as high business complexity, close relationship with business activities and third parties as well as the need for fast and accurate data integration processes to be able to provide real-time information for Management as a basis for strategic decision making. In addition, in operational activities, the Company has also carried out digital transformation by applying Building Information Modeling (BIM) which must be applied consistently at every project level. The Company then also continuously identifies corporate risk referring to ISO 31000 and continues to strengthen other internal control systems in the fields of marketing, human resources and finance with the support of a reliable information technology system.

The Company's biggest challenges in facing an unfavorable business climate are the reduced number of tendered APBN/APBD projects due to the COVID-19 pandemic as well as the refocusing of the budget which affects the Company's cash flow. This situation makes management come up with a solution to selectively expand the network of private owners according to the 5C principle and always be more active in increasing collaboration to accelerate the realization of PPP projects, investment and cooperation with foreign companies.

On the other hand, the Company also determines Office Activity Restrictions by carrying out official duties according to the Work from Office (WFO) and Work from Home (WFH) schedules. This matter is regulated and issued by the leadership of each work unit and business as well as employees who are committed to being able to work effectively, efficiently and on time in completing their work.

In the IT sector, in 2021 the Company will continue the system digital transformation program on business processes in order to create integrated and real-time business processes. The programs carried out include the development of Enterprise Resource Planning (ERP) which aims to monitor the Company's operational activities in terms of production, finance, fulfillment of obligations to partners, production control and monitoring to provide decision support in real time.

ERP implementation is also a manifestation of Nindya Karya's commitment to achieving the Company's Vision, which is to become a trusted, reputable and sustainable global company in the field of construction and engineering-based investment. Nindya Karya's ERP is a system built on a tailor-made basis, meaning that this system was created and developed by Nindya Karya's employees themselves by integrating information systems/modules that already existed and adapted to Nindya Karya's business

Tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bahwa Human Capital Nindya mampu berinovasi dalam membuat suatu aplikasi yang begitu penting bagi Perusahaan serta menjadi salah satu wujud komitmen dalam transformasi digital di Perusahaan.

Dalam hal tata kelola, Perseroan mengembangkan beragam aplikasi yang mempermudah pekerjaan karyawan sehari-hari seperti *Business Organization Risk Nindya* (BORN) dalam aspek pengelolaan manajemen risiko, Nindya e-Procurement dalam aspek pengadaan barang dan jasa, *Nindya Excellent Talent* (NEXT) dalam bidang pengelolaan human capital, serta WBS & UPG online sebagai sarana pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran dan pelaporan gratifikasi.

Nindya juga berusaha meningkatkan perbaikan pada tata kelola IT yang berlandaskan pada *framework* COBIT 2019. Adapun berdasarkan hasil *Assesment IT Maturity level* yang dilakukan pada akhir TW IV, PT Nindya Karya berada pada level 3.33 (*define*), 0.33 point diatas persyaratan dari Kementerian BUMN. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk senantiasa *comply* terhadap ISMS (*Information Security Management System*) berdasarkan pada ISO/IEC 27001:2013, di mana pada triwulan IV 2021 PT Nindya Karya (Persero) berhasil mendapatkan sertifikat iso/iec 27001:2013 tanpa temuan minor dan major.

Kinerja Tahun 2021 dan Ekspansi Usaha

Harus diakui bahwa sepanjang tahun 2021 iklim usaha Nindya Karya masih terdampak pada kondisi yang tidak pasti dengan munculnya varian baru Covid-19, namun berbagai upaya yang telah dilakukan manajemen dengan membuat strategi bisnis dan beberapa skenario target yang akan dicapai tahun 2021. Perseroan optimis mampu menghadapi hal tersebut yang tercermin dari realisasi kinerja Perseroan telah melebihi target, oleh karena itu Perseroan tidak melakukan revisi target RKAP di sepanjang 2021. Di tahun 2021, Perseroan berhasil membukukan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, sebagai berikut:

Segmen Usaha Konstruksi

Pendapatan usaha segmen Konstruksi tahun 2021 tercatat sebesar Rp4,27 triliun, naik 22,24% atau setara dengan Rp777,53 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp3,49 triliun. Peningkatan pendapatan usaha tersebut berdampak terhadap meningkatnya laba usaha segmen Konstruksi yang di tahun 2021 tercatat sebesar Rp372,65 miliar naik 6,83% atau setara dengan Rp23,81 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp348,85 miliar.

Segmen Properti

Pendapatan usaha segmen Properti tahun 2021 tercatat sebesar Rp30,04 miliar, naik 71,77% atau setara dengan Rp12,55 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp17,48 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan di Hotel Horison Nindya Semarang sebagai dampak penurunan

characteristics. Of course, this is a matter of pride that Human Capital of Nindya is able to innovate in making an application that is very important for the Company and is a form of commitment to digital transformation in the Company.

In the aspects of governance, the Company developed various applications that facilitate the daily work of employees such as Business Organization Risk Nindya (BORN) in the aspect of risk management, Nindya e-Procurement in the aspect of procurement of goods and services, Nindya Excellent Talent (NEXT) in the field of management. human capital, as well as WBS & UPG online as a means of managing the violation reporting system and reporting gratuities.

Nindya is also trying to improve IT governance based on the 2019 COBIT framework. Based on the results of the IT Maturity Level Assessment conducted at the end of TW IV, PT Nindya Karya is at level 3.33 (*define*), 0.33 points above the requirements of the Ministry of SOEs. In addition, the Company is also committed to always comply with the ISMS (*Information Security Management System*) based on ISO/IEC 27001:2013, where in the fourth quarter of 2021 PT Nindya Karya (Persero) succeeded in obtaining the ISO/IEC 27001:2013 certificate without any minor and majors findings.

2021 Performance and Business Expansion

It must be admitted that throughout 2021 Nindya Karya's business climate was still affected by uncertain conditions with the emergence of a new variant of Covid-19, however, various efforts have been made by management to create a business strategy and several target scenarios to be achieved in 2021. The Company is optimistic that it will be able to face this is reflected in the realization that the Company's performance has exceeded its target, therefore the Company did not revise the RKAP target throughout 2021. In 2021, the Company succeeded in recording the acquisition of several substantial components as a benchmark in assessing performance, as follows:

Construction Business Segment

Construction segment operating revenue in 2021 was recorded at Rp4.27 trillion, an increase of 22.24% or equivalent to Rp777.53 billion from Rp3.49 trillion in 2020. The increase in operating income resulted in an increase in operating profit for the Construction segment, which in 2021 was recorded at Rp372.65 billion, an increase of 6.83% or equivalent to Rp23.81 billion from Rp348.85 billion in 2020.

Property Segment

Property segment operating revenue in 2021 was recorded at Rp30.04 billion, an increase of 71.77% or equivalent to Rp12.55 billion from Rp17.48 billion in 2020. This was due to the increase in revenue at Hotel Horison Nindya Semarang as a result of the decline in pandemic status

status pandemi mulai Semester II tahun 2021. Faktor lainnya adalah dimulainya pemasaran unit rumah di The Purinatha Cluster yang berlokasi di Cilangkap Kota Jakarta Timur, yang memberikan dampak cukup banyak pada peningkatan Pendapatan Usaha. Peningkatan pendapatan usaha tersebut berdampak terhadap meningkatnya laba usaha segmen Properti yang di tahun 2021 tercatat sebesar Rp3,18 miliar naik 146,02% atau setara dengan Rp1,89 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp1,29 miliar.

Segmen Sewa Alat

Pendapatan usaha segmen Sewa Alat tahun 2021 tercatat sebesar Rp8,12 miliar, turun 30,18% atau setara dengan Rp1,88 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp6,24 miliar.

Segmen Manufaktur

Pendapatan usaha segmen Manufaktur tahun 2021 tercatat sebesar Rp103,46 miliar, naik 7,16% atau setara dengan Rp6,91 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp96,55 miliar.

Di sisi lain, pada tahun 2021, Perseroan juga telah melakukan beberapa ekspansi bisnis, diantaranya; pengembangan bisnis di bidang pengolahan air bersih dengan mendirikan anak perusahaan baru yaitu Nindya Tirta Unggul (NTU) dan menjalin kerjasama dalam Negeri SPAM di Kawasan Industri Makassar dengan KIMA pada tanggal 1 Oktober 2021. Perseroan juga melakukan pengembangan bisnis di bidang energi dengan menjalin kerja sama dalam negeri yaitu PLTS Bekasi dengan Vena Energy pada tanggal 22 Juli 2021 dan EBT Sulawesi Selatan dengan Perusda Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Oktober 2021.

Guna meningkatkan potensi PT Nindya Karya (Persero) dalam memperoleh proyek di luar negeri, Perseroan telah berhasil menjalin 3 (tiga) kerjasama dengan perusahaan luar negeri dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021. MoU tersebut meliputi; Pembangunan Tram di Bali dan Surabaya dengan KIND Korea, LRT Bali dengan Korea Nasional Railway (KNR), dan Pembangunan hospital di Ukraina dengan Ucgén Project.

Analisis tentang Prospek Usaha

Merujuk kepada Laporan Perekonomian Indonesia 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Akselerasi perekonomian nasional di 2022 didukung oleh peningkatan mobilitas seiring dengan penyebaran COVID-19 yang lebih terkendali dan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor prioritas yang semakin luas disertai optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta stimulus kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus COVID-19 perlu terus diwaspadai.

starting in Semester II 2021. Another factor was the start of marketing for housing units at The Purinatha Cluster located in Cilangkap, East Jakarta City, which had a considerable impact on increasing Business Revenue.. The increase in operating income resulted in an increase in operating profit for the Property segment which in 2021 was recorded at Rp3.18 billion, an increase of 146.02% or equivalent to Rp1.89 billion from Rp1.29 billion in 2020.

Equipment Rental Segment

The operating income of the Equipment Rental segment in 2021 was recorded at Rp8.12 billion, a decrease of 30.18% or equivalent to Rp1.88 billion from 2020 of Rp6.24 billion.

Manufacturing Segment

Manufacturing segment operating revenue in 2021 was recorded at Rp103.46 billion, an increase of 7.16% or equivalent to Rp6.91 billion from 2020 of Rp96.55 billion.

On the other hand, in 2021, the Company has also carried out several business expansions, including; business development in the field of clean water treatment by establishing a new subsidiary, namely Nindya Tirta Unggul (NTU) and establishing domestic cooperation with SPAM in the Makassar Industrial Estate with KIMA on October 1, 2021. The company also develops business in the energy sector by establishing domestic cooperation named PLTS Bekasi with Vena Energy on July 22, 2021 and EBT South Sulawesi with Perusda South Sulawesi on October 19, 2021.

In order to increase the potential of PT Nindya Karya (Persero) in obtaining projects abroad, the Company has succeeded in establishing 3 (three) collaborations with foreign companies and signing a memorandum of understanding (MoU) which has been carried out throughout 2021. The MoU includes; Construction of Tram in Bali and Surabaya with KIND Korea, LRT Bali with Korea National Railway (KNR), and Construction of a hospital in Ukraine with Ucgén Project.

Business Prospect Analysis

Referring to the 2021 Indonesia Economic Report released by Bank Indonesia, it was stated that the Indonesian economy is predicted to increase more in 2022 in line with improving domestic demand. Acceleration of the national economy in 2022 is supported by increased mobility in step with spread of COVID-19 being more controlled and accelerated vaccinations, the opening of wider priority sectors accompanied by optimization of the implementation of the integrated policy package of the Financial System Stability Committee (KSSK), as well as the Government's fiscal policy stimulus and Bank Indonesia's policy mix. In this regard, Bank Indonesia predicts that Indonesia's economic growth in 2022 will reach 4.7-5.5%, in line with the acceleration of private consumption and investment, amid maintained government fiscal spending and exports, although the risk of an increase in COVID-19 cases is still a cause of concern.

Tahun 2022 menjadi masa yang penting dan juga sangat berat dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan fondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi diarahkan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi yang semakin efektif, *prudent* dan *sustainable*.

Prospek perekonomian nasional tahun 2022 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi COVID-19. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2022 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2021 dan 2022.

Strategi korporasi yang akan dijalankan pada tahun 2022, yaitu manajemen telah menetapkan strategi-strategi baru yang merupakan terobosan baru untuk merespon peluang pasar industri konstruksi. Seiring dengan penyelesaian restrukturisasi Perseroan yang akan dilakukan dengan pengalihan saham yang diambil bagian oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kembali kepada Negara dengan mekanisme dalam Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2021 dilakukan paling lambat tahun 2022. Penyelesaian tersebut selaras dengan rencana pembentukan holding PT Danareksa (Persero).

Dalam penyusunan RKAP 2022, target-target yang akan dicapai sudah diselaraskan dengan RJPP 2022-2026. Sesuai dengan sasaran RJPP 2022-2026, telah ditetapkan strategi di tahun 2022 dalam tahap *Growth*.

Tahap Pertumbuhan di tahun 2022 berupa perkuatan pada:

1. Bidang Sistem Operasional

Perkuatan bidang sistem operasional meliputi sistem pengendalian proyek dengan aplikasi ERP Proyek terintegrasi (*Cost Control-Procurement-Inventory-Kuangan*) yang harus diterapkan secara konsisten pada setiap level proyek, mengintegrasikan semua sistem yang ada menjadi sistem informasi yang handal. Merumuskan/mengidentifikasi manajemen risiko secara korporasi dengan mengacu pada ISO 31000: 2018 dan tetap memperkuat sistem pengendalian internal lainnya di bidang Pemasaran, *Human Capital* dan Keuangan dengan menggunakan sistem terintegrasi dan sistem teknologi informasi yang handal.

2. Bidang Human Capital

Sistem *Integrated Human Capital Management* (IHCM) di tahun 2022, diharapkan dapat lebih fokus pada penyiapan talenta-talenta Nindya dengan menyusun program pengembangan dan mengintegrasikannya sistem *Talent Management* dan *Performance Management System* dalam *Enterprise Resource Planning* (ERP).

The year 2022 is an important and also very challenging period in the process of accelerating the national economic recovery from the impact of the ongoing COVID-19 pandemic, as well as being a momentum to continue and strengthen the foundations of consolidation and reform. Consolidation is aimed at accelerating economic recovery that is more effective, prudent and sustainable.

The national economy outlook for 2022 is estimated to improve in line with the projected global economic recovery and the impact of fiscal support towards economic recovery acceleration, including support for controlling the COVID-19 pandemic. However, the macroeconomic framework for 2022 was developed with a high risk of uncertainty, so there is a possibility of divergence in global economic projections in 2021 and 2022.

With regards to the corporate strategy that will be implemented in 2022, the management has established novel strategies which are new breakthroughs to respond to market opportunities in the construction industry. Along with the completion of the restructuring of the Company which will be carried out by transferring the shares undertaken by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) back to the State through the mechanism in Government Regulation No. 89 of 2021 to be carried out in 2022 at the latest. The settlement is in line with the plan to establish PT Danareksa (Persero) as a holding company.

In the developing the 2022 RKAP, the targets to be achieved have been aligned with the 2022-2026 RJPP. In accordance with the RJPP 2022-2026 target, a strategy has been set for 2022 as the *Growth* stage.

The 2022 Growth Stage in 2022 will be in the form of fortification on:

1. Field of Operational System

Strengthening the field of operational system includes a project control system with an integrated project ERP application (*Cost Control-Procurement-Inventory-Finance*) which must be applied consistently at every project level, integrating all existing systems into a reliable information system. Formulate/identify risk management at corporate level with reference to ISO 31000: 2018 while continuing the strengthening of other internal control systems in the fields of Marketing, Human Capital and Finance through integrated systems and reliable information technology systems.

2. Field of Human Capital

The Integrated Human Capital Management (IHCM) system for 2022 is expected to focus more on preparing Nindya's talents by establishing a development program and integrating the Talent Management system and Performance Management System in Enterprise Resource Planning (ERP).

- a. Pengembangan Karyawan dilakukan secara berjenjang mulai dari *Management Trainee* sampai level *top management*, dalam penyiapan modul, pengembangan dan pelaksanaan pembelajarannya, Departemen *Human Capital* bekerjasama dengan *Nindya Learning Center* (NLC). NLC mengembangkan media pembelajaran dengan metode *virtual learning* dengan membuat *Learning Management System* (LMS).
- b. Tetap menjalankan Internalisasi *core value* AKHLAK sebagai upaya menanamkan nilai-nilai AKHLAK dalam pribadi dan cerminan dalam keseharian proses kerja karyawan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan Perseroan untuk jangka pendek dan BUMN dalam jangka panjangnya.

3. Bidang Perencanaan Strategis

Pada tahun 2022 manajemen merencanakan melakukan investasi dengan mendirikan dan atau mengakuisisi perusahaan menjadi anak perusahaan di bidang:

- a. Konstruksi & EPC
- b. Pengolahan Air Bersih
- c. Energi
- d. Infrastruktur
- e. Refinery
- f. Properti

- a. Employee development is carried out in stages starting from *Management Trainee* to top management level, in module preparation, development and implementation of learning, the *Human Capital* Department cooperates with the *Nindya Learning Center* (NLC). NLC develops learning media with virtual learning methods by creating a *Learning Management System* (LMS).
- b. Continue to carry out Internalization of the core values of AKHLAK as an effort to instil AKHLAK values in the person and a reflection in the daily work processes of employees, so as to support the growth of the Company in the short-term and BUMN in the long-term.

3. Field of Strategic Planning

In 2022 the management plans to invest by establishing and or acquiring a company to become a subsidiary in the fields of:

- a. Construction & EPC
- b. Water Management
- c. Energy
- d. Infrastructure
- e. Refinery
- f. Property

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di samping itu, sebagai BUMN yang menjadi agen pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Perseroan terus melakukan penyempurnaan sistem tata kelola Perusahaan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam hal kinerja dan kemampuan berorganisasi serta dalam rangka memastikan pemenuhan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Implementasi GCG di lingkup Perseroan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bidang usaha yang digeluti, termasuk regulasi industri dan ketentuan terbaru mengenai Perseroan Terbatas, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi Perseroan; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perseroan dengan pemangku kepentingan Internal dan eksternal, di mana aspek-aspek tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Good Corporate Governance Implementation

As a State-Owned Enterprise (SOE), the Company is fully committed to implementing GCG principles as the basis to create sustainable added value for stakeholders for both short and long term. In addition, as an SOE in the role of an agent of development for Indonesia's economic growth, the Company continues to improve its corporate governance system to reach higher levels in terms of performance and organizational ability as well as to ensure the fulfillment of the aspirations of all stakeholders.

The implementation of GCG within the Company refers to several laws and regulations that are in accordance with the field of business involved, including industry regulations and the latest provisions regarding Limited Liability Companies, especially Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This Law provides a comprehensive foundation for the management aspects of the Company's organization; starting from the rights and obligations of shareholders, duties and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to the Company's relationship with Internal and external stakeholders, where these aspects are also governed in the Company's Articles of Association.

Perseroan menetapkan kebijakan tata kelola yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara *Juncto* No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional Perseroan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*."

Perseroan memiliki kebijakan yang melibatkan seluruh Kepala Departemen Kantor Pusat serta Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko sebagai Penanggung Jawab Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terkait upaya sosialisasi GCG di lingkungan Perseroan. Seluruh Insan Nindya Karya bertanggung jawab langsung atas penerapan GCG di Perseroan khususnya pada unit bisnis masing-masing sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 0008/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 Tentang Perubahan Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Tim GCG) PT Nindya Karya (Persero). Kegiatan sosialisasi atas penerapan GCG dilakukan dengan membedakan ruang lingkup tugas yang ada yaitu sosialisasi dan Internalisasi pada Unit Kerja dan Unit Bisnis.

The Company establishes the applicable governance policy with reference to the Regulation of the State Ministry for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises *Juncto* No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, which states that "SOE are obliged to carry out the Company's operations by adhering to the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and *fairness*."

The Company has a policy that involves all Heads of Departments at the Headquarters as well as the Director of Finance, HR and Risk Management as the Person in Charge of the Monitoring Team for Good Corporate Governance (GCG) Implementation in relation to the socialization of GCG within the Company. All Nindya Karya personnel are directly responsible for the implementation of GCG in the Company, especially in their respective business units as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0008/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2021 dated January 29, 2021 concerning Changes in the Monitoring Team for the Good Corporate Governance Implementation (GCG Team) of PT Nindya Karya (Persero). Socialization of activities on GCG implementation are carried out by distinguishing the scope of existing tasks, namely socialization and internalization in the Work Unit and Business Unit.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2021, tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan Direksi. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Changes in Board of Directors Composition

In 2021, there were no changes in the composition of the Board of Directors membership. As such, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2021 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Haedar A. Karim	Direktur Utama President Director	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120	22 Januari 2020- RUPS 2025 January 22, 2020- 2025 GMS	Periode ke-1 1st Period
Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing & Development	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120	22 Januari 2020- RUPS 2025 January 22, 2020- 2025 GMS	Periode ke-1 1st Period
Firmansyah	Direktur Produksi dan HSE Director of Production & HSE	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-217/MBU/07/2018 dan No. KEP-PS 5/PPA/0718 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-217/MBU/07/2018 and No. KEP-PS 5/PPA/0718	22 Januari 2020- RUPS 2025 January 22, 2020- 2025 GMS	Periode ke-1 1st Period
Sri Haryanto	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HR and Risk Management	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120	22 Januari 2020- RUPS 2025 January 22, 2020- 2025 GMS	Periode ke-1 1st Period

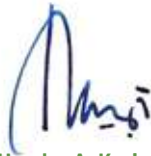
Apresiasi

Atas pencapaian yang ditorehkan di tahun 2021, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Pengawas, pemegang saham, Insan Perusahaan, regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, atas kerjasama yang telah tercipta. Semoga pencapaian ini akan menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus memaksimalkan kemampuannya dan menjadi fondasi bagi Perseroan untuk dapat tumbuh di masa yang akan datang. Kepada Pemegang Saham, Direksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami optimis, Nindya Karya dapat terus melaju menghadapi berbagai tantangan dengan meraih berbagai peluang positif untuk pertumbuhan kinerja yang optimal

Appreciation

For the achievements made in 2021, allow the Board of Directors to extend our respect and gratitude to the Supervisory Board, shareholders, Company Employees, regulators, customers, suppliers, and business partners, for the cooperation that has been created. Hopefully this achievement will inspire all parties to continue to maximize their capabilities and become the foundation for the Company to grow further in the future. To the Shareholders, the Board of Directors would like to thank you for the trust that has been given. We are optimistic that Nindya Karya can continue to face various challenges by seizing positive opportunities for optimal performance growth

Jakarta, Juli 2022/July 2022



Haedar A. Karim

Direktur Utama

President Director

Lembar Pengesahan Responsibility Statement

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information disclosed in the 2021 Annual Report of PT Nindya Karya (Persero) is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Juli 2022/July 2022

Dewan Komisaris Board of Commissioners



RIKA KISWARDANI
Komisaris
Commissioner

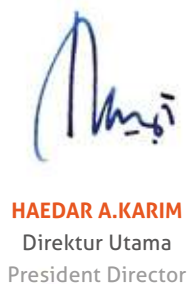


SUGIYARTANTO
Komisaris Utama
President Commissioner



ANDAR PERDANA WIDIASTONO
Komisaris
Commissioner

Direksi Board of Directors



HAEDAR A. KARIM
Direktur Utama
President Director



MOEHARMEIN ZEIN CHANIAGO
Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Director of Marketing and Development



FIRMANSYAH
Direktur Produksi dan HSE
Director of Production and HSE



SRI HARYANTO
Direktur Keuangan, SDM dan
Manajemen Risiko
Director of Finance, HR and
Risk Management



● PLBN Motamasin, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



Management



Hingga akhir tahun 2021, PT Nindya Karya (Persero) telah berhasil menjalin 3 (tiga) kerja sama dengan perusahaan luar negeri dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021.

Until the end of 2021, PT Nindya Karya (Persero) has succeeded in establishing 3 (three) collaborations with foreign companies and signing a memorandum of understanding (MoU) that has been carried out throughout 2021.

Informasi Umum

General Information



Nama Perusahaan
Company Name

PT Nindya Karya (Persero)



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

11 Maret 1960



Jaringan Usaha dan Entitas Anak
Business Network and Subsidiaries

6 (enam) Divisi Usaha dengan cakupan wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia dan Luar Negeri

6 (six) Business Divisions with work area coverage throughout Indonesia and abroad

Entitas anak:

Subsidiary

PT Nindya Beton dan PT Nindya Tirta Unggul



Jumlah Karyawan
Number of Employees

720 Orang/People



Kepemilikan Saham
Shareholding

- **Negara Republik Indonesia 1,00%**
- **PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 99,00%**



Modal Dasar
Authorized Capital

Rp874.615.000.000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Deposited Capital

Rp559.497.421.000



Jumlah Saham dan Portepel
Number of Shares and Portfolio

Jumlah Saham Portepel: 1.788.000 saham

Number of Portfolio Shares: 1,788,000 shares



Dasar Pendirian
Foundation

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi Jo. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 5 tanggal 11 Maret 1960.

Government Regulation No. 2 of 1960 concerning Determination of Dutch-Owned Contracting Companies Subject to Nationalization Jo. Decree of the Minister of Public Works and Electricity No. 5 March 11, 1960.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Nindya Karya"
Government Regulation No. 59 of 1961 dated March 29, 1961 concerning the Establishment of the State Company "Nindya Karya"

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1972, juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-91/MK/IV/3/1973 tentang penetapan modal PT Nindya Karya (Persero) tanggal 3 Maret 1973.

Government Regulation No. 11 of 1972, in conjunction with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-91/MK/IV/3/1973 concerning the determination of PT Nindya Karya (Persero) capital dated March 3, 1973.

Akta Pendirian No. 76 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Moeljadi S.H., Notaris di Jakarta. Government Regulation No. 2 of 1960

Deed of Establishment No. 76 dated March 15, 1973 made of Kartini Moeljadi S.H., Notary in Jakarta. Government Regulation No. 2 of 1960



Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Taufik Hidayat

Telp +6221 8093276

Fax +6221 8093105

Email nindyakarya@nindyakarya

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Letjend MT. Haryono, Kav. 22 Jakarta Timur 1360 DKI Jakarta, Indonesia

Kontak/Contact

Telepon +6221 809 3276 (Hunting)

Fax +6221 809 3105

Email nindyakarya@nindyakarya

Social Media Perusahaan
Social Media

Facebook [nindyakarya](#)

Instagram [@nindyakarya](#)

Twitter [@nindyakarya](#)

Youtube [nindyakarya](#)

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

PT Nindya Karya (Persero), disebut juga sebagai "Perusahaan" atau "Nindya", adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi yang menjalankan usaha di bidang jasa Konstruksi, Engineering Procurement Construction (EPC) dan Investasi. Perjalanan sejarah Perusahaan diawali dengan dinasionalisasikannya perusahaan konstruksi Hindia Belanda N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA yang telah berdiri sejak tahun 1877 pada tahun 1960.

Latar belakang nasionalisasi NEDAM menjadi NINDYA diawali pada periode akhir 1950, yang bertujuan untuk merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 di mana sumber daya negara dikelola dan dikuasai negara untuk kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia. Keinginan tersebut, diimplementasikan pemerintah dalam bentuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Hindia Belanda yang masih tersisa di wilayah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 1958. Selanjutnya, proses nasionalisasi NEDAM menjadi NINDYA dilakukan pemerintah melalui penerbitan PP No.2 tahun 1960 juncto Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 11 Maret 1960 yang menasionalisasi 9 (Sembilan) Perusahaan Pemborongan Hindia Belanda termasuk N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA. Peristiwa ini yang kemudian menjadi dasar penetapan tanggal berdirinya Perusahaan.

Tindak lanjut atas nasionalisasi NEDAM menjadi NINDYA dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan No.5 Tahun 1960 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dimana dilakukan perubahan nama N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA menjadi Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya. Penyesuaian nama dan nomenklatur Perusahaan kemudian terjadi beberapa kali yaitu pada 29 Maret 1961 melalui penerbitan PP No.59 tahun 1961 dari Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Negara (PN) Nindya Karya serta pada 15 Maret 1973 yang ditetapkan dalam akta No.76 menindaklanjuti diterbitkannya PP No.12 Tahun 1969 mengenai perubahan Perusahaan Negara menjadi Persero, PP No.11 Tahun 1972 dan Keputusan Menteri Keuangan No.91/MK/IV/3/1973 PN Nindya Karya berubah nama menjadi PT Nindya Karya (Persero) yang terus bertahan hingga saat ini.

PT Nindya Karya (Persero), also known as the "Company" or "Nindya", is a construction State-Owned Enterprise (BUMN) that operates in the fields of Construction, Engineering Procurement Construction (EPC) and Investment services. the history of the Company began with the nationalization of the Dutch East Indies construction company N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA which has been established since 1877 in 1960.

The background of the nationalization of NEDAM to become NINDYA began in the late 1950s, which aimed to realize the mandate of the 1945 Constitution in which state resources are managed and controlled by the state for the benefit of the lives of the Indonesian people. This desire was implemented by the government in the form of nationalization of companies belonging to the Dutch East Indies that remained in the territory of Indonesia through Government Regulation (PP) No.23 of 1958. Furthermore, the process of nationalizing NEDAM to NINDYA was carried out by the government through the issuance of PP No.2 of 1960 in conjunction with Decree of the Minister of Public Works and Energy on March 11, 1960 which nationalized 9 (Nine) Dutch East Indies Contracting Companies including N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA. This event later became the basis for determining the date of the Company's establishment.

The follow-up to the nationalization of NEDAM to NINDYA was carried out by issuing Decree No. 5 of 1960 by the Minister of Public Works and Energy, which changed the name of N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA became the State Building Company of Nindya Karya. the adjustment of the name and nomenclature of the Company then occurred several times, namely on March 29, 1961 through the issuance of PP No. PP No.12/1969 regarding the change of a State Company into a Persero, PP No.11/1972 and the Decree of the Minister of Finance No.91/MK/IV/3/1973 PN Nindya Karya changed its name to PT Nindya Karya (Persero) which continued to last until now.

Pada akhir Desember 2008 dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas bisnis, Perusahaan melakukan penyertaan saham pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JM KC) sebagai bentuk kegiatan investasi di luar jasa konstruksi pada salah satu pilar bisnis di segmen Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

At the end of December 2008 in order to develop and increase business capacity, the Company invested in PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JM KC) as a form of investment activity outside of construction services in one of the business pillars in the Toll Road Business Entity (BUJT) segment.

Pada tahun 2012, Perusahaan mencanangkan program "Nindya Reborn" guna menindaklanjuti penerbitan PP No.69 Tahun 2012 terkait program restrukturisasi yang mengarah pada perusahaan cerdas berbasis teknologi. Dalam program tersebut, Perusahaan melakukan beberapa transformasi seperti perubahan logo, visi dan misi, nilai budaya perusahaan, organisasi serta system pada kegiatan utama dan pendukung.

In 2012, the Company launched the "Nindya Reborn" program to follow up on the issuance of PP No. 69 of 2012 regarding the restructuring program that leads to technology-based smart companies. In the program, the Company carried out several transformations such as changes to the logo, vision and mission, corporate cultural values, organization and systems for main and supporting activities.

Program tersebut nyata-nyata mampu mendorong pertumbuhan kinerja bisnis Perusahaan yang tercermin dari beberapa peristiwa penting yang berhasil dicatatkan Perusahaan, yakni pada tahun 2018 untuk pertama kalinya sejak program restrukturisasi dimulai Perusahaan membayarkan deviden kepada pemegang saham. Di tahun yang sama, Perusahaan juga meresmikan Hotel di bawah Divisi Properti sebagai bentuk pemanfaatan aset tidak produktif menjadi lebih produktif dalam bentuk recurring income bagi Perusahaan.

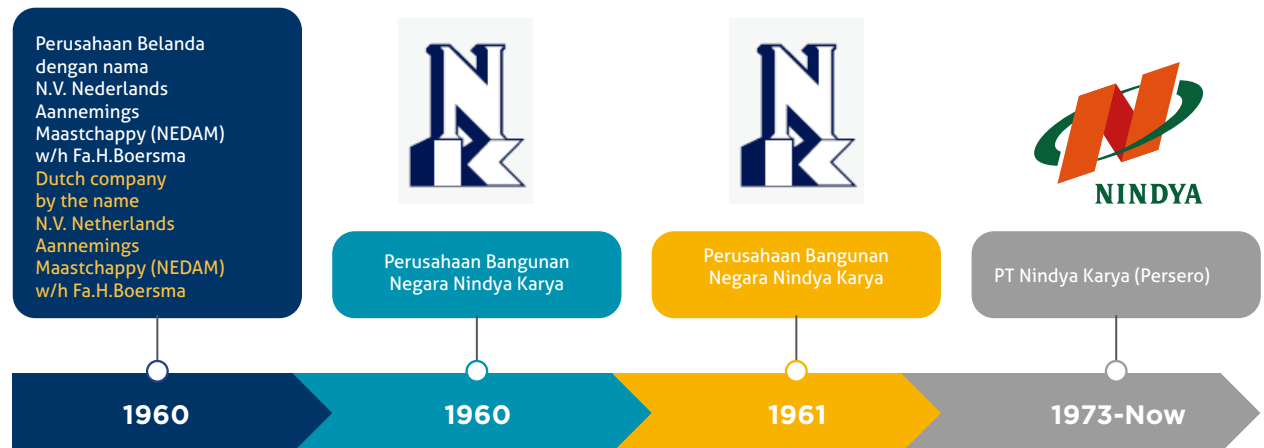
The program has in fact been able to encourage the growth of the Company's business performance as reflected in several important events that the Company has successfully recorded, namely in 2018 for the first time since the restructuring program began. the Company paid dividends to shareholders. In the same year, the Company also inaugurated Hotels under the Property Division as a form of utilizing unproductive assets to become more productive in the form of recurring income for the Company.

Pada tahun 2020 Nindya melakukan beberapa langkah penting diantaranya melakukan perubahan nilai utama Perusahaan menjadi Core Values AKHLAK yang bertujuan sebagai identitas dan perekat budaya kerja BUMN yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain melakukan perubahan terhadap nilai utama Perusahaan, Nindya juga melakukan perubahan Visi dan Misi Perusahaan serta Tagline Perusahaan sebagai bentuk respon Perusahaan terhadap kondisi perekonomian dan industri serta pengimplementasian Road Map Bisnis Nindya 2021-2025.

In 2020, Nindya took several important steps, including changing the Company's main values to Core Values AKHLAK which aims to be the identity and adhesive of the SOE's work culture that supports continuous performance improvement. In addition to making changes to the company's core values, Nindya also made changes to the Company's Vision and Mission as well as the Company's Tagline as a form of the Company's response to economic and industrial conditions as well as the implementation of the 2021-2025 Nindya Business Road Map.

Informasi tentang Perubahan Nama dan Status Badan Hukum Information about Change of Name and Legal Entity Status

Perubahan nama dan status badan hukum Perusahaan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:
Name changes and legal entity status of the Company are described in the table below:



Nama Name	Tahun Year	Dasar Hukum Legal Basis	Status Status
N.V. Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA N.V. Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA	1877	-	Perusahaan Swasta Hindia Belanda Dutch East Indies Private Company
Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya	1960	• PP No.2 tahun 1960 juncto Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 11 Maret 1960 • Surat Keputusan No.5 Tahun 1960 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga • PP No.2 tahun 1960 juncto Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 11 Maret 1960 • Surat Keputusan No.5 Tahun 1960 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga • PP No. 2 of 1960 juncto Decree • Minister of Public Works and Energy on March 11, 1960 • Decree No. 5 of 1960 by the Minister of Public Works and Manpower • PP No. 2 of 1960 juncto Decree • Minister of Public Works and Energy on March 11, 1960 • Decree No. 5 of 1960 by the Minister of Public Works and Manpower	Perusahaan Negara State Company
Perusahaan Negara Nindya Karya	1961	PP No.59 tahun 1961 PP No. 59 of 1961	Perusahaan Negara State Company
PT Nindya Karya (Persero)	1973	• PP No.11 Tahun 1972 dan Keputusan Menteri Keuangan No.91/MK/IV/3/1973 • Akta No.76 15 Maret 1973 • PP No.11 of 1972 and Ministerial Decree • Finance No.91/MK/IV/3/1973 • Deed No.76 March 15, 1973	Persero Company

Bidang Usaha

Business Fields

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan terakhir yang disahkan melalui Akta No. 68 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Khairina S.H., Notaris di Jakarta, ruang lingkup bidang usaha Perusahaan meliputi jasa konstruksi yang terdiri dari konstruksi sipil, mekanikal elektrik termasuk jaringannya, radio, telekomunikasi dan instrumentasi perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan; perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi; layanan jasa konsultan manajemen dan rekayasa industri; building management; pabrikasi bahan komponen bangunan, komponen dan peralatan konstruksi, barang logam, kayu, karet dan plastik; agro industri; keagenan bahan bangunan dan konstruksi; keagenan penjualan ruangan perkantoran dan hunian (condominium); perdagangan umum; penyewaan peralatan komunikasi; pengelolaan kawasan; system development; jasa bidang teknologi informasi; peningkatan bidang jasa konstruksi; pengembang.

Business Activities Based on Articles of Association

In accordance with Article 3 of the Company's latest Articles of Association which was ratified by Deed No. 68 dated January 31, 2020, drawn up before Khairina S.H., Notary in Jakarta, the scope of the Company's business includes construction services consisting of civil construction, mechanical and electrical including network, radio, telecommunications and instrumentation repair/maintenance/renovation of buildings; planning and supervision of construction works; industrial engineering and management consulting services; building management; manufacture of building components, construction components and equipment, metal, wood, rubber and plastic goods; agro industry; building and construction materials agency; sales agency for office and residential space (condominium); general trading; rental of communication equipment; area management; systems development; information technology services; improvement in the field of construction services; developer.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Hingga 2021

Hingga 31 Desember 2021, bidang-bidang usaha yang telah dijalankan Perusahaan dan telah disesuaikan segmentasinya pada pengungkapan laporan keuangan Perusahaan meliputi:

Business Activities in 2021

As of December 31, 2021, the business fields that have been carried out by the Company and have been segmented according to the disclosure of the Company's financial statements include:



Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk pembangkit listrik, seperti pembangunan PLTA, PLTMH, PLTS dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Utilization of Renewable Energy for power plants, such as the construction of PLTA, MHP, PLTS and Drinking Water Supply System (SPAM).



Mengembangkan usaha property/realty termasuk di antaranya Perhotelan dan SentraBisnis.
Develop property/realty businesses including Hospitality and Business Centers.



Melakukan usaha di bidang:
• Industri (Beton Pracetak Readymix)
• Pabrikasi (Beton Pracetak, Bahan & Komponen Bangunan, Komponen & Peralatan Kontruksi)

Doing business in the fields of:
• Industry (Readymix Precast Concrete)
• Fabrication (Precast Concrete, Building Materials & Components, Construction Components & Equipment)



• Gedung, Bandara, Jalan raya, Jembatan, rel Kereta Api, Pelabuhan, Irigasi.
• Proyek EPC, Piping, Pabrik, SPBG, mekanikal Elektrikal, Power Plants.
• Buildings, Airports, Highways, Bridges, Railways, Ports, Irrigation.
• EPC Project, Piping, Plant, SPBG, Mechanical Electrical, Power Plants.



Membangun dan mengoperasikan jalan.
To Build and operate toll roads.

Berikut hasil karya Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2021

Guna merealisasikan Visi PT Nindya Karya (Persero) untuk menjadi perusahaan global di bidang konstruksi dan investasi berbasis engineering yang terpercaya, terkemuka dan berkelanjutan dibutuhkan validasi berupa rekam jejak PT Nindya Karya (Persero) dalam menangani proyek-proyek prestisius dan berkualitas di luar negeri baik dalam bentuk KSO maupun pendanaan.

Hingga akhir tahun 2021, PT Nindya Karya (Persero) telah berhasil menjalin 2 (dua) kerjasama dengan perusahaan luar negeri dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021.

Pertama, PT Nindya Karya (Persero) menjalin kerjasama dengan BUMN serta perusahaan luar negeri melalui Penandatanganan Perjanjian Studi Bersama (Joint Study Agreement/JSA) untuk pembangunan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit Pengolahan II Dumai-Riau bersama dengan PT Pertamina (Persero), serta Perusahaan-perusahaan Korea Selatan antara lain, LOTTE Engineering & Construction, KOREIT dan DH Global.

Kedua, Telah dilakukan penandatanganan MOU oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Ucgen Proje pada 5 November 2021 Disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki.

Kemudian, Perseroan juga telah melakukan kerjasama bisnis dengan sesama BUMN dalam rangka membangun sinergi tentunya memiliki manfaat yang signifikan bagi Perseroan. Pada lingkup internal, hal ini akan berdampak bagi optimalisasi sumber daya secara efisien serta percepatan terpenuhinya visi Perseroan. Sedangkan pada lingkup eksternal, amanah BUMN untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

The following are the results of the Company's work until the end of 2021

In order to realize the vision of PT Nindya Karya (Persero) to become a global company in the field of construction and engineering-based investment that is trusted, reputable and sustainable, validation is needed in the form of PT Nindya Karya (Persero)'s track record in handling prestigious and quality projects abroad both in terms of form of KSO and funding.

Until the end of 2021, PT Nindya Karya (Persero) has succeeded in establishing 2 (two) collaborations with foreign companies and signing a memorandum of understanding (MoU) that has been carried out throughout 2021.

First, PT Nindya Karya (Persero) cooperates with SOEs and foreign companies through the signing of a Joint Study Agreement (JSA) for the construction of the Refinery Development Master Plan (RDMP) Processing Unit II Dumai-Riau together with PT Pertamina (Persero).), as well as South Korean companies including LOTTE Engineering & Construction, KOREIT and DH Global.

Second, the signing of an MOU by PT Nindya Karya (Persero) with Ucgen Project on November 5, 2021, witnessed directly by the Minister of PUPR of the Republic of Indonesia, Basuki Hadimuljono, Ambassador of the Republic of Indonesia to Turkey.

Then, the Company has also carried out business cooperation with fellow SOEs in order to build synergies which certainly have significant benefits for the Company. In the internal scope, this will have an impact on the efficient optimization of resources and the acceleration of the fulfillment of the Company's vision. Meanwhile, in the external scope, the mandate of BUMN to contribute to the welfare of the community can be realized properly.

Sepanjang tahun 2021 kerjasama dengan sesama BUMN yang juga telah dilakukan Perseroan diantara:

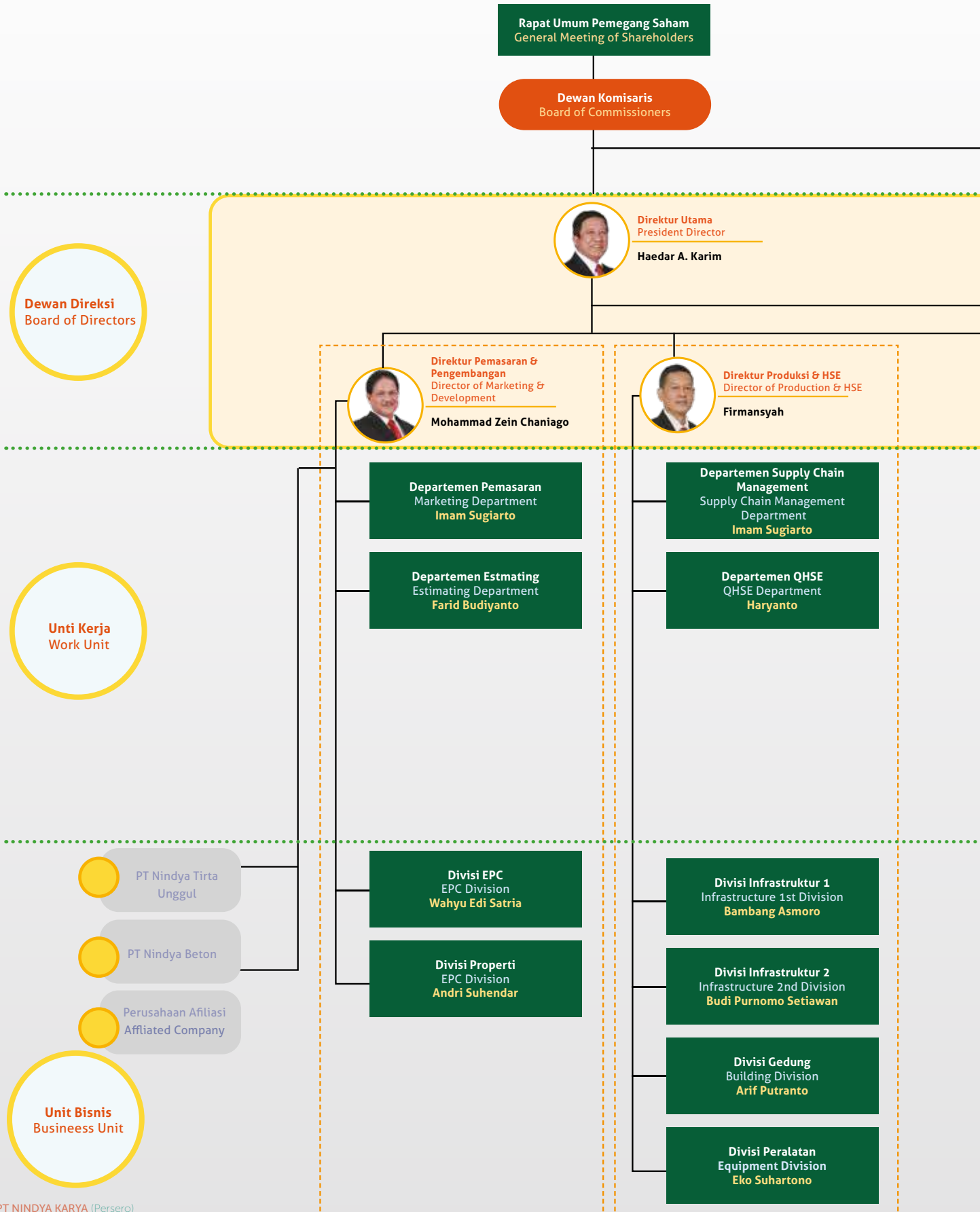
1. Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi Reinforcement Dermaga Konstruksi Tahap 1 Pupuk Kalimantan Timur.
2. Pembangunan Gedung Disaster Recovery Centre (DRC) di Injoko Surabaya.
3. Pembangunan Jetty PLTMGU Lombok Peaker.
4. Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Khusus Otak & Jantung Royal Biringkanaya Makassar.
5. Design and Build Pekerjaan Penyiapan Lahan Bali Tenten Di Pelabuhan Benoa (KSO NK 60% & IPA 30%).
6. Pengembangan Kawasan Pariwisata & Gedung MICE-ITDC, Labuan Bajo, NTT (JO NK 60% & BRL 40%).
7. Pengadaan Jasa Konstruksi, Revitalisasi Sistem Kelistrikan, SCADA, dan Pembangunan Fasilitas Bawah Tanah di Istana Negara Jakarta (JO NK 70%: MJS 30%).
8. Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 (JO NK 30% & Adhi 70%).
9. Works for PASIGALA raw water transmission system rehabilitation (Paket 2); Kab. Sigi; Sulawesi Tengah; 0 Km; 0 m³/dtk; F; K; MYC (JONK 25%, Adhi 50% & BPR 25%).
10. Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoang Kab. Minahasa Utara Paket III (JO Wika 65% & NK 35%).
11. Pembangunan Indoor Multifunction Stadium Kejuaraan Dunia Bola Basket Tahun 2023 (KSO NK 30%).

Throughout 2021 cooperation with fellow SOEs that the Company has also carried out include:

1. Construction Services Project for Reinforcement Pier Construction Phase 1 of Pupuk Kalimantan Timur.
2. Construction of the Disaster Recovery Center (DRC) building in Injoko Surabaya.
3. Construction of Jetty PLTMGU Lombok Peaker.
4. Construction of the Royal Biringkanaya Heart & Brain Special Hospital, Makassar.
5. Design and Build Bali Tenten Land Preparation Works at Benoa Harbor (KSO NK 60% & IPA 30%).
6. Development of Tourism Area & MICE-ITDC Building, Labuan Bajo, NTT (JO NK 60% & BRL 40%).
7. Procurement of Construction Services, Revitalization of the Electricity System, SCADA, and Construction of Underground Facilities at the Jakarta State Palace (JO NK 70%: MJS 30%).
8. Bekasi River Flood Control Package 1 (JO NK 30% & Adhi 70%).
9. Works for PASIGALA raw water transmission system rehabilitation (Package 2); Regency. Sigi; Central Sulawesi; 0 Km; 0 m³/s; F; K; MYC (JONK 25%, Adhi 50% & BPR 25%).
10. Construction of the Kuwil Kawangkoang Dam, Kab. North Minahasa Package III (JO Wika 65% & NK 35%).
11. Construction of the 2023 World Basketball World Championship Indoor Multifunction Stadium (KSO NK 30%).

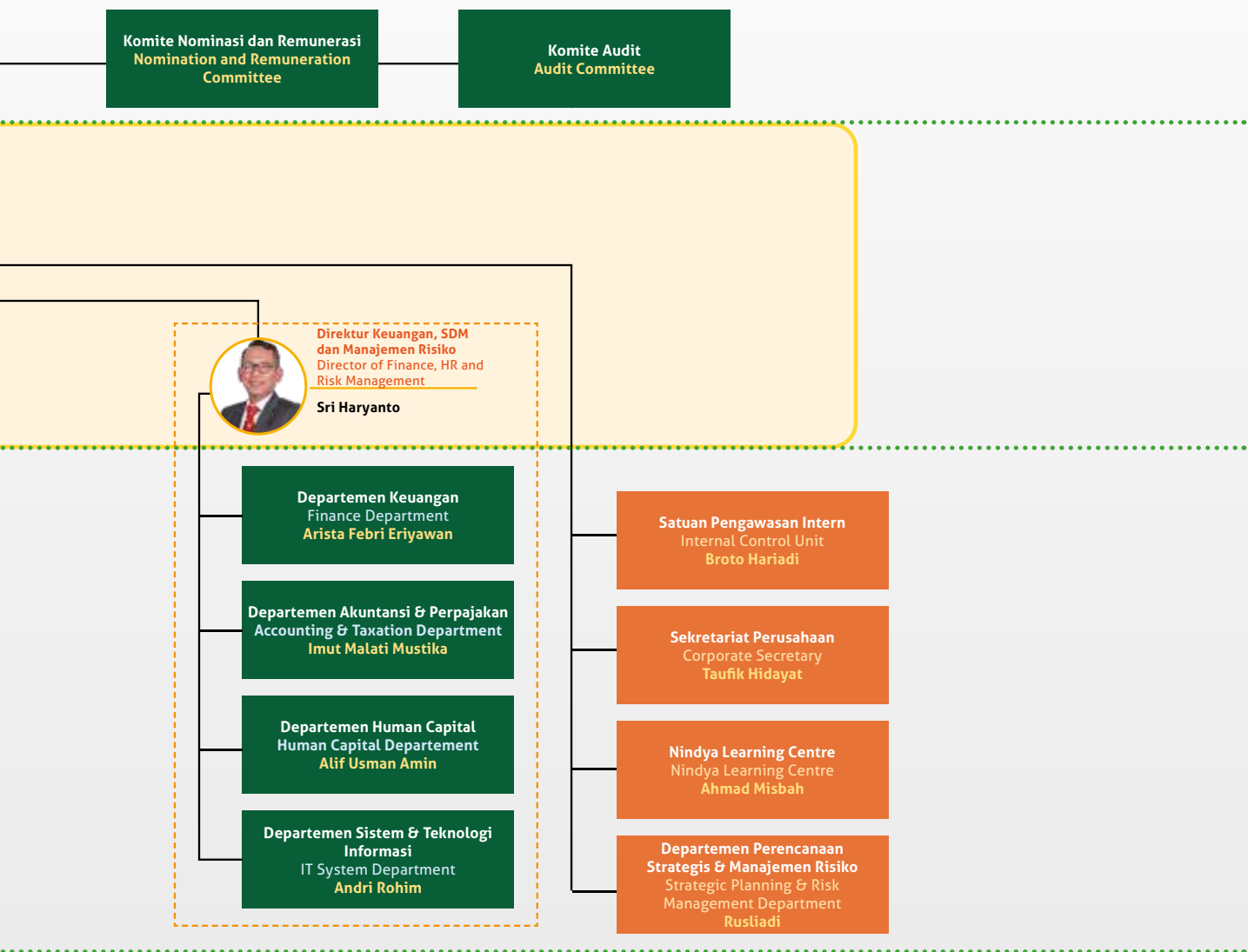
Struktur Organisasi

Organizational Structure



Mengacu pada Keputusan Direksi No. 0001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan PT Nindya Karya (Persero), Struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Referring to the Decree of the Board of Directors No. 0001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 dated January 5, 2021 concerning Determination of the Organizational Structure of PT Nindya Karya (Persero), the organizational structure of the Company as of December 31, 2021 is as follows:



Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Company Values

VISI

Vision

Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan Investasi berbasis Engineering yang Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan

To become a Global Company in the Field of Construction and Engineering-based Investment that is Trusted, Leading and Sustainable

MISI

Mission

1. Meningkatkan nilai tambah bagi (*Stakeholders*) secara berkelanjutan berbasis Excellence Engineering dengan inovasi serta Human Capital yang unggul dan berakhlak.
2. Mengembangkan industri konstruksi dan investasi yang berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, kesehatan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
1. Increasing added value for (*Stakeholders*) in a sustainable manner based on Excellence Engineering with innovation as well as superior and moral Human Capital.
2. Develop a construction and investment industry that has global standards and is highly competitive by prioritizing customer satisfaction, occupational health and safety and sustainable environmental sustainability.

Tagline

Tagline

Toward The Excellent

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan telah mengalami perubahan dan telah dikaji dan disetujui oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 0047/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2016 tentang Visi, Misi, Nilai-nilai Utama Budaya (*Core Values*), dan Slogan PT Nindya Karya (Persero) tanggal 22 Januari 2016. Selain itu, Visi, Misi dan Budaya Perusahaan dikaji secara periodik tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 dan periodik 5 (lima) tahunan melalui penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017-2021.

Vision, Mission, and Corporate Culture have undergone changes and have been reviewed and approved by the Board of Directors based on Decree No. 0047/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2016 concerning Vision, Mission, Core Values, and Slogans of PT Nindya Karya (Persero) dated January 22, 2016. In addition, the Vision, Mission and Corporate Culture are reviewed annually through the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2018 and periodic 5 (five) years through the preparation of the Company's Long-term Plan (RJPP) 2017-2021.



Nilai-Nilai Utama Budaya Perusahaan

Key Values of Corporate Culture

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 tentang Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) PT Nindya Karya (Persero) tanggal 15 September 2020 Perusahaan menetapkan dan memberlakukan *Core Values* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 Concerning PT Nindya Karya (Persero) Corporate Culture on September 15, 2020 The Company establishes and enforces Core Values as described below:

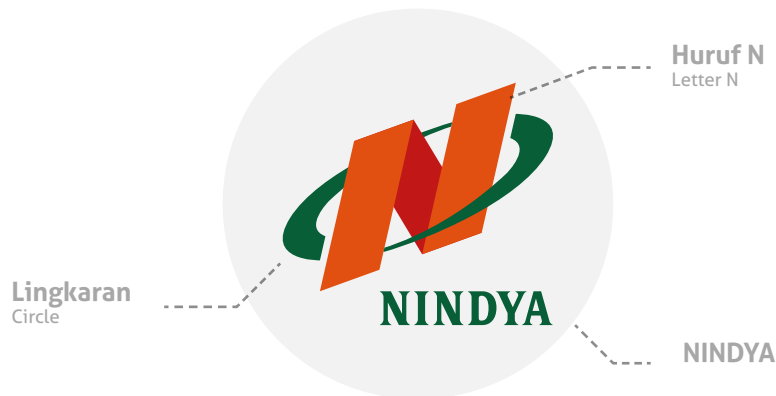
AKHLAK

TATA NILAI VALUE	MAKNA MEANING	PERILAKU UTAMA MAIN ATTITUDE
A AMANAH TRUSTWORTHY	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Firmly uphold the given trust.	- Memenuhi janji dan komitmen. - Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. - Berpegang teguh kepada kejujuran, nilai moral dan etika. - Fulfilling promise and commitment. - Responsible over duties, decision and actions taken. - Uphold honesty, moral and ethical values.
K KOMPETEN COMPETENT	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Continuous learning and develop capacity.	- Kreatif dan inovatif serta meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. - Memberikan solusi terbaik dan membantu orang lain belajar. - Disiplin dalam menyelesaikan tugas dan bekerja tuntas dengan kualitas terbaik. - Creative and innovative as well as improving individual competency to answer the changing challenges. - Provide the best solution and help others to learn. - Discipline in fulfilling the duties and work completely with excellent quality.
H HARMONIS HARMONIOUS	Saling peduli dan menghargai perbedaan. Care each other and respect diversity.	- Menghargai pendapat, ide atau gagasan setiap orang apapun latar belakangnya. - Peduli dan suka menolong orang lain. - Menghargai kontribusi setiap orang. - Respect everyone's opinions, ideas or ideas regardless of their background. - Care and help others. - Appreciate everyone's contribution.
L LOYAL LOYAL	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dedicated and prioritizing interests of the Nation and State.	- Menjaga nama baik Bangsa dan Negara. - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang baik. - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. - Maintain reputation of the Nation and State. - Willing to sacrifice to achieve a good cause. - Obey the leaders as long not violating the law and ethics.
A ADAPTIF ADAPTIVE	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Continuous Innovation and enthusiast in driving or responding to any change.	- Bergerak cepat, lincah dan pantang menyerah dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik. - Sigap dan terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi untuk menghasilkan yang lebih baik. - Gigih, tangguh dan bertindak proaktif. - Moving Fast, agile and never give up in facing challenges to be better. - Responsive and continuous improvement in following the technology advance to produce better ones. - Persistent, tough and proactive.
K KOLABORATIF COLLABORATIVE	Membangun kerja sama yang sinergis. Build synergic partnership.	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. - Terbuka dalam bekerja sama secara sinergis untuk menghasilkan nilai tambah. - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama yang lebih baik. - Give opportunity to everyone to contribute. - Open to cooperate synergically to gain added-values. - Drive utilization of various resources for a better common goals.

Makna Logo Perusahaan

Meaning of Company Logo

Logo Nindya Karya telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN No. S-454/MBU/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Persetujuan Perubahan Logo PT Nindya Karya (Persero), dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000433254 dengan jangka waktu 3 Oktober 2012-3 Oktober 2022 yang dapat diperpanjang kembali.



Huruf N Letter N

- Merupakan singkatan dari NINDYA.
- "N" berbentuk miring naik ke atas dan tidak terputus melambangkan pertumbuhan kinerja yang dinamis dan terus meningkat lebih tinggi.
- Stands for NINDYA.
- "N" shaped sloping upward and uninterrupted symbolizes dynamic performance growth and continues to increase.



Lingkaran Circle

- NINDYA berbisnis secara etis memenuhi koridor, mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- Melambangkan *teamwork* yang solid dalam satu visi dan misi bersama.
- Lingkaran miring ke atas, melambangkan NINDYA berbisnis di dunia yang dinamis dan terus tumbuh.
- NINDYA ikut peduli menjaga bumi tetap hijau (ramah lingkungan).
- NINDYA does business ethically in compliance with the corridors, complies with applicable laws and regulations and applies GCG principles.
- Symbolizes solid teamwork in a shared vision and mission.
- The circle tilts upwards, symbolizing NINDYA doing business in a dynamic and growing world.
- NINDYA is concerned about keeping the earth green (environmentally friendly).



NINDYA

Dalam bahasa Sanskerta berarti "Sempurna".
In Sanskrit it means "Perfect".



HIJAU/GREEN

Membangkitkan energi dan mampu memberikan efek menyegarkan, menenangkan, menyeimbangkan emosi, menimbulkan rasa empati terhadap orang lain, meredam stress, memberi rasa aman dan perlindungan.
Generating energy and able to provide a refreshing, calming effect, balance emotions, generate empathy for others, reduce stress, provide a sense of security and protection.



MERAH/RED

Dapat membangkitkan energi, hangat, komunikatif, optimis, antusias dan bersemangat, berkaitan dengan ambisi dan mendorong agresivitas.
Can generate energy, warm, communicative, optimistic, enthusiastic and passionate, associated with ambition and encourage aggressiveness.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Sugiyartanto

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan: 13 September 2019-RUPS 2024, Periode ke-1
Term of Office: September 13, 2019-GMS 2024, 1st Period

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 61 tahun per 31 Desember 2021 Lahir di Surakarta, 1961	Indonesian citizen Age 61 years as of December 31, 2021 Born in Surakarta, 1961
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Nindya Karya (Persero) sejak tanggal 13 September 2019 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 dan No. KEP-PS 06/PPA/0919 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Nindya Karya (Persero).	Appointed as President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero) since September 13, 2019 through the Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 and No. KEP-PS 06/PPA/0919 dated 13 September 2019 concerning the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero).
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S1 Teknik Sipil, Universitas Gajah Mada (1987) 2. S2 Teknik Transportasi, Universitas Gajah Mada (2001)	1. Bachelor of Civil Engineering, Gajah Mada University (1987) 2. Master of Transportation Engineering, Gajah Mada University (2001)
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR (2020-Sekarang) 2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (2018-2020) 3. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (2017-2018) 4. Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional XI Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (2016-2017) 5. Kepala Sub-Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (2012-2015)	1. Head of the Human Resources Development Agency, Ministry of PUPR (2020-present) 2. Director General of Highways, Ministry of PUPR (2018-2020) 3. Director of Freeways, Urban and Regional Road Facilitation, Directorate General of Highways, Ministry of PUPR (2017-2018) 4. Head of Banjarmasin XI National Road Development Center, Directorate General of Highways, Ministry of PUPR (2016-2017) 5. Head of Sub-Directorate General of Highways, Ministry of PUPR (2012-2015)
Jabatan Sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Luar Perusahaan Position as Board of Commissioners and Directors Outside the Company	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).	He currently serves as Head of the Human Resources Development Agency of the Ministry of Public Works, Public Housing (PUPR).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Sugiyartanto memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian PUPR Republik Indonesia yang memiliki hubungan berelasi dengan Negara Republik Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Sugiyartanto sebagai Komisaris Utama Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Sugiyartanto tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.	Sugiyartanto has an affiliated relationship with the Major/Controlling Shareholder, through his position at the Ministry of PUPR of the Republic of Indonesia which has a relationship with the Republic of Indonesia as the ultimate owner entity of the Company. Sugiyartanto's position as the Company's President Commissioner has passed a fit and proper test. In addition, Sugiyartanto has no financial and family affiliation with other Board of Commissioners or Board of Directors.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.	The Company does not have a Management Share Ownership Program and does not trade its shares to the public. Thus, there is no Board of Commissioners that owns the Company's shares.



Rika Kiswardani

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 6 Januari 2020-RUPS 2025, Periode ke-1
Term of Office: January 6, 2020-AGM 2025, 1st Period

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 53 tahun per 31 Desember 2021 Lahir di Yogyakarta, 9 Desember 1958	Indonesian citizen Age 53 years as of December 31, 2021 Born in Yogyakarta, December 9, 1958
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai Komisaris PT Nindya Karya (Persero) sejak 6 Januari 2020 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-06/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Nindya Karya (Persero).	Appointed as Commissioner of PT Nindya Karya (Persero) since January 6, 2020 through the Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-06/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated January 6, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero).
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S1, Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, (1993) 2. S2, Policy and Administration, Flinders University of South Australia, (2000)	1. S1, State Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University, (1993) 2. S2, Policy and Administration, Flinders University of South Australia, (2000)
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Deputy Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, (2018-sekarang) 2. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, (2012-2018)	1. Deputy for Palace Administration and Management, Presidential Secretariat, Ministry of State Secretariat, (2018-present) 2. Head of the Bureau of Foreign Technical Cooperation, Ministry of State Secretariat, (2012-2018)
Jabatan Sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Luar Perusahaan Position as Board of Commissioners and Directors Outside the Company	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Saat ini menjabat sebagai Deputy Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.	Currently serves as Deputy for Palace Administration and Management, Presidential Secretariat, Ministry of State Secretariat.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Rika Kiswardani memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Sekretariat Presiden RI yang memiliki hubungan berelasi dengan Negara Republik Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Rika Kiswardani sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Rika Kiswardani tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.	Rika Kiswardani has an affiliated relationship with the Major/Controlling Shareholder, through his position at the Secretariat of the President of the Republic of Indonesia which has a relationship with the Republic of Indonesia as the ultimate owner entity of the Company. Rika Kiswardani's position as Commissioner of the Company has passed a fit and proper test. In addition, Rika Kiswardani has no financial and family affiliation with other Board of Commissioners or Board of Directors.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.	The Company does not have a Management Share Ownership Program and does not trade its shares to the public. Thus, there is no Board of Commissioners that owns the Company's shares.



Andar Perdana Widiastono

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 26 Desember 2018-RUPS 2023, Periode ke-1
Term of Office: 26 December 2018-2023 GMS, 1st Periodt

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 63 tahun per 31 Desember 2021 Lahir di Banyuwangi-Jawa Timur, 28 Oktober 1958	Indonesian citizen Age 63 years as of December 31, 2021 Born in Banyuwangi-East Java, October 28, 1958
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai Komisaris PT Nindya Karya (Persero) sejak tanggal 26 Desember 2018 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-308/MBU/12/2018 dan No. SK-78/PPA/1218 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Nindya Karya (Persero).	Appointed as Commissioner of PT Nindya Karya (Persero) since December 26, 2018 through the Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-308/MBU/12/2018 and No. SK-78/PPA/1218 dated December 26, 2018 concerning the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero).
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S1 Teknik Sipil, Universitas Gajah Mada (1987) 2. S2 Teknik Transportasi, Universitas Gajah Mada (2001)	1. S1 Civil Law Department, Brawijaya University Malang (1984) 2. Masters Degree in Law from Brawijaya University Malang (2003)
Pengalaman Kerja Work Experience	Berkarier di Kejaksaan Republik Indonesia sejak tahun 1985. Terakhir menjabat sebagai Direktur Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL) sejak November 2017.	Career in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia since 1985. Most recently served as Director of the Directorate of Ideology, Politics, Defense and Security of the Deputy Attorney General for Intelligence (JAMINTEL) since November 2017.
Jabatan Sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Luar Perusahaan Position as Board of Commissioners and Directors Outside the Company	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Direktur Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen.	He currently serves as Head of the Human Resources Development Agency of the Ministry of Public Works, Public Housing (PUPR).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Andar Perdana Widiastono memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki hubungan berelasi dengan Negara Republik Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Andar Perdana Widiastono sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Andar Perdana Widiastono tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.	Andar Perdana Widiastono has an affiliated relationship with the Major/Controlling Shareholder, through his position at the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which has a relationship with the Republic of Indonesia as the ultimate owner entity of the Company. Andar Perdana Widiastono's position as the Company's Commissioners have passed the fit and proper test. In addition, Andar Perdana Widiastono has no financial and family affiliation with other Board of Commissioners or Board of Directors.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.	The Company does not have a Management Share Ownership Program and does not trade its shares to the public. Thus, there is no Board of Commissioners that owns the Company's shares.



● Jalan Tol Cisumdawu, Jawa Barat
Cisumdawu Toll Road, West Java

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Haedar A. Karim

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 22 Januari 2020-RUPS 2025, Periode ke-1
Term of Office: January 22, 2020-GMS 2025, 1st Period

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 62 tahun per 31 Desember 2021 Lahir di Ujung Pandang, 15 November 1959	Indonesian citizen Age 62 as of December 31, 2021 Born in Ujung Pandang, 15 November 1959
Domisili Domicile	Bekasi, Indonesia	Bekasi, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) sejak 22 Januari 2020 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota.	Appointed as President Director of PT Nindya Karya (Persero) since January 22, 2020 through the Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1985).	Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering from Hasanuddin University, Makassar (1985).
Pengalaman Kerja Work Experience	1. General Manager Teknik dan Pemasaran PT Nindya Karya (Persero) (2009-2013) 2. Kepala Biro Teknik dan Pemasaran PT Nindya Karya (Persero) (2008-2009) 3. Kepala Divisi Konstruksi dan Properti PT Nindya Karya (Persero) selama 6 tahun setelah memegang jabatan sebagai Kepala Proyek dan Manajer Teknik & Pemasaran (1986-2001).	1. General Manager of Engineering and Marketing of PT Nindya Karya (Persero) (2009-2013) 2. Head of the Engineering and Marketing Bureau of PT Nindya Karya (Persero) (2008-2009) 3. Head of Construction and Property Division of PT Nindya Karya (Persero) for 6 years after holding positions as Project Head and Engineering & Marketing Manager (1986-2001).
Jabatan Sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Luar Perusahaan Position as Board of Commissioners and Directors Outside the Company	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Haedar A. Karim tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Haedar A. Karim has no financial and family affiliation with the Board of Commissioners, other Directors, nor with the Major/Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.	The Company does not have a Management Share Ownership Program and does not trade its shares to the public. Thus, there is no Board of Commissioners that owns the Company's shares.



Moeharmein Zein Chaniago

Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Marketing and Development Director

Periode Jabatan: 22 Januari 2020-RUPS 2025, Periode ke-1
Term of Office: January 22, 2020-GMS 2025, 1st Period

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 56 tahun per 31 Desember 2021 Lahir di Palembang, 1 Mei 1965	Indonesian citizens Age 56 years as of December 31, 2021 Born in Palembang, May 1, 1965
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya Karya (Persero) sejak 22 Januari 2020 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero).	Appointed as Director of Marketing and Development of PT Nindya Karya (Persero) since January 22, 2020 through the Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. Meraih gelar Insinyur pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1996) 2. Master of Construction and Engineering Management dari Griffith University Australia (2004)	1. Obtained an Engineer degree at Muhammadiyah University of North Sumatra (1996) 2. Master of Construction and Engineering Management from Griffith University Australia (2004)
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Project Manager PT PP (Persero) (1995-2006) 2. Wakil Kepala Cabang Jakarta, PT PP (Persero), Tbk (2006-2009) 3. Kepala Cabang Luar Negeri, PT PP (Persero), Tbk (2009-2011) 4. Direktur Utama Anak Perusahaan PT SDP & PT MDP (2011-2012) 5. Kepala Cabang II, Sumatera bagian Selatan & Banten PT PP (Persero), Tbk. (2012-2016) 6. Kepala Divisi Operasi Indonesia Timur PT PP (Persero), Tbk (2016-2017) 7. Senior Vice President, Head of Infrastructure Division PT PP (Persero), Tbk. (2017-2020) 8. Direktur Pemasaran & Pengembangan PT Nindya Karya (Persero) (2020 sampai dengan sekarang)	1. Project Manager PT PP (Persero) (1995-2006) 2. Deputy Head of Jakarta Branch, PT PP (Persero), Tbk (2006-2009) 3. Head of Overseas Branch, PT PP (Persero), Tbk (2009-2011) 4. President Director of Subsidiaries PT SDP & PT MDP (2011-2012) 5. Head of Branch II, Southern Sumatra & Banten PT PP (Persero), Tbk. (2012-2016) 6. Head of Eastern Indonesia Operations Division PT PP (Persero), Tbk (2016-2017) 7. Senior Vice President, Head of Infrastructure Division of PT PP (Persero), Tbk. (2017-2020) 8. Director of Marketing & Development of PT Nindya Karya (Persero) (2020 to present)
Jabatan Sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Luar Perusahaan Position as Board of Commissioners and Directors Outside the Company	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Moeharmein Zein Chaniago tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Moeharmein Zein Chaniago has no financial and family affiliation with the Board of Commissioners, other Directors, nor with the Major/Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.	The Company does not have a Management Share Ownership Program and does not trade its shares to the public. Thus, there is no Board of Commissioners that owns the Company's shares.



Firmansyah

Direktur Produksi dan HSE
Director of Production and HSE

Periode Jabatan: 20 Juli 2018-RUPS 2023, Periode ke-1
Term of Office: January 22, 2020-GMS 2025, 1st Period

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 54 tahun per 31 Desember 2021 Lahir di Yogyakarta, 13 November 1967	Indonesian citizen Age 54 years as of December 31, 2021 Born in Yogyakarta, November 13, 1967
Domisili Domicile	Bekasi, Indonesia	Bekasi, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya (Persero) sejak 22 Januari 2020 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero).	Appointed as Director of Production and HSE of PT Nindya Karya (Persero) since January 22, 2020 through the Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Teknik Sipil Universitas Amir Hamzah, Medan (2003)	S1 Civil Engineering from Amir Hamzah University, Medan (2003)
Pengalaman Kerja Work Experience	Berkarier di Nindya Karya sejak tahun 2001. Beberapa jabatan yang pernah dipercaya adalah Manager Teknik Pemasaran (2011-2012), Manager Manajer Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Term. Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (2012-2013), dan General Manager Wilayah V (2013-2018).	Career at Nindya Karya since 2001. Several positions that have been trusted are Manager of Marketing Engineering (2011-2012), Manager of Project Manager for Construction of Term Connecting Bridge. Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (2012-2013), and General Manager Region V (2013-2018).
Jabatan Sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Luar Perusahaan Position as Board of Commissioners and Directors Outside the Company	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Firmansyah tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Firmansyah has no financial and family affiliation with the Board of Commissioners, other Directors, nor with the Major/Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.	The Company does not have a Management Share Ownership Program and does not trade its shares to the public. Thus, there is no Board of Commissioners that owns the Company's shares.



Sri Haryanto

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko
Director of Finance, HR and Risk Management

Periode Jabatan: 22 Januari 2020-RUPS 2025, Periode ke-1
Term of Office: January 22, 2020-GMS 2025, 1st Period

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 50 tahun per 31 Desember 2021 Lahir di Jakarta, 7 Mei 1971	Indonesian citizen 50 years old as of December 31, 2021 Born in Jakarta, May 7, 1971
Domisili Domicile	Bekasi, Indonesia	Bekasi, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko PT Nindya Karya (Persero) sejak 22 Januari 2020 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero).	Appointed as Director of Finance, HR and Risk Management of PT Nindya Karya (Persero) since January 22, 2020 through the Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S1 Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan Universitas Indonesia, Depok (1998) 2. S2 Manajemen Strategi Universitas Prasetya Prasetya Mulya, Jakarta (2015)	1. S1 Economics majoring in Financial Management University of Indonesia, Depok (1998) 2. Master of Strategic Management from Prasetya Prasetya Mulya University, Jakarta (2015)
Pengalaman Kerja Work Experience	Berkarier di Nindya Karya sejak 1993. Beberapa jabatan yang pernah dipercaya adalah Kepala Departemen Keuangan (2009-2016), Kepala Satuan Pengawasan Intern (2016-2017), dan Kepala Departemen Pengembangan (2017-2018).	Has a career at Nindya Karya since 1993. Several positions he has trusted are Head of the Ministry of Finance (2009-2016), Head of the Internal Audit Unit (2016-2017), and Head of the Development Department (2017-2018).
Jabatan Sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Luar Perusahaan Position as Board of Commissioners and Directors Outside the Company	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Sri Haryanto tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Sri Haryanto has no financial and family affiliation with the Board of Commissioners, other Directors, nor with the Major/Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership	Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.	The Company does not have a Management Share Ownership Program and does not trade its shares to the public. Thus, there is no Board of Commissioners that owns the Company's shares.

Pejabat Eksekutif

Executive Officer

Nama Name	Jabatan Position	Menjabat Sejak Serving Since	Pendidikan Terakhir Highest Education
Alif Usman Amin	SVP HUMAN CAPITAL SVP of HUMAN CAPITAL	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Andri Rohim	SVP SISTEM dan TEKNOLOGI INFORMASI SVP INFORMATION SYSTEMS and TECHNOLOGY	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Arista Febri Eriyawan	SVP KEUANGAN SVP of FINANCE	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Broto Hariadi	KEPALA SPI SPI HEAD	05/01/2021	S2 Master's Degree
Farid Budiyo	SVP ESTIMATING SVP ESTIMATING	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Haryanto	SVP QHSE QHSE SVP	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Imam Sugiatno	SVP PEMASARAN SVP MARKETING	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Imut Malati Mustika Putri	SVP AKUNTANSI dan PERPAJAKAN SVP ACCOUNTING and TAXATION	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Rusliadi	SVP PERENCANAAN STRATEGIS dan MANAJEMEN RISIKO SVP STRATEGIC PLANNING and RISK MANAGEMENT	05/01/2021	S2 Master's Degree
Septian Fakhruddin	SVP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SVP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	11/10/2021	S1 Bachelor's Degree
Taufik Hidayat	SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY	02/06/2021	S1 Bachelor's Degree
Andri Suhendar	GM DIVISI PROPERTI GM PROPERTY DIVISION	05/01/2021	D4 Advanced Diploma
Arif Putranto	GM DIVISI GEDUNG GM BUILDING DIVISION	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Bambang Asmoro	GM DIVISI INFRASTRUKTUR 1 GM INFRASTRUCTURE DIVISION 1	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Budi Purnomo Setiawan	GM DIVISI INFRASTRUKTUR 2 GM INFRASTRUCTURE DIVISION 2	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Eko Suhartono	GM DIVISI PERALATAN GM EQUIPMENT DIVISION	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Wahyu Edi Satriya	GM DIVISI EPC EPC DIVISION GM	05/01/2021	S1 Bachelor's Degree
Surachman	DIREKTUR UTAMA NTU NTU PRESIDENT DIRECTOR	24/02/2021	S2 Master's Degree
Okven Ronaldo	DIREKTUR UTAMA NB NB PRESIDENT DIRECTOR	11/10/2021	S2 Master's Degree
Budi Harto	DIREKTUR KEUANGAN DIRECTOR OF FINANCE	11/10/2021	S2 Master's Degree

Demografi Karyawan dan Sekilas tentang Sumber Daya Manusia

Employee Demography and Human Resources at a Glance

Hingga 31 Desember 2021, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 720 orang, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah karyawan di akhir tahun 2020 yang sebanyak 666 orang. Peningkatan jumlah SDM ini terutama disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

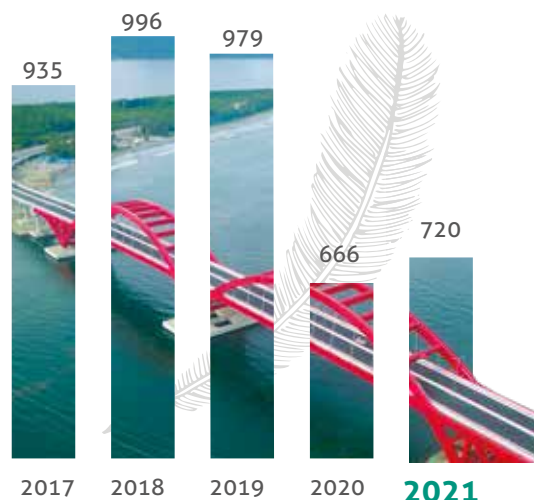
1. Pemenuhan kebutuhan karyawan di unit kerja/bisnis
2. Optimalisasi program NEXT (Nindya Excellent Talent Management System) untuk mengidentifikasi Talent yang ada di perusahaan. Kombinasi antara NEXT dan metode talent identification versi BUMN dan Cluster Danareksa untuk mencari dan menetapkan Talent Nindya
3. Melaksanakan *Upskilling* di level BoD-1
4. Membuat program pembelajaran yang bersifat mandatory maupun tidak melalui aplikasi LMS
5. Menetapkan karyawan untuk dapat menjadi trainer internal dan narasumber untuk menyusun materi e-Learning, dengan sebelumnya membekali mereka dengan pelatihan Training of Trainer
6. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan menggandeng pihak eksternal
7. Menerapkan *Performance Management System* dengan menyusun KPI Individu
8. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Reward Design dengan mempertimbangkan *positioning market* dan *pay for performance*

As of December 31, 2021, the number of employees of the Company is 720 people, an increase compared to the number of employees at the end of 2020 which was 666 people. the increase in the number of human resources was mainly due to the following:

1. Meeting the needs of employees in work/business units
2. Optimization of the NEXT (Nindya Excellent Talent Management System) program to identify talent in the company. the combination of NEXT and the BUMN version of the talent identification method and the Danareksa Cluster to find and determine the Nindya Talent
3. Perform Upskilling at BoD-1 level
4. Create learning programs that are mandatory or not through the LMS application
5. Assign employees to become internal trainers and resource persons to prepare e-Learning materials, by previously equipping them with the Training of Trainer training
6. Carry out continuous employee training and development, both through formal education and training in collaboration with external parties
7. Implementing the Performance Management System by compiling Individual KPIs
8. Evaluate and improve Reward Design by considering market positioning and pay for performance

Pergerakan Jumlah Karyawan 2017-2021

Changes in Number of Employees



Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi PT Nindya Karya (Persero) sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 maka terdapat perubahan level organisasi sebagai berikut:

Level Organisasi Organization Level	2021			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
BOD-1	18	1	19	2,64%
BOD-2	52	9	61	8,47%
Project Manager (PM)/Kepala Plant	78	3	81	11,25%
Site Engineering Manager (SEM)	56	1	57	7,92%
Site Operation Manager (SOM)	20	0	20	2,78%
Site Administration Manager (SAM)	27	3	30	4,17%
Office Engineer (OE)	32	2	34	4,72%
Advisor	1	0	1	0,14%
Setara Staff Staff Equivalent	277	140	417	57,92%
Jumlah Total	561	159	720	100,00%

Employee Composition Based on Organizational Level/Position

In connection with changes in the organizational structure of PT Nindya Karya (Persero) in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 0001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 dated January 5, 2021, there will be changes to the organizational level as follows:

Sementara komposisi karyawan berdasarkan level organisasi/jabatan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of employees based on the level of organization/position in 2020 is as follows:

Level Organisasi Organization Level	2021			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
General Manager	16	1	17	2,55%
Manager	128	6	134	20,12%
Koordinator Coordinator	117	22	139	20,87%
Staff	270	106	376	56,46%
Jumlah Total	531	135	666	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition Based on Education Level

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Employee Demographics by Education Level (people)

Tingkat Pendidikan Education Level	2021				2020			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
Strata-3 (S3) & Strata-2 (S2) Postgraduate & Master Degree	35	6	41	5,69%	25	4	29	4,35%
Strata-1 (S1) & Diploma 4 (D4) Bachelor Degree & Diplom 4	403	123	526	73,06%	386	101	487	73,12%
Diploma 3, 2, & 1 (D3, D2, D1) Diplom 3, 2, & 1	71	20	91	12,64%	72	17	89	13,36%
SLTA/SLTP Senior/Junior High School	52	10	62	8,61%	48	13	61	9,16%
Jumlah Total	561	159	720	100,00%	531	135	666	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition Based on Employment Status

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)
Employee Demographics by Employment Status (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2021				2020			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
Tetap Permanent	319	48	353	49,03%	320	45	365	54,80%
Tidak Tetap Contract	242	111	367	50,97%	211	90	301	45,20%
Jumlah Total	561	159	720	100,00%	531	135	666	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Penempatan

Employee Composition Based on Placement

Demografi Karyawan Berdasarkan Penempatan (orang)
Employee Demographics by Placement (people)

Penempatan Placement	2021			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
Kantor Pusat Head Office	163	77	240	33%
Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure Division 1	101	16	117	16%
Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure Division 2	93	7	100	14%
Divisi Gedung Building Division	73	19	92	13%
Divisi EPC EPC Division	60	16	76	11%
Divisi Properti Property Division	17	8	25	3%
Divisi Peralatan Equipment Division	10	3	13	2%
Mutasi ke Anak Perusahaan Transfer to Subsidiaries	4	0	4	1%
Entitas Anak-Nindya Beton Subsidiary-Nindya Beton	35	11	46	6%
Entitas Anak-Nindya Tirta Unggul Subsidiary-Nindya Tirta Unggul	5	2	7	1%
Jumlah Total	561	159	720	100,00%

Penempatan Placement	2020			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
Kantor Pusat Head Office	111	48	159	23,87%
Wilayah I Region I	48	6	54	8,11%
Wilayah II Region II	71	18	79	11,86%
Wilayah III Region III	49	4	53	7,96%
Wilayah IV Region IV	71	8	79	11,86%

Penempatan Placement	2020			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
Wilayah V Region V	60	14	74	11,11%
Divisi EPC EPC Division	59	16	75	11,26%
Divisi Properti Property Division	14	8	22	3,30%
Unit Penunjang Produksi Production Support Unit	11	4	15	2,25%
Entitas Anak Subsidiary	37	9	46	6,91%
Jumlah Total	531	135	666	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kompetensi

Employee Composition Based on Competence

Demografi Karyawan Berdasarkan Kompetensi (orang)
Employee Demographics Based on Competence (people)

Kompetensi Competence	2021				2020			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
Teknik Technic	410	68	478	66,39%	378	56	434	65,17%
Non Teknik Non Technic	151	91	242	33,61%	153	79	232	34,83%
Jumlah Total	561	159	720	100,00%	531	135	666	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee Composition Based on Age

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Employee Demographics Based on Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2021				2020			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
51 tahun/Years >	46	3	49	6,81%	45	4	49	7%
41-50 tahun/Years	92	16	108	15,00%	83	10	93	14%
31-40 tahun/Years	206	36	242	33,61%	185	36	221	33%
21 -30 tahun/Years	217	104	321	44,58%	218	85	303	45%
Jumlah Total	561	159	720	100,00%	531	135	666	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender/ Jenis Kelamin

Employee Composition Based on Gender

Demografi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
Employee Demographics Based on Gender (people)

Jenis Kelamin Gender/	2021		2020	
	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)	Jumlah Total	Komposisi Compositon (%)
Laki-laki Male	561	77,92%	531	80%
Perempuan Female	159	22,08%	135	20%
Jumlah Total	720	100,00%	666	100,00%

Sekilas tentang Pengelolaan SDM dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

About HR Management and Employee Competency Development

Perusahaan meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan secara berkesinambungan menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi pegawai agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang begitu pesat serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja. Perusahaan begitu memperhatikan dengan baik kualitas, profesionalitas dan efektivitas SDM dalam menjaga, serta menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM setiap tahunnya. Komitmen-komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan dengan mengacu pada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh SDM. Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan pelatihan, yang menyentuh langsung insan Perusahaan sampai pada level terbawah.

The Company believes that qualified Human Resources (HR) are the spearhead in the effort to realize the Company's vision and mission. For this reason, the Company continuously carries out education and competency development programs for employees to be more competitive in the face of rapid changes and developments as well as to improve performance effectiveness and productivity. The company pays great attention to the quality, professionalism and effectiveness of HR in maintaining, and growing the loyalty and productivity of HR every year. These commitments are evidenced by the implementation of HR training and development which is carried out with reference to the training and development framework that covers all aspects and development methods for all HR. Throughout 2021, the Company held trainings, which directly touched the Company's people down to the lowest level.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2021

Competency Development by Position Level and Gender Equality in 2021

Level Jabatan Position Level	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Tujuan Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Objectives	Jumlah Peserta Tahun 2021 Number of Participants in 2021	
			Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Komisaris Commissioner	Risk Governance	Risk Governance Master Class	1	0,03%
BOD	Professional Director Program	Building the Future Ready Organization Chartered Financial Analyst Course	5	0,14%
BOD-1	Management Strategic For GM/SVP	Pelatihan Upskilling Competencies Training Program NBO NBO Upskilling Training Competencies Training Program GRC Summit	142	3,87%
BOD-2	General Training Technical Training Tk. Advance	Training of Trainer Skill Up Auditor Manajemen Risiko Dana Pensiun Retirement Fund Risk Management Certified Internal Auditor Course	416	11,34%
Under BOD-2	General Training Technical Training	Awareness ISO 19650: 2018 Workshop IT Maturity Assessment Pelatihan Scheduler (Batch 1 & 2) Scheduler Training (Batch 1 & 2)	3106	84,63%
		Pelatihan To Be Office Engineer To Be Office Engineer Training		
		Pelatihan To Be Site Engineering Manager To Be Site Engineering Manager Training		
		Pelatihan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan (For SDM Divisi) BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Training (For Division HR)		
Jumlah Total			3.669	100%

Biaya Pengembangan Kompetensi

Competence Development Costs

	Realisasi 2021 (Rp Juta) 2021 Realization (Rp Million)	Target/RKAP 2021 (Rp Juta) 2021Target/RKAP (Rp Million)	Realisasi 2021 terhadap Target RKAP (% Persen) 2021 Realization on the Target RKAP (% Percent)	Realisasi 2020 (Rp Juta) 2020 Realization (Rp Million)	Realisasi 2020 terhadap Realisasi 2019 (% Persen) 2020 Realization to 2019 Realization (% Percent)
	(1)	(2)	(1:2)	(3)	(1:3)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	2204	5219	42%	1117	29%

Lebih lanjut tentang deskripsi lengkap dan data pengelolaan SDM dan pengembangan kompetensi karyawan dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

More about the complete description and data on HR management and employee competency development can be seen in the Business Support Functions chapter of this Annual Report.

Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholders

Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan Company Share Ownership Composition

Komposisi Pemegang Saham Nindya Karya per 31 Desember 2021

Nindya Karya's Shareholders Composition as of December 31, 2021

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Number of shares (Unit)	Nilai Saham per Lembar (Rp/Lembar) Share Value per Sheet (Rp/Unit)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid capital	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
SERI A DWI WARNA SERIES A DWI WARNA				
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	59.500	1.000.000	59.500.000.000	1,00%
SERI B SERIES B				
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	5.890.500	84.882	499.997.421.000	99,00%
JUMLAH TOTAL	5.950.000		559.497.421.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham Nindya Karya per 31 Desember 2021

Nindya Karya Share Ownership Composition as of 31 December 2021



Informasi Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci

Hingga 31 Desember 2021, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak tercatat memiliki saham Perusahaan.

Share Ownership Information by Key Management

As of December 31, 2021, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors have registered ownership of the Company's shares.

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	2021	2020
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS		
Sugiyartanto Komisaris Utama President Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Andar Perdana Widiastono Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Rika Kiswardani Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Zahirwan Marza Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		
Haedar A. Karim Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Moeharmein Zein Chaniago Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	Nihil Nil	Nihil Nil
Firmansyah Direktur Produksi dan QHSE Director of Production and QHSE	Nihil Nil	Nihil Nil
Sri Haryanto Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HR and Risk Management	Nihil Nil	Nihil Nil

Hingga akhir tahun 2021 Perseroan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham baik oleh manajemen (MSOP) maupun karyawan (ESOP).

Until the end of 2021 the Company does not have a Share Ownership Program policy either by management (MSOP) and employees (ESOP).

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Nindya Karya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1,00% (Seri A Dwi Warna) dan 99,00% Saham Seri B Biasa oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). PPA dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Utama/Pengendali sekaligus Entitas Pemilik Akhir Nindya Karya.

Information about Main/Controlling Shareholders up to the Name of the Final Owner

Nindya Karya is owned by the Republic of Indonesia 1.00% (Series A Dwi Warna) and 99.00% Series B Ordinary Shares by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). PPA is wholly owned by the Republic of Indonesia. Thus, the Republic of Indonesia is the Main/Controlling Shareholder as well as the Final Owner Entity of Nindya Karya.

Daftar Entitas Anak, Investasi/Penyertaan Saham dan Ventura Bersama, serta Informasi tentang Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries, Share Investments and Joint Ventures, and Information about Associate Entities

ENTITAS ANAK Subsidiary

Nama Name	Bidang Usaha Fields of Business	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)		Waktu Pendirian Establishment	Status Operasi Operation Status	Jumlah Aset (Rp juta) Total Assets (Rp million)		Domisili Domicile
		2021	2020			2021	2020	
PT Nindya Beton	Industri beton pracetak, industri readymix, dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dan dengan pabrikasi Precast concrete industry, readymix industry, and other businesses relating to and with fabrication	51,00%	51,00%	2013	Beroperasi Operated	173.617	194.717	Jakarta Timur (DKI Jakarta) East Jakarta (DKI Jakarta)
PT Nindya Tirta Unggul	Konstruksi, infrastruktur, dan industri air bersih serta penyediaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Construction, infrastructure and clean water industry and system provision and development of water drinking supplier	95,00%	-	2021	Beroperasi Operated	32.312	-	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java



PT Nindya Beton

PT Nindya Beton ("PT NB") didirikan sebagai bagian dari kebutuhan Nindya Karya untuk memberikan layanan terintegrasi bagi konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen-komponen pendukung, khususnya terkait kebutuhan perkembangan teknologi di sektor konstruksi, efisiensi waktu serta peningkatan kualitas. Pendirian PTNB berdasarkan Akta No. 33 tanggal 19 Februari 2013 dibuat di hadapan Khairina, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-10206.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013.

Kegiatan Utama PTNB meliputi:

1. Industri, yaitu beton pracetak, readymix, dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan.
2. Pabrikasi, yaitu beton pracetak, pabrikasi bahan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik.
3. Usaha lainnya yang berkaitan.

PT Nindya Beton ("PT NB") was established as part of Nindya Karya's need to provide integrated services for consumers in order to meet the needs of supporting components, particularly related to the need for technological developments in the construction sector, time efficiency and quality improvement. Establishment of PTNB based on Deed No. 33 dated February 19, 2013 made before Khairina, S.H., Notary in Jakarta, and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-10206.AH.01.01 of 2013 dated March 4, 2013.

The main activities of PTNB includes:

1. Industry, namely precast concrete, readymix, and other related businesses.
2. Manufacturing, namely precast concrete, manufacturing of building component materials, manufacturing of construction equipment and components, manufacturing of metal, wood, rubber and plastic goods.
3. Other related businesses.

Komposisi Pemegang Saham Nindya Beton per 31 Desember 2021

Composition of Nindya Beton's Shareholders as of 31 December 2021

Komposisi Pemegang Saham Nindya Beton per 31 Desember 2021 Nindya Beton Shareholder Composition as of 31 December 2021	Persentase Jumlah Saham Number of Shares Percentage
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	49,00%
PT Nindya Karya (Persero)	51,00%

Ikhtisar Keuangan Nindya Beton

Nindya Beton Financial Overview

Keterangan Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	108.521	155.796
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	104.933	154.472
Laba Usaha Operating Profit	(10.613)	(11.138)
Laba/Rugi Bersih Net Profit/Loss	(18.486)	(16.477)
Aset Asset	173.963	194.717
Liabilitas Liability	170.105	172.373
Ekuitas Equity	3.858	22.344

Manajemen Kunci Nindya Beton

Nindya Beton Key Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komisaris Utama President Commissioner	Arista Febri Eriyawan
	Komisaris Commissioner	Fajar Rahwinto Soeharto
Direksi Board of Directors	Direktur Utama President Director	Okven Ronaldo
	Plt. Direktur Operasi Interim Operations Director	Okven Ronaldo
	Direktur Keuangan Director of Finance	Budi Harto



PT Nindya Tirta Unggul

PT Nindya Tirta Unggul ("PT NTU") didirikan tanggal 3 Mei 2021 berdasarkan akta notaris Nomor 08 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0031451.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021. Nindya Karya memiliki pengendalian atas PT NTU yang merupakan entitas anak dengan persentase kepemilikan saham sebesar 95%.

PT Nindya Tirta Unggul ("PT NTU") was established on May 3, 2021 based on a notarial deed No. 08 drawn up before Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, M.Kn, Notary in South Jakarta which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0031451.AH.01.01 Year 2021 dated 7 May 2021. Nindya Karya has control over PT NTU which is a subsidiary with 95% share ownership.

Ruang lingkup bidang usaha PT Nindya Tirta Unggul meliputi konstruksi, infrastruktur dan industri air bersih serta penyediaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Pada tanggal 18 Mei 2021, PT Nindya Tirta Unggul menjalin kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap di bidang Investasi dan Pengelolaan Unit Produksi di Kesugihan dengan skema perjanjian Bangun, Kelola dan Alih Milik (Built, Operate and Transfer/B.O.T) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 690/17/47.03/2021 & 001/DIR/NTU/KTR/05/2021 dengan nilai investasi setinggi-tingginya Rp55,19 miliar. Perusahaan berencana membangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan mengelolanya selama 15 (lima belas) tahun, kemudian dialihkan kepemilikannya kepada Perumdam Tirta Wijaya.

The scope of business of PT Nindya Tirta Unggul includes construction, infrastructure and clean water industry as well as the provision and development of drinking water supply systems. on May 18, 2021, PT Nindya Tirta Unggul collaborated with the Regional Drinking Water Company (Perumdam) Tirta Wijaya, Cilacap Regency in the field of Investment and Management of Production Units in Kesugihan with a Build, Manage and Transfer (Built, Operate and Transfer) agreement scheme. B.O.T) in accordance with the Cooperation Agreement Number 690/17/47.03/2021 & 001/DIR/NTU/KTR/05/2021 with a maximum investment value of Rp55.19 billion. the company plans to build a Drinking Water Treatment System (SPAM) in Kesugihan, Cilacap Regency, Central Java and manage it for 15 (fifteen) years, then transfer its ownership to Perumdam Tirta Wijaya.

Komposisi Pemegang Saham Nindya Tirta Unggul per 31 Desember 2021

Composition of Nindya Tirta Unggul Shareholders as of 31 December 2021

Komposisi Pemegang Saham Nindya Tirta Unggul per 31 Desember 2021 Shareholder Composition of Nindya Tirta Unggul as of December 31, 2021	Persentase Jumlah Saham Number of Shares Percentage
PT Nindya Karya (Persero)	95,00%
Alam Wiratama Kencana	5%

Ikhtisar Keuangan Nindya Tirta Unggul

Nindya Tirta Unggul Financial Overview

Keterangan Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	14.429	-
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	14.429	-
Laba Usaha Operating Profit	(1.173)	-
Laba/Rugi Bersih Net Profit/Loss	(1.071)	-
Aset Asset	32.312	-
Liabilitas Liability	16.882	-
Ekuitas Equity	15.430	-

Manajemen Kunci Nindya Tirta Unggul

Nindya Tirta Unggul Key Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komisaris Commissioners	Rusliadi
Direksi Board of Directors	Direktur Directors	Surachman



PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng ("JKC") merupakan anak usaha patungan yang didirikan pada tahun 2008 dan bergerak di bidang pengusahaan jalan tol, konstruksi dan pemeliharaannya. JKC diberikan hak konsesi untuk membangun dan mengelola ruas tol Kunciran-Cengkareng selama 35 tahun berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian antara JKC dengan Badan Pengatur Jalan tol (BPJT).

Hingga akhir tahun 2022 Nindya Karya memiliki 0,32% saham JKC dengan total penyertaan sebesar Rp894.786.056,-.

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng ("JKC") is a joint venture subsidiary established in 2008 and is engaged in toll road concession, construction and maintenance. JKC was granted a concession right to build and manage the Kunciran-Cengkareng toll road for 35 years starting from the signing of the agreement between JKC and the Toll Road Regulatory Agency (BPJT).

Until the end of 2022 Nindya Karya owns 0.32% of JKC shares with a total investment of Rp894,786,056,-.

Komposisi Pemegang Saham PT Jasamarga Kunciran Cengkareng per 31 Desember 2021

Composition of Shareholders of PT Jasamarga Kunciran Cengkareng as of 31 December 2021

Komposisi Pemegang Saham PT Jasamarga Kunciran Cengkareng per 31 Desember 2021 Shareholder Composition of PT Jasamarga Kunciran Cengkareng as of December 31, 2021	Persentase Jumlah Saham Number of Shares Percentage
PT Nindya Karya (Persero)	0,32%
PT Istaka Karya (Persero)	0,14%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2,10%
Synergy Quest Limited	21,01%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	76,43%

Ikhtisar Keuangan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

Financial Highlights of PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

Keterangan Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)
Pendapatan Tol Toll Revenue	45.061	-
Pendapatan Konstruksi Construction Revenue	1.160.389	567.147
Laba Kotor Gross Profit	10.967	4.501
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income for the Year	(34.498)	(4.308)
Aset Asset	5.766.615	4.945.951
Liabilitas Liabilities	4.314.598	3.714.328
Ekuitas Equity	1.452.017	1.231.623

Manajemen Kunci PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

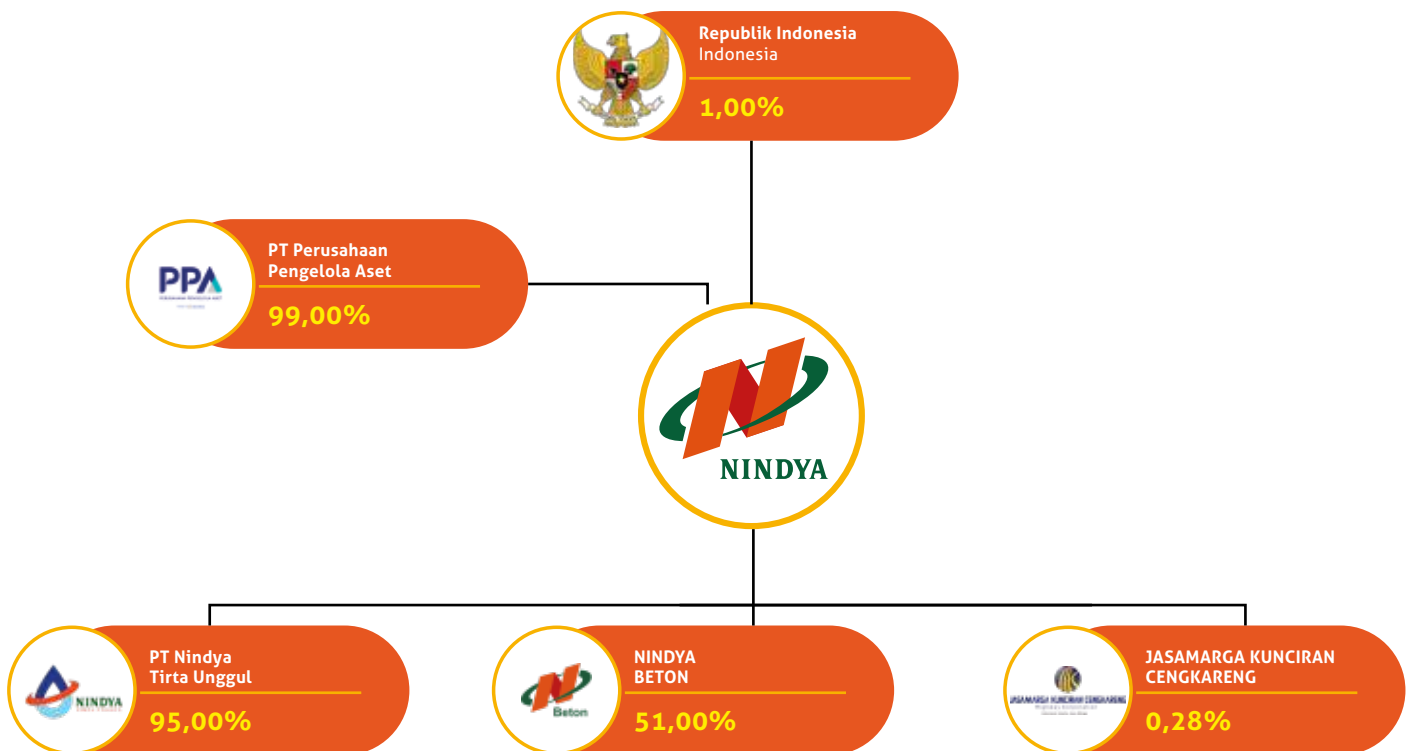
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng Key Management

Komisaris Utama President Commissioners	Agung Prabowo
Komisaris Commissioners	Mohamad bin Husin
Direktur Utama President Director	Dadan Waradi
Direktur Teknik Director of Engineer	Rini Irawaty
Direktur Keuangan Director of Finance	Zaidi bin Ibrahim

Struktur Grup Nindya Karya

Nindya Karya Group Structure

Struktur Grup Perusahaan per 31 Desember 2021
Company Group Structure as of December 31, 2021



Informasi tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat.

Information about Issuance Chronology and Share Listing

Until the end of 2021, the Company did not issue any shares for public ownership.

Informasi tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Hingga 31 Desember 2021, Perusahaan tidak menerbitkan Efek dalam bentuk apapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

Information about Issuance Chronology and Other Securities Listing

Until December 31, 2021, the Company did not issue Securities in any form. Thus, there is no information about the names of other securities, the year of issuance of other securities, interest rate/return on other securities, maturity date of other securities, offering value of other securities, the name of the exchange where the other securities are listed, and the rating of the securities.

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professions

Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Name of Supporting Institution and Profession	Jenis & Bentuk Jasa Service Type & Form	Periode Penugasan Assignment Period
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Public Accountant Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners.	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit of Consolidated Financial Statements and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Auditing Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia and Auditing Standards determined by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	30 November 2021-2 Februari 2022 30 November 2021-2 February 2022
Pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Rating PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	Suatu penilaian yang terstandarisasi terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya dengan tujuan mendapatkan pendanaan A standardized assessment of a company's ability to pay its debts for the purpose of obtaining funding	Maret 2021-Januari 2022 March 2021-January 2022
Notaris Khairina S.H Notary Khairina S.H	Bertanggungjawab terkait pembuatan akta kuasa General Manager, akta kuasa Manager, akta kuasa menjual, akta KSO, akta jual beli, pengesahan dokumen berbentuk waarmarking, legalisir dokumen, dan legalisasi dokumen Responsible for making General Manager power of attorney deed, Manager power of attorney deed, power of sale deed, KSO deed, sale and purchase deed, ratification of documents in the form of waarmarking, document legalization, and document legalization	2021-Sekarang 2021-Present
Konsultan Hukum Toni Hendarto S.H., M.H., M.M & Rekan Legal Consultant Toni Hendarto S.H., M.H., M.M & Rekan	Kuasa Hukum atas permasalahan hukum yang dialami Nindya dengan rekanan (PT Maju Sentosa Cemerlang, PT Buana Risma, dan PT Altra Investama) atas proyek-proyek sebelumnya. Toni Hendarto & Rekan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan hukum tersebut baik secara non litigasi maupun litigasi Legal counsel for legal problems that Nindya experienced with partners (PT Maju Sentosa Cemerlang, PT Buana Risma, and PT Altra Investama) over previous projects. Toni Hendarto & Partners are responsible for the settlement of these legal issues, both non-litigation and litigation	2018-sekarang 2018-present
Nengah Sujana & Rekan Lawfirm Nengah Sujana & Rekan Lawfirm	Retainer (Jasa Hukum Tetap) PT Nindya Karya. Bertanggung jawab atas pemberian pendapat hukum/Legal Opinion kepada PT Nindya Karya atas kegiatan bisnis Perusahaan, serta penyelesaian permasalahan hukum dengan rekanan. Retainer (Permanent Legal Services) PT Nindya Karya. Responsible for providing legal opinion/Legal Opinion to PT Nindya Karya on the Company's business activities, as well as resolving legal issues with partners.	2021-sekarang 2021-present

Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Name of Supporting Institution and Profession	Jenis & Bentuk Jasa Service Type & Form	Periode Penugasan Assignment Period
Hendrik Jehaman & Associates Hendrik Jehaman & Associates	Kuasa hukum atas permasalahan dengan PT Lampiri Djaya Abadi selaku anggota KSO dalam Nindya Lampiri, JO atas pelaksanaan Aceh Reconstruction Project, Road Sub Project Package No. I Section SP. Kraft-Batas Aceh Tengah. Hendrik Jehaman & Associates bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan hukum tersebut litigasi The attorney for the problem with PT Lampiri Djaya Abadi as a member of the KSO in Nindya Lampiri, JO for the implementation of the Aceh Reconstruction Project, Road Sub Project Package No. I Section SP. Kraft-Boundary of Central Aceh. Hendrik Jehaman & Associates is responsible for resolving the legal issues of litigation	2018-sekarang 2018-present
Hendi Gandasmiri Lawyers Hendi Gandasmiri Lawyers	Kuasa hukum atas permasalahan hukum dengan PT Jaya Singa Muda selaku subkontraktor dalam proyek Pembangunan Jalan Batas Kec. Siding/Seluas-Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC). Hendi Gandasmiri Lawyers bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan hukum tersebut litigasi Legal counsel for legal issues with PT Jaya Singa Muda as a subcontractor in the Kec Boundary Road Development project. Siding/Boundary-Kec. Sekayam/Entikong (MYC). Hendi Gandasmiri Lawyers is responsible for the resolution of the legal issues litigation	2020-sekarang 2020-present

Daftar Akuntan Publik 6 (Enam) Tahun Terakhir 2016-2021

List of Public Accountant for the Past 6 (Six) Years 2016-2021

Tahun Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Ruang Lingkup Jasa Scope of Service	Opini Opinion	Fee Audit Audit Fee
2021	Benny Andria	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM)	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit of Consolidated Financial Statements and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Auditing Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia and the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all the things that are material	Rp412,50 juta Rp412,50 million
2020	Benny Andria	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM)	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit of Consolidated Financial Statements and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Auditing Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia and the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all the things that are material	Rp390,50 juta Rp390,50 million
2019	Benny Andria	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM)	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit of Consolidated Financial Statements and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Auditing Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia and the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all the things that are material	Rp374 juta Rp374 million
2018	Benny Andria	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (RSM)	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit of Consolidated Financial Statements and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Auditing Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia and the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all the things that are material	Rp357,50 juta Rp357,50 million

Tahun Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Ruang Lingkup Jasa Scope of Service	Opini Opinion	Fee Audit Audit Fee
2017	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf (RSM)	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit of Consolidated Financial Statements and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Auditing Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia and the Audit Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all the things that are material	Rp341 juta Rp341 million
2016	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf (RSM)	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit of Consolidated Financial Statements and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Auditing Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia and the Audit Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all the things that are material	Rp350 juta Rp350 million

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

Penghargaan di Tahun 2021

Awards in 2021



Concerned Company Award 2021



BUMN Branding and Marketing Award-Silver Winner Technology Enhancement



Terbaik III Kategori Transformasi Bisnis dan Organisasi
Third Best in Business and Organizational Transformation Category



BUMN Branding and Marketing Award-the Best CMO BUMN Branding and marketing Personal Communication BUMN



Human Capital & Performance Award-the Best Employee Engagement Strategy 2021 (Construction Industries)



Human Capital & Performance Award-the Best Reward and recognition Strategy 2021 (Construction Industries)



TJSL & CSR Award-Kategori Pilar Lingkungan dan Pilar Sosial
TJSL & CSR Award-Environmental Pillar and Social Pillar Category



BUMN Branding and Marketing Award-Gold Winner International Recognition

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2021

Certification Still Valid in 2021



Sertifikat IT Maturity
Sertifikat IT Maturity



Sertifikat INDI 4.0 Nindya Karya
INDI 4.0 Nindya Karya Certificate



Sertifikat ISO 14001 2015
ISO 14001 2015 Certificate



Sertifikat ISO 21500
ISO 21500 Certificate



Sertifikat ISO 27001 2013
ISO 27001 2013 Certificate



Sertifikat ISO 31000 2018
ISO 27001 2013 Certificate



Sertifikat ISO 37001 2016
ISO 37001 2016 Certificate



Sertifikat ISO 45001 2018
ISO 45001 2018 Certificate



Sertifikat Kitemark ISO 19650 2018
Kitemark ISO 1650 2018 Certificate



Sertifikat Penghargaan S MK3 2020-2023
SMK3 Award Certificate 2020-2023

Divisi Operasional

Division of Operation

Berdasarkan surat keputusan Direksi Nomor 001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan, struktur organisasi Perusahaan terbagi menjadi 6 Divisi, sebagai berikut:

Based on the decision letter of the Board of Directors Number 001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 dated January 5, 2021 concerning Determination of the Company's Organizational Structure, the Company's organizational structure is divided into 6 Divisions, as follows:



Unit Bisnis

Business Unit



Divisi Infrastruktur I

Infrastructure Division I

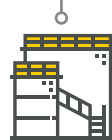
Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyekproyek infrastruktur sipil non jalan dan jembatan seperti bendungan, bangunan air, pelabuhan, dan lainlain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. Operational area covers all across Indonesia, domiciled in Jakarta conducting Company activities in marketing to construction projects for infrastructure civil non-road and bridge like dams, waterworks, ports, and others projects including investment and development.



Divisi Infrastruktur II

Infrastructure Division II

Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyekproyek infrastruktur sipil jalan dan jembatan seperti jalan, jembatan, LRT, jalur kereta api, dan lain-lain, termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. Operational area covers all across Indonesia, domiciled in Jakarta conducting Company activities in marketing to production projects for infrastructure civil road and bridge like road, bridge, LRT, railways, etc including investment and development projects.



Divisi Gedung

Building Division

Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek gedung, bandara, pengembangan kawasan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. The operational area covers all of Indonesia, domiciled in Jakarta by carrying out the Company's activities in the field of marketing to production for building projects, airports, regional development, and others including investment projects and development.

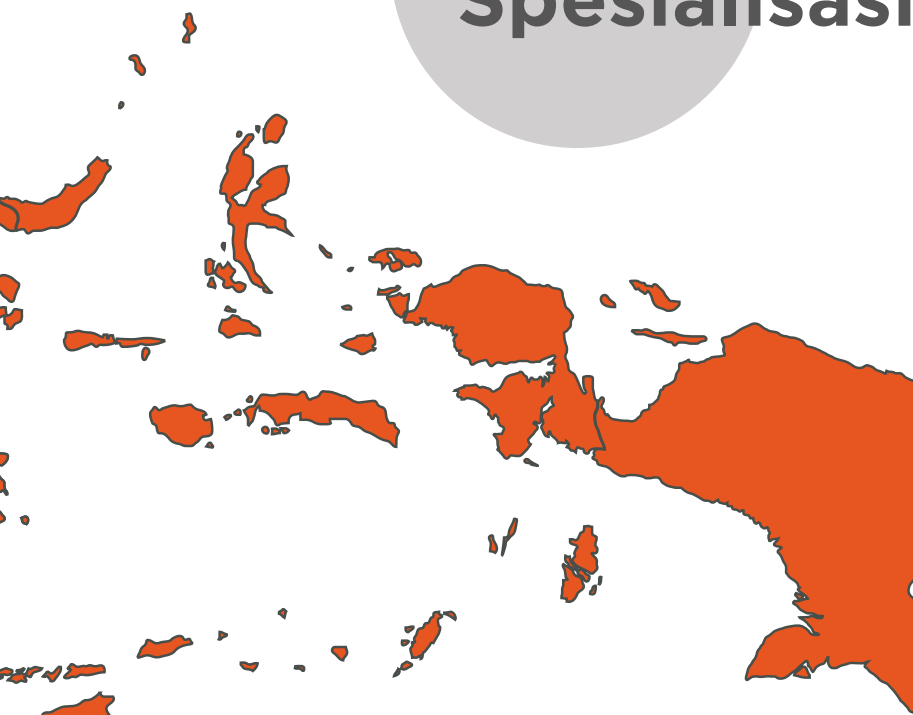


Divisi EPC

EPC Division

Daerah Operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta. The Operational Area covers the whole of Indonesia, domiciled in Jakarta.

Sentralisasi Spesialisasi



Divisi Properti Property Division

Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk mengembangkan usaha properti dan realty. Operational area covers all across Indonesia, domiciled in Jakarta conducting Company activities in marketing to production to develop property and realty.



Divisi Peralatan Equipment Division

Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan jasa penyewaan peralatan proyek. Operational area covers all across Indonesia, domiciled in Jakarta conducting Company activities in marketing to production for project equipment rental service



Daftar Alamat Entitas Anak

Address List of Subsidiaries

PT Nindya Beton

Gedung Nindya
Jl. Letjend. Mt. Haryono Kav. 22
Jakarta Timur 13630
Dki Jakarta, Indonesia

+62 21 800 9070
Faks. +62 21 800 9073
nindyabeton@Gmail.com
www.nindyabeton.co.id

PT Nindya Tirta Unggul

Ruko Sapphire Regency
Jalan Budi Utomo No 6 Sidakaya
Cilacap

+62 282 5393153
www.nindyatirtaunggul@gmail.com



Daftar Alamat Investasi/ Penyertaan Saham

List of Investment Addresses/ Shares Participation

PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG

Business Park Tangerang City
Blok A No. 19
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol, Kota
Tangerang 15117
Banten, Indonesia

+62 21 5578 2453
+62 21 5578 2456
Jkc@Jkc.co.id
www.jkc.co.id

Informasi pada Situs Web

Information on the Website

Perusahaan memiliki situs web sebagai sumber informasi mengenai kinerja yang disajikan secara transparan bagi investor serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Situs web Perusahaan dapat diakses melalui www.nindyakarya.co.id. Pada situs web tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:

1. **Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Terakhir Individu.**
Informasi mengenai Pemegang Saham Perusahaan dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori Keterbukaan Informasi yang tersaji di dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
2. **Isi Kode Etik**
Informasi mengenai Kode Etik Perusahaan dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "GCG".
3. **Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).**
Informasi mengenai RUPS dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "INFORMASI PUBLIK" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data.
4. **Laporan Keuangan Tahunan Terpisah.**
Informasi mengenai Laporan Keuangan Tahunan Terpisah dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "INFORMASI PUBLIK" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data. Data yang dilampirkan dalam informasi Laporan Keuangan selalu diperbaharui setiap per 3 (tiga) bulan dengan menyediakan sarana pengunduhan yang dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam memperoleh data tersebut.
5. **Profil Dewan Komisaris dan Direksi.**
Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris dan Direksi secara lengkap beserta legalitas pengangkatannya dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "PROFIL".
6. **Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Unit Audit Internal.**
Informasi mengenai piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Unit Audit Internal dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "GCG".

Situs web Perusahaan menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The company has a website as a source of information regarding performance that is presented transparently to investors and all other stakeholders. the Company's website can be accessed through www.nindyakarya.co.id. on the website, all stakeholders can obtain information regarding:

1. **Shareholder Information up to the Individual Last Owner.**
Information regarding the Company's Shareholders can be accessed on the Company's website under the Disclosure of Information category which is presented in the Company's Annual Report.
2. **Content of Code of Ethics**
Information regarding the Company's Code of Ethics can be accessed on the Company's website under the "GCG" category.
3. **Information on the General Meeting of Shareholders (GMS).**
Information regarding the GMS can be accessed on the Company's website under the "PUBLIC INFORMATION" category by first registering to submit a data request.
4. **Separate Annual Financial Report.**
Information regarding the Separate Annual Financial Statements can be accessed on the Company's website under the "PUBLIC INFORMATION" category by first registering to submit a data request. the data attached to the Financial Report information is always updated every 3 (three) months by providing a download facility that can facilitate stakeholders in obtaining the data.
5. **Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors.**
Information regarding the complete profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the legality of their appointments can be accessed on the Company's website under the "PROFILE" category.
6. **Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committee and Internal Audit Unit.**
Information regarding the charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committee and Internal Audit Unit can be accessed on the Company's website under the "GCG" category.

The Company's website serves as the official corporate digital portal that is openly accesible, with the purpose of providing comprehensive information about the Company to the public.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Audit Internal

Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit

Nama dan Jabatan Name and Title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Komisaris Board of Commissioners				
Mamat Supangkat	Pelatihan Training	Risk Governance Class Risk Governance Class	Online 07/12/21-07/12/21	CRMS
Direksi Board of Directors				
Sri Haryanto	Pelatihan Training	Building the Future Ready Organization Building the Future Ready Organization	Online 27/06/21-29/06/21	Pertamina Training Consulting
Sri Haryanto	Pelatihan Training	Chartered Financial Analysis Course Chartered Financial Analysis Course	Online 07/08/21-31/10/21	PPA FEUI
Haedar A Karim	Renewal Keanggotaan Membership Renewal	Perpanjangan/Pendaftaran Kartu Tanda Anggota PII PII Membership Card Renewal/Registration	-	Persatuan Insinyur Indonesia
Moeharmein Zein Chaniago	Renewal Keanggotaan Membership Renewal	Perpanjangan/Pendaftaran Kartu Tanda Anggota PII PII Membership Card Renewal/Registration	-	Persatuan Insinyur Indonesia
Kepala SPI SPI Head				
Broto Hariadi	Pelatihan Training	Pelatihan Upskilling Competencies Training Program Competencies Training Program Upskilling Training	Online 30/12/20-24/03/21	NBO
Broto Hariadi	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Manajemen Umum Dana Pensiun General Management of Pension Fund	Online 15/02/21-18/02/21	-ADPI -LSPDP
Broto Hariadi	Pelatihan Training	Pelatihan Risk Based Audit Pada Pekerjaan Sipil Risk Based Audit Training in Civil Works	Online 18/02/21-19/02/21	Mitra Prima Consulting
Broto Hariadi	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Manajemen Risiko Dana Pensiun Pension Fund Risk Management	Online 22/03/21-31/03/21	-ADPI -LSPDP
Broto Hariadi	Pelatihan Training	Diklat Khusus Bagi Kepala SPI Special Training for the Head of SPI	Online 22/06/21-08/07/21	PPAK
Broto Hariadi	Pelatihan Training	Strategi Penyusunan Transfer Pricing Transfer Pricing Strategy	Online 27/08/21-27/08/21	Tax forum BUMN
Broto Hariadi	Pelatihan Training	Pengukuhan Gelar Profesi PIA Inauguration of PIA's Professional Degree	Online 30/10/21-30/10/21	Asosiasi Auditor Internal
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
Taufik Hidayat	Sharing Session Sharing Session	Sharing Session Lesson Learned Kecelakaan Kerja Sharing Session Lesson Learned Work Accident	Online 18/06/21-18/06/21	NLC
Taufik Hidayat	Sharing Session Sharing Session	Sharing Session Pengendalian Covid Di Tempat Kerja Sharing Session on Controlling Covid at Work	Online 01/07/21-01/07/21	NLC
Taufik Hidayat	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Performance Management System berbasis KPI Individu Socialization of Performance Management System based on Individual KPI	Online 17/09/21-17/09/21	NLC



● Dermaga Kendari



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion
& Analysis



Per 31 Desember 2021, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp4,42 triliun, meningkat Rp798,88 miliar atau 22,09% di banding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3,62 triliun.

As of December 31, 2021, the Company recorded operating revenues of Rp4.42 trillion, an increase of Rp798.88 billion or 22.09% compared to the previous year of Rp3.62 trillion.

Tinjauan Perekonomian dan Industri

Economic and Industry Overview

Analisis Perekonomian Global dan Nasional

Merebaknya COVID-19 varian Delta pada April 2021 di sejumlah negara membuat perekonomian global mengalami tekanan dan kondisi yang penuh ketidakpastian. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* yang dikeluarkan pada bulan Oktober memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mengalami koreksi sebesar 0,1% menjadi 5,9% di tahun 2021. Di samping itu, World Bank dalam laporan *Global Economic Prospect* pada Januari 2022 juga menyebutkan COVID-19 memberikan dampak terjadinya ketimpangan ekonomi di suatu negara, salah satunya akibat menurunnya daya beli masyarakat pada tahun 2021 akibat tingginya faktor pemutusan hubungan kerja dan tingginya tingkat inflasi.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah di seluruh menerapkan kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2021, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, pembatasan mobilitas masyarakat, dan yang terpenting adalah vaksinasi. Percepatan vaksinasi COVID-19 selama tahun 2021 berdampak positif dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Terbukti, pertumbuhan ekonomi negara besar seperti Amerika Serikat pada triwulan IV-2021 berhasil mencapai 6,09% *year-on-year* (yoy) akibat mulai meningkatnya aktivitas konsumen, ekspor, dan investasi sektor swasta. Sementara, negara besar lainnya seperti Inggris berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% (yoy) mengingat mulai dilonggarkannya pembatasan sosial masyarakat seiring dengan gencarnya program vaksinasi yang dilakukan.

Di kawasan Asia, negara-negara seperti Korea Selatan juga berhasil tumbuh 4,0% (yoy) pada triwulan IV-2021, Jepang tumbuh sebesar 5,4% (yoy), dan Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi terbesar hingga mencapai 8,1% (yoy) sebagai bukti berhasilnya pemerintah setempat dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang di tahun 2021.

Sementara itu, tahun 2021 menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi nasional meski masih dibayangi kondisi pandemi COVID-19. Mengingat banyaknya tekanan akibat pandemi COVID-19 membuat Pemerintah fokus dalam mendorong perbaikan sekaligus meminimalisir dampak-dampak yang terjadi, mulai dari kesehatan hingga perekonomian.

Global and National Economic Analysis

The outbreak of the Delta variant of COVID-19 in April 2021 in a number of countries made the global economy experience pressure and conditions full of uncertainty. the International Monetary Fund (IMF) in its *World Economic Outlook* report issued in October projects that global economic growth will experience a correction of 0.1% to 5.9% in 2021. in addition, the World Bank in its *Global Economic Prospect* report in January 2022 also mentioned that COVID-19 had an impact on economic inequality in a country, one of which was the decline in people's purchasing power in 2021 due to the high factor of layoffs and high inflation rates.

In overcoming this, the government throughout implements policies in accordance with the conditions that occur during 2021, starting from fiscal, monetary policies, restrictions on people's mobility, and most importantly vaccinations. the acceleration of COVID-19 vaccination during 2021 has a positive impact in maintaining the pace of economic growth.

Evidently, the economic growth of large countries such as the United States in the fourth quarter of 2021 managed to reach 6.09% *year-on-year* (yoy) due to increased consumer activity, exports, and private sector investment. Meanwhile, other major countries such as the UK managed to record economic growth of 7.5% (yoy) considering that social restrictions began to be relaxed in line with the incessant vaccination program carried out.

In Asia, countries such as South Korea also managed to grow 4.0% (yoy) in the fourth quarter of 2021, Japan grew by 5.4% (yoy), and China recorded the largest economic growth reaching 8.1% (yoy) as evidence of the success of the local government in continuing the economic recovery in 2021.

Meanwhile, 2021 will be a momentum for national economic growth even though it is still overshadowed by the COVID-19 pandemic. Given the many pressures caused by the COVID-19 pandemic, the Government has focused on encouraging improvements while minimizing the impacts that occur, from health to the economy.

Pemerintah senantiasa menerapkan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengendalikan kondisi pandemi di dalam negeri, salah satunya dengan mempercepat program vaksinasi sejak awal tahun 2021. Dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar minus 0,74% (yoy) pada triwulan I-2021 tumbuh hingga 7,07% (yoy) pada triwulan II-2021.

Meski demikian, pemulihan ekonomi di dalam negeri juga masih mengalami sejumlah tantangan yang terjadi seperti merebaknya virus COVID-19 varian Delta pada bulan April hingga mencapai puncaknya di bulan Juli 2021. Mengingat kondisi yang cukup berat pada periode ini, Pemerintah kemudian menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mengendalikan laju penyebaran COVID-19 sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkontraksi (melambat) menjadi 3,51% (yoy) pada triwulan III-2021. Untuk memperbaiki kondisi pada periode ini, Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV-2021 menyebutkan Pemerintah berupaya untuk memberikan stimulus ekonomi dengan mempertahankan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di angka 3,50%, suku bunga *deposit facility* 2,75%, dan suku bunga *lending facility* 4,25%.

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 berhasil mengalami perbaikan menjadi sebesar 5,02% (yoy) seiring mulai mulai dilonggarkannya mobilitas masyarakat di luar rumah dan program vaksinasi *booster* pada akhir tahun 2021 yang diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi nasional di tahun berikutnya.

Analisis Industri Konstruksi Indonesia dan Posisi Perusahaan dalam Industri

Di tahun 2021, pandemi COVID-19 masih membayangi industri konstruksi dan infrastruktur Indonesia. Kebijakan ekonomi maupun kebijakan lain yang bertujuan untuk mengatasi pandemi di dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan dampak bagi jalannya usaha konstruksi dan infrastruktur. Kebijakan PPKM Darurat yang dijalankan oleh Pemerintah juga berdampak terhadap pembangunan proyek karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat dan larangan untuk berkerumun guna mengatasi pandemi COVID-19.

Meski demikian, kondisi industri konstruksi masih memiliki optimisme seiring dengan fokus Pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini juga didukung dengan anggaran infrastruktur dalam APBN Tahun 2021 yang

The government continues to implement sustainable policies to control pandemic conditions in the country, one of which is by accelerating the vaccination program since early 2021. the policies implemented by the government have a positive impact on the growth of the national economy. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth which was minus 0.74% (yoy) in the first quarter of 2021 grew to 7.07% (yoy) in the second quarter of 2021.

However, the domestic economic recovery is still experiencing a number of challenges, such as the outbreak of the Delta variant of the COVID-19 virus in April to its peak in July 2021. Given the fairly severe conditions during this period, the Government then implemented the Enforcement of Restrictions on Community Activities. (PPKM) Emergency to control the rate of spread of COVID-19 so as to have an impact on national economic growth which contracted (slowed down) to 3.51% (yoy) in quarter III-2021. To improve conditions during this period, Bank Indonesia in its Quarter IV-2021 Monetary Policy Report stated that the Government is trying to provide economic stimulus by maintaining the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 3.50%, the deposit facility interest rate at 2.75%, and the lending facility interest rate is 4.25%.

Through these policies, Indonesia's economic growth in the fourth quarter of 2021 managed to improve to 5.02% (yoy) in line with the loosening of community mobility restriction and the booster vaccination program at the end of 2021 which is expected to support the improvement of the national economy in the following year.

Analysis of the Indonesian Construction Industry and Company Position in the Industry

In 2021, the COVID-19 pandemic still loomed over Indonesia's construction and infrastructure industry. Economic policies and other policies aimed at directly or indirectly overcoming the domestic pandemic also have an impact on the course of construction and infrastructure businesses. the Emergency PPKM policy implemented by the Government also impacted project development due to restrictions on community mobility and prohibitions on gathering to overcome the COVID-19 pandemic.

Nevertheless, the construction industry is still optimistic in line with the Government's focus on encouraging infrastructure development through the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 and the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025. This is also supported by the infrastructure budget in the 2021 State Budget which amounted to Rp417.4 trillion, a

sebesar Rp417,4 triliun yang tumbuh 48,4% dibanding tahun sebelumnya. Fokus alokasi anggaran dana APBN 2021 di bidang infrastruktur adalah untuk penguatan infrastruktur digital untuk mendorong efisiensi logistik maupun konektivitas, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, infrastruktur padat karya untuk kawasan industri dan pariwisata, serta penyelesaian kegiatan prioritas yang telah berlangsung sejak tahun 2020 dan tertunda akibat pandemi COVID-19.

Fokus pembangunan Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 menjadikan industri konstruksi masih memiliki potensi besar untuk tetap tumbuh di tengah tantangan. Untuk itu, Perseroan tetap optimistis dalam menyelesaikan proyek yang telah berjalan dengan menyesuaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diambil. Selain mempercepat penyelesaian proyek, Perseroan juga berupaya untuk memperoleh proyek-proyek baru yang strategis, agar dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus berkontribusi bagi Indonesia, tidak hanya saat pandemi tetapi juga di segala situasi mengingat ketatnya industri konstruksi di Indonesia.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 17 sektor menurut usaha, jasa keuangan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi sebesar -2,5% secara tahunan (yoy) pada triwulan IV-2021. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan jasa intermediasi perbankan akibat penurunan spread suku bunga referensi dan suku bunga kredit yang disertai dengan penurunan yang signifikan pada pendapatan sekunder pada bank umum. Di sisi lain, sektor industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan mendominasi PDB triwulan IV-2021 sebesar 63,80%. Adapun rinciannya, sektor industri tumbuh sebesar 4,92%, sektor perdagangan sebesar 5,56%, sektor pertanian sebesar 2,28%, sektor konstruksi 3,91%, dan sektor pertambangan sebesar 5,15%.

Perbaikan kondisi perekonomian dan sektor konstruksi yang terjadi di tahun 2021 semakin memperluas peluang yang dimiliki oleh Perusahaan. Sementara, berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan Pemerintah untuk mempercepat proyek-proyek strategis dalam mendukung penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional juga membantu Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya di bidang konstruksi.

48.4% growth compared to the previous year. The focus of the 2021 APBN budget allocation in the infrastructure sector is to strengthen digital infrastructure to encourage logistical efficiency and connectivity, the development of public health facilities and the provision of basic needs, labor-intensive infrastructure for industrial and tourism areas, as well as the completion of priority activities that have been ongoing since 2020 and postponed due to the COVID-19 pandemic.

The Government's development focus through the 2020-2024 RPJMN makes the construction industry still have great potential to continue to grow amidst challenges. For this reason, the Company remains optimistic in completing ongoing projects by adjusting the Company's Work Plan and Budget (RKAP) taken. In addition to accelerating project completion, the Company also seeks to acquire strategic new projects, so that they can grow sustainably while contributing to Indonesia, not only during the pandemic but also in all situations given the tight construction industry in Indonesia.

Meanwhile, the Central Statistics Agency (BPS) noted that of the 17 sectors by business, financial services was the only business field that experienced a contraction of -2.5% on an annual basis (yoy) in the fourth quarter of 2021. This was due to delays in banking intermediation services due to a decrease in the spread of reference interest rates and lending rates accompanied by a significant decrease in secondary income at commercial banks. On the other hand, the industrial, trade, agriculture, construction and mining sectors dominated GDP in the fourth quarter of 2021 at 63.80%. As for the details, the industrial sector grew by 4.92%, the trade sector by 5.56%, the agricultural sector by 2.28%, the construction sector by 3.91%, and the mining sector by 5.15%.

Improvements in economic conditions and the construction sector that occurred in 2021 further expanded the opportunities owned by the Company. Meanwhile, various economic policies implemented by the Government to accelerate strategic projects to support the provision of basic services, increase connectivity, and support national economic recovery also assist the Company in running its business in the construction sector.

Rencana Strategis 2021

2021 Strategic Plan

Strategi Perusahaan

Sebagai salah satu pelaku industri di bidang konstruksi, Perseroan melihat bahwa 2021 merupakan tahun momentum untuk pertumbuhan industri konstruksi, hal tersebut seiring dengan program pemulihan ekonomi yang digulirkan oleh Pemerintah, yang memberikan stimulus positif bagi para pelaku industri, khususnya di bidang konstruksi. Meski demikian, tidak sedikit para pelaku industri yang cukup hati-hati dalam menetapkan target pencapaian kinerja untuk tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah menyusun perencanaan strategis, investasi & operasi yang telah ditetapkan dalam RKAP 2021, antara lain:

1. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan dengan melakukan investasi pada bidang-bidang strategis sesuai dengan anggaran dasar yang ditetapkan perusahaan baik melalui inisiasi bisnis, kerjasama kemitraan strategis, maupun tender investasi atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
2. Penetrasi pasar pada proyek-proyek EPC (Oil & Gas), energi terbarukan dan investasi melalui sinergi antar BUMN serta kerjasama dengan perusahaan asing.
3. Merencanakan pendanaan pada agenda investasi baik bersumber dari equity, mitra strategis, maupun pendanaan kredit perbankan dan Lembaga keuangan.
4. Melakukan monitoring realisasi investasi yang sudah berjalan, evaluasi kinerja dan pencapaian terhadap target-target yang menjadi indikator realisasi investasi seperti IRR, NPV, PBP, PI.
5. Meningkatkan implementasi Program ERP, MS. Project, BIM, CCTV & Video Conference sebagai alat kerja tata kelola proyek.
6. Memanfaatkan inovasi metode kerja untuk memberi nilai tambah perusahaan.
7. Peningkatan kualitas proses penetapan PPP dengan mempertimbangkan unsur 5 M (Metode, Material, Main Power, Machine & Money).
8. Memaksimalkan pembiayaan internal perusahaan dengan mengutamakan *inflow* proyek.
9. Percepatan pekerjaan persiapan dan pelaksanaan proyek *carry over* dan proyek baru.
10. Monitoring dan evaluasi kegiatan operasional mingguan secara konsisten.

Corporate Strategy

As one of the industry players in the construction sector, the Company sees that 2021 is a year of momentum for the growth of the construction industry, this is in line with the economic recovery program launched by the Government, which provides a positive stimulus for industry players, especially in the construction sector. However, not a few industry players are quite careful in setting performance targets for 2021.

Based on this, the Company has prepared strategic planning, investment & operations that have been stipulated in the 2021 RKAP, including:

1. Continuing the company's growth by investing in strategic areas in accordance with the articles of association determined by the company, either through business initiation, strategic partnership cooperation, or investment tender or Government and Business Entity Cooperation (PPP).
2. Market penetration in EPC (Oil & Gas) projects, renewable energy and investment through synergies between SOEs and cooperation with foreign companies.
3. Planning funding on the investment agenda, whether sourced from equity, strategic partners, as well as bank credit funding and financial institutions.
4. Monitoring the realization of investments that are already running, evaluating performance and achieving targets that are indicators of investment realization such as IRR, NPV, PBP, PI.
5. Improve the implementation of ERP, MS Program. Project, BIM, CCTV & Video Conference as project management work tools.
6. Utilizing innovative work methods to add value to the company.
7. Improving the quality of the PPP determination process by considering the 5 M elements (Method, Material, Main Power, Machine & Money).
8. Maximizing the company's internal financing by prioritizing project inflow.
9. Acceleration of work on the preparation and implementation of carry over projects and new projects.
10. Monitoring and evaluation of weekly operational activities consistently.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama (*core business*) yang dijalankan yaitu di bidang jasa konstruksi. Seiring dengan perkembangannya, Perseroan melakukan pengembangan bisnis yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha utama yaitu manufaktur dengan pendirian anak perusahaan PT Nindya Beton, properti dengan mendirikan Divisi Properti serta sewa alat dengan mendirikan Unit Bisnis Unit Penunjang Produksi.

Secara umum, kinerja operasional Perseroan terlihat dari nilai pekerjaan yang tersedia yang terdiri dari nilai pekerjaan dari sisa proyek lama dan nilai pekerjaan dari proyek baru, seperti yang terlihat dari tabel di bawah ini.

Based on the Company's Articles of Association, the main business activities (*core business*) carried out are in the field of construction services. Along with its development, the Company carried out business development that is still related to the main business activities, namely manufacturing by establishing a subsidiary company PT Nindya Beton, property by establishing a Property Division and equipment rental by establishing a Production Supporting Business Unit.

In general, the Company's operational performance can be seen from the value of available work which consists of the value of the work from the remaining old projects and the value of the work from the new project, as shown in the table below.

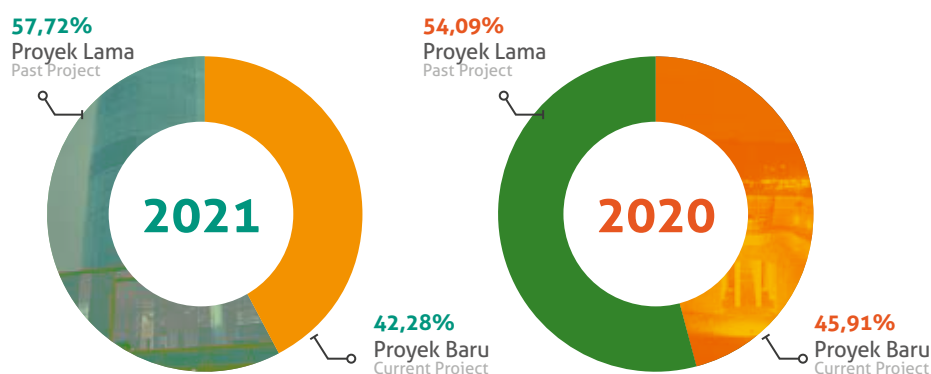
Tabel Nilai Pekerjaan Tersedia 2020-2021
Table of Available Work 2020-2021

Keterangan Description	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Sisa Proyek Lama Carryover from Previous Project	6.827.061	57,72%	6.267.567	54,09%	615.443	8,93%
Proyek Baru New Project	5.000.932	42,28%	5.318.801	45,91%	(349.656)	-5,98%
Nilai Pekerjaan Proyek Project Work Value	11.827.993	100,00%	11.586.368	100,00%	265.787	2,09%

Jumlah nilai pekerjaan tersedia tahun 2021 sebesar Rp13,01 triliun, mengalami peningkatan 2,09% atau setara dengan Rp265,79 miliar dibandingkan tahun 2020 yang senilai Rp12,75 triliun. Jumlah nilai pekerjaan tersedia tahun 2021 terdiri dari sisa pekerjaan proyek lama yang diperoleh tahun 2021 sebesar Rp7,51 triliun dengan komposisi 57,72%, dan perolehan proyek baru tahun 2021 sebesar Rp5,50 triliun atau 42,28% dari total nilai pekerjaan tersedia.

The total value of available jobs in 2021 is Rp13.01 trillion, an increase of 2.09% or equivalent to Rp265.79 billion compared to 2020 which was Rp12.75 trillion. the total value of available work in 2021 consists of the remaining work on old projects obtained in 2021 amounting to Rp7.51 trillion with a composition of 57.72%, and new project acquisitions in 2021 amounting to Rp5.50 trillion or 42.28% of the total value of available jobs.

Komposisi Kontribusi Segmen Usaha terhadap Pendapatan Perusahaan
Composition of Business Segment Contribution Towards Company Revenue



Dalam laporan keuangan audited 2021, pengembangan bisnis yang dilakukan turut membentuk struktur pendapatan usaha Perseroan yang membagi kegiatan bisnis Perseroan ke dalam 4 (empat) segmen yaitu Konstruksi, Manufaktur, Properti dan Sewa Alat.

In the 2021 audited financial report, the business development carried out also forms the structure of the Company's operating income which divides the Company's business activities into 4 (four) segments, namely Construction, Manufacturing, Property and Equipment Rental.

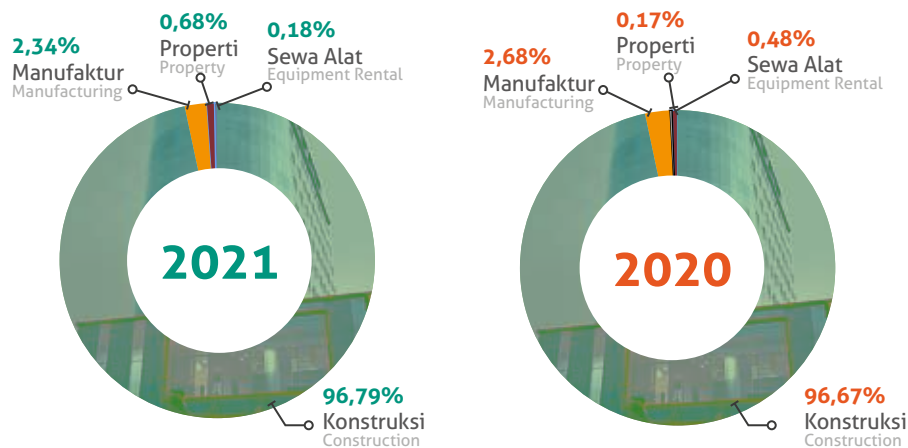
kontribusi setiap segmen usaha terhadap Pendapatan Perseroan dapat dilihat tabel di bawah ini.

The contribution of each business segment to the Company's revenue can be seen in the table below.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Usaha terhadap Pendapatan 2020-2021
Amount and Contribution of Business Segments Towards Revenue 2020-2021

Segmen Operasi Operating Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Konstruksi Construction	4.273.745	96,79%	3.496.211	96,67%	777.534	22,24%
Manufaktur Manufacture	103.462	2,34%	96.549	2,68%	6.913	7,16%
Properti Property	30.038	0,68%	17.487	0,48%	12.551	71,77%
Sewa Alat Equipment Rental	8.119	0,18%	6.237	0,17%	1.882	30,17%
Jumlah Pendapatan Total Income	4.415.364	100,00%	3.616.483	100,00%	798.881	22,09%

Komposisi Kontribusi Segmen Usaha terhadap Pendapatan Perusahaan
Composition of Business Segment Contribution Towards Company Revenue



Terlihat dari komposisi pada bagan di atas, segmen usaha Konstruksi merupakan kompetensi inti Perseroan, dengan kontribusi mencapai 96,79% terhadap pendapatan konsolidasian tahun 2021.

As the chart composition above demonstrated, the Construction business segment is the Company's core competency, with a contribution of 96.79% to the 2021 consolidated revenue.

Uraian tentang masing-masing segmen usaha dapat dilihat di bawah ini.

A description of each business segment can be seen below.

Konstruksi

Segmen usaha Konstruksi didapatkan dari kegiatan usaha utama Perseroan yaitu jasa konstruksi dan Engineering, Procurement and Construction (EPC), yang mencakup 5 (lima) produk dan jasa konstruksi yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan.

Construction

The Construction business segment is derived from the Company's main business activities, namely construction services and Engineering, Procurement and Construction (EPC), which includes 5 (five) construction products and services provided by the Company to customers.

Produk dan Jasa Segmen Usaha Konstruksi

Construction Business Segment Products And Services



Produktivitas Segmen Usaha Konstruksi

A. Irigasi dan Pengairan

Salah satu jasa konstruksi Perusahaan adalah pembangunan irigasi atau pengairan, meliputi pekerjaan irigasi, bendung, embung, pengaman pantai, pemipaan air minum atau air limbah, normalisasi sungai, danau, rawa.

Produktivitas jasa konstruksi Perseroan melalui pembangunan Irigasi/Pengairan terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Nilai Pekerjaan Proyek Irigasi/Pengairan (Excl. PPN) 2020-2021
Table of Work Value of Road and Bridge Projects (Excl. VAT) 2020-2021

Segmen Usaha Business Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Sisa Proyek Lama Carryover from Previous Project	1.917.209	55,34%	2.432.261	79,76%	(515.052)	-21,18%
Proyek Baru New Project	1.547.200	44,66%	617.039	20,24%	930.160	150,75%
Nilai Pekerjaan Proyek Project Work Value	3.464.409	100,00%	3.049.301	100,00%	415.109	13,61%

Di tahun 2021, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek Irigasi/Pengairan sebesar Rp1,55 triliun, meningkat 150,75% atau setara dengan Rp930.16 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp617,04 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pangsa pasar di bidang irigasi/pengairan di tahun 2021 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. Jalan dan Jembatan

Perseroan memberikan jasa pembangunan untuk proyek di bidang Jalan dan Jembatan meliputi pekerjaan jalan (peningkatan dan baru), pekerjaan jembatan, pekerjaan fly over, pekerjaan under pass, dan pekerjaan rel kereta api.

Produktivitas jasa konstruksi Perseroan melalui pembangunan Jalan dan Jembatan terlihat dari

Productivity of the Construction Business Segment

A. Irrigation and Waterworks

One of the Company's construction services is the construction of irrigation or irrigation works, including irrigation works, weirs, reservoirs, coastal protection, piped drinking water or waste water, normalization of rivers, lakes, swamps.

The productivity of the Company's construction services through the construction of irrigation/irrigation can be seen from the development of the value of the work, as shown in the table below.

In 2021, the Company recorded the value of New Projects from Irrigation/Waterwork projects of Rp1.55 trillion, an increase of 150.75% or equivalent to Rp930.16 billion compared to 2020 of Rp617.04 billion. This increase was mainly due to the larger market share in the irrigation/irrigation sector in 2021 when compared to the previous year.

B. Roads and Bridges

The Company provides development services for projects in the Road and Bridge sector including road works (upgrade and new), bridge works, fly over works, under pass works, and railroad works.

The productivity of the Company's construction services through the construction of roads and bridges can be

perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

seen from the development of the value of the work, as shown in the table below. in 2021, the Company recorded a New

Tabel Nilai Pekerjaan Proyek Jalan dan Jembatan (Excl. PPN) 2020-2021
Table of Work Values for Road and Bridge Projects (Excl. VAT) 2020-2021

Segmen Usaha Business Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Sisa Proyek Lama Carryover from Previous Project	995.787	60,42%	181.818	17,03%	813.969	447,68%
Proyek Baru New Project	652.450	39,58%	885.507	82,97%	(233.057)	-26,32%
Nilai Pekerjaan Proyek Project Work Value	1.648.237	100,00%	1.067.325	100,00%	580.912	54,43%

Di tahun 2021, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek Jalan dan Jembatan sebesar Rp652,45 miliar, turun 39,58% atau setara dengan Rp233.06 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp885.51 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya proyek yang tidak tayang karena adanya refocusing anggaran pada APBN 2021.

Project value of the Road and Bridge project of Rp652.45 billion. decreased by 39.58% or equivalent to Rp233.06 billion compared to 2020 of Rp885.51 billion. This decrease was caused by the number of projects that were not broadcast due to budget refocusing in the 2021 State Budget.

C. Bangunan/Gedung

Perseroan memberikan jasa konstruksi pada proyek Bangunan/Gedung meliputi pekerjaan gedung, pembangunan pabrik, pembangunan silo, pembangunan gudang dan pembangunan kawasan. Produktivitas jasa konstruksi Perusahaan melalui pembangunan Bangunan/Gedung terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

C. Building/Construction

The Company provides construction services for Building/Building projects including building works, factory construction, silo construction, warehouse construction and area development. the productivity of the Company's construction services through the construction of buildings/buildings can be seen from the development of the value of work, as shown in the table below.

Tabel Nilai Pekerjaan Proyek Bangunan/Gedung (Excl. PPN) 2020-2021
Table of Work Value for Building/Building Projects (Excl. VAT) 2020-2021

Segmen Usaha Business Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Sisa Proyek Lama Carryover from Previous Project	632.309	34,53%	881.055	49,10%	(284,746)	-28,32%
Proyek Baru New Project	1.198.904	65,47%	913.409	50,90%	285.495	31,26%
Nilai Pekerjaan Proyek Project Work Value	1.831.213	100,00%	1.794.464	100,00%	36.749	2,05%

Di tahun 2021, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek Bangunan/Gedung sebesar Rp1,20 triliun, naik 31,26% atau setara dengan Rp285.50 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp913.41 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh luasnya pangsa pasar di bidang bangunan/gedung di tahun 2021 sehingga terjadi peningkatan perolehan proyek baru dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2021, the Company recorded the value of New Projects from Building/Building projects of Rp1.20 trillion, an increase of 31.26% or equivalent to Rp285.50 billion compared to 2020 of Rp913.41 billion. This increase was due to the wide market share in the building sector in 2021, resulting in an increase in the acquisition of new projects compared to the previous year.

D. Pelabuhan/Bandara

Perseroan memberikan jasa konstruksi untuk proyek pembangunan Pelabuhan/Bandara meliputi pembangunan pelabuhan, pembangunan runway bandara, pembangunan apron bandara dan pembangunan dermaga.

Produktivitas jasa konstruksi Perusahaan melalui pembangunan Pelabuhan/Bandara terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Nilai Pekerjaan Proyek Pelabuhan/Bandara 2020-2021
Table of Port/Airport Project Work Value 2020-2021

Segmen Usaha Business Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Sisa Proyek Lama Carryover from Previous Project	462.809	78,98%	83.576	9,08%	379.233	453,76%
Proyek Baru New Project	123.205	21,02%	837.215	90,92%	(714.010)	-85,28%
Nilai Pekerjaan Proyek Project Work Value	586.013	100,00%	920.791	100,00%	(334.778)	-36,36%

Di tahun 2021, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek Pelabuhan/Bandara sebesar Rp123,21 triliun, turun 85,28% atau setara dengan Rp714,01 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp837,22 miliar. Penurunan ini disebabkan proyek-proyek yang ditargetkan tayang pada tahun 2021 tidak jadi ditayangkan akibat adanya refocusing APBN 2021.

D. Port/Airport

The Company provides construction services for port/airport development projects including port construction, airport runway construction, airport apron construction and dock construction.

The productivity of the Company's construction services through the construction of ports/airports can be seen from the development of the value of work, as shown in the table below.

In 2021, the Company recorded the value of New Projects from Port/Airport projects of Rp123.21 trillion, decreased by 85.28% or equivalent to Rp714.01 billion compared to 2020 of Rp837.22 billion. This decrease is due to the projects that are targeted to be broadcast in 2021, due to the refocusing of the 2021 State Budget.

E. EPC (Engineering, Procurement and Construction) dan Lain-Lain

Perseroan juga memberikan layanan EPC (Engineering, Procurement and Construction) yang berfokus pada lini bisnis energi, power dan water, seperti tanki penyimpanan LPG, jaringan pemipaan gas dan minyak serta pengelolaan air bersih dan limbah.

Produktivitas jasa konstruksi Perseroan melalui pembangunan EPC dan lain-lain terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Nilai Pekerjaan Proyek EPC 2020-2021
Tabel Nilai Pekerjaan Proyek EPC 2020-2021

Segmen Usaha Business Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Sisa Proyek Lama Carryover from Previous Project	533.817	91,80%	643.246	73,69%	(109.429)	-17,01%
Proyek Baru New Project	47.664	8,20%	229.616	26,31%	(181.952)	-79,24%
Nilai Pekerjaan Proyek Project Work Value	581.481	100,00%	872.862	100,00%	(291.381)	-33,38%

E. EPC (Engineering, Procurement and Construction) and Others

The Company also provides EPC (Engineering, Procurement and Construction) services that focus on energy, power and water business lines, such as LPG storage tanks, gas and oil pipelines and clean water and waste management.

The productivity of the Company's construction services through the construction of EPC and others can be seen from the development of the value of work, as shown in the table below.

Di tahun 2021, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek EPC sebesar Rp47,66 miliar, turun 79,24% atau setara dengan Rp181.95 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp229,62 miliar. Penurunan ini disebabkan banyak proyek yang mengalami refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19.

In 2021, the Company recorded the value of New Projects from the EPC project amounted to Rp47.66 billion. down 79.24% or equivalent to Rp181.95 billion compared to 2020 which was Rp229.62 billion. This decrease was due to many projects experiencing budget refocusing due to the COVID-19 pandemic.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Konstruksi

Revenue and Profitability of Construction Business Segment

Berikut adalah pendapatan dan profitabilitas segmen usaha konstruksi

The following is the revenue and profitability of the construction business segment

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Konstruksi 2020-2021
Revenue and Profitability of Construction Business Segment 2020-2021

Segmen Konstruksi Construction Segment	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)
Pendapatan Usaha Operating Revenues				
Pihak Berelasi Related Parties	1.003.123	843.547	159.576	18,92%
Pihak Ketiga Third Party	3.270.622	2.652.664	617.958	23,30%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(3.901.091)	(3.147.366)	(753.725)	23,95%
Laba/Rugi Usaha Operating Profit/Loss	372.654	348.845	23.809	6,83%

Pendapatan usaha segmen Konstruksi tahun 2021 tercatat sebesar Rp4,27 triliun, naik 22,24% atau setara dengan Rp777,53 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp3,49 triliun. Peningkatan pendapatan usaha tersebut berdampak terhadap meningkatnya laba usaha segmen Konstruksi yang di tahun 2021 tercatat sebesar Rp372,65 miliar naik 6,83% atau setara dengan Rp23,81 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp348,85 miliar.

Construction segment operating revenue in 2021 was recorded at Rp4.27 trillion. an increase of 22.24% or equivalent to Rp777.53 billion from 2020 which was Rp3.49 trillion. the increase in operating income resulted in an increase in operating profit for the Construction segment which in 2021 was recorded at Rp372.65 billion, an increase of 6.83%. or equivalent to Rp23.81 billion from 2020 of Rp348.85 billion.

Properti

Property

Produk dan Jasa serta Kegiatan Operasi Segmen Usaha Properti

Products and Services and Operating Activities of the Property Business Segment

Di samping jasa konstruksi, Perseroan juga melakukan pengembangan usaha pada sektor properti. Di sepanjang tahun 2021, Perseroan telah memiliki beberapa pengembangan usaha pada sektor properti komersial dan juga residensial. Dari sektor properti komersial perseroan memiliki beberapa usaha baik yang telah beroperasi maupun sedang dalam tahap pengerjaan. yang pertama perseroan saat ini memiliki usaha sewa kantor dan tanah yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, yang kedua perseroan telah memiliki Hotel Horison Nindya Semarang yang bertaraf bintang 3 dan telah mulai beroperasi sejak tahun 2018, Hotel Horison Nindya Semarang memiliki fasilitas 166 kamar, gym, meeting room dan kolam renang. Selain Hotel Horison Nindya Semarang perseroan juga sedang melakukan pembangunan hotel pods/kapsul dengan

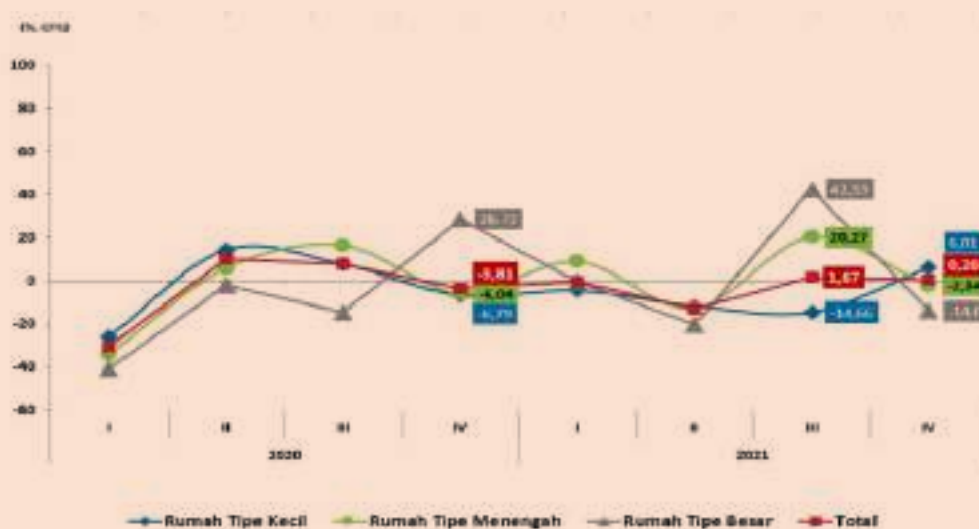
In addition to construction services, the Company also conducts business development in the property sector. Throughout 2021, the Company has had several business developments in the commercial and residential property sectors. From the commercial property sector, the company has several businesses that are already operating or are in the construction stage. the first is that the company currently has office and land rental businesses spread across almost all parts of Indonesia, the second is that the company owns the 3-star Hotel Horison Nindya Semarang and has been operating since 2018, Hotel Horison Nindya Semarang has facilities of 166 rooms, a gym.. meeting room and swimming pool. in addition to the Horison Nindya Hotel Semarang, the company is also developing a pods/capsule hotel with a mix used concept that carries the name Nindya Biodistrict

konsep mix used yang mengusung nama Nindya Biodistrict Bandung, diharapkan Nindya Biodistrict Bandung dapat menjadi pilihan utama pada kategori hotel pods/kapsul di Kota Bandung, dikarenakan dengan adanya café dan meeting room Nindya Biodistrict Bandung memiliki fasilitas yang paling lengkap jika dibandingkan hotel sejenis, ditargetkan Nindya Biodistrict Bandung akan mulai beroperasi pada awal tahun 2022. Dari sektor properti residensial perseroan sampai dengan saat ini telah memiliki 2 usaha perumahan yang berlokasi di Kota Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan nama Permata Gowa yang memiliki 43 unit rumah dan the Purinatha Cluster yang berlokasi di Cilangkap Kota Jakarta Timur yang memiliki 21 unit rumah. Pertumbuhan Triwulanan Penjualan Rumah (% , QTQ)

Bandung, it is hoped that Nindya Biodistrict Bandung can become the first choice in the pods/capsule hotel category in Bandung City, due to the presence of a café and meeting room. Nindya Biodistrict Bandung has the most complete facilities when compared to similar hotels, it is targeted that Nindya Biodistrict Bandung will start operating in early 2022. From the residential property sector, the company currently has 2 housing businesses located in Gowa City, South Sulawesi Province under the name Permata Gowa which has 43 housing units and the Purinatha Cluster located in Cilangkap, East Jakarta City which has 21 housing units. Growth Quarterly Sale Houses (% , QTQ)

Produktivitas Segmen Usaha Properti

Productivity of the Property Business Segment



Sumber: Bank Indonesia
Source: Bank Indonesia

Berdasarkan tabel diatas, secara umum penjualan properti residensial primer triwulan IV-2021 secara tahunan terindikasi membaik. Meskipun penjualan rumah masih mengalami kontraksi sebesar -11,60% (yoy), namun mengalami perbaikan dari kontraksi sebesar -15,19% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dan juga lebih baik dari kontraksi -20,59% (yoy) pada triwulan IV-2020. Perbaikan perkembangan penjualan pada triwulan IV-2021 didorong oleh membaiknya penjualan pada tipe rumah menengah yang tumbuh signifikan (11,26%, yoy). Penjualan pada tipe rumah menengah pun tercatat merupakan yang paling stabil secara qtt jika dibandingkan dengan penjualan tipe rumah kecil dan tipe rumah besar.

Berdasarkan data tersebut di atas memberikan optimisme pada perseroan untuk dapat terus berkembang khususnya pada sektor properti residensial, dimana saat ini perseroan memiliki 2 usaha pada sektor tersebut yaitu perumahan Permata Gowa dan Perumahan the Purinatha Cluster.

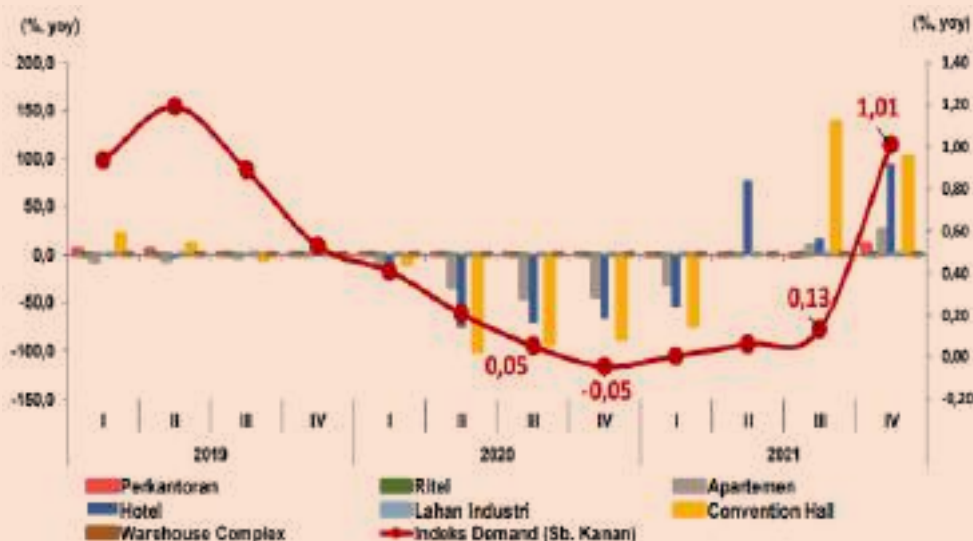
Based on the table above, in general, sales of primary residential properties in the fourth quarter of 2021 on an annual basis are indicated to be improving. Although house sales still contracted by -11.60% (yoy), it improved from the contraction of -15.19% (yoy) in the previous quarter, and was also better than the contraction of -20.59% (yoy) in the previous quarter. IV-2020. the improvement in sales development in the fourth quarter of 2021 was driven by the improvement in sales of medium-sized houses which grew significantly (11.26%, yoy). Sales of medium-sized houses were recorded as the most stable in qtt when compared to sales of small houses and large houses.

Based on the data above, it gives optimism to the company to be able to continue to grow, especially in the residential property sector, where the company currently has 2 businesses in this sector, namely Permata Gowa housing and the Purinatha Cluster housing.

Pertumbuhan Tahunan Indeks Demand Properti Komersial (% , QTQ)
Commercial Property Demand Index Annual Growth (% , QTQ)



Pertumbuhan Tahunan Indeks Demand Properti Komersial I (% , YOY)
Commercial Property Demand Index Annual Growth I (% , YOY)



Permintaan properti komersial pada triwulan IV-2021 menunjukkan peningkatan secara tahunan. Indeks permintaan properti komersial triwulan IV-2021 tercatat tumbuh 1,01% (yoy) dan 0,91% (qtq), peningkatan didorong oleh kategori hotel dan contention hall. Peningkatan pada kategori hotel dan contention hall ini tentunya juga memberikan optimisme bagi perseroan dalam pengembangan usaha pada sektor properti komersial khususnya untuk usaha yang telah beroperasi yaitu Hotel Horison Nindya Semarang dan juga Nindya Biodistrict Bandung yang ditargetkan dapat beroperasi di awal tahun 2022.

Demand for commercial properties in the fourth quarter of 2021 shows an annual increase. the demand index for commercial property in the fourth quarter of 2021 recorded growth of 1.01% (yoy) and 0.91% (qtq), driven by the hotel and contention hall categories. This increase in the hotel and contention hall categories of course also provides optimism for the company in business development in the commercial property sector, especially for businesses that have been operating, namely Hotel Horison Nindya Semarang and also Nindya Biodistrict Bandung, which are targeted to be operational in early 2022.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Properti

Berikut adalah pendapatan dan profitabilitas segmen usaha Properti

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Properti 2020-2021
Property Business Segment Revenue and Profitability 2020-2021

Segmen Properti Property Segment	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	30.038	17.487	12.551	71,77%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(26.852)	(16.192)	(10.660)	65,83%
Laba/Rugi Usaha Operating Profit/Loss	3.186	1.295	1.891	146,02%

Pendapatan usaha segmen Properti tahun 2021 tercatat sebesar Rp30,04 miliar, naik 71,77% atau setara dengan Rp12,55 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp17,48 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan di Hotel Horison Nindya Semarang sebagai dampak penurunan status pandemi mulai Semester II tahun 2021. Faktor lainnya adalah dimulainya pemasaran unit rumah di the Purinatha Cluster yang berlokasi di Cilangkap Kota Jakarta Timur, yang memberikan dampak cukup banyak pada peningkatan Pendapatan Usaha. Peningkatan pendapatan usaha tersebut berdampak terhadap meningkatnya laba usaha segmen Properti yang di tahun 2021 tercatat sebesar Rp3,18 miliar naik 146,02% atau setara dengan Rp1,89 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp1,29 miliar.

Revenues in 2021 were recorded at Rp30.04 billion. an increase of 71.77% or equivalent to Rp12.55 billion from 2020 of Rp17.48 billion. This is caused by an increase in revenue at the Horison Nindya Hotel Semarang as a result of the decline in the status of the pandemic starting in the second semester of 2021. Another factor is the start of marketing for housing units in the Purinatha Cluster is located in Cilangkap, East Jakarta City, which has had a considerable impact on increasing Business Revenue. the increase in operating income resulted in an increase in operating profit for the Property segment which in 2021 was recorded at Rp3.18 billion, an increase of 146.02%. or equivalent to Rp1.89 billion from 2020 of Rp1.29 billion.

Sewa Alat

Produk dan Jasa serta Kegiatan Operasi Segmen Usaha Sewa Alat

Sejak Juli 2018, Direksi telah mengesahkan Pengelolaan aktiva tetap Peralatan kepada Divisi Peralatan sesuai Keputusan direksi No. 0363/DIRUT/KPTS/SEKPER/06/2018 tanggal 5 Juli 2018, di mana semula bernama Unit Penunjang Produksi berubah menjadi Divisi Peralatan pada tahun 2021 memiliki wewenang bertanggung jawab atas Pengelolaan Aktiva Tetap Peralatan yang meliputi pencatatan, pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian serta pemeliharaan Aktiva Tetap Peralatan.

Tool Rent

Products and Services and Operating Activities of Equipment Rental Business Segment

Since July 2018, the Board of Directors has authorized the Management of fixed assets of Equipment to the Equipment Division in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 0363/DIRUT/KPTS/SEKPER/06/2018 dated 5 July 2018, which was originally named Production Support Unit changed to Equipment Division in 2021, has the authority to be responsible for Equipment Fixed Asset Management which includes recording, operation, utilization, control and maintenance Fixed Assets Equipment.

Tahapan yang telah dilakukan Divisi Peralatan di tahun 2021 atas Aset Alat Aktiva Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Workshop dengan memanfaatkan lahan perseroan di Krian Sidoarjo sebagai pusat kegiatan perawatan dan perbaikan Peralatan serta pengendalian operasi Divisi Peralatan.
2. Penambahan peralatan Paving Set yaitu Pneumatic Tire Roller dan Tandem Roller masing-masing berjumlah 1 unit yang digunakan untuk proses penghamparan aspal pada proyek Jalan Batanghari Zona V Jambi.
3. Penambahan peralatan Trado Self Loader berjumlah 1 unit yang digunakan untuk mendukung mobilitas alat di Prosek Jalan Gusig-SP Blusuh, Kutai Barat, Kalimantan Timur.
4. Memperkuat sumber daya peralatan dengan melakukan Pekerjaan Jasa Produksi dan Penghamparan Aspal pada Proyek Overlay Permukaan Runway Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
5. Memperluas Jaringan dan Berkolaborasi dengan sesama Perusahaan BUMN yaitu PT PP Presisi Tbk. dengan melakukan Pekerjaan Jasa Produksi dan Penghamparan Aspal pada Proyek Paved Shoulder Bandara Runway Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
6. Monitoring alat menggunakan inova track untuk mengetahui jam kerja alat serta posisi alat secara real time.
7. Melakukan ekspansi pasar Sewa Alat Jacking Pipe di Perusahaan Swasta pada proyek IPAL Pekanbaru

The stages that have been carried out by the Equipment Division in 2021 for the Company's Assets and Assets are as follows:

1. Construction of a Workshop by utilizing the company's land in Krian Sidoarjo as a center for equipment maintenance and repair activities as well as controlling the operation of the Equipment Division.
2. The addition of Paving Set equipment, namely Pneumatic Tire Roller and Tandem Roller, each amounting to 1 unit which is used for the asphalt laying process on the Jalan Batanghari Zone V Jambi project.
3. The addition of 1 unit of Trado Self Loader equipment which is used to support the mobility of the equipment in the Gusig-SP Blusuh Road Project, West Kutai, East Kalimantan.
4. Strengthening equipment resources by performing Asphalt Production and Overlaying Services on the Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport Runway Surface Overlay Project.
5. Expanding Networks and Collaborating with other State-Owned Enterprises, namely PT PP Presisi Tbk. by performing Asphalt Production and Overlay Services on the Paved Shoulder Project at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport Runway Airport.
6. Monitoring tools using the Inova track to find out the working hours of the tool and the position of the tool in real time.
7. Expanding the Jacking Pipe Equipment Rental market in private companies in the Pekanbaru IPAL project

Produktivitas Segmen Usaha Sewa Alat

Nilai Pekerjaan dari keseluruhan Segmen Usaha Sewa Alat tahun 2021 sebesar Rp305,04 miliar. dari total Nilai Pekerjaan tahun 2021, 54,19% di antaranya merupakan proyek baru, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Productivity of Equipment Rental Business Segment

The Work Value of the entire Equipment Rental Business Segment in 2021 is Rp305.04 billion. of the total Job Value in 2021, 54.19% of them are new projects, as shown in the table below.

Tabel Nilai Pekerjaan Segmen Usaha Sewa Alat 2020-2021
Table of Job Values for Equipment Rental Business Segments 2020-2021

Segmen Usaha Business Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Sisa Proyek Lama Carryover from Previous Project	5.808	13,37%	15.635	15,85%	9.827	(62,85%)
Proyek Baru New Project	36.578	86,30%	83.000	84,15%	46.422	(55,93%)
Nilai Pekerjaan Proyek Project Work Value	42.386	100%	98.635	100%	56.249	(57,03%)

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Sewa Alat

Berikut adalah pendapatan dan profitabilitas segmen usaha Sewa Alat

Revenue and Profitability of Equipment Rental Business Segment

The following are the revenue and profitability of the Equipment Rental business segment

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Sewa Alat 2020-2021

Revenue and Profitability of Equipment Rental Business Segment 2020-2021

Segmen Sewa Alat Equipment Rental Business Segment	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	39.589	60.943	(21.354)	53,94%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(49.386)	(56.770)	(7.384)	14,95%
Laba/Rugi Usaha Operating Profit/Loss	(9.797)	4.173	(13.970)	142,59%

Pendapatan usaha segmen Sewa Alat tahun 2021 tercatat sebesar Rp39,58 miliar, turun 53,94% atau setara dengan Rp21,35 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp60,94 miliar. Hal ini disebabkan oleh Divisi Peralatan pada Semester awal masih fokus pada pasar sektor Internal Perusahaan dan tidak tercapainya target perolehan pada Pekerjaan Jasa Produksi. Adapun di tahun 2021, Perseroan mencatatkan rugi usaha segmen Sewa Alat sebesar Rp9,79 miliar turun 142,59% atau setara dengan Rp13,97 miliar dari tahun 2020 dengan laba usaha sebesar Rp4,17 miliar, yang lebih disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan segmen Sewa Alat tahun 2021 dibanding tahun 2020.

The operating income of the Equipment Rental segment in 2021 was recorded at Rp39.58 billion, a decrease of 53.94% or equivalent to Rp21.35 billion from 2020 of Rp60.94 billion. This is due to the Equipment Division in the first semester still focusing on the Company's internal sector market and not achieving the target for production services work. Meanwhile, in 2021, the Company recorded an operating loss in the Equipment Rental segment of Rp9.79 billion, a decrease of 142.59% or equivalent to Rp13.97 billion from 2020 with an operating profit of Rp4.17 billion, which was mainly due to an increase in the cost of revenue for the segment. Equipment Rental in 2021 compared to 2020.

Manufaktur

Produk dan Jasa serta Kegiatan Operasi Segmen Usaha Manufaktur

Segmen usaha manufaktur didapatkan dari pencatatan atas kegiatan manufaktur produk beton dari entitas anak, PT Nindya Beton ("PT NB"). PT NB didirikan sebagai bagian dari pengembangan bisnis Perseroan di bidang beton pracetak. PT NB bergerak pada industri dan pabrikasi Beton Pracetak, Readymix, serta usaha berkaitan lainnya. Pendirian PT NB diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing Perseroan, serta dapat mendukung kebutuhan beton pada proyekproyek Perusahaan.

Manufacture

Products and Services and Operating Activities of the Manufacturing Business Segment

The manufacturing business segment is obtained from the recording of the concrete product manufacturing activities of the subsidiary, PT Nindya Beton ("PTNB"). PT NB was established as part of the Company's business development in the precast concrete sector. PT NB is engaged in the manufacture and manufacture of Precast Concrete, Readymix, and other related businesses. the establishment of PT NB is expected to increase the added value and competitiveness of the Company, as well as to support the concrete needs of the Company's projects.

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan memiliki pengendalian atas PT NB dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51,00%.

Until the end of 2021, the Company has control over PT NB with a share ownership percentage of 51.00%.

Ruang lingkup bidang usaha PT NB meliputi industri Beton Pracetak, Readymix dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dan Pabrikasi, yaitu:

1. Sistem pabrikasi beton pracetak.
2. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan.
3. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
4. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik.
5. Usaha lainnya yang berkaitan.

The scope of PT NB's line of business includes the Precast Concrete, Readymix and other related businesses and Manufacturing, namely:

1. Precast concrete fabrication system.
2. Manufacturing of building materials and components.
3. Manufacturing components and construction equipment.
4. Manufacturing of metal, wood, rubber and plastic goods.
5. Other related businesses.

Produktivitas Segmen Usaha Manufaktur

Nilai Pekerjaan dari keseluruhan segmen manufaktur tahun 2021 sebesar Rp305,04 miliar. dari total Nilai Pekerjaan tahun 2021, 54,19% di antaranya merupakan proyek baru, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Manufacturing Business Segment Productivity

The Employment Value of the entire manufacturing segment in 2021 is Rp305.04 billion. of the total Job Value in 2021, 54.19% of them are new projects, as shown in the table below.

Tabel Nilai Pekerjaan Segmen Manufaktur 2020-2021
Manufacturing Segment Job Value Table 2020-2021

Segmen Usaha Business Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Sisa Proyek Lama Carryover from Previous Project	139.732	45,81%	121.712	30,31%	18.020	14,81%
Proyek Baru New Project	165.303	54,19%	279.843	69,69%	(114.541)	(40,93%)
Nilai Pekerjaan Proyek Project Work Value	305.035	100,00%	401.556	100,00%	(96.521)	(24,04%)

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Manufaktur

Berikut adalah pendapatan dan profitabilitas segmen usaha Manufaktur

Manufacturing Business Segment Revenue and Profitability

The following are the revenue and profitability of the Manufacturing business segment

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Manufaktur 2020-2021
Manufacturing Business Segment Revenue and Profitability 2020-2021

Segmen Manufaktur Manufacturing Segment	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	39.589	60.943	(21.354)	(35,04%)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(49.386)	(56.770)	(7.384)	(13,01%)
Laba/Rugi Usaha Operating Profit/Loss	(9.797)	4.173	(13.970)	(334,77%)

Pendapatan usaha segmen Manufaktur tahun 2021 tercatat sebesar Rp103,46 miliar, naik 7,16% atau setara dengan Rp6,91 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp96,55 miliar. Hal ini disebabkan oleh target portofolio konstruksi belum bisa mencapai target seperti yang diharapkan, karena sebagian besar pekerjaan belum terlaksana dan diperkirakan mundur dari jadwal pelaksanaan, sedangkan untuk proyek yang sudah berjalan masih ada kendala addendum kontrak dan pengadaan item pekerjaan. Volume produksi readymix di beberapa plant masih belum mencapai target yang diharapkan karena kendala masalah cuaca yang kurang mendukung, disamping itu juga masalah pengadaan material karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit, sehingga target volume produksi tidak tercapai. Proyek pekerjaan Jalan Tol Padang-Sicincin belum bisa dioptimalkan produksinya karena adanya proses dalam pembebasan lahan dan pekerjaan persiapan. Portofolio precast Proyek Irigasi Rentang belum bisa dioptimalkan produksinya karena adanya perubahan desain oleh pemilik pekerjaan. Adapun proyek precast lain belum optimal produksi karena masih dalam tahap produksi. Adapun di tahun 2021, Perseroan berhasil membukukan laba usaha segmen Manufaktur sebesar Rp4,78 miliar naik 128,22% atau setara dengan Rp21,70 miliar dari tahun 2020 dengan rugi usaha sebesar Rp16,93 miliar.

Operating income of the Manufacturing segment in 2021 was recorded at Rp103.46 billion. an increase of 7.16% or equivalent to Rp6.91 billion from 2020 of Rp96.55 billion. This is because the construction portfolio target has not been able to reach the target as expected, since most of the work has not been implemented and is expected to be back from the schedule implementation, while for projects that are already running there are still problems with the contract addendum and item procurement profession. the production volume of readymix in several plants has not yet reached the expected target due to unfavorable weather problems, in addition to material procurement problems due to the company's difficult financial condition, so that the production volume target is not achieved. the production of the Padang-Sicincin Toll Road project cannot yet be optimized due to the process of land acquisition and preparatory work. the precast portfolio of the Span Irrigation Project has not been able to optimize its production due to design changes by the owner of the work. the other precast projects are not yet optimal in production because they are still in the production stage. Meanwhile, in 2021, the Company managed to record an operating profit of the Manufacturing segment of Rp4.78 billion, up 128.22% or equivalent to Rp21.70 billion from 2020 with operating loss amounting to Rp16.93 billion.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan yang disusun dalam Laporan Tahunan ini telah mengacu pada Laporan Keuangan PT Nindya Karya (Persero) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

The analysis and discussion of financial performance prepared in this Annual Report has referred to the Financial Statements of PT Nindya Karya (Persero) which has been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) with a fair opinion in all material respects for the years ended December 31, 2021 and 2020. the Company's Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia, which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board Financial Accounting Standards-Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets	3.521.577	4.221.246	(699.669)	(16,57%)
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	1.378.422	1.265.572	112.850	8,92%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	4.899.999	5.486.818	(586.819)	(10,70%)
Liabilitas Liability				
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	3.004.927	3.378.819	(373.892)	(11,07%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	296.770	589.924	(293.154)	(49,69%)
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITY	3.301.697	3.968.743	(667.046)	(16,81%)
Ekuitas Equity				
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	1.598.302	1.518.074	80.228	5,28%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	4.899.999	5.486.817	(586.819)	(10,70%)

Aset

Asset

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets	3.521.577	4.221.246	(699.669)	(16,57%)
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	1.378.422	1.265.572	112.850	8,92%
TOTAL ASET TOTAL ASSET	4.899.999	5.486.818	(586.819)	(10,70%)

Per 31 Desember 2021, Perseroan membukukan total aset sebesar Rp4,90 triliun, mengalami penurunan Rp586,82 miliar atau 10,70% jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp5,48 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya aset lancar Perseroan meskipun aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan di tahun 2021 dibanding tahun 2020, sebagaimana diuraikan berikut ini.

As of December 31, 2021, the Company recorded total assets of Rp4.90 trillion, a decrease of Rp586.82 billion or 10.70% compared to 2020 which was Rp5.48 trillion. This was due to the decrease in the Company's current assets even though the Company's non-current assets increased in 2021 compared to 2020, as described below.

Aset Lancar

Current Assets

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
ASET LANCAR CURRENT ASSETS				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	435.623	245.873	189.750	77,17%
Investasi Jangka Pendek Short-term Investment	200.000	200.000	0	0,00%
PIUTANG USAHA ACCOUNTS PAYABLE				
Pihak Berelasi Related Parties	58.428	111.354	(52.926)	(47,53%)
Pihak Ketiga Third Party	64.142	23.231	40.911	176,11%
PIUTANG RETENSI RETENTION RECEIVABLE				
Pihak Berelasi Related Parties	46.328	42.186	4.142	9,82%
Pihak Ketiga Third Party	116.693	108.826	7.867	7,23%
Piutang Ventura Bersama Joint Venture Receivable	251.105	306.082	(54.977)	(17,96%)
Piutang Lain-lain Other Receivables	13.359	30.252	(16.893)	(55,84%)
TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA GROSS BILLINGS TO EMPLOYERS				
Pihak Berelasi Related Parties	620.724	530.686	90.038	16,97%
Pihak Ketiga Third Party	883.828	1.800.538	(916.710)	(50,91%)
Persediaan Supply	227.777	146.770	81.007	55,19%
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	514.157	571.480	(57.323)	(10,03%)
Uang Muka Down Payment	69.097	67.564	1.533	2,27%
Beban Dibayar di Muka Prepaid Expenses	18.258	27.756	(9.498)	(34,22%)
Beban Ditangguhkan Deferred Charges	2.052	8.647	(6.595)	(76,27%)
JUMLAH ASET LANCAR TOTAL CURRENT ASSETS	3.521.577	4.221.246	(699.669)	(16,57%)

Total aset lancar Perseroan mengalami penurunan Rp699,67 miliar atau 16,57% dari Rp4,22 triliun di tahun 2020 menjadi Rp3,52 triliun di tahun 2021. Berikut akun yang mempengaruhi penurunan aset lancar Perseroan di tahun 2021 dibanding tahun 2020:

The Company's total current assets decreased by Rp699.67 billion or 16.57% from Rp4.22 trillion in 2020 to Rp3.52 trillion in 2021. Here accounts that affect the decline the Company's current assets in 2021 compared to 2020:

1. Kenaikan pada Kas dan Setara Kas sebesar 77,17% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh realisasi termin pekerjaan dan penerimaan restitusi pajak.
2. Piutang Usaha mengalami penurunan secara keseluruhan, namun pada Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar 176,11% dan Pihak Berelasi menurun 47,53% dibandingkan tahun 2020. Dikarenakan realisasinya *inflow* termin pekerjaan tahun 2020.
3. Kenaikan pada Piutang Retensi, pada pihak berelasi naik sebesar 9,82% dan Pihak Ketiga naik sebesar 7,23% dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh meningkatnya piutang retensi dari proyek berjalan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dan proyek baru.
4. Penurunan pada Piutang Ventura Bersama sebesar 17,96% dibandingkan dengan tahun 2020, disebabkan oleh tertagihnya piutang VB Nindya-Karya Sarana dan Nindya-Adhi Karya.
5. Penurunan Piutang lain-lain sebesar 55,84% yang disebabkan oleh tertagihnya Piutang lain-lain pihak berelasi dan pihak ketiga.
6. Tagihan Bruto secara keseluruhan mengalami penurunan, pada pihak ketiga turun sebesar 50,91% yang disebabkan oleh tagihan bruto pada Kementerian PUPR, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Pemerintah kabupaten Dharmasraya, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Makasar dan lain-lain dibawah Rp500juta sudah dapat dilakukan penagihan (piutang usaha), dan dari Pihak berelasi mengalami kenaikan sebesar 16,97% yang disebabkan oleh percepatan pekerjaan proyek.
7. Kenaikan persediaan 55,19% dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya persediaan material bahan baku konstruksi, beton serta suku cadang untuk kebutuhan proyek, serta persediaan bangunan dan tanah siap jual yaitu Ruko Pabaeng-baeng yang berlokasi di Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng, Makassar, kemudian Bangunan rumah jadi Permata Gowa yang berlokasi di Jalan Teknik (Samata) Kabupaten Gowa, Makassar, Persediaan Apartemen Dago Suites Bandung, Persediaan Kios Sadang Terminal Square.
8. Penurunan Pajak dibayar dimuka sebesar 10,03% dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh penerimaan restitusi pajak atas surat ketetapan lebih bayar pajak.
9. Kenaikan Uang Muka sebesar 2,27% dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh bertambahnya pembayaran uang muka pemasok proyek baru.
10. Penurunan Beban Dibayar dimuka sebesar 34,22% dikarenakan telah dilakukan pembebanan pada biaya pelaksanaan proyek dan asuransi.
11. Penurunan pada Beban ditangguhkan sebesar 76,27% dibandingkan tahun 2020 dikarenakan telah dilakukan pembebanan proyek Pantai Malalayang.
1. The increase in Cash and Cash Equivalents of 77.17% from the previous year was due to the realization of terms of work and receipt of tax refunds.
2. Accounts Receivable decreased overall, but for Third Parties it increased by 176.11% and Related Parties decreased by 47.53% compared to 2020. Due to the realization of the 2020 term of work inflow.
3. The increase in Retention Receivables, from related parties, increased by 9.82% and Third Parties increased by 7.23% compared to the previous year, which was caused by an increase in retention receivables from current projects with multi-year contracts and new projects.
4. The decrease in Joint Venture Receivables by 17.96% compared to 2020, was due to the collection of receivables from VB Nindya-Karya Sarana and Nindya-Adhi Karya.
5. The decrease in other Receivables by 55.84% was due to the collection of other Receivables from related parties and third parties.
6. Gross Bills overall decreased, on third parties decreased by 50.91% caused by gross invoices to the Ministry of PUPR, Ministry of Youth and Sports, Dharmasraya Regency Government, Bank Indonesia, Makassar City Regional Government and others below Rp500 million. collections (trade receivables) were made, and from related parties an increase of 16.97% was due to the acceleration of project work.
7. The increase in inventories of 55.19% compared to 2020 was due to the increase in the supply of construction raw materials, concrete and spare parts for project needs, as well as the inventory of buildings and land ready for sale, namely Pabaeng-baeng Ruko which is located on Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng, Makassar, Then the house building is Permata Gowa which is located on Jalan Teknik (Samata) Gowa Regency, Makassar, Dago Suites Apartment Bandung Supplies, Kiosk Sadang Terminal Square Supplies.
8. The decrease in prepaid taxes by 10.03% compared to 2020 was due to the receipt of tax refunds on the tax overpayment assessment letter.
9. The increase in Advances by 2.27% compared to 2020 was due to the increase in advance payments for suppliers of new projects.
10. Decrease in Prepaid Expenses by 34.22% due to the expense of project implementation and insurance costs.
11. The decrease in deferred expenses was 76.27% compared to 2020 due to the Malalayang Beach project being charged.

Aset Tidak Lancar

Non-current Assets

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture	346.569	242.398	104.171	42,98%
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long-term Investments	4.802	4.028	774	19,22%
Properti Investasi Investment Properties	555.241	432.231	123.010	28,46%
Aset Pajak Ditangguhkan Deferred Tax Assets	5.471	3.737	1.734	46,40%
Aset Tetap Fixed Assets	449.412	561.072	(111.660)	(19,90%)
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi Financial Assets of the Concession Project	13.321	-	13.321	-
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	27	84	(57)	(67,86%)
Proyek Dalam Pelaksanaan Project Under Implementation	3.542	2.952	590	19,99%
Aset Lain-lain Other Assets	32.860	19.070	13.790	72,31%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS	1.378.422	1.265.572	112.850	8,92%

Di tahun 2021, Perseroan berhasil membukukan total aset tidak lancar sebesar Rp1,38 triliun meningkat Rp112,85 miliar atau 8,92% dibanding tahun 2020 sebesar Rp1,26 triliun. Berikut akun yang mempengaruhi peningkatan aset tidak lancar Perseroan di tahun 2021 dibanding tahun 2020:

1. Kenaikan Investasi pada Ventura Bersama sebesar 42,98% dari tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan laba ventura bersama.
2. Kenaikan Investasi jangka panjang lainnya sebesar 19,22% dari tahun 2020 disebabkan oleh penambahan investasi pada entitas asosiasi, PT Jasamarga Kunciran Cengkareng.
3. Kenaikan pada Properti Investasi sebesar 28,46% dari tahun 2020 disebabkan oleh reklasifikasi tanah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan Tenggilis Surabaya, Jalan La Madukelleng Makasar, Jalan Hayam Wuruk No.129 A Denpasar dan Jalan Nindya 9 Jayapura, serta reklasifikasi atas bangunan Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan La Madukelleng dan Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Selain itu terdapat penambahan akumulasi dari perubahan nilai wajar.
4. Kenaikan Aset Pajak Ditangguhkan sebesar 46,40% dari tahun 2020 yang disebabkan oleh perhitungan aset pajak tangguhan entitas anak (PT Nindya Beton)
5. Penurunan Aset Tetap sebesar 19,90% dari tahun 2020 disebabkan oleh reklasifikasi aset tanah sebesar Rp102 miliar dan reklasifikasi atas bangunan sebesar Rp1,1 miliar.
6. Aset Keuangan dari Proyek Konsesi merupakan piutang jangka panjang dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum sehubungan dengan pembayaran ketersediaan layanan di masa depan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dan Pengelolaan Unit

In 2021, the Company managed to record total non-current assets of Rp1.38 trillion. an increase of Rp112.85 billion or 8.92% compared to 2020 of Rp1.26 trillion. Following accounts that affect the increase in the Company's non-current assets in 2021 compared to 2020:

1. The increase in Investment in Joint Ventures by 42.98% from 2020 was due to an increase in joint venture profits.
2. The increase in other long-term investments by 19.22% from 2020 was due to additional investment in an associated entity, PT Jasamarga Kunciran Cengkareng.
3. The increase in Investment Properties by 28.46% from 2020 was due to the reclassification of land located at Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan Tenggilis Surabaya, Jalan La Madukelleng Makasar, Jalan Hayam Wuruk No.129 A Denpasar and Jalan Nindya 9 Jayapura, as well as the reclassification of buildings. Medan Sisingamangaraja Street, La Madukelleng Street and Hayam Wuruk Street Denpasar. in addition, there is an additional accumulation of changes in fair value.
4. Increase in Deferred Tax Assets by 46.40% from 2020 due to the calculation of deferred tax assets of subsidiary (PT Nindya Beton)
5. The decrease in Fixed Assets by 19.90% from 2020 was due to the reclassification of land assets of Rp102 billion and the reclassification of buildings of Rp1.1 billion.
6. Financial Assets from the Concession Project are long-term receivables from the Regional Water Supply Company in connection with payments for future service availability as stated in the Investment Cooperation Agreement and Management of the

Produksi diKesugihan (Bangun, Kelola, Alih Milik) yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 16. Pada bulan Oktober 2021 perusahaan memulai pelaksanaan konstruksi untuk proyek konsesi ini.

7. Penurunan pada aset tak berwujud sebesar 67,86% dari tahun 2020 yang disebabkan oleh tidak adanya penambahan aset tak berwujud dan bertambahnya akumulasi amortisasi dari software.
8. Terdapat penambahan akun Proyek Dalam pelaksanaan milik entitas anak yaitu Retail Beton Indramayu dan lain-lain dibawah Rp100 juta.
9. Penurunan Aset lain-lain sebesar 99,83% dari tahun 2020 disebabkan oleh Perusahaan telah melakukan reklasifikasi atas tanah yang sedang dikembangkan sebagai persediaan berupa tanah yang sedang dikembangkan dan akan digunakan sebagai perumahan dan reklasifikasi atas aset yang diambilalih menjadi properti yang siap dijual dalam akun persediaan.

DiKesugihan Production Unit (Build, Manage, Transfer of Ownership) which have been classified as financial assets as a result of implementation of ISAK 16. in October 2021 the company commenced construction for this concession project.

7. The decrease in intangible assets by 67.86% from 2020 was due to the absence of additional intangible assets and the increase in accumulated amortization of software.
8. There is an additional Project Under implementation account owned by a subsidiary, namely Retail Concrete Indramayu and others under Rp100 million.
9. The decrease in other assets by 99.83% from 2020 was due to the Company having reclassified land under development as inventories in the form of land under development and will be used as housing and reclassification of assets taken over into properties ready for sale in the inventory account.

Liabilitas

Liability

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	3.004.927	3.378.819	(373.892)	(11,07%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	296.770	589.924	(293.154)	(49,69%)
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITY	3.301.697	3.968.743	(667.046)	(16,81%)

Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan mencatatkan total liabilitas sebesar Rp3,30 triliun, mengalami penurunan Rp667,04 miliar atau 16,81% jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp3,97 triliun. Hal ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang Perseroan di tahun 2021 dibanding tahun 2020, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Until the end of 2021, the Company recorded a total liability of Rp3,30 trillion, a decrease of Rp667.04 billion or 16.81% when compared to 2020 which amounted to Rp3.97 trillion. This is due to the decrease in the Company's short-term and long-term liabilities in 2021 compared to 2020, as described below.

Liabilitas Jangka Pendek

Short-term Liabilities

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT-TERM LIABILITIES				
UTANG BANK DAN NON-BANK BANK AND NON-BANK DEBT				
Pihak Berelasi Related Parties	175.349	369.686	(194.337)	(52,57%)
Pihak Ketiga Third Party	146.000	217.400	(71.400)	(32,84%)
UTANG USAHA ACCOUNTS PAYABLE				

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Pihak Berelasi Related Parties	45.594	18.282	27.312	149,39%
Pihak Ketiga Third Party	1.229.526	1.440.403	(210.877)	(14,64%)
UANG MUKA PEMBERI KERJA EMPLOYERS' ADVANCES				
Liabilitas Sewa Lease Liability	-	162	(162)	(100,00%)
Pihak Berelasi Related Parties	21.494	13.588	7.906	58,18%
Pihak Ketiga Third Party	121.780	151.524	(29.744)	(19,63%)
Utang Pajak Tax Debt	15.423	13.208	2.215	16,77%
Utang Ventura Bersama Joint Venture Debt	55.150	20.173	34.977	173,39%
Pendapatan Diterima di Muka Prepaid Income	12.911	6.342	6.569	103,58%
Utang Bruto Gross Debt	967.580	929.472	38.108	4,10%
Beban Akrua Accrued Expenses	15.802	17.906	(2.104)	(11,75%)
Utang Lain-lain Other Debt	4.949	5.023	(74)	(1,47%)
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES	3.004.927	3.378.819	(373.892)	(11,07%)

Di tahun 2021, total liabilitas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar Rp3,00 triliun, mengalami penurunan Rp373,89 miliar atau 11,07% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,38 triliun. Berikut akun yang mempengaruhi penurunan liabilitas jangka pendek Perseroan di tahun 2021 dibanding tahun 2020:

1. Penurunan utang bank dan non bank disebabkan oleh realisasi inflow termin yang dialokasikan untuk pembayaran utang bank jatuh tempo pihak berelasi dan pihak ketiga, masing-masing mengalami penurunan sebesar 52,57% dan 32,84% dari tahun 2020.
2. Penurunan utang usaha pada pihak ketiga sebesar 14,64%, namun terjadi kenaikan pada utang usaha pihak berelasi sebesar 149,39%, yang disebabkan oleh adanya pembayaran hutang kepada subkontraktor dan kenaikan utang pada pemasok.
3. Penurunan Uang muka pemberi kerja pada pihak ketiga sebesar 19,63% serta kenaikan uang muka pemberi kerja pada pihak berelasi sebesar 58,18% dibandingkan tahun 2020, penurunan disebabkan adanya pembayaran pekerjaan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Dinas Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Dharmasraya, Bank Indonesia, dan PT Bhanda Graha Rekasa (Persero).
4. Pada tahun 2021 telah dilakukan pembayaran liabilitas sewa.
5. Kenaikan utang pajak sebesar 16,77% dari tahun 2020 disebabkan oleh naiknya utang PPh 21, 23, dan Pasal 4 ayat 2.

In 2021, the Company's total short-term liabilities were recorded at Rp3.00 trillion, a decrease of Rp373.89 billion or 11.07% compared to 2020 which was Rp3.38 trillion. Following accounts that affect the decline the Company's short-term liabilities in 2021 compared to 2020:

1. The decrease in bank and non-bank loans was due to the realization of inflow terms allocated for payment of maturing bank loans from related parties and third parties, which decreased by 52.57% and 32.84%, respectively, from 2020.
2. A decrease in trade payables to third parties by 14.64%, but an increase in trade payables to related parties by 149.39%, which was caused by the payment of debt to subcontractors and an increase in payables to suppliers.
3. A decrease in employer advances to third parties by 19.63% and an increase in employer advances to related parties by 58.18% compared to 2020, the decrease was due to work payments from the Ministry of Transportation, Ministry of Youth and Sports, Provincial Settlement Infrastructure Service North Sulawesi, Department of Public Works and Spatial Planning Kab. Dharmasraya, Bank Indonesia, and PT Bhanda Graha Rekasa (Persero).
4. In 2021, the lease obligation has been paid.
5. The increase in tax payable by 16.77% from 2020 was due to the increase in income tax payables 21, 23, and Article 4 paragraph 2.

6. Kenaikan Utang Ventura Bersama sebesar 173,39% dari tahun 2020 disebabkan oleh penambahan hutang Ventura Bersama Nindya-Adhi Karya, Nindya-Waskita Jaya Purnama, dan Nindya-Hutama Karya-Wijaya Karya.
7. Kenaikan Pendapatan diterima dimuka sebesar 103,58% dari tahun 2020 disebabkan oleh terdapat tambahan pada retail readymix, Ventura Bersama Brantas Abipraya-Bodiacs, PT Telkomsel Tbk, dan lain-lain dibawah Rp100 juta.
8. Kenaikan utang bruto sebesar 4,10% dari tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan utang bruto pada Divisi Infrastruktur I, Divisi Infrastruktur II, Divisi Gedung, Divisi EPC dan PT Nindya Beton.
9. Penurunan Beban Akruai sebesar 11,75% dari tahun 2020 disebabkan oleh penurunan beban akrual bunga pinjaman bank dan konsultan.
10. Penurunan utang lain-lain sebesar 1,47% dari tahun 2020 disebabkan oleh adanya pembayaran jaminan sewa gedung serta utang lain-lain dibawah Rp500 juta.

6. The increase in Joint Venture Payables by 173.39% from 2020 was due to the addition of joint venture debts by Nindya-Adhi Karya, Nindya-Waskita Jaya Purnama, and Nindya-Hutama Karya-Wijaya Karya.
7. The increase in unearned revenue by 103.58% from 2020 was due to additional retail readymix, Joint Venture Brantas Abipraya-Bodiacs, PT Telkomsel Tbk, and others below Rp100 million.
8. The increase in gross debt by 4.10% from 2020 was due to an increase in gross debt at the Infrastructure Division I, Infrastructure Division II, Building Division, EPC Division and PT Nindya Beton.
9. The decrease in Accrued Expenses by 11.75% from 2020 was due to a decrease in interest expense accrued for bank loans and consultants.
10. The decrease in other payables by 1.47% from 2020 was due to the payment of building rental guarantees and other payables below Rp500 million.

Liabilitas Jangka Panjang

Long-term Liabilities

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG TERM LIABILITY				
UTANG BANK dan NON-BANK BANK AND NON-BANK DEBT				
Pihak Berelasi Related Parties	76.269	266.725	(190.456)	(71,41%)
UANG MUKA KONTRAK JANGKA PANJANG LONG-TERM CONTRACT ADVANCES				
Pihak Berelasi Related Parties	10.942	23.300	(12.358)	(53,04%)
Pihak Ketiga Third Party	188.526	289.308	(100.782)	(34,84%)
Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-Employment Benefits Liability	21.030	10.591	10.439	98,56%
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LONG TERM LIABILITY	296.770	589.924	(293.154)	(49,69%)

Liabilitas jangka panjang Perseroan tercatat sebesar Rp296,77 miliar di tahun 2021, menurun Rp293,15 miliar atau 49,69% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp589,92 miliar. Berikut akun yang mempengaruhi penurunan liabilitas jangka panjang Perseroan di tahun 2021 dibanding tahun 2020:

1. Pinjaman Bank dan Non Bank jangka panjang turun sebesar 71,41% dari tahun 2020 disebabkan terdapat pembayaran pinjaman bank dan non bank yang jatuh tempo dalam setahun sebesar Rp193 miliar.
2. Penurunan uang muka kontrak jangka panjang Pihak Berelasi sebesar 53,04% dari tahun 2020 disebabkan telah berkurangnya uang muka kontrak PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi, dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Penurunan uang muka kontrak Pihak Ketiga sebesar 34,84% dari tahun 2020 disebabkan oleh berkurangnya uang muka kontrak Kementerian PUPR.

The Company's long-term liabilities were recorded at Rp296,77 billion in 2021, a decrease of Rp293.15 billion or 49.69% compared to the previous year of Rp589.92 billion. Following accounts that affect the decline the Company's long-term liabilities in 2021 compared to 2020:

1. Long-term Bank and Non-Bank Loans decreased by 71.41% from 2020 due to payment of bank and non-bank loans maturing in a year amounting to Rp193 billion.
2. The decrease in advances for long-term contracts with related parties by 53.04% from 2020 was due to reduced advances for contracts for PT Pertamina Eksplorasi dan Produk, and PT Pupuk Kalimantan Timur. the decrease in advances for Third Party contracts by 34.84% from 2020 was due to a decrease in contract advances from the Ministry of PUPR.

3. Kenaikan liabilitas imbalan pascakerja sebesar 98,56% dari tahun 2020 disebabkan oleh tambahan program imbalan pasca kerja, yaitu Program Masa Persiapan Pensiun, Program Cincin Emas dan Program Cuti Dinas Lama.

3. The increase in post-employment benefit liabilities by 98.56% from 2020 was due to additional post-employment benefit programs, namely the Retirement Preparation Period Program, the Gold Ring Program and the Old Service Leave Program.

Ekuitas

Equity

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Modal Saham Share Capital	559.497	559.497	0	0,00%
Retain Earnings				
Ditentukan Penggunaannya Allocated	113.608	113.608	0	0,00%
Belum Ditentukan Penggunaannya Unallocated	670.832	497.334	173.498	34,89%
Surplus Revaluasi Aset Tetap Fixed Asset Revaluation Surplus	251.700	336.685	(84.985)	(25,24%)
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada: Total Equity Attributed to:				
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner	1.595.639	1.507.126	88.513	5,87%
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	2.662	10.948	(8.286)	(75,69%)
TOTAL EKUITAS TOTAL EQUITY	1.598.302	1.518.074	80.228	5,28%

Hingga 31 Desember 2021, total ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp1,59 triliun, meningkat Rp80,23 miliar atau 5,28% jika dibanding tahun 2020 sebesar Rp1,52 triliun. Berikut akun yang mempengaruhi peningkatan ekuitas Perseroan di tahun 2021 dibanding tahun 2020:

As of December 31, 2021, the Company's total equity was recorded at Rp1.59 trillion, an increase of Rp80.23 billion or 5.28% compared to 2020 of Rp1.5 to Rp2 trillion. Following accounts that affect the increase in the Company's equity in 2021 compared to 2020:

Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp173,49 miliar atau 34,89% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp497,33 miliar yang disebabkan oleh adanya kinerja laba tahun berjalan perusahaan.

This increase was mainly due to an increase in Unappropriated retained earnings by Rp173.49 billion or 34.89% compared to Rp497.33 billion in 2020 due to the company's current year profit performance.

Lab (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	4.415.364	3.616.483	798.881	22,09%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(4.053.477)	(3.299.318)	(754.159)	22,86%
Lab Bruto Gross Profit	361.887	317.165	44.722	14,10%
Beban Penjualan Selling Expenses	(13.178)	(11.009)	(2.169)	19,70%

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(200.688)	(192.814)	(7.874)	4,08%
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss	(39.327)	(15.809)	(23.518)	148,76%
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expense	(127.886)	(101.709)	(26.177)	25,74%
Beban Keuangan Financial Burden	(75.601)	(89.112)	13.511	(15,16%)
Bagian Laba Bersih Ventura Bersama Share of Joint Venture Net Profit	153.418	91.342	62.076	67,96%
Penghasilan Lainnya-Bersih Other Income-Net	7.075	52.049	(44.974)	(86,41%)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	65.700	50.101	15.599	31,14%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)	94	(7.279)	7.373	101,29%
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	65.794	42.822	22.972	53,65%
Penghasilan Komprehensif Lain: Other Comprehensive Income:				
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items that will not be Reclassified to Profit or Loss:				
Surplus Revaluasi Aset Tetap Fixed Asset Revaluation Surplus	10.717	-	10.717	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas imbalan pasti Actuarial Gain (Loss) on Defined Benefit Liability	2.891	4.332	(1.441)	(33,26%)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	13.608	4.332	9.276	214,13%
Total Laba Komprehensif pada Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	79.402	47.155	32.247	68,39%
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner	75.561	50.896	24.665	48,46%
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	(9.767)	(8.074)	(1.693)	20,97%
Jumlah Amount	65.794	42.822	22.972	53,65%
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Profit Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner	8.514	55.276	(46.762)	(84,60%)
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	(9.112)	(8.121)	(991)	12,20%
Jumlah Amount	79.402	47.155	32.247	68,39%

Pendapatan Usaha

Per 31 Desember 2021, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp4,42 triliun, meningkat Rp798,88 miliar atau 22,09% dibanding tahun sebelumnya yang membukukan pendapatan usaha sebesar Rp3,62 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah perolehan kontrak proyek baru s/d Periode Desember 2021.

Operating Revenues

As of December 31, 2021, the Company posted operating revenues of Rp4,42 trillion, an increase of Rp798.88 billion or 22.09% compared to the previous year which recorded operating revenues of Rp3.62 trillion. This increase was due to an increase in the number of new project contracts obtained until the December 2021 period.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan mengalami peningkatan sebesar 22,86% atau setara Rp754,16 miliar, dari Rp3,30 triliun di tahun 2020 menjadi Rp4,05 triliun di tahun 2021. Hal ini lebih dikarenakan adanya kenaikan beban konstruksi proyek.

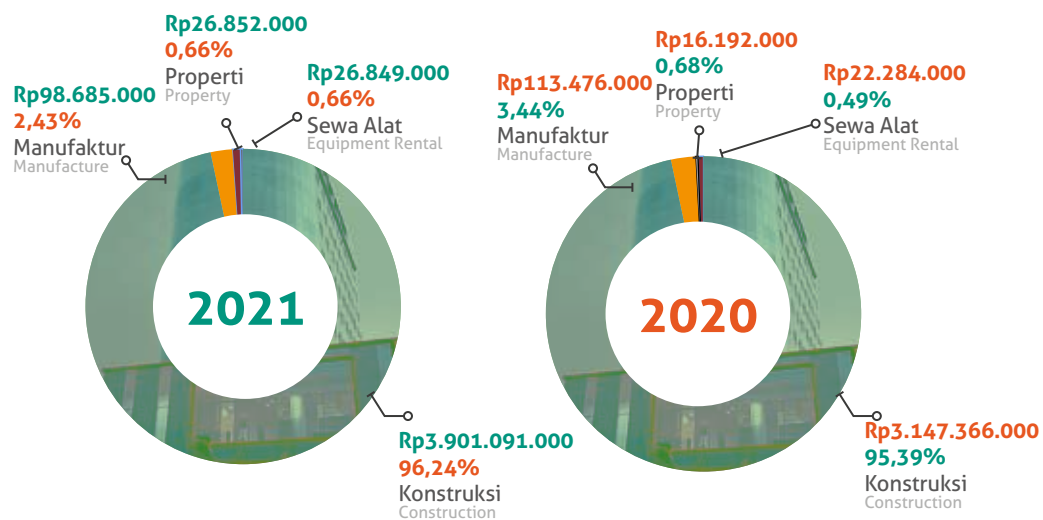
Cost of Revenue

Cost of Revenue increased by 22.86% or equivalent to Rp754.16 billion. from Rp3.30 trillion in 2020 to Rp4.05 trillion in 2021. This is more because an increase in project construction costs.

Tabel Beban Pokok Pendapatan 2020-2021
Table of Cost Revenue 2020-2021

Uraian Description	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Beban Pokok Pendapatan Kontruksi Cost of Construction Revenue	3.901.091	96,24%	3.147.366	95,39%	753.725	23,95%
Beban Pokok Pendapatan Manufaktur Cost of Revenue Manufacture	98.685	2,43%	113.476	3,44%	(14.791)	(13,03%)
Beban Pokok Pendapatan Properti Cost of Property Income	26.852	0,66%	16.192	0,49%	10.660	65,83%
Beban Pokok Pendapatan Sewa Alat Cost of Equipment Rental Income	26.849	0,66%	22.284	0,68%	4.565	20,49%
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN TOTAL COST OF IN-COME	4.053.477	100,00%	3.299.318	100,00%	754.159	22,86%

Komposisi Kontribusi Segmen Usaha terhadap Beban Pokok Pendapatan Perseroan
Composition of Business Segments Contribution to the Company's Revenue Cost



Adapun rincian Beban Pokok Pendapatan berdasarkan jenis beban dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The details of Cost of Revenue by type of expense can be seen in the table below.

Uraian Description	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Bahan Baku Raw Material	1.865.349	46,02%	1.207.243	36,59%	658.106	54,51%
Subkontraktor Subcontractor	1.018.838	25,13%	1.129.402	34,23%	(110.564)	(9,79%)

Uraian Description	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta) (Rp million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Upah Wages	366.577	9,04%	339.059	10,28%	27.518	8,12%
Peralatan Equipment	341.855	8,43%	229.240	6,95%	112.615	49,13%
Overhead Proyek Project Overhead	420.212	10,37%	346.308	10,50%	73.904	21,34%
Biaya Pinjaman Loan Fee	16.170	0,40%	19.661	0,60%	(3.491)	(17,76%)
Penyusutan Aset Tetap Decreasing asset	20.829	0,51%	25.847	0,78%	(5.018)	(19,41%)
Pemeliharaan Listrik dan Air Electricity and Water Maintenance	3.647	0,09%	2.558	0,08%	1.089	42,57%
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN TOTAL COST of INCOME	4.053.477	100,00%	3.299.318	100,00%	754.159	22,86%

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan tahun 2021 tercatat sebesar Rp65,70 miliar, naik sebesar 31,14% atau setara Rp15,60 miliar dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp50,10 miliar. Hal-hal yang memengaruhi kenaikan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Beban Pemasaran mengalami kenaikan sebesar 19,70% dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan adanya kenaikan jumlah tender yang diikuti.
2. Beban Administrasi dan Umum mengalami kenaikan sebesar 4,08% dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan oleh kenaikan beban pegawai, beban pengembangan dan beban penyusutan.
3. Kerugian Penurunan Nilai mengalami kenaikan sebesar 148,76% dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan oleh implementasi PSAK 71 berdasarkan hasil perhitungan konsultan.
4. Beban Pajak Penghasilan Final mengalami kenaikan sebesar 25,74% dibandingkan tahun 2020 sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha.
5. Beban Keuangan mengalami penurunan sebesar 15,16% dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh turunnya pinjaman bank dan non bank dan suku bunga pinjaman.
6. Bagian laba ventura bersama mengalami kenaikan sebesar 67,96% dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh bertambahnya proyek ventura bersama.
7. Pendapatan (Beban) lainnya mengalami penurunan sebesar 86,41% dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pemulihan piutang serta naiknya beban pajak.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan mengalami peningkatan sebesar 53,65% atau setara Rp22,97 miliar, dari Rp42,82 miliar di tahun 2020 menjadi Rp65,79 miliar di tahun 2021. Hal ini lebih dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak serta adanya manfaat pajak penghasilan.

Profit Before Income Tax Expense

Profit Before Income Tax Expense in 2021 was recorded at Rp65.70 billion. an increase of 31.14% or equivalent to Rp15.60 billion compared to 2020 which was Rp50.10 billion. Things that affect the increase in Profit Before Income Tax Expense are as follows:

1. Marketing Expenses increased by 19.70% compared to 2020 due to an increase in the number of tenders participated in.
2. Administrative and General Expenses increased by 4.08% compared to 2020 due to increases in employee expenses, development expenses and depreciation expenses.
3. Impairment Losses increased by 148.76% compared to 2020 due to the implementation of PSAK 71 based on the results of consultant calculations.
4. Final Income Tax expense increased by 25.74% compared to 2020 in line with the increase in operating income.
5. Finance Expenses decreased by 15.16% compared to 2020 due to lower bank and non-bank loans and loan interest rates.
6. The share of joint venture profits increased by 67.96% compared to 2020 due to the increase in joint venture projects.
7. Other income (expenses) decreased by 86.41% compared to 2020 due to a decrease in receivables recovery and an increase in tax expense.

Current year profit

Profit for the Year increased by 53.65% or equivalent to Rp22.97 billion. from Rp42.82 billion in 2020 to Rp65.79 billion in 2021. This was mainly due to increase in profit before tax and the existence of income tax benefits.

Laba Komprehensif pada Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Pada Tahun Berjalan mengalami peningkatan sebesar 68,39% atau setara Rp32,25 miliar, dari Rp47,16 miliar di tahun 2020 menjadi Rp79,40 miliar di tahun 2021. Hal ini lebih dikarenakan terdapat surplus atas penilaian kembali nilai wajar aset tetap.

Comprehensive Income for the Year

Comprehensive Income for the Current Year increased by 68.39% or equivalent to Rp32.25 billion. from Rp47.16 billion in 2020 to Rp79.40 billion in 2021. This was mainly due to there is a surplus on the revaluation of the fair value of property, plant and equipment.

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	590.742	(583.270)	1.174.012	201,28%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	36.825	36.624	201	0,55%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	(437.819)	284.462	(722.281)	(253,91%)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	189.748	(262.184)	451.932	172,37%
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Direalisasi Unrealized Gain (Loss) on Foreign Exchange	2	-	2	-
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Early Year Cash and Cash Equivalents	245.873	508.064	(262.191)	(51,61%)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun End of Year Cash and Cash Equivalents	435.623	245.880	189.743	77,17%

Kas dan setara Kas pada akhir tahun 2021 mengalami peningkatan 77,17% dibandingkan Kas dan setara Kas pada awal tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya penerimaan kas dari pelanggan pada arus kas dari aktivitas Operasi.

Cash and Cash equivalents at the end of 2021 experienced an increase of 77.17% compared to Cash and Cash equivalents at the beginning of 2020. This increase was mainly due to the increase in cash receipts from customers in cash flows from operating activities.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	5.232.197	4.177.293	1.054.904	25,25%
Pengeluaran Kas kepada Pemasok dan Pihak ketiga Cash Disbursements to Suppliers and Third Parties	(4.510.036)	(4.376.990)	(133.046)	3,04%
Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi Cash Disbursements to Employees and Directors	(142.900)	(199.924)	57.024	(28,52%)
Pembayaran Beban Keuangan Payment of Financial Expense	(77.077)	(93.778)	16.701	(17,81%)
Penerimaan Restitusi Pajak Receipt of Tax Refund	215.229	-	215.229	-
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payment	(130.012)	(104.100)	(25.912)	24,89%
Penerimaan Bunga Giro dan Deposito Interest Receipts for Current Accounts and Deposits	3.341	14.228	(10.887)	(76,52%)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Obtained from (Used for) Operating Activities	590.742	(583.270)	1.174.012	201,28%

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan membukukan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp590,74 miliar, mengalami peningkatan Rp1,17 triliun atau 201,28% dibanding tahun sebelumnya sebesar minus Rp583,27 miliar. Hal tersebut dikarenakan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang naik sebesar Rp1,05 triliun atau 25,25% dari tahun 2020, serta adanya penerimaan restitusi pajak sebesar Rp215 miliar.

Until the end of 2021, the Company recorded cash flows from operating activities amounted to Rp590.74 billion, an increase of Rp1.17 trillion or 201.28% compared to the previous year of minus Rp583.27 billion. This was due to an increase in cash receipts from customers which increased by Rp1.05 trillion or 25.25% from 2020, as well as the receipt of tax refunds of Rp215 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investing Activities

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Pembelian Aset Tetap Fixed Asset Purchase	(11.647)	(208)	(11.439)	5.499,52%
Penerimaan Pencairan Laba Ventura Bersama Receipt of Disbursement of Joint Venture Profits	49.247	55.677	(6.430)	(11,55%)
Penempatan Investasi pada Jangka Panjang Lainnya Other Long-Term Investments	(774)	(2.437)	1.663	(68,24%)
Perolehan Aset dalam Proses Asset Acquisition in Process	-	(2.436)	2.436	(100,00%)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi Net Cash Retrieved from Investment Activities	36.825	36.624	201	0,55%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp36,83 miliar, naik 0,55% atau setara Rp201 juta bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp36,62 miliar. Hal tersebut disebabkan adanya penerimaan pencairan Laba Ventura Bersama, serta perusahaan lebih selektif dalam pelaksanaan investasi sesuai prioritas.

Cash Flow from Investment Activities in 2021 was recorded at Rp36.83 billion. an increase of 0.55% or equivalent to Rp201 million when compared to 2020 which was Rp36.62 billion. This is because the receipt of disbursement of Joint Venture Profits, as well as companies being more selective in implementing investments according to priorities.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Funding Activities

Uraian Description	2021 (Rp juta) (Rp million)	2020 (Rp juta) (Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp million)	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Pinjaman Bank dan Non Bank Acceptance of Bank and Non-Bank Loans	4.021.586	4.791.659	(770.073)	(16,07%)
Pembayaran Pinjaman Bank dan Non Bank Payment of Bank and Non-Bank Loans	(4.460.067)	(4.207.196)	(252.871)	6,01%
Penerimaan Setoran Modal Receipt of Capital Deposit	825	-	825	-
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liability	(162)	-	(162)	-
Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah Payment of Medium Term Notes	-	(16.407)	16.407	(100,00%)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Obtained from (Used for) Funding Activities	(437.819)	284.462	(722.281)	(253,91%)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan di tahun 2021 tercatat minus Rp437,82 miliar, turun Rp722,28 miliar atau 253,91% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp284,46 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank dan non bank pada tahun 2021.

Cash Flow from Funding Activities in 2021 was recorded at minus Rp437.82 billion, decreased by Rp722.28 billion or 253.91% compared to the previous year of Rp284.46 billion. This was due to the payment of bank and non-bank loans in 2021.

Kemampuan Membayar Utang

Ability to Pay Debt

Untuk memberikan gambaran tentang kemampuan membayar utangnya, Perseroan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

To provide an overview of its ability to pay its debts, the Company uses liquidity ratios and solvency ratios as shown in the table below.

Uraian Description	2021	2020
RASIO LIKUIDITAS LIQUIDITY RATIO		
Rasio Lancar Current Ratio	117,19%	131,78%
Rasio Cepat Fast Ratio	39,46%	33,34%
Rasio Kas Cash Ratio	21,15%	13,92%
RASIO SOLVABILITAS SOLVENCY RATIO		
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liability to Asset Ratio	1,48 kali	1,38 kali
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	0,37 kali	0,68 kali

Rasio Likuiditas

Dalam mengukur kemampuan Perusahaan untuk membayar utang usahanya, Perusahaan menggunakan Rasio Likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar, Rasio Cepat dan Rasio Kas. Besaran Rasio Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.

Rasio likuiditas Perseroan di tahun 2021 berdasarkan rasio kas tercatat sebesar 21,15%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,92%. Begitu juga dengan rasio cepat yang meningkat dari 33,34% di tahun 2020 menjadi 39,46% di tahun 2021. Peningkatan kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang tersedia lebih membaik dari tahun 2020. Sementara rasio lancar tercatat mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 131,78% menjadi 117,19% pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Aset yang tersedia sedikit menurun di tahun 2021 dibanding tahun 2020. Walaupun rasio lancar Perseroan menunjukkan persentase yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dan tercapai lebih dari 100%, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya.

Liquidity Ratio

In measuring the Company's ability to pay its trade payables, the Company uses the Liquidity Ratio which consists of the Current Ratio, Quick Ratio and Cash Ratio. the Liquidity Ratio can be used to measure the Company's ability to meet its obligations or pay its short-term debt.

The Company's liquidity ratio in 2021 based on the cash ratio was recorded at 21.15%, an increase from the previous year of 13.92%. Likewise, the quick ratio increased from 33.34% in 2020 to 39.46% in 2021. the increase in both ratios shows that the Company's ability to pay off its short-term obligations using available cash and cash equivalents is better than in 2020. Meanwhile, the current ratio has decreased from 131.78% in 2020 to 117.19% in 2021. This shows that the company's ability to pay off its short-term obligations using available assets will slightly decrease in 2021 compared to 2020. Even though the Company's current ratio showed a lower percentage than the previous year and reached more than 100%, it can be concluded that the company has a good ability to pay off its obligations.

Rasio Solvabilitas

Perseroan juga memakai Rasio Solvabilitas untuk mengukur besarnya jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Rasio Solvabilitas yang dipakai adalah Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR).

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebesar 0,37 kali turun dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,68 kali. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Ekuitas yang dibiayai oleh utang di tahun 2021 telah menurun. Sementara Rasio Liabilitas terhadap Aset sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebesar 1,48 kali naik dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,38 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa porsi Aset yang dibiayai oleh hutang di tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020.

Solvency Ratio

The Company also uses the Solvency Ratio to measure the amount of assets financed by debt. the Solvency Ratio used is the Ratio of Liabilities to Equity (DER) and the Ratio of Liabilities to Total Assets (DAR).

The ratio of Liability to Equity until the end of 2021 was recorded at 0.37 times, decreased compared to 2020 which was recorded at 0.68 times. This shows that the amount of Equity financed by debt in 2021 has decreased. Meanwhile, the Liabilities to Assets Ratio until the end of 2021 was recorded at 1.48 times, an increase compared to 2020 which was recorded at 1.38 times. This shows that the portion of Assets financed by debt in 2021 increased compared to 2020.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Accounts Receivable Collectable Level

Dalam mengukur tingkat kolektibilitas piutang, Perseroan menggunakan indikator Collection Period. Indikator ini digunakan untuk mengukur periode rata rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu.

In measuring the collectibility of receivables, the Company uses the Collection Period indicator. This indicator is used to measure the average period required to collect receivables (in days). This indicator can be used to measure the Company's ability to collect receivables within a certain period of time.

Uraian Description	2021	2020
Collection Period (Hari) Collection Period (Days)	10 hari days	14 hari days

Kemampuan kolektibilitas piutang Perseroan tahun 2021 adalah 10 hari, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 14 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan tahun 2021 telah meningkat. Perusahaan mampu menagih dengan cepat setiap piutang usaha pada pelanggan.

The collectibility of the Company's receivables in 2021 is 10 days, better than 2020 which recorded 14 days. This shows that the collectibility level of the Company's receivables in 2021 has increased. the company is able to collect quickly any accounts receivable to customers.

Perseroan telah menerapkan langkah-langkah strategi untuk mempercepat kolektibilitas piutang, antara lain: memperoleh proyek dengan sumber pendanaan yang jelas & lancar (sumber APBD/APBN dan BUMN), percepatan proses penagihan ke pemberi kerja dan memproses secara hukum jika ada piutang terlambat/macet.

The Company has implemented strategic steps to accelerate the collectibility of receivables, including: obtaining projects with clear & smooth funding sources (sources from APBD/APBN and BUMN), accelerating the collection process to employers and processing legally if there are late/lost receivables.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Struktur Modal Perusahaan

Struktur modal Perseroan tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun 2020 yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas adalah sebagai berikut.

Struktur Modal Capital Structure	2021	2020
Total Liabilitas (Rp-juta) Total Liabilities (Rp-million)	3.301.697	3.968.742
Dikurangi Kas dan Setara Kas (Rp-juta) Less Cash and Cash Equivalents (Rp-million)	435.623	245.873
Total Utang Debt Total	3.301.697	3.396.743
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.598.302	1.518.075
Rasio Utang terhadap Modal Debt to Capital Ratio	2,07	2,61

Berdasarkan tabel di atas, rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Desember 2021 adalah 1,79 sementara pada 31 Desember 2020 adalah 2,45. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kewajiban utang yang lebih rendah dari tahun 2020 dikarenakan adanya pembayaran Utang.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan

Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Perseroan memonitor dengan dasar rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dari utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.

Selama tahun 2021 strategi Perseroan adalah mempertahankan rasio utang terhadap modal pada batas bawah dari kisaran 2,00 sampai dengan 4,00.

Company Capital Structure

The Company's capital structure in 2021 and its comparison with 2020 which consists of interest-based debt and equity is as follows.

Based on the table above, the adjusted debt-to-equity ratio at 31 December 2021 was 1.79 while at 31 December 2020 it was 2.45. This shows that the Company has lower debt obligations than in 2020 due to debt payments.

Management Policy on the Company's Capital Structure

The Company determines a certain amount of capital in proportion to risk. the Company manages the capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and the risk characteristics of the underlying assets. the Company monitors on the basis of debt to equity ratio. This ratio is calculated from net debt divided by adjusted capital. Net debt is the total debt (as stated in the statement of financial position) less cash and cash equivalents.

During 2021 the Company's strategy is to maintain a debt-to-debt ratio capital at the lower limit of the range of 2.00 to with 4.00.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Bond for Capital Goods Investment

Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal. Dengan demikian, informasi tersebut tidak dapat disampaikan.

Throughout 2021, the Company has no material commitments for capital goods investment. Thus, the information cannot be conveyed.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Realisasi investasi barang modal Perusahaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The realization of the Company's capital goods investment in 2021 is as follows:

Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Investment Purpose	Nilai Amount (Rp)
Bangunan Building	Menunjang Kinerja Perseroan Supporting the Company's Performance	3.197.493.188
Peralatan Proyek Project Equipment		3.320.000.000
Investasi dalam Pelaksanaan Investment in Operation		10.704.488.458
Penyertaan Participation	Menunjang Kinerja Perseroan Supporting the Company's Performance	16.449.373.600
Jumlah Total		33.671.355.246

Per 31 Desember 2021, Perseroan telah melakukan realisasi investasi barang modal sebesar Rp33,67 miliar, mengalami kenaikan Rp18,36 miliar atau 219,85% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp15,32 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi investasi disesuaikan dengan prioritas perusahaan.

As of December 31, 2021, the Company has realized capital goods investment of Rp33.67 billion, an increase of Rp18.36 billion or 219.85% compared to 2020 which was Rp15.32 billion. This is due to the realization of investments adjusted to the company's priorities.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring After the Date Accountant Report

Informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal laporan akuntan pada 2 Februari 2022, adalah adanya perubahan struktur pemegang saham Perseroan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), telah dijelaskan bahwa terdapat pengalihan kembali saham PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PT Nindya Karya (Persero) sebanyak 5.890.500 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp84.882 atau sebesar Rp499.997.421.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan PT Danareksa (Persero), pada pasal 1 huruf a dijelaskan bahwa Pemerintah mengalihkan saham seri B dan seri A milik negara kepada PT Danareksa (Persero) masing-masing sebanyak 5.890.500 dan 59.499 atau sebesar Rp499.997.421.000 dan Rp59.499.000.000.

Material information and facts that occurred between the end of the reporting period on December 31, 2021 to the date of the accountant's report on February 2, 2022, were changes in the Company's shareholder structure. Based on Government Regulation No. 6 of 2022 dated January 24, 2022 concerning Reduction of State Equity Participation of the Republic of Indonesia in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), it has been explained that there is a transfer of shares of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to PT Nindya Karya (Persero) of 5,890,500 series shares. B with a nominal value of Rp84,882 or Rp499,997,421,000 to the Government of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 7 of 2022 dated January 24, 2022 regarding the addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the share capital of PT Danareksa (Persero), in article 1 letter a it is explained that the Government transfers the state-owned series B and series A shares to PT Danareksa (Persero) respectively. respectively 5,890,500 and 59,499 or Rp499,977,421,000 and Rp59,499,000,000.

Peningkatan atau Penurunan yang Material dari Penjualan atau Pendapatan

Material Increase or Decrease in Sales or Revenue

Pada tahun 2021, Perseroan tidak memiliki dampak mengenai peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

In 2021, the Company has no impact on a material increase or decrease in sales or revenue. Therefore, there is no information regarding a material increase or decrease in sales or revenue that can be presented in this Annual Report.

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Kinerja Perusahaan

The Impact of Price Changes on the Company's Revenue and Performance

Sampai dengan 31 Desember 2021, Perseroan tidak memiliki dampak atas perubahan harga terhadap pendapatan yang berpengaruh atas kinerja Perseroan. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan kinerja Perseroan yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2021, the Company has no impact on price changes on revenues that affect the Company's performance. Therefore, there is no information regarding the impact of price changes on the Company's revenue and performance that can be presented in this Annual Report.

Dampak Nilai Mata Uang Asing bagi Kinerja Perusahaan

Impact of Foreign Currency Value on the Performance of the Company

Hingga 31 Desember 2021, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya menggunakan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai dampak nilai mata uang asing bagi kinerja Perseroan yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Until December 31, 2021, the Company runs its business activities using Rupiah currency. Therefore, there is no information regarding the impact of foreign currency values on the Company's performance that can be presented in this Annual Report.

Perbandingan antara Target dan Realisasi 2021 serta Proyeksi Usaha

Comparison between 2021 Target and Realization and Business Projections

Uraian Description	Realisasi 2021 (Rp juta) 2021 Realization (Rp million)	Target 2021 (Rp juta) 2021 targets (Rp million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 (%) Achievement of Realization Against the 2021 Target (%)	Proyeksi 2022 terhadap Realisasi 2021 (%) 2022 Projection Against 2021 Realization (%)	Proyeksi 2022 terhadap Target 2021 (%) 2022 Projection Against 2021 Target (%)
NILAI PEKERJAAN TERSEDIA VALUE OF AVAILABLE JOBS					
Proyek Lama Existing Projects	6.827.061	5.635.916	121,13%	89,58%	108,52%
Proyek Baru New Projects	5.000.932	7.042.369	71,01%	151,77%	107,78%
JUMLAH TOTAL	11.827.993	12.678.285	93,29%	115,88%	108,11%
LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME					
Pendapatan Usaha Operating Revenues	4.415.364	5.377.790	82,10%	124,24%	102,01%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(4.053.477)	(4.798.213)	84,48%	121,77%	102,87%
Laba Bruto Gross Profit	361.887	579.577	62,44%	151,95%	94,88%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	65.700	60.411	108,76%	141,78%	154,20%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	65.794	55.100	119,41%	133,37%	159,26%
POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION					
Aset Lancar Current Assets	3.521.577	4.081.461	86,28%	109,12%	94,15%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	1.378.422	2.133.930	64,60%	150,56%	97,26%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	4.899.999	6.215.391	78,84%	120,78%	95,22%
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	3.004.927	3.050.021	98,52%	104,00%	102,46%
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	296.770	1.678.559	17,68%	440,73%	77,92%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITY	3.301.697	4.728.580	69,82%	134,27%	93,75%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	1.598.302	1.486.810	107,50%	92,91%	99,88%

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 sesuai dengan asumsi dasar APBN tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah 5,2%.
2. Nilai tukar rupiah adalah Rp14.350 per dollar Amerika Serikat (AS).
3. Inflasi sebesar 3%.
4. Suku bunga SUN 10 Tahun sebesar 6,80%.
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) US\$ 63/barel.
6. Lifting minyak mentah Indonesia 703 ribu barel per hari dan Lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Sumber: Kemenkeu.go.id

Selain itu, dalam penyusunan RKAP Tahun 2022 perusahaan juga memasukkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. COVID-19 diasumsikan terkendali pada Tahun 2022 (status PPKM Level 1).
2. Penerbitan Surat Berharga sebesar Rp500 Miliar direncanakan pada bulan Juli 2022 untuk kegiatan investasi dan modal kerja.
3. Tidak adanya refocusing anggaran di Tahun 2022.
4. Industri Properti Indonesia mulai tumbuh di Tahun 2022.
5. Growth Kontrak Tersedia sebesar 12,53%.
6. Revenue Growth sebesar 22,15%.
7. Net Profit Margin sebesar 1,60%.

In composing Plan Company Work and Budget (RKAP) 2022 according to with assumption the basis for the 2022 state budget is as following :

1. Growth economy is 5.2%.
2. The rupiah exchange rate is Rp14,350 per United States (US) dollar.
3. Inflation by 3%.
4. Ethnic group 10 year SUN interest by 6.80%.
5. Price oil Indonesian crude oil (ICP) US\$ 63/barrel.
6. Oil Lifting Indonesian raw 703 thousand barrels per day and lifting gas 1,036 thousand barrel equivalent oil per day

Source: Kemenkeu.go.id

Besides that. in the preparation of the company 's 2022 RKAP also includes: assumptions as following :

1. COVID-19 assumed under control in 2022 (PPKM Level 1) status.
2. Issuance of Securities Rp500 billion planned for the month July 2022 for activity investment and working capital.
3. Not existence budget refocusing in 2022.
4. Industry Indonesian property start grow in 2022.
5. Contract Growth Available by 12.53%.
6. Revenue Growth of 22.15%.
7. Net Profit Margin of 1.60%.

Tinjauan Keuangan Lainnya

Other Financial Overview

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Sebagai badan usaha yang bertujuan untuk menciptakan nilai bagi seluruh Pemegang Saham, Perseroan memiliki kebijakan untuk memberikan hak seluruh Pemegang Saham dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham, pengambilan keputusan besaran dividen senantiasa mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu besaran laba bersih Perusahaan, kondisi keuangan Perusahaan, serta kebutuhan modal dalam rangka pengembangan usaha.

Dasar pembagian dividen kepada pemegang saham diatur dalam anggaran dasar Perusahaan, terakhir disahkan melalui akta No. 39 tahun 2013 yang dibuat di hadapan Khairina SH., notaris di Jakarta, jo. akta No. 68 tahun 2020 yang dibuat di hadapan notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Dua Upa di Jakarta.

Pembagian Dividen Tahun 2021 dan Kronologis Pembagian Dividen

Hingga 31 Desember 2021 PT Nindya Karya (Persero) menetapkan untuk tidak melakukan pembagian dividen. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai deviden kas yang dibagikan, rasio yang dibagikan, tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran.

Dividend Policy and Distribution

Basic Dividend Distribution Policy

As a business entity that aims to create value for all Shareholders, the Company has a policy to provide rights to all Shareholders in cash at least once a year. Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders, the decision making on the amount of dividends always considers several aspects, namely the amount of the Company's net profit, the Company's financial condition, and the need for capital in the context of business development.

The basis for the distribution of dividends to shareholders is regulated in the Company's articles of association, most recently ratified by deed No. 39 of 2013 made before Khairina SH., a notary in Jakarta, jo. deed No. 68 of 2020 made before the notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Dua Upa in Jakarta.

Dividend Distribution in 2021 and Chronology of Dividend Distribution

Until December 31, 2021, PT Nindya Karya (Persero) has decided not to distribute dividends. So that there is no information about the cash dividends distributed, the ratios distributed, the announcement date and the payment date.

Kronologis pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2014 untuk hasil usaha tahun 2013, hingga tahun 2020 untuk hasil usaha tahun 2019 adalah sebagai berikut;

Chronology of distribution and payment of dividends in 2014 for the results of operations in 2013, up to in 2020 for the results of operations in 2019 are as follows:

Tahun Pembagian Year Distribution	Tahun Dividen Year Dividend	Tanggal Pengumuman Date Announcement	Tanggal Pembayaran Date Payment	Dividen Kas Yang Dibagikan (Rp Juta) Cash Dividend Share (Rp Million)	Rasio Pembagian Dividen (%) Division Ratio Dividend (%)
2021	2020	29 Juni 2021 June 29, 2021	-	-	-
2020	2019	2 Juli 2020 July 2, 2020	-	-	-
2019	2018	27 Mei 2019 May 27, 2019	26 Juli 2019 (Negara) 20 Juli 2019 (PPA Tahap I) 27 Agustus 2019 (PPA Tahap II) 1 Oktober 2019 (PPA Tahap III) 26 Juli 2019 (Country) 20 Juli 2019 (PPA Phase I) 27 August 2019 (PPA Phase II) October 1, 2019 (PPA Phase III)	Rp35.650 miliar/ billion	12,97%
2018	2017	15 Mei 2018 May 15, 2018	5 Juni 2018 June 5, 2018	17.500	15%
2017	2016	Sesuai keputusan para Pemegang Saham yang tertuang dalam RUPS, Perseroan tidak membagikan dividen karna saldo laba ditahan yang terbukukan negatif. In accordance with the decision of the Shareholders as stated in the GMS, the Company did not distribute dividends due to negative retained earnings balance			
2015	2014				
2014	2013				

Kontribusi terhadap Negara

Sebagai entitas usaha yang bergerak di wilayah Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk perpajakan. Komitmen perpajakan yang dilakukan Perseroan juga menjadi bagian dari kontribusi Perseroan terhadap negara. Berikut disampaikan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan Perusahaan di tahun 2020 dan 2021.

Contribution to the Nation

As a business entity operating in the territory of Indonesia, the Company is committed to complying with all applicable regulations, including taxation. The tax commitment made by the Company is also part of the Company's contribution to the country. The following is the fulfillment of tax obligations carried out by the Company in 2020 and 2021.

No	Uraian Description	Realisasi Tahun 2020 Realization in 2020	Realisasi Tahun 2021 Realization in 2021	Yoy (%)
1	Pajak Tax	633.407	763.724	120,57%

Informasi Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Information on Employees and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau manajemen (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait ESOP/MSOP yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

By the end of 2021, the Company does not have a Employees (ESOP) and/or management (MSOP) Share Ownership Program by. Thus, there is no information related to ESOP/MSOP that can be presented in this Annual Report.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Sejak berdirinya hingga 31 Desember 2021, Perseroan belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga tidak menerbitkan obligasi yang mewajibkan Perseroan melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi.

Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Since its establishment until December 31, 2021, the Company has never conducted an Initial Public Offering. the Company also does not issue bonds which require the Company to report the use of proceeds from the public offering of bonds.

Thus, there is no information regarding the realization of the use of proceeds from the public offering.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat informasi mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal yang bersifat material, yang memberikan dampak secara kinerja operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

Throughout 2021 there is no information regarding material investments, expansions, divestments, business mergers, acquisitions, and/or debt/capital restructuring, which have an impact on the operational performance and financial performance of the Company.

Prospek Usaha

Business Prospect

Dalam menentukan langkah ke depan guna mempertahankan kelangsungan usahanya, Nindya Karya berkomitmen untuk mewujudkan visi dan berkontribusi nyata dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi dinamika usaha, di antaranya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

IMF dalam laporan *World Economic Outlook* yang dikeluarkan pada Januari 2022 menyebutkan bahwa mulai menyebarnya virus COVID-19 varian Omicron pada akhir tahun 2021 dapat memberikan dampak bagi kondisi ekonomi global, salah satunya berpengaruh terhadap peningkatan harga energi dan tingkat inflasi.

Mengingat banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi industri di bidang konstruksi, Pemerintah melalui Laporan Informasi APBN 2022 telah menetapkan program pengelolaan subsidi yang dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah melalui APBN tersebut juga telah menyesuaikan kondisi yang terjadi, seperti adanya fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi barang bersubsidi.

Merujuk kepada Laporan Perekonomian Indonesia 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Akselerasi perekonomian nasional di 2022 didukung oleh peningkatan mobilitas seiring dengan penyebaran COVID-19 yang lebih terkendali dan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor prioritas yang semakin luas disertai optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta stimulus kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus COVID-19 perlu terus diwaspadai.

Tahun 2022 menjadi masa yang penting dan juga sangat berat dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan fondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi diarahkan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi yang semakin efektif, *prudent* dan *sustainable*.

In determining future steps to maintain the continuity of its business, Nindya Karya is committed to realizing its vision and making a real contribution by taking into account the factors that occur, both internal and external that can affect business dynamics, including the COVID-19 pandemic that is still ongoing in developing countries. countries in the world, including Indonesia.

IMF in its *World Economic Outlook* report issued in January 2022 stated that the spread of the Omicron variant of the COVID-19 virus at the end of 2021 could have an impact on global economic conditions, one of which will affect the increase in energy prices and inflation rates.

Considering the many factors that affect the condition of the industry in the construction sector, the Government through the 2022 State Budget Information Report has established a subsidy management program that is allocated to ease the burden on the community while protecting producers from producing goods and services. the incentives provided by the Government through the APBN have also adjusted for conditions that occur, such as fluctuations in world crude oil prices, the rupiah exchange rate, and the volume of consumption of subsidized goods.

Referring to Report the 2021 Indonesian economy released by Bank Indonesia, stated that: that Indonesia 's economy is predicted increase more high in 2022 in line with getting better Request domestic. Acceleration economy nationally in 2022 supported by improvements mobility along with more spread of COVID-19 controlled and accelerated vaccination. opening sector increasing priority _ large accompanied optimization implementation package policy integrated Committee Stability System Finance (KSSK), as well as policy stimulus fiscal Government and mix Bank Indonesia policy. in connection this. Bank Indonesia predicts growth Indonesia's economy in 2022 will be reached 4.7-5.5%, in line with acceleration consumption private sector and investment. in the middle permanent awake shopping fiscal Government and exports. though risk increase COVID-19 cases need Keep going watch out.

The year 2022 is an important and also very difficult period in the process of accelerating the national economic recovery from the impact of the ongoing COVID-19 pandemic, as well as being a momentum to continue and strengthen the foundations of consolidation and reform. Consolidation is aimed at accelerating economic recovery that is more effective, prudent and sustainable.

Prospek perekonomian nasional tahun 2022 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi Covid-19. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2022 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2021 dan 2022.

Strategi korporasi yang akan dijalankan pada tahun 2022, yaitu manajemen telah menetapkan strategi-strategi baru yang merupakan terobosan baru untuk merespon peluang pasar industri konstruksi. Seiring dengan penyelesaian restrukturisasi Perseroan yang akan dilakukan dengan pengalihan saham yang diambil bagian oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kembali kepada Negara dengan mekanisme dalam Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2021 dilakukan paling lambat tahun 2022. Penyelesaian tersebut selaras dengan rencana pembentukan holding PT Danareksa (Persero).

Dalam penyusunan RKAP 2022, target-target yang akan dicapai sudah diselaraskan dengan RJPP 2022-2026. Sesuai dengan sasaran RJPP 2022-2026, telah ditetapkan strategi di tahun 2022 dalam tahap *Growth*.

Strategi utama di tahun 2022 sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan Strategis, Investasi dan Operasi

- Melanjutkan pertumbuhan perusahaan dengan melakukan investasi pada bidang-bidang strategis sesuai dengan anggaran dasar yang ditetapkan perusahaan baik melalui inisiasi bisnis, kerjasama kemitraan strategis, maupun tender investasi atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- Penetrasi pasar pada proyek-proyek EPC (Oil & Gas), energi terbarukan dan investasi melalui sinergi antar BUMN serta kerjasama dengan perusahaan asing.
- Merencanakan pendanaan pada agenda investasi baik bersumber dari equity, mitra strategis, maupun pendanaan kredit perbankan dan Lembaga keuangan.
- Meningkatkan implementasi Program ERP, MS, Project, BIM, CCTV & Video Conference sebagai alat kerja tata kelola proyek.

2. Bidang Pemasaran

- Peningkatan competitiveness dalam hal penawaran harga tender suatu proyek melalui Smart Estimating Guide, Value Engineering, Design and Build dan BIM (Building Information Modelling) dan Marketing Intelligent.
- Ekspansi global dengan melakukan kajian atas peluang bisnis, kajian atas regulasi yang berlaku di negara yang dituju, kajian sosial budaya setempat melalui assuring participation pangsa pasar LOAN ICB (kerjasama dengan perusahaan Internasional).

The prospect of the national economy in 2022 is estimated to improve in line with the projected global economic recovery and the impact of fiscal support on accelerating economic recovery, including support for controlling the COVID-19 pandemic. However, the macroeconomic framework for 2022 is prepared with a high risk of uncertainty, so there is a possibility of divergence in global economic projections in 2021 and 2022.

The corporate strategy to be implemented in 2022 is that management has set new strategies which are new breakthroughs to respond to market opportunities in the construction industry. Along with the completion of the restructuring of the Company which will be carried out by transferring the shares taken by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) back to the State with the mechanism in Government Regulation No. 89 of 2021 will be carried out no later than 2022. the settlement is in line with the plan to establish a holding company PT Danareksa (Persero).

In preparation of the 2022 RKAP, the targets to be achieved already aligned with the RJPP 2022-2026. in accordance with the target of the RJPP 2022-2026, has been set strategy in 2022 in the Step Growth.

The main strategies in 2022 are as follows :

1. Strategic Planning, Investment and Operations

- Continuing the company's growth by investing in strategic areas in accordance with the articles of association determined by the company, either through business initiation, strategic partnership cooperation, or investment tender or Government and Business Entity Cooperation (PPP).
- Market penetration in EPC (Oil & Gas) projects, renewable energy and investment through synergies between SOEs and cooperation with foreign companies.
- Planning for financing on the investment agenda, whether sourced from equity, strategic partners, as well as funding for bank credit and financial institutions.
- Improve the implementation of the ERP, MS Program. Project, BIM, CCTV & Video Conference as project management work tools.

2. Marketing

- Increasing competitiveness in terms of bidding on a project's tender price through Smart Estimating Guide, Value Engineering, Design and Build and BIM (Building Information Modeling) and Marketing Intelligent.
- Global expansion by conducting studies on business opportunities, studies on applicable regulations in the destination country, local socio-cultural studies through assuring participation in ICB LOAN market share (partnership with international companies)

- Memperbesar size project untuk meningkatkan efektivitas pertumbuhan usaha.

3. Bidang Riset, Teknologi dan Informasi

- Peningkatan fungsi Infrastruktur & Security TI (dengan fokus utama Cybersecurity).
- Implementasi Digital System.
- Pengoptimalan Transformasi Digital.

4. Bidang Supply Chain Management (SCM)

- Optimalisasi program EPROC untuk memenangkan tender dan melakukan MoU dengan vendor terbaik dan harga kompetitif.
- Melakukan strategi partnership dan kolaborasi bersama mitra seluruh Indonesia untuk menjamin vendor terpilih adalah yang terbaik.
- Mengembangkan aplikasi real time SIMONIK (Sistem Informasi Monitoring Invoice dan Kinerja).

5. Bidang QHSE

- Implementasi di Bidang Quality, Health, Safety & Environment menjadi Budaya bagi setiap Insan Nindya
- Pelaksanaan SIM QHSE untuk memperkuat kegiatan operasional.
- Sertifikasi Personel QHSE sesuai dengan Standar Nasional & Global.
- Pencapaian Zero Accident SR<250 dan FR<2.

6. Bidang Keuangan

- Menerbitkan surat berharga untuk pembiayaan jangka menengah & jangka panjang.
- Optimalisasi skema third parties agreement untuk mendukung kegiatan investasi dan pendanaan.
- Melaksanakan Pemingkatan Perusahaan.

7. Bidang Human Capital

- Nindya Learning Center sebagai Center of Knowledge dalam pengembangan talenta.
- Implementasi Sistem Integrated Human Capital Management (IHCM)
- Mengintegrasikan Sistem Talent Management dan Performance Management System dalam ERP.
- Internalisasi Core Values AKHLAK di seluruh unit bisnis, unit kerja dan proyek.

8. Bidang Manajemen Risiko dan Sistem

- Implementasi aplikasi BORN (Business and Operational Risk Management Nindya)
- Penerapan Audit ISO 19650:2018 di semua proyek.

- Expanding project size to increase the effectiveness of business growth.

3. Research, Technology and Information Sector

- Improved IT Infrastructure & Security function (with the main focus on Cybersecurity).
- Digital System Implementation.
- Digital Transformation Optimization.

4. Supply Chain Management (SCM)

- Optimization of the EPROC program to win tenders and enter into MoUs with the best vendors and competitive prices.
- Implement a strategy of partnership and collaboration with partners throughout Indonesia to ensure that the selected vendor is the best.
- Develop SIMONIK real time application (Invoice and Performance Monitoring Information System).

5. QHSE Field

- Implementation in the Fields of Quality, Health, Safety & Environment becomes a Culture for every Nindya Personnel
- Implementation of QHSE SIM to strengthen operational activities.
- QHSE Personnel Certification according to National & Global Standards.
- Achieving Zero Accident SR

6. Finance Field

- Issuing securities for financing medium term & long term.
- Optimization of the third party agreement scheme for support investment and financing activities.
- Implement Company Ratings.

7. Human Capital

- Nindya Learning Center as Center of Knowledge in talent development.
- Implementation of Integrated Human Capital System Management (IHCM)
- Integrating Talent Management System and Performance Management System in ERP.
- Internalization of AKHLAK Core Values in all units businesses, work units and projects.

8. Risk Management and Systems

- Implementation of the BORN (Business and Business) application Operational Risk Management Nindya)
- Implementation of ISO 1965:2018 Audit in all project.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Pangsa Pasar

Pangsa pasar Perseroan adalah proyek-proyek infrastruktur nasional di bidang pengairan dan irigasi, jalan dan jembatan, bangunan dan gedung, pelabuhan dan bandara, EPC yang berasal dari Kementerian PUPR (Pemerintah Pusat), Pemerintah daerah, BUMN dan Swasta.

Perseroan juga memetakan pangsa pasar berdasarkan tender yang diikuti dan dimenangkan oleh Perseroan. Pertumbuhan bisnis konstruksi pada tahun 2021 masih tumbuh dengan terbatas karena masa pemulihan ekonomi nasional, yang tercermin dari tender-tender proyek yang masih terbatas. Dengan perolehan proyek baru yang hanya mencapai 21% dari tender yang diikuti, Perseroan tetap berusaha memperoleh proyek sebanyak-banyaknya dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian.

Jumlah nilai tender yang diikuti tahun 2021 mencapai sebesar Rp25,67 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,54 triliun atau 9,01% dibandingkan periode yang sama pada realisasi tahun 2020 sebesar Rp28,21 triliun. Dari nilai tender yang diikuti tersebut, nilai tender yang dimenangkan tahun 2021 sebesar Rp5,5 triliun atau 21% terhadap jumlah nilai tender yang diikuti di tahun 2021. Jumlah nilai tender yang dimenangkan mengalami penurunan Rp350 miliar atau 6%, dari Rp5,85 triliun di tahun 2020 menjadi Rp5,5 triliun di tahun 2021.

Strategi Pemasaran

Kegiatan pengembangan pemasaran atas layanan Perseroan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. *Competitiveness* dalam hal penawaran tender melalui SEG (Smart Estimating Guide), Design & Build, dan BIM (Building Information Modelling) dan Marketing Inteligent
2. Penetrasi pasar pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
3. Memasuki pasar swasta yang prudent dengan memenuhi prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)

Market Share

The Company's market share is national infrastructure projects in the field of irrigation and irrigation, roads and bridges, buildings and buildings, ports and airports, EPC originating from the Ministry of PUPR (Central Government), regional governments, BUMN and private sector.

The Company also maps market share based on the tenders the Company participated in and won. Construction business growth in 2021 will still grow at a limited pace due to the national economic recovery period. which is reflected in project tenders that are still limited. With the acquisition of new projects that only reached 21% of the tenders participated in, the Company continues to try to obtain as many projects as possible while still using the precautionary principle.

The total value of the tenders participated in in 2021 reached Rp25.67 trillion, "a decrease " Rp2.54 trillion or 9.01% compared to the same period in realization in 2020 amounted to Rp28.21 trillion. From the value of the tenders that were participated in, the value of the tenders won in 202 1 was Rp5.5 trillion or 21% of the total value of the tenders participated in 202 1. the number of tenders won has decreased Rp350 billion or 6 %, from Rp5.85 trillion in 20 20 to Rp5.5 trillion in 2021.

Marketing Strategy

The marketing development activities for the Company's services in 202 1 are as follows:

1. Competitiveness in terms of tender offers through SEG (Smart Estimating Guide), Design & Build, and BIM (Building Information Modeling) and Marketing Intelligence
2. Market penetration in the Government and Business Entity Cooperation Project (PPP).
3. Entering the prudent private market by fulfilling the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Material Transaction Information Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait didefinisikan sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan.
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan.
 - c. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.
2. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Related Party Policy

The Company has transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures." A related party is a related person or entity defined as follows:

1. A person or close family member has a relationship with the Company if that person:
 - a. Have control or joint control over the Company.
 - b. Has significant influence over the Company.
 - c. Is a key management personnel of the Company or the parent entity of the Company.
2. An entity is related to the Company if it satisfies any of the following:
 - a. The Entity and the Company are members of the same business group (meaning the parent entity, entity subsidiaries, and subsequent subsidiaries are related to other entities).
 - b. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or a joint venture that is a member of a business group, in which case the other entity are members).
 - c. The two entities are joint ventures of the same third party.
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity.
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of one of the Companies or entities related to the Company. If the Company is an entity that implementing the program, the sponsoring entity is also related to the Company.
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by the person identified in letter (a); or
 - g. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - h. The entity, or a member of a group to which the entity is a part, provide key management personnel services to the Company or to the parent of Company.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun Internasional. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, Sifat Transaksi, serta Alasan Dilakukannya Transaksi

Berikut disampaikan nama pihak bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi untuk transaksi Perusahaan di sepanjang tahun 2021.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. Government refers to the Government, Government agencies and similar bodies both locally, nationally and internationally. Entities related to the Government can be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments who are shareholders of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as shareholder proxies.

Name of the Transactional Party, Nature of Affiliated Relationship, Nature of Transaction, and Reason for Conducting Transaction

Following are the names of the transacting parties and the nature of the affiliation relationship for the Company's transactions throughout 2021.

Pihak-Pihak yang Berelasi Related Parties	Hubungan Connection	Sifat Transaksi Transaction Nature
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) Controlled by PT Pertamina (Persero)	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pertamina Geothermal Energy	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) Controlled by PT Pertamina (Persero)	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) Controlled by PT Pertamina (Persero)	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Entitas Induk Parent Entity
PT PPA Finance	Dikendalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Controlled by PT Asset Management Company (Persero)	Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa Right of Use Assets and Lease Liability
PT PTPN IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Semen Padang	Dikendalikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Controlled by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Survei Udara Panas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Waskita Beton Tbk	Dikendalikan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk Controlled by PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk Controlled by PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services

Pihak-Pihak yang Berelasi Related Parties	Hubungan Connection	Sifat Transaksi Transaction Nature
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Yodya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
Ventura Bersama Nindya-Brantas	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-Adhi Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-Hutama Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-Hutama Karya-Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-MCC-Wika-Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-Pembangunan Perumahan	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-PPA	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-Wijaya-Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-Pembangunan Perumahan -Hutama Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
PT PLN (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pertamina Bina Medika IHC	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Controlled by Central Government	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
Ventura Bersama Wijaya Karya-Nindya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
Ventura Bersama Adhi-Nindya-Basuki	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
Ventura Bersama Nindya-PT Surya Mataram Sakti	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan, baik dengan Pihak Berelasi maupun dengan Pihak Ketiga dilakukan melalui proses dan mekanisme pengadaan yang wajar, sesuai dengan yang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Sama seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga maupun transaksi lainnya, transaksi pihak berelasi dilakukan dalam rangka pengelolaan operasional dan bisnis Perseroan; termasuk di antaranya pendapatan serta pinjaman bank maupun penempatan dana di bank.

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

Explanation of the Fairness of the Transaction

All transactions carried out by the Company, both with related parties and with third parties, are carried out through a fair procurement process and mechanism, in accordance with the applicable laws and regulations.

Reason for Transaction

Similar to transactions with third parties and other transactions, related party transactions are carried out in the context of managing the Company's operations and business; including income and bank loans as well as placement of funds in banks.

Company Policy Regarding Transaction Review Mechanism

The fairness of transactions and compliance with regulations on related party transactions have gone through a review and audit process by internal and external auditors. the Company conducts transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties.

Fulfillment of Relevant Rules and Conditions

Fulfillment of related regulations and provisions, namely Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia is carried out through efforts to disclose PSAK 7 regarding "Related Party Disclosures" in the Company's 2021 financial statements which have been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Colleague.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Perseroan tidak mendapatkan adanya informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2021.

The Company did not receive any financial information containing extraordinary and rare events throughout 2021.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Changes to Law Regulations that Significantly Influence the Company

Pada tahun 2021, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

In 2021, there are no changes to laws and regulations that have a significant effect on the Company. Thus, there is no information regarding changes in laws and regulations that have a significant effect on the company in this Annual Report.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Accounting Policy Changes and Their Impact on the Company

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

DSAK-IAI has publish a number of standard new amendments and adjustments on standard. as well as interpretation on standard however not yet apply effective for period starting on January 1. 2021.

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 yaitu:

- PSAK Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait COVID-19 Setelah 30 Juni 2021;

Amendment on applicable standards _ effective for period starting on or _ after April 1, 2021. namely :

- PSAK Amendments to PSAK 73: Leases about Concession Rent related to COVID-19 After 30 June 2021;

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;

Amendment on applicable standards _ effective for period starting on or _ after January 1. 2022, with application early allowed namely :

- PSAK Amendments to PSAK 22: Combination Business about Reference to Framework Conceptual ;
- Amendments to PSAK 57: Provisions. Liabilities Contingencies. and Assets Contingencies about Contract Loss-Cost Fulfill Contract ;
- Amendments to PSAK 16: Assets Permanent About Previous Results Intensified Use ; _

- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang; dan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71-Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan di Laporan tahunan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

- PSAK 69 (Adjustments Annual 2020): Agriculture ;
- PSAK 71 (Adjustments Annual 2020): Instrument Finance ; and
- PSAK 73 (Adjustments Annual 2020): Rent.

Amendment on applicable standards _ effective for period starting on or _ after January 1. 2023, with application early allowed namely :

- Amendments to PSAK 1: Presentation Report Finance about Disclosure Policy Accounting ;
- Amendments to PSAK 1: Presentation Report Finance about Classification Liability as Period Short or Long Term ; and
- Amendments to PSAK 25: Policy Accounting. Change Estimate Accounting. and Errors about Definition Estimate Accountancy
- Amendments to PSAK 46: Tax Income about Tax Deferred related Assets and Liabilities that arise from Single Transaction.

Standard new thing _ effective for period starting on or _ after January 1. 2025, with application early allowed namely :

- Amendments to PSAK 74: Contracts Insurance about Application Beginning of PSAK 74 and PSAK 71-Information Comparative.

Until date report Finance in Report annual this authorized, Group still To do evaluation on impact potential from application standard new, amendment standards and interpretation standard that.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuous Information

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Dalam mengukur kelangsungan usaha, Perseroan menggunakan surat Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian tingkat Kesehatan BUMN. Kebijakan Kementerian BUMN ini memberikan perangkat dan metode untuk mengukur tingkat kesehatan Perseroan yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Melalui pengukuran dan penilaian tingkat kesehatan tersebut, manajemen mendapatkan rekomendasi tentang hal-hal potensial yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan pada tahun buku yang diukur.

Laporan Kinerja Perusahaan tahun buku 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,

Aryanto, Mawar dan Rekan. Audit tersebut meliputi evaluasi kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta perbandingan antara realisasi tahun 2021 dan target anggaran yang tertuang dalam RKAP 2021. Dalam Laporan Kinerja Perusahaan, data keuangan telah termasuk nilai penyertaan dan/atau pendapatan (kerugian) dari penyertaan di entitas anak yang diperhitungkan atas dasar metode ekuitas yang telah diaudit, dan penyertaan di Kerja Sama Operasi (KSO) dengan memperhitungkan bagian laba KSO berdasarkan persentase investasi atas dasar metode ekuitas.

Hasil evaluasi atas tingkat kesehatan Perusahaan menunjukkan kinerja dalam tahun 2021 tergolong dalam kondisi "SEHAT" kategori "A" dengan skor "73,00". Berikut disampaikan tabel tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun buku 2021.

Company Soundness Level

In measuring business continuity, the Company uses the Decree of the Minister of SOEs No.KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment of the Soundness Level of SOEs. This BUMN Ministry policy provides tools and methods to measure the company's Soundness level which includes financial aspects, operational aspects, and administrative aspects. Through the measurement and assessment of the soundness level, management obtains recommendations on potential matters that may affect the Company's business continuity in the financial year measured.

The Company Performance Report for the 2021 financial year has been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf,

Aryanto, Mawar and Partners. the audit includes a performance evaluation, the Company's Work Plan and Budget (RKAP), as well as a comparison between the realization in 2021 and the budget targets contained in the 2021 RKAP. in the Company Performance Report, financial data includes the value of investments and/or income (losses) from investments. in subsidiaries calculated on the basis of the audited equity method, and participation in Joint Operations (KSO) by calculating the share of KSO profits based on the percentage of investment on the basis of the equity method.

The results of the evaluation of the Company's health level show that performance in 2021 is classified as "HEALTHY" category "A" with a score of "73.00". the following is a table of the Company's Health level for the 2021 financial year.

Uraian Description	RKAP 2021		Realisasi Realization 2020		Realisasi Realization 2021	
	Bobot Weight	Skor Score	Bobot Weight	Skor Score	Bobot Weight	Skor Score
ASPEK KEUANGAN FINANCIAL ASPECTS						
Return on Equity (ROE)	3,85%	5,50	2,90%	5,50	4,29%	7,00
ROI	6,07%	5,00	5,08%	5,00	6,22%	5,00
Cash Ratio	25,02%	4,00	13,92%	2,00	21,15%	3,00
Current Ratio	133,82%	5,00	131,78%	5,00	117,19%	4,00
Collection Period (hari) Collection Period (days)	17	5,00	14	5,00	10	5,00
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (times)	9	5,00	15	5,00	19	5,00
Total Asset Turnover (kali) Total Asset Turnover (times)	0,91	4,00	0,69	3,00	0,95	4,00

Uraian Description	RKAP 2021		Realisasi Realization 2020		Realisasi Realization 2021	
	Bobot Weight	Skor Score	Bobot Weight	Skor Score	Bobot Weight	Skor Score
Rasio Modal terhadap Total Aset Capital Adequacy Ratio	23,03%	7,25	26,89%	7,25	31,28%	10,00
ASPEK OPERASIONAL OPERATIONAL ASPECTS						
Peningkatan Penguasaan Teknologi Technological Mastery Improvement	90,00%	5,00	93,88%	5,00	96,22%	5,00
Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Implementation of Formal and Informal Education	90,00%	5,00	93,74%	5,00	169,40%	5,00
Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Timely Completion of Work	95,00%	5,00	95,70%	5,00	96,40%	5,00
ASPEK ADMINISTRASI ADMINISTRATIVE ASPECTS						
Laporan Tahunan Annual Report	≤150 hari/day	3,00	≤150 hari/day	3,00	≤150 hari/day	3,00
RKAP	≤60 hari/day	3,00	≤60 hari/day	3,00	≤60 hari/day	3,00
Laporan Triwulan Quarterly Report	≤60 hari/day	3,00	≤60 hari/day	3,00	≤60 hari/day	3,00
Efektivitas Penyaluran Dana PUKK PUKK Fund Distribution Effectiveness	99,60%	3,00	97,94%	3,00	96,20%	3,00
Tingkat Kolektibilitas Collectibility Rate	85,50%	3,00	71,98%	3,00	74,06%	3,00
JUMLAH TOTAL	JUMLAH SKOR TOTAL SCORE	70,75	67,75		73,00	
	TINGKAT KESEHATAN SOUNDNESS LEVEL	SEHAT SOUND A	SEHAT SOUND A		SEHAT SOUND A	

Kriteria Tingkat Kesehatan
Soundness Level Criteria

No	Tingkat Kesehatan Soundness Level	Kategori Category	Total Skor (Ts) Total Score
1	Sehat Sound	AAA AA A	TS > 95 80 < ts ≤ 95 65 < ts ≤ 80
2	Kurang Sehat Less Sound	BBB BB B	50 < ts ≤ 65 40 < ts ≤ 50 30 < ts ≤ 40
3	Tidak Sehat Unsound	CCC CC C	20 < ts ≤ 30 10 < ts ≤ 20 ts ≤ 10

Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang

Business Road Map: Long-term Plan

Perseroan memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 2021-2025 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan melalui Surat No. 0771/DIRUT/KDAKT/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2021-2025.

The Company has a Corporate Long Term Plan (RJPP) for the period 2021-2025 which has been signed by the Company's Board of Directors through Letter No. 0771/DIRUT/KDAKT/12/2020 dated December 22, 2020 regarding the Company's Long-term Plan of PT Nindya Karya (Persero) 2021-2025.





● Bendungan Rotiklot, NTT
Rotiklot Dam, NTT



Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function



Perusahaan menempatkan SDM sebagai partner strategis yang harus dikelola dan dikembangkan dalam mendukung laju pertumbuhan di masa mendatang.
The Company places HR as a strategic partner that must be managed and developed to support future growth.

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resources Management and Development

Salah satu faktor untuk mendukung keberlanjutan usaha dalam mewujudkan visi Nindya Karya, yakni memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif dan berintegritas dalam menghadapi situasi dinamika persaingan industri. Untuk itu, Nindya Karya secara berkesinambungan akan terus melakukan pengelolaan SDM secara tepat, efektif dan efisien, guna memastikan bahwa SDM Nindya Karya mampu mendukung Perusahaan dalam menghadapi perkembangan bisnis.

Untuk terus mengembangkan SDM yang dimiliki, Perusahaan melakukan pengelolaan SDM yang dikenal dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Capital Management/HCM) yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan dengan strategi Perusahaan, sehingga akan mampu meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja Perusahaan.

Di samping itu, Perusahaan memiliki tata cara, kebiasaan, dan aturan dalam mencapai visi dan misinya. Tata cara, kebiasaan, dan aturan tersebut tercermin dalam nilai-nilai Perusahaan yang diterapkan secara terus menerus, mulai dari level pimpinan hingga staf Perusahaan, yang kemudian menjadi budaya perusahaan. Kinerja perusahaan yang tinggi tentunya tidak terlepas dari budaya perusahaan yang baik dan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab yang dimiliki karyawannya.

Perusahaan menempatkan SDM yang dimilikinya sebagai partner strategis yang harus dikelola dan dikembangkan dalam mendukung laju pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang. Perusahaan juga secara progresif melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan, dan senantiasa berupaya untuk menciptakan SDM yang unggul, loyal dan berkompeten di bidangnya. Untuk itu, Perusahaan berfokus pada pembentukan SDM yang kompeten, berintegritas tinggi, serta menjunjung sikap dan perilaku yang luhur berdasarkan nilai-nilai budaya Perusahaan.

Strategi dan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Pengelolaan SDM yang dilakukan oleh Perusahaan mengedepankan strategi yang mengacu pada peraturan dan regulasi yang berlaku, yang mana salah satunya yakni Perusahaan senantiasa untuk terus berupaya memenuhi hak dan meningkatkan kesejahteraan para pegawainya. Hal tersebut dipercaya akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta menumbuhkan loyalitas setiap pegawai untuk bersama melangkah mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

One of the factors in supporting business sustainability in achieving Nindya Karya's vision is to have Human Resources (HR) who are adaptive and have integrity in dealing with the dynamic situation of industrial competition. For this reason, Nindya Karya will continuously manage HR appropriately, effectively and efficiently, to ensure that Nindya Karya's HR is able to support the Company in facing business developments.

To continue to develop its human resources, the Company implements Human Capital Management (HCM) which is integrated with the management system in line with the Company's strategy, in order to increase the competitiveness and accelerate the Company's performance.

In addition, the Company has procedures, habits, and rules in achieving its vision and mission. These procedures, habits, and rules are reflected in the Company's values which are applied continuously, from the leadership level to the staff of the Company, which later become the corporate culture. The high performance of the company certainly cannot be separated from a good corporate culture and responsible leadership spirit owned by its employees.

The company places its human resources as a strategic partner that must be managed and developed to support the company's growth rate in the future. The Company also progressively implements HR management and development based on the needs and development of the Company, and always strives to create superior, loyal and competent human resources in their fields. To that end, the Company focuses on the formation of competent human resources, with high integrity, and upholds noble attitudes and behavior based on the Company's cultural values.

HR Management and Development Strategy and Policy

HR management carried out by the Company prioritizes strategies that refer to applicable rules and regulations, one of which is that the Company continues to strive to fulfill the rights and improve the welfare of its employees. This is believed to be able to create a conducive work environment and foster the loyalty of every employee to move in harmony towards achieving the Company's vision and mission.

Perusahaan dalam melakukan pengelolaan SDM selalu memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan industri, teknologi, serta ekonomi secara nasional maupun global guna menerapkan strategi yang tepat. Selain itu, guna menciptakan pengelolaan SDM yang berkualitas Perusahaan melakukan pendekatan dengan prinsip "the right man on the right place", sehingga nantinya akan didapatkan Great People, Great Leader", dalam rangka memenuhi kebutuhan serta perkembangan bisnis yang dinamis.

Melalui strategi SDM yang tepat, Perusahaan optimis mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam visi dan misi Perusahaan. Di mana strategi SDM harus mampu mengatasi perkembangan bisnis yang kerap berubah, sekaligus memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan.

Di tahun 2021 Perusahaan telah menerapkan strategi pengelolaan SDM antara lain:

1. Penerapan *Performance Management System* berbasis KPI Individu;
2. Review Design Reward Management (Implementasi Stage 1);
3. Identifikasi dan mapping Talent Nindya untuk masuk dalam Talent Pool Cluster Danareksa dan BUMN;
4. Pengayaan kurikulum dan modul pembelajaran e-Learning serta Pemanfaatan LMS sebagai media pembelajaran secara daring.

Sementara itu, kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan senantiasa mengacu pada pedoman ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dasar aturan di Internal Perusahaan dan beberapa referensi lainnya sebagai sebuah landasan yang telah disesuaikan pada dimensi-dimensi pengelolaan SDM yang dibutuhkan.

Selain sebagai landasan legal-formal, pemenuhan ketentuan regulasi di bidang SDM dilakukan dalam rangka menetapkan acuan dasar strategi pengelolaan SDM baik dalam konteks Rencana kerja perusahaan maupun inisiatif strategis yang dibutuhkan selama berjalannya aktivitas usaha.

Landasan kebijakan pengelolaan SDM yang berlaku di Perusahaan meliputi: Pengelolaan SDM Mengacu pada undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1. Referensi legal-formal utama dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan yaitu dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam menetapkan kebijakan yang diperlukan, regulasi tersebut telah mengatur banyak aspek yang diperlukan seperti:
 - a. Kesetaraan dan pemenuhan Hak asasi Manusia;
 - b. Perencanaan dan informasi tenaga kerja;
 - c. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. Penempatan tenaga kerja;
 - e. Hubungan kerja;

The company in managing its human resources always pays attention to and considers industrial, technological, and economic developments nationally and globally in order to implement the right strategy. In addition, in order to create quality HR management, the Company approaches the principle of "the right man on the right place", to produce Great People, Great Leaders in order to meet the needs and dynamic business development.

Through the right HR strategy, the Company is optimistic that it will be able to achieve the goals that have been set as stated in the Company's vision and mission. Where the HR strategy must be able to cope with the ever-changing business developments, while providing the right solutions as needed.

In 2021 the Company has implemented HR management strategies, such as:

1. Implementation of Performance Management System based on Individual KPIs;
2. Review of the Reward Management Design (Stage 1 Implementation);
3. Identification and mapping of Nindya's talent to be included in the Danareksa and BUMN Talent Pool Cluster;
4. Enrichment of e-Learning curriculum and learning modules and the use of LMS as online learning media.

Meanwhile, HR management policies within the Company continue to refer to the guidelines for applicable laws in Indonesia, the Internal basic rules of the Company and several other references as a basis that has been adjusted to the required dimensions of HR management.

In addition to functioning as a legal-formal basis, compliance with regulatory provisions in the field of HR is carried out in order to establish a basic reference for HR management strategies both in the context of the company's work plan and strategic initiatives needed during the course of business activities.

The basis of HR management policies that apply in the Company include: HR Management with reference to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

1. The main legal-formal reference in the formulation of HR management policies within the Company is by referring to the provisions contained in Law No. 13 of 2013 concerning Manpower. In setting the necessary policies, these regulations have regulated many necessary aspects such as:
 - a. Equality and fulfillment of Human Rights;
 - b. Manpower planning and information;
 - c. Implementation of job training;
 - d. Workforce placement
 - e. Work relationship

- f. Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja;
 - g. Hubungan industrial; dan
 - h. Pemutusan hubungan kerja.
 2. Pengelolaan SDM Mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan. Dalam tahapan selanjutnya, dasar kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan perusahaan juga mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) yang muatannya telah merujuk pada undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan telah dilakukan pengembangan dan penyesuaian kembali dengan kondisi usaha di lingkungan perusahaan. Adapun aspek yang terkandung dalam AD/ART terkait pengelolaan SDM meliputi:
 - a. Kegotongrovan perusahaan termasuk penetapan Gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat umum pemegang Saham.
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian pekerja perusahaan.
 3. Pengelolaan SDM mengacu pada rencana kerja perusahaan. Guna mensinergikan arah pengembangan usaha Perusahaan dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan. Melalui Direktorat SDM, Perusahaan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan dengan rencana kerja perusahaan yang ditetapkan. Penyesuaian terhadap Rencana kerja perusahaan diperlukan agar pilar SDM dapat dimaksimalkan untuk mendukung secara penuh atas rencana yang ditetapkan. Penyesuaian kebijakan SDM yang dilakukan perusahaan terkait Rencana kerja perusahaan yang tertuang dalam:
 - a. Rencana jangka panjang perusahaan
 - b. Rencana kerja dan anggaran Perusahaan 2021
 - c. Road Map pengembangan SDM Departemen SDM
 4. Pengelolaan SDM mengacu pada referensi lainnya. Selain melakukan pemenuhan dasar kebijakan utama dalam melakukan pengelolaan SDM di lingkungan perusahaan, perusahaan juga mengadopsi beberapa strategi pengelolaan SDM berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak eksternal, baik yang bersifat umum maupun kajian yang dikhususkan kepada perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDM di lingkungan perusahaan menjadi lebih tepat dan sesuai pada kebutuhan. Selain itu, pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan juga semakin dekat dengan fenomena-fenomena pengelolaan SDM yang terjadi dewasa ini.
- f. Protection, remuneration and welfare of workers;
 - g. Industrial relationship
 - h. Work Termination
 2. HR Management Refers to the Company's Articles of Association and Bylaws. In the next stage, the basic policy of HR management within the company also refers to the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) whose contents have referred to Law No. 13 of 2003 and has been developed and readjusted to the business conditions in the company environment. The aspects contained in the AD/ART related to HR management include:
 - a. Corporate staffing, including determination of salary, pension or old-age insurance and other income for workers which exceed the obligations stipulated by law, must obtain prior approval from the general meeting of shareholders.
 - b. Appointment and dismissal of company employees.
 3. HR management refers to the company's work plan. In order to synergize the direction of the Company's business development with the policies and strategies of HR management within the Company. Through the HR Directorate, the Company makes the necessary adjustments to the company's work plan. Adjustments to the company's work plan are needed to allow the HR pillar to be maximized to fully support the established plan. Adjustments to HR policy are made by the company in relation to the company's work plan as stated in the
 - a. Company long term plan
 - b. Company work plan and budget for 2021
 - c. HC Department HR Development Road Map
 4. HR management refers to other references. In addition to fulfilling the basic basic policies in managing HR within the company, the company also adopts several HR management strategies based on studies conducted by external parties, both general in nature and studies specific to the company. This is done to increase precision of decisions related to HR management within the company and to meet needs. In addition, HR management in the Company's environment also gains insight of HR management phenomena that occur today.

Struktur Organisasi Pengelola Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM Perusahaan dilakukan oleh Departemen SDM yang bertanggung jawab secara penuh kepada Direktur produksi dan SDM. Departemen SDM perusahaan membawahi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Operasional SDM, Bagian Perencanaan SDM dan Bagian Pengembangan SDM.

Organizational Structure of Human Resources Management

The Company's HR management is carried out by the HC Department which fully reports to the Director of Production and HR. The company's HC department is in charge of 3 (three) sections, namely the HR Operations Section, the HR Planning Section and the HR Development Section.

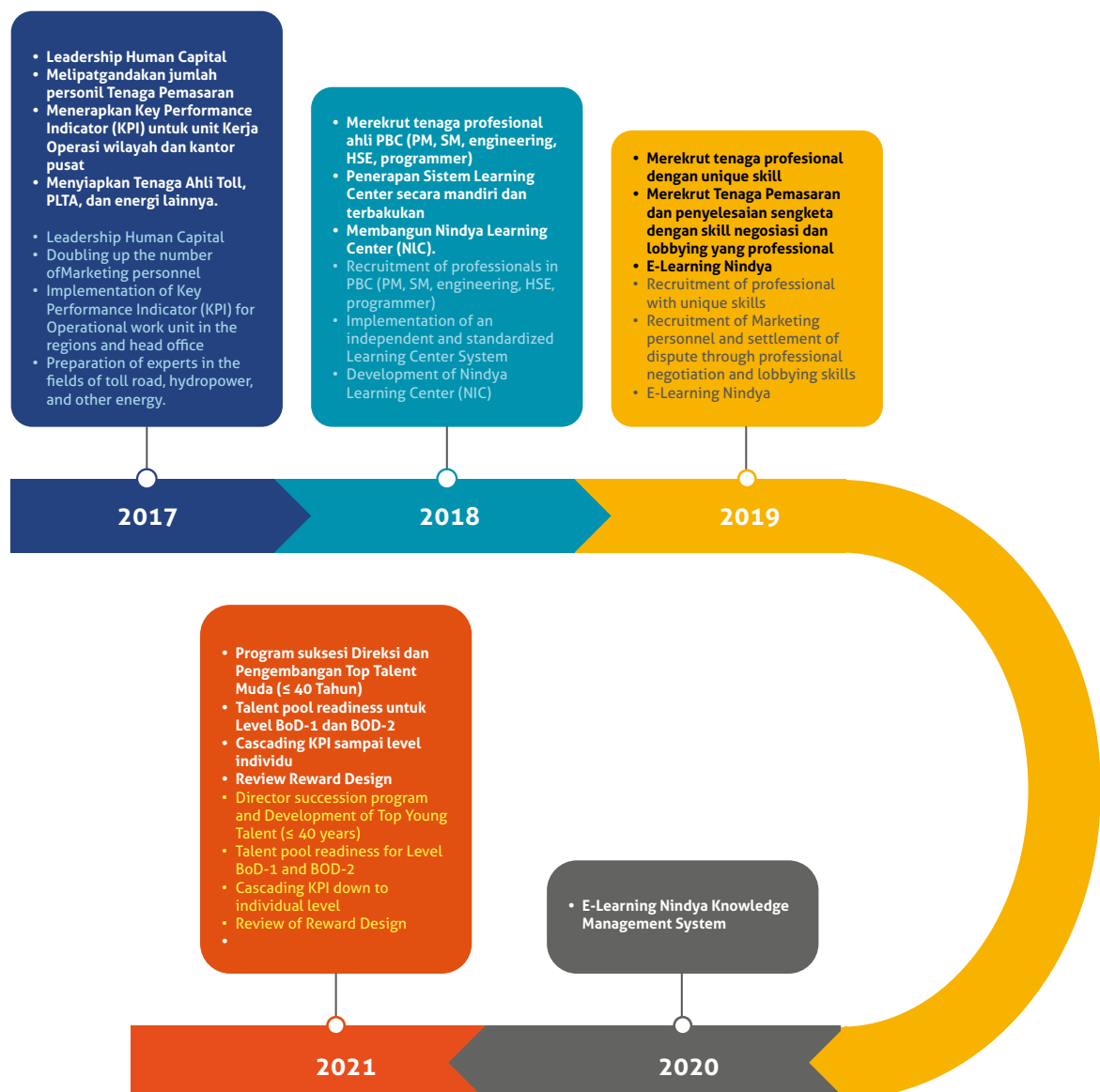


Road Map Pengembangan SDM

Sebagai langkah strategis, Perusahaan telah menyusun Road Map atas rencana pengembangan SDM yang telah disinergikan dengan rencana pengembangan Perusahaan secara menyeluruh di masa depan. Road Map ini memuat sasaran-sasaran program yang terdiri dari penyiapan infrastruktur maupun soft structure yang dibutuhkan. Uraian atas road map pengembangan SDM Perusahaan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

HR Development Road Map

As a strategic step, the Company has prepared a Road Map of HR development plans that have been synergized with the Company's overall development plan in the future. This Road Map contains program objectives which consist of preparing the required infrastructure and soft structures. The description of the Company's HR development roadmap is described in the table below.



Target, Rencana, Program Kerja 2021

Sebagai jawaban dalam mendukung kebutuhan SDM pada setiap Group Business yang ada dalam struktur organisasi Nindya Karya, Departemen SDM Perusahaan telah menyusun target, rencana, dan program kerja di tahun 2021 ini. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas setiap individu karyawan Perusahaan yang nantinya akan dapat menunjang kinerja organisasi, pembangunan kompetensi, dan regenerasi tenaga kerja untuk menunjang keberlanjutan usaha.

Pada tahun 2021, Departemen SDM memiliki beberapa target terkait pengelolaan dan pengembangan SDM. Berikut disampaikan sejumlah target dan realisasi yang telah dilakukan oleh Departemen SDM di tahun 2021:

Uraian Description	Target 2021 2021 Targets	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Jumlah Karyawan Number of Employees	820	720	88%
Jumlah Pelatihan Number of Training	100	140	140%
Program Sertifikasi Certification Program	100	89	89%

Perencanaan Human Capital berperan aktif dalam upaya perubahan terencana Perusahaan dan selalu berusaha meningkatkan efektivitas Human Capital Nindya Karya. Upaya yang telah direalisasikan pada tahun 2021, antara lain:

1. Memastikan proses rekrutmen yang berkualitas dengan menyiapkan kualifikasi/standar yang sesuai
2. Membuat kebijakan sistem penilaian kinerja yang Berbasis KPI sesuai Surat Keputusan Direksi PTNindya Karya (Persero) No. 0042/DIRUT/KPTS/DHC/04/2021 yang didalamnya juga mengatur implikasi penerapan sistem manajemen kinerja terhadap kenaikan remunerasi dan review atas persongrade (keangkatan) karyawan.
3. Mengevaluasi Pemangkatan Jabatan sesuai struktur organisasi Tahun 2021 melalui Surat Keputusan No.0012/DIRUT/KPTS/DHC/02/2021 tentang Penetapan Job Grade di Lingkungan PT Nindya Karya (Persero).
4. Menyusun pedoman penetapan struktur dan besaran nilai penghasilan Direksi & Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta Pedoman Penetapan Besaran Nilai Penghasilan Karyawan Tetap PT Nindya Karya (Persero) yang ditugaskan pada Anak Perusahaan.
5. Menetapkan klasifikasi proyek dan project manager PT Nindya Karya (Persero) melalui Surat Keputusan Direksi No. 0014/DIRUT/KPTS/DHC/02/2021.
6. Menyusun kebijakan reward management sebagai upaya memperbaiki struktur dan besaran penghasilan Karyawan Tetap PT Nindya Karya (Persero) melalui Surat Keputusan Direksi No. 0015/DIRUT/KPTS/DHC/02/2021.

Targets, Plans, Work Programs for 2021

In response to supporting the HR needs of each Business Group within the organizational structure of Nindya Karya, the Corporate HC Department has prepared targets, plans, and work programs for 2021. This is done to improve the capability of each individual employee of the Company which will later support organizational performance, competency development, and workforce regeneration to bolster business sustainability.

In 2021, the HC Department has several targets related to HR management and development. The following are a number of targets and realizations that have been carried out by the HC Department in 2021:

The achievements of the HC Department in 2021 as described in the previous table is in separable from a number of work programs that have been implemented. The work programs are as follows:

1. Ensure a quality recruitment process by preparing appropriate qualifications/standards
2. Make a performance appraisal system policy based on KPI in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0042/DIRUT/KPTS/DHC/04/2021 which also regulates the implications of implementing a performance management system on increasing remuneration and reviewing employee persongrades.
3. Evaluating Position Appointments in accordance with the 2021 organizational structure through Decree No. 0012/DIRUT/KPTS/DHC/02/2021 regarding Job Grade Determination in PT Nindya Karya (Persero).
4. Prepare guidelines for determining the structure and amount of income for the Directors & Board of Commissioners of Subsidiaries as well as Guidelines for Determining the Amount of Income for Permanent Employees of PT Nindya Karya (Persero) assigned to Subsidiaries.
5. Determine the project classification and project manager of PT Nindya Karya (Persero) through the Decree of the Board of Directors No. 0014/DIRUT/KPTS/DHC/02/2021.
6. Develop a reward management policy as an effort to improve the structure and amount of income for Permanent Employees of PT Nindya Karya (Persero) through the Decree of the Board of Directors No. 0015/DIRUT/KPTS/DHC/02/2021.

7. Mendukung transformasi digital PT Nindya Karya dengan menyusun roadmap transformasi Human, menyusun Tim Transformasi Digital dan Tim INDI 4.0 sesuai surat keputusan Direksi No. 0085/DIRUT/KPTS/DHC-1/01/2021 dan No. 0079/DIRUT/KPTS/DHC/10/2021. 8. Menyusun Komite Talenta & Karir PT Nindya Karya (Persero) sebagai tim penilai dan penetapan Talent surat keputusan Direksi No. 0083/DIRUT/KPTS/DHC/11/2021. 9. Melakukan proses identifikasi dan penetapan talent di level BOD-1 dan BOD-2 serta mengirimkannya ke Holding Danareksa-PPA sebagai pengisi talent pool di holding Danareksa-PPA.	7. Support PT Nindya Karya's digital transformation by compiling a Human transformation roadmap, compiling the Digital Transformation Team and the INDI 4.0 Team according to the Directors' Decree No. 0085/DIRUT/KPTS/DHC-1/01/2021 and No. 0079/DIRUT/KPTS/DHC/10/2021. 8. Prepare the Talent & Career Committee of PT Nindya Karya (Persero) as a team for assessing and determining Talent, Decree of the Board of Directors No. 0083/DIRUT/KPTS/DHC/11/2021. 9. Carry out the process of identifying and determining talent at the BOD-1 and BOD-2 levels and sending them to Holding Danareksa-PPA as a filler for the talent pool in holding Danareksa-PPA.

Rekrutmen dan Perputaran Karyawan

Melalui program rekrutmen yang baik, Perusahaan dapat memperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi kompetensi maupun karakter guna semakin meningkatkan Bisnis dari Nindya Karya. Selama proses rekrutmen ini peran Departemen SDM sangat besar untuk dapat menyeleksi bibit unggul yang berkarater sesuai dengan kebutuhan dari Perusahaan.

Salah satu fase terpenting dalam memastikan kuantitas dan kualitas SDM adalah fase rekrutmen. Melalui proses rekrutmen yang transparan dan profesional, Perusahaan dapat menjangking kandidat-kandidat terbaik untuk mendukung pencapaian target di tahun berjalan.

Proses rekrutmen yang telah dilakukan Perusahaan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Open Recruitment/Open Hiring**
Rekrutmen dilakukan melalui media elektronik seperti aplikasi pihak ketiga ataupun situs web resmi Perusahaan di www.nindyakarya.co.id atau media sosial. Cara ini dianggap paling efektif untuk menyebarkan informasi lowongan dan mendapatkan banyak pelamar kerja.
2. **Seleksi Administrasi**
Proses penyaringan awal dari sisi kelengkapan data untuk mengetahui latar belakang para pelamar kerja.
Tes Kesehatan (Fisik dan Jiwa)
Pemeriksaan kesehatan, yang dilakukan dengan pihak ketiga. Selama masa pandemi, pemeriksaan kesehatan diperketat dengan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap COVID-19 sesuai dengan standar kesehatan World Health Organization (WHO).
3. **Tes Psikotes (Assessment Test)**
Evaluasi kognitif sesuai standar yang berlaku di industri untuk mengetahui kapabilitas masing-masing pelamar. Selama pandemi, tes dilakukan dengan menggunakan metode daring (online), jika memungkinkan, atau dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat jika harus dilakukan di dalam ruangan.

Recruitment and Employee Turnover

Through a proper recruitment program, the Company can obtain human resources according to its needs, both in terms of competence and character in order to further improve the business of Nindya Karya. During this recruitment process, the HC Department plays a large role in selecting superior seeds with character who match the needs of the Company.

One of the most important phases in ensuring the quantity and quality of human resources is the recruitment phase. Through a transparent and professional recruitment process, the Company is able to recruit the best candidates to support the achievement of targets in the current year.

The recruitment processes that have been carried out by the Company in 2021 are as follows:

1. **Open Recruitment/Open Hiring**
Recruitment is carried out through electronic media such as third party applications or the Company's official website at www.nindyakarya.co.id or social media. This method is considered the most effective way to disseminate information on vacancies and attract large numbers of job applicants.
2. **Administrative Selection**
Initial screening process in terms of data completeness to find out the background of job applicants.
Health Test (Physical and Mental)
Health examinations, carried out with third parties. During the pandemic, health examinations are tightened by carrying out additional checks for COVID-19 in accordance with the health standards of the World Health Organization (WHO).
3. **Psychological Assessment**
Cognitive evaluation according to industry standards to determine the capabilities of each applicant. During the pandemic, tests are carried out using online methods, if possible, or carried out under strict health protocols if they must be carried out indoors.

4. Wawancara (Interview)

Proses wawancara yang melibatkan Divisi SDM dan Group Business untuk mengenal kandidat lebih dekat. Selama pandemi, wawancara dilakukan dengan menggunakan metode daring (online), jika memungkinkan, atau dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat jika harus dilakukan secara tatap muka.

5. Masa Percobaan

Kandidat yang terpilih akan melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkan sebagai karyawan tetap (organik). Sesuai dengan penempatannya, calon karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah (work from home/WFH), sesuai dengan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)/Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), atau di kantor, jika memang diperlukan. Setiap calon karyawan telah melewati tes kesehatan yang mencakup fisik, jiwa, dan juga pemeriksaan tambahan terhadap Covid-19.

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Nindya Karya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan secara terbuka dan transparan. Nindya Karya berkomitmen untuk memberikan kesempatan bagi setiap putra-putri terbaik bangsa, tanpa membedakan ras, suku, jenis kelamin agama dan golongan, untuk turut serta berpartisipasi membangun bangsa melalui hasil-hasil peternakan yang bermutu tinggi untuk generasi masa depan bangsa. Pada tahun 2021, Departemen HC melakukan perekrutan sebanyak 44 karyawan baru sebagaimana tabel berikut ini:

Jenis Rekrutmen Type of Recruitment	2021 (orang/People)
Lulusan Baru Fresh Graduate	12
Tingkat Berpengalaman Experienced level	32
Jumlah Total	44

Tingkat Perputaran Karyawan

Sama halnya seperti perusahaan yang bergerak di bidang usaha lainnya, bidang usaha Jasa Konstruksi yang dijalankan oleh Nindya Karya juga mengalami turnover karyawan. Di tahun 2021 ini tingkat turnover karyawan rata-rata sebesar 14,86 %. Sedangkan tingkat turnover karyawan yang keluar dari Nindya Karya lebih disebabkan karena mengundurkan diri dengan adanya keinginan pribadi dan berakhirnya masa percobaan sebanyak 103 orang. Bila dibandingkan dengan tingkat turnover tahun 2020 lalu yang sebesar 58,65%, tingkat turnover karyawan di 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 14,86%.

4. Interview

Interview process involving the HR Division and the Business Group to know the candidate more closely. During the pandemic, interviews were conducted using online methods, if possible, or conducted under strict health protocols if they had to be conducted face-to-face.

5. Probation Period

The selected candidate will go through a probationary period of 3 (three) months before being appointed as a permanent employee (organic). Depending on their placement, prospective employees can do work from home (WFH), in accordance with the provisions of Large-Scale Social Restrictions (PSBB)/Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM), or in the office, if necessary. Each prospective employee has passed a medical test that includes physical, mental, and also additional tests for Covid-19.

The recruitment process carried out by Nindya Karya is in accordance with applicable laws and regulations, and is carried out openly and transparently. Nindya Karya is committed to providing opportunities for the nation's best people, regardless of race, ethnicity, gender, religion and class, to participate in building the nation through high-quality animal husbandry products for the nation's future generations. In 2021, the HC Department recruited 44 new employees as shown in the following table:

Employee Turnover Rate

Just like companies engaged in other business fields, the Construction Services business sector run by Nindya Karya also experienced employee turnover. In 2021, the average employee turnover rate is 14.86%. Meanwhile, the turnover rate of employees who left Nindya Karya was largely due to resigning for personal desire while 103 people had reached the end of their probationary period. When compared to the turnover rate in 2020 which was 58.65%, the employee turnover rate in 2021 has decreased to 14.86%.

Departemen HC selaku organ yang diberi tanggung jawab oleh Perusahaan dalam mengelola Sumber Daya Manusia, pada 2020 telah Mengkoordinasi pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Pada periode tahun 2021, terdapat penambahan/pengurangan karyawan sebagai berikut:

The HC Department as the department mandated by the Company to manage Human Resources, in 2020 has coordinated the recruitment and selection of new employees. In the period of 2021, there were additional/removal of employees as follows:

Uraian Description	PT Nindya Karya (Persero)	PT Nindya Beton (Entitas Anak Subsidiary)	PT Nindya Tirta Unggul (Entitas Anak/Subsidiary)	Konsolidasian Consolidated
Jumlah Karyawan Awal Tahun 2021 Number of employee at the beginning of 2021	620	46	0	666
Karyawan Baru New Employees	146	4	7	157
Karyawan yang Berakhir Hubungan Kerjanya/Mengundurkan Diri/Memasuki Masa Pensiun Employees who underwent Employment Termination/Resignation/Entering Retirement Period	99	4	0	103
Total Karyawan Akhir Tahun 2021 Total Employee at the end of 2021	667	46	7	720
Tingkat Perputaran Karyawan Employee Turnover Rate	15,38%	8,70%	0,00%	14,86%

Perputaran karyawan (*turnover*) umum terjadi sebagai dampak dari adanya masa pensiun kerja dan pengunduran diri. Perusahaan terus berupaya menjaga agar komposisi karyawan tetap proporsional sesuai pada kebutuhannya melalui proses rekrutmen dan pengawasan performa kerja.

Employee turnover is commonly the result of retirement and resignation. The Company continues to strive to keep the composition of employees proportional according to their needs through the recruitment process and monitoring of work performance.

Pengelolaan Karier

Dalam rangka pengelolaan karier, Perusahaan memiliki Program Promosi dan Jabatan berupa promosi, rotasi dan mutasi yang dilakukan bertujuan untuk membentuk karakter kerja yang dinamis bagi setiap karyawan.

Career Management

In the context of career management, the Company has a Promotion and Placement Program in the form of promotions, rotations and mutations aimed at forming a dynamic work character for each employee.

Adapun uraian atas tujuan dari masing-masing Program Promosi dan Jabatan adalah:

1. Promosi merupakan alih tugas karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi kelas jabatannya baik dalam satu lingkungan unit kerja/cabang, maupun antar unit kerja/cabang atau afiliasi perusahaan atau anak perusahaan.
2. Rotasi merupakan alih tugas karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai tanggung jawab dan beban tugas relatif sama/setara dan tidak berdampak pada perubahan kelas jabatan, baik dalam satu lingkungan unit kerja/cabang, maupun antar unit kerja/cabang atau afiliasi perusahaan atau anak perusahaan.
3. Demosi merupakan alih tugas karyawan dari satu posisi tugas ke posisi tugas lain yang mempunyai tanggung jawab dan beban tugas lebih rendah dan berdampak pada penurunan, kelas jabatan baik dalam satu lingkungan unit kerja/cabang, maupun antar unit kerja/cabang atau afiliasi perusahaan atau anak perusahaan.

The description of the objectives of each Promotion and Position Program are:

1. Promotion is the transfer of employee duties from one position to another at a higher class position, both within one work unit/branch, as well as between work units/branches or company affiliates or subsidiaries.
2. Rotation is the transfer of employee duties from one position to another that has relatively the same/equal responsibilities and workload and does not have an impact on changes in job class, both within one work unit/branch environment, as well as between work units/branches or company affiliations or subsidiary.
3. Demotion is the transfer of an employee's duties from one task position to another that has lower responsibility and task load and has an impact on the decline, class position both within one work unit/branch environment, as well as between work units/branches or company affiliates or subsidiaries. company.

Berikut adalah uraian mengenai jumlah promosi, rotasi dan demosi karyawan sepanjang 2021:

The following is a description of the number of promotions, rotations and demotions of employees throughout 2021:

Keterangan Description	Jumlah Total
Promosi Promotion	15
Rotasi dan Mutasi Rotation and Mutation	708
Demosi Demotion	1

Pengembangan untuk Peningkatan Kompetensi

Departemen SDM telah merancang program pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan SDM yang dibutuhkan. Program ini berlaku untuk semua posisi berdasarkan level organisasi. Kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan telah disiapkan untuk kebutuhan setiap Group Business pada tahun berjalan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan industry saat ini. Selain itu, terdapat beberapa program dasar yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya untuk tetap mempertahankan standar kualitas operasional Nindya Karya.

Program pelatihan dan pengembangan juga berlaku untuk setiap organ Perusahaan dalam struktur organisasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung kompetensi setiap anggota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mendukung Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Program pelatihan dan pengembangan untuk setiap organ dalam struktur tata kelola dapat dilihat di Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai salah satu penerapan prinsip tata kelola di Nindya Karya.

Development for Competency Improvement

The HC Department has designed a training program and continuous HR development to improve the required skills for HR. This program applies to all positions based on organizational level. Employee training and development activities have been prepared for the needs of each Business Group in the current year and developed in accordance with current industry developments. In addition, there are several basic programs that are routinely carried out every year to maintain Nindya Karya's operational quality standards.

The training and development program also applies to every organ of the Company in the organizational structure. This is to bolster the competence of each member in carrying out their duties and obligations to support Good Corporate Governance and ensure long term business continuity. The training and development program for each organ in the governance structure can be seen in the Good Corporate Governance Chapter as one of the implementations of governance principles at Nindya Karya.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 Implementation of Education and Training in 2021

No	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta Number of participants
1	Pelatihan Upskilling Competencies Training Program NBO NBO Upskilling Competencies Training Program	NBO	30/12/20-24/03/21	20 Orang 20 People
2	Pelatihan BIM ISO 19650: 2018 (Plus Awareness BIM ISO 19650:2018) BIM ISO 195050 Training: 2018 (Plus Awareness BIM ISO 1965:2018)	BSI	27/01/21-16/02/21	200 Orang 200 People
3	Workshop IT Maturity Assessment IT Maturity Assessment Workshop	Aquine Consulting Services	26/01/21-26/01/21	18 Orang 18 People
4	BIM Modeling and Workflow Using Autodesk Revit 2021 BIM Modeling and Workflow Using Autodesk Revit 2021	Prioritech	20/03/21-20/03/21	10 Orang 10 People
5	Pelatihan BPJS Kesehatan (For SDM Divisi) BPJS Kesehatan Training (For Division HR)	NLC	03/03/21-03/03/21	7 Orang 7 People
6	Pelatihan Scheduler (Batch 1 & 2) Scheduler Training (Batch 1 & 2)	NLC	08/03/21-18/03/21	24 Orang 24 People
7	Pelatihan To Be Office Engineer To Be Office Engineer Training	NLC	22/04/21-07/05/21	27 Orang 27 People
8	Pelatihan BPJS Ketenagakerjaan (For SDM Divisi) BPJS Ketenagakerjaan Training (For Division HR)	NLC	15/04/21-15/04/21	7 Orang 7 People
9	Pelatihan To Be Site Engineering Manager To Be Site Engineering Manager Training	NLC	14/06/21-23/07/21	61 Orang 61 People
10	Training Of Trainer-Speak To Change	Akademi Trainer	18/08/21-26/08/21	20 Orang 20 People

No	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta Number of participants
11	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara	23/08/21-28/08/21	25 Orang 25 People
12	Pelatihan Skill Up Auditor Auditor Skill Up Training	Intersys	30/08/21-01/09/21	35 Orang 35 People
13	English For Conversation	LIA	16/09/21-06/01/22	30 Orang 30 People
14	Pelatihan Awareness & Internal Auditor ISO 27001: 2013 ISO 27001: 2013 Awareness & Internal Auditor Training	Intersys	29/09/21-01/10/21	26 Orang 26 People
15	Pelatihan To be Project Manager berbasis Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Edisi 6 To be Project Manager training based on Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Edition 6	NLC	06/12/21-10/03/22	22 Orang 22 People

Biaya Pengembangan Karyawan

Setiap tahunnya Perusahaan mengalokasikan anggaran pengembangan SDM di dalam RKAP. Pengalokasian anggaran pelatihan dan pengembangan SDM ditetapkan dengan mengacu pada rencana pelatihan yang telah disusun oleh Departemen HC atas masukan dari departemen-departemen yang terkait.

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah merealisasikan anggaran pelatihan dan pengembangan SDM sebesar Rp2,204 miliar dengan jumlah kepesertaan karyawan atas program pelatihan dan pengembangan SDM mencapai 3.669 orang. Tabel di bawah ini memberikan gambaran perbandingan jumlah kepesertaan dan biaya pelatihan dan pengembangan SDM Perusahaan.

Employee Development Cost

Every year the Company allocates HR development budget in the RKAP. The allocation of the training and HR development budget is determined by referring to the training plan that has been prepared by the HC Department with input from the relevant departments.

Throughout 2021, the Company has realized a training and HR development budget of Rp2,204 billion with the number of employee participation in the HR training and development program reaching 3,669 people. The table below provides an overview of the comparison of the number of participants and the costs of training and development of the Company's HR.

Keterangan Description	RKAP 2021	Realisasi 2021 2021 Realization	Realisasi 2020 2020 Realization	Pencapaian 2021 terhadap Target 2021 Target Achievement
Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (People)	2.186	3.703	3.866	168%
Biaya Pengembangan Karyawan (Rp Juta) Employee Development Cost (Rp Millions)	5.419	2.283	1.917	42%

Penilaian Kinerja

Nindya Karya memiliki target perusahaan, yang kemudian diturunkan menjadi target dari setiap individu untuk setiap karyawan dalam Group Business. Kemudian target itu disebut dengan Key Performance Indicator (KPI) akan senantiasa ditinjau dan dirumuskan di setiap tahunnya sesuai dengan rencana bisnis perusahaan untuk memastikan tercapainya visi Nindya Karya.

Mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan Nindya Karya juga menjadi salah satu upaya untuk menentukan tingkat remunerasi setiap karyawan. Nilai Kinerja akan mempengaruhi Tunjangan Produktifitas Karyawan Tetap. Tunjangan ini bersifat variable, berdasarkan kehadiran dan Berlaku untuk job grade ≤ 16 (kinerja jabatan grade >16 tidak linear dengan kehadiran)

Performance Assessment

Nindya Karya has a company target, which is then distilled to be the target of each individual for each employee in the Group Business. Then the target is called the Key Performance Indicator (KPI) which will always be reviewed and formulated every year in accordance with the company's business plan to ensure the achievement of Nindya Karya's vision.

The performance appraisal mechanism carried out by Nindya Karya is also an effort to determine the level of remuneration for each employee. Performance Value will affect the Permanent Employee Productivity Allowance. This allowance is variable, based on attendance and applies to job grades 16 (job performance grade >16 is not linear with attendance)

Formula:

$$\frac{(\text{Kehadiran/hari kerja per bun}) \times \text{Tarif Tunjangan Produktifitas}}{(\text{Attendance/working days per month}) \times \text{Productivity Allowance Rate}}$$

Selain tunjangan produktifikasi, nilai kinerja juga menentukan kenaikan gaji pokok. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji pokok dengan mempertimbangkan:

1. Kemampuan Perusahaan.
2. Kinerja Individu.
3. Compa-rasio terhadap Rentang gaji di person grade saat ini.

Kebijakan Remunerasi

Sebagai bagian dari pemenuhan hak pegawai, Perusahaan melalui Departemen SDM memiliki peran dalam melakukan pengelolaan terhadap mekanisme remunerasi karyawan. Pengelolaan remunerasi Perusahaan senantiasa berpedoman pada strategi yang ditetapkan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti pemenuhan regulasi minimum penggajian di tingkat daerah dan nasional, besaran yang kompetitif di industri konstruksi serta pemenuhan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja.

Pada dasarnya sistem remunerasi yang diadopsi Perusahaan menggunakan prinsip pay for performance. Sistem ini memungkinkan Perusahaan untuk memberikan remunerasi bagi pegawai secara kompetitif dibandingkan dengan standar hidup layak dan standar market price yang berlaku di industri konstruksi. Perusahaan terus mengembangkan dan melakukan perbaikan terhadap sistem remunerasi guna mencapai hasil maksimal yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan. Remunerasi setiap tahunnya akan dievaluasi guna penyesuaian dengan keadaan pasar dan ekonomi perusahaan.

Berikut disampaikan struktur remunerasi serta komponen lainnya yang diterima oleh karyawan. Struktur remunerasi yang diterima karyawan dapat berbeda-beda sesuai dengan level jabatan dan status kepegawaianya.

Struktur Remunerasi Karyawan Employee Remuneration Structure

Komponen Component	Pegawai Tetap Permanent Employee	Pegawai Kontrak Temporary Employee
Gaji Pokok Basic Salary	V	v
Tunjangan Allowance	V	v
Insentif Kinerja Performance Incentive	X	x
Bonus Bonus	V	v
Asuransi Kesehatan Health Insurance	V	X
BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan	V	v
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	V	v
Lainnya (Tunjangan Suplemen) Others (Supplementary Allowance)	X	x

V: menerima X: tidak menerima
V: accepted X: not accepted

In addition to the productivity allowance, the performance value also determines the increase in basic salary. Employees who have good performance are entitled to an increase in basic salary by considering:

1. Company Capabilities.
2. Individual Performance.
3. Compa-Ratio with the current person grade's salary range.

Remuneration Policy

As part of fulfilling employee rights, the Company through the HC Department has a role in managing the employee remuneration mechanism. The management of the Company's remuneration is always guided by the strategy set by taking into account several aspects such as compliance with minimum wage regulations at the regional and national levels, competitive rates in the construction industry and compliance with Collective Labor Agreements (PKB) between the Company and the Labor Union.

Basically, the remuneration system adopted by the Company uses the principle of pay for performance. This system allows the Company to provide remuneration for employees competitively compared to a decent standard of living and standard market prices prevailing in the construction industry. The company continues to develop and make improvements to the remuneration system in order to achieve maximum results that are able to provide satisfaction to customers on an ongoing basis. Annual remuneration will be evaluated in order to adjust to market conditions and the company's economy.

The following describes the remuneration structure and other components received by employees. The remuneration structure received by employees may vary according to their level of position and employment status.

Budaya Kerja

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE 7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 untuk semua BUMN, maka Nindya Karya WAJIB menerapkan Nilai-Nilai Utama AKHLAK menjadi Budaya Perusahaan. Penerapan Budaya AKHLAK di Perusahaan selanjutnya akan dilakukan melalui beberapa tahapan sosialisasi, internalisasi, implementasi dan monitoring/evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut akan dikawal pelaksanaannya oleh Penggerak Budaya Perusahaan yang terdiri dari: *Change Leaders* (Direksi), *Change Agents* (pejabat satu tingkat di bawah Direksi), *Change Management Team* (Tim Budaya Perusahaan), dan *Culture Champion* (pengelola aktivitas budaya di unit kerja). Semua insan Nindya Karya dituntut untuk berperan aktif dalam menerapkan budaya AKHLAK di Perusahaan. Sosialisasi juga dilaksanakan di masing-masing farm operasional Perusahaan.

Nilai-nilai AKHLAK akan diintegrasikan dengan sistem dan prosedur Nindya Karya, termasuk sistem Manajemen SDM. Nilai-nilai AKHLAK akan menjadi kriteria dalam sistem rekrutmen, menjadi nilai-nilai yang ditumbuhkembangkan melalui sistem pendidikan dan pelatihan, menjadi salah satu kriteria dalam penilaian kinerja, dan pengembangan karier. Hanya karyawan yang menerapkan AKHLAK yang dapat masuk dalam sistem talenta.

Core Values AKHLAK merupakan kristalisasi nilai-nilai BUMN, diyakini selaras dengan strategi bisnis Nindya Karya yang akan mendorong insan Nindya Karya untuk berkinerja dengan lebih baik. Keselarasan antara budaya kerja dengan strategi bisnis diyakini akan mampu mendorong bertumbuhnya bisnis guna mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

Fasilitas Kesehatan

Komitmen Perusahaan dalam menjaga seluruh karyawannya tidak hanya berada dalam kondisi sehat jasmani melainkan juga rohaninya, dengan demikian para karyawan dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan maksimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk terus menjaga kesehatan para karyawannya, Perusahaan telah menetapkan program pelayanan kesehatan seperti mengikutsertakan seluruh karyawan beserta keluarga tertanggung dalam Program Jaminan Kesehatan.

Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Perusahaan telah berjalan sejak tahun 2014 selain itu Perusahaan juga menyediakan fasilitas kesehatan lainnya dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Hingga akhir 2021, seluruh pegawai tetap Perusahaan yang berjumlah 347 orang beserta keluarganya telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.

Kebijakan Pensiun

Perusahaan telah mengimplementasikan Program Pensiun tersebut sejak tahun 2014 yang mana kebijakan pensiun di internal Nindya Karya telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja (SP) Nindya Karya yang mengacu kepada peraturan dan perundangan yang mengikat perusahaan secara umum.

Work Culture

In accordance with the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE 7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 for all SOEs, Nindya Karya MUST apply the Core Values of AKHLAK as a Corporate Culture. The implementation of AKHLAK Culture in the Company will then be carried out through several stages of socialization, internalization, implementation and monitoring/evaluation. The implementation of these stages will be stewarded by the Corporate Culture Driver, which consists of: Change Leaders (Directors), Change Agents (officials one level below the Board of Directors), Change Management Team (Corporate Culture Team), and Culture Champion (managers of cultural activities in the unit). work). All Nindya Karya people are required to play an active role in implementing the AKHLAK culture in the Company. Socialization was also carried out in each of the Company's operational farms.

AKHLAK values will be integrated with Nindya Karya's systems and procedures, including the HR Management system. AKHLAK values will become criteria in the recruitment system, become values that are fostered through the education and training system, become one of the criteria in performance appraisal, and career development. Only employees who apply AKHLAK can enter the talent system.

AKHLAK Core Values is a crystallization of BUMN values, believed to be in line with Nindya Karya's business strategy which will encourage Nindya Karya's people to perform better. Alignment between work culture and business strategy is believed to be able to encourage business growth in order to realize the Company's Vision and Mission.

Healthcare Facility

The Company's commitment in maintaining all of its employees is not only for healthy physical condition but also spiritually, so employees may carry out their duties and tasks to the maximum and achieve the targets that have been set. To continue maintaining the wellness of its employees, the Company has established a health service program such as involving all employees and their families in the Health Insurance Program.

The implementation of BPJS Kesehatan in the Company has been running since 2014, in addition the Company also provides other health facilities in collaboration with third parties. Until the end of 2021, all 347 permanent employees of the Company have been registered in the BPJS Kesehatan program.

Retirement Policy

The company has implemented a Pension Program since 2014 in which the internal retirement policy of Nindya Karya has been determined in accordance with the Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and the Nindya Karya Workers Union (SP) which refers to the rules and regulations that bind the company in general.

Perusahaan juga mengimplementasikan kebijakan jaminan pensiun sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan sejak diberlakukannya peraturan tersebut pada tahun 2011. Per 31 Desember 2021, seluruh pegawai tetap Perusahaan berjumlah 347 orang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

The company also implements a pension insurance policy in accordance with the laws and regulations regarding the National Social Security System (SJSN) through BPJS Ketenagakerjaan. The implementation of BPJS Ketenagakerjaan has been running since the enactment of the regulation in 2011. As of December 31, 2021, all 347 permanent employees of the Company have been registered in the BPJS Ketenagakerjaan program.

Jumlah Karyawan Pensiun di Tahun 2019-2021
Number of Retired Employees in 2019-2021

Uraian Description	2021	2020	2019
Karyawan Pensiun Retired Employees	5	4	16

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan memandang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebagai aspek penting yang memiliki peran pada kegiatan operasional. Tingkat kesehatan dan keselamatan pekerja juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan produktivitas pekerja, serta pengembangan bisnis. Penjelasan lebih rinci mengenai K3 terdapat pada bab tanggung jawab sosial perusahaan.

Occupational Health and Safety

The company views occupational health and safety (K3) as an important aspect that has a role in operational activities. The level of health and safety of workers also has a significant impact on the performance and productivity of workers, as well as business development. A more detailed explanation of K3 can be found in the chapter on corporate social responsibility.

Hubungan Industrial

Perusahaan senantiasa menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan para karyawan Nindya Karya, hal ini juga sebagai bentuk implementasi kepatuhan Nindya Karya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan ini dilandasi pada asas saling menghormati untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Perusahaan juga telah merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bersama dengan Serikat Pekerja PT Nindya Karya (Persero) untuk menjamin adanya kepastian antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan juga memberikan kebebasan bagi para karyawan untuk membentuk serikat pekerja. Serikat Pekerja tingkat pusat berkedudukan di Kantor pusat Jl. Letjend. MT Haryono, Kav. 22, Cawang, Jakarta 13630.

Industrial Relations

The company continues to maintain harmonious industrial relations with Nindya Karya employees, this is also a form of implementation of Nindya Karya's compliance with applicable laws and regulations. This relationship is based on the principle of mutual respect to create a balance between the fulfillment of rights and the implementation of obligations. The company has also negotiated a Collective Labor Agreement (PKB) with the PT Nindya Karya (Persero) Labor Union to ensure certainty between the rights and obligations of each party. The company also provides freedom for employees to form trade unions. The workers' union at the central level is domiciled at the head office, Jl. Lt. Gen. MT Haryono, Kav. 22, Cawang, Jakarta 13630.

Rencana Pengembangan SDM ke depannya

Program kerja Departemen SDM tahun 2022 ditetapkan dengan berdasarkan arah dan strategi Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Rencana pengelolaan SDM tahun 2022 meliputi:

1. Pembangunan e-Recruitment
2. Penyusunan Career Path dengan acceleration development track
3. Upskilling karyawan terkait global insight, Kerjasama dengan DLI dan I2LI
4. Penyusunan Program Internalisasi Budaya dan Coaching Program
5. Optimalisasi Performance Management System Berbasis KPI Individu

Future HR Development Plan

The HC Department's 2022 work program is determined based on the Company's direction and strategy as outlined in the Company's Long Term Plan. The HR management plan for 2022 includes:

1. Development of e-Recruitment
2. Preparation of Career Path with development track acceleration
3. Upskilling employees in relation to global insight, Collaborating with DLI and I2LI
4. Development of the Cultural Internalization Program and Coaching Program
5. Optimization of the Performance Management System Based on Individual KPIs

Pengembangan Teknologi Informasi

Information Technology Development

Transformasi Digital masih tetap menjadi perbincangan yang hangat di Tahun 2021. Jika kita berkaca pada pelaksanaan transformasi di Perusahaan ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam proses implementasinya. Poin pertama terkait kesisteman, tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah penerapan SOP secara menyeluruh dan memastikan bahwa aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Poin kedua terkait teknologi, hal yang masih menjadi tantangan dari sisi teknologi adalah utilisasi pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, user experience journey dan integrasi antara core dan supporting apps. Poin ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tantangan dari sisi People & Culture, dimana perusahaan harus memastikan bahwa digital mindset & behavior telah secara merata dimiliki oleh karyawan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Departemen STI dalam mengoptimalkan transformasi digital adalah dengan memastikan tercapainya target business value dari transformasi digital. Selama tahun 2021, bidang Teknologi Informasi fokus terhadap akselerasi pencapaian strategi inisiatif sebagai berikut:

Digital Transformation is still a hot topic of discussion in 2021. If we look at the implementation of transformation in the Company, there are several challenges in the implementation process. The first point is related to the system, the biggest challenge faced by the company is the overall implementation of SOPs and ensuring that the applications built are in accordance with the applicable SOPs. The second point is related to technology, the long standing challenge from the technology side is the utilization of applications that have been built, user experience journeys and integration between core and supporting apps. The third point that is no less important is the challenge from the People & Culture side, where the company must ensure that the digital mindset & behavior is evenly distributed among employees. One of the steps taken by the STI Department in optimizing digital transformation is to ensure the achievement of the business value target of digital transformation. In 2021, the Information Technology sector had focused on accelerating the achievement of the following initiative strategies:

Inisiatif Strategis 2021	2021 Strategic Initiatives
- Memastikan Value dari Layanan IT - IT Maturity Assesment (COBIT 2019) - Assesment INDI 4.0 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Value - Percepatan delivery solusi TI yang dibutuhkan dalam pencapaian target - Dashboard Fungsional & BOD - Pengembangan iNindya Web & Mobile - Smart Estimating Guide (SEG) - Eprocurement v2 - Performance Management System (PMS) - Peningkatan cybersecurity & infrastruktur I & T - Migrasi ke cloud untuk aplikasi core process (ERP, iNindya, BORN, dll) - Peningkatan awareness akan data dan cybersecurity - Persiapan Data Analytic dan Big Data - Pengumpulan bank data Smart Estimating Guide	- Ensuring the Value of IT Services - IT Maturity Assessment (COBIT 2019) - INDI 4.0 Assessment - Monitoring and Evaluation of Value Achievement - Accelerate delivery of IT solutions needed to achieve targets - Functional Dashboard & BOD - iNindya Web & Mobile Development - Smart Estimating Guide (SEG) - Procurement v2 - Performance Management System (PMS) - Improved cybersecurity & I&T infrastructure - Migration to cloud for core process applications (ERP, iNindya, BORN, etc.) - Increased awareness of data and cybersecurity - Preparation of Data Analytics and Big Data - Databank collection Smart Estimating Guide

Pencapaian Perkembangan TI 2021

Pada tahun 2021, TI telah mengalokasikan dana sebesar Rp9,75 miliar untuk Peningkatan Infrastruktur TI, *Security* TI, Pengembangan Aplikasi, Peningkatan Value Layanan TI, serta Penyediaan *Software Engineering*. Adapun rincian Highlight anggaran sebagai berikut :

2021 IT Development Achievements

In 2021, IT has budgeted Rp9.75 billion for IT Infrastructure Improvement, IT Security, Application Development, IT Service Value Improvement, and Software Engineering Provision. The details of the budget highlights are as follows:

Biaya Pengembangan Teknologi informasi Tahun 2021

Highlights of Information Technology Investment Costs in 2021

No.	Pengadaan Procurement	Biaya (Rp) Cost
1	Hyper-converged Infrastructure (HCI)	2,825,000,000
2	Internet Access Management (Hardware Upgrade)	470,600,000
3	Peningkatan Perangkat Access Point (Wifi) Access Point Device (Wifi) Upgrade	249,400,000
4	Software Engineering (ETABS)	152,000,000
5	PC/Laptop Kantor Pusat Head Office PC/Laptop	1,892,659,000
6	Pengembangan Aplikasi (iNindya, E-Procurement, SIMONIK) Application Development (iNindya, E-Procurement, SIMONIK)	707,000,000
7	IT Maturity Assesment COBIT 2019	298,000,000
8	INDI 4.0 Assesment	165,455,000
9	Maintenance Network & Subscription Lisence	465,000,000
10	Subscription Software BIM	489,569,000

Tata Kelola TI

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Nindya Karya memandang pengelolaan TI sebagai salah satu implementasi GCG untuk menjalankan operasional TI sebagai bagian integral dari GCG agar dapat menjamin pemanfaatan implementasi TI yang optimal, terukur, dan terarah. Oleh karena itu, guna meningkatkan performa tata kelola TI dan pemenuhan atas APS No. S-949/MBU/11/2020 yang dipertegas melalui Surat Edaran Menteri BUMN No. S-122/MBU/DSI/05/2021 bahwa setiap BUMN wajib melakukan penilaian tingkat kematangan TI dengan framework COBIT 5 atau yang lebih tinggi (COBIT 2019) dan nilai minimum 3.00, dalam hal ini Nindya Karya telah melakukan penilaian kematangan TI menggunakan framework COBIT 2019 dengan nilai akhir 3.33 (lebih tinggi 0.33 poin dari batas minimum yang dipersyaratkan).

Nindya Karya senantiasa memastikan para karyawan untuk dapat bertanggung jawab terhadap informasi korporasi yang dimilikinya dan menggunakannya hanya untuk kepentingan Perusahaan. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Nindya Karya telah melakukan audit dan sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 tanpa ada temuan major dan minor.

IT Governance

In order to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG), Nindya Karya considers IT management as one of the GCG implementations to carry out IT operations as an integral part of GCG in order to ensure optimal, measurable, and directed utilization of IT implementation. Therefore, in order to improve the performance of IT governance and the fulfillment of APS No. S-949/MBU/11/2020 which is confirmed through the Circular Letter of the Minister of SOEs No. S-122/MBU/DSI/05/2021 that every SOE is required to conduct an IT maturity level assessment with COBIT framework 5 or higher (COBIT 2019) with a minimum score of 3.00, in this case Nindya Karya has assessed IT maturity using the COBIT 2019 framework with a final score of 3.33 (0.33 points higher than the minimum required threshold).

Nindya Karya continues to ensure that employees are responsible for the corporate information they have and use it only for the benefit of the Company. Therefore, in 2021 Nindya Karya has audited and certified ISO/IEC 27001:2013 without any major or minor findings.

Rencana Pengembangan TI 2022

Pada tahun 2022, pengembangan teknologi informasi berfokus pada dengan digitalisasi, big data & data analytic, AI & ML, serta peningkatan kapabilitas infrastruktur & security. Fokus-fokus ini diturunkan dalam bentuk inisiatif strategis yang dapat dirangkum pada tabel di bawah ini.

2022 IT Development Plan

In 2022, information technology development will focus on digitalization, big data & data analytics, AI & ML, as well as improving infrastructure & security capabilities. These focuses are derived in the form of strategic initiatives which can be summarized in the table below.

“VISI RTI: Menjadi Enabler Pencapaian VISI MISI dan Rencana Strategis Perusahaan” “RTI VISION: Become an Enabler of Achievement of VISION, MISSION, and Company Strategic Plan”

Tabel Inisiatif Strategis Bidang Teknologi Informasi Tahun 2022
Table of Strategic Information Technology Initiatives in 2022

Corporate Strategic Goal (RJPP 2022-2026)	RTI Strategic Objective	RTI Strategic Initiatives
Mengedepankan kaidah excellence engineering sebagai basis pengembangan bisnis Nindya Karya ke depan Prioritizing excellence engineering principles as the basis for Nindya Karya's business development going forward	(SO.1) Penerapan Transformasi Digital (SO.1) Digital Transformation Implementation	(SI.1) Digitalisasi proses bisnis konstruksi (SI.2) Berkolaborasi dengan Dept. PSMR dan Dept. Estimating untuk Digitalisasi Area Konstruksi (Smart Site) (SI.3) Digitalisasi Kolaborasi Internal Perusahaan (SI.4) Optimalisasi Infrastruktur & Cybersecurity
Mampu mengenali peluang pasar secara lebih cepat dan akurat serta mampu menyusun cara memenangkan persaingan yang lebih efektif. (Proaktif) Able to identify market opportunities more quickly and accurately and be able to devise ways to win the competition more effectively. (Proactive)	(SO.2) Mendorong Smart, Lean, Innovative dan Agile Construction Company berbasis Data (SO.2) Encouraging Smart, Lean, Innovative and Agile Construction Company based on Data	(SI.1) Digitizing the construction business process (SI.2) Collaborating with Dept. PSMR and Dept. Estimating for Digitizing Construction Areas (Smart Sites) (SI.3) Digitizing the Company's Internal Collaboration (SI.4) Infrastructure & Cybersecurity Optimization
Mengubah Nindya Karya menjadi Perusahaan yang lebih produktif, dipimpin oleh manajemen puncak yang kompak dan memiliki kesatuan komando Transforming Nindya Karya into a more productive company, led by a top management that is compact and has a unified command	(SO.3) Meningkatkan IT Customer Experience Journey (SO.3) Improving IT Customer Experience Journey	(SI.5) Implementasi Data Analytic dan Big Data (SI.6) Implementasi AI & ML (SI.7) Data Visualization (SI.8) Membangun Ecosystem R&D dan Inovasi
		(SI.5) Data Analytics and Big Data Implementation (SI.6) Implementation of AI & ML (SI.7) Data Visualization (SI.8) Building an Ecosystem R&D and Innovation
		(SI.9) Memastikan Value dari Layanan IT (SI.10) Continuous Improvement Proses TI dari OFI: ISO 27K, IT MA, INDI 4.0 (SI.11) Mempersiapkan penyesuaian dengan kebutuhan holding
		(SI.9) Ensuring the Value of IT Services (SI.10) Continuous IT Process Improvement from OFI: ISO 27K, IT MA, INDI 4.0 (SI.11) Prepare for alignment with holding requirements



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Perusahaan telah merancang Road Map implementasi GCG dengan tujuan agar tanggap terhadap segala bentuk dinamika yang terjadi baik di Internal maupun di eksternal.

The Company has designed a GCG implementation Road Map with the aim of being responsive to all forms of dynamics that occur both internally and externally.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan Perusahaan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, tercermin dalam suatu mekanisme corporate governance yang dapat diandalkan, diharapkan dapat meminimalisir agency problem sehingga tercipta kinerja perusahaan yang baik.

Dengan demikian, Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan wujud dari komitmen Perusahaan dalam membangun etika bisnis yang sehat dan memberikan manfaat Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkup Perusahaan, penilaian dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a very important factor in managing the Company considering the increasing risks and challenges faced by the Company. The application of good corporate governance principles, reflected in a reliable corporate governance mechanism, is expected to minimize agency problems so as to create good corporate performance.

Thus, the implementation of good corporate governance is a manifestation of the Company's commitment to building sound business ethics and providing Company benefits to all stakeholders in supporting sustainable development.

In line with the development of the business world, the principles of GCG have also developed which include a supervisory and control system that supports work ethics and responsible decision making, supports integrity in financial reporting, proper risk management, and ethically based stakeholder and company relationships. Within the scope of the Company, an assessment is carried out on the implementation of GCG to ensure the implementation of the GCG principles in a comprehensive manner.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Nindya Karya

The Development of the Implementation of Good Corporate Governance in the Nindya Karya Scope

Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu indikator penting yang kemudian dijadikan panduan oleh investor di dunia untuk menilai kinerja Perusahaan. Oleh karena itu, Nindya Karya berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Wujud komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan didukung dengan adanya:

1. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan yang jelas dan realistis yang dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pedoman GCG Perusahaan;
3. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite;
4. Penetapan kode etik yang dilaksanakan secara konsisten dan membudaya;
5. Sistem pengendalian Internal yang kuat;
6. Implementasi mekanisme check and balances yang proporsional;
7. Pedoman transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi afiliasi, dan transaksi dengan pihak terkait lainnya;
8. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran;
9. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Statement of Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) is one of the important indicators which is then used as a guide by investors in the world to assess the Company's performance. Therefore, Nindya Karya is fully committed to applying the principles of *Good Corporate Governance* as the basis for creating sustainable added value for the interests of shareholders, society at large, and various other stakeholders (employees, consumers, regulators, partners, etc.) both in the short and long term.

The Company's commitment to implementing GCG in a sustainable manner is supported by:

1. A clear and realistic vision, mission, and corporate values that are evaluated periodically by the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Company GCG Guidelines;
3. Guidelines and work procedures for the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees;
4. Determination of a code of ethics that is carried out consistently and culturally;
5. Strong Internal control system;
6. Implementation of proportional checks and balances mechanism;
7. Guidelines for transactions containing conflicts of interest, affiliated transactions, and transactions with other related parties;
8. Implementing a violation reporting system;
9. Sustainable social and environmental responsibility program.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Basis of Good Corporate Governance Implementation

Tata Kelola Perusahaan merupakan rangkaian mekanisme yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan Perusahaan secara profesional dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders Perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika usaha yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan karyawan Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga didasarkan pada prinsip metode pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas entitas usaha yang akuntabel, yang kemudian berelasi langsung terhadap pengelolaan organisasi yang berkelanjutan dan iklim investasi.

Implementasi GCG di lingkup Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bidang usaha yang digeluti Perusahaan, termasuk regulasi industri dan ketentuan terbaru mengenai Perseroan Terbatas, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi perusahaan; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan Internal dan eksternal, di mana aspek-aspek tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Implementasi GCG di Perusahaan bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun Internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perusahaan;
3. Mendorong Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; serta
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Corporate Governance is a series of mechanisms designed to direct the management of the Company in a professional manner with the aim of optimizing the value of the Company for shareholders and other stakeholders in the long term while taking into account the interests of the Company's stakeholders based on laws and regulations and business ethics values that are upheld by the Company. management and employees of the Company.

Good Corporate Governance is also based on the principles of accountable decision-making methods and management of business entity activities, which are then directly related to sustainable organizational management and the investment climate.

The implementation of GCG within the Company refers to several laws and regulations that are in accordance with the line of business that the Company is engaged in, including industry regulations and the latest provisions regarding Limited Liability Companies, especially Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This law provides a comprehensive foundation for the management aspects of the company's organization; starting from the rights and obligations of shareholders, duties and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to the Company's relationship with Internal and external stakeholders, where these aspects are also regulated in the Company's Articles of Association.

The implementation of GCG in the Company aims to:

1. Optimizing strong competitiveness, both nationally and internationally, so as to be able to maintain its existence and live sustainably to achieve the goals and objectives of the Company;
2. Encouraging professional, efficient, and effective management, as well as empowering functions and increasing the Company's independence;
3. Encouraging the Company to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the existence of corporate social responsibility towards stakeholders as well as environmental sustainability around the Company;
4. Increase the Company's contribution to the national economy; as well as
5. Improving a conducive climate for the development of national investment.

Internalisasi atas prinsip-prinsip GCG diintegrasikan pada peraturan yang berlaku guna menjadi acuan pedoman praktik terbaik (*best practice*) yang dilaksanakan sebagai landasan legal-formal utama dalam menjalankan kegiatan tata kelola usaha.

Perusahaan menetapkan kebijakan tata kelola yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara Juncto PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional Perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*."

The internalization of GCG principles is integrated into applicable regulations to become a reference for best practice guidelines which are implemented as the main legal-formal basis in carrying out business governance activities.

The Company determines the applicable governance policy by referring to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises Juncto PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (*Good Corporate Governance*) in State-Owned Enterprises, which states that "BUMN is obliged to carry out Company operations by adhering to GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and *fairness*."



Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

The explanation of the basic principles above and their general application in the scope of the Company are as follows:

Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Penerapan di Lingkup Nindya Karya Application in the Scope of Nindya Karya
Keterbukaan Openness	Transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai pengelolaan aspek operasional dan usaha. Transparency as openness in carrying out the decision-making process and openness in presenting material and relevant information regarding the management of operational and business aspects.	Perusahaan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh Pemangku Kepentingan. Perusahaan meyakini bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dengan baik dan tepat akan menghindari terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan berbagai pihak. hal ini dibuktikan dengan publikasi informasi keuangan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan. Seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi penting tersebut termasuk informasi lainnya dengan mengakses website Perusahaan di www.nindyakarya.co.id atau beberapa laporan yang diterbitkan secara berkala baik dalam bentuk fisik, digital atau siaran pers. The Company always provides true, accurate, and timely information to all Stakeholders. The Company believes that the proper and proper implementation of the principle of transparency will avoid conflicts of interest with various parties. this is evidenced by the publication of financial information that has a significant impact on the Company's performance. All stakeholders can access this important information, including other information, by accessing the Company's website at www.nindyakarya.co.id or several reports that are published regularly, either in physical or digital form or press releases.

Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Penerapan di Lingkup Nindya Karya Application in the Scope of Nindya Karya
Akuntabilitas Accountability	Akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Accountability as clarity of function, implementation and accountability of organs company so that the management of the Company is carried out effectively.	Seluruh organ tata kelola Perusahaan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta pertanggung jawaban yang sistematis. Hal ini dapat terlihat melalui pengelolaan Perusahaan yang memisahkan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola. All organs of corporate governance have the principle of accountability with clear functions, structures, systems, and systematic accountability. This can be seen through the management of the Company which separates duties and responsibilities and clearly describes the functions, rights, obligations, and authorities of each governance organ.
Pertanggungjawaban Responsibility	Responsibilitas atau tanggungjawab sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan aktivitas usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Responsibility or responsibility as conformity in the management of business activities to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.	Bentuk pertanggungjawaban Perusahaan dibuktikan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti pembayaran pajak, pelaksanaan hubungan industrial, melindungi segenap pegawai dengan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) yang berkelanjutan. The form of corporate responsibility is proven by compliance with applicable regulations, such as paying taxes, implementing industrial relations, protecting all employees by implementing occupational health and safety, as well as protecting the environment through programs sustainable corporate social responsibility.
Kemandirian Independence	Kemandirian sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independence as a condition in which the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations as well as healthy corporate principles.	Pengelolaan Perusahaan dilakukan dengan profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. The management of the Company is carried out in a professional manner without conflict of interest and influence from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.
Kesetaraan dan Kewajaran Equality and Fairness	Fairness atau kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness or fairness as justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.	Perusahaan memberikan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. melalui prinsip ini, Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap seluruh aset dengan baik dan prudent sehingga memunculkan perlindungan kepentingan Pemegang Saham secara jujur dan adil. Bagi Perusahaan, prinsip fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam Perusahaan. The Company provides fair and equal treatment in fulfilling the rights of all Stakeholders based on the prevailing laws and regulations. through this principle, the Company manages all assets properly and prudently so as to create an honest and fair protection of the interests of shareholders. For the Company, the principle of fairness is the soul to monitor and ensure fair treatment among the various interests in the Company.

Landasan Hukum Penerapan GCG

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan dan perundangundangan, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia
 - Undang-Undang republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal.
 - Undang-Undang republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - Undang-Undang republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Legal Basis for GCG Implementation

The implementation of GCG within the Company refers to several rules and regulations, namely:

- laws of the republic Indonesia
 - Republic of Indonesia Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market.
 - Republic of Indonesia Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.
 - Republic of Indonesia Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
 - Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.
 - k. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - l. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
 - m. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021.
3. Peraturan Presiden
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.
 - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
 - d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan PER-09/MBU/2012.
- e. Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower.
 - f. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN).
 - g. Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investment.
 - h. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - i. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016.
 - j. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure.
 - k. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
 - l. Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2017 concerning Construction Services.
 - m. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation.
2. Government regulations
 - a. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.
 - b. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 40 of 2009 concerning Amendments to Government Regulation No. 51 of 2008 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business.
 - c. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2020 concerning Implementing Regulations of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services as amended by Government Regulation No. 14 Year 2021.
3. Presidential decree
 - a. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in the Provision of Infrastructure.
 - b. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services as last amended by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021.
 - c. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises
 - d. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as last amended by PER-09/MBU/2012.

- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020.
 - f. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
 - g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - i. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021.
 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
 - a. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- e. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/06/2020.
 - f. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.
 - g. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-01/MBU/05/2019 concerning the fourth amendment to the Regulation of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards of Owned Enterprises Country.
 - h. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-10/MBU/10/2020 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Board Supervisor of State Owned Enterprises.
 - i. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-12/MBU/11/2020 concerning the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of Owned Enterprises Country.
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-01/MBU/03/2021 concerning Guidelines for Proposing, Reporting, Monitoring, and Changes in the Use of Additional State Equity Participation to State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.
 - a. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021.
 5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises
 - a. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State-Owned Enterprises.

- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara.
 - e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan Atau Perusahaan Patungan Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-103/MBU/03/2021 tentang Kriteria Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha Milik Negara.
 - g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-394/MBU/12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesment Bagi Talenta Direksi BUMN.
 - h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan lainnya
- a. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Anggaran Dasar Perusahaan, di mana Anggaran Dasar pertama dimuat dalam Akta Notaris Kartini Muljadi, SH di Jakarta No.76 tanggal 15 Maret 1973, beserta perubahan-perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Notaris Khairina, SH di Jakarta Nomor 68 tanggal 31 Januari 2020 Juncto nomor 13 tanggal 06 Desember 2021.
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam risalah RUPS.
6. Other rules
- a. The Company's Articles of Association which have been adjusted to Law Number 40 of 2007 concerning the Company's Articles of Association. where First Articles of Association loaded in Deed Notary Public Kartini Muljadi, SH in Jakarta No. 76 dated March 15, 1973, along with the changes final loaded in Deed Notary Public Khairina. SH in Jakarta Number 68 dated 31 January 2020 Juncto number 13 December 06. 2021 Juncto number 17 dated March 16. 2022.
 - b. The resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) are listed in the minutes of the GMS.

Di samping itu, penerapan prinsip dan praktik GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu kepada Pedoman umum GCG Indonesia tahun 2006 yang dirilis oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

In addition, the implementation of GCG principles and practices within the Company also refers to the 2006 Indonesian GCG General Guidelines released by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

Peta Jalan Pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Roadmap for the Development of Good Corporate Governance

Perusahaan telah merancang Road Map implementasi GCG dengan tujuan agar tanggap terhadap segala bentuk dinamika yang terjadi baik di Internal maupun di eksternal. Dalam Road Map tersebut, Perusahaan telah melakukan analisis serta identifikasi tantangan penerapan GCG yang ada guna mencapai visi GCG sebagai budaya di lingkungan Perusahaan. Berdasarkan analisis dan identifikasi yang dilakukan, pengembangan GCG yang meliputi proses bench marking sebagai acuan kerja dan penetapan persepsi visi penerapan GCG dilakukan secara spesifik.

Penyusunan manual book/panduan penerapan GCG yang disarikan dari berbagai referensi dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola atau optimalisasi fungsi organ tata kelola baik utama maupun pendukung. Setelah menguatkan fundamental GCG dan penyediaan infrastruktur GCG yang dibutuhkan, Perusahaan melakukan upaya Internalisasi dengan objek utama manajemen dan Insan Nindya Karya secara menyeluruh. Internalisasi ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran setiap pemangku kepentingan akan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip GCG yang ada dan terpadu dalam petunjuk pelaksanaan penerapan (board manual).

Prinsip-prinsip GCG ini juga terintegrasi dengan rencana strategis Perusahaan dalam mengedepankan Teknologi Informasi (TI) dalam seluruh aktivitas bisnis, Perusahaan juga melakukan pengembangan mekanisme GCG yang berbasis IT. Disamping itu, Perusahaan konsisten menempatkan GCG sebagai budaya.

The company has designed a GCG implementation Road Map with the aim of being responsive to all forms of dynamics that occur both internally and externally. In the Road Map, the Company has analyzed and identified the challenges of implementing existing GCG in order to achieve the GCG vision as a culture within the Company. Based on the analysis and identification carried out, the development of GCG which includes the bench marking process as a work reference and the determination of the perception of the vision for the implementation of GCG is carried out specifically.

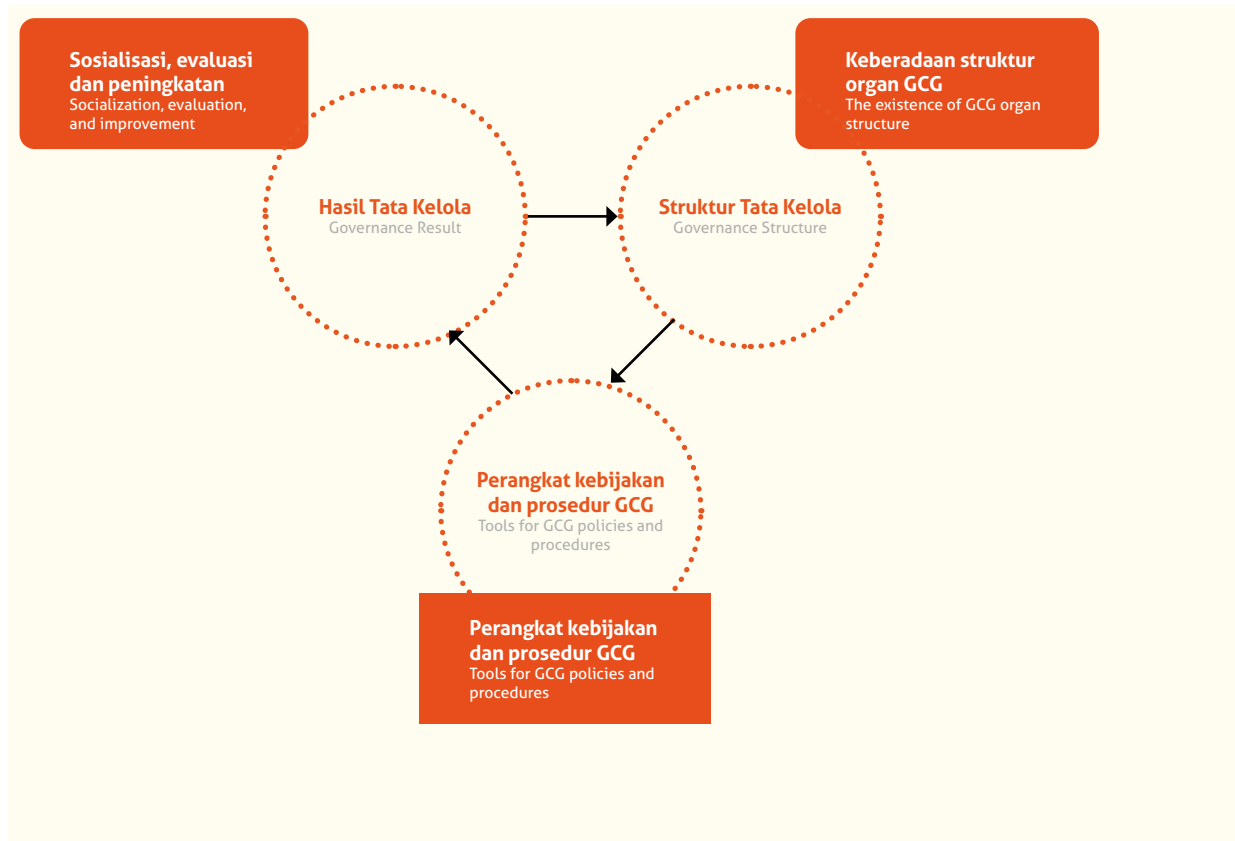
Preparation of a manual book/guideline for the implementation of GCG which is extracted from various references and laws and regulations governing governance or optimizing the functions of governance organs, both main and supporting. After strengthening the fundamentals of GCG and providing the required GCG infrastructure, the Company carried out internalization efforts with the main object of management and Nindya Karya personnel as a whole. This internalization was carried out in order to increase the awareness of each stakeholder on the importance of implementing the existing GCG principles and being integrated in the implementation instructions (board manual).

These GCG principles are also integrated with the Company's strategic plan in promoting Information Technology (IT) in all business activities. The Company also develops IT-based GCG mechanisms. In addition, the Company consistently places GCG as a culture.

Road Map GCG Nindya Karya Nindya Karya's GCG Road Map



Struktur dan Proses Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance Structure and Process

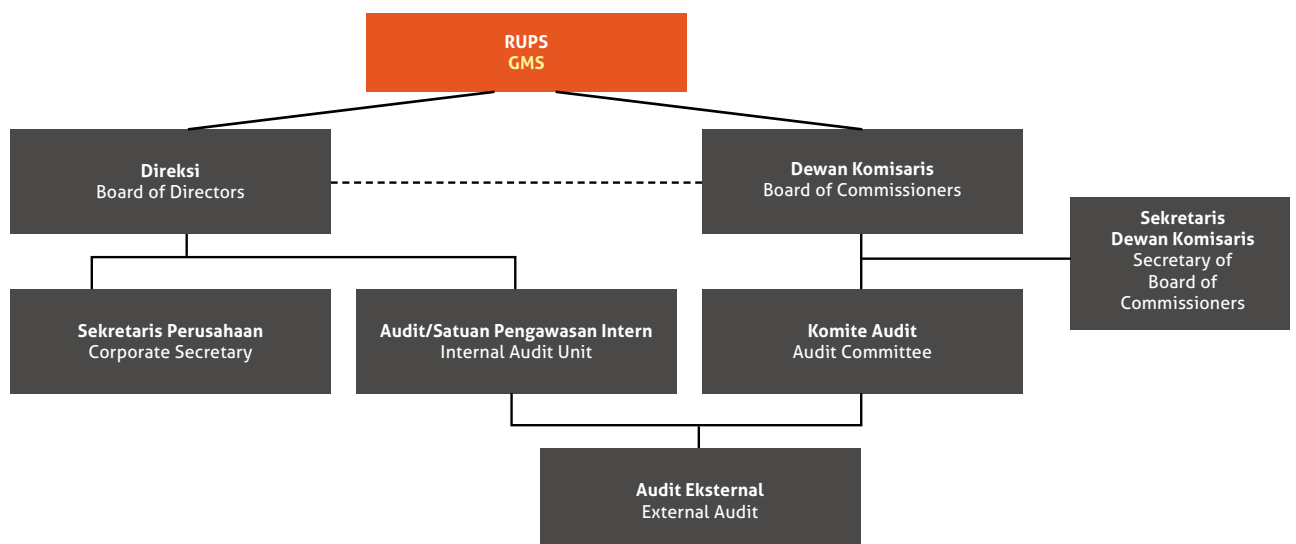


Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur umum tata kelola perusahaan terdiri dari rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang berkedudukan sebagai organ manajemen Puncak dalam melakukan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam melaksanakan proses check and balances kegiatan usaha agar dapat dikelola dan bertanggung jawabkan secara sehat.

Corporate Governance Organ Structure

Referring to the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the general structure of corporate governance consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors which are the top management organs in carrying out the tasks of controlling and supervising business activities. All of these main organs play a role in carrying out the check and balances process for business activities so that they can be managed and accounted for in a healthy manner.



Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, organ Perusahaan terdiri dari rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, ketiga organ Perusahaan tersebut memiliki kewenangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundangundangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan ketentuan lainnya berikut independensi dalam melaksanakan fungsi untuk kepentingan Perusahaan.

RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sementara Direksi memiliki Sekretaris Perusahaan dan audit Internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Perusahaan juga melaksanakan proses audit eksternal atas laporan keuangan Perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Penunjukan KAP dilaksanakan melalui forum RUPS.

Proses dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Mekanisme tata kelola merupakan pedoman-pedoman pokok pengelolaan Perusahaan yang bersifat holistik dan terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian seluruh prosedur dan keputusan, menjadi jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 & 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero) Juncto 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG).

In accordance with Law No. 40 of 2007 Chapter I concerning General Provisions Article 1 point 2, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company which has authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association.
2. The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is a Company organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

In carrying out their duties, the three organs of the Company have the authority that has been regulated in accordance with the provisions of the legislation, the Company's Articles of Association, and other provisions as well as independence in carrying out functions for the benefit of the Company.

The GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other's duties, responsibilities and authorities in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Secretary to the Board of Commissioners. Meanwhile, the Board of Directors has a Corporate Secretary and an Internal audit is carried out by the Internal Audit Unit (SPI). The Company also carries out an external audit process on the Company's financial statements, in accordance with applicable regulations, which is carried out by the Public Accounting Firm (KAP). The appointment of KAP is carried out through the GMS forum.

Good Corporate Governance Process and Mechanism

Governance mechanisms are the main guidelines for managing the Company which are holistic and integrated according to GCG principles. Thus, all procedures and decisions become clear between the party making the decision and the party exercising control (supervision) of the decision.

Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding Guidelines Implementation of Good Corporate Governance (GCG). PT Nindya Karya (Persero) continues to improve its GCG policy (soft-structure GCG) so

PT Nindya Karya (Persero) senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (*soft-structure* GCG) agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG bagi Perusahaan.

that it is in line with the needs of business processes and the provisions for implementing GCG for the Company.

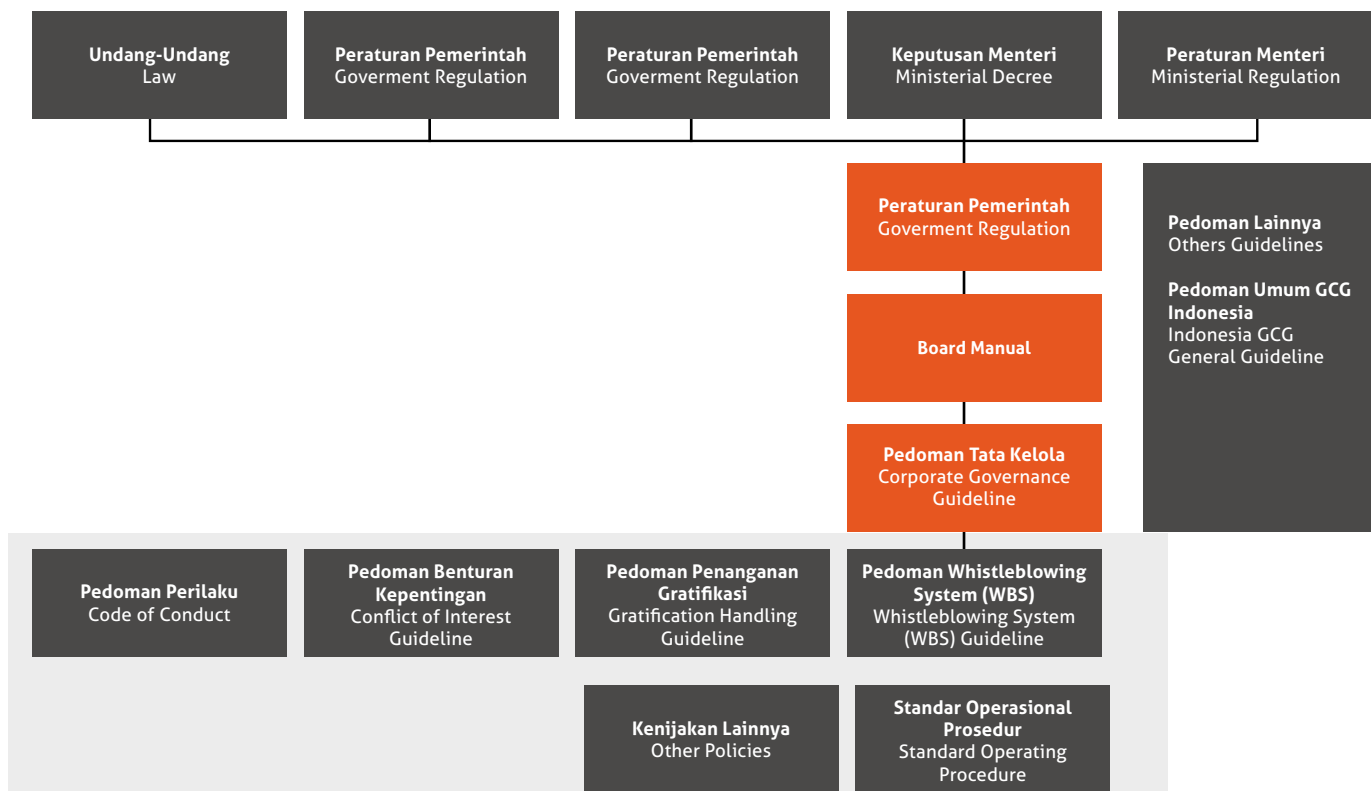
Perusahaan telah menyusun, mengesahkan, menerapkan dan memperbaharui *soft structure* GCG yang terdiri dari berbagai pedoman di tahun 2021, sebagai berikut:

The Company has compiled, ratified, implemented and updated the GCG soft structure which consists of various guidelines in 2021, as follows:

Perangkat Kebijakan Policy Tools	Penetapan dan Pembaruan Establishment and Updates
Visi dan Misi Vision and Mission	Surat Keputusan Direksi PT NINDYA AKRYA (Persero) No. 0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 tanggal 09 November 2020 tentang Visi, Misi PT NINDYA KARYA (Persero) Visi: Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan Investasi berbasis Engineering yang Terpercaya, Berkemajuan dan Berkelanjutan Misi: 1. Meningkatkan Nilai Tambah bagi Stakeholders secara Berkelanjutan Berbasis Excellence Engineering dengan Inovasi serta Human Capital yang Unggul dan Berakhlak. 2. Mengembangkan Industri Konstruksi dan Investasi yang Berstandar Global dan Berdaya Saing Tinggi dengan mengutamakan Kepuasan Pelanggan, Kesehatan dan Keselamatan kerja serta Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan Decree of the Board of Directors of PT NINDYA AKRYA (Persero) Number: 0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dated November 9, 2020 regarding Vision. Mission of PT NINDYA KARYA (Persero) Vision: To be a Global Company in the field of Construction and Investment Based on Trusted. Leading and Sustainable Engineering Mission : 1. Increase Added Value for Stakeholders _ Sustainable Based on Engineering Excellence with Innovation and Excellent and Moral Human Capital. 2. Develop Industry Powerful and Global Standard Construction and Investment High Competition with prioritize Satisfaction Customers. Health and Safety work as well as Sustainability Sustainable Environment
Budaya Perusahaan Corporate Culture	Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Budaya Perusahaan (<i>Corporate Culture</i>) PT NINDYA KARYA (Persero) Decree of the Board of Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 dated September 15, 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) Corporate Culture
Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Kode Etika Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) Implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Code of Conduct (Code of Conduct)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dan 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) Implementation Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)
Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Good Corporate Governance Guidelines (GCG)	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dan 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) Implementation Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)
Pedoman Prilaku Etika Code of Ethics	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dan 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) Implementation Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)
Whistleblowing System Whistleblowing System	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) Implementation Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Control Guidelines Gratification	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) Implementation Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)

Perangkat Kebijakan Policy Tools	Penetapan dan Pembaruan Establishment and Updates
Tim Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Team	Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0009/DIRUT/KPTS/SEKPER/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Perubahan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT NINDYA KARYA (Persero) Decree of the Board of Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0009/DIRUT/KPTS/SEKPER/02/2021 dated February 2, 2021 regarding Change of PT NINDYA KARYA (Persero) Gratification Control Unit Team (UPG)
Pedoman Benturan Kepentingan Guidelines for Conflict of Interest	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) Implementation Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Guidelines for Corporate Governance	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dan 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding Implementation Guidelines for PT NINDYA KARYA (Persero) Good Corporate Governance (GCG)
Tim Pemantauan Pelaksanaan GCG GCG Implementation Monitoring Team	Surat Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0008/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perubahan Tim Pemantau Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT NINDYA KARYA (Persero) Decree of the Board of Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0008/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2021 dated January 29, 2021 concerning Change of PT NINDYA KARYA (Persero)'s Good Corporate Governance Implementation Monitoring Team
Board Manual	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT NINDYA KARYA (Persero) Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT NINDYA KARYA (Persero)
Board Manual	Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) <i>Implementation Guidelines for Good Corporate Governance</i> (GCG) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) number: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 regarding PT NINDYA KARYA (Persero) Implementation Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)

Adapun hirarki kebijakan GCG adalah sebagai berikut:
The GCG policy hierarchy is as follows:



Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Socialization and Internalization of Good Corporate Governance Policy

Pada Tahun 2021, Perusahaan melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi GCG di Nindya Karya, softstructure dan Infrastructure GCG, Whistleblowing System, Pencegahan Gratifikasi serta pelaporan LHKPN.

Perusahaan memiliki kebijakan yang melibatkan seluruh Kepala Departemen Kantor Pusat serta Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko sebagai Penanggung Jawab Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terkait upaya sosialisasi GCG di lingkungan Perusahaan. Seluruh Insan Nindya Karya bertanggung jawab langsung atas penerapan GCG di Perusahaan khususnya pada unit bisnis masing-masing sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 0008/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 Tentang Perubahan Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Tim GCG) PT Nindya Karya (Persero). Kegiatan sosialisasi atas penerapan GCG dilakukan dengan membedakan ruang lingkup tugas yang ada yaitu sosialisasi dan Internalisasi pada Unit Kerja dan Unit Bisnis.

Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan unsur Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) terdiri dari:

No	Nama Jabatan Position Name	Jabatan dalam Tim Position in the Team
1	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director Finance, HR and Risk Management	Penanggung Jawab in charge
2	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Ketua Chairman
3	Senior Vice President Human Capital Senior Vice President of Human Capital	Sekretaris Secretary
4	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head Unit Internal Control	Anggota Member
5	Senior Vice President Senior Vice President	Anggota Member

Sosialisasi GCG dilakukan kepada karyawan melalui penandatanganan Pernyataan Kepatuhan dalam buku Pedoman Perilaku Etika yang merupakan buku pedoman bagi Etika Kerja dan Etika Bisnis yang berlaku di Perusahaan.

In 2021, the Company will socialize Corporate Governance with the aim of providing an in-depth understanding of GCG Implementation at Nindya Karya, GCG soft structure and infrastructure, Whistleblowing System, Gratification Prevention and LHKPN reporting.

The company has a policy that involves all Senior Vice Presidents of the Head Office Department as well as the Director of Finance, HR and Risk Management as the Person in Charge of the Monitoring Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) related to GCG socialization efforts within the Company. All Nindya Karya personnel are directly responsible for the implementation of GCG in the Company, especially in their respective business units as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0008/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2021 dated January 29, 2021 concerning Changes The Monitoring Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG Team) PT Nindya Karya (Persero). Socialization activities on the implementation of GCG are carried out by distinguishing the scope of existing tasks, namely socialization and internalization in the Work Unit and Business Unit.

In the decision letter, the elements of the Monitoring Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero) consist of:

GCG socialization is carried out to employees by signing a Compliance Statement in the Code of Ethics book which is a guidebook for Work Ethics and Business Ethics applicable in the Company.

Assessment: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Assessment: Evaluation, Monitoring, and Improvement of the Implementation of Good Corporate Governance

Dasar Penilaian dan Metode

Sesuai Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan PER-09/MBU/2012, Perusahaan sebagai BUMN wajib untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG yang dilakukan melalui penilaian (*assessment*). Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Tujuan penilaian penerapan GCG adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG Perusahaan melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perusahaan dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perseroan serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dan penerapannya pada Perusahaan.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *Corporate governance* Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara:

BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:

1. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Basis of Assessment and Method

According to Presidential Regulation No. 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), Government Regulation (PP) No. 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 Regarding the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as last amended by PER-09/MBU/2012, the Company as a BUMN is required to measure the implementation of GCG which is carried out through an assessment (*assessment*). The Company evaluates the implementation of GCG consistently every year to determine the level of adequacy of GCG implementation within the Company.

The objectives of assessing the implementation of GCG are:

1. Measuring the quality of the Company's GCG implementation through assessing the level of fulfillment of GCG criteria with real conditions applied to the Company by giving a score/value for the implementation of GCG and the category of the quality of its implementation.
2. Identify the strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation and propose recommendations for improvement to reduce the gap between the GCG criteria and their application to the Company.
3. Monitor the consistency of the Company's GCG implementation and obtain input for the improvement and development of the Company's Corporate governance policies.

Based on Article 44 paragraph 1 of the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises:

SOEs are required to measure the implementation of GCG in the form of:

1. Assessment, namely a program to identify the implementation of GCG in SOEs through measuring the implementation and implementation of GCG in SOEs which is carried out periodically every 2 (two) years;
2. Evaluation (*review*), which is a program to describe the follow-up to the implementation and implementation of GCG in BUMN which will be carried out in the following year after the assessment as referred to in letter a, which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

The method of measuring the implementation of GCG in the Company's environment refers to the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. This assessment and evaluation method is carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with a predetermined weight as stipulated in the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012.

6 Aspek Assessment GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

6 Aspects of GCG Assessment (Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012)

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
Shareholders and GMS/Owners Capital

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Board of Commissioners/supervisory Board

Direksi
Board of Directors

Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Information Disclosure and Transparency

Aspek Lainnya
Other Aspects

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021

Perusahaan telah melaksanakan assessment penerapan GCG tahun buku 2021 yang dilaksanakan oleh internal Perusahaan.

Jenis Penilaian : Self Assessment
Assessor/Penilai : Tim Good Corporate Governance PT NINDYA KARYA (Persero)
Periode Pengukuran : 4 (empat) bulan
Tempat : Gedung Nindya

Assessment of GCG Implementation for Financial Year 2021

The Company has carried out an assessment of the implementation of GCG for the 2021 financial year which was carried out by the Company internally.

Type of Assessment : Self Assessment
Assessor/Appraiser : PT NINDYA KARYA (Persero) Good Corporate Governance Team
Measurement Period : 4 (four) months
Place : Nindya Building

Berdasarkan hasil Self Assessment yang dilakukan oleh Tim Good Corporate Governance PT NINDYA KARYA, kondisi penerapan GCG pada lingkup Perusahaan mencapai predikat kategori "Sangat Baik" dengan skor 90,08. Capaian skor untuk masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut:

Based on the results of the Self Assessment conducted by the Good Corporate Governance Team of PT NINDYA KARYA, the condition of the implementation of GCG in the scope of the Company reached the category of "Very Good" with a score of 90.08. The scores for each governance aspect are detailed as follows:

Aspek Pengujian Aspect of Testing	Bobot Weight	Hasil Evaluasi Tahun Buku 2021 GCG Evaluation Results for the 2021 Fiscal Year		
		Nilai Score	Pencapaian Achievement	Predikat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Predicate
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,759	96,56%	Sangat baik Very good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	7,717	85,74%	Sangat baik Very good
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	31,576	90,22	Sangat baik Very good
Direksi Board of Directors	35,00	33,051	94,43%	Sangat baik Very good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,479	94,21%	Sangat baik Very good

Aspek Pengujian Aspect of Testing	Bobot Weight	Hasil Evaluasi Tahun Buku 2021 GCG Evaluation Results for the 2021 Fiscal Year		
		Nilai Score	Pencapaian Achievement	Predikat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Predicate
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	2,500	50%	
SKOR KESELURUHAN OVERALL SCORE	100,00	90,082		Sangat baik Very good

Keterangan: 0-50: Tidak Baik | 50-60: Kurang Baik | 60-75: Cukup Baik | 75-85: Baik | 85-100: Sangat Baik
Description: 0-50: Bad | 50-60: Not Good | 60-75: Fairly Good | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Dari hasil penilaian di atas, terdapat beberapa *Area of Improvement* (Aol) yang menjadi wilayah perbaikan bagi penerapan praktik dan prinsip GCG di lingkup Perusahaan. Berikut disampaikan rekomendasi Aol tersebut, dan tindak lanjutnya yang telah dilakukan Perusahaan.

From the results of the above assessment, there are several Areas of Improvement (Aol) which are areas of improvement for the implementation of GCG principles and practices within the Company. Following are the recommendations of the Aol, and the follow-up actions that have been taken by the Company.

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Financial Year 2021
I	Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Aspects of Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a Sustainable manner Pedoman perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya belum sepenuhnya menjadi materi dalam proses induction (pengenalan) bagi karyawan baru The code of conduct and technical regulations/implementation guidelines have not been fully materialized in the induction process for new employees
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners - RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan pengaturan mengenai jumlah jabatan yang boleh dirangkap bagi anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan; - Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal belum mengatur jumlah maksimum rangkap jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris; - Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal belum memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan RJPP atau revisi RJPP; - Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP belum dilaksanakan tepat waktu; - Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) belum dilaksanakan secara tepat waktu; - RUPS/Pemilik Moal memberikan persetujuan atas usulan aksi korporasi tidak tepat waktu; - Belum ada pembahasan dan evaluasi dan/atau arahan atas pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik pada perusahaan - Belum melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik pada perusahaan. - GMS/Capital Owner not yet set Settings about amount possible positions _ combined for member Directors who cause collision interests ; - Shareholders/GMS/Capital Owners not yet arrange amount maximum double positions of the Board of Commissioners that may held by a members of the Board of Commissioners ; - Shareholders/GMS/Capital Owners not yet give endorsement/approval to RJPP draft or RJPP revision ; - Endorsement/approval RJPP draft or RJPP revision yet held appropriate time ; - endorsement Plan Company Work and Budget (RKAP) not yet held by appropriate time ; - GMS/Owner Moal give agreement on proposal action corporation no appropriate time ; - None yet discussion and evaluation and/or instruction on implementation of good corporate governance in the company - Haven't done yet efforts follow up on the resulting areas of improvement from the above assessment implementation of good corporate governance in the company.

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Financial Year 2021
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board a. Belum membuat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris; b. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP tidak tepat waktu; c. Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris tidak tepat waktu; d. Belum dicantumkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk membahas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia tentang Manajemen karir, akuntansi, pengadaan barang dan jasa, mutu dan pelayanan, pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; e. Belum terdapat penetapan tertulis dewan komisaris terhadap proses pengangkatan direksi dan dewan komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan; f. Dewan komisaris belum sepenuhnya menindaklanjuti area of improvement hasil assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya; g. Komite nominasi dan remunerasi dewan komisaris belum sepenuhnya melaksanakan pertemuan berkala serta melakukan telaah, Analisa dan evaluasi atas acara rapat yang diagendakan; h. Komite nominasi dan remunerasi dewan komisaris belum sepenuhnya membuat laporan berkala atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi. a. Have not developed report about training results that members of the Board of Commissioners attended ; b. Work Plan and Annual Budget for Board of Commissioners to Directors to be included as part of RKAP was not delivered in time ; c. Response RJPP draft by the Board of Commissioners was not delivered in time; d. Board of Commissioners Work Plan has not included policy discussion/internal control system design, Risk Management, Information Technology, HUman Resources for Management, accounting, goods and services procurement, quality and service, management of subsidiary/joint venture company; e. Determination written by the board of commissioners on the appointment process for subsidiary/joint venture company's directors and board of commissioners is not yet available; f. board of commissioners not fully updated on on areas of improvement resulting from the GCG assessment/review which is under its authority ; g. Committee nomination and remuneration of the board of commissioners has not conducted periodical meeting as well as review, analyze and evaluate on the meeting agendas; h. Committee nomination and remuneration of the board of commissioners have not submitted periodical reports on every implementation assignment accompanied with recommendations.
IV	Direksi Board of Directors a. Belum sepenuhnya melaksanakan program dan laporan pelatihan; b. Penyampaian rancangan RJPP kepada pemegang saham sesudah tanggal 31 oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan c. Penyampaian laporan pencapaian kinerja perusahaan kepada dewan Komisaris belum disampaikan tepat waktu d. Pedoman/kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) belum ditetapkan dalam RUPS Anak perusahaan e. Belum membuat laporan internal control f. Terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan g. Belum memenuhi harapan pemegang saham melalui pencapaian target-target; h. SPI/Fungsi Audit Internal belum melakukan penilaian/review (assessment) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit secara keseluruhan i. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. a. Have not completely implemented programs and training reports; b. Delivery RJPP draft to share holder after October 31st _ before current year RJPP period c. Company performance achievement report was not delivered to the board of commissioners at the appropriate time d. Guidelines/policies Settings for Subsidiary (subsidiary governance) not yet established during Subsidiary GMS e. Internal control report is not yet developed f. There was a delay in the delivery of taxation compulsory document g. Shareholder expectation has not been fulfilled through achievement of targets; h. SPI/Internal Audit Function has not conducted periodical internal assessment/review (assessment) on the guarantee quality program and overall improvement of internal audit function i. GMS/Decision of Capital Owners for ratification/approval of RJPP implemented no later than in time 60 (six twenty) days upon receiving complete RJPP draft before next the start of the next RJPP period.
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency Komite nominasi dan remunerasi belum diungkapkan sepenuhnya dalam laporan tahunan nomination and remuneration Committee not yet fully disclosed in annual report
VI	Aspek Lainnya Other Aspects - -

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020: Hasil, Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan *Assessment* (Penilaian) berdasarkan surat tugas No. ST-42/PW09/4.1/2021 tanggal 19 Januari 2021 dengan penugasan dilaksanakan selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja dalam rentang waktu mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 26 Maret 2021.

Kemudian berdasarkan surat dari PT Nindya Karya (Persero) No. 0020/DKS/SEKPER/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Perpanjangan Jangka Waktu *Assessment* GCG Tahun 2020 PT Nindya Karya (Persero), pelaksanaan waktu pengukuran diperpanjang mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 16 April 2021 mengacu pada surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No. S-339/PW09/4.1/2021 tanggal 25 Maret 2021 Hal *Assessment* GCG pada PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2020.

Jenis Penilaian : *Assessment* (Penilaian)
Assessor/Penilai : BPKP
Periode Pengukuran : 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
Waktu Pengukuran : 21 Januari 2021 s.d 16 April 2021
Tempat : Gedung Nindya
Waktu Terbit Laporan : 15 April 2021

Berdasarkan hasil *Assessment* atau Penilaian tersebut, kondisi penerapan GCG pada lingkup Perusahaan mencapai predikat kategori "Sangat Baik" dengan skor 89,793. Capaian skor untuk masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut:

Assessment of GCG Implementation for the 2020 fiscal Year: Results, Recommendations and Follow-up in 2021

In 2021, the Company has carried out an *Assessment* based on assignment letter No. ST-42/PW09/4.1/2021 dated January 19, 2021 with assignments carried out for 35 (thirty five) working days in the period starting January 21, 2021 until by March 26, 2021.

Then based on a letter from PT Nindya Karya (Persero) No. 0020/DKS/SEKPER/03/2021 dated March 22, 2021 regarding the Extension of the GCG *Assessment* Period for 2020 PT Nindya Karya (Persero), the implementation of the measurement period was extended from January 21, 2021 until with 16 April 2021 referring to the letter from the Financial and Development Supervisory Agency for DKI Jakarta Province No. S-339/PW09/4.1/2021 dated 25 March 2021 Regarding GCG *Assessment* at PT Nindya Karya (Persero) in 2020.

Type of *Assessment* : *Assessment* (*Assessment*)
Assessor/Appraiser : BPKP
Measurement Period : January 1, 2020 to December 31, 2020
Measurement Time : January 21, 2021 to April 16, 2021
Place : Nindya Building
Report Issue Time : April 15, 2021

Based on the results of the *assessment*, the condition of the implementation of GCG within the scope of the Company reached the category "Very Good" with a score of 89,793. The scores for each governance aspect are detailed as follows:

Aspek Pengujian Aspect of Testing	Bobot Weight	Hasil <i>Assessment</i> (Penilaian) Tahun Buku 2020 Assessment Results of The 2020 Fiscal Year		
		Nilai Score	Pencapaian Achievement	Predikat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Predicate
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,000	6,740	96,286	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,000	7,494	83,267	Baik Good
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	31,564	90,183	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,000	33,032	94,377	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	8,463	94,033	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	2,500	50,000	Sangat Baik Very Good
SKOR KESELURUHAN OVERALL SCORE	100,00	89,793	89,793	Sangat Baik Very Good

Keterangan: 0-50: Tidak Baik | 50-60: Kurang Baik | 60-75: Cukup Baik | 75-85: Baik | 85-100: Sangat Baik
Description: 0-50: Bad | 50-60: Not Good | 60-75: Fairly Good | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Dari hasil penilaian di atas, terdapat 5 (Lima) aspek *Area of Improvement* (Aol) yang menjadi wilayah perbaikan bagi penerapan praktik dan prinsip GCG di lingkup Perusahaan. Berikut disampaikan rekomendasi Aol tersebut, dan tindak lanjutnya yang telah dilakukan Perusahaan.

From the results of the assessment above, there are 5 (Five) Aspects Area of Improvement (Aol) which is an area of improvement for the implementation of GCG practices and principles within the Company. Following are the recommendations of the Aol, and the follow-up actions that have been taken by the Company.

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2020	Status Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2021 Follow Up Status By the end of 2021
I	Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Aspects of Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a Sustainable manner	
	Menambahkan muatan pemberian sanksi dalam kebijakan kepatuhan LHKPN. Add payload penalty in LHKPN compliance policy.	Telah diterbitkan surat keputusan direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0035/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2021 tanggal 02 November 2021 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT NINDYA KARYA (Persero) A decision letter from the directors of PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0035/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2021 dated November 2, 2021 has been issued regarding the Implementation of the Mandatory Reporting of State Assets (LHKPN) within PT NINDYA KARYA (Persero)
	Melakukan publikasi berita terkait kebijakan tentang WBS di majalah To do news publication related to policy about WBS in magazines	Telah diterbitkan pada majalah Warkom Edisi 7 tahun 2021 yang mempublikasikan berita terkait kebijakan tentang Whistle Blowing System (WBS) Has been published in Warkom magazine Issue 7 of 2021 which publishes news related to Whistle Blowing System (WBS) policy
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	
	1. Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau revisi RJPP oleh RUPS, agar didahului oleh pemaparan direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/pemilik modal 2. Memberikan pengesahan rencana jangka Panjang perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP 3. Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP agar dilaksanakan tepat waktu 4. Melakukan pembahasan dan evaluasi dan/atau arahan atas pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik pada perusahaan 5. Melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik.	Telah ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam risalah RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan RUPS Tahunan PT Nindya Karya (Persero) No.50 tanggal 29 Juni 2021. It has been followed up as stated in the minutes of the GMS concerning Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and the Annual GMS of PT Nindya Karya (Persero) No.50 dated June 29, 2021.
	1. Discussion/study to RJPP draft or review of RJPP by the GMS, so that it is preceded by a presentation directors on things scheduled for decision by the GMS/capital owners 2. Give endorsement plan long term company (RJPP) or RJPP revision 3. Endorsement/approval RJPP draft or RJPP revision to be implemented appropriate time 4. To do discussion and evaluation and/or instruction on implementation of good corporate governance in the company 5. To do efforts follow up on the resulting areas of improvement from the above assessment implementation of good corporate governance.	

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2020	Status Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2021 Follow Up Status By the end of 2021
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	
	a. laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota dewan komisaris supaya dibuat; b. memiliki rencana pemberian nasihat atas kepatuhan direksi dalam perjanjian dengan pihak ketiga c. memiliki rencana kerja dewan komisaris tentang pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh dewan komisaris d. penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan dewan komisaris kepada direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP agar tepat waktu e. membuat penilaian kinerja direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.	a. Laporan hasil pelatihan yang dijalani anggota dewan Komisaris telah dibuat b. Rencana pemberian nasihat atas kepatuhan direksi dalam perjanjian dengan pihak ketiga telah dibuat dalam rencana kerja dan anggaran dewan komisaris PT NINDYA KARYA (Persero) tahun 2022 c. Rencana kerja dewan Komisaris tentang pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris telah dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran dewan komisaris PT NINDYA KARYA (Persero) tahun 2022 d. Penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan dewan komisaris kepada direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP tahun 2022 telah disampaikan tepat waktu.
	a. report about results training that has been attended by board of commissioners should be developed ; b. Have plan to provide advisory on directors' compliance in agreement with party third c. The board of commissioner should have plan to review about implementation study on SOE-related complaints the board of commissioners have received d. delivery of board of commissioners' work plan and annual budget to directors to be included as part of RKAP should be done in time e. Conduct directors' performance evaluation based on review criteria, targets and main performance indicators covered in individual management contract of directors with realization of each achievements.	a. Report on outcome of training attended by members of the board of commissioners was completed b. Plan to provide advice on board of director's compliance in agreement with party third has been included in the 2022 PT NINDYA KARYA (Persero) board of commissioners' work plan and budget c. The work plan of the Board of Commissioners regarding the implementation of a review of complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners has been included in the work plan and budget of the board of commissioners of PT NINDYA KARYA (Persero) in 2022 d. The submission of the board of commissioners' annual work plan and budget to the board of directors to be included as part of the 2022 RKAP has been submitted on time.
IV	Direksi Board of Directors	
	a. membuat laporan pelatihan b. penyampaian rancangan RJPP kepada Pemegang Saham sebelum tanggal 31 oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan c. penyampaian laporan pencapaian kinerja perusahaan kepada dewan komisaris agar disampaikan tepat waktu d. tingkat pencapaian target kinerja anggota direksi (individu) dibuat; e. nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia f. indikator kinerja individu dan target agar ditetapkan oleh atasan langsung; g. membuat penilaian secara membuat laporan berkala atas kinerja karyawan; h. membuat laporan internal control	a. Telah dibuat laporan pelatihan direksi b. penyampaian laporan pencapaian kinerja perusahaan kepada dewan komisaris telah disampaikan tepat waktu c. penilaian KPI direksi individu sedang dalam proses d. HPS dapat dilihat oleh peserta lelang yang diundang berdasarkan daftar rekanan terseleksi (DRT) PT NINDYA KARYA (Persero) e. Indikator kinerja individu dan target telah ditetapkan oleh atasan langsung sesuai surat keputusan direksi PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0042/DIRUT/KPTS/DHC/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Sistem Penilaian Kinerja Berbasis KPI PT NINDYA KARYA (Persero) f. sedang dalam proses pembuatan laporan penilaian secara berkala atas kinerja karyawan g. sedang dalam proses pembuatan laporan internal control
	a. make training report b. delivery of RJPP draft to Shareholders befor October 31st, before current year RJPP period c. timely delivery of company performance achievement report to the board of commissioners d. establish level achievement of performance targets member directors (individual); e. HPS total score should be open and not confidential f. individual performance indicator and targets to be set by direct superiors; g. make periodical evaluation report on employee performance; h. make internal control report	a. Director's training report has been made b. the submission of reports on the company's performance achievements to the board of commissioners has been submitted on time c. KPI assessment of individual directors is in progress d. HPS can be seen by invited bidders based on the list of selected partners (DRT) PT NINDYA KARYA (Persero) e. Individual performance indicators and targets have been set by the direct supervisor in accordance with the decision letter of the directors of PT NINDYA KARYA (Persero) No. 0042/DIRUT/KPTS/DHC/04/2021 dated 20 April 2021 concerning PT NINDYA KARYA (Persero) KPI-Based Performance Assessment System f. periodic evaluation reports on employee performance is in development g. internal control report is in development

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2020	Status Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2021 Follow Up Status By the end of 2021
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency a. membuat rencana kegiatan untuk pertemuan/gathering dengan stakeholders; b. pertemuan gathering dengan stakeholders agar dilaksanakan; c. annual report agar mencantumkan komite nominasi dan remunerasi	a. telah dibuatkan rencana kegiatan untuk pertemuan/gathering dengan stakeholders b. telah dilaksanakan pertemuan gathering dengan stakeholders c. Mencantumkan komite nominasi dan remunerasi dalam annual report
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	a. an activity plan has been made for meetings/gathering with stakeholders b. a gathering meeting with stakeholders has been held c. The nomination and remuneration committee has been included in the annual report

Perkembangan Assessment Penerapan GCG

Perusahaan melakukan assessment terhadap penerapan GCG secara periodik. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk dapat terus melakukan pemantauan terhadap penerapan GCG. Berikut disampaikan perkembangan assessment penerapan GCG selama 5 (lima) tahun terakhir:

Development of GCG Implementation Assessment

The company conducts periodic assessments of the implementation of GCG. This shows the Company's commitment to be able to continue to monitor the implementation of GCG. The following is the progress of the GCG implementation assessment for the last 5 (five) years:

Jenis Pengukuran Measurement Type	Tahun Ukur Assessment Year	Accessor Accessor	Skor (%) Score (%)							Predikat Rating
			Aspek I Aspect I	Aspek II Aspect II	Aspek III Aspect III	Aspek IV Aspect IV	Aspek V Aspect V	Aspek VI Aspect VI	Jumlah Total	
Self Assessment	2017	Tim Self Assessment Nindya Karya Nindya Karya Self-Assessment Team	6,385	7,649	31,422	32,125	7,930		85,510	Sangat baik Very good
Assessment	2018	BPKP	6,367	7,734	31,413	33,039	7,963	3,125	89,641	Sangat baik Very good
Self Assessment	2019	Tim Self Assessment Nindya Karya Nindya Karya Self-Assessment Team	6,816	7,750	31,668	33,205	7,757	2,500	89,696	Sangat baik Very good
Assessment	2020	BPKP	6,740	7,494	31,564	33,032	8,463	2,500	89,793	Sangat baik Very good
Self Assessment	2021	Tim Self Assessment Nindya Karya Nindya Karya Self-Assessment Team	6,759	7,717	31,576	33,051	8,479	2,500	90,082	Sangat baik Very good

Keterangan:
Details:

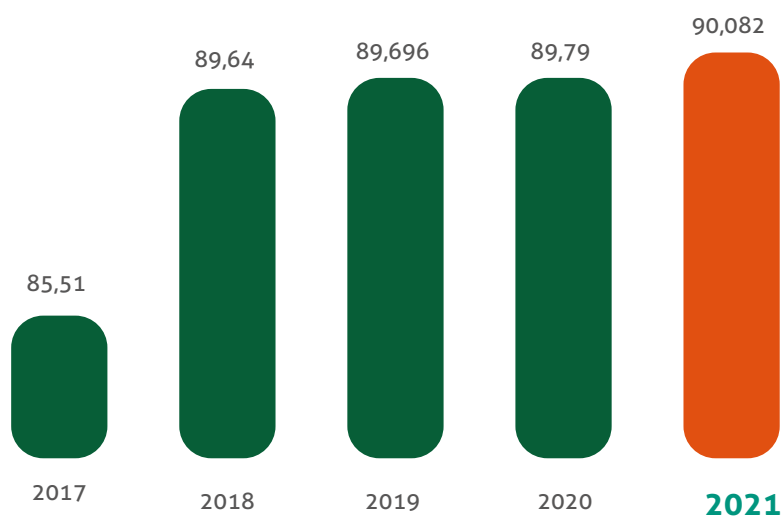
Aspek I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
Aspek II	Pemegang Saham/RUPS	Shareholders/GMS
Aspek III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	Board of Commissioners/Supervisory Board
Aspek IV	Direksi	Board of Directors
Aspek V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	Disclosure of Information and Transparency
Aspek VI	Aspek lainnya	Other Aspects

Perkembangan Skor Assessment GCG 2017-2021

GCG Assessment Score Development 2017-2021 GCG Assessment Score Development 2017-2021

Tahun Year	Skor Score	Keterangan Description
2017	85,51	Sangat Baik Very good
2018	89,64	Sangat Baik Very good
2019	89,696	Sangat Baik Very good
2020	89,79	Sangat Baik Very good
2021	90,082	Sangat Baik Very good

Perkembangan Skor Assessment GCG 2017-2021
Development of GCG Assessment Score 2017-2021



Organ Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Organ

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang Saham

Berdasarkan surat keputusan para pemegang saham PT NINDYA KARYA (Persero) akta No. 13 tanggal 06 Desember 2021 Perihal Perubahan Anggaran Dasar PT NINDYA KARYA (Persero) terdapat perubahan modal dasar dan modal disetor. Dalam hal ini yang mana modal dasar tersebut :

Semula:

1. 238.000 lembar saham seri A Dwi Warna dengan nominal Rp1.000.000/lembar saham
2. 7.500.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp84.882/lembar

Menjadi:

1. 1 lembar saham seri A Dwi warna dengan nominal Rp1.000.000/lembar saham
2. 237.999 lembar saham seri C dengan nominal Rp1.000.000/lembar saham
3. 7.500.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp84.882/lembar

Sedangkan modal disetor terdapat perubahan jenis dan nominal saham sebagai berikut:

Semula:

1. 59.500 lembar saham Seri A Dwi Warna dengan nominal RP1.000.000/lembar saham atau sejumlah Rp59.500.000.000,-
2. 5.890.500 lembar saham Seri B dengan nominal Rp84.882/lembar saham atau sejumlah Rp499.997.421,-

Menjadi:

1. 1 lembar saham Seri A Dwi Warna dengan nominal Rp1.000.000/lembar saham
2. 5.890.500 lembar saham Seri B dengan nominal Rp84.882/lembar saham
3. 59.499 lembar saham Seri C dengan nominal Rp1.000.000/lembar saham

Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)

Shareholders

By letter holder 's decision PT NINDYA KARYA (Persero) shares deed no 13 dated 6 December 2021 Change The Articles of Association of PT NINDYA KARYA (Persero) are: changes in authorized capital and paid-up capital. In Thing which is the basic capital those :

Originally :

1. 238,000 pieces share series A Dwi Color with a nominal value of Rp1,000,000/share share
2. 7,500,000 pieces share series B with nominal value Rp84,882/share

Be :

1. 1 sheet share series A Dwi color with a nominal value of Rp1,000,000/share share
2. 237,999 sheets share series C with a nominal value of Rp1,000,000/share share
3. 7,500,000 pieces Series B shares with nominal value Rp84,882/share

While the paid-up capital there is change types and nominal shares as following :

Originally :

1. 59,500 sheets Series A Dwi. shares Color with a nominal value of Rp1,000,000/sheet share or in the amount of Rp59,500,000,000,-
2. 5,890,500 sheets Series B shares with a nominal value of Rp84,882/share share or a total of Rp499.997.421,-

Be :

1. 1 sheet Series A Dwi. shares Color with a nominal value of Rp1,000,000/sheet share
2. 5,890,500 sheets Series B shares with a nominal value of Rp84,882/share share
3. 59,499 sheets Series C shares with a nominal value of Rp1,000,000/share share

Komposisi Pemegang Saham Nindya Karya Per 31 Desember 2021

Nindya Karya Shareholders' Composition As of December 31, 2021



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan.

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, RUPS memiliki kewenangan selain daripada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar kepada Direksi dan Komisaris. Pada BUMN berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara, RUPS diwakili oleh Menteri. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan merupakan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan, karena aset/kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan.

General Meeting of Shareholders (GMS)

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GMS is a corporate organ that has authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or the Company's Articles of Association. Decisions taken at the GMS must be based on the long-term business interests of the Company.

By taking into account the provisions of the articles of association and the prevailing laws and regulations, the GMS is a forum for Shareholders to make important decisions related to the capital invested in the Company.

The GMS and/or Shareholders may not intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners without reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Company's Articles of Association and laws and regulations, including replacing or dismissing members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

Based on article 75 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the GMS has the authority other than the authority granted by the Act and the Articles of Association to the Board of Directors and Commissioners. In BUMN based on Article 14 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, the GMS is represented by the Minister. Based on article 6 paragraphs 1 and 2 of Law No. 17 of 2003 concerning State Finances, the President as Head of Government holds the power to manage State finances as part of the Government's power, because SOE assets/wealth are separated state assets, this power is delegated to the Minister of Finance.

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Kewenangan Menteri Keuangan bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Dengan kewajiban Menteri BUMN untuk melaporkan kepada Menteri Keuangan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP.
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan antara lain untuk:
 - a. Dividen kepada Pemegang Saham.
 - b. Cadangan.
 - c. Program Kemitraan dan Bina lingkungan.
4. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun individu atas Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan.
8. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Dewan Komisaris.
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris.
11. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.
12. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.
13. Membubarkan atau melikuidasi Perusahaan.

Ruang lingkup hak dan tanggung jawab Pemegang Saham Perusahaan tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdiri dari:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan.
3. Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen).
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS luar Biasa bila dipandang perlu sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Mengalihkan kepemilikan saham Perusahaan

However, based on Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties and Authorities of the Minister of Finance in Limited Liability Companies (Persero), Public Companies (Perum) and Service Companies (Perjan) to the State Minister for State-Owned Enterprises. The authority of the Minister of Finance in the field of fostering and supervising SOEs is partially delegated to the Minister of SOEs. With the obligation of the Minister of SOEs to report to the Minister of Finance in the following matters:

1. Approve or reject the RJPP and RKAP.
2. To determine the calculation of the company's profit allocation, among others, for:
 - a. Dividends to Shareholders.
 - b. reserve.
 - c. Partnerships and community development program.
4. Appoint and dismiss the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Set performance targets for each Board of Directors and Board of Commissioners.
6. Conduct collective and individual performance appraisals of the Board of Directors and the Board Commissioner.
7. Appoint an external auditor to audit the Company's financial statements.
8. Determine the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
9. Establish policies regarding possible conflicts of interest related to Board of Commissioners.
10. Determine the maximum number of positions on the Board of Commissioners that may be held concurrently by a person Board of Commissioners.
11. Determine the maximum number of positions of the Board of Commissioners that the Board of Directors may hold concurrently in Subsidiaries.
12. Delegating to the Board of Commissioners regarding the division of duties and authorities members of the Board of Directors.
13. Dissolve or liquidate the Company.

The scope of the rights and responsibilities of the Shareholders of the Company is stated in the Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, consisting of:

1. Attend the GMS and vote at the GMS.
2. Obtain material information (including the right to ask questions) both from the Board of Commissioners and Directors regarding finance or other matters concerning the Company.
3. Obtaining a share of the Company's profits (dividends).
4. Holding a GMS in the event that the Board of Directors and/or the Board of Commissioners fail to convene Annual GMS and from time to time request the holding of an Extraordinary GMS if deemed need to be in accordance with the Articles of Association.
5. Transferring share ownership of the Company Types,

Jenis, Wewenang dan Batasan RUPS

Authorities and Limits of the GMS

Jenis-jenis Pelaksanaan RUPS

Types of GMS Implementation

RUPS TAHUNAN ANNUAL GMS	RUPS LAINNYA OTHER GMS
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi: 1. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan Laporan Tahunan; 2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan The Annual General Meeting of Shareholders is held annually, including: 1. General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Annual Report; 2. Annual General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Company's Work Plan and Budget	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan An Extraordinary General Meeting of Shareholders can be held at any time based on the need for the benefit of the Company

Rapat Umum Pemegang Saham:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan;
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

General Meeting of Shareholders:

1. The Annual General Meeting of Shareholders to approve the Annual Report is held at least no later than June after the closing of the relevant financial year;
2. Annual General Meeting of Shareholders to approve the Work Plan and Budget The company is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (Fiscal year of the relevant Company's Work Plan and Budget).

An Extraordinary General Meeting of Shareholders may be held at any time based on the need for the benefit of the Company.

Mekanisme dan Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, mekanisme dan tahapan penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persiapan rapat:
 - a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
 - c. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - d. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Mechanisms and Stages of Holding GMS

Based on the Company's Articles of Association, the mechanism and stages of holding the GMS is as follows:

1. Meeting preparation:
 - a. Invitation to the General Meeting of Shareholders is made within a period of no later than 14 (fourteen) days before the date of the General Meeting of Shareholders held, without taking into account the date of the summons and the date of the Meeting General Shareholders.
 - b. Summons for the General Meeting of Shareholders shall be made by letter registered and/or with advertisements in newspapers.
 - c. In the invitation to the General Meeting of Shareholders, the date, time, place and agenda of the meeting accompanied by a notification that the materials to be discussed in the General Meeting of Shareholders available at the Company's office since the date of the summons for the General Meeting of Shareholders until the date the General Meeting of Shareholders is held.
 - d. All General Meetings of Shareholders are held at the domicile of the Company or at the place where the Company conducts its main business activities which located in the Territory of the Republic of Indonesia.

e. Tidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS Luar Biasa jika semua peserta RUPSLB sudah mengetahui menyetujui dan menyatakan dapat hadir. 2. Pelaksanaan rapat: - RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemegang Saham. - RUPS diawali dengan pembacaan tata tertib RUPS. - RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS. - Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS. 3. Pengambilan keputusan: - Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil. - Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah. 4. Pendokumentasian hasil RUPS: - Sekretaris Perusahaan atau Notaris membuat risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS. - Risalah RUPS harus ditandatangani Ketua rapat dan Pemegang Saham. - Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris. - Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan. 5. RUPS Sirkuler: - Pemegang Saham dapat melaksanakan RUPS secara sirkuler. - Syarat dan ketentuan pelaksanaan RUPS sirkuler ditetapkan oleh Pemegang Saham.	e. There is no need to make a written summons for the Extraordinary GMS if all participants The EGMS has acknowledged that it has agreed and stated that it can attend. 2. Meetings: - GMS is chaired by Shareholders or authorized with substitution rights by Shareholders. - The GMS begins with the reading of the GMS rules and regulations. - The GMS discussed issues that had been determined in the agenda of the GMS. - Additional agenda of the GMS can be discussed if approved by the GMS. 3. Decision-making: - Decision making in the GMS is carried out through the following procedures: transparent and fair. - GMS decisions are taken based on deliberation to reach consensus in accordance with The applicable laws and regulations. - In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached Decisions are made based on the majority of the valid votes. 4. Documentation of GMS results: - The Corporate Secretary or Notary shall prepare the minutes of the GMS in every holding of the GMS. - The minutes of the GMS must be signed by the Chairperson of the meeting and the Shareholders. - The signing of the minutes of the GMS is not required if the minutes are made with Notary Minutes. - Minutes of the GMS must be documented and kept by the Corporate Secretary. 5. Circular GMS: - Shareholders may conduct the GMS in a circular manner. - The terms and conditions for the implementation of the circular GMS are determined by the Shareholders.

Dikarenakan status Perusahaan sebagai BUMN yang bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, dalam melaksanakan agenda kegiatan RUPS Perusahaan memiliki ketentuan kuorum sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua
- Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum

Due to the Company's status as a BUMN that is responsible to the holder Shares, in carrying out the agenda of the GMS activities, the Company has a quorum provision as follows:

- The General Meeting of Shareholders can be held if at the General Meeting Shareholders at least 51% (fifty one percent) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the laws and/or articles of association specify otherwise
- In the event that the quorum as referred to in point 1 is not reached, then it can be summons to the second General Meeting of Shareholders was held
- In the summons for the second General Meeting of Shareholders, it must be stated that the Meeting The first General Shareholders' Meeting was held and did not reach a quorum

4. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh dahan dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain
5. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada angka 4 ini tidak tercapai, Perusahaan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga
6. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
7. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan
8. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling capat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

4. The second General Meeting of Shareholders as referred to in number 3 is valid and has the right to make decisions if at the General Meeting of Shareholders at least 50% (fifty percent) of the total number of branches with voting rights present or represented, unless the Articles of Association specify otherwise
5. In the event that the quorum of the second General Meeting of Shareholders as referred to in number 4 is not achieved, the Company may apply to the Chairman of the District Court whose jurisdiction covers the domicile of the Company upon application Company to establish a quorum for the third General Meeting of Shareholders
6. In the summons for the third General Meeting of Shareholders it must be stated that: The second General Meeting of Shareholders was held and did not reach a quorum, and the third General Meeting of Shareholders will be held with a quorum has been determined by the Chief Justice of the District Court
7. The summons for the second and third General Meeting of Shareholders shall be made within a period of no later than 7 (seven) days before the second General Meeting of Shareholders or third held
8. The second and third General Meetings of Shareholders are held within a period of no later than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the date the General Meeting of Shareholders which precedes it is held.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak menutup kemungkinan Perseroan melaksanakan kegiatan RUPS LB. Dengan mengacu pada UU No.40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (1), Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPS LB dengan didahului pemanggilan RUPS.

In carrying out its business activities, it is possible for the Company to carry out EGMS activities. With reference to Law No. 40 of 2007 Article 79 paragraph (1), the Board of Directors has the function and authority to hold an Extraordinary GMS preceded by an invitation to the GMS.

Namun, RUPS LB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. Pemegang Saham yang dimaksud dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permintaan tersebut diajukan oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Tembusan dari surat tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

However, the EGMS can also be held at the request of the Shareholders or the Board of Commissioners. The Shareholders in question may consist of 1 (one) or more persons who together represent 1/10 of the total number of shares with voting rights. The request is submitted by the Shareholders or the Board of Commissioners to the Board of Directors by registered letter with the reasons. A copy of the letter is submitted to the Board of Commissioners.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam agenda RUPS yang dijalankan, Perusahaan memiliki mekanisme pemungutan suara untuk mencapai sebuah keputusan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

The decision-making mechanism in the GMS is carried out by deliberation for consensus. In the GMS agenda, the Company has a voting mechanism to reach a decision in accordance with the Company's Articles of Association.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perseroan mengadakan 2 (dua) kali RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Nindya Karya (Persero) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 pada tanggal 29 Januari 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya (Persero) tanggal 29 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut:

GMS Conducted in 2021

In 2021, the Company held 2 (two) GMS. The General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Nindya Karya (Persero) regarding the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021 on January 29, 2021 and the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Nindya Karya (Persero) on June 29 2021, with the following details:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Nindya Karya (Persero) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021

PT Nindya Karya (Persero) General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021 on January 29, 2021

Hasil Keputusan Decision	Realisasi Realization	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Dewan Komisaris Tahun 2021 Ratification of the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP) including the 2021 Board of Commissioners' Work and Budget Plan (RKAP)	Terlaksana Implemented	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) Tahun 2021 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Dewan Komisaris Tahun 2021 Approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021 including the 2021 Work Plan and Budget (RKAP) of the Board of Commissioners
Pengesahan rencana kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2021 Ratification of the work plan and Budget of the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) 2021	Terlaksana Implemented	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) tahun 2021 Approve the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility (RKA-TJSL) 2021
Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2021, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Determination of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors in 2021, which is contained in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Shareholders	Terlaksana Implemented	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Establish Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors in 2021 as set out in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders
Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Determination of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2021 as stated in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders	Terlaksana Implemented	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Establish Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2021 as set out in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders
Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021 Determination of Operational Aspect Indicators for Measurement of Company Soundness Level in 2021	Terlaksana Implemented	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2021 Establishing Operational Aspect Indicators for Health Level Measurement in 2021

Hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2021 serta tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan adalah sebagai berikut:

The results of the resolutions of the Annual GMS on June 29, 2021 and the follow-up actions by the Company's Management are as follows:

RUPS Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Nindya Karya (Persero) No. 50 tanggal 29 Juni 2021, terdapat beberapa arahan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

GMS Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Nindya Karya (Persero) No. 50 dated 29 June 2021, there were several directions given by the Board of Commissioners and Shareholders.

Hasil Keputusan Decision	Realisasi Realization	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
Arahan dari Dewan Komisaris Directions from the Board of Commissioners		
Dewan Komisaris memahami opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dengan paragraf penjelasan Modified Unqualified Opinion yang diberikan Kantor Akuntan Publik. Namun disarankan agar Direksi melakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya terutama dengan adanya rencana Initial Public Offering (IPO) atau kredit perbankan. The Board of Commissioners understands the opinion of "Reasonable Without" Exceptions" (WTP) with explanatory paragraphs Modified Unqualified Opinion given by the Public Accountant. However, it is recommended that the Board of Directors identify whether there is an effect especially with the initial public plan Offering (IPO) or bank credit.	Terlaksana Implemented	Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan tidak mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, baik ke perbankan maupun terkait rencana IPO Perusahaan dikarenakan opini ini diberikan akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan disclosure dalam laporan audit, hal ini tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Unqualified Opinion with explanatory paragraph does not affect the company's operational activities, both to banking and related to the Company's IPO plan because this opinion is given due to certain circumstances that require the auditor to add disclosure in the audit report, this does not affect the unqualified opinion stated by the auditor

RUPS Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Nindya Karya (Persero) No. 50 tanggal 29 Juni 2021, terdapat beberapa arahan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

GMS Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Nindya Karya (Persero) No. 50 dated 29 June 2021, there were several directions given by the Board of Commissioners and Shareholders.

Hasil Keputusan Decision	Realisasi Realization	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi selaku kuasa pemegang saham Perseroan pada PT Nindya Beton agar segera mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Nindya Beton untuk menyepakati aksi korporasi termasuk namun tidak terbatas terkait strategi, langkah, tahapan, konsekuensi hukum, operasional dan biaya terkait restrukturisasi PT Nindya Beton agar berlangsung efektif, efisien serta dalam waktu yang relatif singkat. The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors as proxy of the Company's shareholders at PT Nindya Concrete to immediately submit a General Meeting Extraordinary Shareholders (EGMS) PT Nindya Concrete for agreeing on corporate actions including but not limited to strategies, steps, stages, legal, operational and costs related to the restructuring of PT Nindya Beton so that take place effectively, efficiently and in a short relatively timely manner.	Terlaksana Implemented	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 yang dihadiri oleh para pemegang saham yaitu PT Nindya Karya (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk membahas restrukturisasi PT Nindya Beton. RUPS tersebut memutuskan perubahan struktur organisasi PT Nindya Beton, di mana perubahan struktur organisasi tersebut menjadi langkah awal restrukturisasi PT Nindya Beton. Kajian lanjutan akan dilakukan terkait perubahan lain seperti perubahan core business PT Nindya Beton. The General Meeting of Shareholders (GMS) was held on October 1, 2021 which was attended by shareholders namely PT Nindya Karya (Persero) and PT Asset Management Company (Persero) to discuss the restructuring of PT Nindya Beton. the GMS decision to change the organizational structure of PT Nindya Beton, where the change in organizational structure becomes the first step in the restructuring of PT Nindya Beton. Further studies will be made related to other changes such as changes to the core business PT Nindya Beton.
Dewan Komisaris mendukung diterapkannya Enterprise Resource Planning (ERP) agar pengelolaan Perseroan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun ERP selain membutuhkan biaya yang tidak murah dan juga tidak mudah dalam membangun dan menerapkannya. Untuk itu perlu komitmen yang kuat dan dukungan yang konsisten dari seluruh pihak terutama top management. The Board of Commissioners supports the Enterprise Resource Planning (ERP) implementation for management. The company becomes more effective and efficient. However ERP in addition to requiring costs that are not cheap and also not easy to build and apply it. This requires a strong commitment and consistent support from all parties especially top management.	Terlaksana Implemented	Enterprise Resource Planning (ERP) PT Nindya Karya (Persero) adalah tailor made di mana PT Nindya Karya membangun sendiri dan disesuaikan dengan SOP Perusahaan sehingga tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Sesuai dengan instruksi dari KBUMN bahwa seluruh BUMN Karya diharapkan dapat melakukan soft go live ERP pada kurun waktu tahun 2020-2021, top management termasuk di dalamnya BOD dan BOD-1 PT Nindya Karya sesuai dengan instruksi tersebut memastikan bahwa ERP Go Live telah terlaksana pada tanggal 16 Agustus 2021 dan memberikan komitmen penuh atas ERP. PT Nindya Karya (Persero)'s Enterprise Resource Planning (ERP) is tailor-made where PT Nindya Karya builds its own and is adjusted to the Company's SOPs so that it does not require too large a fee. In accordance with the instructions from KBUMN that all BUMN Karya are expected to be able to soft go live ERP in the period 2020-2021, top management including BOD and BOD-1 PT Nindya Karya in accordance with these instructions ensure that ERP Go Live has been implemented on August 16, 2021 and gave full commitment to ERP.
Implementasi Teknologi Informasi agar dapat dijalankan secara efektif dan keamanan atas data dapat terjaga, Dewan Komisaris menyarankan agar terus menjaga seluruh aktivitas Teknologi Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta secara rutin kebijakan dan prosedur tersebut dievaluasi. Implementation of Information Technology in order to run effectively and data security can be maintained, the Board of Commissioners recommends that continue to maintain all Information Technology activities in accordance with the policies and procedures that have been established and routinely policies and procedures is evaluated.	Terlaksana Implemented	Kami berkoitmen untuk menjalankan tata kelola IT yang baik berbasis pada framework COBIT 2019 adapun sesuai hasil Assesment IT Maturity level PT Nindya Karya berada pada level 3.33 (define). Selain itu kami juga berkomitmen untuk terus comply terhadap ISMS (Information Security Management System) berdasarkan pada ISO/IEC 27001:2013, di mana pada triwulan IV 2021 PT Nindya Karya berhasil mendapatkan sertifikat dengan 0 minor 0 major. Untuk dapat berkomitmen penuh PT Nindya Karya juga memiliki IT Steering Committee dan Information Security Forum. We are committed to implementing good IT governance based on the COBIT 2019 framework as for the results PT Nindya Karya's IT Maturity assessment level is at level 3.33 (define). In addition, we are also committed to continuing to comply with the ISMS (Information Security Management System) based on ISO/IEC 27001:2013, where in the fourth quarter of 2021 PT Nindya Karya managed to get a certificate with 0 minor 0 major. To be fully committed, PT Nindya Karya also has an IT Steering Committee and Information Security Forum.

Informasi tentang Hasil Keputusan RUPS 2020 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Pada tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yakni RUPS RKAP Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 dan RUPS Tahunan 2020 pada tanggal 02 Juli 2020.

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai manajemen Puncak Perseroan hadir dalam kedua RUPS tersebut.

Hasil keputusan RUPS di tahun 2020 dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

Rups Tahunan 2020 Pengesahan Rkap Akta No. 25 Tanggal 22 Januari 2020 Agenda Dan Hasil Keputusan

Annual GMS 2020 Approval Of Rkap Deed No. 25 January 22, 2020 Agenda And Decision Results

Hasil Keputusan Decision	Realisasi Realization	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020. Ratification of the 2020 Partnership and Community Development Program Work Plan and Budget (RKA PKBL)	Terlaksana Implemented	Menyetujui RKA-PKBL tahun 2020 Approved the 2020 RKA-PKBL
Pengesahan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Tahun 2020 Approval of Operational Aspect Indicators for assessment 2020 Company health level	Terlaksana Implemented	Mengesahkan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Tahun 2020. Approve Operational Aspect Indicators for Company Health Level Rating Year 2020.
Penetapan Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020 Determination of 2020 Management Contract between Proxies Shareholders with the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2020	Terlaksana Implemented	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020. kuasa 2020. Establishing the 2020 Management Contract between power of attorney of the Shareholders with the Board of Directors and the Board Commissioners and Key Performance Indicators (KPI) Board of Commissioners 2020.

Rups Tahunan 2020 Pengesahan Laporan Keuangan Audited 2020 Akta No. 06 Tanggal 02 Juli 2020 Agenda dan Hasil Keputusan

Annual GMS 2020 Approval of The 2020 Audited Financial Statements Deed No. 06 Date July 02, 2020 Agenda and Decision Results

Hasil Keputusan Decision	Realisasi Realization	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements as well as the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2019 financial year, as well as granting full discharge and discharge (Volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Management and Supervision Actions that have been carried out during the Year 2019 book	Terlaksana Implemented	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 00047/2.1030/AU.1/03/0181-2/11/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan dan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang Tahun Buku 2019 sejauh Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report carried out by the Board of Commissioners for the 2019 Fiscal Year and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto and Partners, as contained in their report number 00047/2.1030/AU.1/03/0181-2/11/2020 dated February 10, 2020 with the opinion "reasonable, in all material respects" and provide full settlement and release of responsibility (Volledig acquit et de charge) to all members The Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the actions and supervision that have been carried out throughout the 2019 Fiscal Year to the extent that these actions are not criminal acts and these actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 Fiscal Year

Rups Tahunan 2020 Pengesahan Laporan Keuangan Audited 2020 Akta No. 06 Tanggal 02 Juli 2020 Agenda dan Hasil Keputusan

Annual GMS 2020 Approval of The 2020 Audited Financial Statements Deed No. 06 Date July 02, 2020 Agenda and Decision Results

Hasil Keputusan Decision	Realisasi Realization	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by Management
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada Dierksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 Approval of the Annual Report including the Financial Report of the Partnership and Community Development Program for the 2019 Fiscal Year, as well as the Granting of Full Settlement and Release of Liability (Volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Management and Supervision of the Partnership and Community Development Program that has been carried out for 2019 book year	Terlaksana Implemented	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Rekan sesuai Laporan Nomor 00052/2.1030/AU.2/12/0181.-2/1/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan PKBL Tahun Buku 2019. Approved and ratified the 2019 PKBL Implementation Annual Report which was audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto and Partners in accordance with Report Number 00052/2.1030/AU.2/12/0181.-2/1/II/2020 dated February 20, 2020 with the opinion "fair in all material respects" and giving full discharge and release of responsibility (Volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2019 financial year, so far such action is not a criminal act and such action is reflected in the 2019 PKBL Report.
Penetapan pemberian tantiem/insentif kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku 2019, dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 Determination of the provision of tantiem performance incentives to Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of the financial year 2019, and the determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board Commissioner of 2019	Terlaksana Implemented	Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2019. Granting authority to Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020 and Tantiem for Directors and Board of Commissioners for Performance for Fiscal Year 2019.
Penetapan kantor akuntan public untuk mengaudit Laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 dan laporan keuangan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan perseroan tahun buku 2020 Determination of a public accounting firm to audit the company's financial statements for the 2020 financial year and the financial statements for the implementation of the partnership and community development program for the 2020 financial year	Terlaksana Implemented	Menunjuk dan menetapkan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun buku 2020 Appoint and assign a Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 and Financial Statements of the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2020

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris memiliki batasan untuk tidak turut serta mengambil keputusan operasional kecuali dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama, adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris memiliki acuan yang tertuang dalam Board Manual yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero), dengan memberlakukan buku-buku pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan yang terdiri dari:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Revisi 0.4
2. Board Manual revisi 0.3
3. Pedoman Perilaku etika (*Code of Conduct*) Revisi 0.7
4. Pedoman Pelanggaran Whistle Blowing System Revisi 0.2
5. Pedoman Penanganan Gratifikasi Revisi 0.2
6. Pedoman Benturan Kepentingan Revisi 0.2

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-10/MBU/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, seseorang/pribadi dapat menjadi Dewan Komisaris Perusahaan harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lainnya.

1. Persyaratan formal
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the Company's Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors and ensuring that the Company has implemented GCG principles effectively. In fulfilling its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has limitations not to participate in making operational decisions except in certain circumstances and within a certain period of time as stipulated in the Articles of Association, and laws and regulations. The position of each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, is equal. Duties of the President Commissioner as *primus inter pares* is to coordinate the activities of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Work Guidelines

In carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners has a reference set out in the Board Manual which has been ratified through the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero), by enforcing the Company's Good Corporate Governance (GCG) guidebooks which consist of:

1. Code of Corporate Governance Revised 0.4
2. Board Manual revision 0.3
3. Code of Conduct Revised 0.7
4. Whistle Blowing System Violation Guidelines Revised 0.2
5. Guidelines for Handling Gratifications Revision 0.2
6. Conflict of Interest Guidelines Revision 0.2

Qualifications and Criteria for Members of the Board of Commissioners

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-10/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, a person/individual can become the Board of Commissioners of the Company must meet 3 (three) requirements, namely formal requirements, material requirements, and other requirements.

1. Formal requirements
 - a. Individuals;
 - b. Capable of carrying out legal actions;
 - c. Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination;

- d. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan/perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2. Persyaratan material

- a. Integritas;
- b. Dedikasi;

3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero/perum di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Persyaratan PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:

- a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau kepal/Wakil Kepala Daerah;
- c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- d. Sehat Jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
- e. Bagi Bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan
- f. Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

- d. Never been a member of the board of directors or a member of the board of commissioners/board supervisor who is found guilty of causing a company/public company to declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination; and
- e. Never been punished for committing a crime that caused financial loss state and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to candidacy.

2. Material requirements

- a. Integrity;
- b. Dedication;

3. Understand the company management issues related to wrong one management function; Have adequate knowledge in the field of Persero/Perum business where concerned is nominated; and Can provide sufficient time to carry out their duties. PER-10/MBU/10/2020 Requirements concerning Amendments to the Ministerial Regulation of the Agency State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Board of Supervisors of the Agency State Owned Enterprises.

Other requirements for members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board, namely:

- a. Not an administrator of a Political Party and/or a candidate for a member of the legislature and/or a member legislative. Candidates for legislative members or members of the legislature consist of candidates/members DPR, DPD, Level I DPRD, and Level II DPRD;
- b. Not a candidate for the head/deputy head of the region and/or the head/deputy head of the region;
- c. Not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in BUMN concerned for 2 (two) consecutive periods;
- d. Physically and spiritually healthy (not suffering from a disease that can hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners/Board supervisor), as evidenced by a health certificate from a doctor;
- e. For prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies, must based on a letter of recommendation from the relevant agency; and
- f. For Prospective Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board from: State administrators must report the Operator's Wealth Report State (LHKPN) for the last 2 (two) years as evidenced by Report Evidence LHKPN to the authorized institution.

Sumber bakal calon dewan komisaris/dewan pengawas BUMN berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah;
4. Sumber lain.

Kementerian BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Negara Republik Indonesia melakukan penjangkaran, penilaian, dan pengangkatan Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam Tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan Tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara
5. Dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
6. Mengundurkan diri
7. Masa jabatan yang bersangkutan berakhir.
8. Yang bersangkutan berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena pengunduran diri atau meninggal dunia atau diberhentikan oleh RUPS atau tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan Tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2021

Sesuai keputusan Pemegang Saham, di tahun 2021 tidak terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Sources of candidates for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs come from:

1. Former Directors of SOEs;
2. Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN;
3. Government structural and functional officials;
4. Other sources.

The Ministry of SOEs as the proxy for the State Shareholders of the Republic of Indonesia conducts screening, assessment, and appointment of the Board of Commissioners.

Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office for members of the Board of Commissioners is set for 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the decision of the GMS.

The dismissal of a member of the board of commissioners is carried out if based on the facts, the member of the board of commissioners concerned includes, among others:

1. Unable to carry out their duties properly;
2. Not implementing the provisions of laws and/or provisions Articles of Association;
3. Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
4. Doing actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises
5. Found guilty by a court decision that has permanent legal force
6. Resign
7. The term of office in question ends.
8. The person concerned quits before the term of office ends due to resignation or dies or is dismissed by the GMS or no longer meets the requirements current regulation.
9. Doing a Violating Action ethics and/or proper propriety respected as member of the Board of Commissioners of SOEs.

Composition and Composition of the Board of Commissioners in 2021

In accordance with the decision of the Shareholders, in 2021 there was no change in the composition of the Board of Commissioners. In 2021, there is no change in the composition of the membership of the Board of Commissioners. Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2021 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Length of service	Periode Jabatan Term of Office
Sugiyartanto	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 dan No. KEP-PS 06/PPA/0919 tanggal 13 September 2019 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 and No. KEP-PS 06/PPA/0919 dated September 13, 2019	13 September 2019- RUPS 2024 September 13, 2019- AGM 2024	Periode ke-1 1st period
Rika Kiswardani	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-06/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-06/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated January 6, 2020	6 Januari 2020-RUPS 2025 January 6, 2020-AGM 2025	Periode ke-1 1st period
Andar Perdana Widiastono	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-308/MBU/12/2018 dan No. SK-78/PPA/1218 tanggal 26 Desember 2018 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-308/MBU/12/2018 and No. SK-78/PPA/1218 dated December 26, 2018	26 Desember 2018- RUPS 2023 26 December 2018- 2023 AGM	Periode ke-1 1st period

Profil masing-masing Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The profile of each Board of Commissioners can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of the Company Profile chapter in this annual report.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the general course of management both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget as well as the provisions of the Articles of Association and GMS Resolutions, and applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Tugas dan Kewajiban Umum

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Selalu tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan RUPS.
- Beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
- Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi termasuk mengenai rencana Jangka Panjang Perusahaan, rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham, perjanjian dengan pihak-pihak ketiga/terkait meliputi dengan pihak Bank, JO, JV, leveransir, supplier dan vendor termasuk peraturan perundang-undangan.
- Mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
- Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP dan menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

General Duties and Responsibilities

The powers of the Board of Commissioners are as follows:

- Always comply with the provisions of the Legislation and/or the Company's Articles of Association as well as the resolutions of the GMS.
- In good faith and full of responsibility in carrying out duties for the interests and business of the Company.
- Perform supervisory duties on the policies of the Board of Directors including the Company's Long-Term plan, Work plan and Company's Budget as well as the implementation of the provisions of the Articles of Association and Decisions of the General Meeting of Shareholders, agreements with third/related parties including with the Bank, JO, JV, suppliers. suppliers and vendors including statutory regulations.
- Reviewing and providing opinions regarding the RJPP and RKAP prepared by the Board of Directors before being jointly signed.
- Prepare annual work plans and budgets which are an integral part of the RKAP and submit reports on supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS.

6. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
7. Memantau dan memastikan efektivitas praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan Perseroan secara efektif dan berkelanjutan.
8. Bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan usaha Perseroan dan bertanggung jawab kepada Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh RUPS.

Terkait dengan RUPS

Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:

1. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan aktivitas kinerja Dewan Komisaris kepada RUPS.
2. Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana Pengembangan Perusahaan, rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan Tahunan. Dalam hal anggota Komisaris tidak menandatangani laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
7. Merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal kepada RUPS.

Terkait dengan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan dapat memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Anggota Komisaris dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern dan Ketepatan Laporan

Komisaris mempunyai kewajiban untuk:

1. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian Intern, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Satuan Pengawasan Intern.

6. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company and is not intended for the interests of certain parties or groups.
7. Monitor and ensure the effectiveness of Good Corporate Governance (GCG) practices implemented by the Company in an effective and sustainable manner.
8. Act from time to time for the Company's business interests and be responsible to the Company which in this case is represented by the GMS.

Related to GMS

In relation to the GMS, the Board of Commissioners has the duty and obligation to:

1. Report and account for the performance activities of the Board of Commissioners to the GMS.
2. Reporting the performance of the Board of Directors to the GMS.
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Development plan, the Company's Work plan and Annual Budget as well as its amendments and additions.
4. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company.
5. Report immediately to the GMS if there are symptoms of declining Company performance.
6. Researching and reviewing periodic reports and Annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report. In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the Annual report, the reasons must be stated.
7. Recommend the appointment of an External Auditor to the GMS.

Related to Risk Management

The Board of Commissioners has an obligation to carry out periodic assessments and can provide recommendations on risks and the implementation of risk management in the Company.

Related to Business Ethics and Anti-Corruption

Members of the Board of Commissioners are prohibited from receiving, giving or offering directly or indirectly anything of value to other parties to influence or as a reward for what they have done and other actions in accordance with the laws and regulations.

Related to Internal Control System and Report Accuracy

The Commissioner has the obligation to:

1. Reviewing the effectiveness of the Internal control system, by assessing the competence and number of resources, scope of duties and authorities as well as the independence of the Internal Audit Unit.

2. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal.
3. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
4. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan Keuangan dan Non-Keuangan Tahunan serta laporan Tahunan.

Kerahasiaan dan Keterbukaan Informasi

1. Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan.
2. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
3. Komisaris mengawasi agar Perseroan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
4. Komisaris memastikan agar Perseroan mengungkapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dalam Laporan Tahunan.

Terkait dengan Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
2. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja Dewan dan individu Komisaris dan Direksi kepada RUPS.

Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Direksi

1. Mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Direksi dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan.
2. Menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi
3. Melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi sebelum disampaikan ke Pemegang Saham
4. Mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon anggota Direksi dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan
5. Mengusulkan atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Rapat Umum Pemegang Saham
6. Mengusulkan agar terdapat rencana suksesi bagi Direksi.

2. Assessing the effectiveness of the External Auditor's duties, by assessing the Competence, Independence and scope of the External Auditor's duties.
3. Ensuring Internal Auditors, External Auditors have access to information about the Company needed to carry out their duties.
4. Assessing the accuracy of information prepared for other parties, particularly in the Annual Financial and Non-Financial reports and Annual reports.

Confidentiality and Disclosure of Information

1. The Commissioner is responsible to the Company for maintaining the confidentiality of the Company.
2. Confidential information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners must remain confidential in accordance with the provisions of the Legislation and/or Company regulations.
3. The Board of Commissioners supervises that the Company discloses important information in the Annual Report and Financial Statements to other parties in accordance with the laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
4. The Commissioner ensures that the Company discloses the implementation of Good Corporate Governance principles in the Annual Report.

Related to the Remuneration and Performance Evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors

1. Propose an appropriate remuneration system for members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the GMS.
2. Propose a performance evaluation system for the Board and individual Commissioners and Directors to the GMS.

Related to the Nomination and Selection of the Board of Directors

1. Propose a nomination and selection system for prospective members of the Board of Directors and submit it to the GMS for approval.
2. Establish policies and selection criteria for candidates for the Board of Directors
3. Conduct a study and/or research/examination of the candidates for the Board of Directors proposed by the Board of Directors before being submitted to the Shareholders
4. Propose a nomination and selection system for prospective members of the Board of Directors and submit it to the GMS for approval
5. Propose new candidates for members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders
6. Propose that there is a succession plan for the Board of Directors.

Pembagian Tugas dan Wewenang antar Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan surat keputusan dewan Komisaris PT NINDYA KARYA (Persero) No. SK-02/Kom/01/2021 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pembagian Tugas Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT NINDYA KARYA (Persero) adalah sebagai berikut.

Division of Duties and Authorities among Members of the Board of Commissioners

Based on the decision letter of the Board of Commissioners of PT NINDYA KARYA (Persero) No. SK-02/Kom/01/2021 dated January 04, 2022 regarding the Division of Duties of the Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT NINDYA KARYA (Persero) is as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Pengawasan Scope of Supervision
Sugiyartanto	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Utama, Sugiyartanto, bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang meliputi: 1. Memberikan masukan, arahan, dan mengintegrasikan masukan dari keempat bidang tugas, dalam rangka melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan, melakukan tugas secara khusus menurut Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta bertindak untuk kepentingan dan usaha Perseroan serta bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2. Menangani tugas bidang Tata Kelola Perusahaan yaitu memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi dalam rangka pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) secara terencana dan berkelanjutan. The President Commissioner, Sugiyartanto, is in charge of leading and coordinating the implementation of the duties of the Board of Commissioners which include: 1. Provide input, direction, and integrate inputs from the four task areas, in the context of supervising management policies and providing advice to the Board of Directors in carrying out management activities of the Company, performing specific duties according to the Company's Articles of Association, prevailing laws and regulations and/or based on Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as acting for the interests and business of the Company and being responsible to the General Meeting of Shareholders; 2. Handling the duties of the Corporate Governance field, namely providing input, direction, and recommendations in the context of managing the company carried out by implementing the principles of Good Corporate Governance in a planned and sustainable manner.
Rika Kiswardani	Komisaris Commissioner	Komisaris, Rika Kiswardani, menangani tugas bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi (TI), Pemasaran, Pengembangan Bisnis, dan Manajemen Risiko yang meliputi: 1. Memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi dalam rangka penyiapan penetapan dan penyesuaian struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan ditingkat Pusat dan Divisi; 2. Memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi atas kebijakan pemenuhan kebutuhan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi, profesional dan produktif, dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), yang kompetitif dan berorientasi pada pasar; 3. Bersama Anggota Komisaris lainnya, memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan calon Direksi Perusahaan dan atas usulan calon Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, kepada Menteri BUMN RI dan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku Pemegang Saham PT NINDYA KARYA (Persero) serta rekomendasi atas pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Sekper), Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Pejabat struktural inti (strategik) satu tingkat dibawah Direksi; 4. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka: a. Rencana Strategis TI yang mencakup Visi dan Misi TI, sasaran jangka pendek, Critical Success Factor, dan Key Performance Indicators (KPI); b. Penyusunan kebijakan, standar, dan prosedur pengembangan TI, dan SDM yang diterapkan di unit kerja. c. Memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi dalam rangka pemasaran, pengembangan bisnis yang meliputi: bidang Jasa konstruksi, EPC, Properti, Realiti dan Investasi Infrastruktur; d. Memberi masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka melakukan review, penelaah, dan evaluasi penetapan area risiko bisnis perseroan yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama disepakati dengan Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA (Persero).

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Pengawasan Scope of Supervision
		The Commissioner, Rika Kiswardani, handles the tasks of Human Resources (HR), Information Technology (IT), Marketing, Business Development, and Risk Management which include: 1. Provide input, direction, and recommendations in the context of preparing for the determination and adjustment of the company's overall organizational structure at the Central and Divisional levels; 2. Provide input, direction, and recommendations on policies to fulfill the need for the provision of competent, professional and productive Human Resources (HR), in order to increase efficiency and effectiveness as well as empower Human Resources (HR), which are competitive and market-oriented; 3. Together with other members of the Board of Commissioners, provide input, direction, and recommendations from the Board of Commissioners on the proposals of candidates for the Company's Directors and on the proposals of candidates for Commissioners and Directors of Subsidiaries, to the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia and the Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as Shareholders of PT NINDYA KARYA (Persero)) as well as recommendations on the appointment of the Corporate Secretary (Sekper), Head of Internal Control Unit (SPI) and core structural officers (strategic) one level below the Board of Directors; 4. Provide input, direction and recommendations in order to: a. IT Strategic Plan which includes IT Vision and Mission, short-term goals, Critical Success Factors, and Key Performance Indicators (KPI); b. Formulation of policies, standards, and procedures for the development of IT, and HR implemented in work units. c. Provide input, direction, and recommendations in the context of marketing, business development which includes: construction services, EPC, Property, Realty and Infrastructure Investment; d. Provide input, direction and recommendations in order to review, review, and evaluate the determination of the company's business risk areas carried out by the Board of Directors jointly agreed with the Board of Commissioners of PT NINDYA KARYA (Persero).
Andar Perdana Widiastono	Komisaris Commissioner	Komisaris, Andar Perdana Widiastono, menangani tugas bidang Keuangan, Investasi, Manajemen Risiko dan Produksi yang meliputi : 1. Memberi masukan, arahan, dan rekomendasi dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan, rekayasa, dan perkuatan struktur keuangan perusahaan, serta dalam rangka memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek Jasa Kontruksi, EPC, Properti, Realti dan Investasi Infrastruktur; 2. Memberi masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka penyusunan rencana perusahaan dan struktur keuangan yang mendukung pertumbuhan non organik, pembahasan laporan keuangan perusahaan tahunan dan triwulanan; 3. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka pengembangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi keuangan, pengendalian pinjaman serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dan transaksi keuangan; 4. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka review/evaluasi atas upaya pencegahan risiko sistemik dan non sistemik atas aktivitas investasi; 5. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka melakukan review, penelaah, dan evaluasi konsep kebijakan manajemen risiko yang disiapkan Direksi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA (Persero) sebelum kebijakan dijalankan; 6. Memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi pelaksanaan produksi baik proyek non Joint Operation maupun proyek Joint Operation dalam rangka pengendalian beban kontrak, waktu pelaksanaan serta pekerjaan tambah/kurang sehingga tercapai laba pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. The Commissioner, Andar Perdana Widiastono, handles the tasks of Finance, Investment, Risk Management and Production which include: 1. Give input, direction, and recommendation in skeleton set management, engineering, and reinforcement policies and strategies structure finance company, as well as in skeleton get the necessary funds for finance Construction Services, EPC, Property, Realty and Investment projects Infrastructure ; 2. Give input, directions and recommendations in skeleton composing plan company and structure financial support _ non-organic growth, discussion report finance company annual and quarterly ; 3. Give input, directions and recommendations in skeleton development, improvement efficiency and effectiveness management administration finance, control loan as well as utilization technology information in composing report finance and transactions finance ; 4. Give input, directions and recommendations in review/evaluation framework on effort prevention risk systemic and non-systemic on activity investment ; 5. Give input, directions and recommendations in skeleton conduct a review, review, and evaluation draft policy management prepared risk _ Directors and provide input to the Board of Commissioners of PT NINDYA KARYA (Persero) before policy executed ; 6. Give input, direction, and recommendation implementation production good project non-Joint Operation and Joint Operation project in skeleton control burden contract, time implementation as well as profession add/subtract so that achieved profit work that has been set by the company.

Program Pengenalan Perusahaan

Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan kegiatan pengenalan Perusahaan kepada Anggota Komisaris yang baru menjabat. Di tahun 2021, tidak terdapat program pengenalan Perusahaan, yang dikarenakan tidak adanya pergantian Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2021.

Company Introduction Program

The Company has a policy to carry out activities to introduce the Company to new members of the Board of Commissioners. In 2021, there will be no Company introduction program, due to the absence of a change in the Board of Commissioners throughout 2021.

Program Peningkatan Kompetensi

Agar Dewan Komisaris terus memperbaharui pengetahuannya akan industri konstruksi dan bisnis Nindya Karya, Perseroan memberikan program peningkatan kompetensi berupa seminar, workshop, atau kegiatan lainnya. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2021

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan pengawasan yang semakin efektif. Dewan Komisaris telah menyampaikan ringkasan kegiatan terkait pelaksanaan GCG di sepanjang tahun 2021. Informasi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Dewan Komisaris yang telah disampaikan sebelumnya di Bab Laporan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara garis besar adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Selain itu, posisi ini juga berperan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris ("Dekom") telah memberikan arahan/nasihat kepada Direksi/Manajemen dalam melaksanakan jalannya perusahaan selama tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola perusahaan sesuai dengan RJPP, RKAP, ketentuan AD dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan saran serta arahan yang dituangkan di dalam Tanggapan Dewan Komisaris atas RJPP maupun Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP.
2. Menelaah serta mereviu Laporan Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi baik Laporan Triwulanan maupun Laporan Tahunan. Hasil telaahan serta reviu atas laporan tersebut dituangkan di dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan ("Ragab") bersama Direksi. Sedangkan hasil telaahan serta reviu atas Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP"), maka Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan atas Laporan Tahunan Audited dan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan Persetujuan
3. Memberikan persetujuan *joint operation* serta pengagungan aset perusahaan berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, Palembang, Lampung, Denpasar, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat, dalam rangka mendapatkan pinjaman/kredit dan penyelesaian perpanjangan fasilitas hutang kreditur.

Competency Improvement Program

In order for the Board of Commissioners to continue to update their knowledge of the construction industry and Nindya Karya's business, the Company provides competency improvement programs in the form of seminars, workshops, or other activities. Regarding the competency improvement program to be participated in by the Board of Commissioners in 2021, see the Company Profile chapter in this Annual Report.

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2021

As part of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners continues to strive to encourage more effective supervision. The Board of Commissioners has submitted a summary of activities related to the implementation of GCG throughout 2021. This information is an integral part of the Report of the Board of Commissioners which was previously submitted in the Management Report Chapter of this Annual Report. The implementation of the duties of the Board of Commissioners in general is to supervise the management of the company carried out by the board of directors. In addition, this position also plays a role in providing advice regarding the policies of the board of directors in running the company.

In order to carry out the supervisory function, the Board of Commissioners ("BoC") has provided direction/advice to the Board of Directors/Management in carrying out the running of the company during 2021 as follows:

1. Carry out supervisory duties on the policies of the Board of Directors in managing the company in accordance with the RJPP, RKAP, AD provisions and GMS decisions, as well as laws and regulations. In addition, the Board of Commissioners has provided opinions and suggestions as well as directions as outlined in the Response of the Board of Commissioners to the RJPP and the Response of the Board of Commissioners to the RKAP.
2. Reviewing and reviewing the Company Reports submitted by the Board of Directors, both Quarterly Reports and Annual Reports. The results of the review and review of the report are contained in the minutes of the internal meeting of the Board of Commissioners and the Joint Meeting ("Ragab") with the Board of Directors. While the results of the review and review of the Annual Report which has been audited by the Public Accounting Firm ("KAP"), the Board of Commissioners has responded to the Audited Annual Report and proposed to the GMS for approval.
3. Approval for joint operations and collateral for company assets in the form of land and/or buildings located in the Special Capital Region of Jakarta, Central Java, East Java, West Java, North Sumatra, Riau, Palembang, Lampung, Denpasar, Banten, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, Papua and West Papua, in the context of obtaining loans/credits and completing the extension of creditor debt facilities.

4. Menghadiri serta memberikan arahan dan nasehat pada Rapat Kerja Nasional ("Rakernas") yang diselenggarakan oleh perusahaan yang dihadiri oleh Direksi dan segenap jajarannya serta memberikan arahan serta nasehat pada Ragab antara Dekom dengan Direksi yang diadakan minimal sekali dalam setiap bulan.
5. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* ("GCG") Perusahaan serta memperhatikan dan mengadakan perbaikan sesuai rekomendasi atas hasil assessment penerapan GCG pada PT NINDYA KARYA tahun 2020.
6. Melakukan telaah serta reviu dan memberikan rekomendasi atas penerapan Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, pengadaan, Mutu, Tata Kelola Perusahaan serta keluhan para pemangku kepentingan (stakeholders).
7. Meneliti dan menelaah atas laporan Komite Audit yang ada di bawah Dekom sebagai masukan atas tugas-tugas yang diberikan, yaitu memonitoring tindak lanjut atas hasil/temuan baik audit internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal ("SPI") maupun audit eksternal oleh KAP.
8. Memberikan arahan bukan saja dilakukan di dalam rapat-rapat bersama Direksi, namun juga diberikan saat dilakukan kunjungan ke wilayah maupun kunjungan lapangan, dan pada kondisi tertentu memberikan arahan, nasehat maupun pemeriksaan saat diperlukan
4. Attend and provide direction and advice at the National Working Meeting ("Rakernas") held by the company which is attended by the Board of Directors and all staff and provide direction and advice to the Ragab between the Board of Commissioners and the Board of Directors which is held at least once a month.
5. Monitor the effectiveness of the Company's *Good Corporate Governance* ("GCG") practices as well as pay attention to and make improvements according to the recommendations on the results of the GCG implementation assessment at PT NINDYA KARYA in 2020.
6. Conduct reviews and reviews and provide recommendations on the implementation of Risk Management, Information Technology, Human Resources, procurement, Quality, Corporate Governance as well as complaints from stakeholders.
7. Researching and reviewing the reports of the Audit Committee under the Board of Commissioners as input for the tasks assigned, namely monitoring the follow-up on the results/findings of both the internal audit conducted by the Internal Audit Unit ("SPI") and the external audit by the KAP.
8. Providing direction is not only carried out in meetings with the Board of Directors, but is also given during regional visits and field visits, and in certain conditions providing direction, advice and inspections when needed.

Komisaris Independen

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) di tubuh Dewan Komisaris maka Peraturan Perundangundangan yang berlaku mewajibkan perusahaan untuk menghadirkan Komisaris Independen di dalam susunan organ tersebut.

Susunan anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan 1 (satu) anggota sebagai Komisaris Independen. Komposisi Komisaris Independen di Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN yang menerangkan bahwa 20% komposisi Dewan Komisaris berasal dari independen.

Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Sdr. Zahirwan Marza sebagai Komisaris Independen PT NINDYA KARYA (Persero) di tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT NINDYA KARYA (Persero) No. SK-137/MBU/08/2015 dan KEP-PS 05/PPA/0815 tanggal 6 Agustus 2015, hingga saat ini belum ada jabatan pengganti sebagai Komisaris Independen PT NINDYA KARYA (Persero).

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan) yang dipilih secara transparan

Independent Commissioner

In order to prevent a conflict of interest within the Board of Commissioners, the prevailing laws and regulations require the company to present an Independent Commissioner in the composition of the organ.

The composition of the Board of Commissioners consists of 3 (three) members with 1 (one) member as the Independent Commissioner. The composition of the Independent Commissioners in the Company has complied with the provisions of the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of GCG in BUMN which explains that 20% of the composition of the Board of Commissioners comes from independent.

That with has expiry of term of office Mr. Zahirwan Marza as Commissioner Independent PT NINDYA KARYA (Persero) in 2020 who was appointed based on the Decision of the Shareholders of PT NINDYA KARYA (Persero) number: SK-137/MBU/08/2015 and KEP-PS 05/PPA/0815 dated 6 August 2015, until moment this not yet there is position replacement as Commissioner Independent PT NINDYA KARYA (Persero).

Criteria for Determining Independent Commissioners

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who come from outside the Company (not affiliated with the Company) who are selected transparently

dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Perseroan menerapkan kriteria Anggota Komisaris Independen sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi.
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di Departemen lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
3. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afliasinya.
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara di lingkup BUMN.

Persyaratan Independensi Komisaris Independen

Ketentuan mengenai independensi terbagi atas dua hal. Pertama adalah independensi yang dinyatakan dalam hal-hal yang bersifat administratif dan kepatuhan serta independensi yang dinyatakan pada kondisi sesungguhnya atas pribadi Calon Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam persyaratan pengangkatan Komisaris Independen.

Secara administratif, Calon Komisaris Independen diharuskan telah menyelenggarakan Daftar Khusus, menandatangani Pakta Integritas, dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagai bentuk komitmen menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Untuk Independensi Non Administratif, Calon Komisaris Independen dipastikan tidak memiliki hubungan darah ataupun ikatan perkawinan dengan satu sama lain hingga derajat ketiga baik secara vertikal maupun horizontal. Komisaris Independen tidak mempunyai benturan kepentingan secara pribadi terhadap hal-hal yang termaktub dalam RKAP 2021, dan Komisaris Independen berkomitmen tidak akan memanfaatkan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi.

and independently, have adequate integrity and competence, are free from influence related to personal interests or other parties, and can act objectively and independent by adhering to the principles of GCG.

The Company applies the criteria for Independent Commissioners in accordance with Article 13 of the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises:

1. Not serving as a Board of Directors in an affiliated company.
2. Has not worked for the Government, including in the Department, institutions, and the military within the last three years.
3. Have not worked in the relevant BUMN or affiliate within the last 3 (three) years.
4. Has no financial relationship, either directly or indirectly with the relevant BUMN or company that provides services and products to the BUMN concerned and its affiliates.
5. Free from other interests and activities or relationships that may hinder or interfere with the ability of Independent Commissioners who come from outside the relevant BUMN to act or think independently within the scope of the BUMN.

Independent Commissioner Independent Requirements

The provisions regarding independence are divided into two things. The first is independence which is stated in administrative and compliance matters as well as independence which is stated in the actual condition of the Candidate Independent Commissioner as stated in the requirements for the appointment of the Independent Commissioner.

Administratively, Candidates for Independent Commissioners are required to have held a Special Register, signed an Integrity Pact, and submitted a State Administrators Assets Report (LHKPN) and Personal Taxes Report (LP2P) as a form of commitment to avoid transactions that contain conflicts of interest.

For Non-Administrative Independence, Candidates for Independent Commissioners are confirmed to have no blood or marital ties to each other up to the third degree either vertically or horizontally. The Independent Commissioner does not have a personal conflict of interest on the matters contained in the 2021 RKAP, and the Independent Commissioner is committed not to use the Company either directly or indirectly for personal interests.

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan atas Perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Pedoman Kerja Direksi

Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kerja Direksi atau *Board Manual* sebagai pedoman bagi Direksi dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan Perseroan. *Board Manual* ini telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero), memberlakukan buku-buku Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan antara lain Board Manual Revisi 0.3.

Direksi yang menjabat hingga 31 Desember 2021 tetap menggunakan *Board Manual* tersebut karena dinilai masih relevan dengan perkembangan usaha Perusahaan dan efektif untuk menjadi panduan Direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasannya.

Board Manual yang dimiliki Perseroan memberikan acuan terkait beberapa hal mendasar bagi Direksi, yaitu:

1. Komposisi dan persyaratan Direksi
2. Tugas, wewenang, tanggung serta hak direksi
3. Penetapan kebijakan pengurusan perusahaan oleh direksi
4. Pendelegasian wewenang diantara anggota direksi perusahaan
5. Pembagian tugas direksi
6. Rapat direksi
7. Tim di bawah direksi
8. Sekretaris Perusahaan
9. Satuan pengawasan Intern
10. Penggunaan sarana profesional

Di samping itu, Board Manual juga mengatur beberapa hal yang membatasi kewenangan Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

The Board of Directors is a corporate organ that is collectively assigned and responsible for managing the Company. Each member of the Board of Directors can carry out their duties and make decisions in accordance with the division of tasks and authorities. The task of the President Director as *primus inter pares* is to coordinate the activities of the Board of Directors.

Board of Directors Work Guidelines

The Company already has a Board of Directors Work Guidelines or Board Manual as a guide for the Board of Directors in carrying out the roles and functions of managing the Company. This Board Manual has been ratified through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Nindya Karya (Persero) number 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero), enforces the Company's Good Corporate Governance (GCG) Guidelines, including Board Manual Revision 0.3.

The Board of Directors who served until December 31, 2021, will continue to use the Board Manual because it is considered still relevant to the Company's business development and is effective as a guide for the Board of Directors in carrying out their supervisory duties and responsibilities.

The Board Manual owned by the Company provides a reference regarding several basic matters for the Board of Directors, that is:

1. Composition and requirements of the Board of Directors
2. Duties, powers, responsibilities and rights of the board of directors
3. Determination of company management policies by the board of directors
4. Delegation of authority among members of the company's board of directors
5. Division of duties of the board of directors
6. Board of Directors meeting
7. Team under the board of directors
8. Corporate Secretary
9. Internal control unit
10. Use of professional facilities

In addition, the Board Manual also regulates several matters that limit the authority of the Board of Directors in managing the Company.

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Direksi

Qualifications and Criteria for Members of the Board of Directors

Persyaratan Formal

Persyaratan formal merupakan persyaratan konkret yang harus dipenuhi oleh orang perseorangan yang meliputi:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Perusahaan Anak, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
4. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris
5. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
6. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi/ Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
7. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
8. Para anggota direksi dilarang melakukan Tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan selain penghasilan yang sah.

Persyaratan Materiil

Persyaratan Materiil merupakan persyaratan abstrak yaitu kualitas orang perseorangan yang sesuai dengan kebutuhan PT Nindya Karya (Persero), meliputi:

1. Mempunyai akhlak yang baik, yaitu:
 - a. Tidak melakukan perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
 - b. Tidak melakukan perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja dan/atau pemegang saham
 - c. Tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
 - d. Tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat

Formal Requirements

Formal requirements are concrete requirements that must be met by individuals which include:

1. Able to carry out legal actions
2. Never been declared bankrupt or become a member of the board of directors who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination
3. Never been convicted of a criminal act that is detrimental to the state's finances, BUMN, Subsidiary Companies, Companies, and/or related to the financial sector
4. There must be no blood family relationship up to the third degree, either in a straight line or a sideways line or a marriage relationship (son-in-law or brother-in-law) with other members of the Board of Directors and/or members of the board of commissioners.
5. Not concurrently holding other positions as a member of the board of directors in BUMN, BUMD and Private Owned Enterprises or other positions that may cause a conflict of interest
6. Cannot hold concurrent positions as officials in structural and functional positions in central and/or regional government agencies/agencies
7. Cannot hold concurrent positions that may cause a direct or indirect conflict of interest with the company and/or which is contrary to the provisions of the applicable laws and regulations.
8. Members of the board of directors are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal benefits, either directly or indirectly from decision-making and company activities other than legitimate income.

Material Requirements

Material requirements are abstract requirements, namely the quality of individuals in accordance with the needs of PT Nindya Karya (Persero), including:

1. Have good morals, namely:
 - a. Do not commit acts of engineering and deviant practices in the company where the person concerned works
 - b. Not committing acts of breach of contract which can be categorized as non-fulfillment commitments that have been agreed with the company concerned work and/or shareholders
 - c. Not doing actions that are categorized as giving personal benefits to prospective members of the Board of Directors, employees of the company where related to work
 - d. Not committing acts that can be categorized as violations to the provisions relating to the principles of management healthy company

2. Kompetensi teknis/keahlian, bahwasany yang bersangkutan memiliki:
 - a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha PT Nindya Karya (Persero)
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan PT Nindya Karya (Persero)
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT Nindya Karya (Persero)
 - d. Pemahaman masalah-masalah manajemen Perusahaan yan berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen
 - e. Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya
3. Psikologi bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensia dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero)
4. Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan

2. Technical competence/skills, that is concerned has:
 - a. Adequate knowledge in the business field of PT Nindya Karya (Persero)
 - b. Experience and expertise in the management of PT Nindya Karya (Persero)
 - c. Ability to carry out strategic management in the context of developing PT Nindya Karya (Persero)
 - d. Understanding of related Company management issues with one of the management functions
 - e. Dedication and full time to do their job
3. Psychology that the person concerned has a high level of intelligence and adequate emotional level to carry out his duties as a member Directors of PT Nindya Karya (Persero)
4. Have a strong ability and high dedication to advancing and expand company

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jabatan anggota Direksi berakhir jika:

1. Masa jabatan berakhir.
2. Berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena pengunduran diri atau meninggal dunia atau diberhentikan dari RUPS atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2021

Perseroan mengatur bahwa jumlah Direksi disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini, terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, di mana seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Pada tahun 2021, tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan Direksi. Dengan demikian susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Term of Office of the Board of Directors

The term of office for members of the Board of Directors is set for 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office. The position of a member of the Board of Directors ends if:

1. Term of office ends.
2. Quit before the term of office ends due to resignation or death or dismissal from the GMS or no longer fulfills the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the articles of association and laws and regulations.

Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners if they act contrary to these Articles of Association or there are indications of causing losses to the Company or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company.

Composition and Composition of the Board of Directors in 2021

The Company stipulates that the number of Directors is adjusted to the needs. In this case, it consists of more than 1 (one) member of the Board of Directors, one of whom is appointed as the President Director. In 2021, there was no change in the composition of the Board of Directors membership. Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2021 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Length of service	Periode Jabatan Term of Office
Haedar A. Karim	Direktur Utama President Director	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120	22 Januari 2020-RUPS 2025 January 22, 2020-AGM 2025	Periode ke-1 1st period
Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Marketing Director and Development	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120	22 Januari 2020-RUPS 2025 January 22, 2020-AGM 2025	Periode ke-1 1st period
Firmansyah	Direktur Produksi dan HSE Director of Production and HSE	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-217/MBU/07/2018 dan No. KEP-PS 5/PPA/0718 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-217/MBU/07/2018 and No. KEP-PS 5/PPA/0718	20 Juli 2018-RUPS 2023 20 July 2018-AGM 2023	Periode ke-1 1st period
Sri Haryanto	Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Resiko Director of HR Finance and Risk Management	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 dan No. KEP-PS 03/PPA/0120 Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120	22 Januari 2020-RUPS 2025 January 22, 2020-AGM 2025	Periode ke-1 1st period

Profil masing-masing Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The profile of each Board of Directors can be seen in the Profile of the Board of Directors in the Company Profile chapter in this annual report.

Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi

Perusahaan telah menginterpretasikan tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk kemudian disesuaikan dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan oleh Perusahaan sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan meliputi:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keputusan Direksi.

Duties, Obligations, and Responsibilities of the Board of Directors

The Company has interpreted the duties and responsibilities of the Board of Directors in general as stated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies to be later adjusted to the scope of business carried out by the Company as stated in the Company's Articles of Association. Duties and responsibilities of the Company's Board of Directors include:

1. The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the company for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company as well as representing the company both inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as regulated in the laws and regulations. Articles of Association and/or GMS resolutions.
2. Each member of the Board of Directors must in good faith and full responsibility carry out their duties for the interests and business of the Company by observing the applicable laws and regulations.
3. In carrying out their duties, members of the Board of Directors are required to devote full energy, thought and attention to their duties, obligations and achieving company goals.
4. Each member of the Board of Directors is personally responsible if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties and is jointly and severally responsible for the decisions of the Board of Directors.

5. Direksi wajib membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada SPI dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan SPI.
 6. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat Internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan dan anak Perusahaan/Perusahaan patungan untuk dimuat dalam Laporan Tahunan.
 7. Direksi wajib membuat, memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta menyimpannya di tempat kedudukan perusahaan.
 8. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan Intern dengan membentuk Satuan Pengawasan Intern serta menyampaikan laporan pelaksanaan fungsinya kepada Dewan Komisaris secara periodik.
 9. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan.
 10. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan, Pengawas Intern dan Tata Kelola Teknologi Informasi di Perusahaan.
 11. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.
5. The Board of Directors is required to assist and provide full support to the SPI in carrying out its duties, as well as to follow up on the findings of the SPI.
 6. The Board of Directors must submit information regarding the identity, main jobs, positions of the Board of Commissioners in subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings held in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salaries, facilities and/or other allowances received from the Company and its subsidiaries/joint ventures to be included in the Annual Report.
 7. The Board of Directors must prepare and maintain the Register of Shareholders, Special Register, minutes of the GMS, minutes of the Board of Directors meeting, Annual Report and Company Financial Documents and keep them at the domicile of the company.
 8. The Board of Directors is required to carry out internal supervision by establishing an Internal Control Unit and submitting reports on the implementation of its functions to the Board of Commissioners periodically.
 9. The Board of Directors is required to carry out the function of the Corporate Secretary.
 10. The Board of Directors is required to maintain and evaluate the quality of the functions of the Corporate Secretary, Internal Supervisor and Information Technology Governance in the Company.
 11. One member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors meeting as the person in charge of implementing and monitoring GCG in the relevant BUMN.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Di tahun 2020, Pemegang Saham melalui RUPS tanggal 20 Juli 2018 memutuskan untuk membagi nomenklatur jabatan Direksi ke dalam 4 (empat) direktorat. Pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama:
Bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional Perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran Perseroan secara keseluruhan. Peran Direktur Utama adalah:
 - a. Memimpin penyusunan peraturan dan kebijakan Perseroan.
 - b. Memimpin dan menjalankan Perseroan.
 - c. Menyetujui anggaran tahunan Perseroan dan melaporkan laporan pada Pemegang Saham.
 - d. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi Perseroan.
 - e. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan Perseroan.
 - f. Memimpin dan mengoordinasikan terkait pelaksanaan perencanaan dan pengadaan SDM.
 Wewenang Direktur Utama adalah:

Division of Duties of the Board of Directors

The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS. In 2020, the Shareholders through the GMS on 20 July 2018 decided to divide the nomenclature of the Board of Directors into 4 (four) directorates. The division of duties of the Board of Directors is as follows:

1. President Director:
In charge of leading, directing and controlling the Company's operational activities in order to achieve the Company's overall objectives. The roles of the President Director are:
 - a. Leading the formulation of the Company's regulations and policies.
 - b. Lead and run the Company.
 - c. Approve the Company's annual budget and report to Shareholders.
 - d. Establish strategies to achieve the Company's vision and mission.
 - e. Planning and developing sources of income and expenditure of the Company's assets.
- f. Lead and coordinate related to the implementation of HR planning and procurement. The powers of the President Director are:

- i. Mengangkat dan memberhentikan karyawan tetap Perseroan.
 - ii. Menetapkan RKAP.
 - iii. Menyetujui pengeluaran uang untuk kepentingan Perseroan.
 - iv. Mengesahkan RJPP.
2. Direktur Produksi dan HSE:
Bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional produksi, pencapaian perolehan kontrak dan target produksi secara keseluruhan. Peran Direktur Produksi dan HSE adalah:
- a. Memimpin dan mengoordinasikan terkait pencapaian perolehan kontrak.
 - b. Memimpin dan mengoordinasikan terkait kegiatan operasional produksi, meliputi:
 - i. Pengendalian produksi
 - ii. Administrasi
 - iii. Logistik
 - iv. Melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai target produksi.
 - v. Memimpin dan memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015.

Wewenang Direktur Produksi dan HSE adalah:

- a. Mengesahkan rencana anggaran proyek
 - b. Menetapkan prioritas penanganan masalah dalam bidang produksi
 - c. Menilai hasil proses pelaksanaan produksi
- d. Mengambil tindakan yang diperlukan jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi
3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko:
Bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya keuangan dan operasional sumber daya manusia (karyawan) guna mendukung tercapainya sasaran operasi Perseroan pada umumnya. Peran Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko adalah:
- a. Memimpin, mengarahkan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pengadaan dan pengalokasian dana Perseroan.
 - b. Memimpin, mengarahkan dan mengoordinasikan kegiatan akuntansi Perseroan berserta analisis dan pelaporannya.
 - c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penempatan SDM.

Wewenang Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko adalah:

- Menyetujui rencana Anggaran Perusahaan

- i. Appoint and dismiss the Company's permanent employees.
- ii. Establish RKAP.
- iii. Approved the disbursement of money for the benefit of the Company.
- iv. Approve the RJPP.

2. Director of Production and HSE:
In charge of leading, directing and controlling production operational activities, achieving contract acquisition and overall production targets. The roles of the Director of Production and HSE are:
- a. Lead and coordinate related to the achievement of contract acquisition.
 - b. Leading and coordinating related production operational activities, including:
 - i. Production control
 - ii. Administration
 - iii. Logistics
 - iv. Carry out efforts to achieve production targets.
 - v. Lead and ensure the implementation of the ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 45001:2018 OHS management and ISO 14001:2015 Environmental Management System.

The powers of the Director of Production and HSE are:

- a. Approve the project budget plan
 - b. Set priorities for handling problems in the production sector
 - c. Assessing the results of the production implementation process
 - d. Take the necessary actions if there are deviations in implementation production process
3. Director of Finance, HR and Risk Management:
In charge of leading, directing and controlling the management of financial resources and operational human resources (employees) in order to support the achievement of the Company's operational targets in general. The roles of the Director of Finance, HR and Risk Management are:
- a. Lead, direct and coordinate planning, procurement and allocation of Company funds.
 - b. Leading, directing and coordinating the Company's accounting activities along with its analysis and reporting.
 - c. Leading, directing and coordinating the implementation of HR placement activities.

The authority of the Director of Finance, HR and Risk Management is:

- Approve the Company's Budget plan

4. Direktur Pemasaran dan Pengembangan:

Bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan pengembangan bisnis guna pencapaian visi dan sasaran strategis Perseroan. Peran Direktur Pemasaran dan Pengembangan adalah:

- Memimpin dan mengoordinasikan terkait kegiatan pemasaran.
- Memimpin dan mengoordinasikan terkait kegiatan pengembangan Perseroan.
- Memimpin dan mengoordinasikan terkait penerapan SM Mutu/K3/ISO 45001:2018/Lingkungan dan Manajemen Risiko di unit kerja.

Wewenang Direktur Pemasaran dan Pengembangan adalah:

- Mengakses seluruh data/informasi dari seluruh Departemen/Satuan/Unit Kerja dalam rangka kegiatan pengembangan Perseroan.
- Mengunjungi wilayah/proyek tertentu dalam rangka mengidentifikasi teknologi yang digunakan.
- Melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan untuk keperluan pengembangan usaha dan teknologi serta pemasaran proyek tertentu.

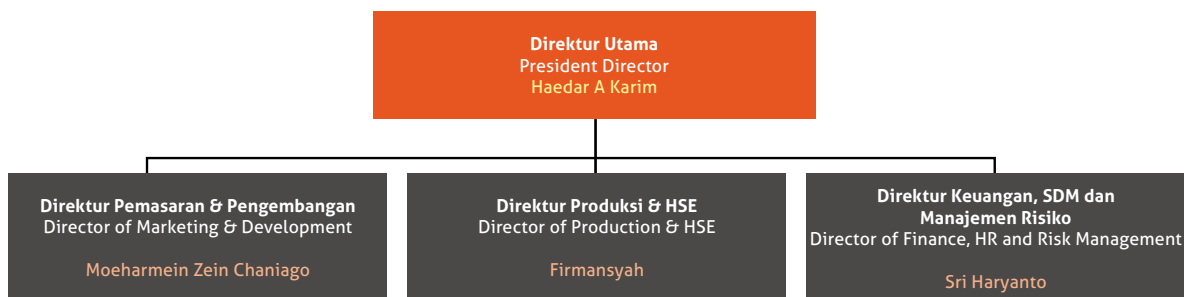
4. Marketing and Development Director:

In charge of leading, directing and controlling marketing and business development activities in order to achieve the Company's strategic vision and goals. The roles of the Marketing and Development Director are:

- Leading and coordinating related marketing activities.
- Lead and coordinate related to the Company's development activities.
- Leading and coordinating the implementation of the Quality/K3/ISO 45001:2018/Environmental and SM Quality Risk Management in work units.

The powers of the Director of Marketing and Development are:

- Access all data/information from all departments/units/work units for the Company to develop.
- Visit specific areas/projects in order to identify technologies that are used.
- Carry out preventive activities for business development purposes and technology and specific project marketing.



Program Orientasi Perusahaan bagi Direksi Baru

Program orientasi bagi Direksi dibutuhkan dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana usaha ke depan, panduan kerja dan lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi. Program pengenalan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dengan melakukan kajian dokumen Agenda dan Publikasi Rencana Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Dokumen Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, Corporate Governance Policy (CGP), Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, Charter Dewan Komisaris, Charter Direksi dan Charter Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Nindya Karya.

Di tahun 2021, tidak terdapat program pengenalan Perusahaan yang dilakukan kepada anggota Direksi baru, dikarenakan tidak adanya pergantian Direksi disepanjang tahun 2021.

Company Orientation Program for New Directors

An orientation program for the Board of Directors is needed with the aim of providing an overview of business activities, future business plans, work guidelines and others that are the responsibility of the Board of Directors. The introduction program is prepared by the Corporate Secretary by reviewing the Agenda and Publication of the Board of Commissioners Meeting Plan documents which consist of Annual Report Documents, Work Plans and Budgets Company (RKAP), Company Long-Term Plan (RJPP), Company Articles of Association, Corporate Governance Policy (CGP), Company Ethical Standards, Work Program of the Board of Commissioners and Supporting Committees of the Board of Commissioners, Board of Commissioners Charter, Board of Directors Charter and Board of Commissioners Supporting Committee Charter. as well as laws and regulations related to Nindya Karya's business processes.

In 2021, there was no Company introduction program conducted for new members of the Board of Directors, due to the absence of a change of Board of Directors throughout 2021.

Program Peningkatan Kompetensi

Agar Direksi terus memperbaharui pengetahuannya akan industri konstruksi dan bisnis Nindya Karya, Perseroan memberikan program peningkatan kompetensi berupa seminar, workshop, atau kegiatan lainnya. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Improvement Program

In order for the Board of Directors to continue to update their knowledge of the construction industry and Nindya Karya's business, the Company provides competency improvement programs in the form of seminars, workshops, or other activities. Regarding the competency improvement program that the Board of Directors will participate in in 2021, see the Company Profile chapter in this Annual Report.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and the Board of Directors

Assessment Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan sehingga menjadikan asesmen atas kedua organ ini sebuah keharusan. Penting bagi Perusahaan untuk menjalankan komitmen ini mengingat status Nindya Karya sebagai BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG sesuai standar BUMN. Pelaksanaan asesmen juga harus diukur secara berkala setiap tahunnya untuk menilai perkembangan Perusahaan dalam mempertahankan implementasi GCG yang berkelanjutan.

Asesmen penerapan GCG Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN.

Sejalan dengan assessment yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses assessment Berdasarkan hasil Assessment penerapan prakti-praktik Good Corporate Governance (GCG) tahun 2021 pada PT Nindya Karya (Persero) yang dilakukan oleh pihak internal Perseroan, yaitu Tim Good Corporate Governance, kondisi penerapan mencapai skor 90,22 dari skor maksimum 100 dengan predikat "Sangat Baik". Khusus untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing meraih skor 35,00.

GCG Implementation Assessment for the Aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors

As the main organs in the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors have a central role in the movement of the Company's growth so that the assessment of these two organs is a must. It is important for the Company to carry out this commitment considering Nindya Karya's status as a BUMN which is directed to apply GCG principles according to BUMN standards. The assessment implementation must also be measured periodically every year to assess the Company's progress in maintaining a sustainable GCG implementation.

Assessment of the implementation of GCG by the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN.

In line with the assessment which aims to provide evaluations and recommendations, the Company's management is expected to follow up on the recommendations that arise from the assessment process. The Company, namely the Good Corporate Governance Team, the conditions of application reached a score of 90.22 out of a maximum score of 100 with the predicate "Very Good". Specifically for the Aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors, each received a score of 35.00.

Jenis Penilaian : Assessment GCG tahun 2021
Assessor/Penilai : Tim Good Corporate Governance PT NINDYA KARYA (Persero)
Periode Pengukuran : 4 (empat) bulan
Waktu Pengukuran : 21 Januari 2021 s.d 16 April 2021
Tempat : Gedung Nindya
Waktu Terbit Laporan : 15 April 2021

Type of Assessment : 2021 GCG Assessment
Assessor/Appraiser : PT NINDYA KARYA (Persero) Good Corporate Governance Team
Measurement Period : 4 (four) months
Measurement Time : January 21, 2021 to April 16, 2021
Place : Nindya Building
Report Issue Time : April 15, 2021

Hasil Assessment Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021 (metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012).

Assessment Results of GCG Implementation Aspects of the Board of Commissioners and Directors for the 2021 Financial Year (Assessment method based on a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012).

Aspek Pengujian Aspect of Testing	Bobot Weight	Hasil Evaluasi GCG Tahun Buku 2021 GCG Evaluation Results for the 2021 Fiscal Year		
		Nilai Score	Pencapaian Achievement	Predikat Kualitas Penerapan Gcg GCG Implementation Quality Predicate
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board Of Commissioners/Board Supervisor	35,00	31,576	90,22	Sangat Baik Very Good

Keterangan: 0-50: Tidak Baik | 50-60: Kurang Baik | 60-75: Cukup Baik | 75-85: Baik | 85-100: Sangat Baik
Description: 0-50: Not Good | 50-60: Not Good | 60-75: Fairly Good | 75-85: OK | 85-100: Very Good

Rekomendasi hasil assessment penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2020 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perseroan hingga akhir tahun 2021 dapat dilihat pada bagian Penilaian Assessment GCG yang telah diulas di awal bab ini.

Recommendations for the results of the assessment of the implementation of GCG for the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2020 and the follow-up actions taken by the Company until the end of 2021 can be seen in the GCG Assessment Assessment section which was reviewed at the beginning of this chapter.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

Prosedur Evaluasi dan Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure for Evaluation and Assessment of the Performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawabkan hasil pengawasan dan penasihatn serta pengurusan pengelolaan Perusahaan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the results of supervision and advisory as well as the management of the Company's management in the GMS in accordance with the provisions and applicable laws and regulations.

Penilaian terhadap anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala berdasarkan target pencapaian (*goal setting*) dan KPI (*Key Performance Indicator*) yang sudah disepakati bersama pada saat awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Assessment of members of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners on a regular basis based on the target achievement (*goal setting*) and KPI (*Key Performance Indicator*) that have been mutually agreed upon at the beginning of the year according to the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. SKS-676/BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak manajemen, maka setiap BUMN diwajibkan membuat Key Performance Indicator (KPI) manajemen yang dijadikan Kontrak manajemen antara Pemegang Saham dengan Direksi BUMN tersebut. Di lingkup Perusahaan, Pemegang Saham menilai kinerja Perusahaan (termasuk Key Performance Indicators), Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

Kriteria yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan program kerja Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan melalui rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, maka disusun KPI Dewan Komisaris tahun 2021 yang merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris.

Aspek yang dinilai dan nilai pembobotan dalam KPI Dewan Komisaris tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Aspek Penilaian Assessment Aspect	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Skor Score
Aspek Pengawasan dan Pengarahan Aspect of Supervision and Direction	65			65
Jumlah Pelaksanaan Rapat Number of Meetings	10	12 kali/times	13 kali/times	10,00
Rapat Internal Internal Meeting	10	12 kali/times	12 kali/times	10,00
Rapat Gabungan Joint meeting	10	100%	100%	10,00
Tingkat Kehadiran dalam Rapat Attendance in Meetings	20	8 Kali/times	11 kali/times	20,00
Memberi Nasihat/Saran kepada Direksi Giving Advice/Suggestion to the Board of Directors	15	2 Kali/times	2 kali/times	15,00
Monitoring Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/Eksternal Follow-up Monitoring of Internal/External Audit Results/Findings	30			30,00
Aspek Pelaporan Aspect of Reporting	5	1 kali/times	1 kali/times	5,00
Menyusun dan Menyampaikan Program Kerja Tahunan Develop and Deliver Annual Work Program	20	4 kali/times	4 kali/times	20,00
Menyampaikan Laporan/Pendapat/Saran kepada Pemegang Saham Submitting Reports/Opinions/Suggestions to Shareholders	5	1 kali/times	1 kali/times	5,00
Menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Submit a Supervisory Task Report	5			5,00
Aspek Dinamis Dynamic Aspect	5	2 kali/times	2 kali/times	5,00
Peningkatan Kompetensi Competency Improvement	100			100,00

The Party Conducting the Assessment

In accordance with the letter of the Ministry of SOEs No. SKS-676/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 regarding management contracts, each BUMN is required to make a management Key Performance Indicator (KPI) which is used as a management contract between the Shareholders and the Directors of the BUMN. Within the scope of the Company, Shareholders assess the performance of the Company (including Key Performance Indicators), Commissioners and Directors through the GMS mechanism.

Criteria Used in the Implementation of the Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the work program of the Board of Commissioners that has been prepared and determined through the Work plan and Budget of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners KPI for 2021 is prepared which is a measure of the assessment of the successful implementation of the duties and responsibilities of supervision and providing advice by the Board of Commissioners.

The aspects assessed and the weighted values in the KPI of the Board of Commissioners in 2021 are as follows:

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi selain berdasarkan target pencapaian dan KPI juga didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pengurusan perusahaan dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Kepatuhan terhadap Peraturan perundangundangan dan komitmen kepada Pemegang Saham.
5. Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat, terbaru dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan RKAP Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, berikut disampaikan KPI Direksi untuk tahun buku 2021 serta realisasi sebagai pencapaiannya Hasil Evaluasi Key Performance Indicators tahun 2021

The criteria used in evaluating the performance of the Board of Directors, apart from being based on achievement targets and KPIs, are also based on the following:

1. Implementation of the Company's management in accordance with the authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
2. The management of the company is carried out for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company.
3. Implementation of the principles of governance in every business activity of the company at all levels or levels of the organization.
4. Compliance with laws and regulations and commitment to Shareholders.
5. Availability of complete, accurate, up-to-date and timely data and information to the Board of Commissioners and other stakeholders.

Based on the 2021 RKAP which has been approved by the Shareholders, the following are the Directors' KPIs for the 2021 financial year and their realization as an achievement. Results of the 2021 Key Performance Indicators Evaluation

Key Performance Indikator (KPI) PT Nindya Karya (Persero) Realisasi Tahun 2021 (Audited)
Key Performance Indicators (KPI) PT Nindya Karya (Persero) Realization In 2021 (Audited)

KPI	Satuan Unit	Rkap2021 2021 RKAP				Audited 2021 2021 Audited		
		Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight		Realisasi Realization	Bobot Weight	
				Sub	Total		Sub	TOTAL
A. NILAI EKONOMI UNTUK Indonesia A. ECONOMIC VALUE FOR INDONESIA					35		34	
Financial Financial								
EBITDA	Rp Juta Rp Million	427.874	Maximize	6	304.033		4	
Net Operating Cash Flow*	Rp Juta Rp Million	282.576	Maximize	6	667.819		7	
ROIC	%	10	Maximize	6	9		5	
Operasional Operational								
Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Timely Completion of Work	%	95	Maximize	6	96		7	
SMK3L-Zero Accident	%	100	Maximize	6	100		6	
Sosial Social								
Peningkatan Ketrampilan Kerja di Desa Binaan Improving Work Skills in Assisted Villages	Orang People	50	Maximize	5	165		6	
B. INOVASI MODEL BISNIS B. BUSINESS MODEL INNOVATION					15		16	
Pelaksanaan Konsolidasi Bisnis dengan Danareksa Implementation of Business Consolidation with Danareksa	Waktu Time	Desember 2021 December 2021	Maximize	3	100%		3	
Perpanjangan PP 69 Tahun 2012 Extension of PP 69 Year 2012	Waktu Time	Desember 2021 December 2021	Maximize	6	Agustus 2021 August 2021		7	
Repeat Order	Klien Client	5	Maximize	6	5		6	

KPI	Satuan Unit	Rkap2021 2021 RKAP				Audited 2021 2021 Audited		
		Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight		Realisasi Realization	Bobot Weight	
				Sub	Total		Sub	TOTAL
C. KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI C. TECHNOLOGY LEADERSHIP					20		21	
Pelaksanaan Konsolidasi Sistem Informasi dan Sistem Akuntansi ke Danareksa Group Secara Bertahap Implementation of Consolidation of Information Systems and Accounting Systems to Danareksa Group in stages	Waktu Time	Triwulan IV 2021 IV Quarter of 2021	Maximize	3		Triwulan IV 2021 IV Quarter of 2021	3	
Penyelesaian Suatu Roadmap/ Rancangan Berupa Sistem IT Completion of a Roadmap/ Design in the Form of an IT System	Waktu Time	Triwulan IV 2021 IV Quarter of 2021	Maximize	6		Triwulan IV 2021 IV Quarter of 2021	6	
Penerapan ERP ERP Implementation	%	50	Maximize	5		82	6	
Penerapan BIM Application of BIM	%	50	Maximize	6		64	7	
D. PENINGKATAN INVESTASI D. INCREASED INVESTMENT					15		16	
Penyelesaian Suatu Roadmap/ Rancangan Berupa Enterprise Risk Management & Governance (ERMG) Completion of a Roadmap/ Design form of Enterprise Risk Management & Governance (ERMG)	Waktu Time	Triwulan IV 2021 IV Quarter of 2021	Maximize	5		Triwulan III 2021 III Quarter of 2021	6	
Sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN dan atau perusahaan terafiliasi BUMN Synergy between SOEs, SOE subsidiaries and or BUMN affiliated companies	Kerjasama Cooperation	7	Maximize	5		11	6	
Kerjasama/Investasi dengan perusahaan Luar Negeri Cooperation/Investment with foreign companies	Pra FS	1	Maximize	5		1	5	
E. PENGEMBANGAN TALENTA E. TALENT DEVELOPMENT					15		16	
Perempuan dalam manajemen (BOD-1 atau Direksi Anak Perusahaan) Women in management (BOD-1 or Directors of Subsidiaries)	%	6	Maximize	6		6	6	
Milenial (≤40 tahun) dalam top talent Millennials (≤40 years) in top talent	%	20	Maximize	6		46	7	
Persetujuan Holding atas Standarisasi Model Kompetensi per Sektor Untuk Pengembangan Pegawai Melalui Danareksa Learning Institute Holding Approval on Standardization Competency Model by Sector For Employee Development Through Danareksa Learning Institute	Waktu Time	Juni 2021 June 2021	Maximize	3		Juni 2021 June 2021	3	
JUMLAH TOTAL					100		103	

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penetapan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2021, ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Prosedur pengusulan hingga penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Tahapan Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Stages of Proposal to Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan kelima atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/Insentif Kinerja

Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Procedure for Proposing to Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

In providing remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company prioritizes the principle of prudence and refers to the applicable laws and regulations. Regarding the determination of the amount of remuneration for the Company's Board of Commissioners and Directors for the 2021 financial year, it is determined based on a shareholder decision that is adjusted to the Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/11/2020 dated December 22, 2020 regarding the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs.

The procedure for proposing to determining the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors can be seen in the chart below.

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 concerning the fifth amendment to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the components of the income of the Board of Commissioners consist of:

1. Salary/Honorarium
2. Allowance
3. Facilities
4. Tantiem/Performance Incentives

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

The remuneration structure and its components for the Board of Commissioners and the Board of Directors can be presented as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Remuneration Structure

Honorarium Dewan Komisaris*

Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama
- Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama

Honorarium for the Board of Commissioners*

Fixed income in the form of money received every month due to his position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following conditions:

- The calculation of the salary of the President Commissioner is 45% of the salary of the President Director
- The calculation of the salary of the Commissioner is 90% of the salary of the President Commissioner

Tunjangan Dewan komisaris

Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain honorarium, yang dapat berupa:

1. Tunjangan hari raya
2. Tunjangan transportasi; dan
3. Asuransi purna jabatan

Berdasarkan Per-04/MBU/2014.

Board of Commissioners Allowance

Income in the form of money or which can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Commissioners other than honorarium, which can be in the form of:

1. Holiday allowance
2. Transportation allowance; and
3. Post-employment insurance

Based on Per-04/MBU/2014.

Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors' Remuneration Structure

Gaji Direksi*

Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman Internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama, sesuai BAB II. Huruf B. angka 1.b. 2). Peraturan Menteri BUMN RI nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan kelima atas peraturan Menteri badan usaha milik negara nomor PER-04/MBU/2014 tetnang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Dalam hal terdapat jabatan lain selain Direktur Utama dan Direktur, besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri BUMN.
- RUPS/Menteri BUMN dapat menetapkan Faktor Besaran Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan Perusahaan.

Board of Directors Salary*

Fixed income in the form of money received every month due to his position as a member of the Company's Board of Directors, with the following conditions:

- The salary of the President Director is determined using the internal guidelines set by the Minister of SOEs.
- The salary of other members of the Board of Directors is determined with the composition of the Position Factor of 85% of the Salary of the President Director, in accordance with Chapter II. Letter B. number 1.b. 2). Regulation of the Minister of BUMN RI number PER-12/MBU/11/2020 concerning the fifth amendment to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
- In the event that there are positions other than the President Director and Director, the amount of the Position Factor is determined by the GMS/Minister of SOEs.
- The GMS/Minister of SOEs may determine the Position Size Factor that is different from the provisions referred to if it is deemed more able to reflect justice and fairness in carrying out the responsibilities of each member of the Board of Directors and the Company's capabilities.

Tunjangan Direksi

Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa:

1. Tunjangan hari raya
2. Tunjangan transportasi; dan
3. Asuransi purna jabatan

Berdasarkan Per-04/MBU/2014.

Board of Directors Allowance

Income in the form of money or which can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Directors other than salary, which can be in the form of:

1. Holiday allowance
2. Transportation allowance; and
3. Post-employment insurance

Based on Per-04/MBU/2014.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration Structure
Fasilitas Dewan Komisaris Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas Kesehatan • Fasilitas Bantuan hukum Board of Commissioners Facilities Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/used by members of the Board of Commissioners in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of: • Medical facility • Legal Aid Facility	Fasilitas Direksi Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas Kendaraan • Fasilitas Kesehatan • Fasilitas Bantuan hukum Directors Facilities Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/used by members of the Board of Directors in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of: • Vehicle Facilities • Medical facility • Legal Aid Facility
Tantiem/insentif Kinerja Dewan Komisaris • Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Berdasarkan PER-04/MBU/2014 -Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris BUMN apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masuk mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. Board of Commissioners Performance bonus/incentive • Tantiem is Income which is an award given to members of the Board of Commissioners if they make a profit and do not experience accumulated losses. • Based on PER-04/MBU/2014 -Performance incentives are income which is an award given to members of the Board of Commissioners of SOEs if there is an increase in performance even though they experience losses or accumulated losses.	Tantiem Direksi Tantiem diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI) • Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. • Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Direksi mengikuti faktor Jabatan, yaitu Anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama. Tantiem Directors Tantiem is given in addition to the Long Term Incentive (ITI) • Tantiem, namely income which is an award given to members of the Board of Directors of SOEs if they make a profit and do not experience accumulated losses. • Performance Incentives, namely income which is an award given to members of the Board of Directors if there is an increase in performance even though they are still experiencing losses or accumulated losses. • The composition of the amount of Tantiem/Performance Incentives for members of the Board of Directors is based on the position factor, namely, the Members of the Board of Directors are 90% of the President Director.
Santunan Purna Jabatan Post-Service Compensation	Santunan Purna Jabatan Post-Service Compensation

Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham Perusahaan oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat opsi saham sebagai bagian dari kebijakan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

The Company does not have a policy regarding the ownership of the Company's shares by management. Thus, there are no stock options as part of the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Indikator Besaran Gaji bagi Direktur Utama, dan Pengesahan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Untuk memperhitungkan besaran gaji bagi Direktur Utama dan bonus kinerja, Perseroan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Indicator of Salary Amount for President Director, and Ratification of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors in 2021

To calculate the salary for the President Director and performance bonuses, the Company considers the following factors:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, Supervisory Board of BUMN as amended several times, most recently by regulation of the Minister of BUMN No. PER-01/MBU05/2019 dated May 31, 2019 regarding the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of BUMN.

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-156/Wk.2.MBU.C/10/2021/ Nomor KEP-PS 15/PPA/1021 tanggal 01 Oktober 2021 Hal: Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2021, besaran gaji bagi Direktur Utama ditetapkan sebesar 100%. Saran gaji Direksi ini akan menjadi perhitungan dasar bagi gaji Direksi lainnya dan honorarium bagi Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan di tahun 2021 sebagai berikut:

1. Gaji dan honorarium
 - a. Gaji Direktur Utama sebesar 100%.
 - b. Gaji Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - c. Honorarium Komisaris Utama dihitung sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
 - d. Honorarium Anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 92% dari honorarium Komisaris Utama.
2. Tantiem/Insentif Kinerja
 - a. Total Tantiem/IK untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 ditetapkan sebesar Rp722.000.000,-dengan ketentuan :
 - b. Tantiem/IK Direktur Utama, Direktur yang membidangi SDM, Anggota Direksi lainnya, Komisaris Utama masing-masing sebesar 100%, 90%, 85%, dan 45% dari Tantiem/IK Direktur Utama, tantiem/IK Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem/IK Komisaris Utama. Besaran tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun buku 2020
 - c. Tantiem Direktur Utama menjadi acuan utama.
 - d. Tantiem Direksi lainnya sebesar 90% dari tantiem Direktur Utama.
 - e. Tantiem Komisaris Utama dihitung sebesar 45% dari tantiem Direktur Utama.
 - f. Tantiem Anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama.

2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-12/MBU/11/2020 concerning the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-156/Wk.2.MBU.C/10/2021/Number KEP-PS 15/PPA/1021 dated October 01, 2021 Subject: Determination of Income for Directors and Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) In 2021, the salary for the President Director is set at 100% This recommendation for the salary of the Board of Directors will be the basic calculation for the salaries of other Directors and the honorarium for the Board of Commissioners.

Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2021

The remuneration for the Company's Board of Commissioners and Directors in 2021 is as follows:

1. Salary and honorarium
 - a. President Director's salary is 100%.
 - b. Other Directors ' salaries are 85% of the President Director's salary.
 - c. Honorarium of the President Commissioner is calculated at 45% of the salary of the President Director.
 - d. Honorarium for other members of the Board of Commissioners is 92% of the honorarium for the President Commissioner.
2. Tantiem/Performance Incentives
 - a. Total Tantiem/IK for the Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 20-20 is set at Rp722,000,000 ,-with the following provisions:
 - b. Tantiem/IK President Director, Director in charge of HR, other members of the Board of Directors, President Commissioner each 100%, 90%, 85%, and 45% of Tantiem/IK President Director, tantiem/IK Board of Commissioners is 90% of tantiem/IK President Commissioner. The amount of bonus/IK is calculated proportionally according to the term of office of each Director and Board of Commissioners in the financial year 20 20
 - c. Tantiem of the President Director is the main reference.
 - d. Other Directors' bonuses are 90% of the President Director's bonuses.
 - e. The tantiem of the President Commissioner is calculated at 45% of the tantiem of the President Director.
 - f. The bonus of other members of the Board of Commissioners is 90% of the bonus of the President Commissioner.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021 di banding tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian Description	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3.352.075.427	3.321.609.430
Direksi Board of Directors	9.370.827.570	11.180.460.785
Jumlah Total	12.722.902.997	14.502.070.215

Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Dewan Direksi tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp9.370.827.570 dan Rp11.180.460.785. Sedangkan jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris per tahun 2021 sebesar Rp3.352.075.427 dan tahun 2020 sebesar Rp3.321.609.430.

Rasio Gaji

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perseroan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Comparison	2021	2020
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	1:1,39	1:0,85
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Members of the Board of Commissioners	1:0,66	1:0,90
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1:0,74	1:0,45
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi President Director to the highest Employee	1:0,37	1:0,24
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah President Director to the lowest Employee	1:0,08	1:0,04
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee against Lowest Employee	1:0,08	1:0,17
Karyawan Terendah terhadap UMP Lowest Employee against UMP	1:0,04	1:0,65

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Kepala Departemen sementara karyawan terendah adalah Staf.

Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2021 compared to 2020 is as follows:

Amount remuneration period short accepted by the Board of Directors 2021 and 2020 are Rp9. _ 370. 827. 570 and Rp11.180.460. 785. Whereas amount remuneration period The short term received by the Board of Commissioners per year 2021 is Rp3.352.075.427 and in 2020 Rp3.321.609.430.

Salary Ratio

Information regarding the salary ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company is as follows:

What is referred to as the highest employee in the table above is the Head of the Department while the lowest employee is the Staff.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal sekali dalam setiap bulan.

Rapat Internal Dewan Komisaris dapat diselenggarakan atas permintaan Komisaris Utama, salah seorang Anggota Dewan Komisaris, atau permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat Internal Dewan Komisaris dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditugaskan Komisaris Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris atau dalam bentuk keputusan yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapatnya; termasuk pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili harus menyampaikan keberatannya dan atau usul perbaikannya, bila ada, atas risalah rapat tersebut.

Di tahun 2021, Dewan Komisaris menyelenggarakan sebanyak 13 kali rapat Internal. Berikut risalah rapat Dewan Komisaris dan kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat.

Board of Commissioners Meeting

Meetings of the Board of Commissioners consist of the Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors. The Board of Commissioners' meeting is held at least once a month.

An Internal Meeting of the Board of Commissioners may be held at the request of the President Commissioner, a member of the Board of Commissioners, or a written request from the Shareholders stating the matters to be discussed. Internal Meetings of the Board of Commissioners are attended by Members of the Board of Commissioners, Secretary to the Board of Commissioners or other officials assigned by the President Commissioner, except for special meetings which may only be attended by Members of the Board of Commissioners.

Meetings of the Board of Commissioners are valid and can make binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners. All decisions in the meeting of the Board of Commissioners are taken by deliberation to reach a consensus. If an agreement is not reached through deliberation, then the decision is taken by majority vote.

Decisions concerning strategic aspects must be made through the mechanism of the Board of Commissioners meeting or in the form of a decision that is approved in writing and signed by all members of the Board of Commissioners. These strategic aspects include, among others, all actions of the Board of Directors which must be approved by the GMS after obtaining a written recommendation from the Board of Commissioners as well as all actions of the Board of Directors which must obtain written approval from the Board of Commissioners.

Minutes of the meeting must be made at every meeting of the Board of Commissioners; including a statement of objection to the meeting decision if there is no unanimity of opinion. Each Member of the Board of Commissioners who is present and/or represented must submit his/her objections and/or suggestions for improvement, if any, to the minutes of the meeting.

In 2021, the Board of Commissioners held a total of 13 internal meeting times. The following are the minutes of the Board of Commissioners' meeting and the attendance of the Board of Commissioners at the meeting.

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris di Tahun 2021

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners in 2021

No	Tanggal Date	Lokasi/Media Location/Media	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	26 Januari 2020 January 26, 2020	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d 31 Desember 2020 2) Proyek/Pekerjaan yang bermasalah (Kendala dan Solusi) 3) Progres Rencana Investasi (Konstruksi dan EPC) 4) Update Usulan RKAP 2021 5) Lain-lain 1) Company Performance up to December 31, 2020 2) Problematic Project/Work (Constraints and Solutions) 3) Investment Plan Progress (Construction and EPC) 4) Update the 2021 RKAP Proposal 5) Others
2	26 Februari 2021 February 26, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d 31 Januari 2021 2) Progres Audit Tahun 2020 1) Company Performance up to January 31, 2021 2) Audit Progress in 2020
3	30 Maret 2021 March 30, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d Februari 2021 2) Progres Audit Tahun 2020 1) Company Performance up to February 2021 2) Audit Progress in 2020
4	30 April 2021 April 30, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d 31 Maret 2021 2) Lain-lain 1) Company Performance up to March 31, 2021 2) Miscellaneous
5	27 Mei 2021 May 27, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d 30 April 2021 2) Persiapan RUPS Audit 2020 3) Progres dan Auction Plan Kontrak Kerjasama Cilacap 1) Company Performance up to 30 April 2021 2) Preparation for 2020 GMS Audit 3) Cilacap Cooperation Contract Progress and Auction Plan
6	11 Juni 2021 June 11, 2021	Zoom Meeting	1) Laporan hasil visit Proyek Benteng Pendem dan spillway Bendungan Tugu oleh Komite Audit 1) Report on the results of the Benteng Pendem Project visit and the Tugu Dam spillway by the Audit Committee
7	26 Juni 2021 June 26, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d 31 Mei 2021 2) Laporan Progres Proyek 3) Spillway Bendungan Tugu 4) Rehabilitasi Bangunan Pusaka Benteng Pendem 1) Company Performance up to 31 May 2021 2) Project Progress Report 3) Tugu Dam Spillway 4) Rehabilitation of the Pendem Fort Heritage Building
8	28 Juli 2021 July 28, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d 30 Juni 2021 2) Hasil Rakornas 1) Company Performance up to 30 June 2021 2) Results of National Coordination Meeting
9	31 Agustus 2021 August 31, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d 31 Juli 2021 2) Prognosa 2021 3) Isu Strategis a. Progres Perubahan PP 69/2012 b. Progres Rencana Permintaan Dividen oleh PPA c. Aksi Korporasi yang membutuhkan persetujuan Dekom pada Sept-Des 2021 1) Company Performance up to July 31, 2021 2) Prognosis 2021 3) Strategic Issues a. Progress of Amendment to PP 69/2012 b. Progress of Dividend Request Plan by PPA c. Corporate Actions that require BoC approval in Sept-Dec 2021
10	27 September 2021 September 27, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan s.d 31 Agustus 2021 2) Aksi Korporasi yang membutuhkan persetujuan Dekom pada Sept-Des 2021 3) Isu Strategis a. Tindak Lanjut PP 69/2012 b. Persiapan Penyusunan RKAP 2022 c. Lain-Lain 1) Company Performance up to August 31, 2021 2) Corporate Actions that require the approval of the Board of Commissioners in Sept-Dec 2021 3) Strategic Issues a. Follow-up to PP 69/2012 b. Preparation for the Preparation of the 2022 RKAP c. Others

No	Tanggal Date	Lokasi/Media Location/Media	Agenda Rapat Meeting Agenda
11	27 Oktober 2021 October 27, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan s.d 30 September 2021 2) Progres Proyek a. Pertamina Cilacap b. Pertamina Bau-Bau c. Spam Cilacap 3) Aksi Korporasi yang membutuhkan persetujuan Dekom pada Sept-Des 2021 1) Company and Subsidiaries Performance up to 30 September 2021 2) Project Progress a. Pertamina Cilacap b. Pertamina Bau-Bau c. Spam Cilacap 3) Corporate Actions that require the approval of the Board of Commissioners in Sept-Dec 2021
12	30 November 2021 November 30, 2021	Zoom Meeting	1) Kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan s.d 31 Oktober 2021 2) Progres Proyek Bendungan Jo dan Non Jo 3) Hasil pembahasan teknis usulan RKAP 2022 dengan pemegang saham 4) Isu Strategis a. Progres Special Dividen b. Skema pengembalian Saham Negara RI pada PT NK c. Lain-Lain 1) Company and Subsidiaries Performance up to 31 October 2021 2) Jo and Non Jo. Dam Project Progress 3) The results of the technical discussion of the 2022 RKAP proposal with the shareholders 4) Strategic Issues a. Special Dividend Progress b. The scheme for returning the Indonesian State Shares to PT NK c. Others
13	29 Desember 2021 December 29, 2021	Zoom Meeting	1. Kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan s.d 30 November 2021 2. Struktur Organisasi Perusahaan 3. Isu Strategis a. Rencana Holding Danareksa 1. Performance of the Company and Subsidiaries up to November 30, 2021 2. Company Organizational Structure 3. Strategic Issues a. Danareksa Holding Plan

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Di Rapat Internal Tahun 2021

Recapitulation of Attendance of Members of the Board of Commissioners at the 2021 Internal Meeting

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Tidak Hadir Number of No Attendance	% Kehadiran % Presence
Sugiyartanto	Komisaris Utama President Commissioner	13	13	0	100
Andar Perdana Widiastono	Komisaris Commissioner	13	13	0	100
Rika Kiswardani	Komisaris Commissioner	13	13	0	100

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Secara umum agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja Keuangan dan operasional Perseroan (triwulan, semester dan tahunan).
2. Pembahasan dan Penetapan RKAP.
3. Evaluasi dan rekomendasi Komite-Komite di Bawah Direksi.
4. Persiapan pelaksanaan RUPS.
5. Agenda lain yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In general, the agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors discusses:

1. Evaluation of the Company's financial and operational performance (quarterly, semester and yearly).
2. Discussion and determination of RKAP.
3. Evaluation and recommendation of the Committees under the Board of Directors.
4. Preparation for the implementation of the GMS.
5. Other agendas under the authority of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Rapat Gabungan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditugaskan atau diundang oleh Komisaris Utama/Direktur Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Joint Meetings are attended by Members of the Board of Commissioners, Directors, Secretary to the Board of Commissioners, Corporate Secretary or other officials assigned or invited by the President Commissioner/ President Director, except for special meetings which may only be attended by Members of the Board of Commissioners and Directors.

Di tahun 2021, rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sebanyak 12 kali. Berikut risalah rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat.

In 2021, the Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors will be held as many as 12 times. The following are the minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at the meeting.

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di Tahun 2021

Minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors in 2021

No	Waktu Date	Lokasi Location	Agenda
1	Selasa, 26 Januari 2021 Tuesday, January 26, 2021	Cloudx Meeting	- Kinerja Perusahaan s.d. Desember 2020 - Proyek/Pekerjaan yang bermasalah (kendala dan solusinya) - Progres Rencana Investasi (Konstruksi/EPC) - Update Usulan RKAP 2021 - Lain-lain - Company Performance s.d. December 2020 - Problematic project/work (obstacles and solutions) - Investment Plan Progress (Construction/EPC) - Update on Proposed RKAP 2021 - Others
2	Jumat, 26 Februari 2021 Friday, February 26, 2021	Zoom Meeting	- Kinerja Perusahaan s.d. Januari 2021 - Progres Audit Tahun 2020 - Hal-hal Strategis lainnya - Company Performance s.d. Januari 2021 - Audit Progress in 2020 - Other Strategic Matters
3	Selasa, 30 Maret 2021 Tuesday, March 30, 2021	Zoom Meeting	- Progres Kinerja Perusahaan s.d. Februari 2021 - Laporan Audit Tahun 2020 - Hal-hal Strategis lainnya. - Company Performance s.d. February 2021 - Audit Report in 2020 - Other Strategic Matters
4	Jumat, 30 April 2021 Friday, April 30, 2021	Zoom Meeting	- Kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan s.d. Maret 2021 - Progres dan Action Plan Investasi - Rencana Aksi Korporasi April-Juni 2021 - Hal-hal Strategis Lainnya - Performance of the Company and Subsidiaries s.d. March 2021 - Investment Progress and Action Plan - Corporate Action Plan April-June 2021 - Other Strategic Matters
5	Kamis, 27 Mei 2021 Thursday, May 27, 2021	Zoom Meeting	- Laporan Realisasi Kinerja s.d 30 April 2021 - Persiapan RUPS Audit 2020 - Usulan Penggunaan Laba Bersih 2020 - Usulan Remunerasi 2021 dan Tantiem/Insentif Kinerja 2020 Direksi/ Dewan Komisaris - Usulan Penunjukan KAP untuk Audit 2021 - Progres dan Action Plan Kontrak Kerjasama SPAM Cilacap - Hal-hal Strategis Lainnya - Performance Realization Report up to 30 April 2021 - Preparation for 2020 GMS Audit - Proposed Use of 2020 Net Profit - Proposed Remuneration 2021 and Tantiem/Performance Incentives 2020 Directors/Board of Commissioners - Proposed Appointment of KAP for 2021 Audit - Cilacap SPAM Cooperation Contract Progress and Action Plan - Other Strategic Matters

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di Tahun 2021

Minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors in 2021

No	Waktu Date	Lokasi Location	Agenda
6	Selasa, 29 Juni 2021 Tuesday, June 29, 2021	Zoom Meeting	- Kinerja Perusahaan s.d. Mei 2021 - Progres Proyek: - Pembangunan Slipway Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek - Rehabilitasi Bangunan Kawasan Pusaka Benteng Pendem - Isu Strategis - Company Performance s.d. May 2021 - Project Progress: - Tugu Dam Slipway Construction, Trenggalek Regency - Rehabilitation of the Fort Pendem Heritage Area Building - Strategic Issues
7	Rabu, 28 Juli 2021 Wednesday, July 28, 2021	Zoom Meeting Meeting ID: 832 9061 9173 Passcode: RAGAB07	- Kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan s.d. Juni 2021; - Hasil RAKORNAS PT NINDYA KARYA (Persero) (Kesimpulan dan Action Plan Kedepan); - Hal-hal Strategis Lainnya. - Performance of the Company and Subsidiaries s.d. June 2021; - Results of the National Coordination Meeting of PT NINDYA KARYA (Persero) (Conclusions and Future Action Plans); - Other Strategic Matters.
8	Selasa, 31 Agustus 2021 Tuesday, August 31, 2021	Zoom Meeting	Kinerja Perusahaan s.d. Juli 2021; Prognosa 2021 dan Langkah Strategis Semester II 2021 untuk Mencapai RKAP 2021; Isu Strategis; - Progres Perubahan PP 69/2012; - Progres Rencana Permintaan Dividen oleh PT PPA; - Aksi Korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris bulan September-Desember 2021; - Lain-lain Company Performance s.d. July 2021; 2021 Prognosis and Strategic Steps for Semester II 2021 to Achieving RKAP 2021; Strategic Issues; - Progress of Amendment to PP 69/2012; - Progress of the Dividend Request Plan by PT PPA; - Corporate Actions that require the approval of the Board of Commissioners in September-December 2021; - Others
9	Senin, 27 September 2021 Monday, September 27, 2021	Zoom Meeting	Progres Kinerja Perusahaan s.d. Agustus 2021; Aksi korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris//RUPS (Oktober-Desember 2021); Isu Strategis; - Tindak Lanjut PP 89 Tahun 2021 - Persiapan penyusunan RKAP 2022 - Lain-lain Company Performance Progress s.d. August 2021; Corporate actions that require the approval of the Board of Commissioners//GMS (October-December 2021); Strategic Issues; - Follow-up to PP 89 in 2021 - Preparation for the preparation of the 2022 RKAP - Others
10	Rabu, 27 Oktober 2021 Wednesday, October 27, 2021	Zoom Meeting	- Kinerja Perusahaan & Anak Perusahaan s.d. 30 September 2021 (triwulan III 2021); - Progres proyek (nama proyek, nilai, pemberi kerja, kendala, action plan, time line) - Proyek Pertamina di Cilacap - Proyek Bau bau - Proyek NTU (SPAM Cilacap) - Tindakan Direksi yg perlu persetujuan Dekom: - Usulan RKAP 2022 - Lain-lain - Company & Subsidiaries Performance s.d. September 30, 2021 (quarter III 2021); - Project progress (project name, value, employer, constraints, action plan, time line) - Pertamina Project in Cilacap Bau-Bau Project - NTU Project (SPAM Cilacap) - Actions of the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners: - Proposed RKAP 2022 - Others

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di Tahun 2021

Minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors in 2021

No	Waktu Date	Lokasi Location	Agenda
11	Selasa, 30 November 2021 Tuesday, November 30, 2021	Zoom Meeting Meeting ID: 876 0086 2644	- Kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan s.d. 30 Oktober 2021. - Progres proyek Bendungan JO dan Non JO. - Hasil Pembahasan Teknis Usulan RKAP 2022 dengan Pemegang Saham. - Isu Strategis: - Progres Spesial Dividen; - Skema Pengembalian Saham Negara RI pada PT NINDYA KARYA (Persero); - Lain-lain. - Performance of the Company and Subsidiaries s.d. October 30, 2021. - JO and Non JO Dam project progress. - Result of Technical Discussion of Proposed RKAP 2022 with Shareholders. - Strategic Issues: - Dividend Special Progress; - The Republic of Indonesia's State Shares Return Scheme at PT NINDYA KARYA (Persero); - Others.
12	Rabu, 29 Desember 2021 Wednesday, December 29, 2021	Zoom Meeting	- Isu Strategis - PP Pengembalian Saham NINDYA Kepada Negara - Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan - Kinerja Perusahaan s.d November 2021 - Progres Restrukturisasi PT NINDYA BETON - Strategic Issues - PP Return of NINDYA Shares to the State - Changes in Company Organizational Structure - Company Performance up to November 2021 - PT NINDYA BETON's Restructuring Progress

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi di Rapat Gabungan Tahun 2021

Recapitulation of Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at the 2021 Joint Meeting

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Tidak Hadir Number of No Attendance	% Kehadiran % Presence
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Sugiyartanto	Komisaris Utama President Commissioner	12	12	0	100
Andar Perdana Widiastono	Komisaris Commissioner	12	12	0	100
Rika Kiswardani	Komisaris Commissioner	12	12	0	100
Direksi Board of Directors					
Haedar A. Karim	Direktur Utama President Director	12	12	0	100
Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	12	12	0	100
Firmansyah	Direktur Produksi dan HSE Director of Production and HSE	12	12	0	100
Sri Haryanto	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko Director of Finance, HR and Risk Management	12	12	0	100

Rapat Direksi

Secara umum Agenda rapat yang diselenggarakan Direksi membahas tentang:

1. Laporan Manajemen mengenai Kinerja Keuangan dan Operasional Perusahaan.
2. Pembahasan persiapan RUPS.
3. Pembahasan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan & RKAP.
4. Menindaklanjuti temuan SPI.
5. Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan Organ Direksi.

Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Direksi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat.

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Direksi) didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (desenting opinion) serta keputusan yang ditetapkan. dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang mengacu kepada board manual sebagai pedoman. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perusahaan.

Dalam hal Direksi Perusahaan yang saat ini berjumlah genap, ketentuan kuorum dalam rapat adalah 50%+1 dihitung dari suara Direktur Utama.

Di tahun 2021, Rapat Direksi diselenggarakan sebanyak 80 kali. Berikut risalah Rapat Direksi serta kehadiran Direksi dalam rapat.

Risalah Rapat Direksi di Tahun 2021
Minutes of Board of Directors Meeting in 2021

No	Waktu Rapat Meeting Time		Kehadiran Attendance				Pokok Pembahasan Topics
	Hari & Tanggal Day & Date	Jam Hour	DIRUT	DPH	DKSM	DPP	
1	2 Januari 2021 January 2, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Persiapan pelaksanaan pelantikan pejabat Preparation for the officials' inauguration
2	14 Januari 2021 January 14, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi progress program kerja tim transisi Evaluation of the progress of the transition team work program
3	18 Januari 2021 January 18, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi progress program kerja tim transisi Evaluation of the progress of the transition team work program

Board of Directors Meeting

In general, the agenda of meetings held by the Board of Directors discusses:

1. Management Report on the Company's Financial and Operational Performance.
2. Discussion on the preparation of the GMS.
3. Discussion on the preparation of the Company's Long Term Plan & RKAP.
4. Following up on SPI findings.
5. Other agendas that are still under the authority of the Board of Directors.

Information regarding the planned implementation of the Board of Directors meeting is carried out no later than 7 (seven) days prior to the scheduled implementation. In the publication, it is informed about the date and time of the meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting and the parties who are the meeting participants.

In ensuring the implementation of the principles of transparency and accountability, the minutes of the meeting (in this case the Board of Directors meeting) are well documented which includes discussions on the meeting agenda, dissenting opinions and decisions made. The meeting documentation is then signed by the leadership and all meeting participants present and distributed according to its designation.

The decision-making mechanism in the Board of Directors Meeting is taken based on deliberation for consensus which refers to the board manual as a guideline. In the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is taken based on majority voting. Meetings of the Board of Commissioners consist of internal meetings and meetings inviting the Board of Commissioners to discuss various operational aspects and financial management of the Company.

In the event that the current number of Directors of the Company is even, the quorum provision in the meeting is 50%+1 calculated from the votes of the President Director.

In 2021, the Board of Directors Meeting was held 80 times. The following are the minutes of the Board of Directors' Meeting and the attendance of the Board of Directors at the meeting.

No	Waktu Rapat Meeting Time		Kehadiran Attendance				Pokok Pembahasan Topics
	Hari & Tanggal Day & Date	Jam Hour	DIRUT	DPH	DKSM	DPP	
4	1 February 2021 February 1, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi progress program kerja tim transisi Evaluation of the progress of the transition team work program
5	2 Februari 2021 February 2, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi dan monitoring program kerja dept PSMR, dept keuangan, dept pemasaran, dept estimating, dan GM Divisi Evaluation and monitoring of the work program of the PSMR dept, finance dept, marketing dept, estimating dept, and division GM
6	8 Februari 2021 February 8, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Monitoring dan evaluasi progress Tim HUT dan Tim Transisi Monitoring and evaluation of the progress of the Anniversary Team and the Transition Team
7	9 Februari 2021 February 9, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi monitoring program kerja dept pemasaran, dept renstra, dept keuangan, dan GM Divisi Evaluation of monitoring the work program of the marketing department, strategic plan dept., finance dept., and GM Division
8	15 Februari 2021 February 15, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi progress kinerja divisi properti, GM Divisi dan Dept Keuangan Evaluation of the progress of the performance of the property division, Division GM and Finance Dept.
9	16 Februari 2021 February 16, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi dept keuangan, dept pemasaran, dept human capital dan dept QHSE Evaluation of the finance dept, marketing dept, human capital dept and QHSE dept
10	19 Februari 2021 February 19, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi kinerja dept Human Capital Human Capital dept performance evaluation
11	22 Februari 2021 February 22, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Monitoring evaluasi progress tim transisi dan tim hut Monitoring the progress evaluation of the transition team and the anniversary team
12	23 februari 2021 February 23, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi kinerja dept pemasaran, divisi dan dept keuangan Evaluation of the performance of the marketing department, division and finance department
13	1 Maret 2021 March 1, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi kinerja dept keuangan, divisi dan dept QHSE Performance evaluation of the finance dept, division and QHSE dept
14	2 Maret 2021 March 2, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi dept keuangan, divisi, dept QHSE Evaluation of finance dept, division, QHSE dept
15	15 Maret 2021 March 15, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi kinerja departemen pemasaran, departemen akuntansi dan pajak Performance evaluation of marketing department, accounting and tax department
16	16 Maret 2021 March 16, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi kinerja dept pemasaran, dept keuangan dan divisi Evaluation of the performance of the marketing dept, finance dept and division
17	25 Maret 2021 March 25, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi kinerja dept estimating, dept pemasaran, dept keuangan Evaluation of the performance of the estimating dept., marketing dept., finance dept
18	29 Maret 2021 March 29, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi progress kinerja dept Human Capital Evaluation of the performance progress of the Human Capital dept.
19	30 Maret 2021 March 30, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Evaluasi kinerja dept pemasaran dan GM Divisi Performance evaluation of the marketing dept and GM Division

No	Waktu Rapat Meeting Time		Kehadiran Attendance				Pokok Pembahasan Topics
	Hari & Tanggal Day & Date	Jam Hour	DIRUT	DPH	DKSM	DPP	
							Kajian atas pembagian dividen atas laporan audited tahun 2020 dalam rangka penyelesaian PP 69 tahun 2012 Review of dividend distribution on audited report 2020 in the context of finalizing PP 69 of 2012
20	3 Mei 2021 May 3, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Pemaparan hasil audit SPI di Unit Penunjang Produksi Presentation of SPI audit results in Production Support Units Update posisi proyek yang berpotensi mengalami kenaikan biaya di tahun 2021 Update the position of projects that have the potential to increase costs in 2021
21	Senin, 14 Juni 2021 Monday, June 14, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan monitoring dan evaluasi Proyek Investasi Description related to the monitoring and evaluation of Investment Projects
22	Selasa, 15 Juni 2021 Tuesday, June 15, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen Pemasaran, Estimating, Produksi, Keuangan Description of Marketing, Estimating, Production, Finance Department
23	Senin, 21 Juni 2021 Monday, June 21, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan monitoring dan evaluasi Nindya Tirta Unggul Description related to monitoring and evaluation of Nindya Tirta Unggul
24	Senin, 21 Juni 2021 Monday, June 21, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan monitoring dan evaluasi Implementasi ER Description related to monitoring and evaluation of ER Implementasi Implementation
25	Selasa 22 Juni 2021 Tuesday, June 22, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen Pemasaran. Estimating, PSMR Description of Marketing Department, Estimating, PSMR
26	Rabu 23 Juni 2021 Wednesday, June 23, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan rencana peresmian proyek di tahun 2021 Description related to the discussion of the project inauguration plan in 2021
27	Rabu 23 Juni 2021 Wednesday, June 23, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan rencana prognosa Tahun 2021 bidang PSMR Description related to the discussion of the 2021 prognosis plan in the PSMR field
28	Minggu 27 Juni 2021 Sunday, June 27, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan surat dari PPA Description related to the discussion of the letter from PPA
29	Senin 28 Juni 2021 Monday, June 28, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan rencana prognosa Tahun 2021 bidang PSMR Description related to the discussion of the 2021 prognosis plan in the PSMR field
30	Senin 28 Juni 2021 Monday, June 28, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan proyek investasi RDMP Dumai Description related to the discussion of the Dumai RDMP investment project
31	Selasa 29 Juni 2021 Tuesday, June 29, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan surat PT. PPA Nomor S-2374/PPA/DU/0621 Tanggal 23 Juni 2021 Perihal Permohonan Penyesuaian Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2020 Description related to PT. PPA Number S-2374/PPA/DU/0621 dated June 23, 2021 Regarding Application for Adjustment of Audited Financial Statements for Fiscal Year 2020
32	Selasa 29 Juni 2021 Tuesday, June 29, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan proses Revisi laporan keuangan Description related to the process of Revisi of financial statements
33	Kamis 1 Juli 2021 Thursday, July 1, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen Pemasaran, Produksi, Keuangan Description of Marketing, Production, Finance Department

No	Waktu Rapat Meeting Time		Kehadiran Attendance				Pokok Pembahasan Topics
	Hari & Tanggal Day & Date	Jam Hour	DIRUT	DPH	DKSM	DPP	
34	Senin 5 Juli 2021 Monday, July 5, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan monitoring dan evaluasi bidang HSE, Nindya Tirta Unggul, Persiapan Rakornas Description related to monitoring and evaluation of HSE, Nindya Tirta Unggul, Preparation of National Coordination Meeting
35	Selasa dan Rabu 6 -7 Juli 2021 Tuesday and Wednesday, July 6-7, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan finalisasi PHU Prognosa tahun 2021 Description related to the finalization of PHU Prognosis in 2021
36	Senin 12 Juli 2021 Monday, July 12, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan strategi RDMP Dumai Description related to the discussion of the Dumai RDMP strategy
37	Selasa 13 Juli 2021 Tuesday, July 13, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen HSE. Estimating, Produksi, Keuangan Description of HSE Department, Estimating, Production, Finance
38	Jumat 16 Juli 2021 Friday, July 16, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan jasa produksi Description related to the discussion of production services
39	Rabu 21 Juli 2021 Wednesday, July 21, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen HSE. Estimating, Keuangan Description of HSE Department, Estimating, Finance
40	Senin 26 Juli 2021 Monday, July 26, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan sumber pendanaan proyek-proyek investasi Description related to the discussion of funding sources for investment projects
41	Selasa 27 Juli 2021 Tuesday, July 27, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen HSE, Produksi, Estimating, Keuangan Description of HSE Department, Production, Estimating, Finance
42	Rabu dan Kamis 28-29 Juli 2021 Wednesday and Thursday, July 28-29, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan evaluasi penilaian dan peningkatan karyawan PJ, dan finalisasi jasa produksi 2020 Description related to evaluation evaluation and improvement of PJ employees, and finalization of production services 2020
43	Senin 2 Agustus 2021 Monday, August 2, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan update perkembangan ERP, dan persiapan acara peringatan HUT RI ke 76 Description related to ERP development updates, and preparation for the 76th Indonesian Independence Day commemoration event
44	Selasa dan Rabu 3-4 Agustus 2021 Tuesday and Wednesday, August 3-4, 2021	09.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan proyek RS Biringkanaya Makassar Description related to the discussion of the Makassar Biringkanaya Hospital project Paparan Departemen Pemasaran, Produksi, Estimating, Keuangan Description of Marketing, Production, Estimating, Finance Department
45	Selasa 10 Agustus 2021 Tuesday, August 10, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan update proyek RS Biringkanaya Makassar Description related to the discussion of the Makassar Biringkanaya Hospital project update

No	Waktu Rapat Meeting Time		Kehadiran Attendance				Pokok Pembahasan Topics
	Hari & Tanggal Day & Date	Jam Hour	DIRUT	DPH	DKSM	DPP	
46	Kamis Jumat 12-13 Agustus 2021 Thursday and Friday, August 12-13, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan surat Kementerian BUMN mengenai permintaan data Laporan Manajemen Triwulan 2 dan Prognosa Tahun 2021 Description related to the discussion of the letter from the Ministry of SOEs regarding the request for data on the Quarter 2 Management Report and 2021 Prognosis Paparan terkait pendanaan Nindya Beton Description related to Nindya Beton's funding Paparan Departemen Pemasaran, Produksi, Estimating, Keuangan Description of Marketing, Production, Estimating, Finance Department
47	Selasa Rabu. 17-18 Agustus 2021 Tuesday and Wednesday, August 17- 18, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan diskusi tim BCM Description related to BCM team discussion Paparan PSMR terkait Prognosa Dan RKAP PSMR Description related to Prognosis and RKAP (Rusli)
48	Rabu 19 Agustus 2021 Wednesday, August 19, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen Pemasaran, Estimating, PSMR PSMR Description related to Prognosis and RKAP
49	Senin 23 Agustus 2021 Monday, August 23, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan update perkembangan proyek tangki black Produk Description of updates on the development of the product black tank project (PM Tangki Black Produk) (PM Tank Black Product)
50	Selasa 24 Agustus 2021 Tuesday, August 24, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen Pemasaran, Estimating, PSMR Description of Marketing Department, Estimating, PSMR
51	Senin 30 Agustus 2021 Monday, August 30, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen Pemasaran, Estimating, PSMR Description of Marketing Department, Estimating, PSMR
52	Rabu, 1 September 2021 Wednesday, September 1, 2021	10:00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan paparan Proyek PLTA Samarkilang dan PLTA Tripa Description related to the discussion of the presentation of the Samarkilang HEPP Project and the HEPP Tripa
53	Kamis, 2 September 2021 Thursday, September 2, 2021	10:00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan pembahasan draft RKAP Tahun 2022 Description related to the discussion of the 2022 RKAP draft
54	Senin, 6 September 2021 Monday, September 6, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan rencana pekerjaan Elektrifikasi Kereta Api Description related to Railway Electrification work plan Paparan kinerja semester I, strategi dan prognosa tahun 2021 Description of first semester performance, strategy and prognosis for 2021
55	Selasa, 7 September 2021 Tuesday, September 7, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait dengan monitoring dan evaluasi Proyek RS Pertamedika Makassar Description related to the monitoring and evaluation of the Pertamedika Makassar Hospital Project Paparan Departemen Pemasaran, Estimating, Produksi, Keuangan Description of Marketing, Estimating, Production, Finance Department
56	Senin, 13 September 2021 Monday, September 13, 2021	10:00	✓	✓	✓	✓	Monitoring dan Evaluasi Proyek Bandara Supadio, Pembahasan Draft RKAP Tahun 2022, Remunerasi Anak Perusahaan dan KPI Individu Monitoring and Evaluation of the Supadio Airport Project, Discussion of the 2022 RKAP Draft, Subsidiary Remuneration and Individual KPIs

No	Waktu Rapat Meeting Time		Kehadiran Attendance				Pokok Pembahasan Topics
	Hari & Tanggal Day & Date	Jam Hour	DIRUT	DPH	DKSM	DPP	
57	Selasa, 14 September 2021 Tuesday, September 14, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen Pemasaran, Estimating, dan Keuangan Description of Marketing, Estimating, and Finance Department
58	Senin, 20 September 2021 Monday, September 20, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Mengenai Aplikasi SEG Description Regarding of the SEG App Paparan mengenai perumahan the puri natha cluster & aset krian Description regarding of the puri natha cluster housing & krian assets
59	Selasa, 21 September 2021 Tuesday, September 21, 2021	10:00	✓	✓	✓	✓	Monitoring dan Evaluasi Proyek RS Biringkanaya Makassar, Bidang Estimating, Bidang Produksi, dan Bidang Keuangan Monitoring and Evaluation of Makassar Biringkanaya Hospital Project, Estimating Sector, Production Sector, and Finance Sector
60	Senin, 27 September 2021 Monday, September 27, 2021	10:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Persiapan Tender Jembatan Sambas Description of Sambas Bridge Tender Preparation
61	Selasa, 28 September 2021 Tuesday, September 28, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemasaran, Keuangan, Produksi, dan Estimating Monitoring and Evaluation in Marketing, Finance, Production, and Estimating Bidang
62	Senin 4 Oktober 2021 Monday, October 4, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Presentasi KPI Individu Description of Individual KPIs
63	Selasa & Rabu, 5-6 Oktober 2021 Tuesday & Wednesday, October 5-6, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait monitoring dan evaluasi Bidang Pemasaran, Keuangan, Produksi, dan Estimating Description related to monitoring and evaluation in the Fields of Marketing, Finance, Production, and Estimating
64	Jumat, 8 Oktober 2021 Friday, October 8, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Proyek Muara Barkah Condensate Refinery Description of Muara Barkah Condensate Refinery Project
65	Rabu, 13 Oktober 2021 Wednesday, October 13, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait RKAP 2022 Description related to RKAP 2022 Skema special dividen PT Nindya Karya (Persero) PT Nindya Karya (Persero) special dividend scheme
66	Kamis Jumat, 14-15 Oktober 2021 Thursday and Friday, October 14-15, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Departemen Pemasaran dan Keuangan Description of Marketing and Finance Department
67	Senin, 25 Oktober 2021 Monday, October 25, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Provinsi DKI Jakarta Description of the DKI Jakarta Provincial School Building Construction Project
68	Selasa Rabu, 26 & 27 Oktober 2021 Tuesday and Wednesday, October 26 & 27, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Proyek Pelabuhan Bias Munjul Description of Bias Munjul Port Project Paparan proyek pekerjaan pembangunan bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka An overview of the Napun Gete dam construction project in Sikka District Paparan tim reward & punishment Description of reward & punishment team
69	Selasa, 2 November 2021 Tuesday, November 2, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemasaran, Keuangan, Produksi, dan Estimating Monitoring and Evaluation in Marketing, Finance, Production, and Estimating Field
70	Selasa, 9 November 2021 Tuesday, November 9, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait RJPP Tahun 2022-2026 dan Monitoring Evaluasi Bidang Pemasaran, Produksi, Estimating Description related to the 2022-2026 RJPP and Monitoring Evaluation in the Fields of Marketing, Production, Estimating

No	Waktu Rapat Meeting Time		Kehadiran Attendance				Pokok Pembahasan Topics
	Hari & Tanggal Day & Date	Jam Hour	DIRUT	DPH	DKSM	DPP	
71	Senin, 15 November 2021 Monday, November 15, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan terkait Turkey Business Meeting Description related to Turkey Business Meeting
72	Selasa, 16 November 2021 Tuesday, November 16, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemasaran, Produksi, dan Estimating
73	Rabu, 17 November 2021 Wednesday, November 17, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Paparan Dana Pensiun PT Nindya Karya (Persero)
74	Senin, 6 Desember 2021 Monday, December 6, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan PT Nindya Beton
75	Rabu, 8 Desember 2021 Wednesday, December 8, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Monitoring Evaluasi Departemen Pemasaran
76	Selasa, 14 Desember 2021 Tuesday, December 14, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Review Struktur Organisasi 2021 dan Usulan Struktur Organisasi 2022
78	Senin, 20 Desember 2021 Monday, December 20, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	-Program Penyiapan Talent and Career dari Departemen HC -Quality Assurance
79	Selasa, 21 Desember 2021 Tuesday, December 21, 2021	10.00	✓	✓	✓	✓	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemasaran, Produksi, dan Estimating
80	Senin, 27 Desember 2021 Monday, December 27, 2021	09:00	✓	✓	✓	✓	Paparan Rencana Kegiatan Rakernas Januari 2022

Keterangan/Description

Dirut: Direktur Utama/President Director

DPH: Direktur Produksi dan HSE/Director of Production and HSE

DKSM: Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko/Director of Finance, HR and Risk Management

DPP: Direktur Pemasaran dan Pengembangan/Director Marketing and Development

Rekapitulasi Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2021

Recapitulation of Attendance of the Board of Directors at the 2021 Board of Directors Meeting

Direksi Board of Directors	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Tidak Hadir Number of Not Attending	% Kehadiran % Presence
Haedar A. Karim	Direktur Utama President Director	80	80	0	100
Moeharmeim Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Marketing Director and Development	80	80	0	100
Firmansyah	Direktur Produksi dan HSE Director of Production and HSE	80	80	0	100
Sri Haryanto	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HR and Risk Management	80	80	0	100

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Disclosure of Affiliation Relationships between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders

Informasi tentang Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pengendali, Hingga Nama Pemilik Akhir

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Per 31 Desember 2021, sebanyak 1,00% saham Perusahaan Seri A Dwi Warna dimiliki oleh Negara republik Indonesia melalui Pemerintah Indonesia. Sisanya sebanyak 99,00% saham Seri B biasa dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). PPA sepenuhnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia. Dengan demikian, Perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia melalui Pemerintah republik Indonesia.

Disclosure of Affiliation Relationships between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders

Information about the Major Shareholders, Controlling Shareholders, Up to the Name of the Final Owner Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Company's shares. As of December 31, 2021, 1.00% of the shares of the Series A Dwi Warna Company were owned by the Republic of Indonesia through the Government of Indonesia. The remaining 99.00% of Series B shares are owned by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). PPA is wholly owned by the Republic of Indonesia. Thus, the Company is wholly owned by the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia.

Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama Direksi maupun antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, serta Komite lainnya tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Transparency of Business Relations and Affiliation Between the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders

Among members of the Board of Commissioners, fellow Directors as well as between members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, as well as other Committees there is no affiliation relationship as referred to in the provisions on Good Corporate Governance.

Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk di antaranya utang-piutang, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya. Bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

Disclosure of affiliation includes family relationships and financial relationships. Forms of financial relationships include debts, business partnerships, and so on. Forms of family relationships include special relationships, especially those caused by blood ties such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, and so on.

	Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with				Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Directors	Pemilik Modal Capital owners	Komite Lainnya Other Committees	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Directors	Pemilik Modal Capital owners	Komite Lainnya Other Committees
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS								
Sugiyartanto Komisaris Utama President Commissioner	x	x	x	x	x	x	x	x
Andar Perdana Widiastono Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x	x	x
Rika Kiswardani Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x	x	x
DIREKSI DIRECTORS								
Haedar A. Karim Direktur Utama President Director	x	x	x	x	x	x	x	x
Moeharmein Zein Chaniago Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and development	x	x	x	x	x	x	x	x
Firmansyah Direktur Produksi dan HSE Director of Production and HSE	x	x	x	x	x	x	x	x
Sri Haryanto Direktur Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko Director of Finance, HR and Risk Management	x	x	x	x	x	x	x	x

✓=ada/x= tidak ada

✓ = have/x = none

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan Kepengurusan antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain dalam periode tahun 2021.

Disclosure of Concurrent Positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The following table shows the management relationship between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in other companies in the period 2021.

Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management at Other Companies/Institutions

	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management at Other Companies/Institutions		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Jabatan Lain Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Sugiyartanto Komisaris Utama President Commissioner	x	x	✓
Andar Perdana Widiastono Komisaris Commissioner	x	x	✓
Rika Kiswardani Komisaris Commissioner	x	x	✓
Direksi Board of Directors			
Haedar A. Karim Direktur Utama President Director	x	x	x
Moeaharmein Zein Chaniago Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and development	x	x	x
Firmansyah Direktur Produksi dan HSE Director of Production and HSE	x	x	x
Sri Haryanto Direktur Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko Director of Finance, HR and Risk Management	x	x	x
✓=ada/x= tidak ada ✓ = have/x = none			

Dewan Komisaris dan Direksi telah memahami ketentuan yang terdapat di *Board Manual* mengenai rangkap jabatan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memahami untuk tidak merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung dengan Perusahaan, yang dilarang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga telah menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan (Pakta Integritas) dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Informasi mengenai rangkap jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan/institusi lain dapat ditemukan di Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have understood the provisions contained in the Board Manual regarding concurrent positions. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors understand that they should not hold other positions that may cause a direct conflict of interest with the Company, which is prohibited as stipulated in the Articles of Association, and/or which is contrary to the provisions of the applicable laws and regulations. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors have also signed a statement that they have no conflict of interest (Integrity Pact) and stated in writing matters that have the potential to cause a conflict of interest to themselves and submitted them to the GMS, and complied with the applicable laws and regulations, including by not involving themselves. on insider trading for personal gain.

Information regarding the concurrent positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors in other companies/institutions can be found in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut disampaikan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan di Nindya Karya dan perusahaan lainnya yang diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kepemilikan Saham
Shareholding

Disclosure of Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The following is the share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in Nindya Karya and other companies which is disclosed periodically through the list of share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

	Kepemilikan Saham Shareholding	
	Nindya Karya	Perusahaan Lain (>5%) Other Companies (>5%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Sugiyartanto Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	Nihil None
Andar Perdana Widiastono Komisaris Commissioner	Nihil None	Nihil None
Rika Kiswardani Komisaris Commissioner	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors		
Haedar A. Karim Direktur Utama President Director	Nihil None	Nihil None
Moeharmein Zein Chaniago Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	Nihil None	Nihil None
Firmansyah Direktur Produksi dan HSE Director of Production and HSE	Nihil None	Nihil None
Sri Haryanto Direktur Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko Director of Finance, HR and Risk Management	Nihil None	Nihil None

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organs

Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit sebagai bentuk upaya memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Audit turut mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi agar dapat memastikan Perseroan dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai prinsip GCG, nilai-nilai, serta etika Perusahaan.

Piagam Komite Audit

Agar tugas dan kewenangan Komite Audit Perusahaan berjalan secara profesional, independen serta bebas intervensi, Perseroan menetapkan Piagam Komite Audit yang disepakati dan ditandatangani secara bersama oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi pada 20 Oktober 2020.

Adapun ruang lingkup Piagam Komite Audit meliputi:

1. Struktur Organisasi
2. Persyaratan Profesional
3. Tugas-tugas Komite Audit
4. Wewenang Komite Audit
5. Tanggung Jawab dan Kewajiban Komite Audit
6. Penilaian Kinerja

Ketentuan dan Independensi Komite Audit

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Ketentuan terkait organisasi Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Ketua dan Anggota Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak secara independen;
3. Komite Audit diketuai oleh 1 (satu) orang yang berasal dari Anggota Komisaris atau dari luar Perusahaan.
4. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
5. Anggota Komite Audit dan Komite lain dapat berjumlah 2 (dua) orang yang bukan berasal dari anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan.
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
7. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

Audit Committee

The Board of Commissioners formed the Audit Committee as an effort to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG). The Audit Committee also supports the Board of Commissioners in carrying out supervision over the implementation of the functions of the Board of Directors in order to ensure that the Company is managed with sound management consistently in accordance with GCG principles, corporate values and ethics.

Audit Committee Charter

In order for the duties and authorities of the Company's Audit Committee to run professionally, independently and free of intervention, the Company established the Audit Committee Charter which was agreed and signed jointly by all levels of the Board of Commissioners and Board of Directors on October 20, 2020.

As for the scope of the Audit Committee Charter include:

1. Organizational Structure
2. Professional Requirements
3. Duties of the Audit Committee
4. Authority of the Audit Committee
5. Responsibilities and Obligations of the Audit Committee
6. Performance Appraisal

Provisions and Independence of the Audit Committee

The Audit Committee in carrying out its duties is under and directly responsible to the Board of Commissioners. Provisions related to the organization of the Audit Committee are as follows:

1. The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
2. The Chairman and Members of the Audit Committee are members of the Board of Commissioners who can act independently;
3. The Audit Committee is chaired by 1 (one) person who is a member of the Board of Commissioners or from outside the Company.
4. Members of the Audit Committee may come from members of the Board of Commissioners or from outside the Company.
5. Members of the Audit Committee and other Committees can be 2 (two) people who are not members of the Supervisory Board or from outside the Company.
6. Appointments and dismissals of members of the Audit Committee are reported to the GMS.
7. Members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners, resign automatically when their term of office as a member of the Board of Commissioners ends.

8. Apabila anggota Dewan Komisaris berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

8. If a member of the Board of Commissioners ceases to be a member of the Board of Commissioners, the Chairman of the Audit Committee must be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya dan Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
5. Salah satu dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan memahami industri/bisnis Perseroan.

To be appointed as a member of the Audit Committee, the following requirements must be met:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/inspection.
2. Do not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company.
3. Able to communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to complete the task and Other requirements stipulated in the Audit Committee Charter.
5. One of the members of the Audit Committee must have an educational background or have expertise in accounting or finance, and understand the industry/business of the Company.

Ketentuan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sedangkan anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan yang sama dengan jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Terms of Service for Members of the Audit Committee

The position of members of the Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Meanwhile, members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners have the same tenure as their positions as members of the Board of Commissioners.

Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris sewaktu-waktu dalam meninjau dan memberhentikan keanggotaan Komite Audit.

Members of the Audit Committee whose term of office has ended may be reappointed only for 1 (one) term of office for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners at any time to review and terminate the membership of the Audit Committee.

Susunan Komite Audit yang diangkat berdasarkan surat keputusan dewan komisaris PT NINDYA KARYA (Persero) No. SK-06/Kom/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan ketua Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT NINDYA KARYA Juncto Surat Keputusan Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA (Persero) No. SK-40/Kom/06/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT NINDYA KARYA (Persero), sehingga susunan ketua dan anggota komite audit adalah sebagai berikut:

arrangement Audit Committee appointed by letter the decision of the board of commissioners of PT NINDYA KARYA (Persero) number: SK-06/Kom/01/2020 dated January 6. 2020 regarding Termination and Appointment chairman The Company's Audit Committee (Persero) PT NINDYA KARYA Juncto Decree of the Board of Commissioners of PT NINDYA KARYA (Persero) Number: SK-40/Kom/06/2020 dated 02 June 2020 concerning Appointment Member PT NINDYA KARYA (Persero) Audit Committee. so that arrangement chairman and members audit committee is as following :

Ketua : Andar Perdana Widiastono
Anggota : Mamat Supangkat

Chairman : Andar Perdana Widiastono
Member : Mamat Supangkat

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit Tahun 2021

Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Composition and Composition of the 2021 Audit Committee Membership

The composition of the members of the Audit Committee as of December 31, 2021 is as follows:

Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office
Andar Perdana Widiastono	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-40/Kom/06/2020 Decree of the Board of Commissioners No. SK-40/Kom/06/2020	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Following the term of office as Commissioner
Mamat Supangkat	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-48/Kom/05/2021 Decree of the Board of Commissioners No. SK-48/Kom/05/2021	Anggota Member	1 Juni 2021-31 Mei 2023 June 1, 2021-May 31, 2023

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Andar Perdana Widiastono

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Andar Perdana Widiastono dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Chairman of the Audit Committee Andar Perdana Widiastono can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

MAMAT SUPANGKAT

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia, Tempat Tanggal Lahir Age, Place Date of Birth	59 tahun, Tasikmalaya 21 November 1963 59 years old, Tasikmalaya, November 21, 1963
Domisili Domicile	Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	D3 STAN, S1 STIE Tridharma Bandung, UNA Profesi, CRMP Diploma 3 Degree of STAN, Bachelor Degree of Tridharma Bandung, UNA Profession, CRMP
Riwayat Jabatan Work Experience	- Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) - Konsultan Keuangan, GCG dan Management Resiko - Staf Komite Audit PT Krakatau Steel - Komite Audit PT Jakarta Propertindo (Jakpro) - Kepala Divisi Internal Audit PT Jakpro - Wakil Ketua Team Penerbitan Obligasi "Jakpro I" - Sekretaris Perusahaan PT Jakpro - Ketua Team Pengadaan Barang dan Jasa PT Jakpro - Ketua Team Pemilihan Mitra Strategis PT Jakpro - Kepala Divisi Bussiness Development PT Jakpro - Konsultan Properti, Konsultan Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko - Komite Manajemen Risiko PT Semen Baturaja (Persero) Tbk - Komite Audit PT. Nindya Karya (Persero) - Auditor of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) - Financial Consultant, GCG and Risk Management - Staff of the Audit Committee of PT Krakatau Steel - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Audit Committee - Head of Internal Audit Division of PT Jakpro - Deputy Chairman of the "Jakpro I" Bond Issuance Team - Corporate Secretary of PT Jakpro - Head of the Goods and Services Procurement Team of PT Jakpro - Head of the PT Jakpro Strategic Partner Selection Team - Head of the Business Development Division of PT Jakpro - Property Consultant, Financial Consultant, Investment and Risk Management - Risk Management Committee PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Audit Committee PT. Nindya Karya (Persero)

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Sebagaimana diuraikan dalam Piagam Komite Audit Perusahaan, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, meliputi:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Dewan Komisaris dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:

1. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan serta rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan manajemen dan Informasi lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan Perseroan.
4. Mengkaji kecukupan fungsi audit Internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
5. Mengkaji di dalamnya perencanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

Wewenang Komite Audit

1. Menilai penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta proses seleksi atau reseleksi Auditor Eksternal, terutama reseleksi Auditor Eksternal.
2. Melakukan penilaian pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal terutama berkaitan dengan ketaatan terhadap standar profesi.
3. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Auditor Eksternal tentang temuan audit dan tindak lanjutnya, jika dipandang perlu.
4. Melakukan penilaian atas pendapat Auditor Eksternal tentang mutu dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan kajian Direksi.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Audit Committee

As outlined in the Company's Audit Committee Charter, the Audit Committee is tasked with providing opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors, identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and performing other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, include:

1. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties.
2. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors.
3. Provide recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation.
4. Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the Company.
5. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners may also give other assignments to the Audit Committee in the form of:

1. Reviewing information regarding the Company as well as the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company Work and Budget Plan (RKAP), management reports and other information.
2. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations related to the Company's activities.
3. Reviewing complaints related to the Company.
4. Reviewing the adequacy of the Internal audit function including the number of auditors, annual work plans and assignments that have been carried out.
5. Reviewing the external audit planning including planning audits and the number of auditors.

Authority of the Audit Committee

1. Assessing the preparation of the Terms of Reference (TOR) as well as the selection or selection process for the External Auditor, especially the selection of the External Auditor.
2. Assessing the implementation of the audit by the External Auditor, especially with regard to compliance with professional standards.
3. Discussing the results of the audit with the External Auditor regarding audit findings and follow-up actions, if deemed necessary.
4. Assessing the opinion of the External Auditor regarding the quality and accounting principles applied in financial reporting.
5. Provide input to the Board of Commissioners as a study material for the Board of Directors.

6. Peraturan perundang-undangan atas perjanjian/kontrak yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.
 7. Untuk pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dapat melakukan penelitian ataupun penyelidikan terhadap masalah-masalah tertentu yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan atau dapat meminta bantuan Auditor Internal atau Auditor Eksternal.
 8. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala.
 9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Perseroan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 10. Komite Audit memiliki kewenangan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap personel, keuangan, dokumen, aset perusahaan, informasi terkait lainnya dan seluruh operasional sesuai dengan tugas yang diberikan Dewan Komisaris.
6. Legislation on agreements/contracts that require the approval of the Board of Commissioners.
 7. To carry out its duties, the Audit Committee may conduct research or investigations into certain issues that affect the Company's performance or may request assistance from the Internal Auditor or External Auditor.
 8. Provide input to the Board of Commissioners on the preparation and improvement of the Audit Committee Charter on a regular basis.
 9. Carry out other tasks related to the supervision of the Company given by the Board of Commissioners.
 10. The Audit Committee has full and unrestricted access authority to personnel, finance, documents, company assets, other related information and all operations in accordance with the duties assigned by the Board of Commissioners.

Hubungan Kerja

Komite Audit dalam melakukan tugasnya dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Auditor Internal maupun dengan Direksi, staf, dan unit-unit kerja di bawahnya dan/atau meminta laporan khusus baik dari Auditor Internal maupun pejabat yang berwenang.

Work Relationship

The Audit Committee in carrying out its duties can communicate directly with the Internal Auditor as well as with the Board of Directors, staff and work units under it and/or request a special report from either the Internal Auditor or the competent authority.

Transparansi Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk pengungkapan, Independensi Komite Audit dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Transparency of the Independence of the Audit Committee Members

The Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. As a form of disclosure, the independence of the Audit Committee is described in the table below:

Aspek Independensi Independence Aspect	Andar Perdana Widiastono	Mamat Supangkat
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Have a financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	X	X
Memiliki hubungan kepengurusan di anak perusahaan, maupun afiliasi Having management relationships in subsidiaries, or affiliates	X	X
Memiliki hubungan kepemilikan saham Perusahaan Have a share ownership relationship with the Company	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Served as administrator of political parties, local government officials	X	X

v=ada/x= tidak ada
v=ada(yes)/x= tidak ada(none)

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Risalah rapat Komite Audit disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat merupakan salah satu dari pelaksanaan tugas Komite Audit. Selama tahun 2021, Komite Audit telah menggelar rapat sebanyak 15 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds a meeting at least in accordance with the provisions of the Board of Commissioners meeting stipulated in the Articles of Association. Minutes of the Audit Committee meetings are submitted in writing to the Board of Commissioners. The meeting is one of the duties of the Audit Committee. During 2021, the Audit Committee has held meetings as many as 15 times, with details as follows:

Risalah Rapat Komite Audit di Tahun 2021
Minutes of Audit Committee Meeting in 2021

No	Tanggal Date	Media	Agenda
1	9 Februari 2021 February 9, 2021	VIRTUAL	Reviu Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit pada PT Bank Negara Indonesia Tbk. Diversity of Composition of The Board of Commissioners and Board of Directors
2	19 April 2021 April 19, 2021	VIRTUAL	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2021 The Board of Commissioners' Response to the 2021 First Quarter Management Report.
3	4 Mei 2021 May 4, 2021	VIRTUAL	Reviu atas Pemohonan Persetujuan Perubahan Porsi Nindya Karya-Bintang Buana Jaya, KSO pada Proyek Peningkatan Jalur KA antara Serang-Merak Lintas Rangkasbitung-Merak Review on Application for Approval of Portion Change of Nindya Karya-Bintang Buana Jaya, KSO on the Project to Improve the Railway Line between Serang-Merak Lintas Rangkasbitung-Merak
4	5 Juni 2021 May 4, 2021	VIRTUAL	Reviu atas Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Kerja pada Konsorsium PP-NK Pembangunan Jembatan Teluk Kendari Review of Application for Approval of Work Fund Loans at the PP-NK Consortium for Kendari Bay Bridge Construction.
5	24 Juni 2021 June 24, 2021	VIRTUAL	Reviu Permohonan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan pada PT Sarana Multi Infrastruktur Review of the Application for Extension of Financing Facilities at PT Sarana Multi Infrastruktur
6	24 Juni 2021 June 24, 2021	VIRTUAL	Reviu Permohonan Perpanjangan Fasilitas Pinjaman Money Market, SKBDN/Bank Garansi pada PT Bank Panin Tbk. Review of Application for Extension of Money Market Loan Facility, SKBDN/Bank Guarantee at PT Bank Panin Tbk.
7	18 Juli 2021 July 18, 2021	VIRTUAL	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2021 Response of the Board of Commissioners on the Management Report Quarter II 2021
8	23 Agustus 2021 August 23, 2021	VIRTUAL	Reviu Permohonan Persetujuan Penambahan Fasilitas Non Cash Loan pada Proyek Pengembangan Terminal BBM Bau-Bau (Nindya-BBB, KSO) Review of Application for Approval for the Addition of Non-Cash Loan Facilities at the Bau-Bau Fuel Terminal Development Project (Nindya-BBB, KSO)
9	24 Agustus 2021 August 24, 2021	VIRTUAL	Reviu Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit atas Nama PT Nindya Karya (Persero) pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Review of Application for Credit Facility Approval on behalf of PT Nindya Karya (Persero) at PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
10	2 September 2021 September 2, 2021	VIRTUAL	Reviu Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Kerja pada KSO NINDYA-GSB, untuk Proyek Pembangunan 2 (dua) unit Tangki Black Produk PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap Review of the Application for Approval of Working Fund Loans at KSO NINDYA-GSB, for the Construction Project of 2 (two) units of Black Tank Products from PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap.
11	23 September 2021 September 23, 2021	VIRTUAL	Reviu Permohonan Perpanjangan Fasilitas Pinjaman Money Market, SKBDN/Bank Garansi pada PT Bank Panin Tbk. Review of Application for Extension of Money Market Loan Facility, SKBDN/Bank Guarantee at PT Bank Panin Tbk.
12	24 September 2021 September 24, 2021	VIRTUAL	Reviu Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Kerja pada KSO NINDYA-TIRTA Proyek SPAM Review of Applications for Approval of Working Fund Loans for KSO NINDYA-TIRTA SPAM Project
13	15 Oktober 2021 October 15, 2021	VIRTUAL	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Rencana Kerja Anggaran dan Perusahaan Tahun 2022 The Board of Commissioners' Response to the 2022 Budget and Corporate Work Plan.
14	19 Oktober 2021 October 19, 2021	VIRTUAL	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2021 Response of the Board of Commissioners to the Management Report Quarter III of 2021.
15	10 Desember 2021 December 10, 2021	VIRTUAL	Reviu permintaan persetujuan perubahan porsi KSO Review of request for approval of changes in KSO portion

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Tahun 2021
Recapitulation of Attendance of the Audit Committee at the 2021

Komite Audit Audit Committee	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Tidak Hadir Number of Not Attending	% Kehadiran % Presence
Andar Perdana Widiastono	Ketua Chairman	15	15	0	100
Mamat Supangkat	Anggota Member	15	15	0	100

Program Peningkatan Kompetensi

Agar Komite Audit terus memperbaharui pengetahuannya akan industri konstruksi dan bisnis Nindya Karya, Perseroan memberikan program peningkatan kompetensi berupa seminar, workshop, atau kegiatan lainnya. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan Tahunan ini.

Kebijakan Remunerasi

Komponen remunerasi Komite Audit per bulan terdiri dari honorarium sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No SK-48/KOM/05/2021 Berdasarkan keputusan tersebut, honorarium Anggota Komite Audit sebesar 20% dari gaji Direktur Utama.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Tahun 2021

Di sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menyelesaikan berbagai program kerja sebagai berikut:

1. Penelaahan informasi keuangan Perseroan,
2. Penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal,
4. Penelaahan atas pelaksanaan manajemen risiko,
5. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan,
6. Penelaahan dan pemberian rekomendasi terkait potensi benturan kepentingan,
7. Memberikan pendapat independen,
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Audit

Atas pelaksanaan tugas Komite Audit sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas masukan yang diberikan dalam mendukung aktivitas pengawasan dan pemberian saran Dewan Komisaris kepada Perseroan. Masukan tersebut menjadi bahan bagi Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas yang ada dengan sebaik-baiknya.

Competency Improvement Program

In order for the Audit Committee to continue to update its knowledge of the construction industry and Nindya Karya's business, the Company provides competency improvement programs in the form of seminars, workshops, or other activities. Regarding the competency improvement program that the Audit Committee will participate in in 2021, see the Company Profile chapter in this Annual report.

Remuneration Policy

The remuneration component of the Audit Committee per month consists of the honorarium as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners No. SK-48/KOM/05/2021 Based on this decision, the honorarium for the members of the Audit Committee is 20% of the salary of the President Director.

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Audit Committee in 2021

Throughout 2021, the Audit Committee has completed various work programs as follows:

1. Reviewing the Company's financial information,
2. Review of compliance with laws and regulations relating to the Company's business activities,
3. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor,
4. Reviewing the implementation of risk management,
5. Reviewing complaints related to the accounting and financial reporting processes,
6. Review and provide recommendations regarding potential conflicts of interest,
7. Provide independent opinion,
8. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a public accountant based on independence, scope of assignment and remuneration for services and maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information

Audit Committee Performance Evaluation and Assessment

For the implementation of the duties of the Audit Committee throughout 2021, the Board of Commissioners appreciates the input provided in supporting the supervisory activities and providing advice to the Company by the Board of Commissioners. Their input are material for the Board of Commissioners to carry out the existing duties as well as possible.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Function

Melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. No. S-254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 Hal: Talent & Succession Managemen Direksi BUMN diminta kepada Direksi BUMN agar segera membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR).

Komisaris PT Nindya Karya (Persero) menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) No. KEP-24/KOM/04/2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nindya Karya (Persero).

Selanjutnya Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) No. KEP-24/KOM/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nindya Karya (Persero), dengan susunan sebagai berikut:

1. Sugiyartanto sebagai Ketua
2. Rika Kiswardani sebagai Sekretaris
3. Zahirwan Marza sebagai Anggota

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Perseroan. Masing-masing profilnya bisa dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Menerima Talent Classification Meeting yang diusulkan oleh Talent Committee Direksi;
2. Melakukan Talent Classification Meeting atas hasil Talent Classification Meeting melalui surat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Komisaris;
3. Mengusulkan kepada Menteri BUMN Up. Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi atas hasil Talent Classification Meeting melalui surat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

Through the letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-254/MBU/04/2020 dated April 17, 2020 Subject: Talent & Succession Management The SOE Directors are requested to the SOE Directors to immediately form the Nomination and Remuneration Committee (KNR).

The Commissioner of PT Nindya Karya (Persero) stipulates the Decree of the Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) No. KEP-24/KOM/04/2020 concerning the Nomination and Remuneration Committee of PT Nindya Karya (Persero).

Furthermore, the Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) formed the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) No. KEP-24/KOM/04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Nomination and Remuneration Committee of PT Nindya Karya (Persero), with the following order:

1. Sugiyartanto as Chairman
2. Rika Kiswardani as Secretary
3. Zahirwan Marza as Member

Profile of The Nomination and Remuneration Committee

All Chairs and Members of the Nomination and Remuneration Committee are Commissioners of the Company. Each of their profiles are presented in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

1. Receiving the Talent Classification Meeting that proposed by the Talent Committee of the Board of Directors;
2. Conducting Talent Classification Meeting on the results of the Talent Classification Meeting via a letter from the Board of Commissioners/Supervisory Board which signed by at least Commissioner;
3. Propose to the Minister of SOEs Up. Deputy Human Resources, Technology and Information Top the results of the Talent Classification Meeting via a letter from the Board of Commissioners/Supervisory Board which signed by at least Commissioner;
4. Helping the Board of Commissioners carry out performance appraisal of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been compiled as material evaluation;

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ;
 6. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 7. Menyediakan talent pool berupa data dan profil calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Provide recommendations to the Board Commissioner regarding the development program ability of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners ;
 6. Provide proposals for qualified candidates requirements as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the Board Commissioners to be submitted to the GMS;
 7. Providing a talent pool in the form of data and profile of prospective members of the Board of Directors and/or members Board of Commissioners.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun sesuai yang ditetapkan dalam dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan rapat merupakan salah satu dari pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menggelar rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Nomination and Remuneration Committee meets at least 4 (four) times a year as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. The meeting is one of the duties of the Nomination and Remuneration Committee. During 2021, the Nomination and Remuneration Committee held 8 (eight) meetings, with details as follows:

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi di Tahun 2021

Minutes of the Nomination and Remuneration Committee Meeting in 2021

NO	Waktu Time	Lokasi Place	Agenda
1	17 Februari 2021 February 17, 2021	virtual	Penyampaian Nominated Talent PT NINDYA KARYA (Persero) satu level dibawah Direksi (BoD-1) sesuai surat Direktur SDM dan Hukum PT Danareksa (Persero)/Sekretaris CTC Klaster Danareksa-PPA Nomor:S-46/001/DIR.03 tanggal 13 Januari 2021. Submission of PT NINDYA KARYA (Persero) Nominated Talent one level below the Board of Directors (BoD-1) according to the letter of the Director of Human Resources and Legal PT Danareksa (Persero) / Secretary of CTC Cluster Danareksa-PPA Number: S-46/001/DIR.03 dated January 13 2021.
2	08 Maret 2021 March 8, 2021	virtual	Up Dating Talent Pool satu level dibawah Direksi (BoD-1) sesuai dengan surat dari Menteri BUMN No.S-37/MBU/DSi/02/2021 tanggal 15 Februari 2022. Up Dating Talent Pool one level below the Board of Directors (BoD-1) in accordance with a letter from the Minister of SOEs No.S37/MBU/DSi/02/2021 dated February 15, 2022.
3	03 Maret 2021 March 3, 2021	Virtual	Updating Talent Pool Bo D-1 Perubahan Organisasi PT Nindya Karya (Persero). Updating Talent Pool Bo D-1 Organizational Change of PT Nindya Karya (Persero).
4	22 Maret 2021 March 22, 2021	Virtual	Perubahan Organisasi PT Nindya Karya (Persero). Changes in the Organization of PT Nindya Karya (Persero).
5	15 Juni 2021 June 15, 2021	Virtual	Sosialisasi Cluster Talent Committee (CTC) Klaster Danareksa-PPA Subklaster BUMN Jasa Konstruksi dan Konsultan Karya. Socialization of the Cluster Talent Committee (CTC) of the Danareksa Cluster-PPA Sub-cluster of BUMN Construction Services and Work Consultants.
6	29 Juni 2021 June 29, 2021	Virtual	Validasi dan Klaster CTC Klaster Danareksa-PPA. Danareksa Cluster CTC Validation and Cluster-PPA.
7	23 Juni 2021 June 23, 2021	Virtual	Rekomendasi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2021 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2020. Recommendations for Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2021 fiscal year and Tantiem for Performance in 2020.
8	7 Juli 2021 July 7, 2021	Virtual	Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris melalui metode self-assessment Talent Classification Meeting dengan Talent Committee Direksi. Performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners through the self-assessment method of Talent Classification Meeting with the Talent Committee of the Board of Directors.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat Tahun 2021
Recapitulation of Attendance of the Nomination and Remuneration Committee at the 2021 Meeting

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Tidak Hadir Number of Not Attending	% Kehadiran % Presence
Sugiyartanto	Ketua Chairman	8	8	0	100%
Rika Kiswardani	Anggota Member	8	8	0	100%
Zahirwan Marza	Anggota Member	8	8	0	100%

Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Related to the Remuneration Policy:

1. Provide recommendations to the Board Commissioner regarding the remuneration structure, policy on remuneration and the amount of remuneration.
2. Helping the Board of Commissioners carry out performance appraisal with conformity remuneration received by each members of the Board of Directors and/or members of the Board Commissioner.

Kebijakan Suksesi Direksi: Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemilihan Ulang Direksi

Board of Directors Success Policy: Board of Directors Appointment, Dismissal and Re-Election Procedures

Pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dan pemilihan ulang Direksi Perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi terdiri dari:

Persyaratan

1. Persyaratan formal Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Persyaratan materiil Persyaratan materiil Direksi yaitu:
 - a. Keahlian;
 - b. Integritas;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pengalaman;
 - e. Jujur;
 - f. Perilaku yang baik; dan
 - g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Sumber Bakal Calon

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN dan sumber lain.

Implementation of the appointment, dismissal and the re-election of the Company's Board of Directors is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 Regarding Requirements and Procedure for Appointment and Dismissal Member of the Board of Directors of State-Owned Enterprises. In The rule states that the mechanism the appointment and dismissal of the Board of Directors consists of from:

Requirements

1. The formal requirements for the Board of Directors of the Company are individuals who are capable of carrying out legal actions, except that within 5 (five) years prior to the appointment they have:
 - a. Declared bankrupt;
 - b. Become a Member of the Board of Directors or Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who is found guilty of causing a State-Owned Enterprise and/or Company to be declared bankrupt;
 - c. Sentenced for committing a crime that is detrimental to state finances, BUMN, Company, and/or related to the financial sector.
2. Material requirements The material requirements of the Board of Directors are:
 - a. Skill;
 - b. Integrity;
 - c. Leadership;
 - d. Experience;
 - e. Honest;
 - f. Good behavior; and
 - g. High dedication to advancing and developing the company.

Source of Prospective Candidates

The nomination of candidates for the Board of Directors is based on the sources of the nominees consisting of former Directors of SOEs, Board of Commissioners, Talents of BUMN, Talents of the Ministry of SOEs and other sources.

Penjaringan

Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan formal dan Persyaratan lain dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK). UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

Usulan Pengangkatan

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan. Untuk penetapan, karena status Perseroan sebagai BUMN yang kepemilikan seluruh saham dimiliki negara maka penetapan dilakukan melalui Keputusan Menteri.

Pemberhentian

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yaitu:

1. Alasan pemberhentian Direksi meliputi ketidakmampuan Direksi dalam menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan bagi Perusahaan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan serta mengundurkan diri.
2. Tata cara pemberhentian dilakukan dengan evaluasi oleh Deputi kepada Direksi yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan dievaluasi, Perusahaan terlebih dahulu memberikan informasi kepada Direksi yang bersangkutan agar yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan (untuk lisan dibuatkan berita acara penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari terhitung setelah Direksi yang bersangkutan memperoleh informasi pemberhentian kepada Deputi. Setelah disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan kedalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan.

Selection

The selection of the names of the Directors is carried out by the Minister of SOEs, the Secretary, Technical Deputy, and/or the Deputy seeking candidates from various sources. All prospective candidates are administered by the Deputy.

Feasibility and Compliance Test (UKK)

A candidate who will be determined as a candidate for a member of the Board of Directors is someone who has been declared to have met the formal requirements and other requirements and passed the Feasibility and Compliance Test (UKK). UKK for prospective candidates is carried out by a professional institution appointed by the Minister.

Appointment Proposal

Candidates who have received a recommendation "Suggested" by the assessment team can be appointed as Directors of the Company. For determination, due to the status of the Company as a state-owned enterprise whose ownership of all shares is owned by the state, the determination is made through a Ministerial Decree.

Dismissal

Provisions regarding the dismissal mechanism as stated in the SOE Decree No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, namely:

1. The reasons for the dismissal of the Board of Directors include the inability of the Board of Directors in carrying out their duties, violating the provisions of the Articles of Association and the legislation, being involved in harmful actions for the Company and the state, committing acts that violate ethics, being found guilty by a court decision and resigning.
2. The procedure for dismissal is carried out by evaluation by the Deputy to the relevant Board of Directors followed by submitting a proposal to be later determined by the Minister of SOEs. Before being determined and evaluated, the Company first provides information to the relevant Board of Directors so that the person concerned can provide a self-defense provided that the self-defense is submitted in written and oral form (for verbally an official report for the submission of the defense is made) a maximum of 14 days after the relevant Board of Directors has obtained dismissal information to the Deputy. After submitting the self-defense, the minutes of the defense are submitted to the GMS for later decisions.

Proses pemberhentian Direksi dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Direksi pengganti dan pemberhentian berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau RUPS.

Pemilihan Ulang

Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN, dapat dilakukan tanpa UKK, apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya yang antara lain didasarkan pada pencapaian target kinerja Perusahaan, kekompakan Tim, Integritas, dan rekam jejak (track record). Penyajian hasil penilaian dapat dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

Dengan statusnya sebagai BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Perusahaan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 dalam hal pengangkatan, pemilihan ulang dan pemberhentian Direksi. Karena hal-hal tersebut bersifat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku wakil pemerintah di dalam Perseroan, maka fungsi Nominasi dan Remunerasi yang Perusahaan diadakan.

Dari 4 (empat) Direksi Perusahaan, 3 (tiga) di antaranya merupakan pejabat yang pernah berkarier di Perusahaan dan berasal dari Internal Perusahaan. hal ini menunjukkan skema suksesi Direksi Perusahaan yang memberikan kesempatan terbuka bagi karyawan Internal Perusahaan sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya."

The process of dismissing the Board of Directors is carried out simultaneously with the appointment of a replacement Board of Directors and the dismissal is effective as of the date stipulated in a Ministerial Decree or GMS.

Re-election

Re-appointment of members of the Board of Directors in the same position in one BUMN, can be done without UKK, if it is considered capable of carrying out their duties properly during their term of office which is based on, among other things, the achievement of the Company's performance targets, Team cohesiveness, Integrity, and track record.. The presentation of the assessment results can be done in the form of a qualitative narrative.

With its status as a BUMN whose share ownership is owned by the Government, the Company always follows the established procedures as stated in the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 regarding the appointment, re-election and dismissal of the Board of Directors. Because these matters are stipulations issued by the Ministry of SOEs as the government's representative in the Company, the Company's Nomination and Remuneration functions are abolished.

Of the 4 (four) Directors of the Company, 3 (three) of them are officials who have had a career in the Company and are from the Company's Internal. This shows the succession scheme of the Company's Board of Directors which provides open opportunities for the Company's internal employees in accordance with their competencies and capacities."

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organ of Directors

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi antar organ perusahaan, mulai dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan. Sekretaris Perusahaan merupakan salah satu organ Perusahaan yang menunjang pemeliharaan hubungan baik dengan pihak eksternal termasuk Pemerintah Indonesia, regulator, dan masyarakat. Perusahaan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) untuk memastikan pemenuhan hubungan dengan baik dalam lingkup internal dan eksternal.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Dasar Pengangkatan

TAUFIK HIDAYAT

Kewarganegaraan Citizenship	INDONESIA
Usia, Tempat Tanggal Lahir Age, Place Date of Birth	36, Pare Pare/1986-02-23
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	0055/DIRUT/KPTS/DHC/05/2021 0055/DIRUT/KPTS/DHC/05/2021
Riwayat Pendidikan Educational background	S1-Teknik Sipil, Universitas Mercubuana S1-Civil Engineering, Mercubuana University
Riwayat Jabatan Position History	2021-Sekretaris Perusahaan 2021-VP Pemasaran 3 2018-Manager Pemasaran III 2021-Company secretary 2021-VP of Marketing 3 2018-Marketing Manager III

Company Secretary

The Corporate Secretary has an important role as a liaison that facilitates communication between company organs, starting from the GMS, the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees. The Corporate Secretary is one of the Company's organs that supports the maintenance of good relations with external parties including the Government of Indonesia, regulators, and the public. The Company appoints a Corporate Secretary (Corporate Secretary) to ensure the fulfillment of good relations within the internal and external scope.

The Party that Appoints and Dismisses the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Corporate Secretary reports directly to the President Director.

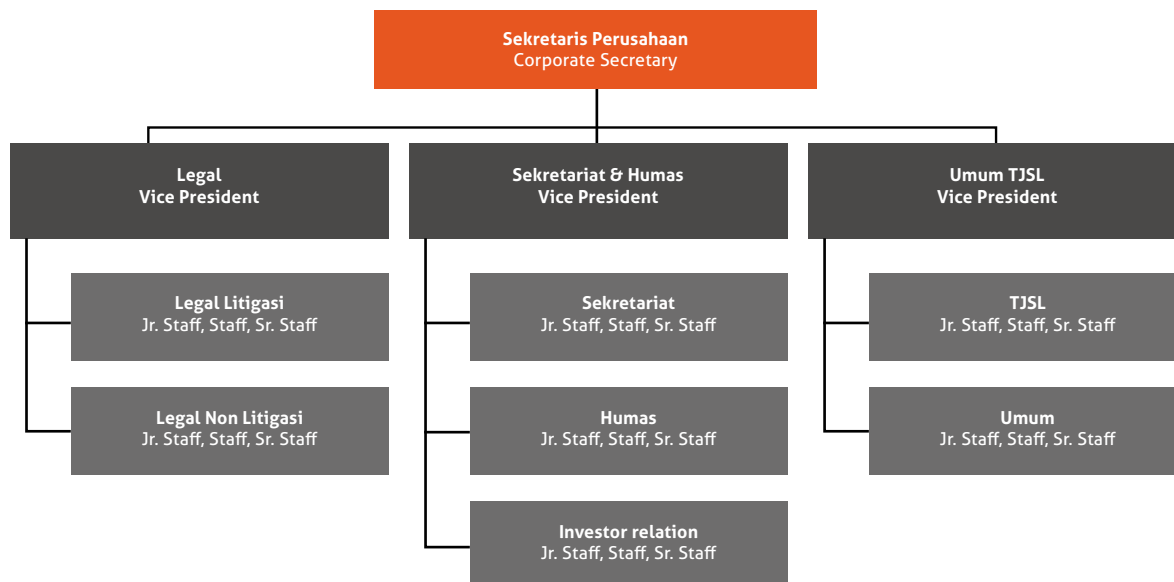
Corporate Secretary and Basis of Appointment

Kedudukan dan Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 0001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021

Position and Organization of the Corporate Secretary

The organizational structure of the Corporate Secretary is determined based on the Decree 0001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021



Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 18 orang.

Until the end of 2021, the number of employees who are members of the Corporate Secretary unit is 18 people.

Fungsi/Jabatan Function/Position	Nama Name
SEKRETARIS PERUSAHAAN COMPANY SECRETARY	Taufik Hidayat
VP LEGAL VP LEGAL	Mohamad Ibrahim
VP SEKRETARIAT dan HUMAS VP SECRETARIAT and PR	Muhammad Maududy Ary
VP UMUM dan TJSL VP GENERAL and TJSL	Deka Hardiya Putra
STAFF LEGAL LITIGASI LITIGATION LEGAL STAFF	Ridho Syach Wicaksono
STAFF LEGAL NON LITIGASI NON-LITIGATION LEGAL STAFF	Tamara Mutiara Devinda
STAFF LEGAL NON LITIGASI NON-LITIGATION LEGAL STAFF	Riyan Hidayat
STAFF GCG GCG STAFF	Eka Netti Rochiswanti
STAFF LEGAL NON LITIGASI NON-LITIGATION LEGAL STAFF	Saikin
STAFF SEKRETARIAT SECRETARIAT STAFF	Reza Febriansyah
SEKRETARIS DIREKSI SECRETARY of THE BOARD of DIRECTORS	Beti Yulia Harwintari
SEKRETARIS DIREKSI SECRETARY of THE BOARD of DIRECTORS	Idha Dwi Prasetyo
STAFF HUMAS PR STAFF	Rendi Julias
STAFF HUMAS PR STAFF	Yulian Fauzi

Fungsi/Jabatan Function/Position	Nama Name
STAFF HUMAS PR STAFF	Ajeng Ayuning Pertiwi
STAFF INVESTOR RELATION INVESTOR RELATION STAFF	Mesa Fitika
STAFF TJSL TJSL STAFF	Kartika Purnamasari
STAFF TJSL TJSL STAFF	Sofi Jihan Nabilah
STAFF UMUM GENERAL STAFF	Asep Khususna
STAFF UMUM GENERAL STAFF	Adi Riyanto
STAFF UMUM GENERAL STAFF	Ade Lia

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh aktivitas kesekretariatan, layanan umum, humas, legal dan compliance serta melakukan koordinasi terkait penyusunan visi, misi perusahaan dan penilaian kinerja perusahaan untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan.

Corporate Secretary Work Guidelines

Directing, monitoring, and evaluating all secretarial activities, services public relations, public relations, legal and compliance as well as To do coordination related composing vision, mission company and appraisal performance company for ensure achievement destination company.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Functions, Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

No.	Peran Role	Output Output	Ukuran Keberhasilan Size Success
1.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan laporan perusahaan Directing, monitoring and evaluating the preparation of company reports	Hasil konsolidasi laporan manajemen (dashboard management) dan laporan tahunan perusahaan Consolidated results of management reports (management dashboard) and company annual reports	Konsolidasi laporan manajemen (dashboard management) dan laporan tahunan perusahaan dilakukan secara akurat, lengkap dan tepat waktu Consolidation of management reports (management dashboards) and company annual reports are carried out in an accurate, complete and timely manner
2.	Mengkoordinir kegiatan dokumen tender Coordinate tender document activities	Tinjauan dokumen tender Tender document review Monitoring hasil kelulusan seleksi dokumen tender Monitoring the results of passing the tender document selection	Tinjauan dokumen tender dilakukan secara akurat dan sesuai dengan rencana strategis perusahaan Review of tender documents is carried out accurately and in accordance with the company's strategic plan Monitoring hasil kelulusan seleksi dokumen tender dilakukan secara akurat dan sesuai dengan rencana strategis perusahaan Monitoring the results of passing the tender document selection is carried out accurately and in accordance with the company's strategic plan
3.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan terkait hubungan dengan stakeholders (Pemerintah (Legislatif, Eksekutif, Asosiasi, Kejaksaan, TNI/Polri), Masyarakat/Institusi Pendidikan/NGO/LSM) Directing, monitoring and evaluating activities related to the relationship with stakeholders (Government (Legislature, Executive, Association, Attorney, TNI/Police), Community/Educational Institution/NGO/NGO)	Terlaksananya kegiatan relasi dengan stakeholders Implementation of relationship activities with stakeholders	Kegiatan relasi dengan stakeholders dilakukan secara akurat, tepat waktu dan sesuai kebijakan dan tujuan perusahaan Relation activities with stakeholders are carried out accurately, on time and in accordance with company policies and objectives

No.	Peran Role	Output Output	Ukuran Keberhasilan Size Success
4.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan terkait hubungan dengan pelanggan Directing, monitoring and evaluating activities related to customer relations	Monitoring status keluhan pelanggan	Monitoring status keluhan pelanggan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan rencana strategis perusahaan
		Monitoring the status of customer complaints	Monitoring the status of customer complaints is carried out accurately and in accordance with the company's strategic plan
		Evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut berikutnya	Evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut berikutnya sesuai dengan strategi perusahaan
		Follow-up evaluation and recommendations	Follow-up evaluation and recommendations in accordance with the company's strategy
		Implementasi program pembinaan relasi dengan pelanggan	Implementasi program pembinaan relasi dengan pelanggan dilakukan sesuai dengan program pembinaan
		Implementation of customer relationship development program	The implementation of the customer relationship development program is carried out in accordance with the coaching program
5.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan terkait program kemitraan Directing, monitoring and evaluating activities related to the partnership program	Pengelolaan Aktivitas Program Kemitraan	Pengelolaan Aktivitas Program Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis perusahaan
		Management of Partnership Program Activities	Management of Partnership Program Activities is carried out in accordance with the company's strategic plan
		Rancangan program kemitraan	Rancangan program kemitraan disusun sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis perusahaan
		Partnership program design	The partnership program design is prepared according to the company's needs and strategic plans
6.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan terkait program bina lingkungan Directing, monitoring and evaluating activities related to the environmental development program	Monitoring dan pembinaan program kemitraan	Monitoring dan pembinaan program kemitraan dilaksanakan secara akurat dan sesuai dengan rencana strategis perusahaan
		Monitoring and fostering partnership programs	Monitoring and fostering the partnership program is carried out accurately and in accordance with the company's strategic plan
		Analisa kelayakan calon penerima bantuan bina lingkungan	Analisa kelayakan calon penerima bantuan bina lingkungan
		Eligibility analysis of potential recipients of environmental development assistance	Eligibility analysis of potential recipients of environmental development assistance
7.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan corporate relation Directing, monitoring and evaluating corporate activities relations	Evaluasi dan rekomendasi program bina lingkungan	Evaluasi dan rekomendasi program bina lingkungan sesuai dengan strategi perusahaan
		Evaluation and recommendation of community development program	Evaluation and recommendation of the community development program in accordance with the company's strategy
		Rencana program partnership	Image perusahaan sesuai dengan visi, misi dan values
		Partnership program plan	I mage the company in accordance with the vision, mission and values
		Implementasi program partnership	Implementasi program partnerhsip dilaksanakan sesuai dengan rencana perusahaan
8.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan corporate communication Directing, monitoring and evaluating corporate activities communication	Implementasi of partnership programs	The implementation of the partnership program is carried out in accordance with the company 's plan
		Tindak lanjut program partnership	Tindak lanjut program partnership dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan
		Follow-up to the partnership program	The follow-up to the partnership program is carried out in accordance with company policies and objectives
		Terbangunnya image baik perusahaan	Image perusahaan sesuai dengan visi, misi dan values
		Build a good image company	I mage the company in accordance with the vision, mission and values
		Terlaksananya komunikasi internal dan eksternal perusahaan	Pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan
		Implementation of internal and external communication of the company	Implementation of the company's internal and external communications in accordance with company needs

No.	Peran Role	Output Output	Ukuran Keberhasilan Size Success
9.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan terkait compliance dan legal Directing, monitoring and evaluating activities related to compliance and legal	Terlaksananya program compliance dan GCG assessment	Program compliance dan GCG assessment dilaksanakan secara akurat, lengkap dan tepat waktu
		Implementation of compliance program and GCG assessment	Compliance programs and GCG assessments are carried out accurately, completely and on time
		Terlaksananya kegiatan legal	Pelaksanaan kegiatan legal sesuai dengan rencana perusahaan
10.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi, terkait corporate secretarial Directing, monitoring and evaluating, related to corporate secretarial	Terlaksananya pengelolaan dokumen dan literatur perusahaan	Dokumen dan literatur perusahaan dikelola secara akurat, lengkap dan tepat waktu
		Implementation of the management of company documents and literature	Company documents and literature are managed accurately, completely and on time
		Terlaksananya aktivitas perusahaan	Aktivitas perusahaan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan
11.	Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi, kegiatan layanan umum Directing, monitoring and evaluating, public service activities	Pelaksanaan layanan umum	Layanan umum dilaksanakan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu
		Implementation service general	Service general held by accurate, complete, and precise time

Program Pengembangan Kompetensi

Perseroan memiliki kebijakan terkait program pengembangan kompetensi bagi Sekretaris Perusahaan, khususnya pada beberapa bidang yang dapat memberikan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Seluruh aktivitas terkait kesekretariatan, layanan umum, humas, legal dan compliance serta koordinasi terkait penyusunan visi, misi perusahaan dan penilaian kinerja perusahaan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan rencana strategis perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan.

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka menciptakan kualitas kinerja unggul, Sekretaris Perusahaan memiliki Key Performance Indicator (KPI) sebagai media dalam melakukan pengukuran efektivitas dan ketercapaian target kinerja. Selain KPI, organ Sekretaris Perusahaan juga menjadi salah satu objek dalam assessmen GCG Perusahaan. Dengan adanya media pengukuran tersebut, kinerja organ Sekretaris Perusahaan akan senantiasa terpantau dan terevaluasi sehingga menciptakan kinerja keberlanjutan di masa depan.

Competency Development Program

The company has policies related to the program competency development for secretaries Companies, especially in several fields which can provide increased competence in carrying out the duties and functions of the Secretary Company. About upgrade program competencies followed by the Corporate Secretary throughout the year 2021 can be seen in chapter Company Profile in this annual report.

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary in 2021

All related activities secretarial service _ public relations, public relations, legal and compliance as well as coordination related composing vision. mission company and appraisal performance company conducted by accurate and appropriate with plan strategic company so that achieved destination company.

Corporate Secretary Performance Assessment

In order to create superior performance quality, the Corporate Secretary has a Key Performance Indicator (KPI) as a medium for measuring the effectiveness and achievement of performance targets. In addition to KPI, the Corporate Secretary organ is also one of the objects in the Company's GCG assessment. With this measurement media, the performance of the Corporate Secretary's organs will always be monitored and evaluated so as to create sustainable performance in the future.

Audit Internal/Satuan Pengawasan Internal

Internal audit/Internal Oversight Unit

Sebagai pemenuhan atas prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan, Perusahaan memiliki organ Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi.

Organ ini memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan dalam rangka membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas pengendalian prosedur, perundangan, peraturan perusahaan, manajemen dan dapat terciptanya 3E, yaitu efektif, efisien dan ekonomis dalam penyelesaian setiap pekerjaan serta terciptanya budaya perusahaan (corporate culture) yang baik, sehingga terjadi kesatuan yang kuat untuk bersaing dan bertahan. pengawasan, pencegahan, mitigasi serta penanganan atas segala bentuk praktik-praktik penyimpangan yang terjadi.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala SPI diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Dasar Pengangkatan

As a fulfillment of the principles of accountability and responsibility in managing the Company, the Company has an Internal Supervisory Unit (SPI) which is directly responsible to the Board of Directors.

This organ has a function to carry out activities in order to assist the Board of Directors in carrying out the tasks of controlling procedures, laws, company regulations, management and the creation of 3E, namely effective, efficient and economical in completing each job as well as creating a good corporate culture.. so that there is a strong unity to compete and survive. supervision, prevention, mitigation and handling of all forms of irregular practices that occur.

The Party that Appoints and Dismisses the Head of the Internal Audit Unit

The Head of SPI is appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Head of SPI reports directly to the President Director.

Head of Internal Control Unit and Basis of Appointment

BROTO HARIADI

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia, Tempat Tanggal Lahir Age, Place Date of Birth	51, Salatiga/1970-11-29
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	0002/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021
Riwayat Pendidikan Educational background	S2-Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro S1-Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro S2-Accounting Economics, Diponegoro University S1-Accounting Economics, Diponegoro University
Riwayat Jabatan Position History	2021-Kepala Satuan Pengawasan Intern 2020-Kepala Departemen Keuangan 2018-Kepala Departemen Akuntansi 2021-Head of Internal Audit Unit 2020-Head of the Ministry of Finance 2018-Head of Accounting Department

Kepala SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 0815/DIRUT/KPTS/KDS/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Uraian Jabatan Di Lingkungan PT Nindya Karya (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan penyusunan strategi audit
2. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan audit execution di lingkungan Perseroan (kantor, proyek gudang bangunan, bengkel, dll) termasuk melakukan entry dan exit meeting
3. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan advisory service terkait kecukupan pengendalian dan permasalahan lainnya untuk seluruh fungsi di Perseroan
4. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh proses pendampingan audit eksternal
5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPN) kepada KPK dan Kementerian BUMN
6. Melaporkan kinerja SMAP ke Direksi/Dewan Pengarah

Kedudukan dan Organisasi Satuan Pengawas Internal

Secara alur koordinasi, SPI berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama dan jajaran Direksi lainnya. organ ini dipimpin oleh seorang Kepala yang keberadaannya satu tingkat di bawah Direksi dan membawahi auditor-auditor. Dalam tugasnya SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertindak sebagai mitra kerja Komite Audit (Dewan Komisaris) dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. SPI juga diberi kewenangan seluas-luasnya oleh Direktur Utama untuk mengumpulkan data, fakta dan informasi, baik secara lisan, tertulis dan kondisi riil lapangan serta berkewajiban menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit (Dewan Komisaris).

Posisi SPI dalam struktur organisasi digambarkan dalam bagan berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan 0002/DIRUT/KPTS/KDS/DHC/01/2021 menetapkan Broto Hariadi sebagai Kepala SPI PT Nindya Karya (Persero).

Hingga akhir tahun 2021, SPI memiliki 8 karyawan dengan rincian penempatan dan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Jabatan Position	Nama Name
Kepala SPI Head of SPI	Broto Hariadi
Auditor Utama Main Auditor	Bambang Sutrisno
Auditor Madya Associate Auditor	Aryadi Sapta Harjanto

The Head of SPI has the duties and responsibilities as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0815/DIRUT/KPTS/KDS/08/2019 dated August 30, 2019 regarding the Determination of Position Descriptions within PT Nindya Karya (Persero) are as follows:

1. Directing, monitoring, and evaluating audit strategy preparation activities
2. Directing, monitoring, and evaluating all audit execution activities in the environment The company (offices, warehouse building projects, workshops, etc.) includes entry and exit meeting
3. Directing, monitoring, and evaluating advisory service activities related to adequacy control and other problems for all functions in the Company
4. Directing, monitoring, and evaluating the entire process of external audit assistance Evaluate and coordinate activities related to Wealth Report
5. Company Officials (LHKPN) to the KPK and the Ministry of SOEs
6. Reporting SMAP performance to the Board of Directors/ Steering Committee

Position and Organization of the Internal Oversight Unit

In terms of coordination, SPI coordinates directly with the President Director and other members of the Board of Directors. This organ is led by a Head who is one level below the Board of Directors and oversees the auditors. In its duties, SPI is directly responsible to the President Director and acts as a partner of the Audit Committee (Board of Commissioners) in carrying out its supervisory function. SPI is also given the broadest authority by the President Director to collect data, facts and information, both orally, in writing and on real field conditions and is obliged to submit an audit report to the President Director with a copy to the Audit Committee (Board of Commissioners).

The position of SPI in the organizational structure is depicted in the following chart:

Based on Decree 0002/DIRUT/KPTS/KDS/DHC/01/2021, Broto Hariadi was appointed as Head of SPI for PT Nindya Karya (Persero).

Until the end of 2021, SPI has 8 employees with details on the placement and implementation of tasks as follows:

Jabatan Position	Nama Name
Auditor Madya Associate Auditor	Khairul Fitri
Auditor Muda Young Auditor	Redy Mulyana Setriady
Auditor Muda Young Auditor	Sapta Dewangga Ariadiningrat
Auditor Muda Young Auditor	Ardian Tofik Kurnianto
Staff Administrasi SPI SPI Administration Staff	Widyawati Utami

Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Internal

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan SPI hingga akhir tahun 2021.

Internal Control Unit Professional Certification

Professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, particularly related to regulatory compliance and industry developments. Following are the professional certifications held by SPI employees until the end of 2021.

Sertifikasi Certification	Jumlah Karyawan Total of Employee
Dasar-Dasar Audit Auditing Fundamentals	7
Audit Operasional Operational Audit	5
Komunikasi dan Psikologi Communication and Psychology	5
Audit Kecurangan Fraud Audit	5
Pengelolaan Tugas-Tugas Audit Management of Audit Tasks	5
Profesional Internal Auditor (PIA) Professional Internal Auditor (PIA)	5
JUMLAH TOTAL	32

Jumlah karyawan SPI yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 5 orang atau 62,5% jumlah keseluruhan karyawan SPI. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan SPI, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

The number of SPI employees who have professional certification is 5 people or 62.5% of the total SPI employees. The Company is committed to increasing the level of professional certification for SPI employees, both for employees who already have professional certification and those who do not.

Piagam Satuan Pengawasan Intern

Pola Organisasi dan Pedoman Kerja bagi SPI diatur dalam Internal Audit Charter yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, atas Internal Audit Charter Revisi Ke-6 terbit pada 01 Desember 2021.

Internal Audit Unit Charter

The Organizational Pattern and Work Guidelines for SPI are regulated in the Internal Audit Charter which has been determined by the Board of Directors and the Board of Commissioners, on the 6th Revision Internal Audit Charter issued on December 01, 2021.

Piagam Audit SPI berisi ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin hasil pemeriksaan yang bermutu agar SPI dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik. Internal Audit Charter dipublikasikan ke seluruh Unit Kerja untuk terjalin kerja sama yang baik dalam mewujudkan tujuan Perseroan.

The SPI Audit Charter contains provisions that can guarantee quality inspection results so that SPI can carry out its functions properly. The Internal Audit Charter is published to all Work Units to establish good cooperation in realizing the Company's goals.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang SPI

Tugas dan tanggung jawab SPI sebagaimana tercantum dalam Piagam SPI adalah:

1. Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berikut anggarannya
2. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai PKAT atas tugas dan persetujuan Direktur Utama, dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern dan manajemen risiko.
 - b. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur serta operasi Perseroan pada unit kerja baik Kantor Pusat, Wilayah maupun Divisi.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan.
 - d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang:
 - i. Administrasi dan keuangan
 - ii. Operasional dan pemasaran SDM dan organisasi
 - iii. Kegiatan perusahaan lainnya
 - e. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.
 - f. Memantau tindakan turun tangan dari objek Audit atas Permintaan Tindak lanjut Direktur Utama sampai dengan seluruh rekomendasi dinyatakan selesai/closed.
 - g. Meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan.
 - h. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lain terkait dengan fungsi pengawasan.
 - i. Menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan SPI kepada Komisaris melalui Komite Audit.
 - j. Melaksanakan tugas khusus dari Direktur Utama terkait dengan fungsi SPI.
 - k. Mendokumentasikan seluruh catatan mutu kegiatan SPI.

SPI Duties, Responsibilities and Authorities

The duties and responsibilities of the SPI as stated in the SPI Charter are:

1. Prepare the Annual Audit Work Program (PKAT) along with the budget
2. Carry out routine inspections according to the PKAT on the duties and approval of the President Director, by:
 - a. Evaluating the effectiveness of the implementation of internal control and risk management.
 - b. Conduct analysis and evaluation of the Company's systems and procedures as well as operations at work units, both Head Office, Regional and Division.
 - c. Evaluate the effectiveness and efficiency of the resources used.
 - d. Supervise and examine activities carried out in the fields of:
 - i. Administration and finance
 - ii. HR operations and marketing and organization
 - iii. Other company activities
 - e. Assess and ensure that the activities of each of the Company's work units have been carried out in accordance with the Company's stated objectives.
 - f. Monitor the intervention actions of the Audit object on the President Director's Follow-up Request until all recommendations are declared closed.
 - g. Improving the competence of auditors through education and training.
 - h. Provide opinions, input and considerations as well as objective consulting services to management and other work units related to the supervisory function.
 - i. Submit reports on all the results of SPI activities to the Commissioners through the Audit Committee.
 - j. Carry out special duties from the President Director related to the SPI function.
 - k. Document all quality records of SPI activities.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab SPI Tahun 2021

Pelaksanaan audit selama 114 (seratus empat belas) hari, dilanjutkan dengan penyusunan laporan dan pemantauan tindak lanjut. Selain itu SPI melaksanakan Counterpart Auditor Eksternal selama bulan Januari-Februari dan November-Desember serta mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Rincian realisasi pelaksanaan audit Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2021 sebagai berikut :

SPI Duties and Responsibilities Implementation Brief Report 2021

The audit is carried out for 114 (one hundred and fourteen) days, followed by the preparation of reports and follow-up monitoring. In addition, SPI conducts Counterpart External Auditors during January-February and November-December and participates in training to improve competence.

The details of the implementation of the 2021 Internal Audit Unit (SPI) audit are as follows:

No.	Realisasi Tahun 2021 Realization in 2021							
	Bulan Month	Divisi/Unit Bisnis Division/Business Unit	Departemen/ Divisi Department/ Division	Sasaran Audit Target	Jumlah Auditor Number of Auditor	Lama Audit Duration	Realisasi Penerbitan Laporan Reporting Release Realization	Keterangan Description
1	Maret March	Divisi Peralatan Equipment Division	Divisi & Proyek Division & Project	A2	6 orang 6 person	5 hari 5 days	1 buah 1 pcs	
2	April April	Divisi Properti Property Division	Divisi & Proyek Division & Project	A2	7 orang 7 person	8 hari 8 days	1 buah 1 pcs	
3	Mei May	Kantor Pusat Headquarters	Departemen SCM	A3	7 orang 7 person	5 hari 10 days	1 buah 1 pcs	
4	Juli July	Divisi Gedung Building Division	Divisi & Proyek Division & Project	A2	7 orang 7 person	10 hari 10 days	3 buah 3 pcs	(3 Proyek) (3 Project)
5	Agustus August	Divisi Infra II Infra Division II	Divisi & Proyek Division & Project	A2	7 orang 7 person	10 hari 10 days	1 buah 1 pcs	(1 Proyek) (1 Project)
6	September September	Divisi Infra I Infra Division I	Divisi & Proyek Division & Project	A2	7 orang 7 person	10 hari 10 days	2 buah 2 pcs	(2 Proyek) (2 Project)
7	September September	Divisi EPC EPC Division	Divisi & Proyek Division & Project	A4	7 orang 7 person	10 hari 10 days	1 buah 1 pcs	(1 Proyek) (1 Project)
8	Oktober October	Divisi Infra I Infra Division I	Divisi & Proyek Division & Project	A2	7 orang 7 person	10 hari 10 days	1 buah 1 pcs	
9	Oktober October	Divisi Infra II Infra Division II	Divisi & Proyek Division & Project	A2	7 orang 7 person	9 hari 9 days	1 buah 1 pcs	
10	Oktober & November October & November	Proyek JO/KSO JO/KSO Project	Proyek Project	A4	7 orang 7 person	8 hari 8 days	2 buah 2 pcs	
11	November November	Divisi Gedung Building Division	Divisi & Proyek Division & Project	A2	7 orang 7 person	10 hari 10 days	1 buah 1 pcs	
12	November November	Divisi EPC EPC Division	Divisi & Proyek Division & Project	A4	7 orang 7 person	10 hari 10 days	1 buah 1 pcs	
13	Desember December	PT Nindya Beton	PT Nindya Beton & Proyek PT Nindya Beton & Project	A1	7 orang 7 person	9 hari 9 days	-	Laporan Terbit Tahun 2022 Report Published in 2022
						144 hari 144 days	16 buah 16 pcs	

Informasi tentang Organ/Komite Lainnya di Bawah Direksi

Information about Other Organs/Committees Under the Board of Directors

Secara keorganisasian, Direksi tidak memiliki organ dan/atau komite lainnya selain Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern. Namun demikian, Direksi memiliki berbagai fungsi pendukung sebagai bagian dari pengelolaan Perusahaan, seperti pengelolaan risiko.

Audit Eksternal/Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan organ eksternal Perseroan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar professional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas perusahaan untuk direview oleh badan atau otoritas terkait. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Organizationally, the Board of Directors does not have other organs and/or committees other than the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit. However, the Board of Directors has various supporting functions as part of managing the Company, such as risk management.

External Audit/Public Accountant

A public accountant is an external organ of the Company whose function is to provide opinions regarding the suitability of the presentation of the Company's financial statements against the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

Management is responsible for the presentation of the Company's financial statements and complies with SAK applicable in Indonesia set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

External Audit Procedures and Auditing Standards

1. The audit of the Company's financial statements is carried out in accordance with the professional standards of the Public Accountant which includes all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.
2. The audit includes testing and evaluation of the internal control system, as well as examining, on a test basis, the evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.
3. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management statements presented in the financial statements.
4. The audit contains an inherent risk that if there are material errors and irregularities. If this is the case, the KAP will report it to management.
5. Management approves KAP audit work papers on the company to be reviewed by the relevant agency or authority. The audit is carried out based on the Professional Standards of Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of Indonesia, the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency (BPK).

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada pemegang saham dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
4. Usulan tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

Public Accountant Appointment Mechanism

The stages of the KAP appointment mechanism:

1. The Board of Commissioners through the Audit Committee conducts the process of appointing a candidate for the external auditor by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process in accordance with the provisions for the procurement of goods/services.
2. The Board of Commissioners may re-appoint the external auditor based on the evaluation results of the external auditor's performance to audit the financial statements.
3. The Board of Commissioners conveys the reasons for the nomination to the shareholders and the amount of the proposed fee/reward for the external auditor.
4. The proposal can be submitted through a separate letter which is part of the response letter from the Board of Commissioners on the Company's annual performance.
5. The Board of Commissioners evaluates the performance of the external auditor through the Audit Committee in accordance with applicable regulations and standards.
6. For the process of appointing the external auditor candidate and or reappointing the external auditor conducted by the GMS, the Board of Commissioners is sufficient to grant power to the GMS to determine the auditor.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

Mechanism of Appointment To Appointment of Public Accountant

Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit.

Submission of directions and assignments from the Board of Commissioners to the Audit Committee.

Tindak lanjut Komite Audit : Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal.

Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.

Follow-up of the Audit Committee:
Evaluating the implementation of internal and external audits.

Dewan Komisaris melakukan telaah atas rekomendasi Komite Audit, melakukan pembahasan dengan organ Dewan Komisaris dan calon auditor eksternal/akuntan publik.

The Board of Commissioners reviews the recommendations of the Audit Committee, conducts discussions with other organs Board of Commissioners and candidates for external auditors/public accountants.

Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi kepada RUPS

The Board of Commissioners submits recommendations to the GMS

Penetapan Akuntan Publik oleh RUPS

Stipulation of Public Accountant by GMS

Akuntan Publik Tahun 2021 2021 Public Accountant Year

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jenis & Bentuk Jasa Service Type & Form	Biaya (Rp) Cost (Rp)
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Benny Andria	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audityang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit of Consolidated Financial Statements and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Auditing Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia Indonesia and Auditing Standards determined by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	Rp412,50 juta

Daftar Akuntan Publik

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2016 hingga 2021 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

List of Public Accountants

For the sake of transparency, the following is the Public Auditor of the Company's Financial Statements for 6 (six) consecutive years, for the financial year 2016 to 2021 as can be seen in the table below:

Tahun Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Accounting Firm Public	Ruang Lingkup Jasa Scope of Service	Opini Opinion
2021	Benny Andria	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material things
2020			Consolidated Financial Statement audits and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Audit Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia	
2019			Indonesia and the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.	
2018	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf (RSM)	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan tertentu serta pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material things
2017			Consolidated Financial Statement audits and testing of the Company's compliance with certain laws and internal controls based on State Audit Standards issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia	
2016			Indonesia and the Audit Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants	

Manajemen Risiko

Risk Management

Perseroan menyadari bahwa jalannya operasional tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perusahaan. Oleh karena itu Perseroan memandang akan pentingnya pengelolaan risiko Perusahaan secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan

Sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan telah dimuat dalam Pedoman Sistem Manajemen. Substansi yang termuat dalam pedoman tersebut meliputi:

1. Prinsip-Prinsip Umum Manajemen Risiko Kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi dalam penerapan manajemen risiko Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. **Komitmen Pimpinan**
Pimpinan Perseroan berkomitmen dan terlibat aktif dalam penerapan manajemen risiko dengan membangun dan memelihara lingkungan Internal di mana semua insan perusahaan dapat sepenuhnya terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan, termasuk tujuan manajemen risiko.
 - b. **Keterlibatan Seluruh Insan Perseroan**
Seluruh insan perusahaan terlibat aktif dalam penerapan manajemen risiko sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
 - c. **Adanya Pendekatan yang Sistematis, Terstruktur, dan Tepat Waktu**
Pendekatan sistematis, terstruktur, dan tepat waktu dilaksanakan untuk penerapan manajemen risiko yang hasilnya secara berkesinambungan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten, dapat dibandingkan, serta andal.
 - d. **Integrasi**
Penerapan manajemen risiko diintegrasikan kedalam proses bisnis perusahaan, kedalam proses pengambilan keputusan bisnis oleh manajemen, dan ke dalam nilai dan budaya perusahaan.
 - e. **Tanggung Jawab Berjenjang**
Pertimbangan dan tanggung jawab atas risiko selalu melekat dan menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan pada semua jenjang manajemen perusahaan.
 - f. **Komprehensivitas**
Penerapan manajemen risiko mencakup seluruh kegiatan operasi perusahaan, di mana prinsip portofolio diterapkan dalam strategi mitigasi risiko.
 - g. **Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat**
Dalam penerapan manajemen risiko, manajemen tetap memperhitungkan pertimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang kemungkinan diperoleh.

The Company realizes that the operations are inseparable from various risks, both risks that are under the control and risks that are beyond the control of the Company. Therefore, the Company views the importance of managing the Company's risk in an integrated, optimal and sustainable manner.

Enterprise Risk Management Framework

The risk management system implemented by the Company is contained in the Management System Guidelines. The substances contained in the guidelines include:

1. General Principles of Risk Management The basic principles that must be adhered to in the implementation of the Company's risk management are as follows:
 - a. **Leadership Commitment**
The Company's leadership is committed and actively involved in the implementation of risk management by building and maintaining an internal environment in which all company personnel can be fully involved in achieving the company's goals, including risk management objectives.
 - b. **Involvement of All Company Personnel**
All company personnel are actively involved in the implementation of risk management according to their respective authorities and responsibilities.
 - c. **There is a Systematic, Structured, and Timely Approach**
A systematic, structured, and timely approach is implemented for the implementation of risk management, the results of which continuously contribute to efficiency and consistent, comparable and reliable results.
 - d. **Integration**
The application of risk management is integrated into the company's business processes, into the business decision-making process by management, and into the company's values and culture.
 - e. **Tiered Responsibility**
Consideration and responsibility for risk is always inherent and an integral part of the decision-making process at all levels of the company's management.
 - f. **Comprehensive**
The application of risk management covers all of the company's operational activities, where the portfolio principle is applied in the risk mitigation strategy.
 - g. **Balance Between Costs and Benefits**
In implementing risk management, management still takes into account the balance between the costs that must be incurred with the benefits that may be obtained.

h. Keyakinan Memadai, Bukan Keyakinan Mutlak

Adanya kesadaran penuh dari seluruh insan perusahaan bahwa manajemen risiko hanya dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) dan bukan keyakinan mutlak (*absolute assurance*).

i. Penyempurnaan Berkesinambungan

Rancangan dan penerapan manajemen risiko selalu disempurnakan sesuai kebutuhan perusahaan melalui peningkatan kompetensi dan perbaikan sistem manajemen risiko.

h. Sufficient Confidence, Not Absolute Belief

There is full awareness of all company personnel that risk management can only provide reasonable assurance and not absolute assurance.

i. Continuous Improvement

The design and implementation of risk management is always refined according to the company's needs through competency improvement and risk management system improvement.

2. Proses Manajemen Risiko

Proses yang dilaksanakan dalam penerapan manajemen risiko berlangsung secara terus menerus dalam satu "siklus" yang dijabarkan dalam tujuh tahapan yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu Perseroan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga Perseroan dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadikan Perseroan memiliki struktur bisnis yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.

Proses manajemen risiko meliputi:

- Komunikasi dan Konsultasi,
- Penetapan Konteks,
- Assesmen Risiko (identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko)
- Penanganan Risiko, dan
- Pemantauan dan Penelaahan.

Bagan proses manajemen risiko digambarkan sebagai berikut:

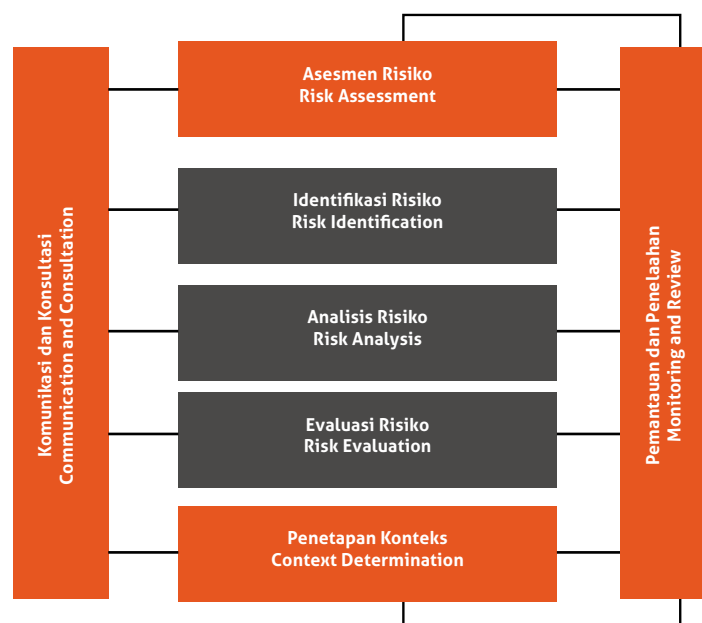
2. Risk Management Process

The process carried out in the application of risk management takes place continuously in a "cycle" which is described in seven stages that must be managed properly in order to help the Company evaluate its strengths and weaknesses, so that the Company can survive and thrive in various situations and conditions. and make the Company have a strong business structure in facing any existing challenges.

The risk management process includes:

- Communication and Consulting,
- Context Determination,
- Risk Assessment (risk identification, analysis risk and risk evaluation)
- Risk Management, and
- Monitoring and Review.

The risk management process chart is described as follows:



a. Komunikasi dan Konsultasi

Persepsi terhadap risiko dapat bervariasi karena perbedaan nilai, kebutuhan, asumsi, konsep, dan perhatian stakeholder sehubungan dengan risiko atau issue yang didiskusikan. Stakeholder membuat pertimbangan terhadap akseptabilitas suatu risiko berdasarkan persepsi mereka terhadap risiko. Stakeholder memiliki konsekuensi signifikan terhadap keputusan yang diambil, maka sangat penting untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan persepsi mereka terhadap risiko dan manfaatnya serta memahami dan mendalami alasan-alasan yang melandasi persepsi mereka.

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses penting pada setiap tahapan manajemen risiko. Pada setiap awal tahapan perlu disusun rencana komunikasi dengan stakeholder baik Internal maupun eksternal. Rencana tersebut harus mengarah pada isu-isu yang berkaitan dengan risiko itu sendiri maupun proses untuk mengelolanya.

Komunikasi dan konsultasi adalah dialog dua arah antara pengambil keputusan dengan stakeholder Internal dan eksternal yang tepat pada setiap tahapan dari proses manajemen risiko dan proses secara keseluruhan yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi yang sama dan kesepakatan penanganan risiko, serta untuk meyakinkan bahwa penanggung jawab pengimplementasian manajemen risiko dan pihak-pihak lain yang berkepentingan memahami dasar pengambilan keputusan dan mengapa tindakan-tindakan tertentu diperlukan.

b. Penetapan Konteks

Tahapan ini dilakukan untuk mendefinisikan variabel-variabel Internal dan eksternal yang akan diperhitungkan dalam mengelola risiko serta mengatur ruang lingkup dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya. Konteks harus mencakup variabel Internal dan eksternal yang relevan dengan organisasi yang diperlukan sebagai pedoman bagi keputusan dalam kajian manajemen risiko yang lebih rinci terutama menyangkut keterkaitannya dengan lingkup suatu proses manajemen risiko.

Kegiatan penetapan konteks terdiri dari:

- i. Penetapan Konteks Eksternal, meliputi pemahaman lingkup budaya, politik, hukum, peraturan, teknologi, keuangan, ekonomi, alam, pesaing, Issue-Issue yang berdampak pada tujuan organisasi, persepsi dan nilai-nilai para stakeholder. Hasil dari penetapan konteks eksternal ini adalah daftar potensi risiko eksternal untuk mengidentifikasi risiko-risiko eksternal.

a. Communication and Consulting

Perceptions of risk may vary due to different values, needs, assumptions, concepts, and stakeholder concerns regarding the risks or issues being discussed. Stakeholders make judgments about the acceptability of a risk based on their perception of the risk. Stakeholders have significant consequences for the decisions made, so it is very important to identify and document their perceptions of the risks and benefits and understand and explore the reasons that underlie their perceptions.

Communication and consultation is an important process at every stage of risk management. At the beginning of each stage, it is necessary to develop a communication plan with both internal and external stakeholders. The plan should address issues related to the risks themselves and the processes for managing them.

Communication and consultation is a two-way dialogue between decision makers and appropriate internal and external stakeholders at each stage of the risk management process and the overall process aimed at obtaining the same perception and agreement on risk management, as well as to ensure that the person in charge of implementing risk management and other interested parties understand the basis for decision making and why certain actions are needed.

b. Context Determination

This stage is carried out to define the internal and external variables that will be taken into account in managing risk and to set the scope and risk criteria for the next process. The context must include internal and external variables relevant to the organization that are needed as a guide for decisions in a more detailed risk management study, especially regarding their relationship to the scope of a risk management process.

The context setting activities consist of:

- i. Determination of External Context, including understanding the scope of culture, politics, law, regulations, technology, finance, economy, nature, competitors, issues that have an impact on organizational goals, perceptions and values of stakeholders. The result of establishing this external context is a list of potential external risks to identify external risks.

b. Penetapan konteks internal, meliputi pemahaman:

- i. Kebijakan, Tujuan dan Strategi organisasi;
- ii. Kapabilitas Sumber Daya;
- iii. Pengetahuan (Proses Bisnis) di lingkungan Internal organisasi;
- iv. Sistem informasi dan proses pengambilan keputusan;
- v. Struktur organisasi dan Pemangku Kepentingan Internal;
- vi. Persepsi, Nilai-nilai dan Budaya organisasi. Hasil dari penerapatan konteks Internal ini adalah daftar potensi risiko Internal untuk mengidentifikasi risiko-risiko Internal.

g. Penetapan konteks manajemen risiko, meliputi:

- i. Penentuan Tanggung jawab pada proses manajemen risiko;
- ii. Penentuan lingkup serta kedalaman dan keluasan aktivitas manajemen risiko yang mencakup proses, fungsi, proyek, produk, jasa atau asset;
- iii. Penentuan hubungan antara suatu proyek atau aktivitas tertentu dengan proyek atau aktivitas organisasi;
- iv. Penentuan metodologi penilaian risiko;
- v. Penentuan cara evaluasi pengelolaan risiko;
- vi. Identifikasi dan spesifikasi keputusan yang harus diambil;
- vii. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Hasil dari penetapan konteks manajemen risiko ini adalah rencana pelaksanaan identifikasi risiko.

h. Pengembangan Kriteria risiko, meliputi penentuan:

- i. Kriteria Tingkat Kemungkinan;
- ii. Kriteria Tingkat Akibat
- iii. matriks Tingkat risiko.

b. Determining the internal context, including understanding:

- i. Organizational Policies, Objectives and Strategies;
- ii. Resource Capability;
- iii. Knowledge (Business Process) in the organization's internal environment;
- iv. Information systems and decision-making processes;
- v. Organizational structure and internal stakeholders;
- vi. Perception, Values and Organizational Culture. The result of applying the Internal context is a list Internal risk potential to identify Internal risks.

g. Determining the context of risk management, including:

- i. Determination of responsibility for the risk management process;
- ii. Determination of the scope and depth and breadth of risk management activities covering processes, functions, projects, products, services or assets;
- iii. Determination of the relationship between a particular project or activity with an organizational project or activity;
- iv. Determination of risk assessment methodology;
- v. Determination of how to evaluate risk management;
- vi. Identification and specification of decisions to be taken;
- vii. Identify the required resources. The results of establishing this risk management context are risk identification implementation plan.

h. Development of risk criteria, including the determination of:

- i. Likelihood Level Criteria;
- ii. Impact Level Criteria
- iii. risk level matrix.

Kriteria Tingkat Kemungkinan

Possibility of Level Criteria

Kemungkinan Terjadinya Risiko Possibility of Risk Occurring	Aspek Kewajiban Aspect of Liability	Aspek Mutu, K3, Lingkungan Aspect of Quality, K3, Environment
Hampir Pasti Almost Sure	Ada peraturan, kemungkinannya bisa menghentikan atau ditutup operasinya sehingga dituntut secara hukum There are regulations, it is possible to stop or close operations so that they are legally prosecuted	Kemungkinan terjadinya sangat besar/Selalu terjadi/frekuensi Kemungkinan terjadi bisa setiap hari, terjadi secara kontinyu The possibility of occurrence is very large/Always occurs/frequency The possibility can occur every day, occurs continuously
Kemungkinan besar terjadi Most likely happen	Kasus pelanggaran berat (Campur tangan pemerintah untuk menghentikan/menutup operasi atau kemungkinan dituntut secara hukum), Pelanggaran hukum berat Cases of serious violations (Government intervention to stop/close operations or possible legal prosecution), Serious legal violations	Kemungkinan terjadinya besar/Selalu terjadi/frekuensi Kemungkinan terjadi bisa > 1 kali per hari, terjadi secara kontinyu Possibility of occurrence is high/Always happens/frequency Likely occurs more than 1 time per day, occurs continuously

Kemungkinan Terjadinya Risiko Possibility of Risk Occurring	Aspek Kewajiban Aspect of Liability	Aspek Mutu, K3, Lingkungan Aspect of Quality, K3, Environment
Kadang-kadang Sometimes	Ada regulasi/peraturan perusahaan dan masih melanggar There are company regulations/rules and they are still breaking	Kemungkinan terjadinya sedang/frekuensi Kemungkinan terjadi bisa ≥ 1 kali seminggu, terjadi secara kontinyu Moderate probability of occurrence/frequency Possible occurrence can be once a week, occurs continuously
Mungkin terjadi Might happen	Ada regulasi/peraturan perusahaan dan memenuhi peraturan There are company regulations/regulations and comply with regulations	Kemungkinan terjadi kecil/frekuensi Kemungkinan terjadi bisa ≥ 1 bulan sekali, tidak kontinyu Chances of occurrence are small/frequency Possible occurrence can be once a month, not continuous
Jarang terjadi Rarely happening	Tidak ada regulasi/peraturan perusahaan yang mengatur There is no regulation/company regulation that regulates	Kemungkinan terjadinya hampir tidak pernah ada/ Kemungkinan terjadi bisa ≥ 1 tahun sekali, tidak kontinyu The possibility of occurrence is almost never/The possibility of it happening can be once a year, not continuously

Kriteria Tingkat Dampak

Impact Level Criteria

Dampak Terhadap Pencapaian Pemasaran Impact On Marketing Achievement	Aspek Mutu (Nilai Kerugian) Quality Aspect (Loss Value)		
	Pemasaran Marketing	Produksi Production	SDM HR
Tidak Signifikan Not Significant	Perolehan Kontrak berhasil Successful Contract Acquisition	BK/PU = 90% (normal), keterlambatan = tidak ada keterlambatan BK/PU = 90% (normal), delay = no there is a delay	Terpenuhinya evaluasi person grade, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM = 100% Fulfillment of person grade evaluation, Fulfillment of core energy project fulfillment, and Improvement of HR system = 100%
Minor Minor	Perolehan Kontrak berhasil, laba berkurang antara 10% s/d 12% (Incl. PPh) Contract acquisition is successful, profit is reduced between 10% to 12% (Incl. PPh)	BK/PU = 93%, progress terlambat = 5% BK/PU = 93%, late progress = 5%	Terpenuhinya evaluasi person grade, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM = 90% Fulfillment of person grade evaluation, Fulfillment of core energy project fulfillment, and Improvement of HR system = 90%
Moderat Moderate	Perolehan Kontrak berhasil, laba berkurang antara 7% s/d 10% (Incl. PPh) Contract acquisition is successful, profit is reduced between 7% to 10% (Incl. PPh)	BK/PU = 96%, progress terlambat = 10% BK/PU = 96%, late progress = 10%	Terpenuhinya evaluasi person grade, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM = 80% Fulfillment of person grade evaluation, Fulfillment of core energy project fulfillment, and Improvement of HR system = 80%
Parah Severe	Perolehan Kontrak berhasil, laba berkurang di bawah 7% (Incl. PPh) Successful contract acquisition, profit reduced below 7% (Incl. PPh)	BK/PU = 100%, progress terlambat = 15% BK/PU = 100%, late progress = 15%	Terpenuhinya evaluasi person grade, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM = 70% Fulfillment of person grade evaluation, Fulfillment of project core personnel, and Completion of HR system = 70%
Sangat Parah Very Severe	Gagal Perolehan kontrak Failed to get contract	BK/PU >100%, progress terlambat > 15% BK/PU >100%, late progress >15%	Terpenuhinya evaluasi person grade, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM <70% Fulfillment of person grade evaluation, Fulfillment of core energy project fulfillment, and HR system improvement <70%

Dampak Terhadap Pencapaian Keuangan Impact On Financial Achievement	Aspek Mutu (Nilai Kerugian) Quality Aspect (Loss Value)		
	Keuangan Finance	Akuntansi Accountancy	Proyek Project
Tidak Signifikan Not Significant	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU = 2,65% dan bunga bank terhadap PU = 1,48 % The value of general and administrative costs (BUA) to PU = 2.65% and bank interest to PU = 1.48%	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham setiap tanggal 10 bulan berikutnya, restitusi PPN cair minimal 80% dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 3 hari kerja setelah surat permintaan diterima = 100 % Completion of financial reports to Shareholders every 10th of the following month, liquidated VAT refunds of at least 80% of the refund submitted to the Tax Office, and Fulfillment of data for tenders in 3 working days after the request letter is received = 100%	Sangat rendah, toleransi sangat tinggi Very low, very high tolerance
Minor	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU = 2,66%-3% dan bunga bank terhadap PU = 1,49%-2,2 % The value of general and administrative costs (BUA) to PU = 2.66%-3% and bank interest to PU = 1.49%-2.2%	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham ≤ tanggal 15 bulan berikutnya, Restitusi PPN cair minimal 75% dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 4 hari kerja setelah surat permintaan diterima = 85% Completion of financial reports to Shareholders 15th of the following month, Liquid VAT refunds of at least 75% of the restitution submitted to the Tax Office, and Fulfillment of data for tenders 4 working days after receipt of the request letter = 85%	Rendah, Toleransi senilai 0 < Deviasi < 1%, Kinerja cukup, dan pemberitaan negatif namun tidak mengakibatkan Penurunan kepercayaan stakeholder/Tidak terlalu mempengaruhi sasaran perusahaan Low, tolerance of 0 < Deviation < 1%, adequate performance, and negative news but does not result in Decreased stakeholder trust/ Doesn't really affect company goals
Moderat	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU = 4% dan bunga bank terhadap PU = 3% The value of general and administrative costs (BUA) to PU = 4% and bank interest to PU = 3%	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham ≤ tanggal 20 bulan berikutnya, Restitusi PPN cair minimal 70% dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 5 hari kerja setelah surat permintaan diterima = 75 % Completion of financial reports to Shareholders the 20th of the following month, Liquid VAT refunds of at least 70% of the restitution submitted to the Tax Office, and Fulfillment of data for tender 5 working days after receipt of the request letter = 75%	Sedang, Toleransi senilai 1 < Deviasi < 2%, Penyimpangan Kecil terhadap sasaran yang dapat diabaikan (yang mudah diperbaiki kembali)/ Mempengaruhi beberapa sasaran Moderate, Tolerance of 1 < Deviation < 2%, Minor Deviation from negligible goal (which is easy to fix)/Affects some goals
Parah	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU > 4% dan bunga bank terhadap PU > 3% Value of general and administrative costs (BUA) to PU > 4% and bank interest to PU > 3%	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham ≤ tanggal 25 bulan berikutnya, Restitusi PPN cair minimal 65% dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 6 hari kerja setelah surat permintaan diterima = 65% Completion of financial reports to Shareholders 25th of the following month, Liquid VAT refunds of at least 65% of the refund submitted to the Tax Office, and Fulfillment of data for tender 6 working days after the request letter is received = 65%	Tinggi, Toleransi senilai = 2%, Kinerja buruk, dan pemberitaan negatif yang dapat mempengaruhi kepercayaan sebagian besar dari stakeholder/ Sasaransasaran penting tidak dapat tercapai High, Tolerance of = 2%, Poor performance, and negative news that can affect the trust of most stakeholders/Important targets can't be reached
Sangat Parah	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU > 4% dan bunga bank terhadap PU > 3% Value of general and administrative costs (BUA) to PU > 4% and bank interest to PU > 3%	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham > tanggal 25 bulan berikutnya, Restitusi PPN cair minimal 65% dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 7 hari kerja setelah surat permintaan diterima < 50% Completion of financial reports to Shareholders > 25th of the following month, liquidated VAT refunds of at least 65% of the restitution submitted to the Tax Office, and Fulfillment of data for tenders 7 working days after the request letter is received < 50%	Sangat Tinggi, Toleransi ≥ 2%, Kinerja sangat buruk, dan pemberitaan negatif yang dapat menghilangkan kepercayaan dari stakeholder/semua sasaran tidak dapat tercapai Very High, Tolerance 2%, very poor performance, and negative news that can destroy the trust of stakeholders/all targets cannot be achieved

Dampak Terhadap Pencapaian Impact On Achievement	Aspek K3 Aspect of K3	Aspek Lingkungan Environmental Aspect
Tidak Signifikan Not Significant	Nearmiss (hampir celaka) Nearmiss (near miss)	Tidak ada pencemaran, Tidak ada penipisan sumberdaya alam, Kerusakan/ pencemaran dapat langsung dipulihkan pada saat itu juga No pollution, No depletion of natural resources, Damage/pollution can be recovered instantly
Minor Minor	Terjadi kecelakaan yang membutuhkan pemulihan first aid There was an accident that required first aid recovery	Pencemaran dengan kuantitas kecil. Penipisan SDA dengan konsumsi kecil. Kerusakan atau pencemaran dapat langsung dipulihkan dalam waktu maksimal 1 minggu Small quantity pollution. SDA depletion with small consumption. Damage or contamination can be directly recovered within a maximum of 1 week
Moderat Moderate	Terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera, memerlukan perawatan di rumah sakit berdampak LTI An accident that causes injury, requires hospitalization LTI impact hospital	Pencemaran dengan kuantitas sedang. Penipisan SDA dengan konsumsi sedang. Kerusakan atau pencemaran sedang. Waktu pemulihan 1-4 minggu Pollution with moderate quantity. SDA depletion with moderate consumption. Moderate damage or contamination. Recovery time 1-4 weeks
Parah Severe	Terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen There was an accident that caused permanent disability	Pencemaran dengan kuantitas besar. Penipisan SDA dengan konsumsi besar. Kerusakan besar dan mengancam kehidupan. Waktu Pemulihan 1-6 bulan Large quantity of pollution. SDA depletion with large consumption. Massive and life threatening damage. Recovery Time 1-6 months
Sangat Parah Very Severe	Critical Critical	Pencemaran dapat mengakibatkan SDA tidak dapat diperbaharui kembali. Kerusakan dapat mengancam eksistensi kehidupan. Waktu pemulihan sangat panjang, lebih dari 6 bulan atau bertahun-tahun Pollution can cause natural resources to be non-renewable. Damage can threaten the existence of life. Very long recovery time, more than 6 months or years

Matriks Tingkat Risiko

Risk Level Matrix

AS/NZS 4360:1999		Dampak Impact				
		Tidak Signifikan Not Significant	Minor Minor	Moderat Moderate	Parah Critical	Sangat Parah Awfully
		1 0%-20%	2 1%-40%	3 41%-60%	4 61%-80%	5 1%-00%
PROBABILITAS PROBABILITY	Hampir pasti Almost sure	H	H	E	E	E
	Kemungkinan besar terjadi Most likely happen	M	H	H	E	E
	Kadang-kadang sometimes	L	M	H	E	E
	Mungkin terjadi Might happen	L	L	M	H	E
	Jarang terjadi Rarely happening	L	L	M	H	H

Dampak terhadap Pencapaian

1. Tidak signifikan
2. Minor
3. Moderat
4. Parah
5. Sangat Parah

Impact on Achievement

1. Not significant
2. Minor
3. Moderate
4. Critical
5. Awfully

Kemungkinan Terjadinya Risiko

1. Hampir pasti
2. Kemungkinan besar terjadi
3. Kadang-kadang
4. Mungkin terjadi
5. Jarang terjadi

Possible Risk

1. Almost sure
2. Most likely happen
3. Sometimes
4. Might happen
5. Rarely happening

Level Risiko Risk Levels	Prioritas Priority	Aktivitas Manajemen Activity Management
Extreme Extreme	1	Risiko Ekstrem. Sangat mendesak, perlu penanganan segera dari ToP manajemen. Dalam Unit Kerja/Bisnis/Proyek, penanganan masalah dipimpin oleh top manajemen yang didukung oleh rencana yang terperinci Extreme Risk. Very urgent, need immediate handling of TopP management. In the Work Unit/Business/Project, problem solving is led by top management supported by a detailed plan
	2	Risiko Ekstrem. Sangat mendesak, perlu penanganan segera dari ToP manajemen. Dalam Unit Kerja/Bisnis, penanganan masalah dilakukan oleh Kepala Departemen/General Manager dan Manager terkait. Dalam Proyek, penanganan masalah dilakukan oleh General Manager dan Project Manager terkait. Extreme Risk. Very urgent, need immediate handling of TopP management. In the Work/Business Unit, the handling of problems is carried out by the Head of the Department/General Manager and the related Manager. In Project, problem handling is carried out by the General Manager and the related Project Manager.
High	3	Risiko Tinggi. Perlu perhatian top manajemen. Dalam Unit Kerja/Bisnis, penanganan masalah dilakukan oleh Manager terkait. Dalam Proyek, penanganan masalah dilakukan oleh Project Manager dan Supervisor terkait High Risk. Need top management attention. In the Work/Business Unit, the handling of problems is carried out by the relevant Manager. In the Project, problem solving is carried out by the Project Manager and related Supervisor
Medium	4	Risiko Sedang. Tanggung jawab manajemen perlu diperjelas. Perhatian dan penanganan masalah dilakukan oleh pemilik proses Moderate Risk. Management responsibilities need to be clarified. Attention and troubleshooting is done by the process owner
Low	5	Risiko rendah. Perlu diatur rutinitasnya menggunakan prosedur yang ada. Dilakukan perhatian dan monitor oleh pemilik proses Low risk. Routines need to be set using existing procedures. Attention and monitoring by the process owner

1. Penilaian risiko

a. Identifikasi Risiko

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa risiko, penyebabnya serta konsekuensi potensialnya. Tujuan tahapan ini adalah untuk menghasilkan suatu daftar risiko yang komprehensif berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dapat meningkatkan, menghalangi, mengurangi, atau menunda pencapaian tujuan. Penting juga untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan kegagalan memanfaatkan peluang. Identifikasi komprehensif sangat kritis karena risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini tidak akan dianalisis lebih lanjut.

Identifikasi komprehensif dilakukan dengan menggunakan proses sistematis dan terstruktur, mencakup semua risiko, baik risiko yang berada dalam kendali perusahaan maupun risiko yang di luar kendali perusahaan. Risiko yang berada dalam kendali perusahaan dapat diidentifikasi dengan pendekatan rantai nilai (*value chain*) atau saling keterkaitan antar tiap proses/aktivitas/fungsi. Sedangkan risiko yang berada diluar kendali perusahaan diidentifikasi dengan pendekatan kerangka analisis operasi. Perusahaan menerapkan perangkat dan teknik identifikasi yang cocok dengan tujuan dan kapabilitasnya terhadap risiko yang dihadapi. Pada intinya, langkah identifikasi risiko dilakukan untuk menggali dan menemukan jawaban terhadap dua pertanyaan: "apa yang dapat terjadi yang memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan?" dan "mengapa dan bagaimana hal itu terjadi?"

1. Risk assessment

a. Risk Identification

This step is carried out by identifying risk events, their causes and potential consequences. The purpose of this stage is to produce a comprehensive risk list based on events that can increase, hinder, reduce, or delay the achievement of objectives. It is also important to identify the risks associated with failing to take advantage of opportunities. Comprehensive identification is critical because risks not identified at this stage will not be analyzed further.

Comprehensive identification is carried out using a systematic and structured process, covering all risks, both risks that are within the control of the company and those that are beyond the control of the company. Risks that are within the company's control can be identified by using a value chain approach or the interrelationships between each process/activity/function. Meanwhile, risks that are beyond the company's control are identified using an operations analysis framework approach. The company applies identification tools and techniques that match its objectives and capabilities to the risks it faces. In essence, the risk identification step is carried out to explore and find answers to two questions: "what can happen that affects the achievement of company goals?" and "why and how did it happen?"

Informasi yang relevan dan terkini sangat penting dalam mengidentifikasi risiko. Semua unit kerja perusahaan harus dilibatkan dalam mengidentifikasi risiko. Proses identifikasi risiko menghasilkan suatu peristiwa yang mungkin terjadi, juga menaksir penyebab yang mungkin dan konsekuensi yang dapat timbul. Semua penyebab yang penting harus diperhitungkan.

b. Analisis Risiko

Analisis risiko menjadi dasar untuk kegiatan evaluasi risiko serta keputusan penanganan risiko, strategi yang diperlukan dan metode penanganan risiko yang paling tepat. Analisis risiko melibatkan pertimbangan mengenai penyebab dan sumber risiko, konsekuensi positif dan negatif, serta kemungkinan konsekuensi tersebut dapat timbul. Risiko di analisis dengan mengkombinasikan estimasi terhadap konsekuensi dan likelihood, serta sifat-sifat lain dari risiko. Suatu peristiwa risiko dapat memiliki berbagai konsekuensi dan dapat memengaruhi berbagai tujuan. Pengendalian yang ada dan efektivitasnya juga harus diperhitungkan.

Cara menentukan tingkat kemungkinan (likelihood) dan akibat (konsekuensi) serta pengkombinasian likelihood dan konsekuensi untuk memperoleh suatu tingkatan (level) risiko dapat bervariasi tergantung pada tipe risiko dan informasi yang tersedia. Penentuan tingkat risiko harus konsisten sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Analisis risiko dapat berupa Analisis kualitatif, semi kuantitatif, kuantitatif atau kombinasi di antaranya, tergantung pada informasi risiko dan data yang tersedia. Analisis kuantitatif memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan analisis semi-kuantitatif dan kualitatif. Praktiknya, analisis kualitatif sering digunakan pertama kali untuk mendapatkan indikasi umum mengenai level risiko. Selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif yang lebih spesifik.

Jenis-jenis analisis risiko tersebut adalah sebagai berikut:

i. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif menggunakan istilah atau skala deskriptif untuk menggambarkan besaran konsekuensi yang potensial dan tingkat kemungkinan (likelihood) jika peristiwa risiko terjadi.

Analisis kualitatif yang digunakan:

- Sebagai suatu aktivitas penyaringan awal untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang memerlukan Analisis yang lebih rinci;

Relevant and up-to-date information is very important in identifying risks. All company work units must be involved in identifying risks. The risk identification process produces an event that may occur, as well as assessing the possible causes and consequences that may arise. All important causes must be taken into account.

b. Risk Analysis

Risk analysis becomes the basis for risk evaluation activities as well as risk management decisions, the strategies needed and the most appropriate risk management methods. Risk analysis involves considering the causes and sources of risk, positive and negative consequences, and the likelihood that these consequences may arise. Risk is analyzed by combining estimates of consequences and likelihood, as well as other properties of risk. A risk event can have multiple consequences and can affect multiple objectives. Existing controls and their effectiveness must also be taken into account.

How to determine the level of likelihood and consequence as well as the combination of likelihood and consequence to obtain a level of risk may vary depending on the type of risk and the information available. Determination of the level of risk must be consistent with the criteria that have been set.

Risk analysis can be in the form of qualitative, semi-quantitative, quantitative analysis or a combination of these, depending on the risk information and data available. Quantitative analysis has a higher level of complexity and costs more than semi-quantitative and qualitative analysis. In practice, qualitative analysis is often used first to get a general indication of the level of risk. Furthermore, a more specific quantitative analysis was carried out.

The types of risk analysis are as follows:

i. Qualitative Analysis

Qualitative analysis uses descriptive terms or scales to describe the magnitude of the potential consequences and the likelihood (likelihood) if a risk event occurs.

Qualitative analysis used:

- As an initial screening activity to identify risks that require a more detailed analysis;

- Ketika level risiko tidak memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih detail karena faktor waktu dan sumber daya; atau
- Ketika data numerik tidak memadai untuk tujuan Analisis kuantitatif.

ii. Analisis Semi Kuantitatif

Analisis risiko semi kuantitatif mengambil satu langkah lebih jauh dibanding Analisis kualitatif yaitu dengan pemberian atribut nilai atau pengali kepada besaran likelihood dan konsekuensi. Angka yang dialokasikan kepada masing-masing uraian tidak harus mengandung hubungan yang akurat dengan besaran aktual dari konsekuensi dan likelihood. Nilai yang digunakan untuk menggambarkan konsekuensi mencerminkan besaran relatif dan bukan besaran atau ukuran absolut. Sedangkan nilai yang digunakan untuk besaran likelihood adalah nilai-nilai subyektif dan variabel sesuai kondisi peristiwa risiko yang dianalisis. Tujuannya untuk memperoleh prioritas yang lebih detail dari pada yang biasanya diperoleh dalam analisis kualitatif.

Kadang-kadang likelihood terdiri dari dua elemen, yaitu frekuensi eksposur dan probabilitas atas suatu kejadian peristiwa risiko. Frekuensi eksposur adalah luasnya area di mana sumber risiko terdapat, sedangkan probabilitas adalah kemungkinan kesempatan sumber risiko terjadi. Perhatian harus dipusatkan ketika terjadi situasi di mana hubungan antara kedua elemen tidak sepenuhnya independen, misalnya terdapat hubungan yang kuat antara frekuensi eksposur dengan probabilitas.

iii. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif menggunakan nilai angka (tidak menggunakan skala deskriptif seperti digunakan dalam Analisis kualitatif dan semi kuantitatif), baik untuk konsekuensi maupun likelihood, dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang tersedia. Kualitas analisis tergantung pada akurasi dan kelengkapan nilai numerik yang digunakan. Konsekuensi dapat diestimasi dengan pembuatan model outcome dari suatu atau beberapa peristiwa, atau dengan ekstrapolasi hasil kajian eksperimen atau data masa lalu. Konsekuensi dapat dinyatakan dalam satuan moneter (mata uang), kriteria teknik (satuan pengukuran) atau manusia (kematian/cedera) atau kriteria lainnya. Dalam beberapa kasus, diperlukan lebih dari satu nilai numerik untuk menentukan konsekuensi pada waktu, tempat, kelompok atau situasi yang berbeda. Pada akhir tahapan analisis risiko ini diharapkan diperoleh:

- Besaran tiap-tiap risiko (level of single risk)
- Peta Risiko.

- When the level of risk does not allow for a more detailed analysis due to time and resource factors; or
- When numerical data are insufficient for the purpose of quantitative analysis.

ii. Semi Quantitative Analysis

Semi-quantitative risk analysis takes one step further than qualitative analysis, namely by assigning a value attribute or a multiplier to the magnitude of likelihood and consequence. The number allocated to each description does not have to contain an accurate relationship to the actual magnitude of the consequences and likelihood. Values used to describe consequences reflect relative magnitudes and not absolute magnitudes or measures. Meanwhile, the values used for likelihood are subjective and variable values according to the conditions of the risk event being analyzed. The aim is to obtain a more detailed prioritization than is usually obtained in a qualitative analysis.

Sometimes likelihood consists of two elements, namely the frequency of exposure and the probability of an occurrence of a risk event. The frequency of exposure is the extent of the area where the risk source is present, while the probability is the probability of the risk source occurring. Attention should be paid to situations where the relationship between the two elements is not completely independent, for example, there is a strong relationship between exposure frequency and probability.

iii. Quantitative Analysis

Quantitative analysis uses numerical values (not using a descriptive scale as used in qualitative and semi-quantitative analysis), both for consequences and likelihood, using data from various available sources. The quality of the analysis depends on the accuracy and completeness of the numerical values used. Consequences can be estimated by modeling the outcome of an event or events, or by extrapolating the results of experimental studies or past data. Consequences can be expressed in monetary units (currency), technical criteria (units of measurement) or human (death/injury) or other criteria. In some cases, more than one numerical value is required to determine consequences at different times, places, groups or situations. At the end of this risk analysis stage, it is expected to obtain:

- The amount of each risk (level of single risk)
- Risk Map.

c. Evaluasi risiko

Evaluasi risiko merupakan perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Dalam evaluasi risiko, level risiko dan kriteria risiko harus diperbandingkan dengan menggunakan basis yang sama. Evaluasi kualitatif mencakup perbandingan level risiko kualitatif terhadap kriteria kualitatif, dan evaluasi kuantitatif mencakup perbandingan level risiko numerik terhadap kriteria yang dapat dinyatakan dalam angka tertentu, seperti kematian, frekuensi atau nilai uang. Demikian juga perbandingan level risiko semi kuantitatif.

Hasil dari Evaluasi Risiko adalah:

- i. Daftar risiko yang dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk pengambilan tindakan lebih lanjut.
- ii. Prioritas risiko.
Jika risiko-risiko masuk dalam kategori rendah atau risiko yang dapat diterima, maka risiko-risiko tersebut diterima dengan atau tanpa perlakuan/penanganan lebih lanjut. Tetapi jika risiko-risiko adalah menengah atau tinggi, maka harus diambil tindakan perlakuan lebih lanjut. Keputusan penanganan risiko harus dibuat sesuai dengan persyaratan hukum, peraturan, dan persyaratan lainnya.

2. Penanganan risiko

Penanganan risiko adalah proses pengembangan, pemilihan dan pengimplementasian pengendalian risiko.

Penanganan risiko dapat berupa:

- a. Menghindari risiko dengan menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko;
- b. Mengambil peluang dari aktivitas yang berisiko;
- c. Memindahkan sumber risiko;
- d. Mengubah sifat dan besaran likelihood;
- e. Mengubah konsekuensi;
- f. Mentransfer risiko misalnya dengan asuransi;
- g. Menerima risiko.

Penanganan risiko yang berhubungan dengan akibat (konsekuensi) negatif seringkali disebut juga mitigasi risiko, eliminasi risiko, pencegahan risiko, pengurangan risiko, penekanan risiko dan koreksi risiko.

Penanganan risiko meliputi identifikasi opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi, menyiapkan rencana penanganan risiko, dan implementasi rencana penanganan risiko. Opsi penanganan risiko dapat berupa menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko, mencari peluang dengan memutuskan untuk melakukan aktivitas yang akan menghasilkan atau meningkatkan risiko, menghilangkan sumber risiko, mengurangi likelihood,

c. Risk evaluation

Risk evaluation is a comparison between the level of risk found during the analysis process with the risk criteria set previously. In risk evaluation, risk levels and risk criteria must be compared using the same basis. Qualitative evaluation includes comparing the qualitative risk level against qualitative criteria, and quantitative evaluation includes comparing the numerical risk level against criteria that can be expressed in a certain number, such as mortality, frequency or value for money. Likewise, the comparison of semi-quantitative risk levels.

The results of the Risk Evaluation are:

- i. List of acceptable or unacceptable risks for further action taking.
- ii. Risk priority.
If the risks fall into the category of low or acceptable risks, then the risks are accepted with or without further treatment. But if the risks are medium or high, then further action should be taken. Risk treatment decisions must be made in accordance with legal, regulatory and other requirements.

2. Risk management

Risk management is the process of developing, selecting and implementing risk controls.

Risk management can be in the form of:

- a. Avoid risk by stopping activities that pose a risk;
- b. Take advantage of risky activities;
- c. Transferring risk sources;
- d. Changing the nature and magnitude of likelihood;
- e. Changing consequences;
- f. Transferring risk for example by insurance;
- g. Accept the risk.

Management of risks associated with negative consequences is often referred to as risk mitigation, risk elimination, risk prevention, risk reduction, risk suppression and risk correction.

Risk management includes identifying options for dealing with risks, assessing options, preparing risk management plans, and implementing risk management plans. Risk management options can be in the form of avoiding risk by deciding not to carry out activities that pose a risk, seeking opportunities by deciding to perform activities that will generate or increase risk, eliminate sources of risk, reduce likelihood, reduce consequences, transfer or share risk, and accept risk. If the choice of

mengurangi konsekuensi, memindahkan atau membagi risiko, dan menerima risiko. Jika pilihan penanganan risiko berdampak pada risiko di bagian lain perusahaan, maka bagian yang terkena dampak penanganan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Jika sumber daya untuk penanganan risiko terbatas, maka rencana penanganan harus jelas dengan memprioritaskan penanganan risiko yang perlu didahulukan. Perusahaan harus menyadari sifat dan lingkup sisa risiko (residual risk) setelah penanganan risiko. Sisa risiko residual harus didokumentasikan, menjadi subjek pemantauan, penelaahan, dan jika diperlukan dilakukan penanganan lebih lanjut.

3. Pemantauan dan Penelaahan

Pemantauan dan penelaahan risiko merupakan suatu bagian terencana dari proses manajemen risiko. Tanggung jawab terhadap kegiatan ini harus ditentukan dengan jelas. Proses pemantauan dan penelaahan risiko mencakup segala aspek proses manajemen risiko dengan tujuan:

- Analisis dan pembelajaran dari peristiwa, perubahan dan tren risiko;
- Mendeteksi perubahan dalam konteks eksternal dan Internal perusahaan termasuk perubahan pada risiko itu sendiri yang dapat menuntut adanya revisi atau penanganan dan prioritas risiko;
- Memastikan bahwa proses pengendalian dan cara penanganan risiko efektif, baik dari segi desain maupun operasi;
- Mengidentifikasi risiko-risiko baru.

Pemantauan dan penelaahan yang dilakukan secara periodik sangat penting untuk meyakinkan bahwa rencana manajemen masih tetap relevan dan hasil pemantauan dan penelaahan telah dicatat, serta dilaporkan secara Internal atau eksternal sesuai kebutuhan, sebagai bahan masukan untuk tinjauan terhadap kerangka manajemen risiko.

Jenis-Jenis Risiko Perusahaan

1. Risiko Persaingan Usaha dan Pemasaran

Jenis risiko ini merupakan risiko yang dihadapi perusahaan terkait daya saing dalam melakukan persaingan usaha yang menyebabkan kinerja pemasaran tidak berjalan dengan baik.

2. Risiko Pembayaran

Tertundanya atau tidak dibayarnya biaya proyek oleh pemberi kerja merupakan jenis risiko yang disebabkan adanya penundaan pembayaran dan/atau tidak dibayarnya jasa atau penjualan dari pihak Pemberi Kerja/Konsumen yang disebabkan oleh berbagai faktor dan berakibat pada timbulnya kerugian dari Perseroan.

risk treatment has an impact on risk in other parts of the company, then the part affected by the treatment must be involved in decision making.

If the resources for risk management are limited, then the treatment plan must be clear by prioritizing the risk management that needs to be prioritized. The company must be aware of the nature and scope of the residual risk after handling the risk. The remaining residual risk must be documented, be the subject of monitoring, review, and if necessary further treatment.

3. Monitoring and Review

Risk monitoring and review is a planned part of the risk management process. Responsibilities for these activities should be clearly defined. The risk monitoring and review process covers all aspects of the risk management process with the objectives of:

- Analysis and learning of risk events, changes and trends;
- Detect changes in the external and internal context of the company including changes to the risk itself that may require revision or risk management and priority;
- Ensuring that the control process and risk management methods are effective, both in terms of design and operation;
- Identify new risks.

Periodic monitoring and review is very important to ensure that the management plan is still relevant and the results of the monitoring and review have been recorded, and reported internally or externally as needed, as input for a review of the risk management framework.

Types of Company Risk

1. Business Competition and Marketing Risk

This type of risk is a risk faced by companies related to competitiveness in conducting business competition which causes marketing performance to not work well.

2. Payment Risk

Delayed or non-payment of project costs by the employer is a type of risk caused by delays in payment and/or non-payment of services or sales from the Employer/Consumer caused by various factors and results in losses from the Company.

3. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar mata Uang

Merupakan salah satu jenis risiko yang disebabkan adanya fluktuasi nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada pembelian bahan baku produksi atau perubahan nilai transaksi terhadap suatu pekerjaan yang berakibat pada pembengkakan biaya produksi.

4. Risiko Ketidakpastian/Kenaikan harga

Sama halnya dengan risiko fluktuasi nilai tukar, risiko ketidakpastian/kenaikan harga disebabkan adanya ketidakpastian atas harga bahan baku pokok yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang berakibat pada pembengkakan biaya produksi.

5. Risiko adanya Perubahan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 89 ayat (2a)-Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

6. Risiko Kurangnya Tenaga Kerja Inti Proyek

Jenis risiko ini disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja inti perusahaan dengan jumlah proyek yang dikerjakan.

3. Risk of Currency Exchange Rate Fluctuations

Is a type of risk caused by fluctuations in currency exchange rates that affect the purchase of production raw materials or changes in the transaction value of a job which results in an increase in production costs.

4. Risk of Uncertainty/Increase in price

Similar to the risk of exchange rate fluctuations, the risk of uncertainty/price increases is due to uncertainty over the prices of basic raw materials originating from outside and within the country which results in an increase in production costs.

5. Risk of Changes in the regulation of the Procurement of Goods and Services

Article 89 paragraph (2a)-Payment for Construction Works is made in the amount of the work that has been installed.

6. Risk of Lack of Project Core Workforce

This type of risk is caused by an imbalance in the number of the company's core workforce with the number of projects being worked on.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

Risiko-Risiko Utama yang Dihadapi Perusahaan dan Upaya Pengelolaannya Key Risks Facing the Company and Its Management

Risiko Risk	Upaya Pengelolaan Risiko Risk Management Effort
Risiko Pembayaran, tertundanya atau tidak dibayarnya biaya proyek oleh Pemberi Kerja (Owner) Risk of Payment, delay or non-payment of project costs by the Employer (Owner)	Mencantumkan klausul kontrak:-menghentikan pekerjaan senilai sisa uang muka s/d termin dibayar.-memutus kontrak secara sepihak. Include contract clauses:-stop work for the remaining amount of the down payment until the term is paid.-unilaterally terminate the contract.
Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang Risk of currency exchange rate fluctuation	Melakukan Hedging dengan memperhitungkan cost dan benefitnya. Hedging by taking into account the costs and benefits.
Risiko Ketidakpastian/kenaikan harga Risk of Uncertainty/price increase	Melakukan kontrak payung pembelian material strategis dan berskala besar. Mengikat calon mitra kerja dengan kontrak atas Proyek yang telah didapat. Memperhitungkan perkiraan inflasi saat melakukan penawaran. Performing umbrella contracts for strategic and large-scale material purchases. Bind prospective work partners with contracts for the Projects that have been obtained. Take inflation forecasts into account when bidding.
Risiko adanya Perubahan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 89 ayat (2a)-Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang Risk of Changes in the regulation of the Procurement of Goods and Services Article 89 paragraph (2a)-Payment for construction work is carried out in the amount of the work that has been installed	Memperhitungkan waste saat melakukan penawaran, khususnya untuk pekerjaan konstruksi di bawah permukaan tanah. Take into account waste when bidding, especially for construction work below ground level.
Risiko Kurangnya Tenaga Kerja Inti Proyek Risk of Lack of Project Core Workforce	Merekrut tenaga kerja proyek profesional/pengalaman. Melakukan peningkatan kompetensi dengan menjalankan program pendidikan dan pelatihan pada Nindya Learning Center. Recruiting a professional/experienced project workforce. Improve competence by running education and training programs at the Nindya Learning Center.

Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko

Risiko-risiko tersebut di atas akan selalu dimonitor dan dievaluasi dengan memperhatikan dinamika kegiatan usaha dan peraturan-peraturan terkait, termasuk memetakan risiko-risiko yang mungkin belum teridentifikasi.

Melalui penerapan sistem manajemen risiko dalam kegiatan operasional, perusahaan memperoleh keakuratan dalam mengidentifikasi risiko industri, keuangan, serta lainnya. Perusahaan juga mampu menjadikan budaya pengelolaan risiko sebagai bagian dari budaya pegawai.

Manajemen risiko telah mewarnai dan berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penguatan penerapan GCG di perusahaan. Sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan mampu meminimalisir dan atau menekan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Hal ini terlihat dari efektivitas atas kualitas, kuantitas, dan waktu yang tercapai.

Evaluasi implementasi manajemen risiko dilakukan melalui monitoring dan review risiko. Implementasi manajemen risiko yang saat ini telah dijalankan akan disempurnakan dengan membangun sistem manajemen risiko yang mengacu kepada framework atau kerangka kerja CoSo.

Sedangkan evaluasi risiko dilakukan melalui pengelompokan risiko berdasarkan level risikonya. Pengelompokan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah peta/profil risiko sehingga terlihat risiko yang mana yang lebih tinggi dibandingkan risiko lain.

Evaluation of Risk Management Implementation

The risks mentioned above will always be monitored and evaluated by taking into account the dynamics of business activities and related regulations, including mapping the risks that may not have been identified.

Through the implementation of a risk management system in operational activities, the company gains accuracy in identifying industrial, financial, and other risks. The company is also able to make risk management culture part of the employee culture.

Risk management has colored and contributed positively to the process of planning, decision making, and strengthening the implementation of GCG in the company. The risk management system implemented by the company is able to minimize and/or suppress the possible risks that will occur. This can be seen from the effectiveness of the quality, quantity, and time achieved.

Evaluation of risk management implementation is carried out through risk monitoring and review. The current implementation of risk management will be improved by building a risk management system that refers to the CoSo framework.

Meanwhile, risk evaluation is carried out through risk grouping based on the level of risk. The grouping is entered into a map/risk profile so that it can be seen which risk is higher than other risks.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Perusahaan sehingga menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perusahaan yang sehat dan aman. Manajemen akan memiliki dasar yang kuat dan tepat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu; dan memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan dan meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, perusahaan mengupayakan pengembangan Sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan CoSo (Committee of Sponsoring organizations of threadway Commissions).

Sistem Pengendalian Internal mencakup:

1. Lingkungan pengendalian Internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengolahan risiko usaha
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi;
5. Monitoring yang secara operasional dijabarkan lebih lanjut kedalam berbagai kebijakan berupa pedoman, petunjuk operasional maupun instruksi kerja.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal Perusahaan berfokus pada penguatan aspek fundamental, serta aktivitas operasional dan bisnis. Manajemen juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan secara berkala, didukung dengan akuntabilitas pencatatan informasi baik keuangan maupun non keuangan.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian Internal menjadi salah satu dasar manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan manajemen menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan cara yang lebih efektif.

Berikut tahapan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern Perseroan:

1. SPI melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern Perseroan;
2. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut kepada Komisaris;

An effective Internal Control System (SPI) is an important component in the Company's management so that it becomes the basis for healthy and safe Company operations. Management will have a strong and appropriate basis to improve the company's compliance with applicable laws and regulations; ensure the availability of correct, complete and timely financial reports and management reports; and meet the efficiency and effectiveness of the company's business activities.

In order to increase the accountability of every decision and increase the transparency and accuracy of recording business transactions, the company seeks to develop an internal control system using the CoSo (Committee of Sponsoring organizations of threadway Commissions) approach.

Internal Control System includes:

1. Internal control environment within the Company which is disciplined and structured;
2. Business risk assessment and processing
3. Control activities;
4. Information and communication systems;
5. Operational monitoring is further elaborated into various policies in the form of guidelines, operational instructions and work instructions.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

The Company's internal control system focuses on strengthening fundamental aspects, as well as operational and business activities. Management also evaluates the implementation of the Company's internal control system on a regular basis, supported by accountability for recording information, both financial and non-financial.

The results of the evaluation of the implementation of the Internal control system become one of the management's basis for determining the improvement and refinement of the system or policies that enable the management to carry out the company's operational activities in a more effective manner.

Following are the stages of evaluating the effectiveness of the Company's internal control implementation:

1. SPI evaluates the effectiveness of the Company's internal control implementation;
2. The Board of Directors follows up on reports on audit results carried out by SPI and External Auditors and reports on the progress of follow-up to the Commissioners;

3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal; 4. Komisaris memberikan penilaian dan masuk terhadap laporan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit dan ruang lingkup audit; 5. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan Tim manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.	3. The Commissioner monitors the progress of follow-up on the SPI audit report and the External Auditor; 4. The Board of Commissioners evaluates and enters into the report on the results of the SPI audit and the External Auditor which includes the report material, audit objectives and audit scope; 5. The Board of Commissioners supervises and monitors the compliance of the Board of Directors and the management team in implementing the laws and regulations.

Maksud dan Tujuan Evaluasi adalah:

1. Memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian pernyataan mengenai efektivitas pengendalian intern untuk selanjutnya memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penerapan Sistem pengendalian intern perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan itu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, dan efisien/efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan di masa yang akan datang (Areas of Improvement).

The Purpose and Objectives of the Evaluation are:

1. Provide confidence to the Board of Directors in providing a statement regarding the effectiveness of internal control to further provide confidence to other stakeholders that the implementation of the company's internal control system is adequate in achieving its expected goals, namely compliance with applicable laws and regulations, availability of financial and management information correct, complete and timely, and efficient/effectiveness of the company's business activities.
2. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the improvement of the Company's Internal Control System implementation in the future (Areas of Improvement).

Sekilas tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility at a Glance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi perusahaan dalam membangun hubungan yang tumbuh Bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari Internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi usaha dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a forum for companies to build growing relationships with stakeholders, both internally such as management and employees, as well as from external parties such as the community around the business location and consumers. Regarding the implementation of CSR, the Company divides it into 4 (four) aspects.



Perkara Penting dan Permasalahan Hukum

Important Matters and Legal Issues

Perkara hukum yang dihadapi Perseroan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Saat ini PT Nindya Karya (Persero) ("Nindya") masih memiliki hak tagih kepada PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) ("DPS") sebesar Rp4.345.943.200,-(empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang mana jumlah tagihan tersebut merupakan tagihan atas Proyek Pembangunan Landasan Glaangan DPS-Lamongan. Selanjutnya terhadap kewajiban tersebut, DPS dan Nindya telah melakukan mediasi dengan Kementerian BUMN sebagai mediatornya.

Hasil dari mediasi tersebut adalah ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Nomor 0006/DKS/KTR/SEKPER/09/2020 dan Nomor Ktr. 602/DS/9/II/2020 tanggal 29 September 2020. Dalam Perjanjian tersebut DPS akan menyelesaikan kewajibannya dengan cara bertahap (angsuran/bulan).

Namun demikian, terhitung dari ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Kewajiban tersebut, DPS belum melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Saat ini DPS sedang dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU") atas permohonan dari salah satu krediturnya yang diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya. Adapun Nindya merupakan salah satu Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara atas usulan perdamaian yang akan diajukan oleh DPS.

Disamping hal tersebut, Perusahaan juga menjalankan pelaksanaan PP No. 69 tahun 2012. PP tersebut berisi tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan saham baru PT Nindya Karya, berisi saham PT PPA bersifat sementara dan saham PT PPA harus dialihkan kembali pada negara dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan paling lambat tahun 2020.

Pada tahun 2021 melalui Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2021 pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) menyatakan bahwa Saham yang diambil bagian oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dialihkan kembali kepada negara dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tahun 2022.

The legal cases faced by the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Directors throughout 2021 are as follows:

Currently PT Nindya Karya (Persero) ("Nindya") still has the right to claim from PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) ("DPS") amounting to Rp4,345,943,200,-(four billion three hundred forty five million nine hundred and forty three thousand two hundred rupiah) in which the amount of the invoice is a bill for the Glaangan Development Project of DPS-Lamongan. Furthermore, regarding this obligation, DPS and Nindya have mediated with the Ministry of SOEs as the mediator.

The result of the mediation was the signing of the Agreement on Settlement of Obligations Number 0006/DKS/KTR/SEKPER/09/2020 and Number Ktr. 602/DS/9/II/2020 dated September 29, 2020. Under the agreement, DPS will settle its obligations in stages (installments/month).

However, as of the signing of the Agreement for Settlement of Obligations, DPS has not implemented the provisions of the agreement. Currently, DPS is in a state of Postponing Debt Payment Obligations ("PKPU") at the request of one of its creditors submitted at the Surabaya Commercial Court. Meanwhile, Nindya is one of the Concurrent Creditors who has the right to vote on the peace proposal that will be submitted by the DPS.

In addition to this, the Company also implements PP No. 69 of 2012. The PP contains changes to the structure of state share ownership through the issuance of new shares of PT Nindya Karya, containing PT PPA shares that are temporary and PT PPA shares must be transferred back to the state with the mechanism regulated in laws and regulations no later than 2020.

In 2021 through Government Regulation No. 89 of 2021 article 3 (three) paragraph 2 (two) states that the shares subscribed by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) are transferred back to the state by the mechanism as regulated in the provisions of the legislation no later than 2022.

Adapun perpanjangan tersebut selaras dengan rencana pembentukan Holding PT Danareksa (Persero), dimana PT Nindya Karya (Persero) nantinya akan masuk ke dalam kelompok perusahaan yang telah menyelesaikan masa restrukturisasinya dan masuk sebagai perusahaan yang akan ditingkatkan oleh PT Danareksa (Persero).

Sanksi Administrasi

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan sebagai organisasi, entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Di sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perseroan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Komisaris maupun Direksi.

The extension is in line with the plan to establish Holding PT Danareksa (Persero), where PT Nindya Karya (Persero) will later be included in the group of companies that have completed their restructuring period and become a company that will be upgraded by PT Danareksa (Persero).

Administrative Sanctions

During 2021, there were no material administrative sanctions affecting the continuity of the Company's business and there were also no administrative sanctions imposed on the Company as an organization, subsidiary, members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners by the relevant authorities.

Important Matters Outside the Legal Aspect

Throughout 2021, the Company did not find any important cases outside the legal aspect involving the Company as an organization, subsidiary, Board of Commissioners or Board of Directors.

Akses Informasi dan Data Perusahaan: Tata Kelola Keterbukaan Informasi

Access to Company Information and Data: Information Disclosure Governance

Implementasi terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan Perseroan, Perseroan menyediakan akses informasi data perusahaan dengan jenis informasi dan media yang beragam.

Implementation of the principle of transparency in the management of the Company, the Company provides access to information on company data with various types of information and media.

Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan menjalankan komitmennya mengenai transparansi dan pengungkapan melalui berbagai media pelaporan sebagai berikut:

1. Situs resmi Perusahaan: www.nindyakarya.co.id.
2. Media sosial: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
3. Newsletter internal
4. Mengikuti event nasional dan internasional
5. Media komunikasi internal
6. Town Hall Meeting

Throughout 2021, the Company carried out its commitments regarding transparency and disclosure through various reporting media as follows:

1. Company's official website: www.nindyakarya.co.id.
2. Social media: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
3. Internal newsletter
4. Participate in national and international events
5. Internal communication media
6. Town Hall Meeting

Media Penyampaian Informasi

Jenis Media Media Type	Akses Access
Situs Site	www.nindyakarya.co.id
Media Sosial Social media	Twitter: @nindyakarya Facebook: PT NindyaKarya (Persero) Instagram: @nindyakarya
Contact Center	(021) 8093276

Information Delivery Media

Sebagai portal utama akses informasi Perseroan, website Perseroan menyajikan beragam materi terkini tentang kegiatan usaha yang dijalankan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam situs tersebut, telah memuat berbagai informasi mengenai profil Perusahaan, produk dan jasa, serta informasi korporasi lainnya. Selain itu, Perusahaan juga menyediakan sarana penyampaian informasi dengan menghubungi kantor pusat Perusahaan secara langsung dengan alamat sebagai berikut:

As the main portal for accessing the Company's information, the Company's website presents a variety of the latest material on business activities carried out using Indonesian and English languages. The site contains various information regarding the Company's profile, products and services, as well as other corporate information. In addition, the Company also provides a means of delivering information by contacting the Company's head office directly at the following address:

Kantor Pusat Head Office

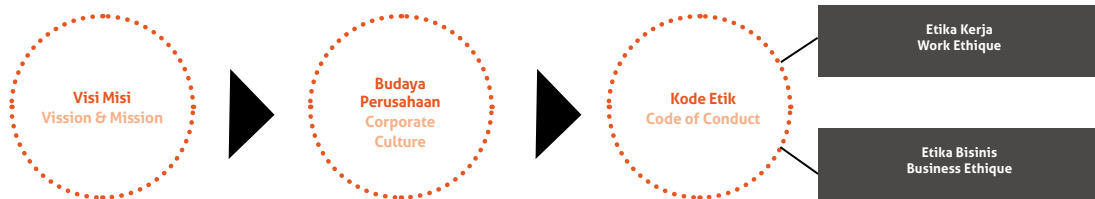
PT Nindya Karya (Persero)
Jl. Letjend MT. Haryono, Kav. 22 Jakarta Timur 1360 DKI Jakarta, Indonesia
Telepon +6221 809 3276 (Hunting)
Fax +6221 809 3105
Email nindyakarya@nindyakarya.

Kode Etik

Code of Ethics

Agar visi, misi dan nilai inti serta budaya Perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, diperlukan sebuah perangkat yang bersifat artikulatorik serta memiliki mekanisme reward & punishment. Perseroan telah menyusun Kode Etik atau Code of Conduct yang berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh insan Nindya Karya dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode Etik Perusahaan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam perusahaan.

In order for the vision, mission and core values as well as the Company's culture to be implemented more realistically, a tool that is articulate and has a reward & punishment mechanism is needed. The Company has compiled a Code of Ethics or Code of Conduct which serves as a guideline for standard behavior for all Nindya Karya employees in interacting with internal and external parties. The Company's Code of Conduct is introduced to all levels within the company.



Penetapan Kode Etik dan Pemberlakuan bagi Seluruh Insan Nindya Karya

Kode Etik perusahaan sebagaimana yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dan 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero) memuat pernyataan, ditujukan dan berlaku bagi seluruh insan Nindya Karya tanpa terkecuali.

Determination of the Code of Ethics and Enforcement for All Insan Nindya Karya

The company's code of ethics as ratified in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero) contains a statement, intended and applicable to all Nindya Karya employees without exception.

Isi Pokok-Pokok Kode Etik

Etika Kerja

Ruang Lingkup Etika Kerja

Kinerja dan citra perusahaan sebagai faktor yang memengaruhi dan menentukan kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis perusahaan sangat berkaitan dengan perilaku seluruh insan perusahaan. Untuk mewujudkan kinerja ekselen dan citra yang baik diperlukan etika kerja yang mengatur hubungan antar individu baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Contents of the Code of Ethics

Work Ethics

Scope of Work Ethics

Performance and corporate image as factors that influence and determine the smooth running of the company's business and business continuity are closely related to the behavior of all company personnel. To realize excellent performance and a good image, it is necessary to have a work ethic that regulates relationships between individuals both inside and outside the company.

Nilai-Nilai Utama Budaya Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (Stakeholders), maka seluruh Insan NINDYA memiliki nilai-nilai utama budaya (Core Values) sebagai berikut:

Core Values of Corporate Culture

In order to realize the Company's commitment to stakeholders, all NINDYA personnel have the following core values:

AKHLAK

TATA NILAI VALUE	MAKNA MEANING
A AMANAH TRUSTWORTHY	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Firmly uphold the given trust.
K KOMPETEN COMPETENT	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Continuous learning and develop capacity.
H HARMONIS HARMONIOUS	Saling peduli dan menghargai perbedaan. Care each other and respect diversity.
L LOYAL LOYAL	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dedicated and prioritizing interests of the Nation and State.
A ADAPTIF ADAPTIVE	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Continuous Innovation and enthusiast in driving or responding to any change.
K KOLABORATIF COLLABORATIVE	Membangun kerja sama yang sinergis. Build synergic partnership.

Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan sikap dasar perusahaan dalam berbisnis dengan semua *Stakeholders*. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan serta menciptakan nilai tambah (*value creation*) bagi perusahaan dan *Stakeholders*.

1. Hubungan dengan Pemegang Saham

Etika hubungan kepada Pemegang Saham adalah:

- Senantiasa berusaha meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai Pemegang Saham (*Shareholder Value*), seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan dan kepentingan lain.
- Menciptakan dan mengembangkan peluang-peluang bisnis guna meningkatkan kemajuan perusahaan.
- Menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Business Ethics

Business ethics is the company's basic attitude in doing business with all stakeholders. The company is committed to continuously building long-term and mutually beneficial relationships and creating value for the company and stakeholders.

1. Relationship with Shareholders

The ethics of the relationship to the Shareholders are:

- Always strive to optimally and sustainably increase Shareholder Value, such as profit levels, growth rates and other interests.
- Creating and developing business opportunities to improve the company's progress.
- Seriously apply the principles of good corporate governance.
- Ensuring that every shareholder gets his rights in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, all decisions taken legally at the GMS and the applicable laws and regulations
- Provide complete and accurate material information about the Company to each Shareholder in accordance with the prevailing laws and regulations;

- f. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- g. Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Hubungan dengan Rekanan/Pemasok Barang dan Jasa

Etika hubungan kepada rekanan/pemasok barang dan jasa adalah:

- a. Memelihara komunikasi yang baik dengan pemasok atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perseroan.
- b. Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemasok atau rekanan.
- c. Bersikap jujur dan adil serta beretika dalam berbisnis dengan pemasok atau rekanan.
- d. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Memilih calon pemasok atau rekanan yang mempunyai reputasi, kompetensi dan catatan kerja/prestasi (track record) yang baik.
- f. Menghindari bisnis dengan pemasok atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g. Membuat perjanjian/kontrak secara tertulis dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian.

3. Hubungan dengan Karyawan

Etika hubungan dengan karyawan adalah:

- a. Menghargai karyawan sebagai aset perusahaan yang bermartabat tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik, gender dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten.
- b. Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi dan pengembangan karier secara adil/wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kompensasi dan hak karyawan diberikan berdasarkan kinerja serta sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menciptakan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi kepada seluruh karyawan tanpa membedakan senioritas, gender, suku, ras, agama dan golongan.
- d. Menyediakan tempat, sarana kerja yang layak dan memelihara lingkungan secara harmonis.

- f. Not taking any action to seek personal gain and other parties by using company information that is not in the public interest or which may cause a conflict of interest;
- g. Always ensure that material information about the company is always provided honestly, timely and regularly to Shareholders in accordance with the applicable laws and regulations.

2. Relationship with Partners/Suppliers of Goods and Services

The ethics of relations with partners/suppliers of goods and services are:

- a. Maintaining good communication with suppliers or partners as strategic partners whose role is to ensure the availability of supplies of goods and services needed for the smooth operation of the Company.
- b. Provide equal treatment to all suppliers or partners.
- c. Be honest and fair and ethical in doing business with suppliers or partners.
- d. Carry out the procurement of goods and services transparently and in accordance with applicable regulations.
- e. Choose a potential supplier or partner who has a good reputation, competence and track record.
- f. Avoid business with suppliers or partners who have conflicts of interest with officials and or companies that are reasonably suspected of causing corruption, collusion and nepotism.
- g. Make written agreements/contracts and carry out the rights and obligations of each party in accordance with the agreement.

3. Relationship with Employees

The ethics of relations with employees are:

- a. Appreciate employees as dignified company assets regardless of race, color, religion, origin, physical barriers, gender and age, whose capacity continues to be improved through consistent education and training.
- b. Implement a fair/fair and consistent recruitment, promotion and career development system based on competence according to company needs. Compensation and employee rights are given based on performance and in accordance with applicable regulations.
- c. Creating equal opportunities for employment and promotion to all employees regardless of seniority, gender, ethnicity, race, religion and class.
- d. Provide a place, proper working facilities and maintain a harmonious environment.

- e. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang.
- f. Selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi termasuk memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja penyandang disabilitas. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan.
- g. Menyediakan informasi yang relevan tentang kebijakan, rencana dan kemajuan perusahaan kepada karyawan.
- h. Menjaga kebebasan karyawan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada perusahaan tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan cara yang beretika dan sesuai dengan peraturan.
- i. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan perusahaan.
- j. Menghormati dan menjaga kerahasiaan catatan maupun informasi pribadi karyawan.
- k. Kompensasi dan hak karyawan diberikan berdasarkan kinerja serta sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Hubungan dengan Pemberi Tugas/Pelanggan

Etika hubungan kepada pemberi tugas/pelanggan adalah:

- a. Menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis.
- b. Menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik serta penyerahan tepat waktu sesuai kontrak kepada pelanggan.
- c. Mengutamakan sikap jujur dan beretika dalam berbisnis dengan pelanggan.
- d. Memperhatikan keluhan dan masukan dari pelanggan serta memberikan tanggapan sesegera mungkin.
- e. Melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha yang memiliki reputasi yang baik.
- f. Menjaga kualitas hubungan dan tidak melakukan kerja sama yang dapat merugikan perusahaan, pelanggan maupun masyarakat.
- g. Menyediakan layanan pengaduan bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi.
- h. Melaksanakan promosi yang berkesinambungan secara sehat, wajar (fair), jujur, mudah dipahami serta diterima oleh norma-norma masyarakat.

- e. Provide a work environment that is free from all forms of pressure (harassment) that may arise as a result of differences in one's character, personal circumstances and cultural background.
- f. Always upholding work equality, including the prohibition against all forms of discrimination, including giving equal treatment to workers with disabilities. The company provides equal and equal opportunities and fair treatment to all employees.
- g. Provide relevant information about company policies, plans and progress to employees.
- h. Maintain employee freedom to express opinions and aspirations to the company regarding company policies and practices in an ethical manner and in accordance with regulations.
- i. Give awards to employees who excel and impose strict sanctions on those who neglect their duties or violate company regulations.
- j. Respect and maintain the confidentiality of employee records and personal information.
- k. Compensation and employee rights are given based on performance and in accordance with applicable regulations.

4. Relationship with Task Owner/Customer

The ethics of the relationship to the assignor/customer are:

- a. Placing customers as strategic partners.
- b. Provide products and services with good quality and timely delivery according to the contract to customers.
- c. Prioritizing honest and ethical attitudes in doing business with customers.
- d. Pay attention to complaints and input from customers and provide feedback as soon as possible.
- e. Perform clear and mutually beneficial business engagements in writing only with business partners who have a good reputation.
- f. Maintain the quality of the relationship and do not cooperate that can harm the company, customers and society.
- g. Provide complaint services for customers that are easily accessible and without discrimination.
- h. Carry out sustainable promotions in a healthy, fair, honest, easy to understand and accepted manner by the norms of society.

5. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar, Mitra Binaan dan Lingkungan

Etika hubungan kepada masyarakat sekitar, Mitra Binaan dan lingkungan adalah:

- Menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan masyarakat sekitar dan memperhatikan adat istiadat serta aspek sosial masyarakat sekitar.
- Menerima dan memanfaatkan tenaga kerja sekitar operasional perusahaan tanpa mengabaikan kualifikasi yang dibutuhkan.
- Proses kegiatan pembangunan dilakukan tanpa memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar dengan implementasi metode yang aman dan ramah lingkungan.
- Mengalokasikan dana untuk pengembangan mitra binaan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mitra binaan dengan membuat rekaman dan sistem pelaporan.
- Memperhatikan dan memberikan kontribusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan sesuai kemampuan perusahaan.
- Menyalurkan pinjaman pada industri kecil dan koperasi (kemitraan) melalui TJSL sesuai dengan keputusan RUPS.
- Melalui TJSL memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial perusahaan yang berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan sarana umum serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan yang dialokasikan oleh RUPS.
- Memberikan informasi-informasi relevan yang diperlukan masyarakat sekitar pekerjaan mengenai dampak selama pelaksanaan pekerjaan.
- Peka dan peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungan.
- Menghindari segala perkataan, Tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar hukum agama, ras dan golongan.
- Senantiasa menjaga lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang ada serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

6. Hubungan dengan Pemerintah

Etika hubungan kepada pemerintah adalah:

- Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi perusahaan, termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya.

5. Relationship with the Neighborhood Community, Development Partner and the Environment

The ethics of relations to the surrounding community, fostered partners and the environment are:

- Maintain a conducive and harmonious relationship with the surrounding community and pay attention to customs and social aspects of the surrounding community.
- Receive and utilize workers around the company's operations without neglecting the required qualifications.
- The process of development activities is carried out without giving a negative impact to the surrounding community by implementing safe and environmentally friendly methods.
- Allocate funds for the development of the fostered partners and the environment in accordance with applicable regulations and evaluate the success of the fostered partners by making records and reporting systems.
- Pay attention to and provide social contributions that are beneficial to the community around the company according to the company's capabilities.
- Distributing loans to small industries and cooperatives (partnerships) through TJSL in accordance with the decision of the GMS.
- Through TJSL, it provides various assistance to the community as a sense of corporate social responsibility in the form of assistance for victims of natural disasters, education and training assistance, assistance for improving health, assistance for infrastructure and public facilities as well as assistance for religious facilities as allocated by the GMS.
- Provide relevant information needed by the community around the work regarding the impact during the implementation of the work.
- Sensitive and concerned about social and economic problems that occur in the environment.
- Avoid all words, actions that lead to community discrimination based on religious law, race and class.
- Always maintain the environment by minimizing environmental impacts and maintaining the balance of the existing ecosystem as well as implementing community empowerment in the context of sustainable development.

6. Relationship with Government

The ethics of relations with the government are:

- Comply and support the laws and regulations related to the company's operations, including compliance with the payment of taxes, levies, labor and environmental issues.
- Support national and regional programs, especially in the fields of technology, education, social, economy and culture.

- c. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis.
- d. Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang beretika dengan pemerintah, sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat diantisipasi dengan baik demi kemajuan dan kelangsungan Perseroan.
- e. Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator.
- f. Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan regulator, legislator dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- g. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi.

7. Hubungan dengan Kreditur dan Bank

Etika hubungan kepada Kreditur dan Bank adalah:

- a. Melakukan pinjaman dengan kreditur yang resmi dan memiliki reputasi baik, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- b. Mematuhi kewajiban sesuai perjanjian.
- c. Menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal.
- d. Mengelola dana pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya.
- e. Menuangkan kesepakatan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.
- f. Memberikan informasi yang actual dan prospektif kepada calon kreditur dan bank.

8. Hubungan dengan Pesaing

Etika hubungan dengan pesaing adalah:

- a. Memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika, sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjadikan pesaing sebagai pembanding (*benchmark*) guna meningkatkan kinerja Perseroan.
- c. Menghormati keberadaan seluruh pesaing dan menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati.

9. Hubungan dengan Auditor

Etika hubungan dengan Auditor adalah:

- a. Menjamin kebebasan auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi dan kode etik.
- b. Menetapkan penunjukan auditor eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membuat perikatan penugasan audit dengan auditor eksternal secara tertulis.
- d. Memperhatikan serta melaksanakan rekomendasi dan saran yang diberikan auditor.

- c. Not taking advantage of good relations with the Government to obtain business opportunities in an unethical manner.
- d. Always communicate and maintain an ethical relationship with the government, so that every government policy can be anticipated properly for the progress and sustainability of the Company.
- e. Avoiding the practice of corruption, collusion and nepotism (KKN) in dealing with the Government/Regulators.
- f. Fostering healthy, harmonious and constructive relationships with regulators, legislators and other relevant agencies from both the Central Government and Regional Governments.
- g. Always comply with the applicable laws and regulations.
- h. Avoiding misuse of partnership relationships, among others, by providing entertainment and gifts for personal gain.

7. Relationship with Creditors and Bank

The ethics of relations with Creditors and Banks are:

- a. Make loans with creditors who are official and have a good reputation, and do not have a conflict of interest with the Company.
- b. Comply with obligations under the agreement.
- c. Guarantee every loan with adequate and legal collateral.
- d. Manage loan funds effectively according to their designation.
- e. Pouring out the agreement in a written document that is prepared in good faith and mutually beneficial.
- f. Provide actual and prospective information to prospective creditors and banks.

8. Relationship with Competitors

The ethics of relations with competitors are:

- a. Observing the rules of fair and ethical competition, in accordance with company regulations and laws and regulations.
- b. Make competitors as benchmarks to improve the Company's performance.
- c. Respect the existence of all competitors and maintain a good relationship and mutual respect.

9. Relationship with Auditors

The ethics of the relationship with the Auditor are:

- a. Guarantee the freedom of auditors in carrying out their duties according to professional standards and codes of ethics.
- b. Determine the appointment of an external auditor in accordance with applicable regulations.
- c. Making audit engagement engagements with external auditors in writing.
- d. Observe and implement recommendations and suggestions given by the auditor.

10. Hubungan dengan Serikat Pekerja

Etika hubungan dengan Serikat Pekerja adalah:

- Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perseroan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.
- Memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi Serikat Pekerja yang ada hubungannya dengan kepentingan karyawan dan perusahaan.
- Tidak melayani perwakilan atau pihak yang mengatasnamakan Serikat Pekerja yang melakukan aktivitas untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan.
- Memberikan informasi yang relevan tentang kebijakan dan aktivitas perusahaan secara terbuka kepada Serikat Pekerja yang sepenuhnya untuk kemajuan Perseroan.

11. Hubungan dengan Anak Perusahaan

Etika hubungan dengan Anak Perusahaan adalah:

- Memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) juga dilaksanakan dengan konsisten di tingkat anak Perusahaan
- Senantiasa menjalin hubungan baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya
- Setiap hubungan dengan Anak Perusahaan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan

12. Hubungan dengan Mitra Usaha

Etika hubungan dengan Mitra Usaha adalah:

- Menghindari Kerjasama dengan mitra usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis
- Selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan dalam bekerja sama dengan mitra usaha
- Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak
- Mitra Usaha wajib mematuhi semua ketentuan Internal yang berlaku di Perusahaan
- Mengedepankan asas manfaat dengan memilih mitra usaha yang memberikan sinergi terbaik pada perusahaan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

13. Hubungan dengan Media Massa

Etika hubungan dengan Media Massa adalah:

- Senantiasa berusaha memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha perusahaan
- Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya

10. Relations with Unions

The ethics of relations with Trade Unions are:

- Placing the Labor Union as the Company's partner in an effort to achieve the company's goals for the creation of dynamic and harmonious industrial relations.
- Paying serious attention to the aspirations of the Trade Unions that have to do with the interests of employees and the company.
- Do not serve representatives or parties on behalf of the Trade Union who carry out activities for personal interests or contrary to law and decency norms.
- Provide relevant information about company policies and activities openly to the Labor Union which is entirely for the advancement of the Company.

11. Relationship with Subsidiaries

The ethics of the relationship with the Subsidiaries are:

- Ensuring that Good Corporate Governance (GCG) is also implemented consistently at the subsidiary level
- Always maintain good relations with Subsidiaries in an effort to build synergies and improve the image of the Company and its business groups
- Every relationship with Subsidiaries is carried out within the framework of a fair and mutually beneficial business relationship

12. Relationship with Business Partner

The ethics of relations with Business Partners are:

- Avoid Cooperation with business partners who carry out unethical business practices
- Always maintain good, equal, transparent and mutually beneficial relationships in cooperating with business partners
- Always fulfill their respective rights and obligations in accordance with the contract
- Business Partners must comply with all applicable Internal provisions in the Company
- Prioritizing the principle of benefit by choosing business partners who provide the best synergy to the company and are free from corruption, collusion and nepotism (KKN).

13. Relationship with Mass Media

The ethics of relations with the Mass Media are:

- Always trying to provide correct, relevant, balanced and educative information to the public in understanding the company's business
- Receive and follow up on constructive criticism submitted through the mass media while taking into account the risk and cost aspects

- c. Memperlakukan media massa sebagai mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam kerangka membangun citra perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik.

14. Komitmen atas Hal-Hal Khusus

Pengelolaan catatan, dokumen, informasi dan penyusunan laporan catatan, dokumen, informasi dan penyusunan laporan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan, akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu setiap insan Perseroan:

- a. Wajib memelihara dan melindungi catatan, dokumen dan informasi dari penggunaan di luar kepentingan perusahaan.
- b. Dilarang memalsukan catatan, dokumen dan informasi perusahaan.
- c. Harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk penggunaan/penyebaran dan pemusnahan catatan, dokumen dan informasi.
- d. Karena kedudukan dan profesinya tidak dibenarkan menggunakan catatan, dokumen dan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan perusahaan dan stakeholders lainnya.
- e. Hanya memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, jelas, tepat isi dan tepat waktu, serta relevan untuk proses pengambilan keputusan.
- h. Tidak menyembunyikan data dan dokumen Perseroan, baik ketika menjabat ataupun setelah selesai masa tugas/jabatannya.
- i. Tidak membiarkan catatan yang tidak benar atau transaksi yang melanggar hukum.
- j. Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perseroan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan.
- k. Melakukan dokumentasi laporan sesuai kebijakan Internal Perseroan.
- l. Melindungi informasi rahasia, bukan hanya insan NINDYA yang masih aktif bekerja tetapi juga berlaku bagi insan NINDYA yang sudah tidak bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- m. Pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas insan NINDYA yang dapat melakukan akses terhadap informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus.
- n. Penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi perusahaan yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk perusahaan.

- c. Treating the mass media as business partners to convey information about the company openly and responsibly within the framework of building a positive corporate image while respecting the journalistic code of ethics.

14. Commitment to Special Things

Management of records, documents, information and preparation of reports. Records, documents, information and preparation of company reports must be accountable, accurate and timely. Therefore, every employee of the Company:

- a. Obligation to maintain and protect records, documents and information from use outside the interests of the company.
- b. It is forbidden to falsify company records, documents and information.
- c. Must obtain approval from the competent authority for the use/distribution and destruction of records, documents and information.
- d. Because of his position and profession, he is not allowed to use company records, documents and information for personal interests and has the potential to harm the company and other stakeholders.
- e. Only provide reliable data.
- f. Recording data and compiling reports based on correct sources, verified for accuracy and can be accounted for.
- g. Submit reports in a correct, complete, concise, clear, precise and timely manner, as well as relevant for the decision-making process.
- h. Do not hide the Company's data and documents, either while in office or after the completion of his/her term of office.
- i. Do not allow improper records or unlawful transactions.
- j. Store all Company documents, reports and files in an orderly manner so that they are always easy to find and use at any time by all interested parties.
- k. Document reports in accordance with the Company's Internal policies.
- l. Protecting confidential information, not only NINDYA personnel who are still actively working but also applies to NINDYA personnel who have not worked for a certain time in accordance with applicable laws and regulations.
- m. Arrangements regarding the authority and scope of duties of NINDYA personnel who can access the required Company information, either general or specific.
- n. Explanations regarding the disclosure or use of confidential company information in the form of speech or writing to or by any party, whether individuals, companies, associations, or other legal entities, can only be made by officials appointed by the company.

- o. kewajiban menjaga kerahasiaan ini dikecualikan untuk: tujuan perusahaan, penagihan piutang perusahaan yang telah dilimpahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, tujuan hukum persidangan atas kasus pidana, tujuan pengadilan dalam kasus antara Perusahaan dengan mitra usahanya, pertukaran informasi antar perusahaan, permintaan tertulis tentang persetujuan yang diberikan oleh Stakeholders kepada perusahaan.

15. Pengamanan Harta Perusahaan

Tanggung jawab pengamanan harta perusahaan merupakan kewajiban setiap insan perusahaan, untuk itu setiap insan perusahaan:

- a. Menjaga, melindungi, memelihara dan menggunakan harta benda perusahaan dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai ketentuan.
- b. Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta perusahaan untuk kepentingan di luar kepentingan Perusahaan.
- c. Menjaga dan menghargai hak milik intelektual (intellectual property rights) yang dimiliki dan digunakan Perusahaan.
- d. Menjaga rahasia-rahasia Perusahaan yang meliputi: desain, dokumen atau informasi sensitif yang merupakan milik perusahaan.
- e. Tidak dibenarkan dengan sengaja atau karena kecerobohnya merusak harta benda perusahaan.

16. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (Conflict of Interest) didefinisikan sebagai situasi atau kondisi dimana Insan NINDYA yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil keputusan tersebut bagi perusahaan.

Setiap Insan NINDYA berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam berbagai bentuk dengan perusahaan, untuk itu:

- a. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apapun di luar perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- b. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan
- c. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris, Komite Audit dan Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan dari kegiatan BUMN yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai Anggota

- o. This obligation to maintain confidentiality is excluded for: company purposes, collection of company receivables that have been delegated to the State Receivables and Auction Agency/State Accounts Receivable Committee, legal purposes of trial in criminal cases, court purposes in cases between the Company and its business partners, exchange of information between companies. a written request for approval given by the Stakeholders to the company.

15. Security of Company Property

The responsibility for safeguarding the company's assets is the obligation of every employee of the company, for that every employee of the company:

- a. Safeguard, protect, maintain and use company assets in the best possible way according to the provisions.
- b. Not using and exploiting company assets for interests other than the interests of the company.
- c. Maintain and respect the intellectual property rights owned and used by the Company.
- d. Maintain Company secrets which include: designs, documents or sensitive information belonging to the company.
- e. It is not justified to intentionally or because of carelessness damage company property.

16. Conflict of Interest

Conflict of interest is defined as a situation or condition in which NINDYA Personnel, because of their position/ position, have the potential to be misused either intentionally or unintentionally for other interests so as to affect the quality of their decisions and the performance of the results of these decisions for the company.

Every NINDYA Personnel is obliged to put the company's interests first and avoid conflicts of interest in various forms with the company, for that:

- a. It is not allowed to hold any concurrent positions outside the company that may cause a conflict of business interest with the company, except in relation to employee cooperatives as regulated in the laws and regulations.
- b. It is not allowed to conduct business ties personally or involve family, with other parties that may cause a conflict of business interest with the company
- c. Members of the Commissioners/Board of Commissioners, Audit Committees and Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have conflicts of interest and taking advantage of the activities of the BUMN they manage

Komisaris, Komite Audit dan Anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS/Pemilik Modal

- d. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan mengenai benturan kepentingan, sehingga dapat bertindak secara independent dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis
- e. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan dan perseroan lain, termasuk setiap perubahannya
- f. Apabila Insan NINDYA yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut
- g. Perangkapan jabatan yang berpotensi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) oleh Insan NINDYA dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut
- h. Insan NINDYA yang berpotensi dan atau telah berada dalam benturan kepentingan (Conflict of Interest) wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung
- i. Insan NINDYA juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

17. Komitmen Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi yaitu pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dalam arti luas yakni meliputi uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Insan NINDYA (Dewan

other than salaries and facilities as Members of the Commissioners, Audit Committees and Members of the Board of Directors, which are determined by the GMS/ Capital Owners

- d. Members of the Board of Commissioners/Board of Commissioners and Members of the Board of Directors are required to make a statement regarding conflicts of interest, so that they can act independently in the sense that they do not have interests that can interfere with their ability to carry out their duties independently and critically.
- e. Members of the Board of Commissioners/Board of Commissioners and Members of the Board of Directors are required to report to the Company regarding their share ownership and or their families in other companies and companies, including any changes thereto.
- f. If NINDYA Personnel who have the potential and/ or are already in a Conflict of Interest situation, it is PROHIBITED to continue activities/carry out duties and responsibilities related to the Conflict of Interest situation. Henceforth, the person concerned may resign from his/her duties with the potential for a Conflict of Interest or decide not to be involved in the decision-making process related to activities that involve a Conflict of Interest as referred to, unless with certain considerations that solely for the benefit of the company, the Board of Directors may ask the person concerned to continue to carry out his duties and responsibilities in these activities
- g. Multiple positions with the potential for a Conflict of Interest by NINDYA Personnel are possible to be carried out as long as there are company policies and regulations governing this matter.
- h. NINDYA personnel who have the potential and or have been in a conflict of interest (Conflict of Interest) are required to make a Statement Letter of Potential Conflict of Interest regarding this condition to their direct supervisor.
- i. NINDYA personnel are also required to make a Statement of Potential Conflict of Interest if they have a blood relationship in a nuclear family relationship with members of the Board of Directors and/or members of the Company's Board of Commissioners.

17. Gratification Control Commitment

Gratification is the giving and/or receiving of gifts/ souvenirs in a broad sense which includes money, goods, rebates, interest-free loan commissions, travel tickets, lodging facilities, tour trips, free medical treatment, and other facilities, both domestically and abroad, using electronic means or without electronic means carried out by NINDYA Personnel (Board of Commissioners,

Komisaris, Direksi dan karyawan) terkait dengan jabatan, wewenang dan tugasnya di Perusahaan.

Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) dalam mengendalikan Gratifikasi dituangkan di dalam Kebijakan Gratifikasi:

- a. DILARANG memberikan dan/atau menawarkan dan/atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pelanggan dan/atau Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerimaan barang yang cepat kadaluarsa (misal: makanan dan minuman) wajib segera diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.
- c. Apabila Insan NINDYA (Persero) terpaksa dan/atau tidak terhindarkan menerima Gratifikasi Illegal, maka wajib segera melaporkan penerimaan tersebut kepada atasan langsung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan.
- d. Bagi atasan yang menerima laporan Gratifikasi Illegal agar segera berkoordinasi dengan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk direkapitulasi kemudian dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kebijakan Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan

18. Aktivitas Politik dan Sosial

- a. Tidak memanfaatkan nama, asset, dan potensi perusahaan untuk tujuan politik tertentu
- b. Tidak mengatasnamakan perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama perusahaan kepada Partai Politik manapun
- c. Tidak membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun
- d. Melakukan setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan social diluar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan
- e. Mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan, apabila menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugasnya di Perusahaan
- f. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan perusahaan

Directors and employees) related to their position, authority and duties in the Company.

The commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) in controlling Gratification is stated in the Gratification Policy:

- a. PROHIBITED to give and/or offer and/or receive, either directly or indirectly, anything of value to and/or from customers and/or Civil Servants and/or State Administrators to influence or in return for what they have done and other actions that have been taken. may cause a conflict of interest, affect independence, objectivity and professionalism, in accordance with the provisions of the laws and regulations.
- b. Receipt of goods that are quickly expired (eg food and drinks) must be immediately submitted to Social Institutions by submitting proof of submission to the Gratification Control Unit (UPG) Team no later than 14 (fourteen) days after the date of receipt.
- c. If NINDYA (Persero) Personnel are forced and/or unavoidably to accept Illegal Gratification, then they are obliged to immediately report the receipt to their immediate supervisor no later than 7 (seven) days from the date of receipt.
- d. For superiors who receive Illegal Gratification reports, they must immediately coordinate with the Gratification Control Unit (UPG) Team for recapitulation and then report to the Corruption Eradication Commission (KPK) no later than 30 (thirty) days from the date of receipt.
- e. Violation of the provisions in this Gratification Policy will be subject to sanctions in accordance with the applicable provisions and regulations in the Company

18. Political and Social Activities

- a. Do not take advantage of the company's name, assets, and potential for certain political purposes
- b. Not on behalf of the company or making contributions on behalf of the company to any Political Party
- c. Do not make any understanding, engagement, statement either directly or indirectly which can show that the company has ties to any political party
- d. Carry out every activity to channel political aspirations and social activities outside of working hours and do not use Company attributes
- e. Submitting resignation from the Company, if holding a position in a political party or political activity that will interfere with his duties at the Company
- f. Not carrying out political activities either directly or indirectly within the company

- g. Tidak menggunakan atribut partai politik atau organisasi social kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan.

- g. Not using the attributes of political parties or social organizations affiliated with political parties within the Company's work environment.

19. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Lainnya

- Patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten.
- Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.
- Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.
- Tidak melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perseroan.

19. Compliance with Laws, Laws and Other Provisions

- Obey and comply with applicable laws and implement them consistently.
- Avoid any actions and behavior that can cause violations of law and decency.
- Prioritize settlement through deliberation to reach consensus on every issue and if no agreement is reached, then legal channels will be used and are obliged to respect the ongoing legal process and the resulting decisions.
- Do not cooperate against the law with other parties that are detrimental to the Company.

20. Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi (Insider Trading)

Insan Nindya Karya yang memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investor.

20. Avoiding Insider Trading Conflicts of Interest

Nindya Karya employees who have access to material information may not abuse their position and work in disclosing material information that can influence investors' decisions.

Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual atau menahan saham Perseroan.

Material information is information that has not been widely published that can encourage someone to buy, sell or hold the Company's shares.

21. Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Setiap Insan NINDYA maupun anak Perusahaannya yang telah memenuhi kriteria sebagai karyawan yang wajib melaporkan LHKPN harus melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana amanat peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagai sikap patuh dan Tindakan untuk menjauhkan persepsi negative terhadap Perusahaan. Ketentuan tentang LHKPN di atur dalam Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero).

21. Obligation of State Administrative Assets Report (LHKPN)

Every NINDYA Personnel and its subsidiaries who have met the criteria as employees who are required to report LHKPN must implement these provisions as mandated by the applicable laws and regulations, as an attitude of obedience and action to distance negative perceptions of the Company. Provisions regarding LHKPN are regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).

22. Anti Suap dan Donasi

- Insan NINDYA harus tunduk pada Undang-Undang anti penyuapan (anti korupsi) dan tidak diperbolehkan untuk meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau membayar suap
- Antisuap merupakan kebijakan untuk menjadikan Perusahaan sebagai suatu Perusahaan Antisuap dalam arti tidak melakukan praktik suap dalam menjalankan usaha
- Anti suap merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud untuk meningkatkan kesadaran Insan NINDYA agar tidak melakukan korupsi dan menyelamatkan uang dan

22. Anti-Bribery and Donation

- NINDYA personnel must comply with anti-bribery (anti-corruption) laws and are not allowed to request, accept, offer, promise or pay bribes
- Anti-bribery is a policy to make the Company an Anti-bribery Company in the sense of not engaging in bribery practices in running the business
- Anti-bribery is a policy to prevent and eliminate opportunities for corruption to develop. Prevention is intended to increase the awareness of NINDYA personnel so that they do not commit corruption while savekeeping the state's funds and assets.

aset Negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan pada sistem yang berjalan.

- d. Pemberian/penerimaan donasi dalam bentuk penghargaan, sumbangan sosial, peristiwa bencana, bantuan kemanusiaan, Pendidikan, organisasi.

23. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct

- a. Pelaksanaan Code of Conduct merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh insan Perseroan. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka insan NINDYA wajib melaporkannya kepada:
 - i. Tim Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Governance (Tim GCG)
 - ii. Atasan Langsung
 - iii. Tim Pemantau Pelaksanaan Whistle Blowing Sistem (WBS)
 - iv. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- b. Pengungkapan harus dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (grievance) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- c. Perseroan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perseroan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.
- d. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat. Khusus untuk pelaporan pelanggaran melalui Whistle Blowing System, pelapor dapat membuat pelaporan menggunakan nama anonim, namun demikian untuk memudahkan tindak lanjut pelaporan disarankan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas.
- e. Pelaporan pelanggaran disertai dengan bukti pendukung yang relevan
- f. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor
- g. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku
- h. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Opportunities for corruption to develop can be eliminated by improving the current system.

- d. Giving/receiving donations in the form of awards, social donations, disaster events, humanitarian assistance, education, organizations.

23. Code of Conduct Violation Reporting Mechanism

- a. The implementation of the Code of Conduct is a commitment and responsibility of all Company personnel. If there is a deviation or violation, then NINDYA personnel must report it to:
 - i. Good Corporate Governance Implementation Monitoring Team (GCG Team)
 - ii. Direct Boss
 - iii. Whistle Blowing System (WBS) Implementation Monitoring Team
 - iv. Gratification Control Unit (UPG) Team
- b. Disclosure must be in good faith and not a personal complaint against a certain company policy (grievance) or based on bad will/slander.
- c. The Company is required to follow up on reports that have the potential to be materially detrimental and may damage the Company's image, among others caused by irregularities, manipulation and so on.
- d. The reporter must clearly state his/her identity on the report. Specifically for reporting violations through the Whistle Blowing System, the reporter can make a report using an anonymous name, however, to facilitate follow-up reporting, it is advisable to clearly state the identity of the reporter.
- e. Reports of violations are accompanied by relevant supporting evidence
- f. The recipient of the report must keep the identity of the reporter confidential
- g. The company is obliged to follow up on every report received in accordance with applicable procedures and mechanisms
- h. The company will also provide legal protection in accordance with the applicable laws and regulations.

Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik ini berlaku untuk seluruh jajaran Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan. Code of Conduct ini diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyebarluasan Kode Etik

Penyebaran dan Sosialisasi Code of Conduct kepada seluruh karyawan dilakukan dengan kewajiban membaca pedoman yang telah ditetapkan dan membuat pernyataan kepatuhan bahwa telah membaca dan memahaminya serta untuk selanjutnya diimplementasikan dengan dikoordinir oleh Sekretariat Perusahaan.

Scope of the Code of Conduct

This Code of Conduct applies to all levels of the Company's Commissioners, Directors and Employees. This Code of Conduct is announced to be known and implemented properly.

Dissemination of Code of Conduct

Dissemination and socialization of the Code of Conduct to all employees is carried out with the obligation to read the guidelines that have been set and make a statement of compliance that has read and understood them and to be further implemented in coordination with the Company Secretariat.

Sebagai wujud kepatuhan dan integritas sekaligus sebagai implementasi dari komitmen terhadap pelaksanaan Pedoman *Code of Conduct* ini, maka menjadi kewajiban individu untuk menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas atas pedoman ini.

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

1. Pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan oleh Pemegang Saham.
3. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.
4. Apabila mitra kerja atau (Stakeholders) lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sebagai realisasi penegakan Standar Etika Perusahaan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun 2020.

Sanksi Penalty	2021	2020
Tindakan Disiplin Ringan Mild Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Tindakan Disiplin Sedang Moderate Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Tindakan Disiplin Berat Heavy Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	Nihil None	Nihil None

Pakta Integritas

Seluruh insan Nindya Karya senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada Kode Etik dan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan atas kepastian substansi aturan yang tersaji di dalam Kode Etik Perusahaan yang ditandatangani oleh masing-masing individu serta bertanggung jawab atas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Kebijakan Anti Korupsi

Dalam meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah melakukan beberapa upaya pencegahan meliputi:

1. Informasi ketentuan etika kerja dan etika bisnis seluruh insan Nindya Karya agar terhindar dari perilaku penyimpangan khususnya tindak pidana korupsi dalam kode etik Perusahaan yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0494/DIRUT/

As a form of compliance and integrity as well as the implementation of a commitment to the implementation of the Code of Conduct Guidelines, it is the individual's obligation to sign a statement of compliance and integrity with these guidelines.

Sanctions for Violation of Code of Conduct

1. Sanctions for violations of the Code of Conduct committed by employees are given by the Board of Directors or authorized officials in accordance with applicable regulations.
2. The sanctions for violations committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be decided by the Shareholders.
3. Sanctions are given after real evidence is found of a violation of this guideline.
4. If a work partner or other (Stakeholders) commits a violation, it will be subject to the provisions as stated in the contract. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

Number of Code of Conduct Violations

As a realization of the enforcement of the Company's Ethical Standards, here are the details of the sanctions imposed related to the enforcement of the Code of Ethics during 2021 and their comparison with 2020.

Integrity Pact

All Nindya Karya people always maintain integrity in carrying out business activities based on the Code of Ethics and applicable regulations. This commitment is stated in the form of a statement of understanding of the substance of the rules presented in the Company's Code of Ethics which is signed by each individual and is responsible for every form of violation committed.

Anti-Corruption Policy

In minimizing the potential for criminal acts of corruption in carrying out business activities, the Company has taken several preventive measures including:

1. Information on the provisions of work ethics and business ethics for all Nindya Karya employees to avoid deviant behavior, especially corruption in the Company's code of ethics which was ratified in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No.

SEKPER/11/2020 dan 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero).

2. Ketentuan mengenai kebijakan gratifikasi yang menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang disahkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Keputusan Kesepakatan Penerapan Pedoman Gratifikasi Perusahaan Pada tanggal 15 September 2020 yang telah disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan 87/Kom/09/2020 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero) dengan memberlakukan Pedoman Penanganan Gratifikasi Revisi 0.2

0494/DIRUT/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero).

2. Provisions regarding the gratification policy that raises the potential for criminal acts of corruption to be ratified in Law No. 20 of 2001 Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Company Regulations as stated in the Decision on the Agreement to Implement the Company Gratification Guidelines on September 15, 2020 which has been ratified in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero) by enforcing the Guidelines for Handling Gratification Revision 0.2

Pemenuhan Hak-Hak Politik dan Keterlibatan Perusahaan dalam Kegiatan Politik

Sikap perusahaan terhadap aktivitas sosial dan politik tercantum dalam pedoman *Code of Conduct* Perseroan yang berisi:

1. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan potensi Perseroan untuk tujuan politik tertentu.
2. Tidak mengatasnamakan Perseroan atau memberikan kontribusi atas nama Perseroan kepada partai politik.
3. Tidak membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
4. Melakukan setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan sosial di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perseroan.
5. Mengajukan pengunduran diri dari Perseroan, apabila menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang mengganggu tugasnya di Perseroan.
6. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perseroan.
7. Tidak menggunakan atribut partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perseroan.

Fulfillment of Political Rights and Company Involvement in Political Activities

The company's attitude towards social and political activities is stated in the Company's Code of Conduct guidelines which contain:

1. Not taking advantage of the name, assets and potential of the Company for certain political purposes.
2. Not on behalf of the Company or making contributions on behalf of the Company to political parties.
3. Not making any understanding, engagement, statement either directly or indirectly which can show that the Company has an attachment to any political party.
4. Carry out every activity to channel political aspirations and social activities outside of working hours and do not use the Company's attributes.
5. Submitting resignation from the Company, if holding a position in a political party or political activity that interferes with his duties in the Company.
6. Not carrying out political activities, either directly or indirectly within the Company.
7. Do not use the attributes of political parties or social organizations affiliated with political parties within the Company's work environment.

Pengendalian Gratifikasi

Gratuity Control

Definisi dan Latar Belakang

Sebagai salah satu BUMN Kontraktor, PT NINDYA KARYA (Persero) mengatur penanganan gratifikasi sebagai kebijakan Perusahaan yang dibuat untuk menjaga reputasi perusahaan sebagai sebuah BUMN, yang mendasarkan setiap tindakan dan keputusannya kepada pertimbangan profesional yang taat hukum.

PT NINDYA KARYA (Persero) akan terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (untuk selanjutnya disebut "GCG") secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan serta pertumbuhan bisnis jangka panjang Perusahaan yang merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan. Dalam pengelolaan bisnis Perusahaan, maka Perusahaan selalu mengutamakan pengelolaan bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang berarti pengelolaan bisnis Perusahaan bukan hanya untuk mengejar keuntungan Perusahaan saja, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG untuk dapat melaksanakan pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip GCG. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya.

Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Perusahaan yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Gratifikasi yang melibatkan Insan NINDYA, meskipun dalam kegiatan usaha Perusahaan, Gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Insan NINDYA. Hal ini penting untuk dibudidayakan di lingkungan PT NINDYA KARYA (Persero) sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan NINDYA yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis

Definition and Background

As one of the state-owned contractors. PT NINDYA KARYA (Persero) regulates handling gratuity as Company policy made for guard reputation company as a state-owned enterprise, which bases every actions and decisions to obedient professional judgment law.

PT NINDYA KARYA (Persero) will Keep going doing application principles good Corporate Governance (for next called "GCG") by consistent and sustainable in skeleton increase Company value as well as growth business period length of the company which is one of the effort for increase trust Shareholders and all Stakeholder interests. In management the Company's business. the Company always prioritize management free business _ from Corruption. Collusion and Nepotism (KKN), which means management Company business not only for chase only company profit. however with permanent notice GCG principles for could doing full management _ trustworthy. transparent and accountable.

In the implementation of the Company's business activities, in general, it cannot be separated from the relationship and interaction between internal and external parties who cooperate with each other in a harmonious, harmonious and sustainable manner without forgetting the ethics and principles of GCG. Related to business relationships, what often happens in the practice of daily work activities always appears and is unavoidable is the existence of gratification from one party to another.

Therefore, in order to maintain business relationships with stakeholders, it is necessary to regulate matters related to gratuities and the procedures or reporting mechanisms within the Company.

In skeleton realize management company's business that is trustworthy. transparent and accountable. then the company realizes importance implementation firm attitude _ to handling Gratuities involving _ NINDYA people, though in activity Company business. Gratuities is possible thing _ difficult avoided by NINDYA Personnel. This thing important for cultivated in the environment of PT NINDYA KARYA (Persero) as a learning process for NINDYA people who have honor. dignity and high image _ in connection business with

dengan para Pemangku Kepentingan. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Penanganan Gratifikasi yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Prinsip Dasar

1. Penolakan Gratifikasi

Insan NINDYA apabila ditawarkan/diberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara yang santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada pihak pemberi dan WAJIB MELAPORKAN PENOLAKAN atas Gratifikasi tersebut, kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Perusahaan atau Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Insan NINDYA yang bersangkutan juga dapat meminta kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan/memberikan Gratifikasi.

2. Pemberian Gratifikasi

Semua Insan NINDYA DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung menjanjikan dan/atau memberikan Gratifikasi kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing PT NINDYA KARYA (Persero) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

3. Penerimaan Gratifikasi

Semua Insan NINDYA yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti), DILARANG untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung Gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing PT NINDYA KARYA (Persero), yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi Insan NINDYA untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya, serta menerima apapun dari pihak lain yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Stakeholders _ interests. For handle Thing that. then arrange Guidelines Handling Consistent gratuities _ with Corporate Governance Guidelines (Code of Corporate Governance) and Guidelines Ethical Behavior (Code of Conduct) as well as applicable values _ at the company.

Basic Principles

1. Denial Gratification

NINDYA people when offered/given Gratuities that don't in accordance with regulated conditions _ in Guidelines this. it is mandatory to DO REJECTION with polite way _ to offer/gift meant. with give explanation to policies and rules this to party giver and MUST REPORT REJECTION of Gratification. to the Control Unit Company or Controlling Unit Gratification Gratification Commission Eradication Corruption.

NINDYA personnel concerned can also ask to the Control Unit Gratification for help explain about Guidelines this as form socialization to the party who offers/gives Gratification.

2. Giving Gratification

ALL NINDYA PERSON IS PROHIBITED good by direct or no direct promising and/or give Gratification to every the party who owns connection business or competitor of PT NINDYA KARYA (Persero) which aims to: for get information. or something things that are not justified by the provisions applicable laws and regulations. or for influence party meant for do and/or no To do something Thing related with position/position.

3. Reception Gratification

ALL NINDYA people who because of position and/or member his family (nuclear family). PROHIBITED for accept or ask good by direct or no direct Gratification from every party who has connection business or competitor of PT NINDYA KARYA (Persero), which aims to: for get information. or something things that are not justified by the provisions applicable laws and regulations. or for influence NINDYA people for do and/or no To do something Thing related with position/position. and accept whatever from other parties who are deviate from provision regulation Applicable Company Laws and Regulations.

Gratifikasi yang Dianggap Suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana Suap/ Gratifikasi Illegal apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/ jabatan Insan NINDYA di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan NINDYA.
2. Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal penerimaan Gratifikasi.

Beberapa jenis Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Uang atau setara uang yang diberikan kepada Insan NINDYA sebagai ucapan terima kasih dari pihak lain, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan NINDYA yang bersangkutan.
2. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang sebagai tanda terima kasih yang diterima Insan NINDYA dari pihak lain terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan atau proses persetujuan atau pemantauan atas pekerjaan pihak lain tersebut.
3. Pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan kenaikan pangkat dan jabatan baru Insan NINDYA yang biasanya dilakukan sebagai tanda perkenalan.
4. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan NINDYA yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
5. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/ prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan NINDYA karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
6. Makanan, minuman dan hiburan yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan NINDYA yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan.
7. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan NINDYA yang bersangkutan di Perusahaan pihak lain, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukkan langsung atau undangan dari pihak lain.
8. Pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan NINDYA di Perusahaan pihak lain, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan NINDYA tersebut.

Gratuities that are Considered Bribes

Something Gratification will changed Becomes act criminal Bribes/Gratuities Illegal if Fulfill elements as following :

1. Gratification the relate with authority/position NINDYA Personnel in the Company, so that could cause collision influencing interests _ independence. objectivity. and professionalism NINDYA people.
2. Gratification the no reported in period time 30 (three twenty) days work to Commission Eradication Corruption (KPK) since date reception Gratification.

A number of type Gratification will changed Becomes act criminal bribe if Fulfill criteria as following :

1. money or the equivalent of the money given to NINDYA people as saying accept love from party other. in connection with has chosen or has finish something profession or activity other in skeleton implementation duties and positions The relevant NINDYA personnel.
2. Giving no official in form of money or money equivalent as sign accept love received _ NINDYA people from other related parties with the inspection process appropriateness profession or approval process or monitoring on profession the other party.
3. Giving in form whatever from other parties in connection with increase rank and position new The usual NINDYA people conducted as sign introduction.
4. Loan from a Bank or Financial Institution other accepted _ because connection personal. position and authority from NINDYA personnel concerned and not apply for Public general.
5. Opportunity or profit including amount/percentage flower special or discount accepted commercial _ NINDYA people because connection personal or position and not apply for Public general.
6. Food. drinks and entertainment provided _ by special. because position or authority The relevant NINDYA personnel. which are carried out outside and not relate with Duty work.
7. Giving facility transportation. accommodation. money or equivalent of money in relation with implementation duties and obligations The NINDYA personnel concerned in the third party company others. which are carried out based on the appointment of direct or invitation from party another.
8. Giving entertainment. packages tours. vouchers. done related with implementation duties and obligations NINDYA Personnel at the company party others. which are not relevant or no there is relationship with meaning assignment The NINDYA person.

9. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan NINDYA oleh pihak lain pada saat melakukan pemeriksaan kerja pihak lain oleh tim yang ditugaskan oleh PT NINDYA KARYA (Persero).
10. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga, voucher hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan NINDYA di Perusahaan pihak lain yang tidak relevan/ tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan NINDYA tersebut.
11. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan NINDYA yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh pihak lain yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya.
12. Pemberian kepada Insan NINDYA, sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, kelulusan, khitanan dan lainnya, yang diberikan oleh Pihak lain, dengan nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).
13. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari pihak lain pada saat Insan NINDYA yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan, khitanan dan lainnya.
14. Pemberian bingkisan/Parsel dalam bentuk apapun kepada Insan NINDYA dari pihak lain sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai SUAP harus DITOLAK, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan NINDYA yang bersangkutan untuk menolaknya. Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:

1. Jika Insan NINDYA tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat pemberi.
2. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara PT NINDYA KARYA (Persero) dengan pemberi, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/ atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), dari masing-masing pemberi.

9. dinner Meals. accommodation and facilities other given _ to NINDYA personnel by other parties at the time To do inspection work other parties by a team assigned by PT NINDYA KARYA (Persero).
10. Accommodation. facilities. equipment and/or vouchers are included and however no limited to tickets flights. hotel vouchers, sports. entertainment vouchers carried out related with implementation duties and obligations NINDYA personnel in other party companies who do not relevant/not relate with meaning assignment The NINDYA person.
11. Giving facility cost free treatment at the moment The NINDYA person concerned treatment to one _ house pain caused by the other party carried out at the time implementation duties and obligations the assignment.
12. Giving to NINDYA people, regarding with something celebrations. including however no limited to celebrations repeat years. marriages. graduations. circumcisions and others. given by the Parties other. with score the material in Rupiah currency exceeding Rp1,000,000,-(One Million Rupiah).
13. Giving facility in the form of service catering/catering from the other party at the time The NINDYA person concerned roll out celebrations. including however no limited to celebrations wedding. birthday year and graduation. circumcision and others.
14. Giving gifts/parcels in form whatever to NINDYA people from other parties in connection with celebration day raya religious.

Every Gratification according to Guidelines this considered as a BRIBERY must be REJECTED, unless if situation at the time that no allow for The NINDYA person concerned for reject it. Included _ in the situation is not allow for reject is as following :

1. If the NINDYA Person no knowing implementation delivery. time and location give it Gratuities. as well as no knowing identity and address giver.
2. If according to consideration common sense logic, action _ _ denial could cause the disturbance connection good between PT NINDYA KARYA (Persero) and giver, where gift the no in form of money and/or money equivalent and/or letter worth the value no exceeds Rp1,000,000,- (One Million Rupiah), from each giver.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Unit Pengendalian Gratifikasi, yaitu Unit Satuan Pengawasan Intern yang bertugas untuk mengelola pelaporan Gratifikasi di Perusahaan sesuai surat keputusan Direksi PT NINDYA KARYA (Persero) tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT NINDYA KARYA (Persero).

Gratification Control Unit (UPG)

Control Unit Gratification. i.e. Units _ Internal Control on duty for manage reporting Gratuities at the Company are appropriate letter decision Directors of PT NINDYA KARYA (Persero) regarding the Control Unit Team Gratification (UPG) of PT NINDYA KARYA (Persero).

Alamat Unit Pengendalian Gratifikasi:
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT NINDYA KARYA (Persero)
Satuan Pengawasan Intern
Kantor Pusat PT NINDYA KARYA (Persero)
Jln. Letjend. Haryono MT Kav. 22
Jakarta Timur 13630
Telp. 021-809 3276
Fax. 021-809 3105
Email: nindyakarya@nindyakarya.co.id

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur dalam pedoman ini, maka Insan NINDYA wajib melaporkan hal tersebut melalui Unit Pengendalian Gratifikasi dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelaporan melalui UPG yang dilakukan oleh Insan NINDYA yang menerima Gratifikasi wajib disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi oleh Insan NINDYA, dengan menggunakan form pelaporan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (contoh: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada lembaga sosial dengan menyampaikan bukti tanda terima dari lembaga sosial tersebut kepada UPG;
3. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (contoh: emas, uang, dan lainnya), wajib disimpan terlebih dahulu di UPG lingkungan kerja Insan NINDYA yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada UPG;
4. UPG membuat rekapitulasi penerimaan Gratifikasi, serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pelaporan Gratifikasi oleh UPG secara lengkap;
5. Setelah disampainya rekapitulasi penerimaan Gratifikasi oleh UPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka untuk proses penentuan atas Status kepemilikan penerimaan Gratifikasi tersebut, Perusahaan akan mengikuti mekanisme/prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di tahun 2021, tidak terdapat adanya pemberian dari pihak luar yang dianggap gratifikasi.

Gratification Reporting Mechanism

Should there be acceptance of Gratification and or entertainment beyond the limits set forth in this guideline, NINDYA Personnel are required to report the matter through the Gratification Control Unit in the following manner:

1. Reports through the UPG conducted by NINDYA Personnel who receive Gratification must be submitted no later than 7 (seven) working days from the date of receipt of Gratification by NINDYA Personnel, using the reporting form as regulated in this Guideline;
2. For receipts which are goods that expire quickly (e.g. food and beverages), they can be submitted to a social institution by submitting a receipt from the social institution to the UPG;
3. For receipts that are goods that do not expire quickly (example: gold, money, etc.), must be stored in the UPG of the working environment of the NINDYA personnel concerned, until the ownership status of the receipt is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK), by submitting proof of storage to UPG;
4. UPG makes a recapitulation of Gratification receipts, and reports it to the Corruption Eradication Commission (KPK) no later than 7 (seven) working days from the date of receipt of a complete Gratification report by UPG;
5. After submitting the recapitulation of Gratification receipts by UPG to the Corruption Eradication Commission (KPK), then for the process of determining the ownership status of the Gratification receipts, the Company will follow the mechanism/procedure established by the Corruption Eradication Commission (KPK).

In 2021, there are no gifts from outside parties that are considered gratuities.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

Prinsip dan Kebijakan

Kegiatan usaha Perusahaan yang bergerak dalam industry jasa konstruksi tidak terlepas dari kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung kinerja usaha. Kegiatan pengadaan barang dan jasa senantiasa dikelola dengan baik dengan mempersiapkan infrastruktur Unit Kerja yang bertugas dalam menjalankan dan mengawasi aktivitas tersebut.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan prinsip GCG di setiap aspek, mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Perseroan mengacu pada Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan pengadaan harus dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku serta dikerjakan secara disiplin. Hal tersebut dilakukan Perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya risiko-risiko fraud dalam proses yang dapat mencederai implementasi GCG di lingkungan Perseroan seperti praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta persaingan usaha tidak sehat.

Prosedur dan Tata Cara Pengadaan

Tata cara pengadaan barang dan jasa di Perseroan yaitu:

1. Adanya pengajuan dari proyek ke Divisi/Wilayah;
2. Sebelum proses dilanjutkan, Manager Proyek, General Manager, Deputy General Manager Wilayah/ Divisi memberikan disposisi kepada SEM/Manager Procurement untuk melakukan identifikasi dan meninjau ketepatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan risiko;
3. Untuk pengadaan di Kantor Pusat ditetapkan adanya: Kontrak Payung, atas persetujuan Direksi.
4. Meminta penawaran minimal dari 3 (tiga) calon rekanan, diutamakan yang ada di dalam DRT (Daftar Rekanan Terseleksi);
5. Melakukan klarifikasi dan negosiasi menggunakan form perbandingan penawaran harga barang dan jasa;
 - a. Spesifikasi Teknis/Mutu
 - b. Waktu Pelaksanaan & Pengadaan
 - c. Garansi Masa Pemeliharaan
 - d. Harga Penawaran

Principles and Policies

The Company's business activities in the construction service industry are inseparable from the need for the procurement of goods and services to support business performance. Procurement of goods and services is always managed properly by preparing the infrastructure of the Work Unit in charge of carrying out and supervising these activities.

As a form of commitment to implementing GCG principles in every aspect, the mechanism for the procurement of goods and services carried out by the Company refers to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 70 of 2012 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services, and Regulation of the Head of LKPP No. 6 of 2012 concerning Technical Instructions for Presidential Regulation No. 70 of 2012 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/ Services. Procurement activities must be carried out in accordance with applicable procedures and carried out in a disciplined manner. This is done by the Company to minimize the occurrence of fraud risks in the process that can injure the implementation of GCG within the Company, such as the practice of Corruption, Collusion and Nepotism as well as unfair business competition.

Procurement Procedures and Procedures

The procedures for the procurement of goods and services in the Company are:

1. There is a proposal from the project to the Division/ Region;
2. Before the process is continued, the Project Manager, General Manager, Deputy General Manager of the Region/Division give disposition to the SEM/ Procurement Manager to identify and reviewing the accuracy of the procurement of goods and services based on risk;
3. For procurement at the Head Office, there are: Umbrella Contracts, with the approval of the Board of Directors.
4. Request a minimum offer from 3 (three) potential partners, preferably those in the DRT (Selected Partner List);
5. Clarifying and negotiating using the form for the comparison of price offers for goods and services;
 - a. Technical Specifications/Quality
 - b. Implementation & Procurement Time
 - c. Maintenance Period Guarantee
 - d. Bid price

- e. Untuk Subkon/Supplier wajib melampirkan pengalaman kerja 3 tahun terakhir sesuai bidang yang ditawarkan dan sumber daya yang memadai serta peduli terhadap K3 (OHS)
 - f. Cara pembayarannya.
 - g. Untuk rekanan yang belum terdaftar dalam DRT, diimbau untuk menjadi rekanan terseleksi dengan meminta/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
 - h. Untuk rekanan khusus, Institusi Negara/Pemerintah seperti PLN, TELKOM, TNI, POLRI, PERTAMINA dan sejenisnya tidak perlu menyertakan data kecuali anak usahanya.
6. Sebelum menetapkan pemenang, rekanan yang akan ditunjuk sebagai pemenang harus dipastikan telah masuk DRT dengan nilai total 60 (enam puluh) atau cukup, untuk rekanan subkon diutamakan yang punya pengalaman kerja 3 tahun terakhir berturut-turut dan telah di konfirmasi kebenarannya.;
7. Sebelum melakukan penandatanganan order/SPK/kontrak untuk rencana penggunaan SKBDN dan SCF dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wilayah/divisi mengajukan permohonan izin untuk penggunaan SKBDN/SCF dan mengusulkan rekanan yang akan ditunjuk dengan penawaran terbaik ke Direksi, tembusan ke Kepala Departemen Produksi dan Kepala Departemen Keuangan untuk dilakukan evaluasi.
 - b. Mendapatkan persetujuan/penolakan dari Kepala Departemen Produksi minimal 5 (lima) hari kerja dari tanggal penerimaan pengajuan lengkap dan benar.
 - c. Menyampaikan hasil keputusan Kepala Departemen Produksi ke wilayah/divisi untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen penerbitan secepatnya.
 - d. Untuk SCF dilanjutkan ke prosedur akseptasi SCF oleh Direktur Keuangan & SDM.
8. Untuk kontrak payung, persetujuan Direksi paling lama 4 (empat) hari kerja dari tanggal pengajuan dengan lengkap dan benar oleh Kepala Departemen Produksi.
9. Penandatanganan kontrak/order.
10. Memberitahukan secara tertulis rekanan pemenang dengan mencantumkan harga satuan serta catatan lainnya kepada seluruh penawar paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kontrak atau purchase order (PO).
11. Melakukan penilaian atas kinerja rekanan secara periodik di akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dan setelah selesai penyerahan barang/pekerjaan.
12. Memasukkan penilaian rekanan ke dalam form evaluasi rekanan dan hasil penilaiannya diinput di SIM pengadaan.
13. Sebagian langkah prosedur di atas sudah menggunakan SIM pengadaan.
14. Menyimpan catatan mutu.
- e. For Subcontractors/Suppliers, they must attach the last 3 years of work experience according to the field offered and adequate resources and care about K3 (OHS)
- f. Payment method.
- g. For partners who have not been registered in DRT, are encouraged to become selected partners by requesting/fulfilling the necessary requirements.
- h. For special partners, State/Government Institutions such as PLN, TELKOM, TNI, POLRI, PERTAMINA and the like do not need to include data except for their subsidiaries.
6. Before determining the winner, the partner who will be appointed as the winner must be confirmed to have entered the DRT with a total score of 60 (sixty) or sufficient, for subcontract partners, the priority is those who have work experience for the last 3 consecutive years and have confirmed the truth;
7. Before signing the order/SPK/contract for the planned use of SKBDN and SCF with the following conditions:
- a. Regions/divisions apply for permits for the use of SKBDN/SCF and propose partners to be appointed with the best offer to the Board of Directors, copies to the Head of the Production Department and the Head of the Finance Department for evaluation.
 - b. Obtain approval/rejection from the Head of the Production Department at least 5 (five) working days from the date of receipt of a complete and correct application.
 - c. Submitting the results of the decision of the Head of the Production Department to the regions/divisions to prepare and submit publishing documents as soon as possible.
 - d. For SCF, proceed to the SCF acceptance procedure by the Director of Finance & HR.
8. For umbrella contracts, the approval of the Board of Directors is no later than 4 (four) working days from the date of submission completely and correctly by the Head of the Production Department.
9. Signing of contracts/orders.
10. Notify the winning partner in writing by including the unit price and other notes to all bidders no later than 3 (three) working days from the date of the contract or purchase order (PO).
11. Assessing the performance of partners periodically at the end of June and the end of December and after the completion of the delivery of goods/work.
12. Entering the partner's assessment into the partner's evaluation form and the results of the assessment are inputted in the procurement SIM.
13. Some of the above procedure steps already use a procurement SIM.
14. Maintain quality records

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Perseroan menyadari pentingnya pengendalian internal terhadap penyimpangan atau kecurangan yang berindikasi merugikan perusahaan sehingga dibentuklah *Whistleblowing System* (WBS) yang merupakan sistem dan prosedur yang dirancang untuk mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang pada dasarnya melanggar Kode Etik atau *Code of Conduct* Perseroan.

PT Nindya Karya (Persero) memiliki komitmen untuk menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai utama budaya (core values) yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang disebut juga dengan AKHLAK dan slogan : "Toward the excellent"

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, PT Nindya Karya (Persero) mendorong partisipasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan PT Nindya Karya (Persero) serta pihak eksternal perusahaan untuk memanfaatkan jalur penyelesaian Internal dalam pelaporan pelanggaran di lingkungan perusahaan serta mempertimbangkan secara seksama sebelum memutuskan untuk melakukan pemanfaatan jalur eksternal.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, PT Nindya Karya (Persero) menyediakan sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat independent dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelapor.

Dasar Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkup Perusahaan

Penerapan WBS di lingkup Perusahaan didasarkan pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) Nomor 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 Tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero)

Lingkup Pengaduan/Pengungkapan

Lingkup pengaduan/penyungkapan yang akan ditindaklanjuti oleh WBS adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan.
3. Pemerasan.
4. Perbuatan curang.
5. Benturan kepentingan.
6. Gratifikasi.
7. Pencurian.
8. Korupsi.
9. Suap.

The Company is aware of the importance of internal control against irregularities or fraud that indicate harm to the company so that a Whistleblowing System (WBS) was formed which is a system and procedure designed to manage complaints/disclosures regarding unlawful behavior, unethical acts which basically violate the Code of Ethics or the Code of Conduct.

PT Nindya Karya (Persero) is committed to running the company in a professional manner based on company behavior that is in accordance with core cultural values, namely trustworthy, competent, harmonious, loyal, adaptive, collaborative which is also known as AKHLAK and the slogan: "Toward the excellent"

In order to maintain and improve the reputation and image of the company, PT Nindya Karya (Persero) encourages the participation of the Board of Commissioners, Directors and employees of PT Nindya Karya (Persero) as well as external parties of the company to take advantage of the Internal settlement line in reporting violations within the company and consider carefully before decided to make use of the external route.

To realize the things mentioned above, PT Nindya Karya (Persero) provides a means of reporting violations that are independent and confidential and has a whistleblower protection mechanism.

Basis for Implementing a Violation Reporting System at the Company's Scope

The implementation of WBS within the Company is based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Nindya Karya (Persero) Number 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero)

Scope of Complaint/Disclosure

The scope of complaints/disclosures that will be followed up by WBS are actions that can harm the Company, including the following:

1. Deviations from the applicable laws and regulations.
2. Misuse of position for other interests outside the Company.
3. Blackmail.
4. Cheating.
5. Conflict of interest.
6. Gratification.
7. Theft.
8. Corruption.
9. Bribes.

Prinsip Dasar

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) pengaduan/penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
 - b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut
 - c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran
 - f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain
 - g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya
 - h. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan/penyingkapan, maka pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/handphone/facsimile/email

Perlindungan terhadap Pelapor dan Kerahasiaan

1. Identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun
3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
4. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme
5. Insan Nindya yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Basic Principles

1. The Whistleblower is required to provide an initial indication that can be accounted for, including:
 - a. The violation that is complained of, includes the amount of the loss (if it can be determined). 1 (one) complaint/disclosure should only be for 1 (one) violation so that the handling can be more focused.
 - b. The parties involved, namely who should be responsible for the violation, including the witnesses and the parties who benefited or were harmed by the violation
 - c. The location of the violation, which includes the name, place, or function of the occurrence of the violation
 - d. Time of violation, namely the period of violation in the form of days, weeks, months, years or a certain date when the violation occurred.
 - e. How did the violation occur and is there any supporting evidence that a violation has occurred?
 - f. Has the violation been reported to other parties?
 - g. Has the violation happened before
 - h. Reporting must be based on good faith and not a personal complaint or based on bad intentions/slander
2. In order to speed up and simplify the follow-up process for complaints/disclosures, the complainant is recommended to provide information regarding personal data, which at least contains the address/phone number/mobile phone/facsimile/email

Protection Against Whistleblowers and Confidentiality

1. The identity of the reporter and the contents of the report submitted are guaranteed by the Company to be kept confidential
2. The Company guarantees the protection of the whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the complainant maintains the confidentiality of the reported violation to any party.
3. The protection of the whistleblower also applies to the parties conducting the investigation as well as the parties providing information related to the complaint/disclosure.
4. In carrying out the follow-up process for each complaint/disclosure, it is obligatory to prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence and professionalism
5. Nindya personnel who violate the confidentiality principle will be given severe sanctions in accordance with applicable regulations in the Company.

Kewenangan Penanganan Laporan

1. Pengaduan/penyungkapan pelanggaran terlebih dahulu akan di review dan dikonfirmasi laporannya oleh ketua Tim WBS
2. Ketua Tim WBS menginstruksikan anggota tim WBS untuk menganalisa dan memverifikasi atas laporan tersebut, untuk kemudian dilaporkan kembali kepada ketua tim WBS
3. Ketua Tim WBS melaporkan Analisa dan verifikasi laporan yang masuk ke direksi untuk di proses sesuai aturan yang berlaku di perusahaan
4. Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Tim Reward & Punishment akan ditindaklanjuti oleh Direksi
5. Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris
6. Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi

Apresiasi bagi Pelapor

Setiap pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan berhak mendapat penghargaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Sanksi bagi Pelapor yang Menyalahgunakan Sistem Pelaporan

Pelanggaran pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan

Laporan Tim Pemantau Pelaksanaan GCG

Tim WBS menyampaikan kepada Tim Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Governance (Tim GCG) atas ada dan/tidaknya pelaporan pelanggaran dan dibuat laporan secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan berikutnya, yang meliputi jumlah pengaduan/penyungkapan, kategori pengaduan/penyungkapan serta media yang digunakan oleh pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses pada Tahun 2021

Per 31 Desember 2021, Perusahaan tidak menerima pelaporan pelanggaran melalui saluran whistleblowing system baik yang berasal dari pihak eksternal maupun internal.

Report Handling Authority

1. Complaints/Disclosure of violations will first be reviewed and the report confirmed by the WBS Team leader
2. The WBS Team Leader instructs the WBS team members to analyze and verify the report, and then report back to the WBS team leader
3. The WBS Team Leader reports Analysis and verification of reports that go to the board of directors to be processed according to the rules that apply in the company
4. Complaints/disclosure of violations related to and or committed by the Reward & Punishment Team will be followed up by the Board of Directors
5. Complaints/disclosure of violations related to and or committed by the Board of Directors will be followed up by the Board of Commissioners
6. Complaints/disclosure of violations related to and or committed by the Board of Commissioners will be followed up by the Board of Directors

Appreciation for Whistleblowers

Every reporter who has contributed to the effort to help prevent violations that can harm the company is entitled to an award in accordance with the provisions and regulations that apply in the company.

Sanctions for Reporters who Abuse the Whistleblowing System

The reporter who sends a report in the form of slander or false report will be subject to sanctions and will not receive any guarantee of confidentiality or protection of the reporter. Sanctions are imposed in accordance with the provisions and regulations that apply in the Company

GCG Implementation Monitoring Team Report

The WBS Team conveys to the Monitoring Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG Team) on the presence and/or absence of reporting violations and reports are made periodically, i.e. every 6 (six) months, which is submitted no later than the third week of the following month, which includes the number of complaints/disclosure, category of complaint/disclosure as well as the media used by the reporter and its submission to the Board of Directors

Number of Complaints Submitted and Processed in 2021

As of December 31, 2021, the Company did not receive any reports of violations through the whistleblowing system, whether from external or internal parties.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Administrator Wealth Report (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai entitas BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Republik Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai harta kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

Basic Principles of State Administrators Wealth Reports
As an SOE entity owned by the State through the Government of the Republic of Indonesia, the Company is required to comply with binding laws and regulations. One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and acts of internal irregularities is the obligation of the State Administrators Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Administrators' Assets as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK's decision No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of State Administrators Wealth Reports. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the authority of the KPK to carry out steps or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN.

In addition, Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, mandates that every administrator is obliged to report and announce his assets before and after taking office and is willing to have his wealth checked before and after taking office. In Law No. 28 of 1999 article 2 (7) along with its explanation, it is explained that other officials who have strategic functions in relation to state administrators include the Board of Commissioners, Directors, and other structural officials in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to create a State Administrator who adheres to the general principles of state administrators who are free from practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other disgraceful acts. Every State Administrator is required to report his wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled out honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyze, evaluate, and assess the entire amount, type and value of reported assets, correctly, quickly, accurately.. accurate and responsible.

Legal Basis and Regulations in Implementing LHKPN in Companies

In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases as the basis for the perspective of implementing LHKPN within the Company. The legal basis are:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, and its amendments.
4. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation.

Pelaksanaan LHKPN di Lingkup Perusahaan

Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan LHKPN yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. 1465/DIRUT/KPTS/SEKPER/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan dan Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Nindya Karya (Persero) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan di lingkungan PT Nindya Karya (Persero).

Berdasarkan peraturan tersebut, pihak di lingkup Perseroan yang wajib menyerahkan LHKPN kepada KPK adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Unit pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkup Perseroan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai admin instansi pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan di lingkungan PT Nindya Karya (Persero) dan Manager Operasional Departemen Sumber Daya Manusia sebagai Admin Unit Kerja.

Agar pelaksanaan LHKPN menjadi kesadaran pihak di lingkup perusahaan yang terkait wajib lapor, Perseroan melakukan sosialisasi melalui Zoom Meeting e-LHKPN pada tanggal 08 Desember 2021.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2021

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perseroan wajib lapor per 31 Desember 2021

Implementation of LHKPN in the Corporate Scope

The Company already has guidelines for the implementation of LHKPN which have been ratified through the Decree of the Board of Directors No. 1465/DIRUT/KPTS/SEKPER/10/2017 dated October 5, 2017 regarding the Obligation to Submit Wealth Reports for Company Officials and the Establishment of the Management Unit for State Administrators Wealth Reports (LHKPN) within PT Nindya Karya (Persero) regarding Obligations for Submission of Official Wealth Reports Company within PT Nindya Karya (Persero).

Based on these regulations, the parties within the scope of the Company who are required to submit LHKPN to the KPK are as follows:

1. Board of Commissioners
2. Directors
3. Officer 1 (one) level below the Board of Directors.

The unit for managing the implementation of LHKPN within the Company is carried out by the Head of the Internal Control Unit (SPI) as the admin of the agency managing the Asset Report of Company Officials within PT Nindya Karya (Persero) and the Operational Manager of the Human Resources Department as the Admin of the Work Unit.

In order for the implementation of the LHKPN to become aware of the parties in the scope of the company concerned, the Company must conduct socialization through the e-LHKPN Zoom Meeting on December 8, 2021.

Company Officials LHKPN Transparency in 2021

Below is conveyed the transparency of the submission of LHKPN, the Company's officials are required to report as of December 31, 2021

Pejabat Wajib Lhkpn Official Mandatory Lhkpn	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Report	Telah Melaporkan Have Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	3	100%
Direksi Directors	4	4	100%
Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Officer 1 (one) level below the Board of Directors	17	17	100%
JUMLAH TOTAL	24	24	100%

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Perseroan meyakini bahwa keberagaman keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih optimal dan berdampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha, serta penerapan tata kelola di lingkup Perusahaan.

The Company believes that the diversity of expertise, experience and educational background of the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the Company's efforts to encourage a more optimal decision-making process and have a positive impact on the supervision and management of the Company. This diversity is expected to enrich perspectives and interests in the decision-making process so as to be able to provide added value for operational and business aspects, as well as the implementation of corporate governance within the Company.

Bila dilihat dari komposisi Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tingkat keberagaman yang cukup memadai untuk membantu Perseroan merealisasikan tujuan dan mencapai target usaha. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi pun juga memperlihatkan keberagaman dari sisi gender di mana di masing-masing organ terdapat satu orang perempuan yang mengisi jabatan.

When viewed from the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, there is a sufficient level of diversity to help the Company realize its goals and achieve business targets. The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors also shows diversity in terms of gender where in each organ there is one woman who fills the position.

Nama dan Jabatan Name and Title	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS				
Sugiyartanto Komisaris Utama President Commissioner	S2 Teknik Transportasi	>30 tahun > 30 Years	61 tahun	Laki-laki Male
Andar Perdana Widiastono Komisaris Commissioner	S2 Magister Hukum	>30 tahun > 30 Years	63 tahun	Laki-laki Male
Rika Kiswardani Komisaris Independen Independent Commissioner	S2, Policy and Administration	>30 tahun > 30 Years	53 tahun	Perempuan Female
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS				
Haedar A. Karim Direktur Utama President Director	S1 Teknik Sipil	>30 tahun > 30 Years	62 tahun	Laki-laki Male
Moeharmein Zein Chaniago Direktur Pemasaran dan Pengembangan Director of Marketing and Development	S2 Master of Construction and Engineering Management	>30 tahun > 30 Years	56 tahun	Laki-laki Male
Firmansyah Direktur Produksi dan HSE Director of Production and HSE	S1 Teknik Sipil	>30 tahun > 30 Years	54 tahun	Laki-laki Male
Sri Haryanto Direktur keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Director of Finance, HR and Risk Management	S2 Manajemen Strategi	>30 tahun > 30 Years	50 tahun	Laki-laki Male

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practices

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat laporan atas aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku dan AMDAL sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan.

Report on Company Activities Polluting the Environment

Throughout 2021, there were no reports of company activities that pollute the environment. In running its business, the Company always complies with applicable regulations and AMDAL as a form of commitment to the environment.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk perpajakan. Komitmen perpajakan yang dilakukan Perseroan juga menjadi bagian dari kontribusi Perseroan terhadap negara. Di sepanjang tahun 2021, Perseroan telah menyetorkan pajak sebesar Rp763,81 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp633,41 miliar. Pajak ini mencakup pajak di Pusat dan pajak proyek di Daerah.

Disclosure of Fulfillment of Tax Obligations

The Company is committed to complying with all applicable regulations, including taxation. The tax commitment made by the Company is also part of the Company's contribution to the country. Throughout 2021, the Company has deposited taxes of Rp763.81 billion, an increase compared to 2020 of Rp633.41 billion. This tax includes taxes at the Center and project taxes at the Regions.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam laporan tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

All information presented in this annual report, particularly related to financial performance and other matters, refers to the financial statements for the years ended 31 December 2021 and 31 December 2020 which have been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & partner.

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

The presentation and disclosure of the company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Sepanjang tahun 2021 Perseroan tidak memiliki kasus terkait buruh dan karyawan. Perseroan senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara Perseroan dengan karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Hingga akhir tahun 2021, laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan belum menerapkan PSAK 5 tentang segmen operasi. Perseroan bukanlah entitas usaha yang menerbitkan sahamnya kepada publik dan berstatus perusahaan terbuka (Tbk.), dengan demikian tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan segmen operasi pada laporan Keuangannya.

Kesesuaian Laporan Tahunan Hardcopy dan Softcopy

Perseroan menjamin bahwa isi laporan tahunan dalam bentuk hardcopy dan softcopy telah sesuai dan tidak terdapat adanya perbedaan.

Cases Related to Labor and Employees

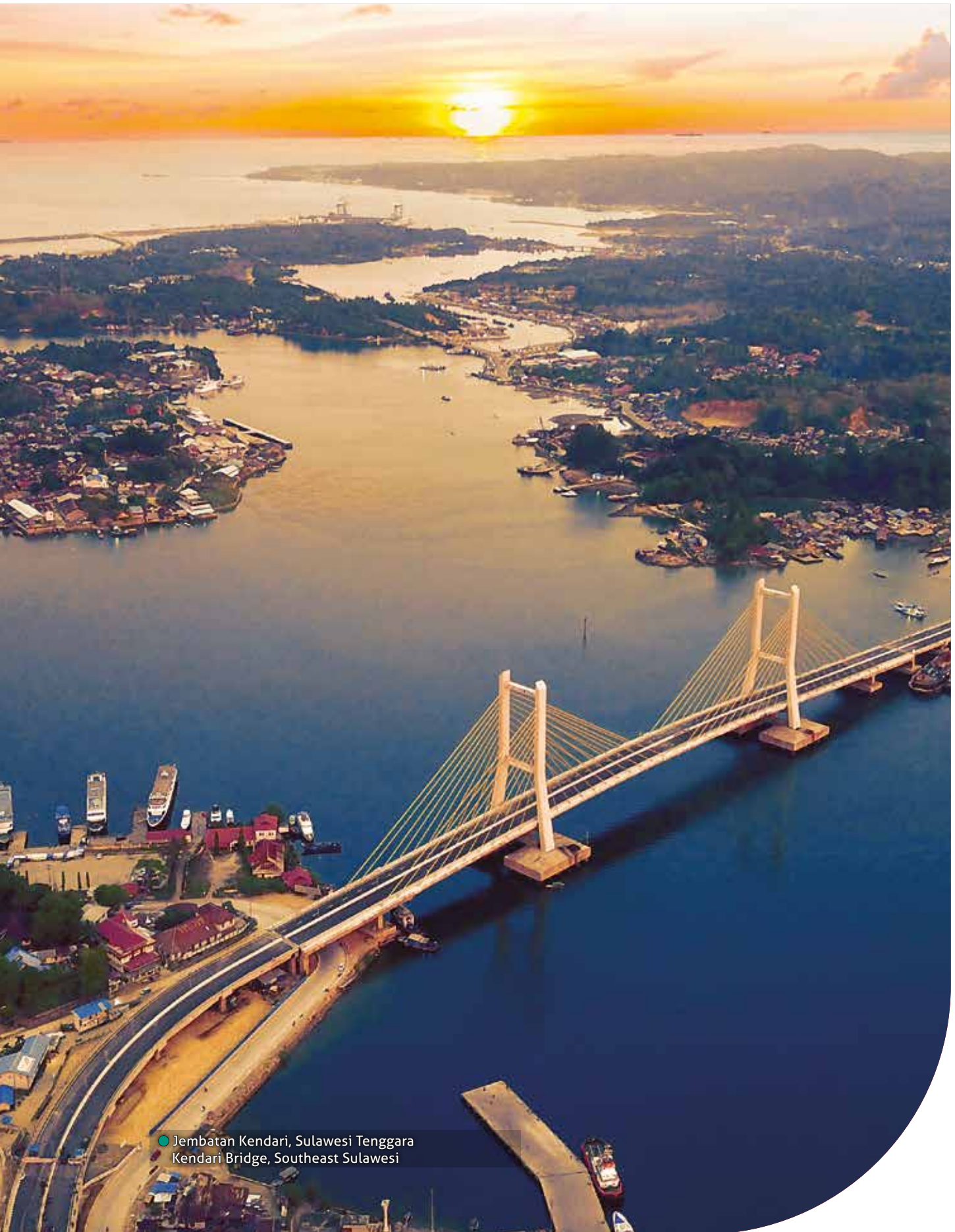
Throughout 2021 the Company did not have any cases related to workers and employees. The Company always upholds the rights and obligations between the Company and its employees in accordance with applicable laws and the Company's articles of association.

Disclosure of Operating Segments in Financial Statements

Until the end of 2021, the Company's Consolidated Financial statements have not implemented PSAK 5 regarding operating segments. The Company is not a business entity that issues its shares to the public and has the status of a public company (Tbk.), thus it has no obligation to apply operating segments to its financial statements.

Compatibility of Hardcopy and Softcopy Annual Reports

The Company guarantees that the contents of the annual report in the form of hardcopy and softcopy are appropriate and there are no differences.



● Jembatan Kendari, Sulawesi Tenggara
Kendari Bridge, Southeast Sulawesi



● Bendungan logung, Kudus
Logung Dam, Kudus



TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

Environmental Social Responsibility



Perusahaan senantiasa berperan aktif untuk mendorong terbentuknya perekonomian rakyat yang kuat melalui pemberian bantuan pinjaman permodalan yang bernilai tambah.

The Company always plays an active role in encouraging the formation of a strong people's economy through the provision of value-added capital loans.



Bantuan Sinergi BUMN Kluster Danareksa-PPA (Bencana Alam Mamuju dan Kalimantan Selatan) Danareksa PPA Cluster SOE Synergy Assistance (Mamuju and South Kalimantan Natural Disasters)



Bantuan Sembako untuk Korban Banjir Wilayah Jakarta, Bekasi dan Sekitarnya
Basic Food Assistance for Flood Victims in Jakarta, Bekasi and Surrounding Areas



Khitanan Yatim dalam rangka HUT PT Nindya Karya (Persero) ke-61 Tahun 2021
Orphans Circumcision in the framework of the 61st Anniversary PT Nindya Karya (Persero) in 2021



Penataan Lingkungan Sekitar Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA Batu Tulis-Ciomas Lintas Bogor-Sukabumi
Structuring the Environment Around the Double Track Development Project for the Ciomas Slate Railway for the Bogor-Sukabumi Cross



Bantuan Sinergi BUMN Kluster Danareksa-PPA (Banjir Bandang di NTT)
SOEs Synergy Assistance for the Danareksa PPA Cluster (Flood in NTT)



Peringatan Nuzulul Quran 1442 Hijriah "Pemberian Santunan kepada Anak Yatim"
Commemoration of the Nuzulul Quran 1442 Hijriah "Providing Compensation to Orphans"



Penataan Lingkungan Sekitar Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA Batu Tulis-Ciomas Pembangunan Masjid Al Manar Taman Duta Lintas Bogor-Sukabumi
Structuring the Environment Around the Batu Tulis-Ciomas Double Track Construction Project Construction of the Al Manar Mosque Taman Duta Lintas Bogor-Sukabumi



Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada PMI Kota Jakarta Timur dalam Penanganan Pencegahan COVID-19
Personal Protective Equipment (PPE) Assistance to PMI East Jakarta City in Handling COVID-19 Prevention



Bantuan Air Mineral dan APD Kolaborasi BUMN Kluster Danareksa-PPA
Mineral Water and Personal Protective Equipment (PPE) Assistance in the Danareksa-PPA Cluster SOEs Collaboration



Bantuan Sembako untuk Warga yang Terdampak COVID-19 di Sekitar Gedung Nindya-Jakarta Timur
Food Assistance for Residents Affected by COVID-19 Around the Nindya Building-East Jakarta



Pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an Masjid Al Muhajirin
Construction of the Al Qur'an Education Park Al Muhajirin Mosque



Pemberian Dukungan atas Kegiatan Launching Desa Digital Tawangsari dan Pelatihan Digital UMKM
Kolaborasi BUMN Kluster Danareksa-PPA
Supporting for the Launching of the Tawangsari Digital Village and Digital Training for SOEs Collaborating MSMEs Danareksa-PPA Cluster



Pemberian Dukungan atas Kegiatan Launching Desa Digital Tawang Sari dan Pelatihan Digital UMKM Kolaborasi BUMN Klaster Danareksa-PPA Supporting for the Launching of the Tawang Sari Digital Village and Digital Training for SOEs Collaborating MSMEs Danareksa-PPA Cluster



Program Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sekitar Danau Toba-Bantuan Sosial Budaya dan Lingkungan Pertanian berupa Benang Ulos dan Bibit Pohon Super Priority Tourism Destinations Program (DPSP) around Lake Toba-Agricultural Socio-Cultural and Environmental Assistance in the form of Ulos Yarn and Tree Seeds



Bantuan Pendidikan Kaos Latihan dan Masker untuk Sanggar Tari Desa Binaan Cikopomayak Educational Assistance for Training T-shirts and Masks for the Cikopomayak Assisted Village Dance Studio



Program Pelatihan Pertukangan Lanjutan di Desa Binaan Cikopomayak "Pembuatan Wall Décor" Advanced Carpentry Training Program in Cikopomayak Assisted Village "Wall Décor Making"



Program Penghijauan bersama Kementerian BUMN Greening Program with the Ministry of SOEs



Program Bantuan Sinergi BUMN Klaster Danareksa PPA-Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru The Danareksa PPA Cluster SOEs Synergy Assistance Program-Natural Disaster of Mount Semeru Eruption



Program Bantuan Pembangunan Infrastruktur Desa Binaan Cikopomayak Tahun 2021 Cikopomayak Assisted Village Infrastructure Development Assistance Program in 2021



Program Bantuan Paket Sembako Anak Yatim Yayasan Baitul Yataama Fadlan Food Package Assistance Program for Orphans Baitul Yataama Fadlan Foundation



Vaksin tahap 1, karyawan Nindya Karya berlokasi di sentra vaksin kbumn di tennis indoor senayan tgl 2 april 2022 Vaccine phase 1, Nindya Karya employees are located at the vaccine center of the Ministry of SOEs at indoor tennis Senayan April 2, 2022



Vaksin tahap 2, karyawan nindya karya berlokasi di sentra vaksin kbumn tennis indoor senayan tgl 30 april 2022 Vaccine phase 2, Nindya Karya employees are located at the vaccine center of the Ministry of SOEs at indoor tennis Senayan April 30, 2022



Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diinisiasi NINDYA KARYA Bersama Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS) dan Palang Merah Indonesia (PMI) pada tanggal 24-27 juli 2022 di Gedung Kantor Pusat Nindya Karya The implementation of the COVID-19 vaccination initiated by NINDYA KARYA with the Hasanuddin University Alumni Association (IKA UNHAS) and the Indonesian Red Cross (PMI) on 24-27 July 2022 at the Nindya Karya Head Office Building



Bertepatan dengan HUT RI ke-76, PT Nindya Karya (Persero) menggelar donor plasma konvalesen dan donor darah reguler pada 16 dan 17 Agustus 2021 di gedung kantor pusat Nindya Karya To coincide with the 76th Indonesian Independence Day, PT Nindya Karya (Persero) held convalescent plasma donors and regular blood donors on 16 and 17 August 2021 at the Nindya Karya head office building

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Corporate Social and Environmental Responsibility for Sustainable Development

Perusahaan senantiasa berupaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Agenda 2030, yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan bersama pembangunan negara-negara lintas pemerintahan hingga tahun 2030. Di dalam SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Perusahaan mempraktikkan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan pengembangan yang bertanggung jawab sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan dan dibuat berlandaskan pada keseimbangan antara aspek-aspek triple bottom line (*people, profit, planet*). Melalui prinsip 3P ini Perusahaan percaya bahwa perusahaan yang baik bukan hanya yang berhasil mencapai target *profit* yang dicanangkan, tetapi juga mampu menterjemahkan menjadi program yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Terlebih Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga terus mendorong pencapaian SDGs yang disederhanakan ke dalam 4 pilar utama, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Melalui referomasi bisnis yang dilakukan Perusahaan di tahun 2014 silam, Perusahaan mulai melakukan pembenahan-pembenahan yang diperlukan salah satunya mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dari pedoman-pedoman yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan Perusahaan tidak bersandar hanya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat filantropi semata namun merancang program-program yang lebih strategis dan terintegrasi.

Perusahaan menggagas pemahaman bahwa kontribusi perusahaan dalam kaitannya dengan aspek sosial dan lingkungan dapat dilihat dari bagaimana proyek-proyek yang Perusahaan jalankan ramah terhadap lingkungan, membawa manfaat bagi masyarakat secara luas serta terhindar dari konflik-konflik sosial yang timbul mulai dari pra, pembangunan dan pasca pembangunan suatu proyek.

The company always strives to support the achievement of the 2030 Agenda Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), which is a sustainable development agreement with the development of cross-governmental countries until 2030. The SDGs themselves consist of 17 goals with 169 measurable achievements and the deadline that has been determined by the United Nations as the world's development agenda for the benefit of humans and planet earth.

The company practices sustainable development through a responsible development approach in line with the company's vision, mission and values and is based on a balance between the aspects of the triple bottom line (*people, profit, planet*). Through this 3P principle, the Company believes that a good company is not only one that succeeds in achieving the profit target that has been set, but is also able to translate it into a program that benefits the community.

Moreover, the National Development Planning Agency (Bappenas) also continues to push for the achievement of the SDGs which is simplified into 4 main pillars, namely the Social Development Pillar, the Economic Development Pillar, the Environmental Development Pillar and the Legal Development Pillar and Governance.

Through the business reform carried out by the Company in 2014, the Company began to make necessary improvements, one of which was preparing the necessary infrastructure in order to adopt the concept of sustainable development from the applicable guidelines.

Therefore, in carrying out sustainable development programs, the Company does not rely solely on philanthropic activities but designs programs that are more strategic and integrated.

The company initiated an understanding that the company's contribution in relation to social and environmental aspects can be seen from how the projects that the Company runs are friendly to the environment, bring benefits to the community at large and avoid social conflicts that arise from pre, development and post development. a project.

Selain itu, Perusahaan senantiasa berperan aktif untuk mendorong terbentuknya perekonomian rakyat yang kuat melalui pemberian bantuan pinjaman permodalan yang bernilai tambah. Peran aktif tersebut merupakan kewajiban Perusahaan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menjalankan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN.

In addition, the Company continues to play an active role in encouraging the formation of a strong people's economy through the provision of value-added capital loans. This active role is the Company's obligation as part of the State-Owned Enterprises (SoE), to carry out the Micro Small Business (SMB) empowerment program as mandated by the Ministry of SOEs.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Corporate Social and Environmental Responsibility Governance

Komitmen Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Komitmen Perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan salah satunya diwujudkan dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL). Melalui program TJSL Perusahaan berupaya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan beroperasi, maupun di wilayah lain di seluruh Indonesia. TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Selain itu, dukungan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diwujudkan Perusahaan melalui program pemberdayaan UMK, dalam objektif yang sama dengan negara terkait penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, yang akan berdampak signifikan bagi upaya mengentaskan kemiskinan. Melalui program ini, Perusahaan dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua.

Perusahaan berkeyakinan, perubahan positif yang dibuat dalam masyarakat akan mempunyai dampak berkelanjutan bagi generasi mendatang, dan dapat mewujudkan pertumbuhan usaha yang baik serta memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

Commitment to Implementing Corporate Social and Environmental Responsibility

One of the Company's commitments to support sustainable development is manifested in the Corporate Social Responsibility (TJSL) program. Through the CSR program, the Company strives to provide the maximum benefit to stakeholders, especially the communities in which the Company operates, as well as in other areas throughout Indonesia. CSR is an activity that is the Company's commitment to sustainable development by providing economic, social, environmental and legal benefits and governance with more integrated, targeted, measurable and accountable principles and is part of the company's business approach.

In addition, support for the achievement of the Sustainable Development Goals is realized by the Company through the MSE empowerment program, in the same objective as the state regarding the creation of jobs and employment opportunities, which will have a significant impact on efforts to alleviate poverty. Through this program, the Company can continue to support inclusive and sustainable economic growth, and the provision of decent jobs for all.

The company believes that positive changes made in society will have a sustainable impact on future generations, and can realize good business growth and make a positive contribution to the environment and social community.

Dasar Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sebagai Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dasar pelaksanaan program TJSL Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai berikut:
6. Pasal 2: salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
7. Pasal 88: BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
8. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
10. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
12. Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
13. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
14. Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
15. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
16. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
17. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
19. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Legal Basis for Implementing Corporate Social and Environmental Responsibility

As a Limited Liability Company owned by the Republic of Indonesia, the basis for implementing the Company's CSR program is based on several legal aspects, including:

1. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety.
2. Law No. 23 of 1992 concerning Health.
3. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
4. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
5. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN), as follows:
6. Article 2: One of the aims and objectives of establishing BUMN is to actively participate in providing guidance and assistance to entrepreneurs from economically weak groups, cooperatives, and the community.
7. Article 88: BUMN may set aside a portion of its net profit for the purposes of fostering small businesses/ cooperatives as well as fostering the community around BUMN.
8. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
9. Law No. 25 of 2007 concerning Investment.
10. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
11. Law No. 36 of 2009 concerning Health.
12. Law No. 13 of 2011 concerning Treatment of the Poor.
13. Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body.
14. Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services.
15. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits.
16. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
17. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems.
18. Regulation of the Minister of Manpower No. 05/ Men/1996 concerning Occupational Health and Safety Management System (SMK3).
19. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/ MBU/04/2021 dated April 8, 2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises

Tujuan dan Sasaran Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tujuan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah keberlanjutan usaha (*Business Sustainability*). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi, Engineering, Procurement dan Construction/EPC dan Investasi. Nindya Karya mengemban amanah untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diinisiasi dari kesepakatan bersama 193 Kepala Negara termasuk Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-70 tahun 2015 untuk melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menyempurnakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) yang harus dilaksanakan oleh seluruh BUMN dalam 4 (empat) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu: Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum & Tata Kelola. Program TJSL BUMN merupakan penyempurnaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selama ini sudah dijalankan oleh BUMN.

Organisasi, Penanggung Jawab dan Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan



Pembiayaan dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pembiayaan dan anggaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan mencakup 4 (empat) pilar utama yaitu (1) Pilar Sosial, (2) Pilar Ekonomi, (3) Pilar Lingkungan, (4) Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Objectives and Targets of the Implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibility Program

The objective of Social and Environmental Responsibility (TJSL) is business sustainability. As a construction State-Owned Enterprise (BUMN) that runs business in the fields of construction services, Engineering, Procurement and Construction/EPC and Investment. Nindya Karya has the mandate to implement the Sustainable Development Goals (TPB) as regulated in Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals (TPB) which was initiated from a joint agreement with 193 Heads of State including Indonesia at the 70th UN General Assembly in 2015 to implement the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Sustainable Development Goals (TPB) are regulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-05/MBU/04/2021 dated April 8, 2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises which enhances the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Program Corporate Social Responsibility (CSR) is a Social & Environmental Responsibility Program (TJSL) that must be implemented by all SOEs in the 4 (four) pillars of the Sustainable Development Goals (TPB), namely: Social Pillar, Economic Pillar, Environmental Pillar and Law & Governance Pillar Manage. The BUMN TJSL program is a refinement of the Partnership and Community Development Program (PKBL) and the Corporate Social Responsibility (CSR) Program that has been carried out by BUMN so far.

Organization, Responsible Agency and Corporate Social and Environmental Responsibility Program Manager

Corporate Social and Environmental Responsibility Program Financing and Budget

The financing and budget of the Corporate Social and Environmental Responsibility program are aligned with the Environmentally Sustainable Development Goals covering 4 (four) main pillars, namely (1) Social Pillar, (2) Economic Pillar, (3) Environmental Pillar, (4) Law and Governance Pillar

Jumlah realisasi penyaluran Program TJSL di tahun 2021 adalah sebesar Rp1.205.000.000,-. Jumlah terdiri dari:

1. Pilar Sosial yang berasal dari biaya perusahaan sebesar Rp77.150.000,-.
2. Pilar Ekonomi berasal dari realisasi pendanaan UMK sebesar Rp705.000.000,-.
3. Pilar Lingkungan yang berasal dari biaya perusahaan sebesar Rp402.850.000,-.
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola yang berasal dari biaya perusahaan sebesar Rp20.000.000,-.

The total realization of the distribution of the TJSL Program in 2021 is Rp1,205,000,000,-. The amount consists of:

1. The Social Pillar that comes from the company's costs is Rp77,150,000,-.
2. The Economic Pillar comes from the realization of UMK funding of Rp705,000,000.
3. The Environmental Pillar that comes from the company's costs is Rp402.850.000,-.
4. Pillar of Law and Governance originating from the company's cost of Rp20,000,000,-.

Tanggung Jawab Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Environmental Company Responsibility

Komitmen dan Kebijakan

Menyadari manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup bagi pertumbuhan kinerja berkelanjutan, Perusahaan telah menginternalisasi hal tersebut dalam bentuk komitmen yang tertuang dalam Kebijakan PT Nindya Karya (Persero) tentang Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan, prosedur HSE No. P-NK-HSE-14 tentang penanganan limbah, dan sertifikat ISO 14001:2015.

Perusahaan juga telah menjalankan penggunaan material ramah lingkungan yang diwujudkan dalam program kegiatan TJSL. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam pemenuhan kriteria *Go Green Construction* pada tiap-tiap proyek yang dikerjakan. Perusahaan memiliki sertifikasi tersebut dan diperoleh perjanjian sertifikasi Greenship yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2017.

Dampak dan Risiko Lingkungan Terkait Operasi dan Bisnis Perusahaan

Dengan memperhatikan lingkungan hidup, maka Perusahaan dapat meminimalisir dampak dan risiko lingkungan penting yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. Dampak dan risiko lingkungan dari aktivitas kegiatan bisnis Perusahaan yang berpotensi muncul, yakni limbah material proyek, kebisingan, polusi udara, dan perubahan kontur tanah. Namun risiko tersebut telah dimitigasi dengan baik melalui penanganan limbah, penggunaan alat ramah lingkungan dan pemasangan pengaman sesuai standar keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja agar para pekerja, masyarakat sekitar serta lingkungan tetap terjaga.

Rencana dan Program Kegiatan di Tahun 2021

Dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan lingkungan di perusahaan, Nindya Karya senantiasa berupaya melakukan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dengan mengacu

Commitments and Policies

Realizing the benefits of implementing environmental responsibility for sustainable performance growth, the Company has internalized this in the form of a commitment contained in PT Nindya Karya (Persero) Policy on Occupational Health & Safety, HSE procedure No. P-NK-HSE-14 on waste management, and ISO 14001:2015 certificate.

The company has also implemented the use of environmentally friendly materials which are realized in the TJSL activity program. This is in line with the Company's commitment to fulfilling the *Go Green Construction* criteria for each project undertaken. The company has this certification and obtained a Greenship certification agreement which was signed on January 24, 2017.

Environmental Impacts and Risks Related to the Company's Operations and Business

By paying attention to the environment, the Company can minimize significant environmental impacts and risks related to the Company's activities. Potential environmental impacts and risks from the Company's business activities, namely project material waste, noise, air pollution, and changes in land contours. However, these risks have been mitigated properly through waste management, use of environmentally friendly tools and installation of safety equipment according to occupational safety, health and safety standards so that workers, the surrounding community and the environment are maintained.

Plans and Programs of Activities in 2021

In order to fulfill the requirements of Quality Standards, Occupational Safety & Health and the environment in the company, Nindya Karya always strives to implement an Environmental Management System with reference

pada Sistem Manajemen Mutu, K-3 dan Lingkungan yang terintegrasi. Dengan demikian, Perusahaan berharap bisa menciptakan proses kerja yang ramah lingkungan dan mencegah pencemaran.

Sebagai pelaku usaha di bidang konstruksi, Perusahaan menggunakan berbagai sumber daya alam atau material tak terbarukan yaitu pasir, batu belah, semen, dan besi beton. Sedangkan sumber daya alam atau material terbarukan yang digunakan antara lain berupa kayu. Volume penggunaan material sangat dipengaruhi oleh jumlah proyek yang ditangani Perusahaan. Per 31 Desember 2021, volume atau berat total material yang dipakai Perusahaan berdasarkan data dari Wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pemakaian Material/Bahan Baku Tahun 2021
Use of Materials/Raw Materials in 2021

Uraian Description	Satuan Unit	Volume	
		2021	2020
Material Terbarukan Renewable Material			
Besi Beton Steel bar	Ton Tonnes	26.825	27.946
Semen Cement	Ton Tonnes	77.310	47.944
Material Tidak Terbarukan Non-Renewable Material			
Tanah Merah Laterite	m3	555.127	147.201
Agregat Aggregate	m3	213.550	386.513

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dalam penggunaan bahan baku material, Perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk memperhatikan aspek dan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Untuk mendapatkan material berupa agregat halus, agregat kasar dan tanah timbunan misalnya, maka lokasi pengambilannya harus sudah memenuhi syarat-syarat mengenai Analisa mengenai dampak lingkungan, serta memiliki izin IUP (Izin Usaha Produksi). Selain itu, lokasi tersebut juga tidak berada di area atau wilayah yang berdekatan dengan kawasan lindung atau dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.

Pedoman Penggunaan Bahan Baku Material
Guidelines for the Use of Raw Materials

Jenis Material Material Type	Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Requirements That Needs To Be Met
Agregat (Batu Pecah, Batu Belah, Pasir) Aggregate (Broken Stone, Split Stone, Sand)	Memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi Have a Mining Business Permit-Production Operation
Tanah Timbunan Landfill	Memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi Have a Mining Business Permit-Production Operation
Kayu Wood	Memiliki Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Have a Business Permit for the Utilization of Timber Forest Products
Besi Beton Steel Bar	Sertifikat SNI, Millsheet, Hasil Test Lembaga Independent SNI Certificate, Millsheet, Independent Institute Test Results

to an integrated Quality, K-3 and Environmental Management System. Thus, the Company hopes to create an environmentally friendly work process and prevent pollution.

As a business actor in the construction sector, the Company uses a variety of natural resources or non-renewable materials, namely sand, crushed stone, cement, and iron-concrete. Meanwhile, natural resources or renewable materials used include wood. The volume of material usage is strongly influenced by the number of projects handled by the Company. As of December 31, 2021, the volume or total weight of the materials used by the Company based on data from Regions 1, 2, 3, 4, and 5 can be seen in the table below.

As a form of concern for the environment, in the use of raw materials, the Company makes every effort to pay attention to environmental aspects and impacts in accordance with the regulations issued by the Government in the environmental sector. To obtain material in the form of fine aggregate, coarse aggregate and embankment soil, for example, the location for collection must meet the requirements regarding environmental impact analysis, and have an IUP (Production Business Permit) permit. In addition, the location is also not in an area or area adjacent to a protected area or with a high biodiversity value.

Untuk penggunaan energi, Perusahaan menggunakan sumber energi utama berupa listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Penggunaan listrik bersumber dari PT PLN (Persero), dan Perusahaan menyiapkan genset sebagai alternatif jika pasokan listrik dari PLN padam. Energi listrik digunakan dalam operasional kantor, seperti penerangan, menghidupkan piranti elektronik penunjang kerja, dan lain-lain. Sementara itu, bahan bakar minyak yang dipakai adalah bensin (Pertamax/Pertalite/Premium) dan solar untuk bahan bakar kendaraan operasional dan genset.

Perusahaan berkomitmen menggunakan energi dan mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab dalam proses produksi maupun pemanfaatannya, sehingga dapat berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan dan dukungan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan penghematan listrik dan BBM, baik untuk operasional di kantor maupun di lokasi proyek.

Langkah yang dilakukan Perusahaan, diantaranya melakukan sosialisasi penghematan energi, himbuan untuk mematikan lampu dan piranti listrik (komputer, AC, televisi, kipas angin, dan lain-lain) apabila sudah tidak digunakan, dan sebagainya. Selain itu, Perusahaan juga memperbanyak panel kaca pada ruangan perkantoran sehingga pada siang hari bisa memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penerangan. Upaya yang lain adalah mengganti lampu TL (*Fluorescent Lamp*) dengan lampu LED (*Light Emitting Diode*) yang lebih hemat energi. Sedangkan upaya penghematan bahan bakar minyak dilakukan, antara lain, dengan mengurangi perjalanan dinas dan mengganti rapat tatap muka dengan telekonferensi.

Penggunaan energi yang dikonsumsi Perusahaan dihitung berdasarkan tagihan Kwh meter dari PLN untuk konsumsi listrik, dan satuan liter yang diperoleh dari Wilayah 1, 2, 4, dan 5 yang mencatat pengeluaran bahan bakar minyak, baik untuk kendaraan operasional maupun genset. Total konsumsi energi yang digunakan oleh Nindya Karya selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Volume Konsumsi Energi dalam Organisasi
Table of Energy Consumption Volume in Organizations

Konsumsi Energi Energy Consumption	Satuan Unit	2021	2020
Listrik Electricity	kWh	1.052.356.696	1.085.732.662
BBM fuel	liter	210	258

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan energi pada tahun 2021 turun dibandingkan tahun 2020. penurunan penggunaan energi disebabkan oleh masa pandemi dengan diberlakukannya work from home (WFH).

For energy use, the Company uses the main energy sources in the form of electricity and fuel oil (BBM). The use of electricity comes from PT PLN (Persero), and the Company prepares a generator as an alternative if the electricity supply from PLN goes out. Electrical energy is used in office operations, such as lighting, turning on work-supporting electronic devices, and others. Meanwhile, the fuel oil used is gasoline (Pertamax/Pertalite/Premium) and diesel fuel for operational vehicles and generators.

The company is committed to using energy and encourages all parties to be responsible for the production process and its use, so that it can be sustainable. This is in line with the implementation and support for the achievement of the Sustainable Development Goals, namely Responsible Consumption and Production. Therefore, the Company is committed to saving electricity and fuel, both for operations at the office and at the project site.

The steps taken by the Company include socializing energy savings, calls for turning off lights and electrical devices (computers, air conditioners, televisions, fans, etc.) when they are not in use, and so on. In addition, the Company also increases the number of glass panels in the office space so that during the day it can use sunlight as a source of lighting. Another effort is to replace TL (*Fluorescent Lamp*) lamps with LED (*Light Emitting Diode*) lamps which are more energy efficient. Meanwhile, efforts to save fuel were carried out, among others, by reducing business trips and replacing in person meetings with teleconferencing.

The use of energy consumed by the Company is calculated based on the Kwh meter bill from PLN for electricity consumption, and liters obtained from Regions 1, 2, 4, and 5 which record the expenditure of fuel oil, both for operational vehicles and generators. The total energy consumption used by Nindya Karya during 2021 can be seen in the table below.

Based on the table above, energy use in 2021 will decrease compared to 2020. The decrease in energy use is caused by the pandemic period with the implementation of work from home (WFH).

Penggunaan Air

Penggunaan air yang efisien menjadi komitmen bagi pelaku usaha, khususnya Perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan air yang besar, Perusahaan memanfaatkan air PDAM dan air tanah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Wilayah 1, 2, 4, dan 5, volume pengambilan air berdasarkan sumbernya per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020
Air PDAM PDAM water	m3	4.485	4.313

Standar dan metodologi yang digunakan dalam menghitung pemakaian air adalah:

1. Sumber air PDAM: perhitungan konsumsi air (m3) berdasarkan besarnya tagihan PDAM tiap bulan.
2. Sumber air sumur: perhitungan konsumsi air (m3) dilakukan dengan cara membaca langsung dari alat flowmeter yang ada pada tiap mesin pompa. Pencatatan angka yang tertera pada alat flowmeter sesuai dengan jumlah air yang terpakai setiap bulan.

Perusahaan menyadari bahwa air PDAM maupun air tanah ketersediaannya semakin menipis. Bahan baku air yang diolah PDAM semakin buruk kualitasnya karena tercemar sedangkan penggunaan air tanah kian terbatas karena semakin banyak orang atau perusahaan yang mengambilnya. Oleh karena itu, Nindya Karya berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan air. Kebijakan yang dilakukan antara lain mengeluarkan himbauan penggunaan air secara bijaksana (hemat), dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap instalasi air sehingga bisa dilakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan atau kebocoran.

Pengelolaan Limbah

Dalam kegiatan konstruksi yang dilakukan Perusahaan, limbah yang muncul sebagai sisa-sisa dari kegiatan operasi mencakup limbah B3 dan non B3 perusahaan, cair maupun padat. Pengolahan limbah yang dijalankan Perusahaan telah mengacu pada kerangka ISO 14001:2015 terkait dengan Environmental Management Systems-Requirements with Guidance For Use. Selama penanganan tumpahan, catatan harus dibuat dengan memperhatikan perihal:

1. Lokasi proyek dan lokasi tumpahan
2. Tipe material dan jumlah yang terlepas
3. Orang yang hadir, termasuk mencakup karyawan Perseroan, subcontractor, masyarakat, wartawan, dan sebagainya.
4. Tindakan penanganan, dengan waktu pelaksanaan
5. Pembacaan alat pemantau udara
6. APD yang dipakai oleh personel yang menangani
7. Berbagai paparan atau gejala dilaporkan
8. Berbagai macam informasi mungkin bisa digunakan kemudian untuk memeriksa dampak tumpahan atau evaluasi tindakan penanganan.

Water Usage

Efficient use of water is a commitment for business actors, especially the Company. To meet the large water demand, the Company utilizes PDAM water and ground water. Based on data obtained from Regions 1, 2, 4, and 5, the volume of water withdrawal by source as of December 31, 2021 can be seen in the table below.

The standards and methodologies used in calculating water use are:

1. PDAM water source: calculation of water consumption (m3) based on the amount of PDAM bill each month.
2. Source of well water: calculation of water consumption (m3) is done by reading directly from the flowmeter on each pumping machine. Recording the numbers listed on the flowmeter according to the amount of water used every month.

The company realizes that the availability of PDAM water and ground water is running low. The raw materials for water treated by PDAM are of poor quality because they are polluted, while the use of ground water is increasingly limited because more people or companies are taking it. Therefore, Nindya Karya is committed to efficient use of water. The policies implemented include issuing calls for wise (saving) use of water, and conducting regular checks on water installations so that repairs can be made in the event of damage or leakage.

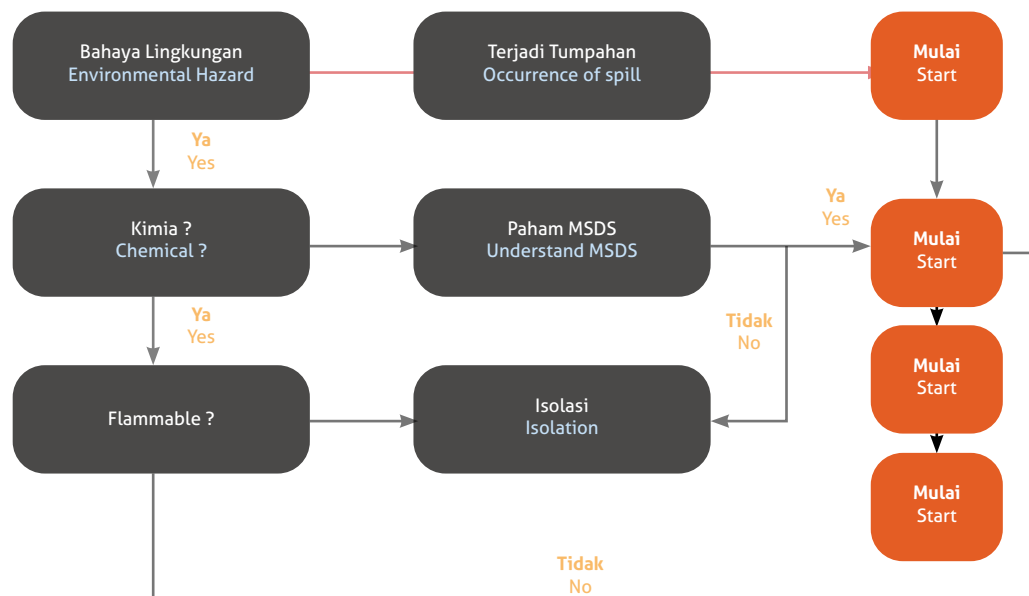
Waste Management

In the construction activities carried out by the Company, the waste that appears as remnants of operating activities includes the company's B3 and non-B3 waste, liquid and solid. The waste treatment carried out by the Company has referred to the ISO 14001:2015 framework related to Environmental Management Systems-Requirements with Guidance For Use. During the handling of spills, records must be made with regard to:

1. Project site and spill site
2. Material type and amount released
3. The people who attended included the Company's employees, subcontractors, the public, journalists, and so on.
4. Handling action, with execution time
5. Air monitor reading
6. PPE used by personnel handling
7. Multiple exposures or symptoms reported
8. A wide range of information may be used later to examine the impact of a spill or evaluate response actions.

Setelah penanganan tumpahan lengkap, catatan harus ditinjau secara khusus untuk tujuan evaluasi penanganan. Tindakan koreksi harus ditujukan dalam memenuhi pelaksanaan Program Pengendalian Bahaya. Catatancatatan yang dihasilkan didalam hubungannya terhadap program ini harus dipelihara sesuai dengan pengendalian rekaman mutu. Di bawah ini alur kerja penanganan pembersihan tumpahan B3 dan tumpahan limbah B3:

Once spill handling is complete, records should be reviewed specifically for treatment evaluation purposes. Corrective action shall be aimed at complying with the implementation of the Hazard Control Program. Records produced in connection with this program shall be maintained in accordance with quality control records. Below is the workflow for handling B3 spills and B3 waste spills:



Selain penanganan tumpahan, Nindya Karya juga menghasilkan air limbah, limbah padat dan limbah B3. Di Kantor Pusat misalnya, air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan mandi cuci dialirkan ke saluran kawasan dan limbah cair kaku dikelola dengan septik tank secara anaerob. Sesuai SK Gub. No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Propinsi DKI Jakarta mensyaratkan bahwa air limbah domestik tidak boleh diresapkan dalam tanah karena dapat mencemari air tanah sehingga harus diolah terlebih dahulu untuk dapat dibuang ke saluran air permukaan.

In addition to handling spills, Nindya Karya also produces waste water, solid waste and B3 waste. At the Head Office, for example, domestic wastewater generated from bathing and washing activities is channeled into regional drains and latrine wastewater is managed in an anaerobic septic tank. According to the Governor's Decree. No. 122 of 2005 concerning Domestic Wastewater Management in DKI Jakarta Province requires that domestic wastewater should not be infiltrated into the ground because it can contaminate ground water so it must be treated first to be discharged into surface waterways.

Perusahaan secara berkala melakukan pengujian terhadap air limbah yang dibuang ke saluran air permukaan. Dengan demikian dapat diketahui kualitas air limbah sebelum dibuang ke saluran air permukaan.

The company periodically conducts tests on wastewater discharged into surface waterways. Thus, the quality of wastewater can be known before being discharged into surface waterways.

Tabel Uji Limbah Domestik Pembuangan Air Ciliwung Tahun 2021
Ciliwung Water Disposal Domestic Test Table Year 2021

No	Parameter	Satuan Unit	Hasil Uji Test Test Results	Kadar Maksimum Maximum Levels	Spesifikasi Metode Method Specification
1	pH	mg/l	6.0	6-9	APHA Section 4500 H 23 rd ED 2017
2	BOD	mg/l	76	30	IKM/7.2.81//MB (BOD Oxydirect)
3	COD	mg/l	252.1	100	SNI 6989.73:2009
4	TSS	mg/l	136.7	30	APHA Section 2540 D 23 rd ED 2017
5	Minyak dan Lemak Oil and fat	mg/l	<0.7912	5	APHA Section 5520 Oil & Grease-F 23 rd ED 2017

No	Parameter	Satuan Unit	Hasil Uji Test Test Results	Kadar Maksimum Maximum Levels	Spesifikasi Metode Method Specification
6	Amoniak Ammonia	mg/l	6.2	10	APHA Section 4500 NH ₃ B and NH ₃ F, 23rd ED 2017
7	Total Coliform	Total/100 ml	80	3000	IKM/7.2.37/MB

Tabel Uji Limbah Domestik Pembuangan Air Ciliwung Tahun 2020
Ciliwung Water Disposal Domestic Test Table Year 2020

No	Parameter	Satuan Unit	Hasil Uji Test Test Results	Kadar Maksimum Maximum Levels	Spesifikasi Metode Method Specification
1	pH	mg/l	6.5	6-9	APHA Section 4500 H 23rd ED 2017
2	BOD	mg/l	63	30	IKM/7.2.81//MB (BOD Oxydirect)
3	COD	mg/l	188.3	100	SNI 6989.73:2009
4	TSS	mg/l	22.7	30	APHA Section 2540 D 23rd ED 2017
5	Minyak dan Lemak Oil and fat	mg/l	<0.7912	5	APHA Section 5520 Oil & Grease-F 23rd ED 2017
6	Amoniak Ammonia	mg/l	3.7	10	APHA Section 4500 NH ₃ B and NH ₃ F, 23rd ED 2017
7	Total Coliform	Total/100 ml	1290	3000	IKM/7.2.37/MB

Untuk pengelolaan limbah padat domestik, menurut data dari Divisi Properti, Kantor Pusat Nindya Karya menghasilkan timbunan sampah sekitar 1,5 meter kubik per hari. Sampah tersebut berasal dari aktivitas karyawan dan tamu serta kantin. Penanganan sampah dilakukan oleh petugas cleaning service dari setiap lantai dan ditempatkan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang berada di belakang area gedung operasional. Penanganan sampah padat sudah dilakukan pemisahan antara sampah anorganik dan organik. TPS berupa bangunan terpisah dari Gedung Nindya Karya. Sampah di TPS selanjutnya dikerjasamakan dengan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur dengan frekuensi pengangkutan dua kali sepekan.

Adapun pengelolaan limbah B3 di Kantor Pusat, antara lain, berupa lampu TL bekas, lampu ulir bekas, baterai bekas, Perusahaan mengumpulkan limbah tersebut di dekat lokasi TPS domestik. Selanjutnya, limbah tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berizin. Jenis limbah B3 berupa lampu TL rata-rata sebulan sebanyak 6,4 buah, sedangkan lampu PLS 13,3 buah.

Pengaduan Masalah Lingkungan

Segala pengaduan terkait masalah lingkungan yang timbul akibat kegiatan operasi yang dijalankan Perusahaan dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada proyek dan/atau Kantor Wilayah sebagai perwakilan Perusahaan yang berada di lokasi proyek. Perusahaan juga membuka kemungkinan penyampaian pengaduan maupun keluhan melalui Kantor Pusat.

Informasi Tentang Pengaduan Masalah Lingkungan terkait Operasional Perusahaan dapat disampaikan melalui beberapa cara antara lain :

Telepon : (021) 809 3276
Website : www.nindyakarya.co.id
Email : nindyakarya@nindyakarya.co.id
Media Sosial : @nindyakarya

For domestic solid waste management, according to data from the Property Division, the Nindya Karya Head Office produces around 1.5 cubic meters of waste per day. The garbage comes from the activities of employees and guests as well as the canteen. Garbage handling is carried out by cleaning service officers from each floor and placed in a Temporary Waste Shelter (TPS) which is behind the operational building area. Handling solid waste has done the separation between inorganic and organic waste. The TPS is a separate building from the Nindya Karya Building. Garbage at the TPS is then collaborated with the East Jakarta Sanitation Sub-dept. with a frequency of transportation twice a week.

As for the management of B3 waste at the Head Office, among others, in the form of used TL lamps, used screw lamps, used batteries. The Company collects the waste near the location of domestic TPS. Furthermore, the waste is cooperated with a licensed third party. The type of B3 waste in the form of TL lamps is an average of 6.4 units per month, while PLS lamps are 13.3 units.

Complaints of Environmental Problems

All complaints related to environmental problems arising from operational activities carried out by the Company can submit complaints or complaints to the project and/ or Regional Office as representatives of the Company at the project site. The company also opens the possibility of submitting complaints or complaints through the Head Office.

Information regarding Complaints about Environmental Problems related to Company Operations can be submitted in several ways, including:

Telepon : (021) 809 3276
Website : www.nindyakarya.co.id
Email : nindyakarya@nindyakarya.co.id
Media Sosial : @nindyakarya

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan terkait masalah lingkungan yang berdampak cukup signifikan dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

Until the end of 2021, the Company did not find any complaints related to environmental issues that had a significant impact and affected the Company's business continuity.

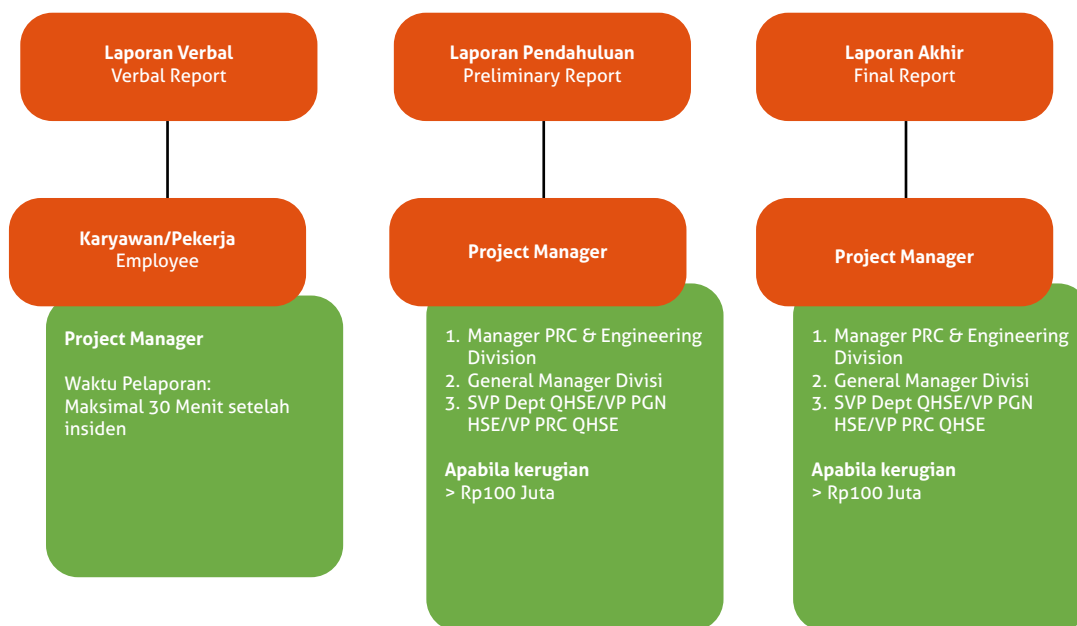
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Mekanisme pengaduan permasalahan lingkungan di wilayah operasional Perusahaan adalah dengan menyampaikan langsung permasalahan yang ditemui ke bagian Departemen QHSE dimana keluhan dan permasalahan yang disampaikan akan diteruskan ke bagian terkait untuk dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut untuk kemudian dilakukan tindak lanjut. Berikut merupakan diagram alur dari mekanisme terhadap pengaduan masalah lingkungan:

Mechanism for Environmental Complaints

The complaint mechanism for environmental problems in the Company's operational areas is to directly convey the problems encountered to the QHSE Department where the complaints and problems submitted will be forwarded to the relevant department for analysis of these problems for further follow-up. The following is a flow chart of the mechanism for environmental complaints:

Mekanisme Laporan Kerusakan Lingkungan Environmental Damage Reporting Mechanism



Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Environmental Awards and Certifications

Penghargaan di Bidang Lingkungan Environmental Award

Tanggal Date	Nama Penghargaan/Kategori Award Name/Category	Pemberi Penghargaan Award Given by
18 Oktober 2021	The Most Prominent Construction Company in Supporting TJSL on Social and Environment	BUMN Track Awards

Sertifikasi di Bidang Lingkungan Environmental Certification

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certification Release Date	Jenis Sertifikat Certificate Type	Dikeluarkan Oleh Issued by	Masa Berlaku Hingga Validity period Until
20 April 2017	ISO 14001: 2015	SUCOFINDO	19 April 2020

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility in Employment, Occupational Health and Safety

Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan menyadari pentingnya peran dari pegawai, maka dari itu Perusahaan mewujudkan mengimplementasikannya pada sebuah tanggung jawab sosial yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Di mana di dalamnya meliputi praktik terbaik atas pengelolaan SDM, jaminan kesehatan bagi karyawan, persamaan hak dan kesempatan kerja, sarana dan sosialisasi keselamatan kerja, tingkat kecelakaan kerja serta pendidikan dan pelatihan.

Bagi Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang mendalam guna menjaga keberadaan bisnis Perusahaan dalam bidang konstruksi. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap K3 terdiri dari kesetaraan di tempat kerja, praktik kesehatan dan keselamatan kerja, serta sistem manajemen mutu K3 dan lingkungan. Hal tersebut juga disesuaikan dengan regulasi terkait K3 yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pedoman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Perusahaan secara khusus diatur dalam Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SM-K3L). Pedoman tersebut telah ditinjau dan disahkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan No. 496/DIRUT-I/KDRST/07/2015 tanggal 6 Juli 2015. Pedoman tersebut memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi:

1. Organ pengelola K3L;
2. Standar dan pemenuhan aspek kesehatan pegawai;
3. Standar pemeliharaan peralatan operasional dan pendukung operasional kerja;
4. Pelatihan keselamatan kerja dan mitigasi risiko terhadap kecelakaan kerja melalui kegiatan identifikasi bahaya kecelakaan;
5. Penyediaan alat perlindungan diri;
6. Analisis kecelakaan kerja dan statistik;
7. Prosedur tanggap darurat;
8. Sistem izin kerja; dan
9. Program manajemen keselamatan sub kontraktor.
10. Standar dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk perhatian yang besar, Perusahaan memiliki unit khusus di bidang Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) yang secara khusus memiliki tugas dalam melakukan pemantauan, pencegahan, pengukuran dan penanggulangan atas potensi risiko kecelakaan kerja. Bagan struktur organ K3L Kantor Pusat sampai dengan dan Divisi adalah sebagai berikut:

Commitments and Policies

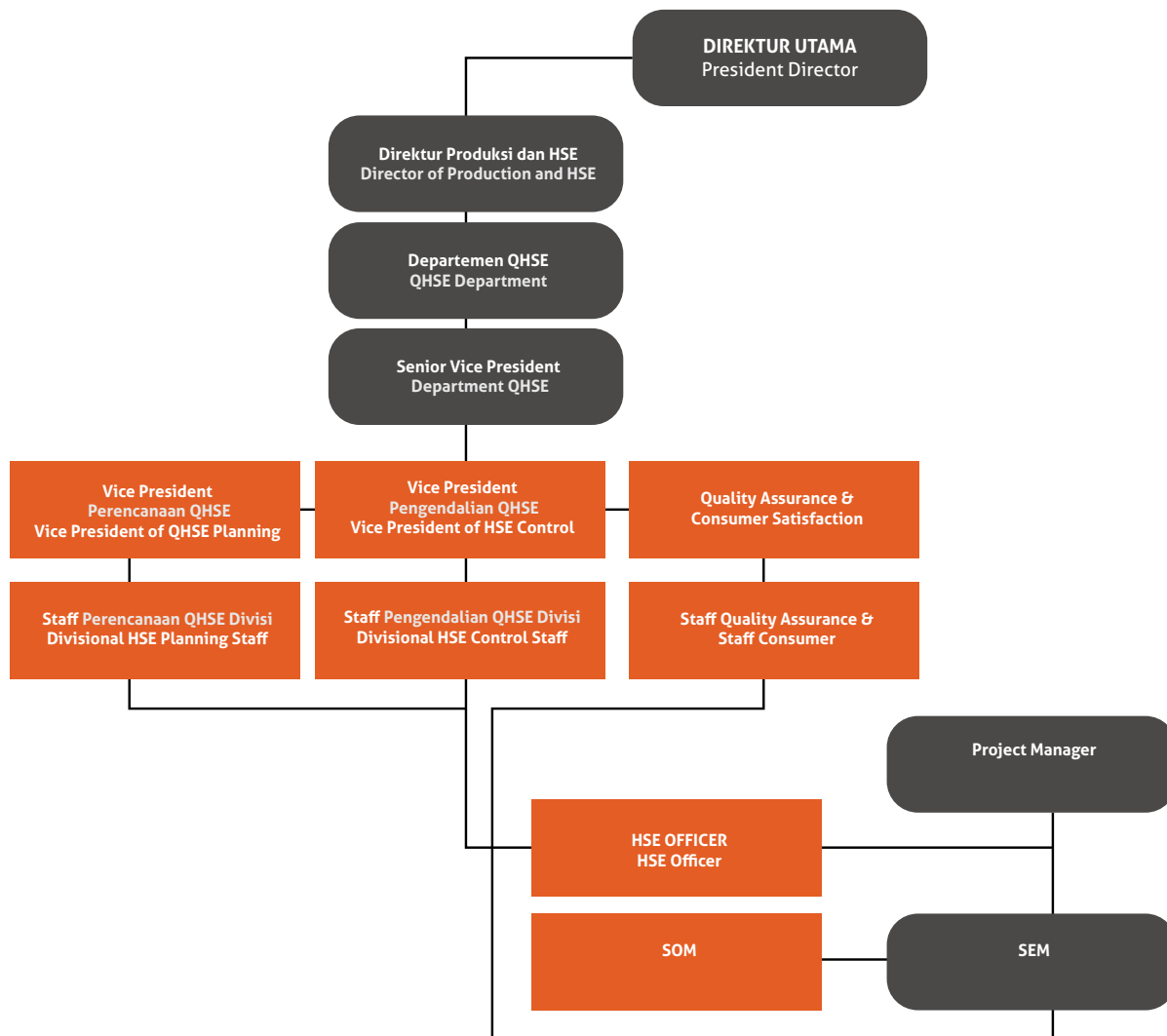
The Company realizes the importance of the role of employees, therefore the Company realizes its implementation in a social responsibility related to employment, occupational health and safety. This includes best practices in human resource management, health insurance for employees, equal rights and work opportunities, facilities and socialization of work safety, occupational accident rates and education and training.

For the Company, occupational safety and health has a deep role to maintain the Company's business presence in the construction sector. The form of corporate responsibility towards OSH consists of equality in the workplace, occupational health and safety practices, as well as OHS and environmental quality management systems. This is also adjusted to the applicable K3-related regulations, namely Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health.

Guidelines for the implementation of occupational safety and health in the Company's environment are specifically regulated in the Occupational and Environmental Health and Safety Management System Manual (SM-K3L). The guidelines have been reviewed and approved by the President Director through Decree No. 496/DIRUT-I/KDRST/07/2015 dated 6 July 2015. The guidelines contain Standard Operating Procedures (SOP) which include:

1. HSE management organ;
2. Standards and fulfillment of employee health aspects;
3. Standards for maintaining operational equipment and supporting work operations;
4. Work safety training and risk mitigation of work accidents through accident hazard identification activities;
5. Provision of personal protective equipment;
6. Accident analysis and statistics;
7. Emergency response procedures;
8. Work permit system; and
9. Sub contractor safety management program.
10. Standards and compliance with laws and regulations.

As a form of great concern, the Company has a special unit in the field of Occupational Health, Security and Safety (K3) which specifically has the task of monitoring, preventing, measuring and overcoming the potential risks of work accidents. The HSE organ structure chart from Head Office to Regions and Divisions is as follows:



Rencana dan Target Kegiatan serta Realisasinya di Tahun 2021

Tahun 2021, Perusahaan menekankan K3 sebagai fokus dalam pengembangan bisnis jasa konstruksi yang dijalankan. Perusahaan akan menerapkan K3 sebagai pengendalian mutu dalam pelaksanaan proyek. Beberapa program dan agenda sebagai rencana penerapan K3 adalah:

1. Sosialisasi SM-MK3L di unit kerja/proyek.

Menetapkan tata cara komunikasi, konsultasi, dan partisipasi HSE yang baik dan terarah sesuai dengan kebijakan HSE. Dengan pedoman referensi dari ISO 9001 Tahun 2015 tentang Quality Management System element 2.1.1 Clause 7.4 tentang Komunikasi; ISO 14001 Tahun 2015 tentang Environmental Management System element 2.2.1 Clause 7.4 tentang Komunikasi; ISO 45001 Tahun 2018 Occupational Health and Safety Management System element 2.4.1 Clause 7.4 tentang Komunikasi; ISO 37001 Tahun 2016 tentang Anti-Bribery Management System element 2.4.1 Clause 8.4 tentang Pengendalian Non Keuangan;

Activity Plans and Targets and Their 2021 Realization

In 2021, the Company emphasizes K3 as a focus in developing the construction services business that it operates. The company will implement K3 as quality control in project implementation. Several programs and agendas as plans for implementing OHS are:

1. Socialization of SM-MK3L in work units/projects.

Establish good and directed procedures for HSE communication, consultation, and participation in accordance with HSE policies. With reference guidelines from ISO 9001 Year 2015 regarding Quality Management System element 2.1.1 Clause 7.4 concerning Communication; ISO 14001 Year 2015 concerning Environmental Management System element 2.2.1 Clause 7.4 concerning Communication; ISO 45001 Year 2018 Occupational Health and Safety Management System element 2.4.1 Clause 7.4 concerning Communication; ISO 37001 Year 2016 concerning Anti-Bribery Management System element

UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja element 2.6.1 Bab V-Pasal 9; PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 element 2.6.1 Sub Elemen 2.4 informasi K3. Kegiatan pengendalian ini mencakup tata cara komunikasi, konsultasi, partisipasi, dan informasi HSE, meliputi:

2.4.1 Clause 8.4 concerning Non-Financial Control; Law No.1 Year 1970 concerning Occupational Safety element 2.6.1 Chapter V-Article 9; PP No. 50 of 2012 concerning the Implementation of SMK3 element 2.6.1 Sub Element 2.4 OHS information. These control activities include procedures for HSE communication, consultation, participation, and information, including:

Kick off Meeting	Rapat pembahasan peraturan proyek dan ruang lingkup Pekerjaan sub-kontraktor dan mandor sebelum memulai pekerjaan di proyek.
HSE Induction	Kegiatan untuk menunjukan dan menjelaskan tentang kondisi bahaya yang timbul di area kerja. Tindakan pengamanan dan alat perlindungan yang diwajibkan serta sikap amkan yang harus dilakukan di area proyek
Daily Toolbox Talk	Rapat/pertemuan yang dilaksanakan sebelum memulai pekerjaan untuk menyampaikan rencana kerja kepada tenaga kerja. Meliputi perintah kerja, potensi bahaya, cara penanggulangan dan alat perlindungan yang wajib digunakan.
Weekly Toolbox Talk Meeting	Kegiatan yang dilaksanakan setiap sabtu minggu dan wajib dihadiri oleh seluruh personil proyek (PT Nindya Karya, Sub Kontraktor, Mandor dan pekerja) untuk menyampaikan rencana kerja kepada tenaga kerja, meliputi perintah kerja, potensi bahaya, cara penanggulangan dan alat perlindungan yang wajib digunakan.
Papan Informasi HSE	Media yang digunakan untuk memberikan informasi terkait HSE; Statistik HSE, Risiko pekerjaan, peringatan keselamatan pada minggu berikutnya.
Laporan Sumber Bahaya	Media bagi karyawan dan pekerja dalam melaporkan kegiatan bahaya atau keadaan bahaya yang terlihat di area kerja. Laporan Sumber Bahaya merupakan bagian dari partisipasi karyawan dan pekerja dalam implementasi HSE
Rapat P2K3	Kegiatan rapat yang dilakukan secara rutin dan dihadiri oleh ketua P2K3 dan/atau wakil ketua P2K3 dan/atau Sekretaris P2K3 dan Anggota P2K3. Ketentuan rapat P2K3 terdapat dalam prosedur tentang P2K3

2. Peningkatan Komitmen implementasi HSE sesuai dengan siklus Plan, Do, Check & Action (PDCA).
3. Pelatihan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, serta ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta SMK3 PP 50 Tahun 2012. Perseroan juga senantiasa melakukan pelatihan dan pengembangan keahlian para auditor.

2. Increased commitment to HSE implementation in accordance with the Plan, Do, Check & Action (PDCA) cycle.
3. Training on ISO 9001:2015 on Quality Management System, ISO 14001:2015 on Environmental Management System, as well as ISO 45001:2018 on Occupational Health and Safety Management System and SMK3 PP 50 of 2012. The Company also continuously conducts training and expertise development for auditors.

Program dan Kegiatan Terkait Ketenagakerjaan

Kesetaraan Gender, Kesempatan Kerja yang Sama, dan Pengembangan Karier

Perusahaan senantiasa berupaya memenuhi dalam bidang ketenagakerjaan dengan menjalankan aspek kesetaraan dan kesempatan kerja sesuai pada kepantasan yang mengacu pada regulasi yang berlaku. Perusahaan tidak melihat pemenuhan kesetaraan dan kesempatan dengan latar belakang gender maupun SARA. Beberapa bentuk implementasi lainnya oleh Perusahaan dalam merepresentasikan prinsip kesetaraan, antara lain diwujudkan melalui:

1. Pemberian imbal jasa pekerja yang sesuai dengan jenjang karier, tanggung jawab serta kompetensi.
2. Kesempatan yang sama bagi karyawan dalam mengembangkan kariernya.
3. Kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi jabatan.

Employment-Related Programs and Activities

Gender Equality, Equal Employment Opportunities, and Career Development

The company always strives to fulfill in the field of employment by carrying out aspects of equality and employment opportunities in accordance with appropriateness which refers to the applicable regulations. The company does not see the fulfillment of equality and opportunity with a gender or SARA background. Several other forms of implementation by the Company in representing the principle of equality, among others, are realized through:

1. Provision of employee benefits in accordance with career paths, responsibilities and competencies.
2. Equal opportunities for employees in developing their careers.
3. Opportunity to receive training in the context of developing job competencies.

Perusahaan membuka seluas-luasnya bagi insan Nindya Karya yang berprestasi tanpa memandang latar belakang gender ataupun Suku, Agama, dan Ras (SARA). Di tahun 2021, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 720 orang, yang terdiri dari 561 orang karyawan laki-laki dan 159 orang karyawan perempuan. Komposisi ini menunjukkan keterbukaan Perusahaan terhadap rekrutmen karyawan tanpa memandang gender.

The company opens the widest possible opportunity for Nindya Karya people who excel regardless of gender or ethnicity, religion, and race (SARA) background. In 2021, the Company's employees will reach 720 people, consisting of 561 male employees and 159 female employees. This composition shows the Company's openness to employee recruitment regardless of gender.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (Orang)

Employee Composition Based On Gender (People)

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Karyawan Number Of Employees		Kenaikan Increase	
	2021	2020	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Laki-laki Male	561	531	30	55,6%
Perempuan Female	159	135	24	44,4%
Jumlah Total	720	666	54	100,00%

Perusahaan memberikan hak kepada pekerja perempuan berupa hak dasar pekerja, hak kesempatan pengembangan karier dalam perusahaan. Selain itu perusahaan juga memberikan hak-hak perempuan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

The company provides rights to women workers in the form of basic worker rights, the right to career development opportunities in the company. In addition, the company also provides women's rights according to the Manpower Act.

Pemenuhan Hak Kesejahteraan Karyawan

Keberhasilan dan kemajuan Perusahaan merupakan hasil kerja bersama antara harapan Pemegang Saham, bentuk penasihat dan penyeimbang performance dari Dewan Komisaris dan pengelola yang diwakili oleh Manajemen dengan dukungan utama oleh Insan Nindya Karya. Oleh karena itu, Perusahaan terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan guna meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan. Pemenuhan kesejahteraan karyawan Perusahaan berupa gaji dan upah di tahun 2021 sebesar Rp720 miliar, meningkat 8,11% dibandingkan jumlah gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan tahun 2020 sebesar Rp666 miliar.

Fulfillment of Employee Welfare Rights

The success and progress of the Company is the result of joint work between the expectations of the Shareholders, the form of advisory and balancing performance from the Board of Commissioners and the manager represented by the Management with the main support from the Insan Nindya Karya. Therefore, the Company continues to be committed to improving employee welfare in order to increase employee performance motivation and loyalty to the Company. Fulfillment of the Company's employee welfare in the form of salaries and wages in 2021 amounting to Rp720 billion, an increase of 8.11% compared to the total salaries and wages provided to employees in 2020 of Rp666 billion.

Gaji dan Upah

Salary and Wages

Uraian Description	(Rp Miliar) (Rp Billion)		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	2021	2020	Selisih (Rp Miliar) Difference (Rp Billion)	Persentase Percentage (%)
Gaji dan Upah Salary and Wages	63,4	62,7	0,7	1,1%

Pemenuhan kesejahteraan yang dibayarkan Perusahaan kepada karyawan pada tabel diatas menunjukkan komitmen Perusahaan untuk dapat tumbuh Bersama karyawan sejalan dengan kegiatan usaha dan nilai ekonomi Perusahaan yang mengalami perkembangan setiap tahun.

The fulfillment of the welfare paid by the Company to employees in the table above shows the Company's commitment to be able to grow with employees in line with the Company's business activities and economic values which develop every year.

Sebagai bagian dari transparansi informasi, berikut disampaikan rasio gaji/remunerasi tertinggi dan terendah per bulan yang menggambarkan jenjang gaji/remunerasi yang diberlakukan Perusahaan.

As part of the transparency of information, the following is the ratio of the highest and lowest salary/remuneration per month which describes the level of salary/remuneration applied by the Company.

Rasio Gaji/Remunerasi Tertinggi dan Terendah per Bulan
Highest and Lowest Salary/Remuneration Ratio per Month

Rasio Gaji/Remunerasi Salary Remuneration Ratio	Skala Perbandingan Comparison Scale	
	2021	2020
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest employee salaries	1:0,08	1:0,07
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest salaries of the Board of Directors	1:1,39	1:1,28
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest salary of the Board of Commissioners	1:0,66	1:0,61
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan karyawan tertinggi The highest salary ratio of the Board of Directors and the highest employee	1:0,37	1:0,35

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Kepala Departemen sementara karyawan terendah adalah Staf.

The highest employee referred in the table above is the Head of the Department while the lowest employee is the Staff.

Apresiasi

Setiap karyawan Perusahaan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan penghargaan dari Perusahaan atas dasar prestasi dan kinerja tanpa adanya diskriminasi. Penghargaan karyawan tersebut antara lain penghargaan Dwi Windu, Tri Windu, Tri Dasawarsa, serta penghargaan Kinerja Karyawan.

Appreciation

Every employee of the Company has the same opportunity to receive an award from the Company on the basis of achievement and performance without any discrimination. The employee awards include the Dwi Windu, Tri Windu, Tri Dasawarsa awards, as well as the Employee Performance award.

Pembentukan Lingkungan Kerja yang Kondusif

Perusahaan memberikan kesempatan seluasluasnya bagi karyawan untuk membentuk komunitas dengan kegiatan di luar waktu kerja. Berbagai komunitas yang aktif mencakup kegiatan olahraga seperti yoga; kegiatan hobi seperti Nindya Gowes, Paduan Suara, dan Nindya Rider; dan kegiatan keagamaan seperti Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) Komisariat PT Nindya Karya (Persero). Adanya komunitas di luar waktu kegiatan kerja diharapkan mampu membentuk hubungan non struktural di antara karyawan, yang pada akhirnya akan menciptakan pembentukan lingkungan kerja yang kondusif.

Establishing a Conducive Work Environment

The company provides the widest opportunity for employees to form a community with activities outside of work time. Active communities include sports activities such as yoga; hobby activities such as Nindya Gowes, Choir, and Nindya Rider; and religious activities such as the Islamic Da'wah Coordinating Board (BKDI) Commissariat of PT Nindya Karya (Persero). The existence of a community outside of work activities is expected to be able to form non-structural relationships among employees, which in turn will create a conducive work environment.

Turnover Karyawan

Rasio turnover karyawan dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perusahaan. Selain itu, tingkat turnover karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Employee Turnover

The employee turnover ratio reflects the productivity of the Company's performance. In addition, the employee turnover rate is also a reflection of the Company's culture and work system which can be an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment.

Perhitungan rasio turnover adalah sebagai berikut:

The calculation of the turnover ratio is as follows:

Penyebab Reason	2021	2020
Pensiun alami Natural retirement	5	4
Pensiun dini Early retirement	0	0
Meninggal Die	2	3
Mengundurkan diri Resign	23	54
Diberhentikan karena melakukan pelanggaran Dismissed for committing a violation	0	0
Jumlah karyawan yang keluar Number of employees leaving	103	466
Jumlah karyawan yang masuk Number of incoming employees	157	156
Jumlah karyawan di awal tahun Number of employees at the beginning of the year	666	979
Jumlah karyawan di akhir tahun Number of employees at the end of the year	720	666
Persentase Turnover Turnover Percentage	14,86%	56,66%

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat karyawan, menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

Terwujudnya hubungan yang berkeadilan dan komunikasi yang hangat antara Pemegang Saham yang diwakili oleh Manajemen dengan Pekerja merupakan aset terpenting bagi Perusahaan dan menjadi hubungan prioritas dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

Perusahaan membangun hubungan industrial melalui jaminan keberadaan serikat pekerja di lingkungan kerja Perusahaan sebagai bagian dari hak berserikat karyawan. Serikat pekerja di lingkungan Perusahaan bernama Serikat Pekerja Nindya Karya yang berdiri sejak 17 Maret 1999.

Seluruh karyawan yang bekerja di Perusahaan beserta entitas dan unit usahanya yang dengan sekaligus telah menjadi anggota serta memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam AD/ART Serikat Pekerja Nindya Karya. Dengan demikian jumlah anggota Serikat Pekerja Nindya Karya berbanding lurus dengan jumlah karyawan Perusahaan, atau dengan persentase 100%.

Freedom of Association and Assembly: Trade Unions and Industrial Relations

Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety, as well as Collective Labor Agreements (PKB) between management and employee unions, serve as a reference for all employment policies to ensure compliance with applicable laws and minimize violations of human rights in employment relationships.

The realization of a fair relationship and warm communication between Shareholders represented by Management and Employees are the most important assets for the Company and become a priority relationship in achieving the Company's vision and mission.

The Company builds industrial relations by guaranteeing the existence of a labor union in the Company's work environment as part of the employee's right to associate. The labor union within the Company is called the Nindya Karya Workers Union which was established on March 17, 1999.

All employees who work in the Company and its entities and business units who at the same time have become members and fulfill all the requirements specified in the AD/ART of the Nindya Karya Workers Union. Thus, the number of members of the Nindya Karya Labor Union is directly proportional to the number of employees of the Company, or with a percentage of 100%.

Hingga akhir tahun 2021, tercatat tidak ada kasus atau perkara yang melibatkan antara Perusahaan dengan karyawan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan berhasil melakukan pengelolaan hubungan industrial antara karyawan dan Perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama

Seluruh karyawan Perusahaan dilindungi oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang ditandatangani oleh pihak Manajemen dan Perhimpunan Pegawai. PKB mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. PKB diperbarui melalui perundingan dan disepakati Bersama setiap 2 (dua) tahun sekali. PKB tersebut telah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.280/PHIJSK-PK/PKB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Nindya Karya (Persero) dengan Serikat Pekerja Nindya Karya (SPNK) periode 2019-2021.

PKB Perusahaan mengatur hal-hal di antaranya:

1. Penerimaan dan pengangkatan karyawan
2. Hari kerja dan jam kerja
3. Kewajiban dan hak karyawan
4. Perawatan dan pengobatan
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja
7. Pembinaan dan pengembangan serta peningkatan karier karyawan
8. Penghargaan karyawan
9. Penyelesaian masalah dan keluhan kesah
10. Pemutusan hubungan kerja dan pembebasan tugas Karyawan

Survei Kepuasan Karyawan

Perusahaan melakukan survei keterikatan dan kepuasan karyawan untuk dapat memetakan harapan karyawan saat bekerja di bawah system yang diberlakukan.

Survei keterikatan dan kepuasan karyawan dilakukan dengan mengadaptasi alat ukur Employee Engagement berdasar Gallup Theory, Munawir dan beberapa perihal tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan Internal. Indikator keterikatan dibagi dalam 40 item pertanyaan, 20 item pertanyaan mengukur kepuasan karyawan. Total item pernyataan yang digunakan dalam survei ini adalah 60 item. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner survei ini adalah skala interval 5 point Likert scale meliputi:

Derajat Keterikatan/Kepuasan Degree of Engagement/Satisfaction	Nilai Interval Score Interval
Engaged	525 Orang/People (93,47%)
Not Engaged	37 Orang/People (6,53%)
Disengaged	0 Orang/People (0%)

Until the end of 2021, there were no cases or cases involving the Company and employees that had a significant impact on the financial performance and operational performance of the Company. This shows that the Company has succeeded in managing industrial relations between employees and the Company.

Collective Labor Agreement

All of the Company's employees are protected by a Collective Labor Agreement (PKB), which is signed by the Management and the Employee Association. The CLA includes the rights and obligations of each party. The CLA is renewed through negotiations and mutually agreed upon every 2 (two) years. The PKB has been registered with the Ministry of Manpower through the Decree of the Director General of Industrial Relations and Social Security for Workers No. KEP.280/PHIJSK-PK/PKB/XII/2019 dated December 31, 2019 regarding the Collective Labor Agreement between PT Nindya Karya (Persero) and the Nindya Karya Workers Union (SPNK) for the 2019-2021 period.

The Company's CLA regulates matters including:

1. Recruitment and appointment of employees
2. Working days and working hours
3. Obligations and rights of employees
4. Care and treatment
5. Occupational safety and health
6. Social security and labor welfare
7. Coaching and development and career improvement of employees
8. Employee awards
9. Problem solving and complaints
10. Termination of employment and release of employee duties

Employee Satisfaction Survey

The company conducts employee engagement and satisfaction surveys to be able to map employee expectations when working under the system in place.

The employee engagement and satisfaction survey was carried out by adapting the Employee Engagement measurement tool based on Gallup Theory, Munawir and several additional matters tailored to internal needs. The engagement indicator is divided into 40 question items, 20 question items measure employee satisfaction. The total statement items used in this survey are 60 items. The measurement scale used in this survey questionnaire is a 5-point Likert scale interval scale which covers:

Keterikatan karyawan terhadap Perusahaan didefinisikan menjadi 13 aspek yang representative mengukur hal tersebut. Ketiga belas aspek tersebut di antaranya adalah:

Employee engagement with the Company is defined as 13 aspects that are representative of measuring this. These thirteen aspects include:

Aspek Keterikatan Karyawan Employee Engagement Aspect	Jumlah (Nilai Keterikatan Karyawan) Total (Employee Engagement Value)
Umpan Balik & Supervisi Atasan Superior Feedback & Supervision	79,67%
Kesempatan Berkembang Growth Opportunity	71,86%
Teamwork & Rekan Kerja Teamwork & Coworkers	80,16%
Keseimbangan Kerja Work Balance	79,13%
Kesetaraan Equality	79,15%
Misi & Tujuan Mission & Goals	82,42%
Keinginan Dihargai Wishes Appreciated	77,14%
Kompensasi & Tunjangan Kesejahteraan Compensation & Welfare Benefits	65,62%
Tempat Kerja & Sumber Daya Workplace & Resources	79,67%
Kinerja & Akuntabilitas Performance & Accountability	79,22%
Komunikasi Communication	78,73%
Persepsi Individu Individual Perception	81,13%
Pengembangan Kompetensi Competency Development	71,58%
NILAI KETERIKATAN KARYAWAN EMPLOYEE ENGAGEMENT VALUE	77,41%

Hasil survei keterikatan dan kepuasan karyawan di tahun 2021 diuraikan sebagai berikut ini.

The results of the employee engagement and satisfaction survey in 2021 are described as follows.

Tabel Keterikatan Karyawan terhadap Perusahaan
Table of Employee Engagement to the Company

Aspek Keterikatan Karyawan Employee Engagement Aspect	Karyawan Employee
Umpan Balik & Supervisi Atasan Superior Feedback & Supervision	3,98
Kesempatan Berkembang Growth Opportunity	3,59
Teamwork & Rekan Kerja Teamwork & Coworkers	4,01
Keseimbangan Kerja Work Balance	3,96
Kesetaraan Equality	3,96
Misi & Tujuan Mission & Goals	4,12
Keinginan Dihargai Wishes Appreciated	3,86
Kompensasi & Tunjangan Kesejahteraan Compensation & Welfare Benefits	3,28
Tempat Kerja & Sumber Daya Workplace & Resources	3,98
Kinerja & Akuntabilitas Performance & Accountability	3,96
Komunikasi Communication	3,94
Persepsi Individu Individual Perception	4,06
Pengembangan Kompetensi Competency Development	3,58
RATA-RATA AVERAGE	3,87

Berdasarkan data keseluruhan yang terdapat pada tabel Keterikatan Karyawan terhadap Perusahaan tahun 2021 didapati total nilai rata-rata sebesar 3,87 dengan Nilai Employee Engagement Index (EEL) sebesar 77,41%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan karyawan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap Perusahaan. Terutama pada aspek/indikator misi & tujuan mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,12 dengan nilai EEL sebesar 82,42% hal ini menunjukkan bahwa karyawan merasa harus bersatupadu mewujudkan misi dan tujuan bersama demi kemajuan Perusahaan. Selain itu pada aspek/indikator kompensasi & tunjangan kesejahteraan mendapatkan nilai rata-rata terendah sebesar 3,28 dengan nilai EEL sebesar 65,62%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan masih memiliki keterikatan yang cukup terhadap Perusahaan, karena karyawan merasa cukup dalam menerima gaji untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta merasa gaji yang diterima cukup kompetitif dibandingkan perusahaan lain dengan posisi yang sama.

Rata-Rata Keseluruhan Terkait Keterikatan Karyawan
Overall Average Related To Employee Engagement

Rata-Rata Keseluruhan Terkait Keterikatan Karyawan Overall Average Of Employee Engagement	Jumlah Total
Kepuasan Terhadap Pekerjaan Job Satisfaction	3,89
Kepuasan Terhadap Imbalan/Gaji/Upah Satisfaction with Rewards/Salary/Wages	3,27
Kepuasan Terhadap Supervisi Atasan Satisfaction with Supervisor Supervision	3,93
Kepuasan Terhadap Rekan Kerja Satisfaction with Coworkers	4,04
Kepuasan Terhadap Kesempatan Promosi Satisfaction with Promotion Opportunities	3,38

Berdasarkan data keseluruhan yang terdapat pada tabel Kepuasan Karyawan terhadap Perusahaan tahun 2021 didapati total nilai rata-rata sebesar 3,70. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan karyawan memiliki kepuasan yang tinggi terhadap Perusahaan. Terutama pada indikator/aspek kepuasan terhadap rekan kerja yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,04. Hal ini menunjukkan bahwa sangat baiknya kerjasama karyawan dalam menyelesaikan/mencapai target pekerjaan serta hubungan sesama karyawan yang saling menghormati serta suasana kekeluargaan dalam bekerja yang terbina dengan baik serta Perusahaan juga menciptakan tempat kerja yang nyaman dan sehat.

Selain itu pada aspek gaji/upah menunjukkan bahwa karyawan memiliki kepuasan yang tinggi terhadap gaji/upah yang diterimanya, karena karyawan merasa perusahaan telah memberikan gaji/upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah memenuhi janji kenaikan gaji/upah yang telah disepakati serta karyawan merasa cukup atas gaji/upah yang diberikan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

Based on the overall data contained in the table of Employee Engagement to the Company in 2021, it was found that the total average value was 3.87 with an Employee Engagement Index (EEL) value of 77.41%. This shows that overall employees have a high attachment to the Company. Especially in the aspects/indicators of mission & goals, the highest average score of 4.12 with an EEL value of 82.42% shows that employees feel they have to work together to realize a common mission and goals for the progress of the Company. In addition, the aspects/indicators of compensation & welfare benefits get the lowest average score of 3.28 with an EEL value of 65.62%. This shows that employees still have sufficient attachment to the Company, because employees feel that they are sufficient in receiving a salary to meet their daily needs, and feel that the salary received is quite competitive compared to other companies with the same position.

Based on the overall data contained in the table of Employee Satisfaction with the Company in 2021, it was found that the total average value was 3.70. This shows that overall employees have high satisfaction with the Company. Especially on the indicators/aspects of satisfaction with colleagues who get the highest average score of 4.04. This shows that the cooperation between employees is very good in completing/achieving work targets as well as mutual respect among employees and a family atmosphere at work that is well-developed and the Company also creates a comfortable and healthy workplace.

In addition, the salary/wages aspect shows that employees have high satisfaction with the salaries/wages they receive, because employees feel that the company has provided salaries/wages in accordance with applicable regulations, has fulfilled the promise of an agreed salary/wages increase and employees feel sufficient for the salary/wages provided by the Company to meet the needs of his family's life.

Program dan Kegiatan Terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pembentukan P2K3

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan membentuk panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan organisasi ini mengacu kepada peraturan Menteri tenaga Kerja No. PER.04/MeN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli Keselamatan Kerja.

P2K3 merupakan badan pembantu yang merupakan wadah kerja sama antara perusahaan dan karyawan untuk mengembangkan kerja sama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keberadaan P2K3 di antaranya untuk mengimplementasi Kebijakan Sistem Manajemen PT Nindya Karya (Persero) bersamaan dengan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan menyediakan tempat kerja yang aman, memperhatikan perlindungan kesehatan untuk semua karyawan dan sub-kontraktor dan menghindari kerusakan lingkungan selama proses produksi di lingkungan PT Nindya Karya (Persero). Selain itu, P2K3 juga memberikan perhatian khusus kepada kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan

Perusahaan telah menyiapkan standar Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan standar Mutu ISO 9001:2015, dan SMK3 PP No. 50 Th.2012, ISO 14001:2015 serta Sistem Manajemen Lingkungan dengan Standar ISO 14001:2015. Selain itu, Perusahaan juga memiliki sertifikat atas penerapan SM-Mutu yang terintegrasi dengan SMK3 dan ISO 45001:2018 dan Lingkungan ISO 14001 telah diberikan oleh Badan Sertifikasi kepada Perusahaan untuk ruang lingkup Kantor Pusat dan seluruh Divisi, dan terus menerus di-review baik secara Internal & oleh eksternal/Badan Sertifikasi secara berkesinambungan serta dilakukan pembaruan.

Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Karyawan yang bertugas di bidang K3 telah mengikuti program-program sertifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan badan sertifikasi lainnya. Para karyawan K3 tersebut melakukan pengawasan, inspeksi, dan edukasi setiap hari kepada karyawan lainnya.

Programs and Activities Related to Occupational Health and Safety

Formation of P2K3

As a business entity that is committed to complying with occupational safety and health norms as well as applicable laws and regulations in Indonesia, the Company has formed an Occupational Safety and Health Committee (P2K3). The formation of this organization refers to the regulation of the Minister of Manpower No. PER.04/MeN/1987 concerning the Committee for the Trustees of Occupational Safety and Health and the procedures for appointing Occupational Safety experts.

P2K3 is an auxiliary agency which is a forum for cooperation between companies and employees to develop cooperation in the application of occupational safety and health. The existence of P2K3 includes implementing the Management System Policy of PT Nindya Karya (Persero) together with the Occupational Safety & Health Management System and Environmental Management System, preventing work accidents and occupational diseases by providing a safe workplace, paying attention to health protection for all employees and sub-contractors and avoiding environmental damage during the production process at PT Nindya Karya (Persero). In addition, P2K3 also pays special attention to compliance with applicable government regulations regarding Occupational Safety & Health and the Environment.

Quality and Environmental Management System

The company has prepared Quality, Occupational Health & Health and Environment standards that are integrated with the Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 9001:2015 Quality standards, and SMK3 PP No. 50 Year 2012, ISO 14001:2015 and Environmental Management System with ISO 14001:2015 Standard. In addition, the Company also has a certificate for the implementation of SM-Quality which is integrated with SMK3 and ISO 45001:2018 and the ISO 14001 Environment has been given by the Certification Body to the Company for the scope of the Head Office and all Divisions, and is continuously reviewed both internally & by external/Certification Bodies on an ongoing basis and updated.

Occupational Safety and Health Certification

Employees assigned to K3 have participated in certification programs from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and other certification bodies. These K3 employees carry out daily supervision, inspection, and education to other employees.

Tabel Sertifikasi Mutu
Quality Certification Table

No.	Nama Name	Unit Kerja Work Units	Jenis Pembinaan Types Of Development	Modul Pembinaan Module Of Administrative Management	Penyelenggara Organizer	
1	Enzo Cahya Augusdiano	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan Training	III.14	Pelatihan BIMTEK SMKK PUPR Petugas Keselamatan Konstruksi Training for BIMTEK SMKK PUPR Construction Safety Officer	PT Kualitas Indonesia Sistem
2	Devy Muthia Oja	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan Training	III.14	Pelatihan BIMTEK SMKK PUPR Petugas Keselamatan Konstruksi Training for BIMTEK SMKK PUPR Construction Safety Officer	PT Kualitas Indonesia Sistem
3	Satriyo Fajar Dewantoro	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan Training	III.14	Pelatihan BIMTEK SMKK PUPR Petugas Keselamatan Konstruksi Training for BIMTEK SMKK PUPR Construction Safety Officer	PT Kualitas Indonesia Sistem
4	Bunga Natalia Hutaeruk	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	XI.12	Pelatihan dan Sertifikasi Nasional Certified Risk Management Officer (CRMO Level II)-ISO 31000 COSO National Certified Risk Management Officer (CRMO Level II) Training and Certification-ISO 31000 COSO	LSPMR
5	Tegar Prahananto	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.2	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi Training and Certification of Associate K3 Construction Experts	PT Ashindo Tama
6	Hendri Ferdian	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.2	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi Training and Certification of Associate K3 Construction Experts	PT Ashindo Tama
7	Mulyadi	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.2	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi Training and Certification of Associate K3 Construction Experts	PT Ashindo Tama
8	Herdi	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.2	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi Training and Certification of Associate K3 Construction Experts	PT Ashindo Tama
9	Herlianto	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.2	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi Training and Certification of Associate K3 Construction Experts	PT Ashindo Tama
10	Eko Hari Junanda	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.2	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi Training and Certification of Associate K3 Construction Experts	PT Ashindo Tama
11	Satriyo Fajar Dewantoro	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan Training	III.15	Quality and Reability Engineering	Yayasan Komunitas Teknik Industri Indonesia
12	Nur Fitria Permatasari	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan Training	III.15	Quality and Reability Engineering	Yayasan Komunitas Teknik Industri Indonesia
13	Hana Fajrianti	Departemen QHSE QHSE Department	Pelatihan Training	IX.1	Lead Auditor ISO 45001 2018 IRCA	Sucofindo
14	Sandi Okta Prayogo	Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure 1 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
15	Yossi Dwi Aryono	Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure 1 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
16	Mardani Ikhsan	Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure 1 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
17	Hasanudin	Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure 1 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara

No.	Nama Name	Unit Kerja Work Units	Jenis Pembinaan Types Of Development		Modul Pembinaan Module Of Administrative Management	Penyelenggara Organizer
18	Akhmad Fanani	Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure 1 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
19	Muh. Rahmat Mustari	Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure 1 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
20	Dicky Ragil Patra	Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure 1 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
21	Juhidden Jaingot Samosir	Divisi Infrastruktur 1 Infrastructure 1 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
22	Fahrizal Harahap	Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure 2 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
23	Sumantri Panji	Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure 2 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
24	Eka Saputra	Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure 2 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
25	Andi Pallawarukka	Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure 2 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
26	Ganda Piraliyandi	Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure 2 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
27	Radief Jatmiko	Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure 2 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
28	Eko Hari Junanda	Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure 2 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
29	Rahmatsyah Putra S	Divisi Infrastruktur 2 Infrastructure 2 Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
30	Andi Asmar	Divisi Gedung Building Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
31	Made Artawante	Divisi Gedung Building Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
32	Wayan Badra	Divisi Gedung Building Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
33	Panji Prayoga	Divisi Gedung Building Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
34	Andi Prasetyo	Divisi Gedung Building Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara

No.	Nama Name	Unit Kerja Work Units	Jenis Pembinaan Types Of Development	Modul Pembinaan Module Of Administrative Management	Penyelenggara Organizer	
35	Reza Bhakti	Divisi Gedung Building Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
36	Achmad Rizky Irsyad	Divisi Gedung Building Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
37	Didin Hermawan	Divisi EPC EPC Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara
38	Taufik Firmansyah	Divisi EPC Building Division	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	III.12	Training P3K Sertifikasi BNSP BNSP Certification First Aid Training	PT Surya Safety Nusantara

Kontrol Perusahaan terhadap Sub-Kontraktor dan Pemasok Terkait Persyaratan K3

Perusahaan memiliki kebijakan khusus bagi sub-kontraktor dan pemasok terkait persyaratan dan standarisasi K3 atas pekerjaan/produk dan jasa yang diberikan oleh setiap sub-kontraktor dan pemasok. Sesuai Surat Edaran Direktur Produksi dan HSE No. 0155/DPH/SE/KDEH/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengendalian Subkontraktor, Supplier, dan Penyedia Tenaga Kerja di Proyek, Perusahaan memastikan seluruh sub-kontraktor dan pemasok untuk:

1. Memastikan komitmen terhadap K3.
2. Sosialisasi tentang syarat kompetensi personel dan kelayakan alat.
3. Melaksanakan seleksi untuk memastikan bahwa kompetensi personel subkon, supplier dan penyedia tenaga kerja telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perusahaan yang berkaitan dengan K3.
4. Melakukan seleksi untuk memastikan bahwa alat-alat kerja yang digunakan memiliki SILO dan dioperasikan oleh operator yang memiliki SIO yang masih berlaku.

Sarana Keselamatan Kerja dan Pengelolaan K3

Perusahaan menyediakan peralatan keselamatan baik yang dapat diaplikasikan secara langsung pada masing-masing karyawan maupun yang diaplikasikan secara umum. Selain itu, Perusahaan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keselamatan lainnya mulai dari pelatihan terhadap situasi tanggap darurat maupun proses inspeksi dan pemantauan guna memitigasi risiko yang ada. Adapun penyelenggaraan program keselamatan kerja Perusahaan terdiri dari:

Company Control of Sub-contractors and Suppliers Regarding OHS Requirements

The company has a special policy for sub-contractors and suppliers regarding the requirements and standardization of K3 for the work/products and services provided by each sub-contractor and supplier. According to the Circular of the Director of Production and HSE No. 0155/DPH/SE/KDEH/02/2018 dated February 28, 2018 concerning Control of Subcontractors, Suppliers, and Labor Providers in the Project, the Company ensures all sub-contractors and suppliers to:

1. Ensure commitment to OHS.
2. Dissemination of personnel competency requirements and equipment feasibility.
3. Carry out selections to ensure that the competence of subcontracting personnel, suppliers and labor providers is in accordance with those required by Company regulations relating to K3.
4. Conduct a selection to ensure that the work tools used have a SILO and are operated by operators who have a valid SIO.

Occupational Safety and K3 Management Facilities

The company provides safety equipment both that can be applied directly to each employee as well as those that are applied in general. In addition, the Company also carries out other safety-related activities starting from training on emergency response situations as well as inspection and monitoring processes to mitigate existing risks. The implementation of the Company's work safety program consists of:

No	Uraian Description	Keterangan Details
INSTALASI SISTEM ALARM ALARM SYSTEM INSTALLATION		
1	Alat/Instalasi Pemadam Api Otomatis (Sprinkler) Automatic Fire Extinguisher Equipment/Installation (Sprinkler)	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available on every floor in the Nindya Karya building and managed, inspected, and maintained by the Property Division
2	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Light Fire Extinguisher (APAR)	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available on every floor in the Nindya Karya building and managed, inspected, and maintained by the Property Division
3	Masker Mask	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available in the Nindya Karya building for emergency mitigation and managed, inspected, and maintained by Property Division
4	Kacamata Pelindung Protective glasses	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available in the Nindya Karya building for emergency mitigation and managed, inspected, and maintained by Property Division
5	Hydrant Hydrant	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available in the Nindya Karya building for emergency mitigation and managed, inspected, and maintained by Property Division
6	Kursi Roda Wheel chair	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available in the Nindya Karya building for emergency mitigation and managed, inspected, and maintained by Property Division
7	Tandu stretcher	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available in the Nindya Karya building for emergency mitigation and managed, inspected, and maintained by Property Division
8	Tabung Oksigen Oxygen tube	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available in the Nindya Karya building for emergency mitigation and managed, inspected, and maintained by Property Division
9	Baju Tahan Api Fire Resistant Suit	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti Available in the Nindya Karya building for emergency mitigation and managed, inspected, and maintained by Property Division

Terpenuhinya keamanan kerja dimulai dari aspek awal suatu pekerjaan seperti kewanamanan material yang telah teruji, pemenuhan perangkat-perangkat pendukung serta pemenuhan standar yang ada melalui kegiatan inspeksi yang dilaksanakan secara berkala. Dengan terpenuhinya aspek tersebut, Perusahaan dapat meminimalisasi terjadinya tingkat kecelakaan kerja yang berasal dari material atau objek fisik dari suatu produk konstruksi.

The fulfillment of work security starts from the initial aspects of a job such as material safety that has been tested, the fulfillment of supporting devices and compliance with existing standards through inspection activities that are carried out regularly. With the fulfillment of these aspects, the Company can minimize the occurrence of work accidents originating from the material or physical object of a construction product.

Sosialisasi & Program Pengembangan Pelatihan Terkait K3

Perusahaan senantiasa memberikan perhatian terhadap sosialisasi K3, baik bagi Internal maupun eksternal. Selain sosialisasi, Perusahaan memberikan pelatihan K3 kepada karyawan dengan tujuan meningkatkan kesadaran seluruh insan Nindya Karya terkait K3 saat melaksanakan tugasnya. Berikut pelatihan K3 yang diberikan di tahun 2021.

Socialization & Training Development Program Related to K3

The company always pays attention to the socialization of K3, both for internal and external. In addition to socialization, the Company provides OHS training to employees with the aim of increasing awareness of all Nindya Karya personnel regarding K3 when carrying out their duties. The following is the K3 training provided in 2021.

Uraian Pelatihan Training Description	Partisipan Participant
Auditor Internal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Internal Auditors ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	Staff HSE Perencanaan & HSE Pengendalian HSE Planning & HSE Control Staff
Lead Auditor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Lead Auditor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	VP PG, VP PRN, Staff HSE Perencanaan & HSE Pengendalian VP PG, VP PRN, HSE Planning & HSE Control Staff
Insiden Investigasi Incident Investigation	VP PG, VP PRN, Staff HSE Perencanaan & HSE Pengendalian VP PG, VP PRN, HSE Planning & HSE Control Staff
Auditor Internal ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Internal Auditor	VP QACS, Sr. Staff, Staff, Jr. Staff QACS VP QACS, Sr. Staff, Staff, Jr. QACS staff
AK3 Konstruksi-Madya AK3 Construction-Intermediate	HSE Proyek Project HSE
AK3 Umum General AK3	Staff HSE Perencanaan & HSE Pengendalian HSE Planning & HSE Control Staff
P3K first aid	HSE Proyek Project HSE

Kecelakaan Kerja

Di tahun 2021, tidak terdapat adanya kecelakaan kerja fatal Severity Rate (SR) yaitu indicator banyaknya jumlah kehilangan hari kerja akibat kecelakaan kerja untuk per-1.000.000 jam kerja orang; dan Frequency Rate (FR) sebagai indicator pengukuran banyaknya jumlah insiden per-1.000.000 jam kerja orang. Berikut disampaikan realisasi SR, FR dan Fatality tahun 2020 dibandingkan target.

Work Accident

In 2021, there were no fatal work incidents Severity Rate (SR) is an indicator of the number of lost working days due to work accidents for every 1,000,000 working hours of people; and Frequency Rate (FR) as an indicator of measuring the number of incidents per 1,000,000 working hours of people. Below is the realization of SR, FR and Fatality in 2020 compared to the target.

URAIAN	REALISASI 2021	TARGET 2021
Safety Rate (SR)	229,86	<250
Freequency Rate (FR)	0,19	<2
Fatality	0	0

Fasilitas dan Jaminan Kesehatan bagi Karyawan

Perusahaan memberikan fasilitas dan jaminan kesehatan kerja melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu:

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Asuransi Jiwa
4. Klinik di Kantor Pusat & Wilayah
5. Klinik di Proyek
6. Medical Check Up 1 kali setahun

Facilities and Health Insurance for Employees

The company provides facilities and occupational health insurance through several programs and activities, namely:

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Life Insurance
4. Clinics at Headquarters & Regions
5. Clinic on Project
6. Medical Check Up once a year

Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan menyusun suatu mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan setiap saat siap untuk melakukan tindakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan, produk dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Employment, Health and Safety Complaints

The company always strives to comply with applicable laws and regulations, one of which is Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, the Company developed a complaint mechanism for employment, occupational safety and health issues. The Company is ready at all times to take control measures against activities, products and services that may pose a risk of accidents and occupational diseases.

Perusahaan terus berupaya untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan terhadap kenyamanan, keselamatan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kualitas lingkungan dan produktivitas kerja akibat aktivitas kerja dari penggunaan alat, mesin, dan bahan berbahaya dalam lingkungan kerja. Penyelesaian pengaduan masalah ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka menjamin hak-hak para karyawan.

Perusahaan memiliki mekanisme bagi karyawan untuk dapat menyampaikan keluhan maupun pengaduan terkait pelaksanaan K3 yang diatur dalam pedoman komunikasi, konsultasi dan partisipasi HSE No. P-NK-HSE-07-10. Perusahaan juga memiliki Prosedur Tetap terkait penghentian pekerjaan oleh karyawan atas pekerjaan yang memiliki risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, kecelakaan lingkungan, maupun penyakit yang timbul akibat kerja yang diatur dalam pedoman No. P-NKHSE-07-3.

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pengaduan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersifat material dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang K3

Berikut disampaikan sertifikasi K3 yang dimiliki Perusahaan, dan penghargaan atas pemenuhan K3 yang diterima oleh Perusahaan di tahun 2021.

Sertifikasi Bidang K3 yang Masih Berlaku di Tahun 2021

K3 Field Certification that is still valid in 2021

No	Jenis Sertifikat Type Of Certificate	Tanggal Dikeluarkannya Certificate Issuance Date	Masa Berlaku Validity	Dikeluarkan Oleh Issued By
1	ISO 45001:2018	6 Mei 2019 may 6, 2019	3 Tahun Years	Sucofindo
2	SNI ISO 9001:2015	20 April 2020 April 20, 2019	3 Tahun Years	Sucofindo
3	SNI ISO 14001:2005	20 April 2020 April 20, 2019	3 Tahun Years	Sucofindo
4	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Management System	17 September 2020 September 17, 2020	3 Tahun Years	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

The Company continues to strive to prevent unwanted occurrences of comfort, safety, health, order, security, environmental quality and work productivity due to work activities from the use of tools, machines, and hazardous materials in the work environment. The resolution of complaints regarding employment, occupational safety and health issues for employees is one of the company's responsibilities in order to guarantee the rights of employees.

The company has a mechanism for employees to be able to submit complaints or complaints related to the implementation of K3 which is regulated in the HSE communication, consultation and participation guidelines No. P-NK-HSE-07-10. The company also has a Permanent Procedure regarding the termination of work by employees for work that has risks that can cause work accidents, environmental accidents, or work-related illnesses which are regulated in the guideline No. P-NKHSE-07-3.

Throughout 2021, there were no complaints related to Occupational Safety and Health that were material and had a significant impact on the financial performance and operational performance of the Company.

Awards and Certifications in the Field of K3

Following are the K3 certifications owned by the Company, and awards for the fulfillment of K3 received by the Company in 2021.

Penghargaan di Bidang K3 Tahun 2021

Award in the Field of K3 2021

No	Penghargaan Award	Penerima Penghargaan Awardee
1	Kecelakaan Nihil Zero Accident Award	Karlloe Dam Project Package 2 Karlloe Dam Project Package 2 Proyek Pembangunan Bendung Sadawarna Subang Paket II Sadawarna Subang Dam Construction Project Package II DIVISI INFRASTRUKTUR 1 INFRASTRUCTURE DIVISION 1 PT NINDYA SACNA KSO PT NINDYA SACNA KSO Proyek Mainline Manggarai Mainline Manggarai Project Proyek Pembangunan Bandara Lombok Lombok Airport Development Project Proyek Dermaga Teluk Bayur Bayur Bay Pier Project Proyek Perpanjangan Runway Bandara Supadio-Pontianak Supadio Airport Runway Extension Project-Pontianak Proyek Overlay Permukaan Runway & Pave Shoulder Sepinggan Sepinggan Runway & Pave Shoulder Surface Overlay Project Proyek Reinforcement Dermaga PKT Bontang PKT Bontang Pier Reinforcement Project Pekeerjaan Pembangunan Gedung Airport Learning Academy (ALA) Airport Learning Academy (ALA) Building Construction Work Proyek Pembangunan Gedung Airport Learning Airport Learning Building Construction Project PT Nindya Karya (Persero) Proyek Pembangunan Gardu Listrik Kereta Api Antara Yogyakarta Klaten PT Nindya Karya (Persero) Project for the Construction of the Intermediate Railway Electrical Substation, Yogyakarta, Klaten Proyek POLTEKPAR Bali Bali POLTEKPAR Project Divisi INFRASTRUKTUR 2 INFRASTRUCTURE Division 2
2	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Di Tempat Kerja COVID-19 Prevention and Mitigation in the Workplace	PT NINDYA KARYA (PERSERO)-Airport Learning Academy (ALA) Building Construction Work PT NINDYA KARYA (PERSERO)-Airport Learning Academy (ALA) Building Construction Work PT NINDYA KARYA Kab. Sarolangun-Jambi PT NINDYA KARYA Kab. Sarolangun-Jambi Proyek Pembangunan Bendungan Bendo Jawa Timur East Java Bendo Dam Construction Project PT NINDYA SACNA KSO PT NINDYA SACNA KSO Proyek Bendungan Karalloe Paket 2 Karlloe Dam Project Package 2 Proyek Pelabuhan Bias Munjul Bali Bali Munjul Bias Port Project
3	Kepatuhan Pelaksanaan Perundang-undangan ketenagakerjaan di atas 80% (Delapan Puluh Persen) Compliance with the Implementation of Labor Laws above 80% (Eighty Percent)	Proyek Bendungan Karalloe Paket 2 Karlloe Dam Project Package 2
4	Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Safety and Health (K3) Performance	Proyek Bendungan Karalloe Paket 2 Karlloe Dam Project Package 2
5	Kinerja Panitia Pembina Keselamatan Kerja P2K3 Performance of the P2K3 Work Safety Committee	Proyek Bendungan Karalloe Paket 2 Karlloe Dam Project Package 2
6	Penghargaan Administrasi Perizinan K3 & Umum K3 & General Licensing Administration Award	Proyek Reinforcement Dermaga PKT Bontang PKT Bontang Pier Reinforcement Project

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen dan Mitra Kerja

Corporate Social Responsibility on Responsibility for Products/ Services and Consumers and Work Partners

Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan dengan keinginan pelanggan. Komitmen Perusahaan untuk setiap produk dan jasa konstruksi harus memenuhi aspek keamanan sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. pemenuhan atas aspek keselamatan sendiri telah menjadi komitmen awal perusahaan sesuai porsinya sebagai penyedia jasa.

Di samping kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, komitmen Nindya Karya atas tanggung jawab terhadap konsumen merupakan bagian dari perwujudan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tanggung jawab Perusahaan terhadap produk dan/atau jasa juga bergantung pada hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra kerja. Baik distributor maupun pemasok/vendor/supplier atau kreditur memiliki peran yang cukup besar dalam mempermudah kegiatan Perusahaan, khususnya dalam menghadirkan produk dan/atau jasa yang berkualitas.

Rencana dan Target Kegiatan serta Realisasinya di Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Perusahaan merencanakan pembentukan Unit Pelayanan Keluhan Pelanggan di bawah Departemen Produksi.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan dan Dampaknya

Pengendalian Kualitas Produk dan Jasa

Perusahaan memiliki kebijakan pengendalian kualitas produk yang telah disahkan melalui Dokumen Prosedur No. P-NK-MUTU-05 tentang Prosedur Umum Tindakan Pencegahan, Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai dan Perbaikan dengan Formulir PTPP yang telah berlaku sejak 1 Juni 2016. Penerapan dokumen prosedural ini bertujuan untuk:

1. Memastikan tindakan pencegahan atas ketidaksesuaian yang mungkin akan terjadi sehingga dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien pada produk/jasa, proses, dan Sistem Manajemen Mutu, K3 & Lingkungan.

Commitments and Policies

The company is committed to continuously improving services and innovating products to suit the times, as well as in line with customer desires. The Company's commitment to every construction product and service must meet the safety aspects as required by law No. 2 of 2017 concerning Construction Services. fulfillment of the safety aspect itself has become the company's initial commitment according to its portion as a service provider.

In addition to compliance with laws and regulations, Nindya Karya's commitment to responsibility for consumers is part of the realization of sustainable growth.

The Company's responsibility for products and/or services also depends on good and mutually beneficial relationships with business partners. Both distributors and suppliers/vendors/suppliers or creditors have a significant role in facilitating the Company's activities, particularly in presenting quality products and/or services.

Activity Plans and Targets and Their Realization in 2021

In order to improve service to customers, the Company plans to establish a Customer Complaints Service Unit under the Production Department.

Programs and Activities Conducted and Their Impact

Product and Service Quality Control

The company has a product quality control policy that has been approved through Procedure Document No. P-NK-MUTU-05 concerning General Procedures for Prevention, Control of Non-Conforming Products and Improvements with PTPP Form which has been in effect since June 1, 2016. The application of this procedural document aims to:

1. Ensuring preventive actions for non-conformities that may occur so that they can be planned and implemented in an effective and efficient manner on products/services, processes, and Quality, K3 & Environmental Management Systems.

2. Memberikan penjelasan tentang proses pelaksanaan pengendalian produk yang tidak sesuai untuk menjamin keefektifan tindakan yang diambil.
3. Memberikan penjelasan tentang proses pelaksanaan pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjamin keefektifannya penerapannya dan menghindari terjadinya pengulangan ketidaksesuaian yang sama. Keberadaan dokumen prosedural ini diharapkan mampu memberikan cara dan metode tindakan pencegahan ketidaksesuaian yang mungkin akan terjadi di lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan produk dan jasa, proses serta Sistem Manajemen MK3L. Dokumen prosedural ini berlaku untuk sistem mutu yang diterapkan di Kantor Pusat, Wilayah/Divisi dan Proyek serta pemasoknya.
2. Provide an explanation of the process of implementing non-conforming product controls to ensure the effectiveness of the actions taken.
3. Provide an explanation of the process of implementing the corrective action to ensure the effectiveness of its implementation and avoid the repetition of the same non-conformity. The existence of this procedural document is expected to be able to provide ways and methods of preventing non-conformances that may occur in the company's environment related to products and services, processes and the MK3L Management System. This procedural document applies to the quality system implemented at the Head Office, Region/ Division and Project and its suppliers.

Survei Kepuasan Pelanggan

Agar Perusahaan memahami keinginan pengguna jasa, Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan. Survei ini juga menjadi bagian dari Key Performance Indicator (KPI) sesuai Surat Edaran Menteri BUMN RI No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam KPI tersebut, kepuasan pelanggan dihitung berdasarkan Jumlah Referensi yang didapatkan dari kuesioner Kepuasan Pelanggan yang Positif dibagi Jumlah Proyek. Hasil survei kepuasan pelanggan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perbaikan terus menerus, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Customer Satisfaction Survey

In order for the Company to understand the wishes of service users, the Company conducts a customer satisfaction survey. This survey is also part of the Key Performance Indicators (KPI) according to the Circular of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Submission of Guidelines for Determining KPIs and Criteria for Assessment of Superior Performance in State-Owned Enterprises. In the KPI, customer satisfaction is calculated based on the number of references obtained from the Positive Customer Satisfaction questionnaire divided by the number of projects. The results of the customer satisfaction survey for the last 5 (five) years show continuous improvement, as can be seen in the table below.

Tahun Year	Survei Kepuasan Pelanggan (%) Customer Satisfaction Survey (%)
2017	87,78
2018	89,45
2019	89,68
2020	89,85
2021	90,00

Pengelolaan Hubungan dengan Mitra Kerja Pemasok/Supplier/Vendor

Dalam membangun hubungan yang mutual dengan mitra kerja pemasok, Perusahaan menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa serta evaluasi rekanan sebagai bagian dari pengukuran kepuasan pemasok sekaligus bagian dari evaluasi bagi Perusahaan. Kebijakan ini tertuang dalam Dokumen Prosedural No. P-NKPROC-01 tentang Procurement Pengadaan Barang/Jasa dan Evaluasi Rekanan yang telah berlaku sejak 1 Februari 2018. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang proses & tata laksana pengadaan barang dan jasa serta penilaiannya atas kinerja rekanan yang ditunjuk. Prosedur ini diterapkan di lingkup Perusahaan untuk Proyek, Wilayah/Divisi serta Kantor Pusat.

Managing Relationship with Supplier/Supplier/Vendor Partners

In building mutual relationships with supplier partners, the Company implements a policy of procurement of goods and services and evaluation of partners as part of measuring supplier satisfaction as well as part of the evaluation for the Company. This policy is contained in the Procedural Document No. P-NKPROC-01 regarding Procurement of Goods/Services Procurement and Evaluation of Partners which has been in effect since February 1, 2018. This document provides an explanation of the process & procedure for the procurement of goods and services as well as an assessment of the performance of the appointed partner. This procedure is applied in the scope of the Company for Projects, Regions/ Divisions and Head Office.

Pengaduan Terkait Layanan serta Produk Perusahaan dan Penanganannya

Kebijakan mutu Perusahaan juga diwujudkan melalui mekanisme yang memungkinkan bagi pelanggan untuk mengajukan pengaduan terkait layanan serta produk Perusahaan dan penanganannya. Mekanisme ini tertuang dalam Dokumen Prosedural No. P-NK-MUTU-02 tentang Prosedur Umum Penanganan Keluhan Pelanggan Bidang Konstruksi yang diberlakukan sejak 1 Juni 2016. Pengaduan dapat diajukan melalui Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah Perusahaan.

Complaints Related to the Company's Services and Products and Their Handling

The Company's quality policy is also realized through a mechanism that allows customers to submit complaints related to the Company's services and products and their handling. This mechanism is contained in the Procedural Document No. P-NK-MUTU-02 concerning General Procedures for Handling Customer Complaints in the Construction Sector which has been in effect since June 1, 2016. Complaints can be submitted through the Head Office or the Company's Regional Office.

Penghargaan dan/atau Sertifikasi di Bidang Jaminan Mutu dan Layanan Konsumen

Awards and/or Certification in the Field of Quality Assurance and Consumer Service

Sertifikasi Jaminan Mutu yang Masih Berlaku di Tahun 2021
Quality Assurance Certification Still Valid in 2021

No	Jenis Sertifikat Certificate Type	Tanggal Dikeluarkannya Sertifikat Certificate Date Of Is- sueance	Masa Berlaku Validity	Dikeluarkan Oleh Issued By
1	SNI ISO 9001:2015 Quality Management System Requirements	20 April 2020	3 Tahun Years	Sucofindo International Certification Services
2	ISO 19650-2:2018 Organization an Digitization of Information about Buildings and Civil Engineering Work, including Building Information Modelling (BIM)-Information Management using Building Information Modelling	09 April 2021	1 Tahun Years	PT BSI Group Indonesia

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility on Social and Community Development

Komitmen dan Kebijakan

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk turut serta memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat khususnya di sekitar lingkungan operasi. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, Perusahaan selalu menerapkan prinsip partisipasi aktif dalam bantuan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Commitments and Policies

The implementation of social responsibility programs related to social and community development is carried out with the aim of being able to provide benefits to the community, in line with the Company's commitment to participate in providing a positive impact on people's lives, especially around the operating environment. As a form of corporate social responsibility related to social and community development, the Company always applies the principle of active participation in sustainable community development assistance.

Kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Bagian dari upaya Perusahaan untuk mewujudkan kepeduliannya terhadap

The Company's obligations in carrying out corporate social responsibility in social and community development as regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/04/2021 dated April 8, 2021 regarding the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises. Part of the Company's efforts to realize its concern for the community is to implement a CSR program

masyarakat adalah dengan melaksanakan program TJSL yang terfokus dalam dalam 4 (empat) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu: Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum & Tata Kelola.

Rencana dan Target Kegiatan di Tahun 2021

Dalam rangka merumuskan rencana kegiatan TJSL bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, Perusahaan terlebih dahulu melakukan studi untuk menganalisis isu strategis pengembangan masyarakat di sekitar Perusahaan berdasarkan 4 (empat) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Program TJSL Pilar Ekonomi merupakan program yang memiliki fokus kerja dalam aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman dana kemitraan untuk modal kerja serta bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga menjadi usaha yang unggul dan mandiri serta mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru.

Sementara program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Pilar Sosial, Lingkungan, Hukum dan Tata Kelola adalah program pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan Perusahaan dan Dampaknya

Program Creating Sharing Value (CSV)

Program TJSL mendukung pencapaian TPB dan berorientasi pada Creating Sharing Value (CSV). Pada tahun 2021, Target Nindya Karya untuk program yang mendukung bisnis inti dan menciptakan Creating Sharing Value (CSV), yaitu 1 Program Pelestarian & Penataan Lingkungan sebesar Rp100.000.000,-. Adapun realisasi program CSV sampai dengan akhirtahun 2021 adalah sebesar Rp133.339.000,- dengan rincian sebagai berikut.

1. **Penataan Lingkungan Sekitar Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA Batu Tulis-Ciomas-Lintas Bogor-Sukabumi**
Program ini merupakan pembenahan lingkungan permukiman sekitar Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA Batu Tulis-Ciomas Lintas Bogor-Sukabumi di Kampung Legok Muncang RW 015 kelurahan Cipaku, kecamatan Bogor Selatan. Biaya yang telah disalurkan Perusahaan dalam program ini adalah sebesar Rp48.911.000,-.

that is focused on the 4 (four) pillars of the Sustainable Development Goals (TPB), namely: Social Pillar, Economic Pillar, Environmental Pillar and Law & Governance Pillar.

Plans and Target for Activities in 2021

In order to formulate a plan for CSR activities in the field of Social and Community Development, the Company first conducts a study to analyze the strategic issues of community development around the Company based on the 4 (four) pillars of the Sustainable Development Goals (TPB).

The Economic Pillar TJSL program is a program that focuses on the aspect of empowering and improving the community's economy through the provision of partnership fund loans for working capital as well as coaching assistance in the form of business management training assistance, marketing assistance (promotions/exhibitions) and others. This program aims to improve the competence of Micro and Small Enterprises (MSMEs) so that they become superior and independent businesses and are able to create jobs and absorb new workers.

Meanwhile, the Social & Environmental Responsibility (TJSL) Pillar of Social, Environment, Law and Governance program is a development program that maintains continuous improvement of the community's economic welfare, development that maintains the sustainability of community social life, development that maintains environmental quality and development that ensures justice. and the implementation of governance that is able to maintain the improvement of the quality of life from one generation to the next.

Programs and Activities Conducted by the Company and Their Impact

Creating Sharing Value (CSV) Program

The CSR program supports the achievement of TPB and is oriented towards Creating Sharing Value (CSV). In 2021, Nindya Karya's target is for programs that support core business and create Creating Sharing Value (CSV), namely 1 Environmental Preservation & Arrangement Program amounting to Rp100,000,000,-. The realization of the CSV program until the end of 2021 is Rp133,339,000, with the following details:

1. **Area Revitalization Around the Double Track Development Project for the Batu Tulis-Ciomas-Lintas Bogor-Sukabumi Railway**
This program is an improvement of the residential environment around the Batu Tulis-Ciomas Cross Bogor-Sukabumi Double Track Railway Development Project in Legok Muncang Village, RW 015, Cipaku sub-district, South Bogor sub-district. The costs that have been disbursed by the Company in this program amounted to Rp48,911,000,-.

Program pembenahan lingkungan ini masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran TJSL Tahun 2021 dalam Program Pelestarian & Penataan Lingkungan. Kegiatan ini juga selaras dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Lingkungan Nomor 15, yaitu Menjaga Ekosistem Daratan. Bentuk bantuan yang dilakukan diantaranya (a) 100 pohon produktif yang tertanam dan terpelihara (b) 3 gerobak sampah dan 6 tong sampah dan (c) pemugaran taman kota yang tertata rapi.

2. Program Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sekitar Danau Toba-Bantuan Sosial Budaya dan Lingkungan Pertanian berupa Benang Ulos dan Bibit Pohon

Program ini merupakan pembenahan lingkungan permukiman sekitar Proyek Preservasi Jalan Batang Toru-BTS, Kota Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan, Medan, Sumatera Utara di sekitar Danau Toba tepatnya di Desa Silalahi 1, 2 dan 3. Biaya yang telah disalurkan Perusahaan dalam program ini adalah sebesar Rp84.428.000,-.

Program pembenahan lingkungan ini masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran TJSL Tahun 2021 dalam Program Pelestarian & Penataan Lingkungan serta Pelestarian Budaya. Kegiatan ini juga selaras dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Lingkungan Nomor 15, yaitu Menjaga Ekosistem Daratan dan Nomor 11, yaitu Kota dan Pemukiman yang Berkualitas. Bentuk bantuan yang dilakukan diantaranya (a) 2000 Bibit Pohon dan (b) 1200 Benang Ulos.

This environmental improvement program is included in the 2021 TJSL Work Plan and Budget in the Environmental Preservation & Arrangement Program. This activity is also in line with the Sustainable Development Goals (SDG's) program for Environmental Development Pillar Number 15, namely Protecting Land Ecosystems. The forms of assistance provided include (a) 100 productive trees planted and maintained (b) 3 garbage carts and 6 trash cans and (c) the restoration of a neatly arranged city park.

2. Super Priority Tourism Destinations Program (DPSP) around Lake Toba-Agricultural Socio-Cultural and Environmental Assistance in the form of Ulos Yarn and Tree Seeds

This program is an improvement in the residential environment around the Batang Toru Road Preservation Project-BTS, Sidempuan City, Kab. South Tapanuli, Medan, North Sumatra around Lake Toba to be precise in the Villages of Silalahi 1, 2 and 3. The cost that has been distributed by the Company in this program is Rp84,428,000,-.

This environmental improvement program is included in the 2021 TJSL Work Plan and Budget in the Environmental Preservation & Arrangement Program and Cultural Preservation. This activity is also in line with the Sustainability Development Goals (SDG's) Environmental Development Pillar Number 15, namely Maintaining Land Ecosystems and Number 11, namely Quality Cities and Settlements. The forms of assistance provided include (a) 2000 Tree Seeds and (b) 1200 Ulos Yarns.

Program Unggulan

Nindya Karya menyalurkan beragam bantuan ke beberapa pilar sesuai dengan TPB. Dari beragam bantuan yang telah disalurkan, Nindya Karya memiliki program-program unggulan yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaan penyaluran Program TJSL realisasi sampai dengan akhir tahun 2021, adalah sebagai berikut.

1. Bantuan Sinergi BUMN Klaster Danareksa-PPA (Banjir Bandang di NTT)

BUMN-BUMN Klaster Danareksa-PPA mengadakan kegiatan pengumpulan dana bencana alam banjir bandang yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat No. S-1253/PPA/DSP-DU/0421 tanggal 6 April 2021. Kegiatan ini merupakan sinergi seluruh BUMN Holding Danareksa-PPA dalam bantuan dana terkumpul yang nantinya akan disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun penyampaian akan disampaikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan mekanisme dana bantuan yang ditransferkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Nindya Karya ikut berpartisipasi sebesar Rp15.000.000,-.

Featured Programs

Nindya Karya distributed various aids to several pillars in accordance with the TPB. From the various aids that have been distributed, Nindya Karya has excellent sustainable programs. In the implementation of the TJSL Program distribution, the realization until the end of 2021, is as follows.

1. Danareksa SOE Cluster Synergic Assistance-PPA (Banjir Bandang in NTT)

The SOEs of the Danareksa-PPA Cluster held a fundraising activity for the flash flood natural disaster that occurred in East Nusa Tenggara Province based on letter No. S-1253/PPA/DSP-DU/0421 dated April 6, 2021. This activity is a synergy of all SEO under Danareksa-PPA in the collected funds which will later be submitted to the Regional Disaster Management Agency (BPBD). The submission will be submitted through the Regional Disaster Management Agency (BPBD) with the mechanism of aid funds being transferred to PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Nindya Karya participated in the amount of Rp15.000.000,-.

Kegiatan ini juga selaras dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Lingkungan Nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

This activity is also in line with the Sustainable Development Goals (SDG's) Environmental Development Pillar Number 13 on Climate Change Management.

2. Pembangunan Masjid Al Manar Taman Duta

Panitia Pembangunan Masjid Al Manar Taman Duta mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan masjid. Lokasi masjid berada di Jalan Teratai X Blok A.11 No.17, Kel. Cisalak, Kec. Sukmajaya, Depok-Jawa Barat. Tujuan dari membangun kembali Masjid Al Manar Taman Duta ini adalah memberdayakan secara maksimal bentuk dan luas bangunan masjid agar dapat menampung semua aktivitas ukhuwah islamiyah khususnya masyarakat sekitar Taman Duta Depok. Pemberian bantuan bahan bangunan Masjid ini masuk dalam Program Bantuan Rumah Ibadah mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Lingkungan Nomor 11, yaitu Kota dan Komunitas yang berkelanjutan. Nindya Karya menyediakan bantuan bahan bangunan senilai Rp20.000.000,- dengan bentuk bantuan berupa bahan bangunan diantaranya (1) material baja wf, (2) kawat las, (3) cat dan (4) mata gerinda.

2. Construction of Al Manar Mosque Taman Duta

The Al Manar Taman Duta Mosque Construction Committee submitted a request for funding assistance for the mosque's construction. The location of the mosque is at Jalan Teratai X Blok A.11 No.17, Kel. Cisalak, Kec. Sukmajaya, Depok-West Java. The purpose of rebuilding the Al Manar Taman Duta Mosque is to maximize the shape and area of the mosque building so that it can accommodate all ukhuwah Islamic activities, especially the community around Taman Duta Depok. The provision of assistance in building materials for this mosque is included in the House of Worship Assistance Program to support the Sustainable Development Goals (SDG's) Pillar of Environmental Development Number 11 about Sustainable Cities and Communities. Nindya Karya provides building material assistance worth Rp20,000,000,- with assistance in the form of building materials including (1) wf steel material, (2) welding wire, (3) paint and (4) grinding wheel.

3. Bantuan Air Mineral dan APD Kolaborasi BUMN Klaster Danareksa-PPA

BUMN-BUMN Klaster Danareksa-PPA mengadakan kegiatan penyampaian bantuan berupa air mineral, APD dan masker untuk para tenaga Kesehatan, berdasarkan surat No. S-45/066/CS tanggal 12 Juli 2021. Kegiatan ini merupakan sinergi seluruh BUMN Holding Danareksa-PPA dalam usaha menangani COVID-19. Adapun mekanisme pengumpulan dana bantuan ini ditransferkan kepada PT Danareksa (Persero). Nindya Karya ikut berpartisipasi sebesar Rp10.000.000,- dengan rincian (1) 10.000 botol air mineral, (2) 1.500 APD set (hazmat & kacamata medis) dan (3) 1.000 box masker. Pemberian bantuan Air Mineral dan APD ini mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Lingkungan Nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

3. Aid in the form of Mineral Water and PPE in the Collaboration of Danareksa-PPA SEO Cluster

The SOEs of the Danareksa-PPA Cluster held activities to deliver assistance in the form of mineral water, PPE and masks for health workers, based on letter No. S-45/066/CS dated July 12, 2021. This activity is a synergy of all BUMN Holding Danareksa-PPA in efforts to deal with COVID-19. The mechanism for collecting aid funds was transferred to PT Danareksa (Persero). Nindya Karya participated in the amount of Rp10,000,000,- with details of (1) 10,000 bottles of mineral water, (2) 1,500 PPE sets (hazmat & medical glasses) and (3) 1,000 box masks. The provision of Mineral Water and PPE assistance supports the Sustainable Development Goals (SDG's) Environmental Development Pillar Number 13 about Climate Change Management.

4. Bantuan Sembako untuk Warga yang Terdampak COVID-19 di Sekitar Gedung Nindya-Jakarta Timur

Program ini merupakan bentuk Tanggung Jawab Sosial Nindya Karya dalam menangani dampak dari COVID-19. Adapun dasar pelaksanaan program ini ialah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Nindya Karya memberikan bantuan sembako senilai Rp59.850.000,- untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar Gedung Nindya, Jakarta Timur.

4. Basic Food Assistance for Residents Affected by COVID-19 Around the Nindya Building-East Jakarta

This program is a form of Nindya Karya's Social Responsibility in dealing with the impact of COVID-19. The basis for implementing this program is the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Community Activities Level 4 Corona Virus Disease 2019 in the Java and Bali Regions. Nindya Karya provided basic food assistance worth Rp59,850,000,- to help sustain the lives of the people around the Nindya Building, East Jakarta.

Pemberian 300 Paket Sembako ini selaras dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Lingkungan Nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

The distribution of 300 basic food packages is in line with the Sustainable Development Goals (SDG's) Environmental Development Pillar Number 13 on Climate Change Management.

5. Bantuan Kebutuhan ICU Urgent Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet

Tim TJSL Nindya Karya melakukan Survei ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet pada tanggal 9 Agustus 2021. Setelah dilakukan survei, TIM TJSL Nindya Karya memutuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang sedang dibutuhkan RSDC Wisma Atlet. Adapun bantuan Kebutuhan ICU yang diberikan Nindya Karya senilai Rp4.044.000,-dalam bentuk (1) Tounge Spatel, (2) Waslap, (3) Sabun Mandi, (4) Listerin dan (5) Pulpen.

Pemberian bantuan kebutuhan ICU Urgent ini mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Lingkungan Nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

5. Aid for Urgent ICU Needs for the COVID-19 Emergency Hospital (RSDC) Wisma Atlet

The Nindya Karya TJSL team conducted a survey to the Wisma Atlet COVID-19 Emergency Hospital (RSDC) on August 9, 2021. After the survey was carried out, the Nindya Karya TJSL TEAM decided to help meet the needs of the Wisma Atlet RSDC. The ICU assistance provided by Nindya Karya was Rp4,044,000,-in the form of (1) Tounge Spatel, (2) Washcloth, (3) Bath Soap, (4) Listerin and (5) Pen.

The provision of assistance to the needs of the Urgent ICU supports the Sustainable Development Goals (SDG's) Environmental Development Pillar Number 13, namely Climate Change Management.

6. Program Pelatihan Pertukangan Lanjutan di Desa Binaan Cikopomayak "Pembuatan Wall Décor"

Tim TJSL Nindya Karya melakukan Survei ke Desa Cikopomayak di pertengahan triwulan II, setelah dilakukan survei, TIM TJSL Nindya Karya memutuskan untuk memberikan Pelatihan Pertukangan Lanjutan "Pembuatan Wall Décor dari Bahan Limbah Kayu", karena Program ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas serta kemampuannya dalam hal pertukangan.

Program ini diikuti oleh 30 peserta dan memiliki nilai CSV terhadap proses bisnis perseroan. Peserta yang hadir, akan dinilai secara objektif oleh konsultan. Setelah itu, peserta terbaik akan dipekerjakan di Program TJSL Nindya Karya Tahun 2021, yaitu Pembangunan Infrastruktur terkait pembuatan jalan setapak untuk akses MCK.

Program Pelatihan Pertukangan Lanjutan "Pembuatan Wall Décor" ini mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial Nomor 4, yaitu Pendidikan Berkualitas.

6. Advanced Carpentry Training Program in Cikopomayak Assisted Village "Wall Décor Making"

The Nindya Karya TJSL Team conducted a survey to Cikopomayak Village in the middle of the second quarter, after the survey, the Nindya Karya TJSL Team decided to provide Advanced Carpentry Training "Making Wall Décor from Wood Waste Materials", because this program can help the community to improve their quality and ability in carpentry stuff.

This program was attended by 30 participants and brings CSV value to the company's business processes. Participants who attend will be assessed objectively by the consultant. After that, the best participants will be employed in the 2021 Nindya Karya TJSL Program, namely Infrastructure Development related to the construction of trails to access sanitation facilities.

This Advanced Carpentry Training Program "Making Wall Décor" supports the Sustainable Development Goals (SDG's) Social Development Pillar Number 4, namely Quality Education.

Program Pendanaan UMK (PUMK)

Nindya Karya melakukan Program Pendanaan UMK (d/h PK) dalam rangka pencapaian TPB nomor 8 yang bersumber dari dana bergulir (revolving) sampai dengan tahun 2021. Dana program PUMK disalurkan secara mandiri sebesar Rp836.544.386,- untuk 11 mitra binaan.

Dana Program Kemitraan yang telah direalisasi sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp705.000.000,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp836.544.386,-. Total dana yang disalurkan secara mandiri ini diberikan kepada 10 mitra binaan sebagai berikut:

Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2021 Distribution of Partnership Program Funds in 2021

No	Nama Name	Sektor Sector	Nilai Penyaluran (Rp) Amount Distributed (Rp)	Wilayah Region
1	Rizki Alfa Gerwanto (Streetsoda)	Industri Industry	75.000.000	Jakarta
2	Ratnawaty Sumba (Faris Catering)	Jasa Services	100.000.000	Sulawesi Selatan
3	Rina Afrianingrum (Rina Budidaya Pembibitan Ikan Lele)	Peternakan Animal Husbandry	40.000.000	Jawa Tengah
4	Heni Kusumawati (SKN Furniture)	Industri Industry	110.000.000	Jawa Barat
5	Gunther Suyono (Sub Pangkalan Gas Gunther)	Perdagangan Trading	60.000.000	Jawa Barat
6	Irman (Kinanti Paint)	Industri Industry	30.000.000	Jawa Barat
7	Rismanto (Ismantoto)	Industri Industry	30.000.000	Jakarta
8	Bidan Ani (Praktek Bidan Swasta)	Jasa Services	110.000.000	Jawa Barat
9	Atika Zahra (Software)	Perdagangan Trading	110.000.000	Jakarta
Total			705.000.000	

Berikut adalah kinerja Program PUMK sampai dengan akhir tahun 2021:

- Efektivitas Pinjaman**
Tingkat efektivitas Penyaluran Program Pendanaan UMK di tahun 2021 direncanakan sebesar 99,60% atau dengan skor "3" sedangkan Audited Tahun 2021 mencapai 96,20% atau dengan skor "3".
- Kolektabilitas Pinjaman**
Selain itu untuk tingkat kolektibilitas Program Pendanaan UMK di tahun 2021 direncanakan sebesar 85,50% atau dengan skor "3" sedangkan Audited tahun 2021 mencapai 74,06% atau dengan skor "3".
- UMK Naik Kelas**
Jumlah Mitra naik kelas tahun 2021 ditargetkan sebanyak 2 Mitra Binaan. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 terdapat 4 Mitra Binaan Naik Kelas, yaitu Ratnawaty Sumba (Faris Catering), Dwi Lestari (Ayam Bakar Podomoro Mbak Wik), Heni Kusumawati (SKN Furniture) dan Bidan Ani (Bidan Praktek Swasta).

MSE Funding Program (PUMK)

Nindya Karya conducted the UMK Funding Program (formerly PK) in order to achieve TPB number 8 sourced from revolving funds until 2021. The PUMK program funds were distributed independently of Rp836,544,386,- for 11 fostered partners.

The Partnership Program Fund that has been realized until the end of 2021 is Rp705,000,000 from the planned budget of Rp836,544,386. The total funds distributed independently were given to 10 fostered partners as follows:

The following are the performance of the PUMK Program by the end of 2021:

- Loan Effectiveness**
The effectiveness level of MSE Funding Program Distribution in 2021 is planned at 99.60% or with a score of "3" while Audited in 2021 reaches 96.20% or with a score of "3".
- Loan Collectability**
In addition, the collectibility level of the MSE Funding Program in 2021 is planned at 85.50% or with a score of "3" while Audited in 2021 reaches 74.06% or with a score of "3".
- MSE Upgrading**
The number of Partners who are upgraded in 2021 is targeted at 2 Fostered Partners. Realization until the fourth quarter of 2021, there are 4 fostered partners for promotion, namely Ratnawaty Sumba (Faris Catering), Dwi Lestari (Ayam Bakar Podomoro Mbak Wik), Heni Kusumawati (SKN Furniture) and Midwife Ani (Private Practice Midwife).

4. Pelatihan/Pembinaan

Selain penyaluran dana Program UMK, dilakukan pula kegiatan pembinaan untuk para mitra binaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sumber dana kegiatan pembinaan berasal dari biaya Program TJSL bukan lagi menjadi beban pembinaan kepada UMK. Program pembinaan yang dilakukan adalah Pelatihan Keahlian Pertukangan di Desa Binaan Kampung Nindya-Cikopomayak. Kegiatan ini dilaksanakan Sabtu, 30 Januari 2021 yang dihadiri 20 orang peserta. Program Kedua ialah Pelatihan Digital dan E-Commerce UMKM Desa Digital Tawangsari tanggal 31 Oktober-2 November 2021 dan dihadiri oleh 117 orang peserta. Program Ketiga ialah Pelatihan Pertukangan Berkelanjutan yang dilaksanakan tanggal 13-14 November 2021 dan dihadiri oleh 28 orang peserta. Adapun realisasi Program Pelatihan/Pembinaan Pengembangan UMKM Tahun 2021 dihadiri oleh 165 orang peserta. Program Pembinaan ini selaras dengan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan Tahun 2021 dengan skor "6" poin yang terdapat di Bagian (A) Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Sub Bagian Sosial (Peningkatan Keterampilan Kerja di Desa Binaan) dengan target skor "5" poin dan dihadiri oleh 50 orang peserta.

4. Training/Coaching

In addition to the distribution of UMK Program funds, coaching activities are also carried out for the fostered partners which aim to grow and improve the capabilities of the fostered partners to become strong and independent businesses. The source of funds for coaching activities comes from the TJSL program costs, which are no longer a burden for coaching MSEs. The coaching program carried out is Carpentry Skills Training in the fostered village of Kampung Nindya-Cikopomayak. This activity was held on Saturday, January 30, 2021, which was attended by 20 participants. The second program is the Digital and E-Commerce Training for SMEs in Tawangsari Digital Village on October 31-November 2, 2021 and was attended by 117 participants. The Third Program is the Sustainable Carpentry Training which will be held on November 13-14, 2021 and was attended by 28 participants. The realization of the 2021 MSME Development Training/Guidance Program was attended by 165 participants. This Guidance Program is in line with the achievement of the Company's Key Performance Indicator (KPI) in 2021 with a score of "6" points contained in Part (A) Economic and Social Values for Indonesia Social Sub-Section (Improving Work Skills in Fostered Villages) with a target score of "5" points and was attended by 50 participants.

Saluran Pengaduan Terkait Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, untuk itu, Perusahaan menyediakan sarana saluran pengaduan bagi masyarakat, apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, yang dapat dilayangkan langsung ke Perusahaan atau melalui kontak layanan yang tertera di *website* Perusahaan atau langsung ke kantor pusat.

Complaint Channels for Social and Community Development

The Company is committed to continuing to carry out social and community development programs, for this reason, the Company provides a complaint channel for the community, should there are obstacles or complaints in community activities, which can be submitted directly to the Company or through the service contact listed on the Company's website or directly to the office. center.

Kantor Pusat Nindya Karya
Nindya Karya Head Office
Jl. Letjend. Haryono
MT Kav. 22 Jakarta 13630, Indonesia.
Telepon (021) 809 3276 (Hunting)
Email: nindyakarya@nindyakarya.co.id

Bagian ini memuat informasi mengenai sarana yang tersedia bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan atas hal-hal yang bertentangan dengan etika, integritas, norma-norma dan dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu lingkungan hidup, dan lainnya.

Mekanisme pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) maupun penyampaian pengaduan melalui email atau telepon hotline. Disamping mengungkapkan mekanisme pengaduan masyarakat, perusahaan juga mengungkapkan jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti.

Penghargaan Bidang Sosial Kemasyarakatan

Sepanjang tahun 2021, Perseroan belum dan/atau memiliki penghargaan terkait sosial kemasyarakatan. Kendati demikian, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk berjalan harmonis dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya di wilayah operasional Perseroan.

This section contains information on the means available for stakeholders to report or submit complaints on matters that are contrary to ethics, integrity, norms and alleged violations of regulations or actions that disrupt the environment, and others.

The public complaint mechanism can be carried out through a violation reporting mechanism (whistleblowing system) or submission of complaints via email or telephone hotline. In addition to disclosing the mechanism for public complaints, the company also discloses the number of complaints received and followed up.

Awards in Social and Community

Throughout 2021, the Company has not and/or has awards related to social society. Nevertheless, the Company is always committed to working in harmony with the community and relevant stakeholders in order to realize sustainable development, especially in the Company's operational areas.



● Bendungan Mila, NTB



08

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report





**PT NINDYA KARYA (Persero)
DAN ENTITAS ANAK**

***PT NINDYA KARYA (Persero)
AND SUBSIDIARY***

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

*Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020*

Daftar Isi	<u>Halaman/ Page</u>	<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2021 and 2020</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



PT NINDYA KARYA (Persero)

• GENERAL CONTRACTOR • EPC • INVESTMENT

PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
PT NINDYA KARYA (Persero) DAN ENTITAS ANAK

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020
PT NINDYA KARYA (Persero) AND SUBSIDIARY

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned :

1. Nama/Name	: Haedar A. Karim
Alamat Kantor/Office Address	: Jalan Letjend. Haryono MT Kav. 22 Jakarta Timur
Alamat Domisili sesuai KTP/ Domicile as stated in ID Card	: Pondok Hijau Permai Blok B2/15, RT 001/025, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi
Jabatan/Title	: Direktur Utama/President Director
2. Nama/Name	: Sri Haryanto
Alamat Kantor/Office Address	: Jalan Letjend. Haryono MT Kav. 22, Jakarta Timur
Alamat Domisili sesuai KTP/ Domicile as stated in ID Card	: KP Tengah No. 41 RT/RW 007/001
Jabatan/Title	: Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia & Manajemen Risiko/Director of Finance, Human Resources & Risk Management

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;
4. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	4. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit information or facts;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.	5. We are responsible for the Company's internal control system within the company and its subsidiary.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter has been made truthfully.

Jakarta, 2 Februari 2022 / Jakarta, February 2, 2022

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan, SDM &
Manajemen Risiko/
Director of Finance, HR & Risk
Management

HAEDAR A. KARIM

SRI HARYANTO

Toward The Excellent

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00035/2.1030/AU.1/03/0181-4/1/III/2022

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Nindya Karya (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nindya Karya (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nindya Karya (Persero) ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nindya Karya (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nindya Karya (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2021 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

We also have tested on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express a conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. R/020.AAT/bna/2022 dan No. R/021.AAT/bna/2022 tanggal 2 Februari 2022.

The reports of compliance to certain regulations and internal controls, are submitted to the management, separately in our reports No. R/020.AAT/bna/2022 and No. R/021.AAT/bna/2022 dated February 2, 2022, respectively.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181/
Public Accountant License Number: AP.0181

Jakarta, 2 Februari/February 2, 2022



**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2021 dan 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4, 41	435,623,369,346	245,873,000,967	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	5	200,000,000,000	200,000,000,000	Short-Term Investments
Piutang Usaha	6			Accounts Receivable
Pihak Berelasi	41	58,428,320,908	111,354,019,908	Related Parties
Pihak Ketiga		64,142,606,525	23,230,964,787	Third Parties
Piutang Retensi	7			Retention Receivables
Pihak Berelasi	41	46,328,348,801	42,186,046,668	Related Parties
Pihak Ketiga		116,693,800,902	108,825,876,417	Third Parties
Piutang Ventura Bersama	8	251,105,754,456	306,081,905,753	Joint Ventures Receivables
Piutang Lain-lain	9			Other Receivables
Pihak Berelasi	41	12,842,886,561	16,452,465,525	Related Parties
Pihak Ketiga		517,094,527	13,799,981,862	Third Parties
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	10			Gross Amount Due From Customers
Pihak Berelasi	41	620,724,288,193	530,686,106,849	Related Parties
Pihak Ketiga		883,828,032,299	1,800,538,118,882	Third Parties
Persediaan	11	227,777,210,030	146,770,076,152	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	12.a	514,157,149,925	571,480,250,288	Prepaid Taxes
Uang Muka	13	69,097,602,400	67,563,789,008	Advances
Beban Dibayar di Muka	14	18,258,160,051	27,756,086,769	Prepaid Expenses
Beban Ditangguhkan	15	2,052,341,181	8,646,790,057	Deferred Expenses
JUMLAH ASET LANCAR		3,521,576,966,105	4,221,245,479,892	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSET
Investasi Pada Ventura Bersama	16	346,569,285,715	242,398,321,371	Investment in Joint Ventures
Investasi Jangka Panjang Lainnya	17	4,802,761,600	4,028,388,000	Other Long-Term Investments
Properti Investasi	18	555,241,088,000	432,231,232,001	Investment Properties
Aset Pajak Tangguhan	12.e	5,471,867,720	3,736,851,047	Deferred Tax Assets
Aset Tetap	19	449,412,745,512	561,071,224,431	Property, Plant and Equipment
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi	20	13,321,338,724	--	Financial Assets from Concession Arrangement
Aset Tak Berwujud		27,725,839	83,177,503	Intangible Assets
Proyek Dalam Pelaksanaan		3,542,377,397	2,952,837,473	Project on Progress
Aset Lain-lain	21	32,860,000	19,070,221,609	Other Assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		1,378,422,050,507	1,265,572,253,435	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		4,899,999,016,612	5,486,817,733,327	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**

As of December 31, 2021 dan 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020*) Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Bank dan Nonbank	23.a			Bank and Nonbank Loans
Pihak Berelasi	41	175,349,156,786	369,686,180,200	Related Parties
Pihak Ketiga		146,000,000,000	217,400,000,000	Third Parties
Utang Usaha	22			Accounts Payable
Pihak Berelasi	41	45,594,872,631	18,281,501,853	Related Parties
Pihak Ketiga		1,229,526,387,674	1,440,402,931,064	Third Parties
Liabilitas Sewa		--	162,418,016	Lease Liabilities
Uang Muka Pemberi Kerja	24			Advances from Customers
Pihak Berelasi	41	21,494,904,519	13,587,752,023	Related Parties
Pihak Ketiga		121,780,729,647	151,523,661,522	Third Parties
Utang Pajak	12.b	15,423,542,272	13,208,280,876	Taxes Payable
Utang Ventura Bersama	25	55,150,914,339	20,172,844,332	Joint Venture Payables
Pendapatan Diterima Dimuka	26	12,911,405,850	6,342,118,310	Unearned Revenues
Utang Bruto	27	967,580,686,958	929,472,278,511	Gross Amount Payables
Beban Akrua	28	15,802,138,638	17,905,647,827	Accruals
Utang Lain-lain	29	4,949,746,539	5,022,626,834	Other Payables
Utang Bank dan Nonbank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	23	193,362,622,155	175,650,843,214	Long-Term Bank and Non Bank Loans
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		3,004,927,108,008	3,378,819,084,582	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank dan Non Bank	23.b			Bank and Non Bank Loans
Pihak Berelasi	41	76,269,590,438	266,725,470,075	Related Parties
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	30			Long-Term Contract Advances
Pihak Berelasi	41	10,942,622,952	23,299,581,400	Related Parties
Pihak Ketiga		188,526,724,989	289,307,562,671	Third Parties
Liabilitas Imbalan Pascakerja	31	21,030,964,649	10,591,133,993	Post-Employment Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		296,769,903,028	589,923,748,139	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		3,301,697,011,036	3,968,742,832,721	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Seri A Dwi Warna dan Rp84.882 per saham Seri B				Share Capital - Rp1,000,000 par Value per Share of Seri A Dwi Warna and Rp84,882 per Share of Seri B
Modal Dasar - 7.738.000 saham yang terdiri dari 238.000 Saham Seri A Dwi Warna dan 7.500.000 Saham Seri B				Authorized Capital - 7,738,000 shares consist of 238,000 Shares of Seri A Dwi Warna and 7,500,000 Shares of Seri B
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.950.000 saham yang terdiri dari 59.500 Saham Seri A Dwi Warna dan 5.890.500 Saham Seri B				Subscribed and Paid Up Capital - 5,950,000 Shares consist of 59,500 Shares of Seri A Dwi Warna and 5,890,500 Shares of Seri B
Saldo Laba:	32.a	559,497,421,000	559,497,421,000	Retained Earnings:
Ditentukan Penggunaannya		113,608,743,613	113,608,743,613	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		670,832,864,018	497,334,104,366	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lain				Other Equity Components
Surplus Revaluasi Aset Tetap	19	251,700,874,450	336,685,860,847	Property, Plant and Equipment Surplus Revaluation
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		1,595,639,903,081	1,507,126,129,826	Total Equity Attributable to Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali	45	2,662,102,495	10,948,770,780	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		1,598,302,005,576	1,518,074,900,606	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4,899,999,016,612	5,486,817,733,327	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Direklasifikasi, lihat catatan 48

*)Reclassified, See note 48

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements as a whole

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pendapatan Usaha	33	4,415,364,107,154	3,616,483,176,454	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	34	(4,053,477,055,665)	(3,299,318,745,634)	Cost of Revenues
Laba Bruto		361,887,051,489	317,164,430,820	Gross Profit
Beban Penjualan	36	(13,177,729,543)	(11,009,075,979)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	36	(200,687,605,235)	(192,814,206,909)	General and Administrative Expenses
Kerugian Penurunan Nilai		(39,326,812,694)	(15,809,061,100)	Impairment Losses
Beban Pajak Penghasilan Final	38	(127,886,299,312)	(101,709,351,783)	Final Income Tax Expenses
Beban Keuangan		(75,600,790,417)	(89,111,850,810)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Ventura Bersama	35	153,417,476,394	91,341,841,495	Sharing Profit of Joint Ventures
Penghasilan Lainnya - Bersih	37	7,074,636,612	52,048,545,643	Other Income- Net
Laba Sebelum Pajak		65,699,927,294	50,101,271,377	Profit Before Tax
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	12.c	93,781,033	(7,279,332,627)	Income Tax Benefit (Expenses)
Laba Tahun Berjalan		65,793,708,327	42,821,938,750	Profit for The Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pos-pos yang Tidak Akan				Items that Will Not Be Reclassified
Direklasifikasi ke Laba Rugi				Subsequently to Profit and Loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap		10,717,194,808	--	Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas imbalan pasti	31	2,891,201,835	4,332,916,805	Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefits Liabilities
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		13,608,396,643	4,332,916,805	Total Other Comprehensive Income
Total Laba Komprehensif Pada Tahun Berjalan		79,402,104,970	47,154,855,555	Total Comprehensive Income for The Year
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada:				Profit Attributable To:
Pemilik Entitas Induk		75,560,917,134	50,895,518,834	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	45	(9,767,208,807)	(8,073,580,084)	Non-Controlling Interest
JUMLAH		65,793,708,327	42,821,938,750	TOTAL
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat				Profit Comprehensive Income
Diatribusikan Kepada:				Attributable To:
Pemilik Entitas Induk		88,513,773,255	55,275,483,224	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	45	(9,111,668,285)	(8,120,627,669)	Non-Controlling Interest
JUMLAH		79,402,104,970	47,154,855,555	TOTAL

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk /
Equity Attributable to Owner of the Parent

Catatan/ Notes	Surplus Revaluasi		Saldo Laba/ Retained Earnings		Jumlah / Total Rp	Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp	
	Modal Saham / Share Capital	Aset Tetap/ Property Plant and Equipment Revaluation Surplus Rp	Ditentukan Penggunaan Appropriated Rp	Belum Ditetukan Penggunaan Unappropriated *) Rp				
Saldo per 1 Januari 2020	559,497,421,000	356,142,880,847	113,608,743,613	422,601,601,142	1,451,850,646,601	19,069,398,449	1,470,920,045,050	Balance As of January 1, 2020
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	50,895,518,834	50,895,518,834	(8,073,580,084)	42,821,938,750	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-	4,379,964,391	4,379,964,391	(47,047,585)	4,332,916,806	Other Comprehensive Income (Losses) for The Year
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	(19,457,020,000)	-	19,457,020,000	-	-	-	Reclassification of Property Plant and equipment Revaluation Surplus
Saldo per 31 Desember 2020	559,497,421,000	336,685,860,847	113,608,743,613	497,334,104,366	1,507,126,129,826	10,948,770,780	1,518,074,900,606	Balance As of December 31, 2020
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	75,560,917,134	75,560,917,134	(9,767,208,807)	65,793,708,327	Profit for the Year
Tambahan Modal Disetor Entitas Anak	-	-	-	-	-	825,000,000	825,000,000	Additional Paid in Capital of Subsidiaries
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	9,960,340,902	-	2,992,515,219	12,952,856,121	655,540,522	13,608,396,643	Other Comprehensive Income for the Year
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	(94,945,327,299)	-	94,945,327,299	-	-	-	Reclassification of Fixed Assets Revaluation Surplus
Saldo per 31 Desember 2021	559,497,421,000	251,700,874,450	113,608,743,613	670,832,864,018	1,595,639,903,081	2,662,102,495	1,598,302,005,576	Balance as of December 31, 2021

*) Saldo laba termasuk keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan pasti

*) Retained earnings includes actuarial gain (loss) arising from defined benefit plan

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi				Cash Flows From Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan		5,232,197,168,290	4,177,293,439,124	Cash Receipts from Customers
Pengeluaran Kas kepada Pemasok dan Pihak ketiga		(4,510,035,853,724)	(4,376,989,934,744)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi		(142,899,606,065)	(199,923,835,976)	Cash Paid to Employees and Directors
Pembayaran Beban Keuangan		(77,076,658,236)	(93,778,198,691)	Payment for Financial Charges
Penerimaan Restitusi Pajak	12.a	215,228,592,736	–	Receipt from Tax Restitutions
Pembayaran Pajak Penghasilan		(130,012,332,518)	(104,099,601,913)	Payments of Income Tax
Penerimaan Bunga Giro dan Deposito		3,340,547,117	14,227,497,511	Cash Received from Interest and Time Deposits
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		590,741,857,600	(583,270,634,689)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				Cash Flows From Investing Activities
Pembelian Aset Tetap	19, 47	(11,646,881,454)	(208,072,730)	Acquisition of Property, Plant, and Equipment
Penerimaan Pencairan Laba Ventura Bersama	16	49,246,512,050	55,676,689,406	Cash Received from Share of the Profit of Joint Venture
Penempatan Investasi pada Jangka Panjang Lainnya		(774,373,600)	(2,436,707,000)	Placement of Other Long-Term Investment
Perolehan Aset Dalam Proses		–	(16,407,884,733)	Acquisition of Assets in Progress
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi		36,825,256,996	36,624,024,943	Net Cash Provided by Investing Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows From Financing Activities
Penerimaan Pinjaman Bank dan Non Bank	23	4,021,585,971,180	4,791,658,637,848	Proceed from Bank and Non Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank dan Non Bank	23	(4,460,067,095,290)	(4,207,196,144,359)	Payments for Bank and Non Bank Loans
Penerimaan Setoran Modal		825,000,000	–	Proceed from Capital Share
Pembayaran Liabilitas Sewa		(162,418,016)	–	Payments for Lease Liabilities
Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah		–	(300,000,000,000)	Cash Payments for Medium Term Notes
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(437,818,542,126)	284,462,493,489	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		189,748,572,470	(262,184,116,257)	Net Increase (Decrease) on Cash and Cash Equivalents
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Direalisasi		1,801,623	–	Unrealized Gain (Loss) On Foreign Exchange
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		245,873,000,967	508,064,440,458	Cash And Cash Equivalents At The Beginning Of Year
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		435,623,375,060	245,880,324,201	Cash And Cash Equivalents At The End Of Year
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas				Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas		435,623,375,060	245,880,324,201	Amount as reported in statement of cash flow
Cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas		(5,714)	(7,323,234)	Allowance for Impairment Losses of cash and cash equivalents
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan		435,623,369,346	245,873,000,967	Amount as reported in statements of financial position

Transaksi non kas dan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan disajikan di catatan 47 & 49

Non cash transactions and reconciliation of liabilities arising from financing activities are presented in notes 47 & 49

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum

1. General

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Nindya Karya (Persero) ("Perusahaan") didirikan sebagai pengalihan bentuk dari Perusahaan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Persero sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1972, *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-91/MK/IV/3/1973 tentang penetapan modal PT Nindya Karya (Persero) tanggal 3 Maret 1973. Sebelumnya Perusahaan merupakan sebuah perusahaan jasa konstruksi Belanda bernama NV Nederlands Annenings Maatschappij (NEDAM) yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara seperti yang tercantum dalam PP 59/1961.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, dan terakhir berdasarkan Akta No. 68 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Khairina S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat AHU-0009053.AH.01.02 tahun 2020.

Ruang lingkup bidang usaha Perusahaan meliputi jasa konstruksi yang terdiri dari konstruksi sipil, mekanikal elektrik termasuk jaringannya, radio, telekomunikasi dan instrumentasi perbaikan / pemeliharaan / renovasi bangunan; perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi; layanan jasa konsultan manajemen dan rekayasa industri; *building management*; pabrikasi bahan komponen bangunan, komponen dan peralatan konstruksi, barang logam, kayu, karet dan plastik; agro industri; keagenan bahan bangunan dan konstruksi; keagenan penjualan ruangan perkantoran dan hunian (*condominium*); perdagangan umum; penyewaan peralatan komunikasi; pengelolaan kawasan; *system development*; jasa bidang teknologi informasi; peningkatan bidang jasa konstruksi; pengembang.

Perusahaan ini mulai berdiri sejak tanggal 15 Maret 1973 dan memperoleh status badan hukum sejak 20 Agustus 1973.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Letjend. MT Haryono Kav. 22 Jakarta 13630.

1.a. Establishment and General Information

PT Nindya Karya (Persero) ("the Company") was established as a transfer manifestation from Nindya Karya State Company became Limited Liability Entity as the Government Regulation Number 11 of 1972, in conjunction with the Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. Kep-91/MK/IV/3/1973 regarding the capital determination of PT Nindya Karya (Persero) on March 3, 1973. Previously, the Company was a Netherlands construction company called NV Nederlands Annenings Maatschappij (NEDAM) that has been nationalized became State Owned Company as stated in PP 59/1961.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, and most recently by Deed No. 68 dated January 31, 2020 of Khairina S.H., Notary in Jakarta and have been approved by Ministry of Law and Human Rights on letter AHU-0009053.AH.01.02 in 2020.

The scope of the Company's business areas includes construction services consisting of civil construction, electrical and mechanical including its network, radio, telecommunications and instrumentation repairment / maintenance / renovation of building; planning and supervising of construction works; consulting management services and industrial engineering services; building management; manufacturing of building component materials, construction's components and equipments, metal goods, wood, rubber and plastic; agro industry; building's material and construction agency; sales agency of office and residential space (*condominium*); general trading; communication equipment rental; area management; system development; information technology services; increasing construction services; developer.

The Company was established on March 15, 1973 and obtained legal status since August 20, 1973.

The Company is domiciled in Jakarta, with head office located at Jl. MT Letjend. Haryono Kav. 22 Jakarta 13630.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1.b. Organisasi

Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris dan Direktur Perusahaan berdasarkan surat No. SK-137/MPBU/08/2015, KEP-PS 05/PPA/0815, SK-217/MBU/07/2018, KEP-PS 5/PPA/0718 tanggal 24 Juli 2018, No. SK-282/MBU/10/2018 dan SK-65/PPA/2018 tanggal 31 Oktober 2018, pembagian tugas dan wewenang anggota - anggota Direksi ditetapkan Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: SK-060/KOM/07/2016 Tanggal 13 Juli 2016 menetapkan 4 (empat) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur.

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengalihan Penugasan Sdr. Haedar A. Karim semula sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan menjadi Direktur Utama Perusahaan, dan juga mengangkat Moeharmein Zein Chaniago sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham PT Nindya Karya Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Kep-PS 03/PPA/0120 tanggal 22 Januari 2020.

Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

1.b. Organization

Organization Structure

According to Decision of Company's Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders regarding Termination, Job's Nomenclature Change and Appointment of Members of the Board of Commissioner and Directors of the Company based on No. SK-137/MPBU/08/2015, KEP-PS 05/PPA/0815, SK-217/MBU/07/2018, KEP-PS 5/PPA/0718 dated July 24, 2018, No. SK-282/MBU/10/2018 and SK-65/PPA/2018 dated October 31, 2018, the roles and responsibilities of the Director members are set according to Director's Decree Number: SK-060/KOM/07/2016 dated July 13, 2016 determine 4 (four) members of the Directors, consisting a President Director and 3 (three) Directors.

The Board of Commissioners, Directors and Employees

According to the Decision of the Company's Shareholders Outside the General Meeting on Transfer of Assignment i.e Haedar A. Karim originally as Director of Marketing and Business Development Director regarding the Dismissal and Appointment of the President Director and also nominate Moeharmein Zein Chaniago as Director of Marketing and Development of the Company based on shareholders' decrees of Nindya Karya Number: 26/MBU/01/2020 and Kep-PS 03/PPA/0120 on January 22, 2020.

The Company's Board of Commissioners and Directors Structure as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

2021 dan/and 2020		
Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Sugiyartanto	President Commissioner
Komisaris	Rika Kiswardani	Commissioner
Komisaris	Andar Perdana Widiastono	Commissioner
Direksi		Directors
Direktur Utama	Haedar A. Karim	President Director
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko	Sri Haryanto	Director of Finance, Human Resources, and Risk Management
Direktur Produksi, Health Safety dan Environment	Firmansyah	Director of Production, Health Safety and Environment
Direktur Pemasaran dan Pengembangan	Moeharmein Zein Chaniago	Director of Marketing and Business Development

Wilayah Kerja

Berdasarkan surat keputusan Direksi Nomor 001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan, struktur organisasi Perusahaan terbagi menjadi 6 Divisi, sebagai berikut :

Working Areas

According to the Director's Decree Number: 001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 on January 5, 2021 regarding the Organizational Structure of the Company, it is divided into 6 divisions, as follows :

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Unit Bisnis/ Business Unit	Wilayah Operasi/ Work Areas	Kedudukan/ Location
Divisi Infrastruktur I/ Infrastructure I Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil non jalan dan jembatan seperti bendungan, bangunan air, pelabuhan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. <i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for the entire building project for the works of buildings, airports, area development, and others as well as selected investment and development projects.</i>	Jakarta
Divisi Infrastruktur II/ Infrastructure II Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil jalan dan jembatan seperti jalan, jembatan, LRT, jalur kereta api, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. <i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for road and bridge civil infrastructure projects such as road, bridge, LRT, railway, and others as well as selected investment and development projects.</i>	Jakarta
Divisi Gedung/ Building Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek gedung, bandara, pengembangan kawasan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. <i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for the entire building project for the works of buildings, airports, area development, and others as well as selected investment and development projects.</i>	Jakarta
Divisi EPC/ EPC Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek EPC seperti <i>power plant</i> , <i>industrial plant</i> , <i>smelter</i> , transmisi-distribusi air, listrik, <i>oil</i> dan gas, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. <i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for EPC projects such as power plant, industrial plant, smelter, transmission-distribution of water, electricity, oil and gas, and others as well as selected investment and development projects.</i>	Jakarta
Divisi Properti/ Property Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk mengembangkan usaha properti dan realty. <i>The operational area covers all of Indonesia, domiciled in Jakarta by carrying out the Company's activities in the marketing to production sectors to develop property and realty businesses.</i>	Jakarta
Divisi Peralatan/ Equipment Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan jasa penyewaan peralatan proyek <i>The operational area covers all of Indonesia, domiciled in Jakarta by carrying out the Company's activities in the marketing sector to production for project equipment rental service work</i>	Jakarta

Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.352.075.427 dan Rp3.321.609.430, sedangkan jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Direksi pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.370.827.570 dan Rp11.180.460.785.

Total of remuneration received by the Board of Commissioners for 2021 and 2020 are amounted to Rp3,352,075,427 and Rp3,321,609,430, respectively, while remuneration received by Directors for 2021 and 2020 are amounted to Rp9,370,827,570 and Rp11,180,460,785, respectively.

Jumlah karyawan Perusahaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 720 dan 666 (tidak diaudit).

Number of the Company's employees on December 31, 2021 and 2020 are 720 and 666, respectively (unaudited).

1.c. Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tahun 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

1.c. Audit Committee

The composition of Company's Audit Committee as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2021 dan/and 2020

Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Andar Perdana W.	Chairman
Anggota	Mamat Supangkat	Member

Andar Perdana Widiastono diangkat sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK-06/Kom/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan.

Andar Perdana Widiastono was appointed as Chairman of the Audit Committee of the Board of Commissioners pursuant to Decree No.SK-06/Kom/01/2020 dated January 6, 2020 on dismissal and appointment of the Chairman of the Audit Committee of the Company.

Mamat Supangkat diangkat sebagai Anggota komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK-40/Kom/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan.

Mamat Supangkat was appointed as a Member of the Audit committee based on the Decree of the Board of Commissioners No.SK-40 / Kom/06/2020 dated June 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of member the Audit Committee of the Company.

1.d. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas PT Nindya Beton ("PT NB"), entitas anak, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51%.

1.d. Subsidiary Structure

The Company has control over PT Nindya Beton ("PT NB"), a subsidiary with the percentage of ownership of 51%.

PT NB didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khairina S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-10206.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013.

PT NB was established based on Notarial Deed No. 33 dated February 19, 2013 made before Khairina S.H., the Notary and Land Deed Officer in Jakarta and has received the validation from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in Decree No. AHU-10206.AH.01.01 on 2013 dated March 4, 2013.

Ruang lingkup bidang usaha PT NB meliputi: industri beton pracetak, industri *readymix*, dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dan pabrikasi, yaitu:

The scope of PT NB business includes: concrete precast industry, readymix industry, and other related businesses and manufacturing, such as:

- Sistem pabrikasi beton pracetak;
- Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
- Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
- Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
- Dan usaha lainnya yang berkaitan.

- Precast concrete manufacturing system;
- Building materials and components manufacturing;
- Components and construction equipments;
- Metal, wood, rubber, and plastic manufacturing;
- And others related businesses.

Total aset PT NB pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp173.616.620.312 dan Rp194.717.195.498. Total pendapatan PT NB untuk tahun-tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp108.520.974.955 dan Rp155.795.727.275.

Total assets of PT NB as of December 31, 2021 and 2020 were amounting to Rp173,616,620,312 dan Rp194,717,195,498 respectively. Total revenues of PT NB for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp108,520,974,955 and Rp155,795,727,275, respectively.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan memiliki pengendalian atas PT Nindya Tirta Unggul ("PT NTU"), entitas anak, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 95%.

PT NTU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98.AH.02.02 tanggal 26 Oktober 2021.

Ruang lingkup bidang usaha PT NTU meliputi konstruksi, infrastruktur, dan industri air bersih serta penyediaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Total aset PT NTU pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32.311.909.709. Total pendapatan PT NTU untuk tahun-tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2021 sebesar Rp14.429.150.304.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Company has control over PT Nindya Tirta Unggul ("PT NTU"), a subsidiary with the percentage of ownership of 95%.

PT NTU was established based on Notarial Deed No. 08 dated on May 3, 2021 made before Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and has received the validation from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in decree No. AHU-98.AH.02.02 dated October 26, 2021.

The scope of PT NTU's line of business includes construction, infrastructure, and clean water industry as well as the provision and development of drinking water supply systems.

Total assets of PT NTU as of December 31, 2021 amounting to Rp32,311,909,709. Total revenues of PT NTU for the years ended December 31, 2021 is amounting to Rp14,429,150,304.

The Company and subsidiaries hereinafter will be referred as "the Group".

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

2. Significant Accounting Policies

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the return given in exchange for assets.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60; Amandemen PSAK 62 dan Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020) : Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020) : Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112 : Accounting Wakaf;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021) : Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan;
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip – prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The consolidated statements of cash flows are presented by using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are new standards, amendments of standards and interpretation of standard issued by DSAK – IAI' and is effectively applied for the period starting on or after January 1, 2021, namely:

- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60; Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding interest Rate Benchmark Reform – Phase 2;
- PSAK 110 (Improvement 2020) : Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020) : Accounting for Wa'd;
- PSAK 112 : Accounting for Wakaf;
- PSAK 1 (Annual Improvement 2021) : Presentation of Financial Statement;
- PSAK 13 (Annual Improvement 2021) : Investment Properties;
- PSAK 48 (Annual Improvement 2021) : Impairment of Assets;
- PSAK 66 (Annual Improvement 2021) : Joint Arrangement;
- ISAK 16 (Annual Improvement 2021) : Service Concession Arrangements.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidations

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary as described in Note 1.d.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

A subsidiary is an entity controlled by the Group, ie the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements consist of the operating results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the noncontrolling interests having a deficit balance. The Group presents noncontrolling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the ownership of the parent entity in the subsidiary that do not result in loss of control is accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, the remaining interest in entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss are recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendalian pada entitas anak terdahulu. Ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendalian);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

If the Group loses control, the Group:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- (e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

2.e. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual Ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- 1) The financial assets are held within a business model whose objective to hold the financial assets to collect contractual cash flows (held to collect), and
- 2) The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- 1) The financial assets are held within a business model whose objective is achieved by both collective contractual

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- cash flows and selling financial assets; and*
- 2) *The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.*
- b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.*
- c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher than:*
 - (i) The amount of the loss allowance; and*
 - (ii) The amount initially recognized less, when appropriate, the cumulative amount of income recognized in accordance with the principles of PSAK 72*
- d) Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognized in profit or loss.*

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- a) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.*

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Impairment of Financial Assets

The Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial asset are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
- ii. Time value of money; and
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Group retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak terutama terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka panjang.

Pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka panjang pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

When the Group reclassifies its financial asset out of FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Classification as Liabilities or Equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries' financial liabilities mainly consist of short-term loans, account payables, accrued expenses, other payables, and long-term payables

Short-term loans, account payables, accrued expenses, other payables, and long-term payables are initially measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognize financial liabilities, if and only if the Group's obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan

memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
- ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
- iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and

maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2.f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal posisi keuangan. Selisih kurs yang terjadi dicatat sebagai laba (rugi) selisih kurs tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Dollar Amerika Serikat (USD)	14,269	14,105	United States Dollar (USD)
Euro	16,127	17,330	Euro

2.g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor ;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor ; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);

2.f. Transactions and Balances in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah.

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the prevailing rate at the time of transactions.

At the date of the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the exchange prevailing middle rates of Bank Indonesia at such date. The resulting exchange differences is recorded as gain (loss) on foreign exchange for the year.

As of December 31, 2021 and December 31, 2020 the exchange rates used are as rate follows:

2.g. Transactions with Related Parties

Related party represents a person or entity that is related to the reporting entity.

- 1) A person or close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.
- 2) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka 1;
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- iii. Both entities are joint ventures from the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of the third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity was controlled or jointly controlled by a person identified in number 1;
- vii. A person identified in number (1) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any member of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government-related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.j. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

2.k. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar namun pembelanjaannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.l. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent are cash on hand, cash in bank (demand deposit) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.i. Retention Receivables

Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.j. Gross amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customer is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of consolidated statement of financial position date.

2.k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in the future over the periods benefits using straight-line method.

2.l. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the First In First Out (FIFO) method.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Penyisihan Penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.m. Aset Real Estat

Aset Real Estat terdiri dari tanah belum dikembangkan, bangunan dan tanah sedang dikembangkan, bangunan dan tanah yang siap untuk dijual, bangunan dalam konstruksi, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai Realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangkan dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman, jika ada. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan atau dipindahkan ke tanah siap untuk dijual.

2.n. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan,

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for decrease in value of inventory is provided based on physical check of inventory at the end of the period.

The amount of any impairment of inventories will be recognized to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net property value, is property as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.m. Real Estate Assets

Real estate assets, which consist of land not yet developed, land under development, buildings and land ready for sale, buildings under construction, are inventories stated at cost or net realizable value whichever is lower. Net realizable value is estimated selling price in the ordinary course of business deducted by estimated costs of completion and estimated selling expenses.

The cost of land not yet developed consists of pre-development costs and land acquisition cost. The cost of the land not yet developed is transferred to the land under development account when the development of the land has started.

The cost of land recognition consists of cost of land not yet developed, direct and indirect costs related to the development of real estate assets and borrowing costs, if any. The cost of land under development is transferred to the buildings under construction account when the development is completed or transferred to the land available for sale.

2.n. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa aset, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

about the relevant activity require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classified joint arrangement as joint venture which represents the joint arrangement which the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and records for that investment using the equity method.

2.o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment properties are recognized as asset, if only, it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment properties, initially, shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment properties is based on a valuation by an independent appraiser who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.p. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- b. Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- c. End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

An investment property is derecognizes on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.p. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, property, plant and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated allowance for impairment losses.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Tahun/Years		
Bangunan	2-20	Buildings
Mesin dan Peralatan	2-8	Machineries and Equipment
Kendaraan	2-5	Vehicles
Inventaris Kantor	2-4	Office Equipments
Inventaris Mess	2-4	Dormitory Inventories

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk tanah yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Depreciation of property, plant and equipment starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

The Group choose to use revaluation model for land whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation.

If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is property in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously in profit or loss.

If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is property in profit or loss. However, the decrease is property in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease property in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluations is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

Self-constructed property, plant and equipment are presented as part of the property plant and equipment under "Asset in Settlement" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Akumulasi biaya perolehan yang dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan/siap digunakan & disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.q. Aset Keuangan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak konsesi dalam kontrak.

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lainnya (pemberi konsesi) memberikan kontrak untuk penyediaan layanan publik ke entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut sebagai perjanjian 'publik-ke-swasta'.

Dalam perjanjian ini, operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan jasa publik dan mengoperasikan serta mengelola infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar untuk jasa yang dibayarkan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa kasus, operator dapat meningkatkan infrastruktur yang ada.

Beberapa ciri umum dari perjanjian konsesi jasa meliputi:

- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas layanan tersebut.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The accumulated costs will be transferred to the respective property plant and equipment items at the time the asset is completed or ready for use and is depreciated since the operation.

The carrying amount of a property, plant and equipment is derecognized on disposal or has no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss from derecognition (determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

At the end of each reporting period, Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.q. Service Concession Arrangement Financial Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to the concession rights.

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or other body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services to a private sector entity (the "operator"). This is often referred to as a 'public – to – private' arrangement.

In this type of arrangement, an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Some common features of service concession arrangements include:

- *The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.*

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Operator bertanggung jawab setidaknya atas sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas kepentingan pemberi konsesi.

Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.

Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya mendanai infrastruktur.

Dalam ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan hak dan kewajiban terkait dengan konsesi jasa, Perusahaan tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap namun mengakui sebagai aset keuangan, karena Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas dari Perumdam Tirta Wijaya melalui pembayaran kapasitas berdasarkan Perjanjian Konsesi. Aset keuangan dicatat sebagai "Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi" sesuai dengan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

2.r. Sewa

Grup sebagai Penyewa

Pada tanggal inisiasi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- (a) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasi; dan
- (b) hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, yaitu hanya jika:

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- The operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.

The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.

The operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.

Under ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession, the Company does not recognize the infrastructure as property, plant and equipment but recognizes it as a financial asset, as the Company has an unconditional right to receive cash from Perumdam Tirta Wijaya through the capacity payments under the Concession Agreement. The financial asset is accounted as a "Financial Assets at amortized Cost" in accordance with PSAK 71, "Financial Instruments"

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession agreement.

2.r. Leases

The Group as Lessee

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Group shall assess whether, throughout the period of use, the Group has both of the following:

- (a) *the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and*
- (b) *the right to direct the use of the identified asset, only if either:*

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
- (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
 - Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- (i) the Group has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or
- (ii) the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:
 - the Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or
 - the Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.

At the commencement date, the Group shall measure the right-of-use asset at cost, which includes the amount of the initial measurement of the lease liability, any lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received, any initial direct costs incurred by the Group, and an estimate of costs to be incurred by the Group in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories.

After the commencement date, the Group measures the right-of-use asset by applying a cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai pesewa

Perusahaan melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan beberapa kontrak.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

At the commencement date, the Group shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group shall use the Group's incremental borrowing rate.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- a. increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- b. reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*
- c. remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Lease liability is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as lessor

The Company enters into lease agreements as a lessor with respect to some of contracts.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sewa di mana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan masih di pesewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan sebagai jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

2.s. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan biaya atas perolehan piranti lunak komputer yang tidak terintegrasi dengan piranti keras dikapitalisasi berdasarkan biaya terjadinya untuk mendapatkan dan menyiapkan piranti lunak sampai siap digunakan; diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya, yaitu tiga tahun.

2.t. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Leases for which the Company is a lessor are classified as operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership still in the lessor, the contract is classified as a operating leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

2.s. Intangible Asset

Intangible asset is the costs associated with the acquisition of computer software which is not integrated with related hardware are recognized based on costs incurred to acquire and prepare the software until ready to use. These costs are amortised using the straight-line method over their estimated useful lives, which is three years.

2.t. Impairment of Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an allowance for impairment losses and is recognized immediately in profit or loss.

An allowance for impairment losses recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.u. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari :

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last allowance for impairment losses was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an allowance for impairment losses.

2.u. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from :

- a) the initial recognition of goodwill; or
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan aset pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara aset untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan;
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or*

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Penghasilan Final

Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No.51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa Konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008 dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

2.v. Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup. Nilai

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and
- b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Final Income Tax

Final income tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is recognized as prepaid tax or tax payable. If the income is already subject to final income tax, the differences between the carrying value of existing assets and liabilities and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation No. 40 year 2009 concerning amendments of Government Regulation No.51 year 2008 concerning income tax from the construction business which effective starting August 1, 2008, final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

Final income tax is presented outside income tax expense in profit or loss.

2.v. Employee Benefit

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's post-employment benefit

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

tercatat liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 31.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan No.13 /2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto-kan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

liabilities. The carrying amounts of post-employment benefits liabilities are disclosed in Note 31.

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Program Masa Persiapan Pensiun

Perusahaan memberikan imbalan bagi karyawan tetap yang memasuki usia pensiun. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

Program Cincin Emas

Perusahaan, sebagai Pemberi Kerja, memberikan penghargaan berupa Cincin Emas kepada pegawai yang sudah memenuhi kriteria dan mekanisme untuk mendapatkan Cincin Emas sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

Program Cuti Dinas Lama

Perusahaan, sebagai Pemberi Kerja, memberikan cuti dinas lama setelah enam tahun bekerja berhak mendapatkan 60 hari cuti dan tetap mendapatkan tunjangan gaji yang akan diberikan kepada pegawai yang sudah memenuhi kriteria dan mekanisme sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

2.w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - b. Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Retirement Preparation Advance Program

The Company provide benefits to their permanent employees who at retirement age. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

Gold Ring Program

The Company, as the Employer, gives awards in the form of a Gold Ring to employees who have fulfilled the criteria and mechanism for obtaining the Gold Ring according to the Collective Labor Agreement (PKB). The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

Long Service Leave Program

The Company, as the Employer, provides an long service leave after six years worked, that entitled to 60 days of leave and still gets a salary allowance which will be given to employees who have met the criteria and mechanisms according to the Collective Labor Agreement (PKB). The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

2.w. Revenues and Expenses Recognition

An entity shall account for a contract with a customer only when all of the following criteria are met:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
 - a. *The contract has been agreed by the parties involved in the contract;*
 - b. *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- c. Kontrak memiliki substansi komersial; dan
- d. Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:

- pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- c. The contract has commercial substance; and
- d. It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.
2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;
- the Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and
- the Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kriteria berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan Konstruksi dan Biaya Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada hasil survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada suatu waktu tertentu saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Penjualan Aset Real Estat

Pendapatan dari penjualan aset real estat diakui pada suatu waktu tertentu saat pengendalian atas aset telah berpindah kepada pelanggan, yaitu saat terjadi penyerahan aset kepada pembeli.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The following recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Construction Revenue and Constructions Costs

Revenues related to construction contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the surveys results of work performed.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as nonproject expenses (operating expenses).

Sale of Goods

Revenue from the sale of goods is recognized at a point in time when the control of goods has been transferred to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group' warehouse at the request of the customer, when issued invoices.

Sale of Real Estate Assets

Revenue from the sale of real estate asset is recognized at a point in time when the control of asset has been transferred to the customer, ie upon of handover of asset to buyer.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

2.x. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat aset maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan.

Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Expense Recognition

Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

2.x. Provision

A provision is recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances.

Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Where some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

**Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang
Penting**

Persentase Penyelesaian

Grup mengakui pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi dan proyek yang masih dalam progress pembangunan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan kebijakan Akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2v. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan dan jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, Grup mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di waktu yang lampau dan bantuan dari spesialis. Pendapatan dari proyek diungkapkan dalam Catatan 33 dan beban dari proyek diungkapkan dalam Catatan 34.

**3. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgements**

The preparation of the consolidated financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the financial statements are prepared.

Assumptions and situation about the future development, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, disclosed below.

Accounting Estimates and Assumptions

Percentage of Completion

The Group recognize revenues and cost of revenue from the construction and project in development stage based on percentage of completion method. Stage of completion is measured based on the accounting policies described in Note 2v. Important assumption which required in determining the stage completion (percentage of completion) and the amount of estimated income and total development cost. In making assumptions, the Group evaluate them based on past experience and with the assistance of specialist. Revenue from the project are disclosed in Note 33 and expenses from the project are disclosed in Note 34.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Grup melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tercatat aset tetap disajikan pada Catatan 19.

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 31.

Nilai Wajar Properti Investasi dan Nilai Revaluasi Aset Tetap Tanah

Nilai wajar properti investasi dan tanah bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi dan tanah. Jumlah tercatat properti investasi dan aset tetap disajikan pada Catatan 18 dan 19.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai untuk instrumen keuangan telah diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Estimated Useful Lives

Group conducts periodic reviews of the economic useful lives of Property Plant and Equipment and intangible assets based on factors such as the condition of technical and technological developments in the future. Future operating results will be materially affected by the estimation changes caused by changes in factors mentioned above.

Group performs periodic review over the useful life of the equipment based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of Group property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments. The carrying amount of Property Plant and Equipment is disclosed in Notes 19.

The determination of Group's post-employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Management believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. Detailed information has been disclosed in Note 31.

Fair Value of Investment Property and Revaluation Value of Land

The Group's fair value of investment property and land depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. The Group believe that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its investment property and land. The carrying amount has been disclosed in Notes 18 and 19.

Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

Allowance for impairment losses for financial instruments has been measured at an amount equal to lifetime expected credit loss

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

umurnya jika risiko kredit meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian Kredit Ekspektasian pada instrumen keuangan diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar pelanggan di masa lalu dan analisis posisi keuangan pelanggan saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari pelanggan, kondisi ekonomi umum industri di mana pelanggan beroperasi. Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari 36 bulan karena pengalaman historis mengindikasikan bahwa instrumen keuangan tersebut umumnya tidak dapat dipulihkan.

Instrumen keuangan dihapuskan ketika terdapat informasi yang mengindikasikan bahwa pelanggan dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama tahun pelaporan berjalan.

if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since its initial recognition. The Expected Credit Loss on financial instruments are estimated using a provision matrix refer to past default history of the customers and an analysis of the customers current financial position, and adjusted for specific factors to the customers, general economic conditions of the industry in which the customers operate. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables over 36 months past due because historical experience has indicated that financial instruments aren't generally recoverable.

Financial instrument is written off when there is information indicating that the customers is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting year.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Kas	474,061,163	510,690,552	Cash
Bank			Banks
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	120,875,026,433	22,406,020,332	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	82,911,644,963	194,320,984,679	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	347,883,225	1,015,197,157	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain - lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	769,936,632	709,849,689	Others (each below Rp 500 Million)
Dolar Amerika			US Dollar
(USD 3,847 dan USD 3,887 masing-masing pada 31 Desember 2021 dan 2020)			(USD3,847 and USD3,887 as of December 31, 2021 and 2020, respectively)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46,407,656	54,838,990	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,489,200	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	204,959,388,109	218,506,890,847	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	127,679,697,546	3,125,240,980	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Lain - lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	797,982,726	22,023,396,817	Others (each below Rp 500 Million)
Dolar Amerika			US Dollar
(USD858 dan USD1,000) masing-masing pada 31 Desember 2021 dan 2020)			(USD858 and USD1,000) as of December 31, 2021 and 2020, respectively)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	12,245,516	14,105,005	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Sub Jumlah	128,489,925,788	25,162,742,802	Sub Total
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Sub Jumlah Bank - Bersih	(5,714) 333,449,308,183	(7,323,234) 243,662,310,415	Allowance for Impairment Losses Sub Total Banks - Net
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	70,000,000,000	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30,000,000,000	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,700,000,000	1,700,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	101,700,000,000	1,700,000,000	Sub Total
Sub Jumlah Deposito	101,700,000,000	1,700,000,000	Sub Total Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih	435,623,369,346	245,873,000,967	Total Cash and Cash Equivalent - Net
Tingkat Suku Bunga Kontraktual Deposito per Tahun Jangka Waktu	1.90% - 2.35% 1 bulan / month	3.50% 1 bulan / month	Contractual Annual Interest Rates of Time Deposits Terms Deposit

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi penyisihan penurunan nilai kas dan setara kas sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of cash and cash equivalent is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	7,323,234	--	Beginning Balance of The Year
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	--	5,880,574	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	183,836	1,442,660	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	(7,501,356)	--	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	5,714	7,323,234	Ending Balance of the Year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai atas saldo bank dan deposito berjangka telah memadai.

Management considered that allowances for impairment loss of bank balance and time deposits is sufficient.

5. Investasi Jangka Pendek

5. Short-Term Investment

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Surat Utang PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	200,000,000,000	200,000,000,000	Promissory Note PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Investasi jangka pendek Perusahaan merupakan surat utang yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), entitas induk, berdasarkan Surat Utang No. SU-1/PPA/0121 pada tanggal 1 Januari 2021 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan telah diperpanjang dengan Surat Utang No. S-5558/PPA/DU/1221 tanggal 30 Desember 2021 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Suku bunga dari surat utang adalah 3% pertahun.

The Company's short term investment is a bond issued by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)(PPA), parent entity, based on Secured Promissory Notes No. SU-1/PPA/0121 on January 1, 2021, for a period of 1 (one) year from January 1, 2021 to December 31, 2021. and have been extended based on Secured Promissory Notes No. S-5558/PPA/DU/1221 on December 30, 2021, for a period of 1 (one) year from January 1, 2022 to December 31, 2022. Interest rate of promissory note is 3% per year.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada penyisihan penurunan nilai atas saldo investasi jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021.

Management believes that there is no allowance for impairment loss for short term investment on December 31, 2021.

6. Piutang Usaha

6. Accounts Receivable

Semua saldo piutang usaha Grup didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

All the Groups' accounts receivable are denominated in Rupiah.

Rincian saldo piutang pihak berelasi dan pihak ketiga sebagai berikut :

The details of accounts receivable to the related parties and third parties are as follows :

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
Ventura Bersama Nindya - Adhi	14,811,261,571	23,264,075,936	JV Nindya - Adhi
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	10,765,141,984	14,353,522,644	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Pertamina (Persero)	8,144,629,728	30,402,660,829	PT Pertamina (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)	7,909,239,120	8,926,375,820	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Krakatau Engineering & Construction	7,001,055,821	7,018,170,678	PT Krakatau Engineering & Construction
PT PP Presisi Tbk	4,296,312,541	--	PT PP Presisi Tbk
PT Angkasa Pura II (Persero)	4,228,278,740	11,338,965,052	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Hakaaston	3,781,301,499	13,828,083,374	PT Hakaaston
PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	1,869,048,000	1,869,048,000	PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Ventura Bersama Nindya - Sacna	1,457,140,213	--	JV Nindya - Sacna
Ventura Bersama Nindya - Barata	1,332,078,137	--	JV Nindya - Barata
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	--	3,732,563,613	PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi
Ventura Bersama Nindya - Surya	--	2,543,390,100	JV Nindya - Surya
PT Pupuk Kalimantan Timur	--	1,467,355,000	PT Pupuk Kalimantan Timur
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	6,384,769,803	4,351,395,771	Others (each below Rp 1 Billion)
Sub Jumlah Pihak Berelasi	71,980,257,157	123,095,606,817	Sub Total Related Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13,551,936,249)	(11,741,586,909)	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	58,428,320,908	111,354,019,908	Sub Total Related Parties - Net
Pihak Ketiga			Third Parties
Pemerintah Daerah Kota Cimahi	36,132,491,781	--	Cimahi City Regional Government
PT Crystal Garden	18,267,403,290	18,267,403,290	PT Crystal Garden
Penjualan Ritel Beton	12,591,487,801	27,309,294,029	Concrete Retail Sales
PT Sarana Sirkuitindo Utama	10,223,367,526	10,223,367,526	PT Sarana Sirkuitindo Utama
PT KNE Global Persada	10,043,811,490	10,043,811,490	PT KNE Global Persada
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9,374,688,766	13,302,256,674	Ministry of Public Works and Housing
Ventura Bersama Abipraya - Bodiacs	9,359,345,000	--	JV Abipraya - Bodiacs
PT Sinergi Solusi Utama	4,848,145,264	4,848,145,264	PT Sinergi Solusi Utama
Penjualan Ritel Properti	4,084,911,671	63,197,512	Penjualan Ritel Properti
PT Buana Risma	2,749,428,235	2,749,428,235	PT Buana Risma
PT Saras Square	2,142,539,000	2,142,539,000	PT Saras Square
PT Altra Excis Investama	1,765,478,924	1,765,478,924	PT Altra Excis Investama
Ventura Bersama Utama - Adhi	1,739,474,795	--	JV Utama - Adhi
PT Wirakarsa Konstruksi	1,276,405,000	1,276,405,000	PT Wirakarsa Konstruksi
PT Rosa Lisca	1,146,400,000	--	PT Rosa Lisca
PT Fatimah Azzahra	1,099,648,042	1,785,465,586	PT Fatimah Azzahra
PT Rizki Ilham Bersaudara	1,008,910,800	--	PT Rizki Ilham Bersaudara
Ventura Bersama PP - KPS	--	2,412,818,649	JV PP - KPS
Kementerian Perhubungan	--	1,693,556,774	Ministry of Transportation
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	7,879,878,858	6,338,722,015	Others (each below Rp 1 Billion)
Sub Jumlah Pihak Ketiga	135,733,816,243	104,221,889,968	Sub Total Third Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(71,591,209,718)	(80,990,925,181)	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	64,142,606,525	23,230,964,787	Sub Total Third Parties - Net
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	122,570,927,433	134,584,984,695	Total Accounts Receivable - Net

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (bulan)
sebagai berikut:

Total accounts recivable by aging (months) are as follows :

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
< 12 Bulan	96,734,497,813	116,707,079,801	< 12 Months
> 12 - 24 Bulan	14,163,023,718	20,521,661,371	> 12 - 24 Months
> 24 Bulan	96,816,551,869	90,088,755,613	> 24 Months
Jumlah	207,714,073,400	227,317,496,785	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(85,143,145,967)	(92,732,512,090)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	122,570,927,433	134,584,984,695	Total - Net

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut:

Movement in the amounts of the allowance for impairment losses of receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(92,732,512,090)	(63,524,603,923)	Balance at Beginning of The Year
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	--	(33,942,067,795)	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(1,560,276,717)	(8,951,949,060)	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	9,149,642,840	13,686,108,688	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	(85,143,145,967)	(92,732,512,090)	Ending Balance of the Year

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha pada tahun 2021 sebesar Rp9.149.642.840 yang terdiri dari pemulihan atas piutang proyek BNB-5 sebesar Rp1.693.556.774, proyek pembangunan RS Fatimah Azzahra Rp685.817.544 dan proyek lainnya sebesar Rp793.901.060 sementara pemulihan atas piutang penjualan beton sebesar Rp5.770.831.024.

Recovery of allowance for impairment losses on accounts receivable in 2021 is amounting to Rp9,149,642,840 which consisted of recovery of receivables from the BNB-5 project is amounting to Rp1,693,556,774, Fatimah Azzahra Hospital construction project Rp685,817,544 and other projects is amounting to Rp793,901,060 while recovery of receivables from sales of concrete amounting to Rp5,770,831,024.

Piutang usaha PT Pertamina (Persero) digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 23.1 dan 23.4).

Accounts receivable of PT Pertamina (Persero) were used as collateral to borrowings from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Notes 23.1 and 23.4).

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses of receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible receivables in the future.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. Piutang Retensi

7. Retention Receivables

Rincian saldo piutang retensi pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of retention receivables to the related parties and third parties are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Angkasa Pura II (Persero)	29,099,358,497	28,704,830,729	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Krakatau Engineering & Construction	7,047,737,085	7,047,737,085	PT Krakatau Engineering & Construction
PT Pupuk Kalimantan Timur	6,559,367,500	956,540,000	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	4,677,056,248	418,142,800	PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi
Perum Perumnas (Persero)	3,484,770,691	3,484,770,691	Perum Perumnas (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,923,532,182	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Magnesium Gosari Internasional	2,561,818,181	2,561,818,181	PT Magnesium Gosari Internasional
PT Utama Karya (Persero)	1,845,758,970	1,845,758,970	PT Utama Karya (Persero)
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	--	4,355,590,908	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	--	1,386,536,565	JV Nindya - Dewa Ruci
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	--	2,562,701,108	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	2,507,752,562	395,171,981	Others (each below Rp 1 Billion)
Sub Jumlah	60,707,151,916	53,719,599,018	Sub Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(14,378,803,115)	(11,533,552,350)	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Berelasi	46,328,348,801	42,186,046,668	Sub Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	107,072,646,073	106,114,195,224	Ministry of Public Works and Housing
PT Sinergi Solusi Utama	10,376,663,040	10,376,663,040	PT Sinergi Solusi Utama
Bank Indonesia	9,260,723,990	200,703,922	Bank Indonesia
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	5,231,150,813	4,943,073,624	Pesisir Barat Regency Government
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	4,891,202,700	2,603,152,867	Dharmasraya Regency Government
Pemerintah Kabupaten Kotabaru	4,077,292,936	4,077,292,936	Kotabaru District Government
PT Karya Unggulan Gemilang	3,528,110,765	3,528,110,765	PT Karya Unggulan Gemilang
Kementerian Perhubungan	3,284,040,908	--	Ministry of Transportation
PT Mandiri Karya Cipta Indah	2,125,987,499	2,125,987,499	PT Mandiri Karya Cipta Indah
PT Royal Residen	1,539,770,958	1,539,770,958	PT Royal Residen
PT Maju Santosa Cemerlang	1,227,631,725	1,227,631,725	PT Maju Santosa Cemerlang
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	--	4,109,770,350	West Sumatra Provincial Government
Pemerintah Provinsi Papua	--	3,883,035,717	Papua Provincial Government
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	1,453,864,425	2,457,202,558	Others (each below Rp 1 Billion)
Sub Jumlah	154,069,085,832	147,186,591,185	Sub Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(37,375,284,930)	(38,360,714,768)	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Ketiga	116,693,800,902	108,825,876,417	Sub Total Third Parties
Jumlah Piutang Retensi - Bersih	163,022,149,703	151,011,923,085	Total Retention Receivables - Net

Jumlah piutang retensi berdasarkan umur (bulan) sebagai berikut:

Total retention receivables by aging (months) are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
< 12 Bulan	147,785,183,247	123,707,989,259	< 12 Months
> 12 - 24 Bulan	184,624,488	36,348,061,674	> 12 - 24 Months
> 24 Bulan	66,806,430,013	40,850,139,270	> 24 Months
Jumlah	214,776,237,748	200,906,190,203	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(51,754,088,045)	(49,894,267,118)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	163,022,149,703	151,011,923,085	Total - Net

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang retensi sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of retention receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(49,894,267,118)	(24,529,799,667)	Beginning Balance of the Year
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	--	(27,773,022,606)	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(2,979,548,828)	(713,433,261)	Addition in the Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	1,119,727,901	3,121,988,416	Recovery in the Current Year
Saldo Akhir Tahun	(51,754,088,045)	(49,894,267,118)	Ending Balance of the Year

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2021 sebesar Rp1.119.727.901 sebagian besar dari piutang retensi atas pekerjaan interior Bandara Supadio yang telah dilunasi pada tanggal 7 April 2021.

Recovery for allowance for impairment losses on retention receivables in 2021 is amounting to Rp1,119,727,901 is mainly from retention receivables of Interior of Supadio Airport project that has been paid on April 7, 2021.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan Kerugian penurunan nilai piutang retensi cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses of retention receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible retention receivables in the future.

8. Piutang Ventura Bersama

8. Joint Venture Receivables

Merupakan piutang kepada ventura bersama (JV) untuk pembelian material, biaya bank, overhead, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ventura bersama.

Represents receivable from the Joint Venture (JV) to purchase the material, bank fees, overhead, and others for the of joint venture purposes.

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan	75,605,869,524	70,740,605,086	JV Nindya - Pembangunan Perumahan
Ventura Bersama Nindya - Sacna	38,676,167,937	40,044,993,581	JV Nindya - Sacna
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Sarana Baja	31,026,275,280	13,033,365,579	JV Nindya - Gerbang Sarana Baja
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	30,495,616,013	15,600,212,104	JV Nindya - Citra - Kharisma
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	27,379,709,182	27,738,111,850	JV Nindya - Bumi Karsa
Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangun Nusa	21,256,089,400	21,124,429,912	JV Nindya - Bahagia Bangun Nusa
Ventura Bersama Nindya - Bunga Raya Lestari	17,309,102,342	17,026,914,200	JV Nindya - Bunga Raya Lestari
Ventura Bersama Nindya - Bina Nusa Lestari	16,387,444,627	--	JV Nindya - Bina Nusa Sarana
Ventura Bersama Nindya - Waskita - Jaya Purnama	14,921,740,231	19,644,517,840	JV Nindya - Waskita - Jaya Purnama
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	14,212,796,441	15,772,115,335	JV Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	11,948,984,573	13,023,430,651	JV Nindya - Dewa Ruci
Ventura Bersama Nindya - Rapi Tirta Treatmindo	12,943,911,296	816,314,171	JV Nindya - Rapi Tirta Treatmindo
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	8,022,330,165	28,334,385,233	JV Nindya - Karya Sarana
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	7,740,172,430	48,643,435,947	JV Nindya - Adhi Karya
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan - Utama Karya	7,708,657,692	7,708,657,692	JV Nindya - Pembangunan Perumahan - Utama Karya
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	6,892,181,083	6,892,181,083	JV Nindya - Cipuga
Ventura Bersama Nindya - Sejahtera	5,995,439,198	5,995,439,198	JV Nindya - Sejahtera
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	5,205,541,977	8,767,574,812	JV Nindya - MCC - Wika - Waskita
Ventura Bersama Nindya - Brantas	4,531,300,864	4,531,300,864	JV Nindya - Brantas
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	4,623,494,826	8,839,813,594	JV Nindya - Bangun Bejana Baja
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya	2,223,294,657	439,873,951	JV Nindya - Utama Karya
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Abipraya	2,242,818,197	1,571,349,130	JV Nindya - Adhi - Abipraya
Ventura Bersama Nindya - Mettana	1,718,166,948	--	JV Nindya - Mettana
Ventura Bersama Nindya - Inti	1,650,000,000	1,650,000,000	JV Nindya - Inti
Ventura Bersama Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	3,368,705,984	2,294,927,011	Others (each below Rp 1 Billion)
Jumlah	374,085,810,867	380,233,948,824	Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(122,980,056,411)	(74,152,043,071)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Piutang Ventura Bersama - Bersih	251,105,754,456	306,081,905,753	Total Joint Venture Receivables - Net

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada ventura bersama (JV) sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of receivable from the Joint Venture (JV) receivable is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal Tahun	(74,152,043,071)	--	Beginning Balance of the Year
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	--	(77,838,947,490)	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(49,900,806,569)	(6,614,972,661)	Addition in the Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	1,072,793,229	10,301,877,080	Recovery in the Current Year
Saldo Akhir Tahun	(122,980,056,411)	(74,152,043,071)	Ending Balance of the Year

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang ventura bersama pada tahun 2021 sebesar Rp1.072.793.229 sebagian besar dari pelunasan dari Ventura Bersama Nindya – Dewa Ruci.

Recovery for allowance for impairment losses on joint ventures receivables in 2021 is amounting to Rp1,072,793,229 is mainly from Joint Venture Nindya – Dewa Ruci.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang ventura Bersama cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang ventura bersama.

Management believes that allowance for impairment losses of joint venture receivable is sufficient to cover possible losses on uncollectible joint venture receivables.

9. Piutang Lain-lain

9. Other Receivables

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	12,230,147,117	6,000,000,000	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Asuransi ASEI Indonesia	--	6,271,479,315	PT Asuransi ASEI Indonesia
PT BRI Asuransi Indonesia	--	4,180,986,210	PT BRI Asuransi Indonesia
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	612,739,444	--	Others (Each below Rp 1 Billion)
Sub Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	<u>12,842,886,561</u>	<u>16,452,465,525</u>	Sub Total Related Parties - Net
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Manunggal Muara Palma	39,239,364,416	39,239,364,416	PT Manunggal Muara Palma
PT Asuransi Bosowa Indonesia	--	5,226,232,762	PT Asuransi Bosowa Indonesia
PT Asuransi Purna Arthanugraha	--	5,226,232,762	PT Asuransi Purna Arthanugraha
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	--	1,692,706,104	The Ministry of Public Work and Public Housing
PT Asuransi Binagriya Upakara	--	1,438,802,056	PT Asuransi Binagriya Upakara
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	517,094,527	316,956,203	Others (Each below Rp 1 Billion)
Sub Jumlah	39,756,458,943	53,140,294,303	Sub Total
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(39,239,364,416)	(39,340,312,441)	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	<u>517,094,527</u>	<u>13,799,981,862</u>	Sub Total Third Parties - Net
Jumlah Bersih Piutang Lain-lain - Bersih	<u>13,359,981,088</u>	<u>30,252,447,387</u>	Total Other Receivables - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movement in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Saldo Awal Tahun	(39,340,312,441)	(43,196,364,416)	Beginning Balance of the Year
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	--	(100,985,073)	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	--	(61,485,398)	Addition in the Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	100,948,025	4,018,522,446	Recovery in the Current Year
Saldo Akhir Tahun	(39,239,364,416)	(39,340,312,441)	Ending Balance of the Year

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Piutang lain – lain merupakan piutang yang tidak berhubungan dengan usaha operasional oleh Grup, dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), entitas induk, merupakan piutang bunga atas Surat Utang PPA (Catatan 5).
2. Piutang dari PT Manunggal Muara Palma (MMP) merupakan tagihan atas proyek pabrik kelapa sawit (PKS) sebesar Rp94.272.200.000 dan USD2,911,798.84 (termasuk PPN) yang dihentikan karena MMP tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Catatan 44).

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian nilai piutang lain-lain cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Other receivables represent receivables that was not related to operational performed by the Group, with the details are as follows:

1. Receivables from PT Perusahaan Pengelola Aset Persero) (PPA), the parent entity, represent interest short term investment on PPA (Note 5).
2. Receivables from PT Manunggal Muara Palma (MMP) represents receivables for the palm oil mill project (PKS) amounting to Rp94,272,200,000 and USD2,911,798.84 (including VAT) which were terminated because MMP did not fulfill payment obligations in accordance with the agreements made by Indonesian National Arbitrase Agency (BANI) (Note 44).

Management believes that allowance for impairment losses for other receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible other receivables.

10. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Rincian saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah sebagai berikut :

10. Gross Amount Due from Customers

The details of gross amount due from customer are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Tagihan Bruto Pemberi Kerja			Gross Amount Due from Customers
Pihak Berelasi			Related Parties
Tagihan Bruto Jasa Konstruksi	625,348,189,596	530,686,106,849	Gross Amount Due from Customer
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4,623,901,403)	--	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Berelasi	620,724,288,193	530,686,106,849	Sub Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Tagihan Bruto Jasa Konstruksi	916,765,612,993	1,851,497,165,699	Gross Amount Due from Customer
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32,937,580,694)	(50,959,046,817)	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Ketiga	883,828,032,299	1,800,538,118,882	Sub Total Third Parties
Jumlah Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja - Bersih	1,504,552,320,492	2,331,224,225,731	Total Gross Amount Due from Customers - Net

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian saldo tagihan bruto pemberi kerja pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Detail of related party and third party of gross amount due from customers as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Pertamina (Persero)	210,607,746,266	148,306,769,101	PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	82,255,972,918	14,535,578,816	PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi
PT Angkasa Pura I (Persero)	75,196,980,177	150,118,178,103	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	66,056,517,246	104,457,940,150	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC	58,159,272,727	--	PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pupuk Kalimantan Timur	38,358,818,684	22,791,261,653	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	28,697,707,600	25,249,519,264	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT PLN (Persero)	28,264,211,015	--	PT PLN (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,688,769,800	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	9,267,047,995	--	JV Nindya - Dewa Ruci
PT Bhandha Ghara Rekza (Persero)	4,455,045,638	9,210,955,519	PT Bhandha Ghara Rekza (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	38,417,918,591	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	--	3,600,000,000	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	--	11,468,535,452	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	--	2,529,450,200	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	340,099,530	--	Others (Each below Rp 1 Billion)
Sub Jumlah Pihak Berelasi	625,348,189,596	530,686,106,849	Sub Total Related Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4,623,901,403)	--	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	620,724,288,193	530,686,106,849	Sub Total Related Parties - Net
Pihak Ketiga			Third Parties
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	820,345,053,560	1,577,325,519,309	The Ministry of Public Work and Public Housing
PT Polowijo Gosari Pupuk Indonesia	50,061,818,182	50,061,818,182	PT Polowijo Gosari Pupuk Indonesia
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	35,930,359,535	41,691,903,315	West Coast District Government
Ventura Bersama Abipraya - Bodiacs	5,063,147,000	--	JV Abipraya - Bodiacs
Pemerintah Kota Padang	2,506,754,749	--	Padang City Government
Penjualan Retail Beton	2,189,448,222	2,316,153,980	Concrete Retail Sales
Kementerian Perhubungan	625,531,745	25,755,029,022	The Ministry of Transportation
Kementerian Pemuda dan Olahraga	--	86,394,873,087	The Ministry of Youth and Sports
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	--	32,109,807,360	Dharmasraya District Government
Bank Indonesia	--	29,562,272,725	Bank Indonesia
Pemerintah Daerah Kota Makassar	--	6,033,445,532	Local Government of Makassar City
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 Juta)	43,500,000	246,343,187	Others (Each below Rp500 Million)
Sub Jumlah Pihak Ketiga	916,765,612,993	1,851,497,165,699	Sub Total Third Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32,937,580,694)	(50,959,046,817)	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	883,828,032,299	1,800,538,118,882	Sub Total Third Parties - Net
Jumlah Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja - Bersih	1,504,552,320,492	2,331,224,225,731	Total Gross Amount Due from Customers - Net

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai kepada tagihan bruto kepada pemberi kerja sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses on gross amount due to customers are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(50,959,046,817)	--	Beginning Balance of the Year
Penyesuaian	--	(50,959,046,817)	Adjustment
Penambahan Tahun Berjalan	(8,850,104,350)	--	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	22,247,669,070	--	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	(37,561,482,097)	(50,959,046,817)	Ending Balance of the Year

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto pada tahun 2021 sebesar Rp22.247.669.070 sebagian besar dari tagihan bruto proyek pekerjaan gedung bupati Krui sebesar Rp17.473.999.502, tagihan bruto pekerjaan proyek Marore Rp4.646.666.106 dan pekerjaan Minihydro Cilaki Rp127.003.462.

Recovery of allowance for impairment losses on gross due amount from customers in 2021 is amounted to Rp22,247,669,070, most of this consists the Krui regent building works project of Rp17,473,999,502, Marore project work of Rp4,646,666,106 and Minihydro Cilaki works of Rp127,003,462.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan bruto cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto.

Management believes that allowance for impairment losses of gross amount due to customer is sufficient to cover possible losses on uncollectible gross amount due to customers.

11. Persediaan

11. Inventories

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Persediaan Jasa Konstruksi			Construction Inventory
Material Bahan Baku Konstruksi	183,867,138,783	116,733,882,050	Material Construction Supplies
Beton Pracetak	4,967,457,717	4,395,837,983	Precast Concrete
Suku Cadang	972,796,426	298,163,890	Spare Parts
Sub Jumlah Persediaan Jasa Konstruksi	189,807,392,926	121,427,883,923	Sub Total Inventory of Construction
Aset Real Estat			Real Estate Assets
Tanah Sedang Dikembangkan	13,032,568,578	12,553,516,080	Land Under Development
Bangunan Dalam Konstruksi	8,029,714,029	7,625,070,287	Building Under Construction
Bangunan dan Tanah Siap Jual	16,907,534,497	5,163,605,862	Building and Land Ready for Sale
Jumlah Aset Real Estat	37,969,817,104	25,342,192,229	Sub Total Real Estate Assets
Jumlah	227,777,210,030	146,770,076,152	Total

Persediaan merupakan material bahan baku konstruksi berupa perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Grup.

The inventories are the material construction supplies such as project's supplies that are still available in the project's warehouse of the Group.

Untuk material beton pracetak merupakan persediaan milik Nindya Beton meliputi *Box Culvert, partel precast, lead bearing, u-ditch, squart mini pile, square pile, tutup u-ditch, Lining concrete.*

For precast concrete, Nindya Beton's inventory includes Box Culvert, precast partel, lead bearing, u-ditch, squart mini pile, square pile, u-ditch cover, Lining concrete.

Tanah sedang dikembangkan yaitu merupakan tanah yang siap untuk di bangun yang berlokasi di Gowa-Makassar, Desa Kragilan, Cisait Tangerang dan daerah Cilangkap-Jakarta Timur.

Land under development represents land that is ready to be developed which is located in Gowa-Makassar, Kragilan Village, Cisait Tangerang and Cilangkap area-East Jakarta.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Bangunan dalam konstruksi yaitu persediaan berupa Kavling Perumahan Permata Gowa yang berlokasi di Jalan Teknik (Samata), Kabupaten Gowa, Makassar, dan bangunan Perumahan Purinatha Jalan Cilangkap Baru, Jakarta Timur milik Divisi Properti.

Buildings under construction are inventories in the form of the Permata Gowa Housing Lot located at Jalan Teknik (Samata), Gowa Regency, Makassar, and the Purinatha Housing building at Jalan Cilangkap Baru, East Jakarta belonging to the Property Division.

Bangunan dan tanah siap jual terdiri dari Ruko Pabaeng-baeng yang berlokasi di Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng Makassar, kemudian Bangunan rumah jadi Permata Gowa yang berlokasi di Jalan Teknik (Samata) Kabupaten Gowa, Makassar, Persediaan Apartemen Dago Suites Bandung, Persediaan Kios Sadang Terminal Square.

Buildings and land ready for sale consist of Pabaeng-baeng shophouses located at Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng Makassar, then Permata Gowa finished house buildings located at Jalan Teknik (Samata) Gowa Regency, Makassar, Dago Suites Apartment Bandung Supplies, Sadang Kios Supplies Terminal Square.

Perusahaan telah melakukan reklasifikasi atas tanah yang sedang dikembangkan sebesar Rp6.092.209.680 dan aset yang diambilalih berupa ruko mall STS dan apartemen Dago Suites sebesar Rp12.445.151.929 (Catatan 21).

The Company has reclassified the land under development is amounting to Rp6,092,209,680 and foreclosed assets in the form of stall on STS mall and Dago Suites apartment is amounting to Rp12,445,151,929 (Note 21).

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan dan tidak ada penghapusan persediaan yang rusak atau usang.

Based on the review of the condition of the inventory, the company management believes that there is no need for the provision of decline in inventory value and there is no write-off for damaged or obsolete inventory.

Persediaan tanah yang sedang dikembangkan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari Pinjaman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 23.3).

Inventory land under development were used as collateral for borrowings from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 23.3).

12. Perpajakan

12. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	507,739,134,438	563,104,828,030	Value-Added Tax
PPH Penghasilan Final	992,601,784	992,601,784	Final Income Tax
	<u>508,731,736,222</u>	<u>564,097,429,814</u>	
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	3,789,798,539	5,816,215,987	Value-Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 22	1,635,615,164	1,566,604,487	Income Tax Article 22
	<u>5,425,413,703</u>	<u>7,382,820,474</u>	
Jumlah	<u>514,157,149,925</u>	<u>571,480,250,288</u>	Total

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2021 Perusahaan telah menerima restitusi pajak, atas surat ketetapan lebih bayar pajak, dengan rincian sebagai berikut:

In 2021, The Company has received tax refund based on tax overpayment letter with the details are as follows:

No. / No.	Tahun /Years	Entitas/ Entity	Jenis Surat / Tax Letters	Nomor Surat / Tax Letters No.	Tanggal Surat / Date Issued	Periode / Period	Jumlah Total
1	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00013/407/19/093/20	07-Dec-20	Jan-19	24,426,776,005
2	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00014/407/19/093/20	07-Dec-20	Feb-19	15,841,644,507
3	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00015/407/19/093/20	07-Dec-20	Mar-19	19,913,441,902
4	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00039/407/19/093/20	23-Dec-20	Apr-19	16,725,916,495
5	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00040/407/19/093/20	23-Dec-20	May-19	12,288,351,563
6	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00041/407/19/093/20	23-Dec-20	Jun-19	10,913,229,192
7	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00043/407/19/093/20	30-Dec-20	Jul-19	15,675,963,249
8	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00044/407/19/093/20	30-Dec-20	Aug-19	21,123,914,598
9	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00045/407/19/093/20	30-Dec-20	Sep-19	16,594,998,132
10	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00046/407/19/093/20	30-Dec-20	Oct-19	23,570,662,534
11	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00047/407/19/093/20	30-Dec-20	Nov-19	22,082,546,568
12	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00039/407/19/093/21	18-May-21	Dec-19	15,549,108,779
13	2020	PT NK	Keberatan Masa November 2017	KEP-00008/KEB/WPJ.19/2021	12-Jan-21	Nov-17	411,793,960
14	2020	PT NK	Keberatan Masa Desember 2017	KEP-00009/KEB/WPJ.19/2021	12-Jan-21	Dec-17	93,091,783
15	2020	PT NK	Keberatan Masa Mei 2018	KEP-00012/KEB/WPJ.19/2021	12-Jan-21	May-18	10,164,000
16	2020	PT NK	Keberatan Masa Juni 2018	KEP-00013/KEB/WPJ.19/2021	12-Jan-21	Jun-18	4,983,420
17	2020	PT NK	Keberatan Masa Agustus 2018	KEP-00014/KEB/WPJ.19/2021	12-Jan-21	Aug-18	2,006,049
							215,228,592,736

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak Penghasilan Pasal 21	1,734,808,203	1,398,486,488	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 22	3,629,742,087	3,429,891,243	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	1,478,491,471	710,112,267	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	31,955,331	20,245,585	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	6,860,805,020	6,090,570,945	Income Tax Article 4 paragraph 2
Pajak Penghasilan Pasal 29	1,045,105,972	1,363,380,642	Income Tax Article 29
Pajak Pembangunan I (PB I)	232,344,881	155,291,276	Development tax
Subjumlah	15,013,252,965	13,167,978,446	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Penghasilan Pasal 21	42,502,451	1,933,350	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 23	241,205,348	13,688,553	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	126,581,508	24,680,527	Income Tax Article 4 paragraph 2
Subjumlah	410,289,307	40,302,430	Subtotal
Jumlah	15,423,542,272	13,208,280,876	Total

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expense (Benefit)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Perusahaan			Company
Beban Pajak Kini	1,595,748,000	5,396,663,265	Current Tax Expense
Entitas Anak			Subsidiary
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(1,689,529,033)	1,942,373,665	Deferred Tax Expense (Benefit)
Penyesuaian Tarif Pajak	--	(59,704,303)	Tax rate adjustment
Jumlah	(93,781,033)	7,279,332,627	Total

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

d. Pajak Kini

d. Current Tax

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Laba Sebelum Pajak Laporan			Profit Before Income Tax According To
Laba Rugi Konsolidasian	65,699,927,294	50,101,271,377	Consolidated Statements of Profit or Loss
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	22,583,891,641	14,594,024,689	Losses (Income) Before Tax of Subsidiary
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak			Portion of Income Accounted for
Penghasilan Final	(81,030,433,618)	(40,165,008,497)	Final Income Tax
Bagian Laba Penghasilan Non Final Entitas Induk	7,253,385,317	24,530,287,569	Profit Before Tax of Parent Entity
Pembulatan	7,253,400,000	24,530,287,000	Rounding
Beban Pajak Kini			Income Tax Expenses
22% x 2021 : Rp 7,253,400,000	1,595,748,000	--	22% x 2021 : Rp 7,253,400,000
22% x 2020 : Rp 24,530,287,000	--	5,396,663,140	22% x 2020 : Rp 24,530,287,000
Jumlah Beban Pajak Kini	1,595,748,000	5,396,663,140	Total Current Tax Expenses
Dikurangi			Less :
Kredit Pajak PPh 22	(4,655,000)	--	Prepaid Tax Art 22
Kredit Pajak PPh 23	(185,942,530)	(3,653,812,839)	Prepaid Tax Art 23
Kredit Pajak PPh 25	(360,044,498)	(379,469,784)	Prepaid Tax Art 25
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	1,045,105,972	1,363,380,642	Under Payment Income Tax

e. Aset Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax Asset

2021						
Saldo Awal/ Beginning Balance	(Dibebankan)/ Dikreditkan ke Laba Tahun Berjalan/ (Charged)/Credited to Income for the year	Dikreditkan ke Ekuitas dari Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited to Equity from Other Comprehensive Income	Penyesuaian Tarif Pajak Terhadap Ekuitas dan Pendapatan Komprehensif Lain/ Impact on Tax Rate Adjustment on Equity and Other Comprehensive Income		Saldo Akhir/ Ending Balance	
Entitas Anak / Subsidiary						
Aset Tetap / Property, Plant and Equipment	743,914,151	7,826,757	--	--	751,740,908	
Imbalan Pascakerja / Post-Employment Benefit Liabilities	108,824,516	--	45,487,640	--	154,312,156	
Aset Hak Guna Usaha / Right-of-Use-Asset	31,989,576	(31,989,576)	--	--	--	
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	2,852,122,804	1,713,691,852	--	--	4,565,814,656	
Jumlah / Total	3,736,851,047	1,689,529,033	45,487,640	--	5,471,867,720	

2020						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Dampak Penerapan PSAK 71/ Effect of Initial Implementation SFAS 71	Penyesuaian Tarif Pajak Terhadap Laba Tahun Berjalan/ Impact on Tax Rate Adjustment on Income for The Year	Dikreditkan ke Ekuitas dari Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited to Equity from Other Comprehensive Income	(Dibebankan)/ Dikreditkan ke Laba Tahun Berjalan/ (Charged)/Credited to Income for the year	Dikreditkan ke Ekuitas dari Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited to Equity from Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance
Entitas Anak / Subsidiary						
Aset Tetap / Property, Plant and Equipment	1,560,492,444	--	(78,024,622)	--	(738,553,671)	743,914,151
Imbalan Pascakerja / Post-Employment Benefit Liabilities	86,045,502	--	(4,302,275)	--	27,081,289	108,824,516
Aset Hak Guna Usaha / Right-of-Use-Asset	--	--	--	31,989,576	--	31,989,576
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	--	3,945,901,174	142,031,200	--	(1,235,809,570)	2,852,122,804
Jumlah / Total	1,646,537,946	3,945,901,174	59,704,303	--	(1,942,373,665)	3,736,851,047

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dengan jumlah yang dihitung dengan menerapkan tarif pajak efektif terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the amount of tax expense and the amount calculated by applying an effective tax rate to profit before tax according to the income statement is as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Laba Sebelum Pajak Laporan	65,699,927,294	50,101,271,377	Profit Before Income Tax According To Consolidated Statement of Profit or Loss
Laba Rugi Konsolidasian			Losses (Income) Before Tax of Subsidiary
Rugi (Laba) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	22,583,891,641	14,594,024,689	Portion of Income Accounted for Final Income Tax
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final	(81,030,433,618)	(40,165,008,497)	Profit Before Tax of Parent Entity
Bagian Laba Penghasilan Non Final Entitas Induk	7,253,385,317	24,530,287,569	Rounding
Pembulatan	7,253,400,000	24,530,287,000	Applicable Tax Rate
Tarif Pajak yang Berlaku	1,595,748,000	5,396,663,265	Income Tax Expense (Benefit) - Subsidiary
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan - Entitas Anak	(1,689,529,033)	1,942,373,665	Tax rate adjustment
Penyesuaian Tarif Pajak	--	(59,704,303)	Income Tax Expenses (Benefit) - Net
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan - Bersih	(93,781,033)	7,279,332,627	

Perusahaan tidak menghitung aset pajak tangguhan yang berasal dari liabilitas imbalan pascakerja, aset tetap dan penyisihan penurunan nilai karena berkeyakinan aset pajak tangguhan yang muncul tidak dapat dipulihkan.

The Company does not calculate deferred tax assets originating from post employment benefit, property, plant and equipment and allowance for impairment losses because the deferred tax assets that appear not recoverable.

13. Uang Muka

13. Advances

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Uang Muka Pemasok	32,197,619,993	26,133,034,780	Advances to Suppliers
Uang Muka Subkontraktor	28,141,877,592	27,211,890,827	Advances to Subcontractors
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	8,758,104,815	14,218,863,401	Others (Each below Rp 1 Billion)
Jumlah	69,097,602,400	67,563,789,008	Total

Uang muka subkontraktor diberikan untuk modal kerja rekanan, ketika hasil pekerjaan subkontraktor telah mencapai kemajuan tertentu uang muka akan langsung menjadi beban proyek.

Advances to Subcontractors are provided for working capital of partners, when the results of the work of sub-contractors have achieved certain progress, the advance will be directly charged to the project expenses.

Uang muka pemasok akan menjadi beban ketika barang yang dipesan diterima dan langsung menjadi beban proyek.

Supplier advance will be charged to expense when the ordered goods are received and directly charged to the project.

14. Beban Dibayar di Muka

14. Prepaid Expenses

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Biaya Pelaksanaan Proyek	12,492,395,700	17,559,073,599	Project Implementation Cost
Asuransi	1,372,136,930	4,468,857,154	Insurance
Sewa Rumah/Kantor	885,301,980	1,270,714,713	Office/ Director Keet's Rental
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	3,508,325,441	4,457,441,303	Others (Each below Rp 1 Billion)
Jumlah	18,258,160,051	27,756,086,769	Total

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Biaya pelaksanaan proyek merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pabrik dan proyek yang belum dapat diperhitungkan dengan pendapatan usaha karena berita acara penyerahan barang belum ditandatangani.

For Project Implementation costs represent costs incurred for the purpose of a for project and factory needs that can not be accounted with revenues because minutes of goods handover have not been signed.

15. Beban Ditangguhkan

15. Deferred Expenses

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Proyek Pantai Malalayang	--	6,029,702,702	Proyek Pantai Malalayang
Lain-Lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	2,052,341,181	2,617,087,355	Others (Each below Rp 1 Billion)
Jumlah	2,052,341,181	8,646,790,057	Total

Beban ditangguhkan merupakan suatu aktivitas dari kegiatan untuk memperoleh suatu proyek baru atau pekerjaan-pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

Deferred expenses represent an activity to acquire new project or project works that are being carried out until the date of the financial statements.

16. Investasi pada Ventura Bersama

16. Investment in Joint Ventures

Nama Ventura Bersama / Name of Joint Venture	Proyek / Project	Persentase/ Percentage	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Bendungan Sadawarna	60%	86,910,259,714	48,793,265,804
Ventura Bersama Nindya - Bina Nusa Lestari	Bendungan Temef Di Kab. Timor Tengah Selatan Paket 3 (Myc)	70%	36,192,525,519	--
Ventura Bersama Nindya - Bahagia bangunnusa	Bendungan Tiusuntuk	65%	36,023,252,974	20,491,154,386
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Cisumdawu	8.7%	26,768,524,772	20,750,170,944
Ventura Bersama Nindya - Sacna	Bendungan Meninting	73%	25,670,607,171	24,705,105,535
Ventura Bersama Nindya - Modern Widya Tehnical	Fasilitas Sisi Udara Bandara Nabire Baru I	60%	15,285,687,925	11,668,915,482
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	Bendungan Bomberay	70%	13,656,000,001	11,351,826,632
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bau-Bau	70%	10,479,114,731	10,237,024,345
Ventura Bersama Nindya - Surya Mataram Sakti	Pengendalian Banjir Dan Rob Semarang - Demak Paket II	65%	9,816,558,877	--
Ventura Bersama Nindya - Rapi Tirta Treatmindo	SPAM Kalidendeng KAP.150 liter/detik	70%	8,545,666,575	5,133,046,638
Ventura Bersama Nindya - Passokkorang	Jalan Tompe-Dalam kota Palu	70%	8,535,281,898	7,043,598,028
Ventura Bersama Nindya - Abel	Proyek Preservasi Jalan SP. Perdau - Batu Ampar	65%	7,307,935,364	900,526,732
Ventura Bersama Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	Pembangunan Jl.Depapre	35%	7,169,011,266	7,169,011,266
Ventura Bersama Nindya - Damai	Jalan Bts. Kec. Siding/Seluas - Bts. Kec. Sekayan/Entikong (MYC)	60%	6,511,892,048	961,712,727
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	Waduk Bendo	33%	6,207,234,659	8,128,119,659
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	Irigasi Doplang	70%	5,077,000,003	6,139,765,660
Ventura Bersama Nindya - Tamiang	Jalan Rianiate	60%	4,897,921,217	4,897,921,217
Ventura Bersama Nindya - Bumi Agung Annusa	Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok - Mandalika	70%	4,519,430,140	3,731,011,299
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya	Bendungan Tanju Mila	60%	3,936,893,419	3,936,893,419
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita	Tol Solo - Kertosono	31%	3,823,209,117	3,823,209,117
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	Takengon - Uning	75%	2,610,613,645	2,610,613,645
Ventura Bersama Nindya - Inti	Ipal Aceh	60%	2,478,881,152	2,478,881,152
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Sei Wampu	45%	2,430,882,638	3,150,882,638
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Penta	Indoor Multifunction Stadium Dalam Rangka Kejuaraan Dunia Bola Basket Tahun 2023	30%	2,149,767,487	--
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	Jalur Main Line I KA Manggarai-Jatinegara	60%	1,957,576,013	3,151,320,121
Ventura Bersama Nindya - Bunga Raya Lestari	Pengembangan Dan Pembangunan MICE, Infrastruktur Kawasan Tana Mori Kabupaten Manggarai	60%	1,943,561,867	--
Ventura Bersama Nindya - Andesmont	Jaringan Irigasi Di. Bintang Bano Sumbawa Barat (Paket 3)	70%	1,867,543,207	209,659,904
Ventura Bersama Nindya - Kencana	Rembele Tahap II	70%	1,854,768,595	1,854,768,595
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Irigasi Batang Anai Tahap 2	70%	1,737,963,752	1,737,963,752
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Basuki	Sukodono	70%	1,521,569,360	1,521,569,360
Ventura Bersama Nindya - Mettana	Works For Pasigala Raw Water Transmission System Rehabilitation (Package II)	25%	1,295,000,000	--
Ventura Bersama Nindya - Surya	Waduk Pondok Ranggon Dan Waduk Wirajasa Berserta Kelengkapannya	98%	1,055,505,530	--
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	Irigasi Lematang	70%	--	5,679,729,674
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Pantai Marore	60%	--	2,854,128,002
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	Sungai Ciliwung	40%	--	1,300,190,644
Jumlah/ Total			(3,668,354,921)	15,986,334,994
			346,569,285,715	242,398,321,371

Ringkasan informasi keuangan agregasi di bawah ini merupakan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan ventura bersama dengan rincian sebagai berikut:

The aggregate summarized financial information below represents amounts shown in joint venture's financial statements with the details belows:

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Aset Lancar	1,459,849,986,487	3,106,580,152,682	Current Asset
Aset Tidak Lancar	50,070,919,360	81,279,360,376	Non-Current Asset
Liabilitas Jangka Pendek	917,772,848,838	2,139,907,333,518	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	165,556,971,537	275,802,689,920	Non-Current Liabilities
Pendapatan Usaha	1,747,795,881,795	1,575,543,116,338	Revenue
Laba Bersih Tahun Berjalan	188,121,076,489	147,512,457,434	Net Income
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	Other Comprehensive Income of The Year
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	188,121,076,489	147,864,469,776	Comprehensive Income of The Year

Mutasi investasi pada ventura Bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investment in joint ventures are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Nilai tercatat awal tahun	242,398,321,371	206,733,169,282	Carrying amount at beginning of year
Mutasi Investasi - bersih	(49,246,512,050)	(55,676,689,406)	Investment movements - net
Bagian Laba Ventura Bersama (Catatan 35)	153,417,476,394	91,341,841,495	Share in profit of joint ventures (Note 35)
Nilai tercatat akhir tahun	<u>346,569,285,715</u>	<u>242,398,321,371</u>	Carrying amount at the end of year

17. Investasi Jangka Panjang Lainnya

17. Other Long Term Investment

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	4,802,761,600	4,028,388,000	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
Jumlah	<u>4,802,761,600</u>	<u>4,028,388,000</u>	Total

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran - Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng is a company which its business activity is management of Kunciran-Cengkareng Toll Road, which include funding, technical planning, construction implementation, operation and maintenance of the Toll Road, as well as other business activities in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan tambahan setoran modal kepada PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp774.373.600, sehingga per 31 Desember 2021 nilai investasi Perusahaan menjadi Rp4.802.761.600 dengan persentase kepemilikan sebesar 0,32%.

In 2021, the Company paid an additional capital deposit to PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp774,373,600, therefore as of December 31, 2021 the Company's investment value was Rp4,802,761,600 with ownership percentage of 0.32%.

Aset ini dikelompokkan ke dalam aset yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi.

These assets are classified as fair value through profit or loss.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Manajemen berpendapat bahwa perubahan atas nilai wajar saldo investasi jangka panjang lainnya tidak material per tanggal 31 Desember 2021.

Management considered that the change in fair value on other long-term investment balances are immaterial as of December 31, 2021.

18. Properti Investasi

18. Investment Properties

31 Desember / December 31, 2021						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	165,936,183,601	--	--	102,108,000,000	268,044,183,601	Land
Bangunan	101,527,465,601	--	--	1,109,485,055	102,636,950,656	Building
Jumlah	267,463,649,202	--	--	103,217,485,055	370,681,134,257	Total
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	164,767,582,799	19,792,370,944	--	--	184,559,953,743	in Fair Value
Nilai Tercatat	432,231,232,001	19,792,370,944	--	--	555,241,088,000	Carrying Value
31 Desember / December 31, 2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	136,786,163,601	--	--	29,150,020,000	165,936,183,601	Land
Bangunan	101,527,465,601	--	--	--	101,527,465,601	Building
Jumlah	238,313,629,202	--	--	29,150,020,000	267,463,649,202	Total
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	145,007,930,372	19,759,652,427	--	--	164,767,582,799	in Fair Value
Nilai Tercatat	383,321,559,574	19,759,652,427	--	--	432,231,232,001	Carrying Value

Perusahaan melakukan reklasifikasi atas tanah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan Tenggilis Surabaya, Jalan La Madukelleng Makasar, Jalan Hayam Wuruk No.129 A Denpasar dan Jalan Nindya 9 Jayapura sebesar Rp102.108.000.000 dan reklasifikasi atas bangunan yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan La Madukelleng dan Jalan Hayam Wuruk Denpasar dengan nilai tercatat sebesar Rp1.109.485.055 (Catatan 19).

The Company reclassified lands located at Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan Tenggilis Surabaya, Jalan La Madukelleng Makasar, Jalan Hayam Wuruk No.129 A Denpasar and Jalan Nindya 9 Jayapura amounting to Rp102,108,000,000 and reclassified buildings located at Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan La Madukelleng and Jalan Hayam Wuruk Denpasar with carrying value is amounting to Rp1,109,485,055 (Note 19).

Properti Investasi merupakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Bajak V Medan (tanah) dengan luas tanah 9.363 m²; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian Sidoarjo (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 10.440 m²; Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (tanah) dengan luas tanah 4.572 m²; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.828 m²; Jl Majapahit Nomor 36, kel. Ampenan, Kec. Ampenan kota Mataram (tanah dan bangunan)

Investment Properties are the land and buildings located at Jl. Bajak V Medan (land) with area of 9,363 sqm; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo (land and building) with area of 10,440 sqm; Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (land) with area of 4,572 sqm; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (land and building) with area of 5,828 sqm Jl Majapahit Number 36, kel. Ampenan, Kec. Ampenan city of Mataram (land and buildings) with a land area of 5,977 sqm; Jl. Bontosunggu number 22

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dengan luas tanah 5.977 m²; Jl. Bontosunggu nomor 22 Makassar dengan luas tanah 1.559 m²; dan Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan dengan luas tanah 1.057 m²; Jl. Brigjend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan kota Semarang (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 3.768m²;Jl. Mustofa no 67 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan luas 1.338 m²; Tanah di Jl. Gedebage no 173, Cisaranten Kidul, Kota Bandung dengan luas 2.720 m²; Tanah dan bangunan SHGB No. 366/Harjosari II dengan luas tanah sebesar 5.170 m² yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Tanah di Jalan Tenggilis Tengah No. 4 Surabaya, Tanah dan bangunan SHGB No. 20019/Losari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 966 m² yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599.

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laba rugi konsolidasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp	Rp
Pendapatan Sewa	10,594,297,792	9,044,080,389
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang Menghasilkan Penghasilan Sewa	8,590,137,920	7,485,439,567

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan laporan tertanggal 02 November 2021 dan adanya penilaian yang di lakukan oleh KJPP Herman Meirizki & Rekan dengan laporan tertanggal 22 Desember 2021.

Hierarki nilai wajar Tingkat 2 dari properti investasi atas tanah dan bangunan yang disewakan dihitung berdasarkan hasil penilaian pendekatan berikut ini:

- Pendekatan Pendapatan
Input yang paling signifikan dalam pendekatan ini adalah asumsi-asumsi digunakan dalam perhitungan tingkat kapitalisasi seperti tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan.
- Pendekatan Biaya
Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Biaya pengganti

Makassar with a land area of 1,559 sqm; and Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan with a land area of 1,057 sqm; Jl. Brigjend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan, city of Semarang (land and buildings) with a land area of 3,768 sqm; Jl. Mustofa no 67 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung 1,338 sqm; Land in Jl. Gedebage no 173, Cisaranten Kidul, Kota Bandung dengan luas 2,720 sqm; Land and building SHGB No. 366/Harjosari II with a land area of 5,170 m² which is located on Jl. Sisingamaraja Ex. Harjosari II, Medan Amplas Subdistrict, Medan City, North Sumatra, Land on Central Tenggilis Street No. 4 Surabaya, Land and building SHGB No. 20019/Losari on behalf of the Company with a land area of 966 m² located on Jl. Lamadukelleng No. 28 Ex. Losari, Ujung Pandang District, Makassar City, South Sulawesi, Land/office building and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Ex. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya above SHGB No. 599.

Rental revenue earned and direct operating expenses from investment properties on consolidated profit and loss are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp	Rp
Pendapatan Sewa	10,594,297,792	9,044,080,389
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang Menghasilkan Penghasilan Sewa	8,590,137,920	7,485,439,567

The fair value of the investment property as of December 31, 2021 was estimated based on an assessment of the market value conducted by KJPP Jimmy Prasetyo & Partners report dated November 2, 2021 and an assessment conducted by KJPP Herman Meirizki & Rekan with a report dated December 22, 2021.

The Level 2 fair value hierarchy of investment properties for land and buildings that are rented is calculated using following approaches:

- Income Approach
The most significant input in this valuation approach is the estimated cost that used in capitalized rate for disconto and growth rate.
- Cost Approach
The most significant input in this valuation approach is the estimated cost of the new reproduction or replacement. The replacement

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

baru disesuaikan dengan estimasi penyusutan dengan mempertimbangkan tingkat umur ekonomis, kemunduran fisik dan keusangan.

costs are adjusted for estimated depreciation by considering the rate of economic age, physical deterioration and obsolescence.

Properti investasi berupa tanah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 23).

Investment properties in the form of land were used as collateral to borrowings (Note 23).

19. Aset Tetap

19. Property, Plant and Equipment

31 Desember 2021 / December 31, 2021						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan/Revaluasi:						Acquisition Cost / Revaluated:
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	380,121,238,192	1,544,599,808	--	(102,108,000,000)	10,711,225,000	290,269,063,000
Bangunan	133,271,769,408	3,197,493,188	--	(3,726,604,599)	--	132,742,657,997
Mesin dan Peralatan	189,340,383,010	--	(9,259,802,539)	515,000,000	--	180,595,580,471
Kendaraan	8,921,989,573	--	(3,134,379,338)	--	--	5,787,610,235
Inventaris Kantor	13,601,725,118	--	--	--	--	13,601,725,118
Inventaris Mess	9,586,000	--	--	--	--	9,586,000
Aset dalam Penyelesaian	7,605,306,119	10,851,488,458	--	(515,000,000)	--	17,941,794,577
Jumlah	732,871,997,420	15,593,581,454	(12,394,181,877)	(105,834,604,599)	10,711,225,000	640,948,017,398
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Bangunan	45,265,280,273	11,223,412,637	--	(2,662,107,908)	--	53,826,585,002
Mesin dan Peralatan	108,622,767,971	21,603,251,240	(9,259,802,539)	--	--	120,966,216,672
Kendaraan	6,265,003,491	858,986,068	(3,134,379,336)	--	--	3,989,610,223
Inventaris Kantor	11,638,135,261	1,105,138,735	--	--	--	12,743,273,996
Inventaris Mess	9,585,993	--	--	--	--	9,585,993
Jumlah	171,800,772,989	34,790,788,680	(12,394,181,875)	(2,662,107,908)	--	191,535,271,886
Nilai Tercatat	561,071,224,431					449,412,745,512
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan/Revaluasi:						Acquisition Cost / Revaluated:
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	409,271,258,192	--	--	(29,150,020,000)	--	380,121,238,192
Bangunan	103,590,211,921	--	--	29,681,557,487	--	133,271,769,408
Mesin dan Peralatan	189,132,310,280	208,072,730	--	--	--	189,340,383,010
Kendaraan	8,921,989,573	--	--	--	--	8,921,989,573
Inventaris Kantor	13,601,725,118	--	--	--	--	13,601,725,118
Inventaris Mess	9,586,000	--	--	--	--	9,586,000
Aset dalam Penyelesaian	20,878,978,873	16,407,884,733	--	(29,681,557,487)	--	7,605,306,119
Jumlah	745,406,059,957	16,615,957,463	--	(29,150,020,000)	--	732,871,997,420
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Bangunan	35,825,538,024	9,439,742,249	--	--	--	45,265,280,273
Mesin dan Peralatan	83,036,069,566	25,586,698,405	--	--	--	108,622,767,971
Kendaraan	5,325,989,565	939,013,926	--	--	--	6,265,003,491
Inventaris Kantor	10,232,719,819	1,405,415,442	--	--	--	11,638,135,261
Inventaris Mess	9,585,993	--	--	--	--	9,585,993
Jumlah	134,429,902,967	37,370,870,022	--	--	--	171,800,772,989
Jumlah Tercatat	610,976,156,990					561,071,224,431

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perusahaan melakukan reklasifikasi atas tanah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan Tenggilis Surabaya, Jalan La Madukelleng Makasar, Jalan Ciung Wanara Denpasar dan Jalan Nindya 9 Jayapura sebesar Rp102.108.000.000 dan reklasifikasi atas bangunan yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan La Madukelleng dan Jalan Hayam Wuruk Denpasar dengan nilai tercatat sebesar Rp1.109.485.055 (Catatan 18).

Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset dalam penyelesaian menjadi mesin dan peralatan atas alat *Bitumen Decanter* milik Divisi Peralatan sebesar Rp515.000.000.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 23).

Bangunan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp133.271.769.408 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, dan PT Asuransi Jasa Tania.

Beban penyusutan dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban administrasi dan umum dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	30 Juni/ June 30, 2020 Rp
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 34)	20,828,701,782	25,847,460,101
Beban Administrasi dan Umum (Catatan 36)	13,962,086,898	11,523,409,921
Jumlah	34,790,788,680	37,370,870,022

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2021 dan 2020.

The Company reclassified lands located at Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan Tenggilis Surabaya, Jalan La Madukelleng Makasar, Jalan Ciung Wanara Denpasar and Jalan Nindya 9 Jayapura amounting to Rp102,108,000,000 and reclassified buildings located at Jalan Sisingamangaraja Medan, Jalan La Madukelleng and Jalan Hayam Wuruk Denpasar with carrying value is amounting to Rp1,109,485,055.(Note 18).

The Company reclassified asset in settlement into machinery and equipment of Bitumen Decanter equipment that belong to the Equipment Division amounting to Rp515,000,000.

Fixed asset, such as land and building, are used as collateral for bank loans in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 23).

Building and vehicle are insured with of coverage value amounting to Rp133,271,769,408 against the risk of fire accident and others to PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, and PT Asuransi Jasa Tania.

Depreciation expenses allocated to cost of revenues and general and administrative expenses, with the details are as follows:

Cost of Revenue (Note 34)
General and Administrative Expense (Note 36)
Total

Based on Management review, there are no events or changes in circumstances that indicate impairment of fixed asset, the Management does not provide allowance for impairment of property plant and equipment as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

20. Aset Keuangan Perjanjian Konsesi Jasa

20. Service Concession Arrangement of Financial Assets

Aset Keuangan Konsesi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.321.338.724 dan nihil.

Concession Financial Assets as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp13,321,338,724 and nil, respectively.

Akun ini merupakan piutang jangka panjang dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum sehubungan dengan pembayaran ketersediaan layanan di masa depan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dan Pengelolaan Unit Produksi di Kesugihan (Bangun, Kelola, Alih Milik) yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 16.

This account represents long-term receivable from Perusahaan Umum Daerah Air Minum in relation to the future service availability payments set forth in Cooperation Agreement for Investment and Management of Production Units at Kesugihan (Build, Manage, Transfer of Ownership) that have been classified as financial asset as a result of adoption of ISAK 16.

Pada akhir masa konsesi 15 tahun terhitung setelah sejak tanggal operasi, aset prasarana, aset fasilitas perawatan prasarana dan aset fasilitas perawatan sarana dikembalikan ke pemberi konsesi.

At the end of the concession period of 15 years from the date of operation, infrastructure assets, maintenance facility assets and maintenance facility assets will be returned to the concessionaire

Pada bulan Oktober 2021, Perusahaan memulai pelaksanaan konstruksi untuk proyek konsesi ini.

On October 2021, the Company has started its construction progress on this concession project.

21. Aset Lain-lain

21. Other Assets

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Aset yang Diambilalih	--	12,445,151,929	Foreclosed Assets
Tanah yang Sedang Dikembangkan	--	6,092,209,680	Under Developed Land
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 milyar)	32,860,000	532,860,000	Others (each below Rp1 Billion)
Jumlah	32,860,000	19,070,221,609	Total

Perusahaan telah melakukan reklasifikasi atas tanah yang sedang dikembangkan sebagai persediaan berupa tanah yang sedang dikembangkan dan akan digunakan sebagai perumahan (Catatan 11).

The Company reclassified under developed land into Inventory as land underdevelopment that would be utilized as residences (Note 11).

Aset yang diambilalih adalah aset milik Divisi Properti yang diperoleh atas pelunasan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan Memo Dinas dari Sekretaris Perusahaan No.1489/MD/SEKPER/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang penyelesaian Kewajiban PT Sadang Terminal Square sebesar Rp10.936.051.929 dan apartemen Dago Suites sebesar Rp1.509.100.000.

Foreclosed assets are assets obtained for the settlement of third party liabilities based on the Memo from the Corporate Secretary No.1489/MD/SEKPER/12/2020 dated December 23, 2020 regarding the settlement of obligations of PT Sadang Terminal Square amounting to Rp10,936,051,929 and Dago Suites apartment is amounting to Rp1,509,100,000.

Perusahaan telah melakukan reklasifikasi atas aset yang diambilalih tersebut menjadi properti yang siap dijual dalam akun persediaan (Catatan 11).

The Company reclassified foreclosed assets into property that ready for sale into inventories (Note 11).

22. Utang Usaha

22. Accounts Payable

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Utang Pemasok	782,857,082,256	708,150,550,350	Supplier Payable
Utang Subkontraktor	492,264,178,049	750,533,882,567	Sub Contractor Payable
Jumlah	1,275,121,260,305	1,458,684,432,917	Total

Dengan rincian berdasarkan sifat transaksi adalah sebagai berikut:

The details based on nature of the transaction are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Pihak Berelasi:			Related Parties:
Utang Pemasok	44,983,132,233	16,162,189,051	Supplier Payable
Utang Subkontraktor	611,740,398	2,119,312,802	Sub Contractor Payable
Jumlah Pihak Berelasi	45,594,872,631	18,281,501,853	Total Related Parties
Pihak Ketiga:			Third Parties:
Utang Pemasok	737,873,950,023	691,988,361,299	Supplier Payable
Utang Subkontraktor	491,652,437,651	748,414,569,765	Subcontractor Payable
Jumlah Pihak Ketiga	1,229,526,387,674	1,440,402,931,064	Total Third Parties
Jumlah Utang Usaha	1,275,121,260,305	1,458,684,432,917	Total Account Payable

Utang usaha adalah utang kepada pemasok dan utang kepada subkontraktor. Utang kepada pemasok adalah utang yang terjadi atas pengadaan bahan-bahan proyek kepada *leveransir/supplier*, sedangkan utang kepada subkontraktor adalah utang yang terjadi atas pengadaan jasa borongan meliputi pengadaan material dan jasa di proyek.

Accounts payable represent payables to the supplier and the sub-contractor. Debt to supplier is debt that occurred for the procurement of project materials to the leveransir/supplier, otherwise debt to sub-contractor is a debt incurred for the procurement of wholesale services including the procurement of materials and services in the project.

23. Pinjaman Bank dan Non - Bank

23. Bank and Non - Bank Loans

a. Pinjaman Bank dan Non- Bank Jangka Pendek

a. Short Term Bank and Non – Bank Loans

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Liabilitas Jangka Pendek			Short-Term Liability
Pihak Berelasi:			Related Parties:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	110,000,000,000	166,500,000,000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65,349,156,786	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	188,200,000,000	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT PPA Finance	--	14,986,180,200	PT PPA Finance
Jumlah Pihak Berelasi	175,349,156,786	369,686,180,200	Total Related Parties
Pihak Ketiga:			Third Parties:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	146,000,000,000	217,400,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Pinjaman Bank dan Nonbank Jangka Pendek	321,349,156,786	587,086,180,200	Short-Term Bank and Nonbank Loan

b. Pinjaman Bank dan Non- Bank Jangka Panjang

b. Long Term Bank and Non – Bank Loans

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Liabilitas Jangka Panjang			Long-Term Liability
Pihak Berelasi:			Related Parties:
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	180,000,000,000	--	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	65,000,000,000	359,818,000,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT PPA Finance	24,632,212,593	16,558,313,289	PT PPA Finance
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	66,000,000,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	269,632,212,593	442,376,313,289	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Less current maturities
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(110,000,000,000)	--	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	(65,000,000,000)	(109,650,843,214)	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT PPA Finance	(18,362,622,155)	--	PT PPA Finance
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	(66,000,000,000)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	(193,362,622,155)	(175,650,843,214)	Total
Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang - Bersih	76,269,590,438	266,725,470,075	Total Long - Term Liability - Net

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Nindya Karya (Persero) No. 245/KKO-KO2/2021 tanggal 5 April 2021, Perusahaan mendapatkan pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), sebagai berikut:

- Jenis fasilitas kredit yaitu Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) *Standby Loan switchable* fasilitas *non cash loan*. Fasilitas KMKK *standby loan switchable* fasilitas *Non Cash Loan* dengan sifat *revolving* dengan proyek yang berbeda. Sifat fasilitas *Non Cash Loan II* adalah *uncommitted, advised, revolving*.
- Modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN. Fasilitas *Non Cash Loan* dapat digunakan sebagai sarana disposisi untuk transaksi seperti SKBDN, L/C, Bank Garansi, dan *Supply Chain Financing (SCF)*.
- Pagu kredit sebesar Rp700.000.000.000, dengan rincian Fasilitas *Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000.000.000, yang dapat ditarik untuk pembiayaan proyek sedangkan Fasilitas *Non Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000.000.000.
- Jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit sebelumnya 11 April 2021 sampai dengan 11 April 2022.
- Piutang proyek diikat secara fidusia sebesar 125% dari plafon kredit.
- Tingkat Suku Bunga sebesar 8,50%-9,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo awal tahun 2021 adalah sebesar Rp217.400.000.000. Total pencairan pinjaman dari periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp 272.500.000.000. Total pembayaran pinjaman jatuh tempo Januari sampai dengan Desember tahun 2021 sebesar Rp343.900.000.000. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp146.000.000.000.

2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

- Berdasarkan surat yang diterbitkan No. S-452/SMI/DPI/0621 tanggal 22 Juni 2021, Perusahaan mendapatkan kredit modal kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) melalui fasilitas pembiayaan modal kerja *revolving* fasilitas pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Based on the Letter of Offer for Extension of Credit Facility PT Nindya Karya (Persero) No. 245/KKO-KO2/2021 dated on April 5, 2021, the Company obtained a loan from PT Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk (BJB Bank), are as follows:

- Type of credit facility is Working Capital Credit Constructions (KMKK) facility *Standby Loan switchable non cash loan*. The KMKK *standby loan switchable* facility is a *Non Cash Loan* facility with a revolving nature with different projects. The nature of the *Non Cash Loan II* facility is *uncommitted, advised, revolving*.
- Working capital of construction and procurement services for the project which the funds originate from APBN/APBD/SOE. disposition for such transactions, such as SKBDN, L/C, Bank Bond, and Supply Chain Financing (SCF).
- Maximum credit limit is amounting to Rp700,000,000,000, with the details maximum of Cash Loan Facility is Rp350,000,000,000, which could be drawn for project financing, therefore the maximum of Non-Cash Loan Facility is Rp350,000,000,000.
- The loan term is 12 (twelve) months from the previous credit maturity date April 11, 2021 until April 11, 2022.
- Project receivables are tied in fiduciary terms of 125% of the maximum credit limit
- Interest rate at 8,50%-9,00%.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has comply all the terms and conditions required by the bank covenant.

The beginning balance of 2021 is Rp217,400,000,000. The total loan disbursement from January until December 2021 is amounting to Rp272,500,000,000. The total loan repayment are due from January until December 2021 is amounting to Rp343,900,000,000. The balance on December 31, 2021 is Rp146,900,000,000.

2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

- Based on the credit agreement No. S-452/SMI/DPI/0621 dated June 22, 2021, the Company obtained working capital loans from PT Sarana Multi infrastructure (Persero) (PT SMI) through a revolving working capital Financing Facility agreement and Financing Facilities.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- a. Pagu kredit sebesar Rp200.000.000.000;
 - b. Keperluan modal kerja untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai berikut:
 - Proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket – II) di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03-AS/ KONT/ SNVT PB NT I/904 /2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - Proyek Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk (Paket I) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan NoHK.02.03 / KONT /SNVT PB NT I/38/2020 tanggal 23 Januari 2020;
 - Proyek Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket III di Kabupaten Oku Selatan, berdasarkan Surat Perjanjian No. 01/SP /Bend.II /PB-Ah /2019 tanggal 16 Oktober 2018;
 - Proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sesuai POJK No. 46/POJK.05/2020 tanggal 27 Oktober 2020, berikut perubahannya;
 - c. Jangka waktu: 30 bulan sejak 27 Juni 2021 s/d 27 Desember 2023;
 - d. Tingkat Suku Bunga sebesar 8,75% per tahun
 - e. Jaminan sesuai dengan persyaratan dari kreditur dalam fasilitas pembiayaan ini, adalah sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 366/Harjosari II atas Nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 5.170m2 yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 18);
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 118/Harjosari II atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.442 m2 yang terletak di Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 19);
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 20019/Losari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 966 m2 yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Catatan 18);
- a. Maximum credit limit amounting to Rp200,000,000,000;
 - b. Working capital purposes are to carry out the construction of infrastructure project are as follow:
 - Beringin Sila Dam Project (Package - II) in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, based on Unit price Contract Agreement No HK.02.03-US / KONT / SNVT PB NT I / 904/2018 dated December 31, 2018;
 - Tiu Suntuk Dam Project (Package - II) in West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, based on Unit Price No Contracts Agreement HK.02.03 / KONT / SNVT PB NT I /38/2020 date on January 23, 2020;
 - Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Dam Construction Project Package III in Oku Selatan Regency, based on the Letter of Agreement No. 01/SP /Bend.II /PB-Ah /2019 dated October 16, 2018;
 - Other infrastructure projects financed from APBN funds and in accordance with POJK No. 46/POJK.05/2020 dated October 27, 2020, following the amendments;
 - c. Period: 30 months starting from June 27, 2021 until December 27, 2023;
 - d. Interest rate at 8,75% per annum
 - e. The collaterals in accordance to the requirements of the creditor in this financing facility, are as follows:
 - Land and building with SHGB No. 366 /Harjosari II registered under the name of Company with a land area of 5,170m2 located on Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatera (Note 18);
 - Land and building with SHGB No. 118/Harjosari II registered under the name of Company with a land area of 1,442 m2 located on Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatera (Note 19);
 - Land and building with SHGB No 20019/Losari registered under the name of Company with a land area of 966 m2 located on Jl. Lamadukelleng no. 28, Kec. Losari, Kel Ujung Pandang, South Makassar (Note 18).

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Tanah dan bangunan SHGB no 601/Sukarami atas nama perusahaan dengan luas tanah sebesar. 1.619 m2 yang terletak di Kel Sukarami, Kec, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Catatan 19).
- Tanah dan bangunan SHGB No 22/Neglasari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.085 m2 yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 18);
- Tanah dan bangunan SHGB no. 23/Neglasari atas nama perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.085 m2 yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 18);
- Tanah dan bangunan SHGB no. 00023/Besusu Tengah atas nama PT Nindya Karya (Persero) dengan luas tanah sebesar 1.548 m2 yang terletak di Kel.Basusu Tengah, Kec. Palu Timur, Sulawesi Tengah (Catatan 19).
- Tanah dan bangunan SHGB no 18/Besusu atas nama perusahaan dengan luas tanah sebesar 2.016 m2 yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur, Sulawesi tengah (Catatan 19);
- Tanah dan bangunan SHGB No 00022/Besusu Tengah atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.078 m2 yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kab. Dongkaka, Sulawesi Tengah (Catatan 18);
- Tanah dan bangunan SHGB No. 25/Besusu atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.169 m2 yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Sulawesi Tengah (Catatan 19);
- Tagihan/piutang (siswa termin) atas proyek yang dibiayai dan akan dilakukan pengikatan awal secara fidusia minimal sebesar 150% dari total fasilitas pembiayaan. Selanjutnya nilai tagihan /piutang (siswa termin) dijaga minimal 150% dari outstanding fasilitas pembiayaan;
- Tagihan/piutang (siswa termin) atas proyek yang dibiayai dan akan dilakukan pengikatan awal secara
- Land and building with SHGB No. 601/Sukarami registered under the name of Company with a land area of 1,619 m2 located in Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Palembang, South Sumatera (Note 19);
- Land and building with SHGB No. 22/Neglasari registered under the name of Company with a land area of 1,085 m2 located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 18);
- Land and building with SHGB no.23/Neglasari registered under the name of Company with a land area of 1,085 m2 located on Jl. Penghulu H.Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 18).
- Land and building with SHGB No. 00023/ Central Besusu registered under the name of PT Nindya Karya (Persero) with a land area of 1,548 m2 located in Kel. Central Basusu Kec. Palu Timur, Central Sulawesi (Note 19);
- Land and building ownership proven by SHGB No. 18/Besusu registered under the name of Company with a land area of 2,016 m2 located in Basusu Palu Tengah districts, Central Sulawesi (Note 19);
- Land and building with SHGB No. 00022/Besusu Tengah registered under the name of Company with a land area of 1,078 m2 located in Basusu tengah Palu Timur Districts, Central Sulawesi (Note 18);
- Land and building with SHGB No. 25/Besusu registered under the name of Company with a land area of 1,169 m2 located in Kel. Centre Basusu, East Palu Districts, Central Sulawesi (Note 19);
- Billing/accounts receivable (remaining terms) for a project that was financed and will be conducted early in a binding fiduciary minimum of 150% of the total financing facility. For further invoice/receivable (the remainder of the term) is kept for a minimum of 150% of the outstanding financing facility;
- Billing/accounts receivable (remaining terms) for the project being financed and initial fiduciary binding will be

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

fidusia minimal sebesar 150% dari total fasilitas pembiayaan. Selanjutnya nilai tagihan /piutang (siswa termin) dijaga minimal 150% dari outstanding fasilitas pembiayaan;

- Pembayaran utang pokok fasilitas pembiayaan ini dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian kontrak antara Debitur dengan pemberi kerja atau pemilik proyek infrastruktur (bawhaer) atau berakhirnya jangka waktu fasilitas pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo awal tahun 2021 adalah sebesar Rp188.200.000.000. Total pencairan pinjaman selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp201.437.000.000. Total pembayaran pinjaman jatuh tempo selama Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp209.637.000.000. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp180.000.000.000.

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No. BNI/2.1/023, tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

KMK Transaksional

a. Pagu kredit sebesar Rp375.000.000.000;

b. Tingkat suku bunga sebesar 8.85%

c. Jangka Waktu:

- Periode: 12 bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2022. Sesuai dengan surat No. BNI/2.1/023 tanggal 20 Januari 2021, fasilitas pinjaman telah diperpanjang sampai 20 Januari 2022.
- Realisasi Kredit: maksimal sesuai dengan jangka waktu proyek dalam kontrak.

KMK Revolving

a. Pagu kredit sebesar Rp50.000.000.000;

b. Jangka Waktu: 12 bulan sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2022.

c. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk keperluan operasional perusahaan.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

carried out at a minimum of 150% of the total financing facility. Furthermore, the value of invoices/receivables (remaining terms) is maintained at least 150% of the outstanding financing facility;

- Principal of payment of financing facility is to be conducted by no more than due date of the contractual agreements between the debtor and the owner of the infrastructure projects or the end of period financing facility.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has comply all the terms and conditions required by the bank covenant.

The beginning balance in 2021 is Rp188,200,000,000. The total loan disbursement for period from January to December 2021 is amounting Rp201,437,000,000. The total loan repayment period are due from January until December 2021 is amounting to Rp209,637,000,000. The balance as of December 31, 2021 is Rp180,000,000,000.

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on letter No. BNI/2.1/023, dated January 20, 2021, the Company obtained an extension of credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, with the details are as follows:

KMK Transactional

a. Maximum credit limit is amounting to Rp375,000,000,000;

b. Interest rate at 8,85%

c. Period :

- Credit limit: 12 months from the due date of the facility, namely from January 21, 2021 to January 20, 2022. In accordance with letter No. BNI/21/ 023 dated January 20, 2021, the loan facility has been extended until January 20, 2022.
- Credit realization: Maximum realization in accordance with the duration of the project in the contract.

KMK Revolving

a. Maximum limit is amounting to Rp50.000.000.000;

b. Period: 12 months starting January 21, 2021 until January 20, 2022.

c. The purpose: Additional working capital for the company operating necessities.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Non Cash Loan

- a. Pagu kredit sebesar Rp2.675.000.000.000
- b. Jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2022. Sesuai dengan surat No. BNI/2.1/023 tanggal 20 Januari 2021, fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 20 Januari 2022.

Jaminan

- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Brigjend Sudiarto No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah di atas SHGB No. 2 dan SHGB No. 111 atas nama Perusahaan (Catatan 19);
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan SHGB No. 721 dan SHGB No. 725 atas nama Perusahaan (Catatan 19);
- Tanah/bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung dengan SHGB No. 05 atas nama Perusahaan (Catatan 19);
- Tanah di Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara dengan SHGB No. 546 atas nama Perusahaan (Catatan 19);
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur di atas SHGB No. 2 atas nama Perusahaan (Catatan 19);
- Tanah/bangunan rumah tinggal serta gudang terletak di Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan di atas SHGB No. 20005/Manuruki (d/h 4197 /Mangasa) atas nama Perusahaan (Catatan 19);
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 798/Gurabesi (d/h No. 508/Gurabesi) atas nama Perusahaan (Catatan 19);
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599 atas nama Perusahaan (Catatan 19);
- Tanah/bangunan gedung kantor pusat di Jl. Letjend. Haryono MT Kav. 22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur di atas SHGB No. 36 atas nama Perusahaan (Catatan 19).

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Non cash loan

- a. Maximum credit limit amounting to Rp2,675,000,000,000;
- b. Period 12 months since January 21, 2021 until January 20, 2022. Based on the letter No. BNI/2.1/023 dated January 20, 2021, the loan facility has been extended until January 20, 2022.

Collaterals

- Land/office building and warehouse on Jl. Brigjend Sudiarto No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah on SHGB No. 2 and SHGB No. 111 registered under the name of the Company (Note 19);
- Land/residential house on Jl. Tenggilis Tengah No 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kab. Surabaya, East Java Timur with SHGB No. 721 and SHGB No. 725 registered under the name of the Company (Note 19);
- Land/building on Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung city, Lampung with SHGB No. 05 registered under the name of the Company (Note 19);
- Land in Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatra Utara with SHGB No. 546 registered under the name of the Company (Note 19);
- Land/office building and warehouse on Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Krian, Sidorejo, Sidoarjo, East Java, on SHGB No. 2 registered under the name of the Company (Note 19);
- Land/building of house and warehouse located on Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, South Sulawesi on SHGB No. 20005 /Manuruki (4197 /Mangasa) registered under the name of the Company (Note 19);
- Land/residential house on Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 798/Gurabesi (No. 508/Gurabesi) registered under the name of the Company (Note 19);
- Land/office building and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 599 registered under the name of the Company (Note 19);
- Land/main office building on Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, East Jakarta, on SHGB No. 36 registered under the name of the Company (Note 19).

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Surat No. BNI/2.3/108/R tanggal 10 Mei 2019, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut:

- a. Pagu kredit sebesar Rp175.000.000.000;
- b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket 1 (MYC);
- c. Jangka Waktu: 45 bulan terhitung sejak perjanjian kredit ;
- d. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat cession dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

Saldo pada awal tahun 2021 adalah sebesar Rp359.818.000.000. Total pencairan pinjaman dari periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp2.760.037.039.536. Total pembayaran pinjaman jatuh tempo dari periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp3.054.855.039.536. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.000.000.000.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa Batasan untuk mempertahankan batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 5 kali; dan
- Rasio *Debt Service Coverage* minimum 100%

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.062/2019 tanggal 02 September 2019 dan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.099/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dan Tambahan Limit Fasilitas Non Cash Loan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

1) Fasilitas kredit modal kerja

- a. Pagu kredit sebesar Rp300.000.000.000;
- b. Tujuan penggunaan: tambahan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan proyek jasa Konstruksi sesuai dengan SPK/Kontrak;
- c. Jangka waktu: sejak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 25 Agustus 2022;
- d. Tingkat Suku Bunga sebesar 8,75%.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on the letter No. BNI/2.3/108/R dated May 10, 2019, the Company obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. are as follows:

- a. Maximum limit amounting to Rp175,000,000,000;
- b. The purpose: Additional working capital for The Rukoh Dam of Pidie District Package at 1 (MYC) Project;
- c. Period: 45 months starting from the credit facility is signed;
- d. Collateral: Accounts receivable of financed projects is tied with cession and associated with current facilities.

Balance at the beginning of 2021 is Rp359,818,000,000. The total loan disbursement from January until December 2021 is amounting to Rp2,760,037,039,536. Total loan repayments are due from January until December 2021 is amounting to Rp3,054,855,039,536. The balance as of December 31, 2021 is Rp65,000,000,000.

The Company is required to comply with some restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current ratio minimum 1 time;
- Debt to Equity Ratio maximum 5 times; and
- Debt Service Coverage Ratio minimum 100%

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has comply all the terms and conditions required by the bank covenant.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the letter No. CBG.CB2/SCD.SPPK.062/2019 dated September 2, 2019 and No. CBG.CB2/SCD.SPPK.099/2021 dated August 16, 2021. The Company obtained additional transactional KMK from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, with the details are as follows:

1) Working capital credit facility

- a. Maximum limit amounting to Rp300,000,000,000;
- b. Purpose of use: additional working capital to support the implementation of construction services projects in accordance with the SPK/Contract;
- c. Duration: since the signing of the addendum to the credit agreement until August 25, 2022;
- d. Interest rate at 8,75%

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

e. Jaminan:

- Piutang usaha dan/atau piutang retensi dan/atau piutang ventura bersama dan/atau tagihan bruto serta stock persediaan barang diikat fidusia (Catatan 6 dan 11);
- Sebidang tanah dan bangunan SHGB No.414/Cipinang Cempedak, seluas 5.828 m2 yang terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Perusahaan (Catatan 18);
- Dua bidang tanah dan bangunan SHGB No. 1689 dan 1690, seluas 159 m2 dan 100 m2 di Komp. Sudirman Business Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru atas nama Perusahaan (Catatan 19).

2) Non Cash Loan

- a. Pagu kredit sebesar Rp1.100.000.000.000;
- b. Jangka Waktu: sejak penandatanganan Perjanjian Kredit s.d. 25 Agustus 2022;
- c. Jaminan dikaitkan dengan jaminan KMK revolving.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada awal tahun 2021 adalah sebesar Rp66.000.000.000. Total pencairan pinjaman selama periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp165.349.156.786. Total pembayaran pinjaman jatuh tempo selama periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp166.000.000.000 Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.349.156.786.

5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berdasarkan surat persetujuan kredit No. BMN/SP3/15/2021 dan No. 006/PJMN/SP3/06/2021 tanggal 08 Juni 2021, Perusahaan, memperoleh kredit modal kerja dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), antara lain:

Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) *Trade Finance – Pre Shipment Financing* untuk Pembiayaan *Trust Receipt* (LC/SKBDN Jatuh Tempo)

Pagu kredit Rp400.000.000.000;

Tujuan penggunaan :

- 1) Pembiayaan modal kerja untuk proyek-proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

e. Collaterals:

- Account receivable and / or retention receivable and / or receivable from joint ventures and /or gross amount due from customers and stock inventory fiduciary bound (Notes 6 and 11);
- Land and building SHGB No.414/Cipinang Cempedak, with a land area 5,828 m2, located at Cipinang Cempedak, Jatinegara districts, Jakarta Timur registered under the name of Company (Notes 18);
- Two land and building SHGB No.1689 and 1690, with a land area 159 m2 and 100 m2, located at Sudirman Bussines Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru registered under the name of Company (Note 19).

2) Non Cash Loan

- a. Maximum limit amounting to Rp1,100,000,000,000;
- b. Period: since the signing of the credit agreement until August 25, 2022;
- c. Collateral is related with KMK revolving collateral.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has comply all the terms and conditions required by the bank covenant.

Balance at the beginning balance of 2021 is Rp66,000,000,000. The total loan disbursement from January until December 2021 is amounting to Rp165,349,156,786. Total repayment of loans from January until December 2021 is amounting to Rp166,000,000,000. The balance on December 31, 2021 is Rp65,349,156,786.

5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Based on the credit agreement letter No. BMN/SP3/15/2021 and 006/PJMN/SP3/06/2021 date June 8, 2021, the Company, obtained working capital credit from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), such as:

Export Working Capital Credit Financing Facility (KMKE) *Trade Finance – Pre Shipment Financing* for Trust Receipt Financing (LC/SKBDN Maturity)

Maximum credit limit is Rp400,000,000,000;

The purpose :

- 1) Working capital financing for foreign projects or domestic projects related/supporting

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

terkait/penunjang ekspor yang telah dan akan diperoleh;

- *Sublimit KMKE Trade Finance – Pre Shipment*
- Pembiayaan Trust Receipt (LC/SKBDN Jatuh Tempo) atas proyek dalam negeri ataupun proyek luar negeri yang terkait/penunjang ekspor yang telah dan akan diperoleh.
- Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2022;
- Tingkat suku bunga 8,75%-9,00%

Jaminan berupa:

- Piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau - dijamin oleh LPEI minimal 125% dari total pagu kredit (Catatan 6);
- Tanah dan bangunan diatas SHGB No. 19 - yang berlokasi di Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.918.000.000 (Catatan 19);
- Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 352 - yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali atas nama Perusahaan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp4.862.000.000 (Catatan 19);
- Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali atas nama perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp11.563.000.000 (Catatan 19);
- Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 65 dan SHGB No. 75 yang berlokasi di Jl. Majapahit No.36, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp10.133.000.000 (Catatan 19);
- Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 356 yang berlokasi di Jl. Parikesit No. 10, Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp999.000.000 (Catatan 19);
- Tanah di atas SHGB No. 1347 yang berlokasi di Jl. Cisait, Kelurahan Walantaka, Kragilan, Serang, Banten (Catatan 19).

Fasilitas Penerbitan dan/atau Pembiayaan LC/SKBDN

- a. Pagu kredit sebesar Rp150.000.000.000;
- b. Tujuan penggunaan untuk proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait /

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

exports that have been and will be obtained;

- *Sublimit KMKE Trade Finance – Pre Shipment*
- *Trust Receipt (LC/SKBDN Maturity) financing for domestic projects or foreign projects related/export support that has been and will be obtained.*
- *The period is for 1 (one) year, starting June 9, 2021 until June 9, 2022;*
- *Interest rate at 8,75%-9,00%*

Collaterals:

- *Accounts receivable over a contract that was financed and/or guaranteed by LPEI minimum 125% from the credit limit (Note 6);*
- *Land and building on SHGB No. 19 located at Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp1,918,000,000 (Note 19);*
- *Land and building on SHGB No. 352, located at Jl. Ciung Wanara no.1 Bandung registered under the name of the Company with first mortgage rating I amounting to Rp4,862,000,000 (Note 19);*
- *Land and building on SHGB No. 3 and SHGB No. 4 located on Jl. Hayam Wuruk No. 129-A desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp11,563,000,000 (Note 19);*
- *Land and building on SHGB No. 65 and SHGB No. 75 located at Jl. Majapahit No. 36, Desa Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp10,133,000,000 (Note 19);*
- *Land and building on SHGB no.356, located at Jl. Parikesit no.10, Cakranegara Barat Village, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp999,000,000 (Note 19);*
- *Land on SHGB No. 1347, located at Jl. Cisait, kelurahan Walantaka, Kragilan, Serang, Banten (Note 19).*

LC/SKBDN Publishing and/or Financing Facilities

- a. *Maximum credit limit is amounting to Rp150,000,000,000;*
- b. *The Purpose of usage is for the overseas or domestic projects, which related to projects*

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

menunjang perdagangan internasional (ekspor);

- c. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 9 Juni 2021 s/d 9 Juni 2022;
- d. Jaminan : piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Indonesia Eximbank minimal sebesar 125% dari total *plafond* kredit.

Fasilitas Penjaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- a. Pagu kredit sebesar Rp150.000.000.000;
- b. Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjang kegiatan ekspor;
- c. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2022;

Saldo pada awal tahun 2021 adalah sebesar Rp166.500.000.000. Total pencairan pinjaman selama periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp267,741,677,561. Total pembayaran pinjaman jatuh tempo periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp324.241.677.561. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp110.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

6. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat No. 291/IBD/EXT/21 tanggal 16 September 2021. Perusahaan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Pinjaman Money Market;
 - a. Pagu kredit sebesar Rp100.000.000.000;
 - b. Tujuan penggunaan: modal kerja umum;
 - c. Jangka Waktu: sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
- 2) Fasilitas Pembukaan SKBDN/ Bank Garansi
 - a. Pagu kredit sebesar Rp150.000.000.000;
 - b. Tujuan penggunaan: Melakukan realisasi pembelian bahan baku, bahan pendukung produksi dan suku cadang;
 - c. Jangka Waktu: sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
 - d. Jaminan : Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

that support international trade (export);

- c. The period is for 1 (one) year starting June 9, 2021 until June 9, 2022;
- d. Guarantees : accounts receivable for contracts that was financed and / or guaranteed by Indonesia Eximbank at a minimum of 125% of the total credit limit.

Indonesian Export Financing Agency Guarantee Facility

- a. Maximum credit limit is amounting to Rp150,000,000,000;
- b. The Purpose of usage is for infrastructure projects undertaken in both domestic and foreign, which support export activities;
- c. The period of 1 (one) year, starting on June 23, 2021 until June 23, 2022.

The balance at the beginning of 2021 is Rp166,500,000,000. The total loan disbursement from January until December 2021 is amounting Rp267,741,677,561 The total loan repayment are due period from January until December 2021 is amounting to Rp324,241,677,561. The balance as of December 31, 2021 is Rp110,000,000,000.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has comply all the terms and conditions required by the bank covenant.

6. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on Letter No. 291/IBD/EXT/21 dated September 16, 2021. The Company obtained facilities are as follows:

- 1) Money Market Loan Facility;
 - a. Maximum credit limit is amounting to Rp100,000,000,000;
 - b. The purpose: general working capital;
 - c. Period: until July 7, 2022;
- 2) SKBDN Facility/Bank Guarantee Facility
 - a. Maximum credit limit is amounting to Rp150,000,000,000;
 - b. The purpose: Realizing the purchase of raw materials, production support and spare parts;
 - c. Period: until July 7, 2022;
 - d. Collateral : Fiduciary on existing project contracts with a minimum value of 100% of the Loan Principal.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 3) Fasilitas Transaksi Valuta Asing
- Pagu kredit sebesar USD2,000,000;
 - Tujuan penggunaan: Memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung-nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional;
 - Jangka Waktu: sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022

Saldo awal tahun 2021 adalah sebesar Nihil. Total pencairan pinjaman selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp350.000.000.000. Total pelunasan pinjaman periode Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp350.000.000.000. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Nihil.

7. PT PPA Finance

Berdasarkan Surat No. 063/PPAF-DIR/II-2021 tanggal 05 Februari 2021, PT Nindya Beton mendapatkan kredit modal kerja dari PT PPA Finance perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan Anjak Piutang.

Anjak Piutang

Invoice dan atau dokumen lainnya yang dilampirkan sebagai syarat penagihan kepada konsumen sesuai dengan dokumen persyaratan penagihan yang disebutkan dalam Perjanjian antara PT Nindya Beton dengan konsumen;

Cek/bilyet giro dari rekening operasional PT Nindya Beton sebagai jaminan pembayaran factoring pada saat jatuh tempo;

Factoring with recourse

Pagu Rp15.000.000.000;
Jangka waktu plafond 12 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Plafond, bersifat revolving;

Konsumen:

- PT Nindya Karya (Persero)
- PT Waskita Karya, Tbk (Persero)
- PT Cakra Kencana Indah
- PT Kadi International

Pembiayaan factoring maksimal 80% x nilai tagihan/ invoice di luar pajak.

Tingkat bunga sebesar 15% p.a

Jangka waktu/ tenor maksimum 180 Hari Kalender

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. Foreign Exchange Transaction Facility:
- Maximum credit limit is amounting to USD2,000,000;
 - The purpose: operational transaction for foreign exchange to fulfill the foreign exchange transaction needs and hedging which arising from the operational activities;
 - Period: until October 7, 2022;

Balance at the beginning of 2021 is Nill. The total loan disbursement from January until December 2021 is amounting to Rp350,000,000,000. The total loan repayment from January until December 2021 is amounting Rp350,000,000,000. The balance on December 31, 2021 is Nill.

7. PT PPA Finance

Based on Letter Surat No. 063/PPAF-DIR/II-2021 tanggal February 5, 2021, PT Nindya Beton obtained a working capital loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing factoring.

Factoring

Invoice and other documents are presented as billing requirements according to the documents which were mentioned in engagement between PT Nindya Beton with the customer;

Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton as factoring payment guarantees at due time;

Factoring with recourse

Maximum limit Rp15,000,000,000;
12 months of plafond term since the signing of the plafond engagement revolving;

Consumer;

- PT Nindya Karya (Persero)
- PT Waskita Karya, Tbk (Persero)
- PT Cakra Kencana Indah
- PT Kadi International

Factoring finance maximal 80% x bill value/ invoice exclude tax.

Discount rate at 15% p.a

Term/ tenor maximum 180 days calendar.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Provisi 0,5% p.a dari total plafond Pembayaran, dibayar satu kali pada saat pencairan pembiayaan pertama

Berdasarkan surat perpanjangan fasilitas pinjaman nomor S-212A/PPAF-DIR/VII-2021 tanggal 13 Juli 2021 dijelaskan bahwa, entitas anak telah melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 08 Maret 2022.

Berdasarkan Surat No. S-158/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 17 Maret 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA Finance perihal penawaran fasilitas pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Jaminan:

- Jaminan Pembiayaan
Fidusia kendaraan atau alat berat yang menjadi objek pembiayaan PPAF senilai 117,65% dari jumlah pembiayaan.
- Jaminan Pembayaran
Cek/ Bilyet Giro yang diterbitkan dari rekening operasional PT Nindya Beton;
- Pembiayaan
Barang modal yang dibiayai;
- 2 (dua) unit Wheel Loader Merk XCMG LW300KN + AC;
- 1 (satu) unit Comaco Wet Mix Concrete Batching Plant 90 m3/h Full Automation;
- 1 (satu) unit Truck Weight Scale Cap.60 Ton
- Tenor pembiayaan maksimum 48 bulan
- Tingkat Bunga 15%

Berdasarkan surat No. S-142/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 16 Maret 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan.

Jaminan

Cek/ Bilyet giro yang diterbitkan dari rekening operasional PT Nindya Beton

Pembiayaan

Barang modal yang Dibiayai 10 unit truck mixer Merek Sany.

- Supplier/ Dealer PT Sany Makmur Perkasa
- Nilai Perolehan Barang Modal Rp 9.335.000.000.
- Jumlah Pembiayaan Rp7.934.750.000,
- Uang Muka Rp1.400.250.000,
- Tenor pembiayaan maksimum 48 bulan
- Pembayaran angsuran Rp220.831.000 (untuk 10 unit kendaraan)
- Tingkat Bunga 15%

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Provision at 0.5% p.a from total payment plafond, paid once at the first released.

Based on the loan facility extension letter number S-212A/PPAF-DIR/VII-2021 dated July 13, 2021, it is explained that, the subsidiary has extended the loan period until Marc 08, 2022.

Based on Letter No. S-158/PPAF-Dir/III-2020 dated March 17, 2020. PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing, with the details are as follows:

Collaterals:

- Financing Collateral
Vehicle fiduciary or heavy equipment which is the object of financing PPAF amount to 117,65% from amount of financing.
- Payment Collaterals
Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton;
- Financing
Financial capital of goods
- 2 (two) unit Wheel Loader brand of XCMGLW300KN + AC;
- 1 (one) unit Comaco Wet Mix Concrete Batching Plant 90 m3/h Full Automation;
- 1 (one) unit Truck Weight Scale Cap.60 Ton
- Term payment maximum 48 month
- Interest rate at 15%

Based on letter No. S-142/PPAF-Dir/III-2020 dated March 16, 2020, PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing

Collaterals

Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton

Financing

Financial capital of goods are 10 unit sany mixer truck.

- Supplier PT Sany Makmur Perkasa
- Acquisition value of capital goods amount to Rp9,335,000,000.
- Total financing amount to Rp7,934,750,000,
- Down payment amount to Rp1,400,250,000,
- Term payment maximum 48 months
- Payment of installments amount to Rp220,831,000 (for 10 unit vehicles)
- Interest rate at 15%

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Surat No. S-562/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 09 Juli 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA Finance perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan

Berdasarkan Surat No. S-158/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 17 Maret 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA Finance perihal penawaran fasilitas pembiayaan :

Jaminan Pembayaran

Cek/ Bilyet Giro yang diterbitkan dari rekening operasional PT Nindya Beton;

Pembiayaan

Barang modal yang dibiayai;

- 2 (dua) unit Wheel Loader Merk XCMG LW300KN + AC
- 1 (satu) unit Comaco Wet Mix Concrete Batching Plant 90 m³/h Full Automation
- 1 (satu) unit Truck Weight Scale Cap.60 Ton
- Tenor pembiayaan maksimum 48 bulan
- Angsuran sebesar Rp87.434.000 (untuk seluruh unit barang modal yang dibiayai)
- Tingkat Bunga 15%

Berdasarkan surat No. S-142/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 16 Maret 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA Finance perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan.

Jaminan

Cek/ Bilyet giro yang diterbitkan dari rekening operasional PT Nindya Beton

Pembiayaan

Barang modal yang Dibiayai 10 unit truck mixer Merek Sany dengan tenor pembiayaan maksimum 48 bulan, pembayaran angsuran Rp220.831.000 (untuk 10 unit kendaraan), dan tingkat suku bunga 15%.

Saldo awal tahun 2021 adalah sebesar Rp31.544.493.489. Total pencairan pinjaman selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.521.097.297. Total pelunasan pinjaman periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp11.433.378.193. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.632.212.593.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on Letter No. S-562/PPAF-DIR/III- dated July 09, 2020, PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing.

Based on Letter No. S-158/PPAF-Dir/III-2020 dated March 17, 2020. PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing :

Payment Collaterals

Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton;

Financing

Financial capital of goods;

- 2 (two) unit Wheel Loader brand of XCMGLW300KN + AC;
- 1 (one) unit Comaco Wet Mix Concrete Batching Plant 90 m³/h Full Automation
- 1 (one) unit Truck Weight Scale Cap.60 Ton;
- Term payment maximum 48 month
- Payment of installments is Rp87,434,000 (for all unit capital of goods).
- Interest rate at 15%

Based on letter No. S-142/PPAF-Dir/III-2020 dated March 16, 2020, PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing

Collaterals

Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton

Financing

Financial capital of goods are 10 unit sany mixer truck with maximum term payment is 48 months, payment of installments is Rp220,831,000 (for 10 unit vehicles), and interest rate at 15%.

Balance at beginning of 2021 is Rp31,544,493,489. The total loan disbursement from January until December 2021 is amounting to Rp4,521,097,297. The total loan repayment from January until December 2021 is amounting to Rp11,433,378,193. The balance on December 31, 2021 is Rp24,632,212,593.

24. Uang Muka Pemberi Kerja

Akun ini merupakan uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi. Uang muka tersebut akan dikompensasikan dengan kemajuan pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan kemajuan lapangan.

This account represents cash advance for project execution that is received from employer in accordance to the contract on construction. The cash advance will be compensated with the progress of the work and the termin of payment in accordance with the progress of the field.

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Divisi Infrastruktur 1	56,142,546,557	--	Infrastructure Division 1
Divisi Infrastruktur 2	45,004,923,767	--	Infrastructure Division 2
Divisi Gedung	42,128,163,842	--	Building Division
Wilayah V Makassar	--	78,972,742,601	Region V Makassar
Wilayah II Jakarta	--	48,985,785,656	Region II Jakarta
Wilayah I Medan	--	37,152,885,288	Region I Medan
Jumlah	143,275,634,166	165,111,413,545	Total

Rincian berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details based on the customer as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Pihak Berelasi:			Related Parties:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16,669,507,637	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Ventura Bersama Nindya - PT PPA	3,999,763,234	4,122,006,569	Joint Venture Nindya - PT PPA
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	192,390,000	--	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	8,745,745,454	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	633,243,648	720,000,000	Others (each below Rp 1 Billion)
Jumlah Pihak Berelasi	21,494,904,519	13,587,752,023	Total Related Parties
Pihak Ketiga:			Third Parties:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	113,707,040,356	82,555,011,354	The Ministry of Public Works and Public Housing
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	5,875,640,066	6,803,652,112	Pesisir Barat District Government
PT Karya Unggulan Gemilang	1,310,263,471	1,310,263,471	PT Karya Unggulan Gemilang
Kementerian Perhubungan	605,905,220	9,088,578,307	Ministry of Transportation
Kementerian Pemuda dan Olahraga	--	25,770,598,172	Ministry of Youth and Sports
Dinas Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	--	12,855,794,176	North Sulawesi Provincial Settlement Infrastructure Office
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Dharmasraya	--	6,864,149,500	Public Works and Spatial Planning Office of Dharmasraya Regency
Bank Indonesia	--	3,627,272,728	Bank Indonesia
PT Bhandha Graha Reksa (Persero)	--	2,532,974,586	PT Bhandha Graha Reksa (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	281,880,534	115,367,116	Others (Each below Rp 1 Billion)
Jumlah Pihak Ketiga	121,780,729,647	151,523,661,522	Total Third Parties
Jumlah Uang Muka Pemberi Kerja	143,275,634,166	165,111,413,545	Total Advances From Customers

25. Utang Ventura Bersama

Rincian utang ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of the joint venture's payable are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	24,810,070,007	--	Joint Venture Nindya - Adhi Karya
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan	18,114,286,232	18,114,286,232	Joint Venture Nindya - Pembangunan Perumahan
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	9,200,000,000	1,400,000,000	Joint Venture Nindya - Waskita Jaya Purnama
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	2,368,000,000	--	Joint Venture Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	658,558,100	658,558,100	Others (Each below Rp 1 Billion)
Jumlah	55,150,914,339	20,172,844,332	Total

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Utang ventura bersama merupakan utang penyertaan modal ke ventura bersama yang belum dibayarkan oleh Perusahaan.

Joint venture payables are equity participation payables in joint ventures that has not yet been paid by the Company.

26. Pendapatan Diterima di Muka

26. Unearned Revenues

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Retail Readymix	7,315,807,817	5,468,523,471	Retail Readymix
Ventura Bersama Brantas Abipraya-Bodiads	3,500,000,000	--	Joint Venture Brantas Abipraya-Bodiads
PT Telkomsel Tbk	629,947,500	--	PT Telkomsel Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100 Juta)	1,465,650,533	873,594,839	Others (Each below Rp 100 Million)
Jumlah	12,911,405,850	6,342,118,310	Total

27. Utang Bruto

27. Gross Amount Payables

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Divisi Infrastruktur II	342,056,291,189	--	Infrastructure Division 2
Divisi Gedung	271,160,548,498	--	Building Division
Divisi Infrastruktur I	127,851,682,249	--	Infrastructure Division 1
Divisi EPC	153,834,664,970	106,084,634,837	EPC Division
PT Nindya Beton	65,916,646,632	59,890,880,791	PT Nindya Beton
Kantor Pusat	3,265,016,795	4,347,036,014	Head Office
Divisi Peralatan	1,033,536,354	3,361,706,200	Equipment Division
Divisi Properti	2,448,500,271	813,321,874	Division of Property
PT Nindya Tirta Unggul	13,800,000	--	PT Nindya Tirta Unggul
Ex. Wilayah I	--	210,227,584,838	Ex. Region I
Ex. Wilayah II	--	143,216,507,321	Ex. Region II
Ex. Wilayah III	--	109,524,864,831	Region III
Ex. Wilayah IV	--	161,286,372,705	Region IV
Ex. Wilayah V	--	130,719,369,100	Region V
Jumlah	967,580,686,958	929,472,278,511	Total

Utang bruto merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Gross amount payables represent amount outstanding from third parties or project workers regarding to the field work.

28. Beban Akrua

28. Accrued Expenses

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Jasa Produksi	9,750,000,000	9,750,000,000	Production Service
Tantiem	5,377,925,000	5,377,925,000	Tantiem
Bunga Pinjaman Bank	599,213,638	1,400,760,069	Interest on Bank Loans
Konsultan	--	1,376,962,758	Consultant
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500 Juta)	75,000,000	--	Others (Each below Rp 500 Million)
Jumlah	15,802,138,638	17,905,647,827	Total

29. Utang Lain-lain

29. Other Payables

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Utang Lain - lain Proyek Divisi	2,995,800,232	2,571,412,627	Other Payables of Division Project
Jaminan Sewa Gedung	1,355,331,426	1,361,256,679	Building Rental Guarantee
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500 Juta)	598,614,881	1,089,957,528	Others (Each below Rp 500 Million)
Jumlah	4,949,746,539	5,022,626,834	Total

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. Uang Muka Kontrak Jangka Panjang

30. Long-Term Contract Advances

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties:
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	6,803,747,952	11,062,661,400	PT Pertamina Exploration and Production
PT Pupuk Kalimantan Timur	4,138,875,000	12,236,920,000	PT Pupuk Kalimantan Timur
Jumlah Pihak Berelasi	10,942,622,952	23,299,581,400	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	169,177,563,244	276,008,965,353	The Ministry of Public Work and Public Housing
Kementerian Perhubungan	19,349,161,745	13,298,597,318	The Ministry of Transportation
Jumlah Pihak Ketiga	188,526,724,989	289,307,562,671	Total Third Parties
Jumlah Uang Muka Jangka Panjang	199,469,347,941	312,607,144,071	Total Long-Term Contract Advances

31. Liabilitas Imbalan Pascakerja

31. Post-Employment Benefits Liabilities

	31 Desember 2021/ December 31, 2021 Rp	31 Desember 2020/ December 31, 2020 Rp	
Program Pesangon Karyawan	4,843,857,548	10,591,133,993	Employee Severance Program
Program Masa Persiapan Pensiun	9,571,350,423	--	Post Employment Preparation Program
Program Cincin Emas	899,704,601	--	Gold Ring Program
Program Cuti Dinas Lama	5,716,052,077	--	Long Service Leave Program
Jumlah	21,030,964,649	10,591,133,993	Total

a. Program Pesangon Karyawan

Perusahaan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.

Perhitungan beban dan liabilitas aktuarial dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaris Muh Imam Basuki dan Rekan dalam laporannya tanggal 26 Januari 2022. Adapun asumsi aktuarial dan metode perhitungan yang dipergunakan sebagai berikut:

a. Employee Severance Program

The Company has recorded liabilities of employee benefits in accordance with constitution Act No. 13 year 2003 on regarding to matter pertaining to man power, on using the actuarial technique for the implementation PSAK 24 (Revised 2013) of Employee Benefits.

The calculation of actuarial expenses and liabilities is carried out by the Actuarial Consultant Office of Muh Imam Basuki and Partners in their report dated January 26, 2022. The actuarial assumptions and calculation methods are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Dasar Perhitungan			Calculation Basis
Tingkat diskonto	7.6% per tahun/ per annum	7.3% per tahun/ per annum	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	3% per tahun/ per annum	3% per tahun/ per annum	Salary increase rate
Usia pensiun	55 tahun/ years		Retirement age
Tabel mortalita	Table Mortalita Indonesia TMI IV - 2019/ Indonesia Mortality Table (TMI) IV 2019		Mortality table

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pendanaan untuk program imbalan pascakerja pensiun karyawan tetap per 31 Desember 2021 terbagi menjadi dua yaitu sebanyak 183 orang diikutsertakan pada DPNK (Dana Pensiun Nindya Karya) dan 164 orang diikutsertakan ke dalam DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Bank BNI.

Funding for pension benefit program of permanent employees as of December 31, 2021 is divided into two, as many 183 people were included in DPNK (Dana Pensiun Nindya Karya) and 164 individuals were included in the DPLK Bank BNI.

Rincian beban dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The details of expense and employee benefits liability in the statement of financial position are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	1,821,421,112	2,321,712,906	Current Service Cost
Beban Bunga	709,519,721	3,245,268,958	Interest Expense
Hasil Aset Program yang Diharapkan	(103,872,416)	(1,675,079,948)	Expected Results of Plan Assets
Jumlah Beban Imbalan Kerja	2,427,068,417	3,891,901,916	Employee Benefit Expenses
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	26,675,795,107	32,021,750,490	Present Value of Defined Benefit Obligation
Nilai Wajar Aset Program	(21,831,937,559)	(21,430,616,497)	Fair Value of Plan Assets
Liabilitas Imbalan Kerja	4,843,857,548	10,591,133,993	Employee Benefit Liabilities

Mutasi nilai kini kewajiban manfaat pasti adalah sebagai berikut:

Movement in the present value obligation are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Saldo Awal	32,021,750,490	38,224,168,030	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	1,821,421,112	2,321,712,906	Current Service Cost
Biaya Bunga	709,519,721	3,245,268,280	Interest Cost
Imbalan Yang Dibayarkan	(1,870,398,117)	(3,060,463,440)	Benefit Paid
(Keuntungan) Aktuarial Bersih	(6,006,498,099)	(8,708,935,286)	Net Actuarial (Gain)
Saldo Akhir Nilai Kewajiban Manfaat Pasti	26,675,795,107	32,021,750,490	Ending Balance of Present Value Obligation

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement of the fair value of asset program are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Nilai Wajar Aset Program - Awal	21,430,616,497	22,946,300,663	Opening fair value of plan assets
Hasil Aset Program yang Diharapkan	1,017,744,093	1,675,079,947	Expected Results of Plan Assets
Kontribusi Pemberi Kerja dan Karyawan	2,968,325,944	1,530,545,749	Contributions from the Employer and Employee
(Kerugian) Aktuarial atas Aset Program	(79,217,275)	(1,842,081,725)	Actuarial (Loss) on Assets Programs
Pembayaran Manfaat	(3,505,531,700)	(2,879,228,137)	Benefits Payment
Jumlah	21,831,937,559	21,430,616,497	Jumlah

Mutasi liabilitas di laporan keuangan Perusahaan sebagai berikut:

Mutations of liabilities in the statement of financial positions as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Liabilitas pada Awal Tahun	10,591,133,993	15,277,867,367	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	2,427,068,416	3,891,901,238	Employee Benefit Expenses
Pembayaran Imbalan Kerja	(1,870,398,117)	(3,060,463,440)	Benefit Payment
(Penghasilan) Komprehensif Lainnya	(3,678,509,323)	(4,305,835,516)	Other Comprehensive (Income)
Iuran Dana Pensiun	(2,625,437,421)	(1,212,335,656)	Dues Pension Fund
Liabilitas pada Akhir Tahun	4,843,857,548	10,591,133,993	Ending Balance of Liabilities

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Program Masa Persiapan Pensiun

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian atas Program Masa Persiapan Pensiun adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	9,571,350,423	--
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	9,571,350,423	--

Current Value - Defined Benefit Obligation
Net Liabilities End of the Year

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Liabilitas Bersih Awal Tahun	--	--
Beban Tahun Berjalan	8,873,666,008	--
Beban Komprehensif Lain	697,684,415	--
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	9,571,350,423	--

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follow:

Net Liabilities - Beginning of Year
Current Year Expense
Other Comprehensive Expense
Net Liabilities - End of Year

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Biaya Jasa Kini	587,632,022	--
Biaya Jasa Lalu	8,286,033,986	--
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	8,873,666,008	--

Employee benefit expenses recognized in the profit or loss are as follow:

Current Service Cost
Past Service Cost
Cost Recognized in Profit and Loss

Rincian beban imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Details of the employee benefit expenses which is recognized as other comprehensive income are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Rugi Aktuaria pada Kewajiban	697,684,415	--
Pengukuran Kembali Penghasilan Komprehensif Lain	697,684,415	--
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Tahun	--	--
Beban Komprehensif Lain Tahun	697,684,415	--
Penghasilan Komprehensif Lain Akhir Tahun	697,684,415	--

Actuarial Loss on Liabilities
Remeasurement on Other Comprehensive Income

Other Comprehensive Income - Beginning of Year
Other Comprehensive Expense for the Year
Other Comprehensive Income - End of Year

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

c. Program Cincin Emas

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian atas Program Masa Persiapan Pensiun adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	899,704,601	--
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	899,704,601	--

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Beban Tahun Berjalan	810,081,528	--
Beban Komprehensif Lain	89,623,073	--
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	899,704,601	--

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Biaya Jasa Kini	74,131,829	--
Biaya Jasa Lalu	735,949,699	--
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	810,081,528	--

Rincian beban imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Rugi Aktuarial pada Kewajiban	89,623,073	--
Pengukuran Kembali Penghasilan Komprehensif Lain	89,623,073	--
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Tahun	--	--
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun	89,623,073	--
Penghasilan Komprehensif Lain Akhir Tahun	89,623,073	--

d. Program Cuti Dinas Lama

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian atas program cuti dinas lama adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	5,716,052,077	--
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	5,716,052,077	--

c. Gold Ring Program

Details of employee benefit liabilities recognized in the consolidated statement of financial position for the Pension Preparation Period Program are as follow:

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follow:

Employee benefit expenses recognized in the profit or loss are as follow:

Details of the employee benefit expenses which is recognized as other comprehensive income are as follow:

d. Long Service Leave Program

Details of employee benefit liabilities recognized in the consolidated statement of financial for long service leave are as follow:

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Beban Tahun Berjalan	5,716,052,077	--	Current Year Expense
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	5,716,052,077	--	Net Liabilities - End of Year

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses recognized in the profit or loss are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Biaya Jasa Kini	--	--	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	5,716,052,077	--	Past Service Cost
Biaya yang Diakui di Laba Rugi	5,716,052,077	--	Cost Recognized in Profit and Loss

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. Namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability. However, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined liabilities are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	31 Desember December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Sensitivitas (-1%) terhadap Tingkat Bunga			Sensitivity (-1%) to Interest Rate
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	49,082,683,210	5,799,137,415	Present Value of Defined Benefit Obligation
Biaya Jasa Kini	3,978,492,966	837,170,874	Current Service Cost
Sensitivitas (+1%) terhadap Tingkat Bunga			Sensitivity (+1%) to Interest Rate
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	39,737,606,334	4,059,583,650	Present Value of Defined Benefit Obligation
Biaya Jasa Kini	3,201,499,130	658,972,874	Current Service Cost

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Sensitivitas (-1%) terhadap Tingkat Gaji			Sensitivity (-1%) to Salary Rate
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	39,686,676,392	3,563,770,650	Present Value of Defined Benefit Obligation
Biaya Jasa Kini	3,136,419,468	603,582,128	Current Service Cost
Sensitivitas (+1%) terhadap Tingkat Gaji			Sensitivity (+1%) to Salary Rate
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	46,479,179,960	6,491,983,295	Present Value of Defined Benefit Obligation
Biaya Jasa Kini	3,830,789,454	903,705,997	Current Service Cost

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual charge in the defined benefits obligations as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligations has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no changes in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

32. Modal Saham

32. Share Capital

a. Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 59.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar, dan atas modal yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Notaris Khairina S.H., No. 39 tanggal 14 September 2012 menerangkan bahwa komposisi kepemilikan saham Perusahaan menjadi: Negara Republik Indonesia sebanyak 59.500 saham Seri A Dwi Warna atau senilai Rp59.500.000.000, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebanyak 5.890.500 saham Seri B atau senilai Rp499.997.421.000. Secara persentase kepemilikan saham Perusahaan menjadi Negara Republik Indonesia sebesar 1% dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebesar 99%.

Pada tanggal 14 September 2012, PT Perusahaan Pengelola Aset telah menyetorkan modalnya sebesar Rp499.997.421.000.

a. Subscribed and Fully Paid Up Capital

Subscribed and Fully paid up capital as of December 31, 2010 amounted to 59,500 shares and each share has a par value of Rp1,000,000, and the capital is paid fully and is placed entirely taken part by the Government of the Republic of Indonesia.

Based on Notary Deed No. 39 Khairina S.H., dated September 14, 2012 explained that the composition of the Company's shares ownership became: the Republic of Indonesia amounted to 59,500 shares series A Dwi Warna or amounting to Rp59,500,000,000, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) amounted to 5,890,500 series B shares or amounting to Rp499,997,421,000. The percentage ownership of the shares of the Company into the Republic of Indonesia is 1% and PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) is 99%.

On September 14, 2012, PT Perusahaan Pengelola Aset paid the capital amounting to Rp499,997,421,000.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian susunan modal Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the composition of the Company's capital are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Modal Dasar	874,615,000,000	874,615,000,000	Authorized Capital
Modal Saham Dalam Portepel	(315,117,579,000)	(315,117,579,000)	Capital Share in Portfolio
Jumlah Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	<u>559,497,421,000</u>	<u>559,497,421,000</u>	Total Subscribed and Paid Up Capital

b. Dividen

Menurut Risalah RUPS Tahunan PT Nindya Karya (Persero) No.50 pada hari Selasa, 29 Juni 2021 tidak menetapkan adanya pembayaran dividen untuk tahun buku 2020.

b. Dividend

According to the Minutes of the Annual GMS of PT Nindya Karya (Persero) No.50 on Tuesday, June 29, 2021 does not stipulate any dividend payments for the 2020 financial year.

c. Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

Saldo cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp113.608.743.613. Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan PT Nindya Karya (Persero) No.6 pada hari Kamis, 2 Juli 2020, pemegang saham menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan sebesar Rp223.784.182.449. Sehingga saldo cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp337.392.926.062 dan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp113.608.743.613.

c. Appropriated Retained Earnings

The general reserve balance for the December 31, 2019 period is Rp113,608,743,613. Based on the minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of PT Nindya Karya (Persero) No.6 on Thursday, July 2, 2020, shareholders approved to provide general reserve from the Company's profits amounted Rp223,784,182,449. Therefore the general reserve balance for the December 31, 2020 is Rp337,392,926,062 and for the December 31, 2019 is Rp113,608,743,613.

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan PT Nindya Karya (Persero) No.50 pada hari Selasa, 29 Juni 2021, Manajemen menyetujui adanya penyesuaian terhadap Saldo Laba Belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp223.784.182.449, sehingga saldo cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp113.608.743.613 dan dilakukan Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 31 Desember 2020.

Based on the Minutes of the Annual GMS of PT Nindya Karya (Persero) No.50 on Tuesday, June 29, 2021, the Management approved an adjustment to the Undetermined Profit Balance of Rp223,784,182,449, so that the balance of general reserves as of December 31, 2020 was Rp113,608,743,613 and Reissuance of Consolidated Financial Statements for the fiscal year December 31, 2020.

Adapun Saldo Cadangan Umum pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp113.608.743.613.

The General Reserve Balance as of December 31, 2021 and 2020 is Rp113,608,743,613.

Perusahaan membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. Undang-undang tersebut mengharuskan perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

The Company provided appropriation to general reserve in accordance with the Law No.40 year 2007 concerning to Limited Company. The law requires companies in Indonesia to provide a general reserve at least 20% of the issued and fully paid capital.

33. Pendapatan Usaha

33. Revenues

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Pendapatan Konstruksi			Construction Income
Pihak Berelasi	1,003,122,453,406	843,547,540,859	Related Parties
Pihak Ketiga	3,270,622,042,391	2,652,663,800,045	Third Parties
Pendapatan Manufaktur	103,462,102,455	96,548,544,393	Manufacturing Income
Pendapatan Properti	30,038,538,123	17,486,566,157	Property Income
Pendapatan Sewa Alat	8,118,970,779	6,236,725,000	Equipment Rental Income
Jumlah	4,415,364,107,154	3,616,483,176,454	Total

Berikut ini adalah rincian pendapatan usaha yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2021 dan 2020:

The above revenue in 2021 and 2020, include sales to the following customers which represent more than 10% of the net sales of the respective years:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2,711,206,194,584	1,838,032,370,839	The Ministry of Public Work and Public Housing

34. Beban Pokok Pendapatan

34. Cost of Revenues

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan sektor usaha sebagai berikut:

The Details of cost of revenue based on the business sector are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Beban Pokok Pendapatan Konstruksi	3,901,090,586,579	3,147,366,065,582	Cost of Construction Revenue
Beban Pokok Pendapatan Manufaktur	98,685,188,952	113,476,334,943	Cost of Manufacture Revenue
Beban Pokok Pendapatan Sewa Alat	26,849,069,712	22,284,176,939	Cost of Equipment Rental Revenue
Beban Pokok Pendapatan Properti	26,852,210,422	16,192,168,170	Cost of Property Revenue
Jumlah	4,053,477,055,665	3,299,318,745,634	Total

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan jenis beban sebagai berikut:

The details of cost of goods sold based on type of cost are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Bahan Baku	1,865,349,337,255	1,207,242,833,446	Raw Materials
Subkontraktor	1,018,837,968,403	1,129,402,067,274	Subcontractors
Overhead Proyek	420,212,320,571	346,307,839,641	Project Overhead
Upah	366,576,877,450	339,059,177,054	Wages
Peralatan	341,854,858,431	229,239,950,684	Equipments
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 19)	20,828,701,782	25,847,460,101	Property and Equipment Depreciation (Note 19)
Biaya Pinjaman	16,170,342,125	19,661,287,057	Financial Charges
Pemeliharaan, Listrik dan Air	3,646,649,648	2,558,130,377	Maintenance, Electricity and Water
Jumlah	4,053,477,055,665	3,299,318,745,634	Total

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. Bagian Laba (Rugi) Ventura Bersama

35. Share of the Profit (Loss) of Joint Ventures

Rincian bagian laba (rugi) ventura bersama sebagai berikut:

The details of cost of share of the profit (loss) as follows:

Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Project Name	Persentase/ Percentage	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Ventura Bersama Nindya - Adhi	Proyek Bendungan Sadawarna	60.00%	38,116,993,910	25,414,633,259
Ventura Bersama Nindya - Bina Nusa Lestari	Pembangunan Bendungan Temef di Kab. Timor Tengah Selatan Paket III	70.00%	36,192,525,519	--
Ventura Bersama Nindya - Modern WT	Proyek Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandara Nabire Baru I	60.00%	17,700,573,179	11,668,915,482
Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangun Nusa	Proyek Bendungan Tiusuntuk	65.00%	15,532,098,588	20,491,154,386
Ventura Bersama Nindya - Surya	Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Semarang	65.00%	9,816,558,877	--
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Proyek Jalan Toll Cisumdawu	7.50%	9,018,353,828	3,427,615,630
Ventura Bersama Nindya - Abel	Proyek Preservasi Jalan SP. Perdao - Batu Ampar	65.00%	6,407,408,632	900,526,732
Ventura Bersama Nindya - Damai	Proyek Jalan Bts. Kec. Siding/Seluas - Bts. Kec. Sekayan/Entikong	60.00%	6,377,214,613	961,712,727
Ventura Bersama Nindya - Rapi Tirta Treatmindo	Proyek SPAM Kali Dendeng	70.00%	3,412,619,937	5,133,046,638
Ventura Bersama Nindya - Bumi Agung	Proyek Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok - Mandalika	70.00%	2,848,703,330	3,731,011,299
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	Proyek Waduk Bendo Lanjutan	33.00%	2,719,115,000	8,128,119,659
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	Proyek Bendungan Bomberay	70.00%	2,304,173,369	4,932,523,394
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Penta	Pembangunan Indoor Multifunction Stadium	30.00%	2,149,767,487	--
Ventura Bersama Nindya - Lestari	Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Mice Infrastruktur Tn. Mori	60.00%	1,943,561,867	--
Ventura Bersama Nindya - Thamrin - Dwifarita	Proyek Jalur Main Line I KA Manggarai-Jatinegara	60.00%	1,806,255,892	1,276,648,095
Ventura Bersama Nindya - Passokkorang	Proyek Jalan Tompe - Dalam Kota Palu	70.00%	1,748,138,241	6,693,615,528
Ventura Bersama Nindya - Bunga Raya Lestari	Proyek Jaringan Irigasi Di. Bintang Bano Sumbawa Barat (Paket 3)	70.00%	1,657,883,303	209,659,904
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Basuki	Proyek Rehabilitasi Sistem Transmisi Air Baku Pasigala Paket II	25.00%	1,295,000,000	--
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	Proyek Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bau-Bau	70.00%	1,242,090,386	8,717,578,410
Ventura Bersama Nindya - Mettana	Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Wirajasa	97.50%	1,055,505,530	--
Ventura Bersama Nindya - Sacna	Proyek Bendungan Meninting	73.00%	965,501,636	4,055,107,988
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Proyek Long Storage Kalimati Air Baku	60.00%	--	3,888,024,545
Ventura Bersama Nindya - Surya	Proyek Irigasi Lematang	70.00%	--	3,880,000,000
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	Proyek Pembangunan Gedung Universitas Jember	45.00%	--	2,871,648,808
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)/ Others (each below Rp 1 Billion)			(10,892,566,730)	(25,039,700,989)
Jumlah/ Total			153,417,476,394	91,341,841,495

36. Beban Penjualan dan Beban Administrasi dan Umum

36. Selling Expense and General and Administrative Expense

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Beban Penjualan	13,177,729,543	11,009,075,979	Selling Expense
Beban Umum dan Administrasi :			General and Administrative Expense:
Beban Pegawai	128,182,504,500	115,724,874,220	Employee Expense
Beban Umum	15,272,954,236	16,946,061,881	General Expense
Beban Gedung/Kantor	15,791,667,241	15,884,665,780	Building/Office Expense
Beban Penyusutan (Catatan 19)	13,962,086,898	11,523,409,921	Depreciation Expense (Notes 19)
Beban Pengembangan	9,983,923,075	7,573,462,780	Development Expense
Beban Insentif	9,503,125,700	14,368,455,752	Incentive Expense
Beban Perjalanan Dinas	7,991,343,585	10,793,276,575	Official Travel Expense
Jumlah Beban Administrasi Umum	200,687,605,235	192,814,206,909	Total General and Administrative Expense
Jumlah Beban Pemasaran dan Administrasi dan Umum	213,865,334,778	203,823,282,888	Total Selling Expense and General and Administrative Expense

37. Penghasilan (Beban) Lainnya

37. Other Income (Expenses)

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Pendapatan Lainnya :			Other Income :
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	19,792,370,944	19,759,652,427	Difference from Investment Property Revaluation
Pemulihan Piutang	14,733,506,492	25,548,807,064	Recovery of Receivables
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	10,231,780,064	14,227,497,511	Interest Income and Current Account
Penerimaan atas Proyek Selesai	5,684,494,440	20,718,831,028	Receipt from Finished Project
Lain-lain	8,585,865,123	2,969,457,201	Others
Jumlah Pendapatan Lainnya	59,028,017,063	83,224,245,231	Total Other Income
Beban Lainnya :			Other Expenses :
Beban Pajak	28,226,456,826	1,093,230,664	Tax Expenses
Beban atas Proyek Selesai	21,271,983,845	25,593,053,546	Expense on Finished Project
Administrasi Bank	1,344,628,854	1,909,896,188	Bank Administration
Selisih Kas/ Bank dan Kurs	444,675,840	-	Difference Value Expense in Exchange Rate
Lain-lain	665,635,086	2,579,519,190	Others
Jumlah Beban Lainnya	51,953,380,451	31,175,699,588	Total Other Expenses
Jumlah Penghasilan (Beban) Lainnya - Bersih	7,074,636,612	52,048,545,643	Total Other Income (Expense) - Net

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pendapatan bunga dan jasa giro merupakan hasil dari penerimaan bunga rekening koran dan bunga, bunga investasi jangka pendek dan bunga deposito berjangka.

Interest income and current account are the result of overdraft interest revenue, short-term investments and time deposit's interest.

38. Beban Pajak Penghasilan Final

38. Final Income Tax Expenses

Rincian beban pajak penghasilan final sebagai berikut:

The details of final income tax expenses as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	
Jasa Konstruksi			Construction
Pendapatan Jasa Konstruksi	4,259,315,345,493	3,496,211,340,904	Construction Income
Pendapatan Jasa Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak	(20,875,080,060)	(115,038,574,022)	Construction Non-taxable Income
Jumlah Pendapatan Jasa Konstruksi	4,238,440,265,433	3,381,172,766,882	Construction Total Income
Non Jasa Konstruksi			Non-construction
Pendapatan Jasa Non Konstruksi	141,619,611,357	120,271,835,550	Construction Income
Pendapatan Jasa Non Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak Final	(121,845,717,297)	(111,627,743,570)	Non-Construction Non-Final taxable Income
Jumlah Pendapatan Non Jasa Konstruksi	19,773,894,060	8,644,091,980	Non Construction Total Income
Ditambah (Dikurangi):			Add (Less):
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena pajak	4,238,440,265,433	3,381,172,766,882	Construction Taxable Income
Pendapatan Non Jasa Konstruksi Kena Pajak	19,773,894,060	8,644,091,980	Non-construction Taxable Income
Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak	4,258,214,159,493	3,389,816,858,862	Total Taxable Income
Beban Pajak Final Konstruksi			Constructions Final Tax Expenses
3% x 2021 : Rp4.238.440.265.433	127,153,207,963	--	3% x 2021 : Rp4,238,440,265,433
3% x 2020 : Rp3.381.172.766.882	--	101,435,183,006	3% x 2020 : Rp3,381,172,766,866
Beban Pajak Final Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan			Land and Building Rental Final Tax Expenses
10% x 2021 : Rp3.183.253.300	318,325,330	--	10% x 2021 : Rp3,183,253,300
10% x 2020 : Rp774.219.700	--	77,421,970	10% x 2020 : Rp774,219,700
Beban Pajak Final atas Penjualan Properti			Non Constructions Final Tax Expenses
2.5% x 2021 : Rp16.590.640.760	414,766,019	--	2.5% x 2021 : Rp16,590,640,760
2.5% x 2020 : Rp7.869.872.280	--	196,746,807	2.5% x 2020 : Rp7,869,872,280
Jumlah Beban Pajak Final	127,886,299,312	101,709,351,783	Total Final Income Tax Expenses

39. Aset Moneter Dalam Mata Uang Asing

39. Monetary Assets in Foreign Currency

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Grup mempunyai aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

On December 31, 2021 and December 31, 2020, the Group has monetary assets denominated in foreign currencies as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember / December 31, 2020		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent	
	USD	Rp	USD	Rp	
Bank					Cash in Banks
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	594.94	8,489,200	--	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,252.34	46,407,656	3,887.91	54,838,990	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	858.19	12,245,516	1,000.00	14,105,005	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah	4,705.47	67,142,372	4,887.91	68,943,995	Total

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**40. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko
Keuangan dan Manajemen Permodalan**

**40. Financial Instrument, Financial Risk and
Capital Management**

Instrumen Keuangan

Financial Instrument

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi		
Kas dan Setara Kas	435,623,369,346	245,873,000,967
Piutang Usaha - Bersih		
Pihak Berelasi	58,428,320,908	111,354,019,908
Pihak Ketiga	64,142,606,525	23,230,964,787
Piutang Retensi - Bersih		
Pihak Berelasi	46,328,348,801	42,186,046,668
Pihak Ketiga	116,693,800,902	108,825,876,417
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	251,105,754,456	306,081,905,753
Piutang Lain - lain - Bersih		
Pihak Berelasi	12,842,886,561	16,452,465,525
Pihak Ketiga	517,094,527	13,799,981,862
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja		
Pihak Berelasi	620,724,288,193	530,686,106,849
Pihak Ketiga	883,828,032,299	1,800,538,118,882
Investasi Jangka Pendek	200,000,000,000	200,000,000,000
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi	13,321,338,724	--
Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba-Rugi (FVTPL)		
Investasi Jangka Panjang Lainnya	4,802,761,600	4,028,388,000
Jumlah Aset Keuangan	2,708,358,602,842	3,403,056,875,618
Liabilitas pada harga perolehan diamortisasi		
Utang Bank dan Non - bank		
Pihak Berelasi	444,981,369,379	812,062,493,489
Pihak Ketiga	146,000,000,000	217,400,000,000
Utang Usaha		
Pihak Berelasi	45,594,872,631	18,281,501,853
Pihak Ketiga	1,229,526,387,674	1,440,402,931,064
Liabilitas Sewa	--	162,418,016
Utang Ventura Bersama	55,150,914,339	20,172,844,332
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	967,580,686,958	929,472,278,511
Beban Akrua	15,802,138,638	17,905,647,827
Utang Lain-lain	4,949,746,539	5,022,626,834
Jumlah Liabilitas Keuangan	2,909,586,116,158	3,460,882,741,926

Financial Assets Measured at Amortized Cost
Cash and Cash Equivalents
Accounts Receivable - Net
Related Parties
Third Parties
Retention Receivables - Net
Related Parties
Third Parties
Joint Venture Receivables
Other Receivables
Related Parties
Third Parties
Gross Amount Due from Customers
Related Parties
Third Parties
Short-Term Investment
Financial Assets from Concession Arrangement
Financial Assets at Fair Value Through Profit of Loss (FVTPL)
Other Long-Term Investment
Total Financial Assets
Liabilities at amortized cost
Bank and Non - Bank Loans
Related Parties
Third Parties
Account Payables
Related Parties
Third Parties
Lease Liabilities
Joint Venture Payables
Gross Amount Payables
Accruals
Other Payables
Total Financial Liabilities

Kebijakan Manajemen Risiko

Tujuan Grup secara umum adalah menciptakan nilai bagi para pemegang saham melalui maksimalisasi laba dengan tetap berlandaskan pada praktik-praktik pengelolaan bisnis yang sehat. Dalam kenyataannya banyak ketidakpastian yang menyelubungi praktik dunia bisnis, baik ketidakpastian yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Grup. Ketidakpastian ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif dari ketidakpastian dapat menjadi peluang dan pengaruh negatif dapat menjadi risiko.

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko bunga, risiko kredit dan risiko nilai tukar, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

Pengkajian Direksi dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masing-masing risiko ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Risk Management Policies

The purpose of the Group in general is to create value for the shareholders through maximization of existing continuous profit based on good corporate governances. In fact, a lot of uncertainty surrounding the world's business practices, both the uncertainty occurred from the internal and external environment of the Group. This uncertainty can be a positive or negative influence. Positive influence from uncertainty could be an opportunity and negative influence could be a risk.

The main risks of Group financial instrument are interest credit risk, credit risk and foreign currency exchange risk, liquidity risk, and risk of changes in government policy, economic and social-political conditions.

The assessment of Directors and approved policies for managing each of these risks could explained as follows :

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

a. Risiko Bunga

Grup menyadari bahwa salah satu risiko yang melekat adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan tingkat bunga. Eksposur risiko bunga berupa kesulitan likuiditas keuangan dalam memenuhi pinjaman bank dan pinjaman lainnya. Guna meminimalisasi risiko tersebut, Grup melakukan diversifikasi sumber dana murah melalui peningkatan profil Grup.

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Pinjaman dengan suku bunga mengambang	590,981,369,379	1,029,462,493,489

Loan with floating interest rate

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain tetap:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp
Naik 100 bps	5,909,813,694	10,294,624,935
Turun 100 bps	(5,909,813,694)	(10,294,624,935)

*Increase 100 bps
Decrease 100 bps*

a. Interest Risk

The Group realized that one of the inherent risk is the risk of fluctuations in the value of a financial instrument due to changes in interest rates. Interest risk exposure forms financial liquidity difficulties in fulfil bank loans and other loans. In order to minimize those risks, the Group diversified sources of cheap funds through improvements in Group profile.

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income before tax with all other variables constant:

b. Risiko Kredit

Risiko kredit diidentifikasi sebagai kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko ini adalah piutang usaha, piutang ventura bersama, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja dan uang muka subkontrak. Grup mengelola risiko ini dengan menerima sebagian tertentu melalui keseimbangan arus kas proyek dan penyisihan atas piutang yang cukup.

Grup meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Eksposur maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana di ungkapkan pada Catatan 4. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

b. Credit Risk

Credit risk is identified as the inability to meet the contractual obligations. Group's financial instruments that have potential for these risks are accounts receivable, joint venture receivable, receivable retention, gross amount due to customer and cash advance subcontractor. Group manages those risks by receiving specific part through project cash flow balances and sufficient allowance of receivables.

Group minimize credit risks financial assets such as cash and cash equivalent by maintaining minimum cash balance and select qualified bank for the placement of funds. The maximum exposure to the credit risk is represented by the carrying amount as shown in Notes 4. There is no significant concentration of credit risk.

c. Risiko Nilai Tukar

Belum ada risiko nilai tukar signifikan yang secara langsung dapat diidentifikasi ke dalam instrumen keuangan Grup.

c. Exchange Rate Risk

There is no significant exchange rate risk that identified directly in the Group financial instruments.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

d. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk in which the position of cash flows show short - term revenues is not sufficient to cover short term expenses.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Grup dalam memenuhi liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Grup diharapkan dapat membayar seluruh liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabilitas tersebut, maka Grup harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Berikut ini merupakan liabilitas keuangan non-derivatif berdasarkan nilai sisa jatuh tempo yang tidak didiskonto untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate %	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 tahun sampai dengan 2 tahun / 1 year to 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 year	Jumlah/ Total
31 Desember 2021					
Liabilitas					
Tanpa Bunga					
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	--	45,594,872,631			45,594,872,631
Pihak Ketiga	--	1,229,526,387,674			1,229,526,387,674
Utang Ventura Bersama	--	55,150,914,339	--	--	55,150,914,339
Utang Bruto	--	967,580,686,958	--	--	967,580,686,958
Beban Akruai	--	15,802,138,638	--	--	15,802,138,638
Utang Lain-lain	--	4,949,746,539	--	--	4,949,746,539
Instrumen suku bunga variabel					
Utang Bank dan Non - bank					
Pihak Berelasi	8.5% - 15%	514,711,778,941	76,269,590,438	--	590,981,369,379
Pihak Ketiga	8.5% - 15%	146,000,000,000	--	--	146,000,000,000
Jumlah		2,979,316,525,720	76,269,590,438	--	3,055,586,116,158

December 31, 2021
Liabilities
Non - interest bearing
Accounts Payable
Related Parties
Third Parties
Joint Venture Payables
Gross Amount Payables
Accruals
Other Payables
Variable interest rate instruments
Bank and Non - Bank Loans
Related Parties
Third Parties
Total

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate %	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 tahun sampai dengan 2 tahun / 1 year to 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 year	Jumlah/ Total
31 Desember 2020					
Liabilitas					
Tanpa Bunga					
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	--	18,281,501,853			18,281,501,853
Pihak Ketiga	--	1,440,402,931,064			1,440,402,931,064
Utang Ventura Bersama	--	20,172,844,332	--	--	20,172,844,332
Utang Bruto	--	929,472,278,511	--	--	929,472,278,511
Beban Akruai	--	17,905,647,827	--	--	17,905,647,827
Utang Lain-lain	--	5,022,626,834	--	--	5,022,626,834
Instrumen suku bunga variabel					
Utang Bank dan Non - bank					
Pihak Berelasi	9% - 9.50%	545,337,023,414	266,725,470,075	--	812,062,493,489
Pihak Ketiga	9% - 9.50%	217,400,000,000	--	--	217,400,000,000
Jumlah		3,193,994,853,835	266,725,470,075	--	3,460,720,323,910

December 31, 2020
Liabilities
Non - interest bearing
Accounts Payable
Related Parties
Third Parties
Joint Venture Payables
Gross Amount Payables
Accruals
Other Payables
Variable interest rate instruments
Bank and Non - Bank Loans
Related Parties
Third Parties
Total

- e. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik
Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistematis dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Grup menurun.

- e. *The Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Political Conditions.*
Government policies that affect economic and monetary, uncondusive social and political conditions will result in declining investment and development. This condition can make current projects and upcoming projects to be postponed. The nature of this risk is systematic which can negatively influence all related variables, thus makes the performance of the Group would decline.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Manajemen Permodalan

Tujuan dari Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Grup menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Grup memonitor dengan dasar rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Strategi Grup adalah mempertahankan rasio utang terhadap modal pada batas bawah dari kisaran 2,00 sampai dengan 4,00. Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Manajemen Permodalan			Capital Management
Total Liabilitas	3,301,697,011,036	3,968,742,832,721	Total Liability
Dikurangi: Kas dan Setara Kas	435,623,369,346	245,873,000,967	Less: Cash and Cash Equivalent
Utang Neto	2,866,073,641,690	3,722,869,831,754	Net Debt
Total Ekuitas	1,598,302,005,576	1,518,074,900,606	Total Equity
Rasio Utang terhadap Modal	1.79	2.45	Debt to Equity Ratio

41. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Berikut ini adalah entitas berelasi dengan Pemerintah yang merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah:

41. Nature and Transactions of Related Parties

The followings are the Government-related entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government:

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Nature of Transaction
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / Placement of Current Account, Bank and Non Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / Placement of Current Account, Bank and Non Bank Loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / Placement of Current Account, Bank and Non Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Giro dan Penempatan Deposito / Placement of Current Account and Placement of deposits
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	Dikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / Controlled by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro / Placement of Current Account
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Giro / Placement of Current Account
Perum LPPNPI (Airnav Indonesia)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
Perum Perumnas	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Bukit Asam Tbk	Dikendalikan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) / Controlled by PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Hakaaston	Dikendalikan oleh PT Utama Karya (Persero) / Controlled by PT Utama Karya (Persero)	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Utama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Utama Karya Infrastruktur	Dikendalikan oleh PT Utama Karya (Persero) / Controlled by PT Utama Karya (Persero)	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk / Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Investasi Jangka Panjang Lainnya / Other Long Term Investment
PT Krakatau Engineering & Construction	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Nature of Transaction
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) / <i>Controlled by PT Pertamina (Persero)</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pertamina Geothermal Energy	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) / <i>Controlled by PT Pertamina (Persero)</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) / <i>Controlled by PT Pertamina (Persero)</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Entitas Induk / <i>Owners of The Parent</i>
PT PPA Finance	Dikendalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) / <i>Controlled by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)</i>	Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa / <i>Right of Use Assets and Lease Liabilities</i>
PT PTPN IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) / <i>Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Semen Padang	Dikendalikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk / <i>Controlled by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Survei Udara Panas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Waskita Beton Tbk	Dikendalikan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Yodya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / <i>Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Nature of Transaction
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya - PPA	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya - Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan - Hutama Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
PT PLN (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
PT Pertamina Bina Medika IHC	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Ventura Bersama Wijaya Karya - Nindya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Ventura Bersama Adhi - Nindya - Basuki	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>
Ventura Bersama Nindya – PT Surya Mataram Sakti	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>/ Investment in Associates and Joint Ventures</i>	Investasi pada Ventura Bersama / <i>Investment in Joint Ventures</i>

**42. Standar dan Interpretasi Telah diterbitkan Tapi
Belum diterapkan**

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

**Amandemen atas standar yang berlaku efektif
untuk periode yang dimulai pada atau setelah
1 April 2021 yaitu:**

- PSAK Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021;

**Amandemen atas standar yang berlaku efektif
untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1
Januari 2022, dengan penerapan dini
diperkenankan yaitu:**

- PSAK Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;

**42. Standards and Interpretations Issued Note Yet
Adopted**

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2021.

**Amendments to the standard that are effective for
periods beginning on or after April 1, 2021 are:**

- PSAK 73: Leases regarding Covid-19-related Rent Concessions Beyond June 30, 2021;

**Amendment to standards which effective for
periods beginning on or after January 1, 2022,
with early adoption is permitted, are as follows:**

- Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;
- Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang; dan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

- *Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;*
- *PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;*
- *PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and*
- *PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.*

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendment PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current; and*
- *Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates.*
- *Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.*

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 74: Insurance Contract.*
- *Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Implementation of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information.*

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

43. Perikatan dan Perjanjian

Informasi penting yang berkaitan dengan kontrak dan perjanjian sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

43. Commitments and Agreements

Important information relating to the contracts and agreements until December 31, 2021 are as follows :

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

a. Perusahaan

a. The Company

No.	Nama Proyek/ Name of Projects	Nilai Kontrak/ Contract Value (Rp)	Pemberi Kerja/ Owner	Masa Pelaksanaan/ Mulai Started	Contract Period Selesai Ended
1	Proyek Pembangunan Bendungan Pamukulu Pamukulu Dam Project	811,425,631,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat The Ministry of Public Work and Housing	15 November 2017 November 15, 2017	20 Desember 2022 December 20, 2022
2	Lanjutan Pembangunan Bendungan Temef Di Kab. Timor Tengah Selatan Paket 3 (Myc) Continuation of Construction of the Temef Dam in Kab. South Central Timor Package 3 (Myc)	666,997,938,183	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat The Ministry of Public Work and Housing	05 November 2021 November 05, 2021	28 Desember 2023 December 28, 2023
3	Proyek Pembangunan Bendungan Karaloe Tahap II Karaloe Package II Dam Project	657,864,000,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat The Ministry of Public Work and Housing	25 Mei 2018 May 25, 2018	9 Desember 2021 December 9, 2021
4	Proyek Pembangunan Bendungan Tigadihaji Tigadihaji Dam Project	629,946,666,667	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat The Ministry of Public Work and Housing	16 Oktober 2018 October 16, 2018	19 September 2024 September 19, 2024
5	Proyek Pengembangan Pipa CY-III (Lomanis - Rewulu) Design and Development CY- III Pipe (Lomanis - Rewulu) Project	616,951,979,799	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)	18 Juni 2019 June 18, 2019	18 Maret 2022 March 18, 2022
6	Pembangunan Indoor Multifunction Stadium Dalam Rangka Kejuaraan Dunia Bola Basket Tahun 2023 / Construction of an Indoor Multifunction Stadium for the 2023 World Basketball Championship	581,055,495,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / The Ministry of Public Work and Housing	14 Desember 2021 / December 14, 2021	08 Juni 2023/ June 08, 2023
7	Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 Bekasi River Flood Control Project Package 1	537,876,128,036	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat The Ministry of Public Work and Housing	21 Januari 2021 January 21, 2021	31 Desember 2023 December 31, 2023
8	Proyek Pembangunan Bendungan Tugu Trenggalek Tugu Trenggalek Dam Project	518,400,000,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat The Ministry of Public Work and Housing	27 Desember 2018 December 27, 2018	13 Desember 2021 December 13, 2021
9	Proyek Pembangunan Bendungan Temef Temef Dam Project	506,145,751,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat The Ministry of Public Work and Housing	22 Desember 2017 December 22, 2017	13 April 2022 April 13, 2022
10	Proyek Pembangunan Bendungan Bringin Sila Bringin Sila Dam Project	446,773,533,800	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat The Ministry of Public Work and Housing	31 Desember 2018 December 31, 2018	07 Juni 2023 June 07, 2023

b. PT NTU

b. PT NTU

Pada 18 Mei 2021, PT NTU melakukan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan, dan alih milik di Unit Produksi Kesugihan, Cilacap tertera dalam Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya dengan PT NTU No.690/17/47.03/20210001/DIR/NTU/KTR/-05/2021.

On May 18, 2021, PT NTU collaborated with Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya to collaborate on the building, operation and transfer of the Production Unit in Kesugihan, Cilacap as stated in the Cooperation Agreement between the Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya and PT NTU No.690/17/47.03/2020001/DIR/NTU/KTR/05/2021.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir dalam jangka waktu 15 tahun sejak tanggal operasi komersial, kecuali apabila diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.

This agreement is valid from the date of signing and ended in 15 years from the date of commercial operation, except if extended in accordance with the provisions of the Cooperation Agreement.

44. Perkara Hukum

44. Legal Cases

Perusahaan sedang menghadapi beberapa perkara hukum baik dalam proses mengajukan gugatan maupun yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan atau kasasi. Perusahaan meyakini bahwa keputusan pengadilan atau kasasi dalam kasus-kasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perusahaan.

The Company is facing several legal cases both in the process of filing a lawsuit and currently waiting for a court verdict or cassation. The Company believes that the decision of the Court or Cassation in such cases will not bring material impacts on the financial condition and performance of the Company.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 perkara hukum yang sedang berjalan antara lain:

Up to December 31, 2021, legal cases in progress, are as follows:

1. Piutang kepada PT Buana Risma (PT BR) adalah sisa tagihan proyek kerjasama pembangunan perumahan Malaka Asri. PT BR sebagai konsultan manajemen proyek pembangunan serta membuat program pemasaran, akan tetapi PT BR telah

1. Accounts receivable to PT Buana Risma (PT BR) is remaining billing of Malacca Asri residential construction cooperation project. PT BR as the projects construction management consultant as well as the creator of marketing program has

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

melampaui batas kewenangannya dengan melakukan penjualan atas rumah dan menerima pembayaran langsung dari pembeli. Namun hasilnya tidak disetorkan kepada Perusahaan.

Berdasarkan kesepakatan PT BR mengakui memiliki utang kepada Perusahaan sebesar Rp3.082.631.548 termasuk bunga dan status penyelesaian tagihan saat ini adalah menunggu PT BR melakukan perhitungan kewajiban dan pelepasan hak tanggungan untuk aset yang akan diserahkan kepada Perusahaan. Perkara ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun).

Pada tanggal 13 November 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang dalam perkara tersebut Grup sebagai Pihak Penggugat dan PT BR sebagai Tergugat. Putusan tersebut menyatakan gugatan Grup tidak diterima. Sehingga Grup mengajukan Banding.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2015 terbit putusan Pengadilan Tinggi yang isinya menerima permohonan banding Grup dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga menyatakan PT BR telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap Grup dan menghukum PT BR untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.082.631.548.

Sesuai surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.W10.U3/1656/HK.02/8/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Permohonan Keterangan Inkracht, disampaikan bahwa dalam perkara perdata antara Grup dan PT BR jika sampai dengan batas waktu yg ditentukan oleh Undang-undang para pihak (Penggugat & Tergugat) tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan PN Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel *juncto* No.131/PDT/2015/PTDKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Karena tidak ada upaya hukum lagi dari PT BR, dan sebagai tindak lanjut dari putusan PN Jakarta Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel *juncto* Putusan PT No.131/PDT/2015/PTDKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Grup mengajukan permohonan eksekusi putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, Tanggal 23 Agustus 2017 telah diterbitkan Surat Penetapan Eksekusi Putusan dari Ketua Pengadilan Negeri. Melalui Penetapan Eksekusi Tersebut, PT BR dipanggil sebanyak 2 kali oleh PN Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Oktober Grup mengajukan permohonan sita dan eksekusi putusan perkara No.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

exceeded its limit by selling home and receive direct payment from the buyer. Meanwhile, the payment has not been received by the Company.

Based on the deal, PT BR admits that it has debt to the Company as Rp 3,082,632,548 including interest. The current status of the bill is waiting PT BR to calculate liabilities and mortgage waiver for assets which shall be submitted to the company. These matters are handled handled by the Young Attorney General Civil and TUN (Jamdatun).

On November 13, 2014 the District Court of South Jakarta has determined the verdict that contains Group accusation. The verdict stated that the Group lawsuit is not accepted. So that, Group decided to fill the appeal.

Then, on June 19, 2015 the Pengadilan Tinggi declared the verdict which stated that the Pengadilan Tinggi had received the appeal of Group and issued cancelation of the South Jakarta District Court Verdict. The Supreme Court also stated that PT BR had done a default that caused losses to Group and punished PT BR to pay compensation as much as Rp 3,082,631,548.

*Based on the letter from South Jakarta District Court No.W10.U3/1656/HK.02/8/2016 dated August 30, 2016 about Inkracht Certification Request, stated that the civil case between Group and PT BR up to the time limit specified by Law, the parties (Prosecutor & Defendant) would not filled a legal action, then the Sentence of South Jakarta District Court No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel *juncto* No.131/PDT/2015/PTDKI has a permanent legal course (*inkracht van gewisjde*).*

*Due to no further legal remedies from PT BR, and as a follow up to the South Jakarta DC decision No. 171/Pdt.G/2014PN.Jkt Sel *juncto* HC Decision No.131/PDT/2015/PTDKI has legal force still (*inkracht van gewisjde*), Group submitted an application for the execution of the verdict through the South Jakarta District Court. Then, on August 23, 2017, a Decision Letter on the Execution of Decisions has been issued from the Chair of the District Court. Through the Determination of Execution, PT BR was summoned twice by the South Jakarta DC. Then on October 10, Group submitted a petition for seizure and the execution of case decision No. 171/PDT.G/2014/PN.JKT*

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

171/PDT.G/2014/PN.JKT SEL juncto Putusan PT
No.131/PDT/2015/PTDKI.

Pada tanggal 11 Juli 2018, adanya surat dari PN Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, yang menjelaskan tindaklanjut Pengajuan Bukti Pendaftaran Blokir Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HDB) No.555 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017.

Pada tanggal 30 Juli 2018, adanya Surat dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat kepada Ketua PN Jakarta Selatan perihal menindaklanjuti pengajuan bukti pendaftaran blokir terhadap Sertipikat HGB No.555 dan Sertipikat SHM No.1452, terhadap Penetapan No.42/Eks.Pdt/2017. Tanggal 21 Januari 2019 terbit pelaksanaan sita eksekusi.

Pada tanggal 22 April 2019 perusahaan telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Pada tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi oleh KJPP Dolly dan tim Lawyer untuk melakukan appraisal terhadap asetnya BR dalam rangka penentuan harga limit dari Pengadilan Negeri. pada tanggal 11 September 2019 telah dilakukan survey terhadap aset BR.

Pada tanggal 15 November 2019, KJPP Dolli Siregar & Rekan telah menyerahkan laporan final appraisal atas tanah kosong seluas 130 m2 dan bangunan seluas 39m2 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. nilai pasar sebesar Rp 542.900.000
- b. nilai likuidasi sebesar Rp 434.300.000

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan telah menyerahkan hasil laporan penilaian appraisal atas tanah kosong dari KJPP Dolly & Siregar kepada kuasa hukum untuk selanjutnya diserahkan ke PN Bandung.

Pada tanggal 6 Februari 2020 telah diajukan permohonan lelang eksekusi kepada Kantor Lelang Kabupaten Bandung. Dan Proses Lelang di jadwalkan pada 22 Juli 2020.

Pada tanggal 22 Juli 2020 telah di adakan lelang eksekusi namun belum ada peminatnya.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan menunggu proses lelang.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

SEL juncto HC Decision No.131/PDT/2015/
PTDKI.

On July 11, 2018, there was a letter from the South Jakarta District Court to the Head of the West Bandung Regency Land Office, that explained following upon the Submission of Proof of Block Registration of Building Use Rights Certificate (HDB) No.555 and Certificate of Ownership (SHM) No.1452, against Stipulation Number: 42/Eks.Pdt/2017.

On July 30, 2018, there was a letter from the Ministry of Agrarian & Spatial Planning / BPN West Bandung Regency Land Office of West Java Province to the Chairperson of the South Jakarta District Court regarding the follow up on the submission of blocking registration evidence to the Certificate of HGB No. 555 and Certificate of SHM No.1452, for Determination of No.42/Eks.Pdt/2017. January 21, 2019 the execution of seizure execution.

On April 22, 2019 the company has submitted an application for Execution Auction to the District Court.

On August 7, 2019 a location survey was conducted by KJPP Dolly and Tim Lawyer to conduct an appraisal of BR assets in the context of determining the price limit of the District Court. And on September 11, 2019, a survey of assets of BR.

On November 15, 2019, the KJPP Dolli Siregar & Partners has submitted a final appraisal report on vacant land measuring 130 m² and building area of 39 m² with the following conclusion :

- a. market value of Rp 542,900,000
- b. liquidation value of Rp 434,300,000

On December 6, 2019, the Company has submitted the results of the assessment report on the appraisal of land left blank KJPP Dolly & Siregar to legal counsel to then submitted to the Bandung District Court.

On February 6, 2020, a bid for execution was submitted to the Bandung Regency Auction Office. And the Auction Process is scheduled for July 22, 2020.

On July 22, 2020, an execution auction was held but there was no bid yet.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case was still on going and waiting for the auction process.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Proyek Aston adalah proyek paket pekerjaan struktur dan *general finishing* Aston Mangga Dua Jakarta dengan PT Mandiri Karya Cipta Indah (PT MKCI) sebagai pemilik pekerjaan. Nilai proyek sebesar Rp52.000.000.000, proyek berakhir karena PT MKCI selalu menghindari untuk penetapan progress fisik pekerjaan termasuk menunda pembayaran sebagai akibat belum adanya kesepakatan progress. Tagihan yang diajukan sebesar Rp13.678.000.000 termasuk kenaikan harga (eskalasi) dan status penyelesaian tagihan pada 2013 adalah menunjuk Tim Jamdatun sebagai kuasa direksi perusahaan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dilakukan registrasi perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Grup tidak dapat diterima. Grup mengajukan upaya banding dan pada tanggal 23 April 2013 telah menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 20 Mei 2014 Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Grup mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan dari Kasasi tersebut antara lain menolak permohonan Kasasi Grup.

Pada tanggal 2 Oktober 2017 sesuai surat Direksi No.1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 perihal Permohonan Pendapat Hukum, Grup bersurat kepada Jamdatun meminta pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet pada proyek Aston Mangga Dua. Sampai saat ini Jamdatun masih mengkaji pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet tersebut.

Tanggal 3 Oktober 2019 telah dilakukan ekspos terhadap *Legal Opinion* (LO) untuk Perusahaan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Pada tanggal 29 Oktober 2019, melalui surat No. B-569/G/Gph.1/10/2019, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Pendapat Hukum (LO) atas permohonan pendapat hukum Perusahaan pada perkara perdata, *Lawyer Opinion* tersebut pada intinya menyarankan untuk mengajukan kembali gugatan terhadap PT MKCI.

Pada tanggal 22 November 2019, LO (*Legal Opinion*) dari Retainer telah diterima Perusahaan, yang menyarankan perusahaan harus mengajukan gugatan ulang.

2. Aston Project is a structural work package project and general finishing for Aston Mangga Dua Jakarta with PT Mandiri Cipta Karya (PT MKC) as the owner of the project. The project which values for Rp52,000,000,000 had to be ended due to PT MKC always evading the establishment of physical work progress, included delaying payments as the result of the lack of progress agreement. The proposed bill of Rp13,678,000,000 including price increases (escalation) and the status of the settlement Bill in 2013 is pointing to the Jamdatun Team as the power of the directors of the company to file a lawsuit through the Pengadilan Negeri Central Jakarta and registration have been made through the Registrar of the Pengadilan Negeri in Central Jakarta. Then the Pengadilan Negeri Central Jakarta issued a ruling stating that the Group lawsuit was not acceptable. Group submitted an appeal attempt and on April 23, 2013, delivered a memory of the appeal to the High Court through the District Court of Central Jakarta. On May 20, 2014 the Central Jakarta High Court issued a ruling stating that the District Court's verdict was upheld. The Group submitted a request for cassation at the Supreme Court. The decision of the Cassation, among others, rejected the application for the Cassation of the Group.

On October 2, 2017 according to the Directors' letter No.1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 regarding the Request for Legal Opinion, the Group corresponded to Jamdatun asking for legal considerations for the elimination of bad debts in the Aston Mangga Dua project. Until now, Jamdatun is still reviewing legal considerations for the elimination of bad debts.

On October 3, 2019, Legal Opinion was exposed for the Company at the Deputy Attorney General for Civil and Administrative Affairs (Jamdatun).

On October 29, 2019, through letter No.B-569/G/Gph.1/10/2019, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia issued a Legal Opinion (LO) on the request for a legal opinion of the Company on civil cases, the Opinion Lawyer in essence advised to resubmit the lawsuit against PT MKCI.

On November 22, 2019, the Legal Opinion (LO) of the retainer has been received by the Company, which the advice the company re-siling the law suit.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 19 Juni 2020, berdasarkan hasil rapat dengan BOD dan NSR, bagian hukum Perusahaan diminta untuk membuat rekap progres dan pembayaran yang telah direalisasikan dan tambahan dokumen terkait guna analisa lebih lanjut oleh NSR terkait posisi hukum Nindya dalam kasus proyek Aston ini

Pada tanggal 14 September 2020 NSR memberikan kajian antara lain Nindya dapat mengupayakan penyelesaian secara negoisasi dengan MKCI guna melakukan set off atau Nindya dapat mempertimbangkan untuk melakukan penghapusbukuan piutang (*write off*) proyek Aston Mangga Dua.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses pertimbangan manajemen.

3. Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan proyek tahun Anggaran 2004-2011. Nilai total kontrak proyek sebesar Rp771.599.297.800 dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai pemilik pekerjaan. Dalam mengerjakan proyek tersebut Perusahaan menjalin kerjasama operasi dengan PT Tuah Sejati, dan membentuk perjanjian kerjasama dengan nama Nindya-Sejati Kerja Sama Operasi (KSO).

Persentase nilai kepesertaan masing-masing perusahaan tersebut adalah Perusahaan sebesar 55% dan PT Tuah Sejati 45%. Laba yang dibukukan dari pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Lanjutan porsi Perusahaan yaitu sebesar Rp44.681.053.100.

Pada tanggal 29 Oktober 2018, pihak berwenang telah melakukan penyitaan dokumen berupa prosedur pemasaran, operasi, dan satuan pengawas internal Perusahaan. Sampai 31 Desember 2021, perkara ini masih dalam proses hukum.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah mencatat penurunan nilai atas dana yang dibatasi penggunaannya.

4. Piutang kepada PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) adalah sisa tagihan kerjasama proyek pada paket pekerjaan struktur dan arsitektur pembangunan Koja Trade Mall Di Jakarta Utara. MSC tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 90,77 % dan pekerjaan tambah / kurang kepada Perusahaan.

On June 19, 2020, based on the results of a meeting with BOD and NSR, the Company's legal department was asked to make a recap of progress and payment that had been realized and additional related documents for further analysis by NSR regarding the Company's legal position in the Aston project case.

On September 14, 2020, NSR provided a study, among others, that Nindya could seek negotiations with MKCI to set off or Nindya could consider write-off the receivable of Aston Mangga Dua's Project receivables.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on management's considerations.

3. Sabang Loading Dock Construction Project in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is a project for 2004-2011 fiscal year. Total project's value amounting to Rp771,599,297,800 with Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) as the project owner. In the project implementation, The Company established joint operations with PT Tuah Sejati, and formed a joint venture as Nindya-Sejati Joint Operation (JO).

The share value percentage for each Company is amounted to 55% for the Company and 45% for PT Tuah Sejati. Operating income that has been accounted from the Sabang Loading Dock Construction Projects in the portion of the Company was amounted to Rp44,681,053,100.

On October 29, 2018, the authorities have confiscated documents that consists of marketing operations, and the Company's internal supervisory unit procedures. Until December 31, 2021, this case still in the legal process.

Until December 31, 2021, the Company has recognized the allowances for impairment losses of restricted fund.

4. Receivables from PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) are the remaining project collaboration debts, in the Koja Trade Mall construction structure and architecture package in North Jakarta. MSC did not pay 90.77% for the work performed and addition/reductions of work to the Company.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perusahaan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan isi putusan mengabulkan gugatan MSC untuk sebagian. Perusahaan mengajukan upaya banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan isi putusan Menyatakan MSC telah wanprestasi kepada Perusahaan; Menghukum MSC untuk membayar kerugian kepada Perusahaan seluruhnya sebesar Rp5.226.198.142. Putusan kasasi telah terbit, Pada tanggal 24 Oktober 2018 PT MSC minta waktu 2 minggu untuk menyiapkan usaha penyelesaian kewajiban MSC kepada Perusahaan.

Pada tanggal 5 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi aset MSC oleh KJPP Dolly dan Tim Kuasa Hukum.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 telah keluar hasil appraisal dari KJPP Dolly Siregar & Rekan atas aset yang terletak di Jalan Kramat Jaya Koja, Jakarta Utara.

Pada tanggal 20 Januari 2020, Perusahaan bersurat ke Toni Hendarto dan rekan perihal Permohonan Pendapat hukum terkait tindak lanjut dan upaya hukum yang dilakukan Perusahaan dengan dikeluarkannya penetapan PN Jakarta Utara. Dan Nindya telah bersurat kepada Kuasa Hukum Perusahaan untuk pengajuan PKPU.

Pada tanggal 23 Juni 2020 bagian hukum menyampaikan Kajian *Pro Cons* kasus koja untuk penanganan upaya hukum selanjutnya.

Pada tanggal 22 September 2021, Pengacara Toni Hendarto & Rekan menyampaikan alternatif penyelesaian hukum melalui pengajuan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada PT MSC.

Pada tanggal 30 Desember 2021, Perusahaan melalui kuasa hukum Toni Hendarto & Rekan menyampaikan pengajuan PKPU terhadap PT MSC.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses kajian lanjutan.

5. Perusahaan telah menyelesaikan Prestasi sebesar 94,76% kepada PT Fatimah Azzahra (FA) sehingga PT FA berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada Perusahaan sebesar Rp17.457.355.385. Namun faktanya PT FA baru menyelesaikan kewajiban kepada Perusahaan sebesar Rp13.947.733.987.

The Company submitted a lawsuit through the South Jakarta District Court, that contains the decision Granting for the MSC claim for part. The Company submitted an appeal effort through the DKI Jakarta High Court, that contents of the decision stating that MSC had defaulted to The Company; Sentencing MSC to pay losses to the Company for a total of Rp5,226,198,142. The decision on cassation has been issued. On October 24, 2018, PT MSC requested 2 weeks to prepare an effort to settle MSC's obligations to the Company.

On August 5, 2019, MSC's asset location survey was conducted by KJPP Dolly and the Legal Counsel Team.

On August 20, 2019, an appraisal result was issued by KJPP Dolly Siregar & Partners for assets located at Jalan Kramat Jaya Koja, North Jakarta.

On January 20, 2020, the Company corresponded to Toni Hendarto and partners regarding the petition for legal opinions related to the follow-up and legal remedies to be carried out by the Company with the issuance of the North Jakarta District Court. And Nindya has written to the Attorney General for filing PKPU.

On June 23, 2020, the Company's legal department submitted a Pro Cons Study on the Koja case for further handling of legal remedies.

On September 22, 2021, Lawyer Toni Hendarto & Partners submitted an alternative legal settlement through a PKPU submission to the Central Jakarta Commercial Court to PT MSC.

On December 30, 2021, the Company through its attorney Toni Hendarto & Partners submitted a PKPU application against PT MSC.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment process.

5. The Company has completed the working progress of 94.76% to PT Fatimah (FA) so therefore PT FA is obliged to pay to the Company Rp17,457,355,385 however PT FA has not fulfilled its liabilities to the Company amounted to Rp13,947,733,987.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Putusan BANI no.861/VI/ARB-BANI/2016, tanggal 27 Maret 2017 yang memutuskan bahwa kewajiban PT FA kepada Perusahaan adalah sebesar Rp3.566.552.621.

Pada tanggal 29 Oktober 2019 Kejati Riau menyampaikan surat ke Perusahaan, perihal penyampaian proposal rencana pembayaran dari PT FA, yg pada intinya PT FA bersedia membayar sisa pembayaran dalam bentuk penyerahan sebuah aset apartemen di daerah dago, bandung dan terhadap kekurangan sisa pembayaran akan dilakukan dengan cara mencicil dalam rentang waktu 3 tahun terhitung sejak januari 2020 sampai desember 2022.

Pada tanggal 8 Juni 2020 Perusahaan bersurat setuju akan mengambil unit dan *furnished* apartemen yang diajukan PT FA yang akan dikompensasikan sebagai bagian penyelesaian kewajiban PT FA kepada Perusahaan.

Pada tanggal 12 September 2020 Perusahaan dan FA menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Nomor 1 di hadapan Notaris Lili Lastari, S.H., M.Kn. di Pekanbaru, kemudian FA menyerahkan 36 Bank Giro sebagai pelaksanaan dari Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban.

Tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan penandatanganan AJB dan Serah Terima Unit Apartemen di Dago Suites 2 Bandung untuk penyelesaian Kewajiban FA kepada Perusahaan.

Sisa kewajiban sebesar Rp2.057.452.621 akan di bayar secara bertahap selama 36 bulan terhitung sejak Januari 2021 sd Desember 2023. Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp685.817.544.

6. PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS) tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan Pembangunan Landasan Galangan DPS-Lamongan yang telah diselesaikan oleh Perusahaan.

Perusahaan bersurat ke DPS dengan nomor surat 112/NK-WIL.IV/KEU/04/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Percepatan Penyelesaian Outstanding DPS.

Perusahaan bersurat ke DPS sesuai surat No. 304/NK-WIL.IV/KEU/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian *Outstanding*.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

BANI Decision no.861/VI/ARB-BANI/2016, dated March 27, 2017 has decided that the obligation PT FA to the Company is Rp3,566,552,621.

On October 29, 2019, Riau Attorney deliver a letter to the Company, regarding submission of proposals payment plan of PT FA, who in essence PT FA are willing to pay the remainder of the payment in the form of delivery of an asset apartments in Dago, Bandung and the remaining payment will be made by installments within the period of 3 years commencing from January 2020 until December 2022.

On June 8, 2020, the Company consented to take the apartment units and furnishings as proposed by PT FA which would be compensated as part of the settlement of PT FA's obligations to the Company.

On September 12, 2020, the Company and FA signed the Debt Settlement Agreement Act No. 1 before Notary Lili Lastari, S.H., M.Kn. In Pekanbaru, the FA then handed over 36 Bank Giro as an implementation of the Debt Settlement Agreement Act

On December 17, 2020, AJB was signed and the Apartment Unit has been handed over at Dago Suites 2 Bandung for the settlement of FA's Obligations to the Company.

The remaining obligation amounting to Rp2,057,452,621 will be paid in installments over 36 months from January 2021 to December 2023. As of December 31, 2021, the Company has received a payment of Rp685,817,544.

6. *PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS) did not make payments for the performance of the DPS-Lamongan Shipyard Construction work which was completed by the Company.*

The Company sent letter to DPS with the number of letter is 112 /NK-WIL.IV / KEU / 04/2016 dated 13 April 2016 regarding the Acceleration of DPS Outstanding Settlement.

The Company sent letter to DPS with the No. 304/NK-WIL.IV / KEU / 09/2016 on 14 September 2016 concerning the follow-up to Accelerate Completion of Outstanding.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

DPS bersurat ke Perusahaan No.16/3501-12/DS/IV/N-Awn tanggal 30 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian *Outstanding*. Disampaikan bahwa berkaitan dengan nilai *outstanding* DPS sebesar Rp4.730.048.000, akan dibahas dalam pertemuan pada minggu ke 2 bulan Januari 2017 dengan agenda acara Pembahasan Penyelesaian para pihak dalam bentuk sinergi BUMN seperti melakukan KSO, pengerjaan proyek bersama ataupun dengan cara lainnya untuk penyelesaiannya

Adanya pertemuan dari pihak Perusahaan dengan DPS pada tanggal 28 Mei 2018, dengan kesepakatan DPS memutuskan untuk melepaskan Aset Tanah dan Bangunannya yang berlokasi di Jl. Irian Barat No. 19. Surabaya

Pada tanggal 14 Agustus 2018, Direktur Utama DPS bersurat kepada Menteri BUMN RI. Sesuai surat No.18/1958-8/DS/I/M-1 perihal Permohonan Persetujuan Ijin Pelepasan & Optimalisasi Aset Perusahaan.

Pada tanggal 23 September 2019 Perusahaan telah bersurat kembali untuk penagihan kepada DPS sesuai surat No.1689/DKS/SEKPER/09/2019 perihal: "Penyelesaian *Outstanding* PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero).

Perusahaan bersurat ke Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN tanggal 11 Maret 2020 yang intinya setuju dengan usulan DPS pembayaran secara bertahap. Perusahaan telah menyerahkan konsep perjanjian penyelesaian kewajiban antara Perusahaan dan DPS kepada DPS tanggal 30 Maret 2020. Tanggal 5 Agustus 2020 telah Perusahaan kirimkan kembali koreksi konsep perjanjian penyelesaian kewajiban DPS. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan telah menerima Perjanjian Penyelesaian Kewajiban yang telah di tanda tangani DPS.

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menyampaikan surat penyelesaian kewajiban kepada DPS untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Penyelesaian Kewajiban.

Tanggal 29 Maret 2021, Perusahaan telah menyampaikan surat Perihal Penyelesaian Kewajiban kepada DPS untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Penyelesaian Kewajiban.

Pada tanggal 13 Oktober 2021 Perusahaan menerima surat putusan PKPU dari DPS.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

DPS sent a letter to the Company No.16/3501-12/DS/IV/N-Awn Dec 30, 2016 regarding Follow-Up to Accelerate Completion of Outstanding. Submitted that the outstanding amount related to DPS Rp4,730,048,000 will be discussed during the week to 2 months in January 2017 with the agenda discussion of the Settlement of the parties in the form of synergy as do KSO, jointly working on projects or otherwise for its completion.

A meeting was held between the Company with DPS on May 28, 2018, with the agreement that DPS has decided to release the Assets Land and building located at Jl. Irian Barat No. 19. Surabaya

On August 14, 2018, President Director of DPS sent a letter to the Minister of State Owned Enterprises RI. Corresponding letter No.18/1958-8/DS/I/M-1 regarding the Request Approval Waiver & Optimization Company Assets.

On September 23, 2019 the Company has resent the letter for the billing to the DPS in accordance with the letter No.1689/DKS/SEKPER/09/2019 regarding: "Completion of Outstanding PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero).

The Company corresponded to the Deputy for Legal Affairs and Debt of the Ministry of BUMN on March 11, 2020, which basically agreed to the DPS proposal in stages. The Company has submitted the concept of the obligation settlement agreement between the Company and DPS to DPS on March 30, 2020. On August 5, 2020, the Company sent back the corrections to the draft DPS debt settlement agreement. On October 9, 2020, the Company has received the Debt Settlement Agreement that has been signed by DPS.

On December 16, 2020, the Company submitted a liability settlement letter to DPS to make installment payments as stated in the Obligation Settlement Agreement.

On March 29, 2021, the Company has submitted a liability settlement letter to DPS requesting to make installment payments as stated in the Liability Settlement Agreement.

On October 13, 2021, the Company received a PKPU decision letter from DPS.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada Tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan menghadiri rapat penyampaian usulan Perdamaian DPS kepada para Kreditor.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam pengkajian perjanjian penyelesaian kewajiban.

7. Perusahaan dan PT Lampiri Djaya Abadi telah membentuk dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi No. 334/NKDI/TEKNIK/07/2013 tertanggal 2 Juli 2013 (NINDYA-LAMPIRI,JO) untuk Proyek Aceh Reconstruction Project (IP-545) – Road Sub Project Package No. I: Section Sp. Kraft-Batas Aceh Tengah dengan porsi kepesertaan Perusahaan: 51% dan PT Lampiri Djaya Abadi : 49%.

Pada tanggal 23 Agustus 2017, Pengacara Perusahaan mengajukan permohonan kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Pada tanggal 13 Juli 2018 dibacakan putusan BANI, antara lain sebagai berikut :

- a. Lampiri dinyatakan telah wan prestasi.
- b. Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan dan membayar hutang sisa pencairan/pinjaman dana kepada Nindya sebesar Rp16.422.289.899.
- c. Lampiri d i perintahkan untuk mengembalikan biaya BANI kepada Perusahaan sebesar Rp279.531.000.

Pada tanggal 12 November 2019, permohonan eksekusi telah diajukan permohonan oleh kuasa hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada tanggal 10 Juni 2020, telah diterbitkan pemberitahuan Putusan PT DKI Jakarta, yang amarnya berbunyi "Menguatkan Putusan PN Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2019 No.79/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.

Pada tanggal 2 Februari 2021, pengacara Perusahaan menyampaikan bahwa telah menerima surat rilis pemberitahuan pernyataan terhadap kasasi terhadap Perkara No.20/PDT/2020/PT DKI Jo. 79/Pdt.G/2019/PN.Jak.Tim.

Pada tanggal 16 Maret 2021, pengacara Perusahaan menyampaikan kontrak memori Kasasi atas pengajuan permohonan Kasasi Lampiri.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih dalam tahap kasasi dan memori kasasi PT Lampiri Jaya Abadi sedang diproses dan belum ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung RI.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

On December 29, 2021, the Company attended a liability settlement proposal meeting to creditors.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment for the settlement agreement.

7. The Company and PT Lampiri Djaya Abadi has formed and signed a Joint Operation Agreement No. 334/NKDI/ENGINEERING/07/2013 dated July 2, 2013 (Nindya-Lampiri,JO) to project the Aceh Reconstruction Project (IP-545) - Road Sub Project Package No. I: Section Sp. Kraft-Border Central Aceh with a portion of the Company: 51% and PT Lampiri Djaya Abadi: 49%.

On August 23, 2017, Attorney of the Company apply to BANI (Indonesian National Board of Arbitration).

On July 13, 2018, BANI verdict was being read, among others are as as follows :

- a. Lampiri declared default.
- b. Lampiri ordered to restore and pay the residual debt disbursement / loan funds to Nindya of Rp16,422,289,899.
- c. Lampiri ordered to refund the cost of the descendants of the the Company for Rp279,531,000.

On November 12, 2019, the execution application has been filed by the Company's attorney to the West Jakarta District Court.

On June 10, 2020, PT DKI Jakarta's Decision, the verdict "Reconfirming the East Jakarta District Court Decision on May 21, 2019 No.79/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim has been issued.

On February 2, 2021, the Company's lawyer said that he had received release a letter of the cassation statement regarding Case No.20/PDT/2020/PT DKI Jo. 79 / Pdt.G / 2019 / PN.Jak.Tim.

On March 16, 2021, the Company's lawyer has submitted a memorandum of cassation contract for the submission of the Lampiri Cassation application.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the case status is still on going in cassation and the cassation memorandum of PT Lampiri Jaya Abadi which being processed and no notification from the Supreme Court of the Republic of Indonesia yet.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. Dalam Pekerjaan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipanisasi transmisi serta distribusi primer, sekunder dan tersier berikut pekerjaan sipil untuk pendistribusian air bersih kota Bontang-Kaltim, dimana Perusahaan masih memiliki tagihan sebesar Rp2.600.000.000 kepada PT Altra Excis Investama tetapi hingga saat ini PT Altra masih belum merealisasikannya.

Pada tanggal 26 November 2019, Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M. & Rekan selaku Kuasa Hukum Perusahaan mengirimkan Surat No.7005.2611/TH.R/XI/2019 Perihal Somasi ke 1 (satu) kepada PT Altra.

Pada tanggal 26 Maret 2020, Kuasa hukum telah menyampaikan somasi kedua kepada Altra.

Pada tanggal 14 Mei 2020 Altra telah menyampaikan tanggapan somasi dari kuasa hukum Perusahaan, dimana isinya Altra akan melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp1.200.000.000 selama 5 tahun dan sisanya melalui kerjasama usaha.

Pengacara Toni Hendarto menyampaikan LO nya melalui surat No.2002.2209/TH.R/LO/IX/2021 tanggal 22 September 2021 Perihal Pendapat Hukum yang pada pokoknya Toni menyampaikan agar Nindya mengajukan gugatan melalui BANI atas permasalahan tersebut.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam pengkajian perjanjian penyelesaian kewajiban.

9. Pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Siding/Seluas – Batas, Kec. Sekayam/Entikong, (MYC), PT Jayasinga Muda telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati, oleh karena itu Perusahaan bermaksud mencairkan Bank Garansi yang telah di terbitkan oleh PT BPD Kalimantan Barat senilai Rp909.587.452, namun sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, PT BPD Kalimantan Barat tidak melakukan kewajibannya untuk mencairkan Bank Garansi yang telah diterbitkannya.

Pada tanggal 18 Juni 2020 diadakan sidang dengan agenda pembacaan gugatan dan penyerahan jawaban dari PT BPD kepada PT Jayasinga Muda.

Pada tanggal 27 Juli 2020 diadakan sidang dengan agenda pembuktian Tergugat I dan pemeriksaan saksi penggugat, dalam acara tersebut Penggugat mengajukan 1 saksi, dan mengajukan permohonan kepada majelis untuk dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi fakta lagi.

8. On Procurement and Installation of primary, secondary and tertiary transmission and distribution pipelines along with civil works for the distribution of clean water in the city of Bontang-East Kalimantan projects, where The Company still has a receivable of Rp2,600,000,000 to PT Altra Excis Investama but no payment has been realized by PT Altra.

On November 26, 2019, Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M. & Partners as Legal Counsel of the Company sent Letter No.7005.2611/TH.R/XI/2019 regarding the 1st (one) Somasi to PT Altra.

On March 26, 2020, the attorney has delivered the second summons to Altra.

On May 14, 2020, PT Altra has submitted a summons response from the Company's attorney, wherein Altra will make a payment in the amount of Rp1,200,000,000 billion gradually over 5 years and the rest through cooperation.

Lawyer Toni Hendarto submitted his LO through letter No.2002.2209/TH.R/LO/IX/2021 dated September 22, 2021 Regarding Legal Opinions, basically Toni conveyed that Nindya should file a lawsuit through BANI on the matter.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the case status still on going and still on assesment for the settlement agreement.

9. In the Siding/Seluas Boundary Road Construction Work Project - Kec. Sekayam/Entikong (MYC). PT Jayasinga Muda has defaulted by not completing the work in accordance with the agreed time period, therefore the Company intends to withdraw the Bank Guarantee which has been issued by PT BPD Kalimantan Barat worth Rp909,587,452, but until the issuance date of this consolidated financial statement, PT BPD Kalimantan Barat has not fulfilled its obligation to withdraw the Bank Guarantee that has already issued.

On June 18, 2020, a hearing was held with the agenda of the lawsuit reading and answers submission from PT BPD to PT Jayasinga Muda.

On July 27, 2020, the trial session with the agenda of proving Defendant I and examination of plaintiff's witnesses, in that event the Plaintiff filed 1 lawsuit, and submitted an application to the panel to be given the opportunity to present another witness.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 23 September 2020, Majelis hakim membacakan Putusan Perkara No.7/Pdt.G/2020/PNStg yang pada pokoknya amarnya adalah menyatakan gugatan tidak diterima.

On September 23, 2020, the panel of judges read out the Decision on Case No.7/Pdt.G/2020/PNStg which basically stated that the lawsuit was not accepted.

Pada tanggal 7 Mei 2021, Perusahaan melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan memori Kasasi kepada MA.

On May 7, 2021, the Company through his attorney submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam pengkajian perjanjian penyelesaian kewajiban.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment for the settlement agreement.

45. Kepentingan Nonpengendali

45. Non-Controlling Interests

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:

Non-controlling interests in net assets of subsidiaries:

31 Desember / December 31, 2021					
Kepemilikan/ Ownership %	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Amount Beginning Balance Rp	Modal Saham Share Capital Rp	Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Comprehensive Income for the Year Rp	Nilai Tercatat Akhir Periode/ Carrying Amount Beginning Balance Rp	
PT Nindya Beton	49	10,948,770,780	--	(9,058,142,277)	1,890,628,503
PT Nindya Tirta Unggul	5	--	825,000,000	(53,526,008)	771,473,992
Saldo per 31 Desember 2021		10,948,770,780	825,000,000	(9,111,668,285)	2,662,102,495
31 Desember / December 31, 2020					
Kepemilikan/ Ownership %	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Amount Beginning Balance Rp	Penyesuaian/ Adjustment Rp	Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Comprehensive Income for the Year Rp	Nilai Tercatat Akhir Akhir Periode/ Carrying Amount Beginning Balance Rp	
PT Nindya Beton	49	26,803,364,750	(7,733,966,301)	(8,120,627,669)	10,948,770,780
Saldo per 31 Desember 2020		26,803,364,750	(7,733,966,301)	(8,120,627,669)	10,948,770,780

PT Nindya Beton
PT Nindya Tirta Unggul
Balance as of December 31, 2021

PT Nindya Beton
Balance as of December 31, 2020

46. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Bisnis

46. The Impact of COVID-19 on Business

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, telah terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, there has been a pandemic of the COVID-19 which has resulted in decreased activities in the economic sector.

Secara langsung dan tidak langsung, dampak ini tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan operasional Grup selama tahun 2022.

Directly and indirectly, this impact will certainly affect the Group's operational activities during 2022.

Adapun dampak dari pandemi COVID-19 sebagai berikut :

The impacts of the COVID-19 pandemic are as follows:

1. Adanya *refocusing* anggaran APBN terutama dari Kementerian PUPR dimana kebijakan pemerintah untuk fokus terhadap penyelesaian Pandemi sehingga anggaran

1. There is a *refocusing* of the APBN budget, especially from the Ministry of PUPR, where the government policy is to focus on solving the pandemic resulted in the budget for

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

untuk konstruksi dialihkan ke kesehatan. Adanya *refocusing* anggaran ini tidak merubah jangka waktu pelaksanaan proyek, sehingga penyelesaian proyek tetap harus selesai tepat waktu, dan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk performa Perusahaan.

2. Tagihan Bruto yang cukup besar pada akhir tahun 2021 dimana rencana anggaran yang terkena *refocusing* baru akan dicairkan pada Triwulan 1 dan 2 Tahun 2022. Pinjaman kepada pihak perbankan dan pendanaan lainnya juga mengalami peningkatan seiring dengan percepatan penyelesaian pekerjaan PSN dan juga proyek lainnya dimana tidak ada perubahan atau addendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan.
3. *Financing Debt* to EBITDA yang tinggi dikarenakan utang yang tinggi dibandingkan dengan *earning* Perusahaan yang terdampak COVID-19 dan adanya *refocusing* anggaran. Anggaran APBN Tahun 2021 untuk konstruksi yang dialokasikan untuk kesehatan juga mengakibatkan tertundanya tender pengadaan proyek yang semula sudah termatriks di tahun 2021 diundur ke triwulan 2 Tahun 2022 sehingga perolehan proyek atau kontrak pekerjaan Perusahaan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, manajemen melakukan langkah-langkah berikut untuk memitigasi risiko signifikan atas dampak pandemic COVID-19:

1. Melakukan efisiensi beban usaha (beban pemasaran, umum dan administrasi).
2. Grup mulai memasuki proyek investasi mengingat sebagian besar dana APBN untuk konstruksi dialihkan ke Kesehatan.
3. Mempercepat proses pengajuan restitusi PPN.
4. Memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran ke rekanan melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) menjadi 180 hari.
5. Mencari alternatif pendanaan selain dari perbankan untuk membiayai pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional (PSN) sehingga dapat selesai tepat waktu.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

construction is diverted to health. This budget refocusing does not change the project implementation period, so that project completion must still be completed on time, and for National Strategic Projects (PSN), the acceleration of work implementation is carried out as a form of Company's performance.

2. Gross Amount bill at the end of 2021 where the budget plan that is subject to refocusing will only be disbursed in Q1 and Q2 of 2022. Loans to banks and other funding have also increased along with the acceleration of completion of PSN work and other projects where there has been no change or addendum to the contract extension to the implementation time.
3. High Financing Debt to EBITDA due to high debt compared to Company's earnings affected by COVID-19 and the budget refocusing. The 2020 State Budget budget for construction allocated for health also resulted in delays in the project procurement tender which was originally matrix in 2021 being postponed to Q2 of 2021 resulted in the acquisition project or work contract for the Company has not performed.

Based on the analysis above, management is taking the following steps to mitigate the significant risk of the impact of the COVID-19 pandemic:

1. The efficiency of operating expenses (marketing, general and administrative expenses).
2. The Group has enter into investment projects considering that most of the APBN funds for construction have been diverted to Health.
3. Speed up the process of submitting VAT refunds.
4. Extending the due date for payments to suppliers via SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) to 180 days.
5. Looking for alternative funding apart from banks to finance the work of national strategic projects (PSN) in order for them to be completed on time.

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

47. Transaksi Non Kas

47. Non Cash Transactions

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi non kas:

Supplemental disclosures on non-cash investing activities:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	
Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas:			Non cash investing activities:
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	3,946,700,000	--	Addition of property, plant and equipment through account payables
Penambahan (pengurangan) nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar properti investasi	19,792,370,944	19,759,652,427	Addition (deduction) of value of assets in fair value of investments properties
Penambahan (pengurangan) nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar aset tetap	10,711,225,000	--	Addition (deduction) of value of assets through revaluation and increase in fair value of property, plant and equipment
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap	103,217,485,055	--	Addition of investments properties from property, plant and equipment reclassification

48. Reklasifikasi

48. Reclassification

Pinjaman Bank dan Non Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan Penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan rincian yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

Bank and Non-Bank Loans for the year ended December 31, 2020 have been reclassified according to the statement of financial position as of December 31, 2021 with details are as follows:

	2020		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Liabilitas Jangka Pendek			Current Liabilities
Utang Bank dan Non bank yang Jatuh Tempo dalam Setahun	--	175,650,843,214	Bank and Non Bank - Loans Long-Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Panjang			Non Current Liabilities
Utang Bank dan Non bank Pihak Berelasi	442,376,313,289	266,725,470,075	Bank and Non Bank - Loans Related Parties
Jumlah	442,376,313,289	442,376,313,289	Total

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**49. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari
Aktivitas Pendanaan**

Tabel dibawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/		Perubahan Transaksi NonKas/ Non-Cash Changes			
	1 Januari 2021 / January 1, 2021	Financing Cash Flows	Selisih Kurs/ Foreign Exchange	Nilai Wajar/ Fair Value	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
Utang Bank dan Non Bank	1,029,462,493,489	(438,481,124,110)	--	--	590,981,369,379	Bank and Non-Bank Loans
Liabilitas Sewa	162,418,015	(162,418,015)	--	--	--	Lease Liabilities

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/		Perubahan Transaksi NonKas/ Non-Cash Changes			
	1 Januari 2020 / January 1, 2020	Financing Cash Flows	Selisih Kurs/ Foreign Exchange	Nilai Wajar/ Fair Value	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Utang Bank dan Non Bank	445,000,000,000	584,462,493,489	--	--	1,029,462,493,489	Bank and Non-Bank Loans
Surat Utang Jangka Menengah	300,000,000,000	(300,000,000,000)	--	--	--	Medium Term Notes

50. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perubahan Struktur Pemegang Saham Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), telah dijelaskan bahwa terdapat pengalihan kembali saham PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PT Nindya Karya (Persero) sebanyak 5.890.500 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp84.882 atau sebesar Rp499.997.421.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan PT Danareksa (Persero), pada pasal 1 huruf a dijelaskan bahwa Pemerintah mengalihkan saham seri B dan seri A milik negara kepada PT Danareksa (Persero) masing-masing sebanyak 5.890.500 dan 59.499 atau sebesar Rp499.997.421.000 dan Rp59.499.000.000.

50. Events After Reporting Period

Change in Company's Shareholders Structures

Based on Government Regulation number 6 of 2022 dated January 24, 2022 regarding the Reduction of State Equity Participation of the Republic of Indonesia, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), it has been explained that there was a transfer of shares of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in PT Nindya Karya (Persero) series B 5,890,500 shares with a nominal value of Rp84,882 or Rp499,997,421,000 to the Government of Republic of Indonesia.

Based on the Government Regulation number 7 of 2022 dated January 24, 2022 regarding the addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the shares of the PT Danareksa (Persero), article 1 explains that the Government transfers 5,890,500 and 59,499 or Rp499,997,421,000 and Rp59,499,000,000 shares of series B and series A, respectively to PT Danareksa (Persero).

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED NOTES TO THE
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 And 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat perubahan struktur pemegang saham Perusahaan sebagai berikut:

Based on the information above, there has been changes in the Company's shareholder structure are as follows:

2022					
Nama / Name	Seri Saham / Shares' Series	Jumlah Saham / Total Shares	Nilai Nominal / Nominal Value	Jumlah / Amount	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership
PT Danareksa (Persero)	B	5,890,500	84,882	499,997,421,000	89.3655%
PT Danareksa (Persero)	C	59,499	1,000,000	59,499,000,000	10.6344%
Pemerintah Republik Indonesia	A	1	1,000,000	1,000,000	0.00018%
		<u>5,950,000</u>	<u>2,084,882</u>	<u>559,497,421,000</u>	<u>100%</u>

**51. Tanggung Jawab Manajemen atas
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 2 Februari 2022.

**51. The Management's Responsibility on the
Consolidated Financial Statements**

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statement. The consolidated financial statement were authorized for issue by the Directors on February 2, 2022.

PT NINDYA KARYA (Persero)

General Contractor-EPC-Investment

Kantor Pusat :

Head Office:

Jl. Letjen. MT. Haryono

kav. 22. Jakarta 13630

Online

Email: nindyakarya@nindyakarya.co.id

website: www.nindyakarya.com

Phone & Fax

Phone: +62 21 8093276

Fax: +62 21 8093105

